

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-2 *CALL FOR PAPERS* DAN PAMERAN HASIL
PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT KEMENRISTEKDIKTI RI**

**TATA KELOLA EKONOMI INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN DAN MENINGKATKAN MARTABAT BANGSA BERBASIS SUMBER
DAYA ENERGI DAN MEMPERKOKOH SINERGI PENELITIAN ANTAR
PEMERINTAH, INDUSTRI & PERGURUAN TINGGI**

YOGYAKARTA, 18 OKTOBER 2016

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2016**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-2
DAN CALL FOR PAPERS**

**TATA KELOLA EKONOMI INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN DAN MENINGKATKAN MARTABAT BANGSA BERBASIS SUMBER
DAYA ENERGI DAN MEMPERKOKOH SINERGI PENELITIAN ANTAR
PEMERINTAH, INDUSTRI & PERGURUAN TINGGI**

Cetakan Tahun 2016

Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Prosiding Seminar Nasional dan *Call For Papers*
Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat
Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah,
Industri & Perguruan Tinggi
LPPM UPNVY

, hlm; 21 x 29.7 cm.
ISBN: 978 - 602 - 60245 - 03

LPPM UPNVY PRESS

Universitas Pembangunan Nasional –Veteran|| Yogyakarta
Kapuslitbang LPPM UPNVY
Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang
Jln. SWK 104 (Lingkar Utara) Ring Road, Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpon (0274) 486733, ext 154
Fax. (0274) 486400

www.lppm.upnyk.ac.id
Email: puslitbang.upn@gmail.com

Penata Letak : Dwi Septiani Puteri
Rahmini Dini Putri
Al Theana Sweta. R
Desain Sampul : Andika Ahmadyansyah

Distributor Tunggal
LPPM UPNVY Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang
Jln. SWK 104 (Lingkar Utara) Ring Road, Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpon (0274) 486733, ext 154
Fax. (0274) 486400

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi,
tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR REVIEWER
SEMINAR NASIONAL, CALL FOR PAPERS, DAN PAMERAN HASIL
PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT KEMENRISTEK DIKTI RI
18 OKTOBER 2016
LPPM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Prof. Dr. Sari Bahagiarti, M.T. | (UPNVY) |
| 2. Prof. Dr. Didit Welly Udjianto, M.S. | (UPNVY) |
| 3. Prof. Dr. Arief Subyantoro, M.S | (UPNVY) |
| 4. Prof. Dr. Danisworo | (UPNVY) |
| 5. Prof. Dr. Bambang Prathistho | (UPNVY) |
| 6. Prof. Dr. Suwardjono, M.Sc. | (UGM) |
| 7. Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, M.Sc | (UGM) |
| 8. Prof. Dr. Sucy Kuncoko, M.Si. | (UNNES) |
| 9. Prof. Bambang Subroto, M.M | (Brawijaya) |
| 10. Prof. Ahmad Sudiro | (Brawijaya) |
| 11. Prof. Idayanti, M.Si | (UNHAS) |
| 12. Dr. Ardhito Bhinadi, M.Si. | (UPNVY) |
| 13. Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT. | (UPNVY) |
| 14. Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak | (UPNVY) |
| 15. Dr. Jatmiko Setyawan, M.T. | (UPNVY) |
| 16. Dr. Suprajarto. | (DIRUT BNI) |
| 17. Drs. Suyoto, M.Si. | (Bupati Bojonegoro) |
| 18. Dr. Mahreni | (UPNVY) |
| 19. Ir. Husein Kasim, MP. | (UPNVY) |
| 20. Dr. Joko Susanto, M.Si. | (UPNVY) |
| 21. Dr. Rahmat Setiawan, M.Si. | (UNAIR) |
| 22. Dr. Rahmad Sudarsono, M.Si. | (UNPAD) |
| 23. Dr. Hendro Wijanarko, SE, M.M | (UPNVY) |

**PRAKATA REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Yogyakarta dapat menyelenggarakan Seminar Nasional Tahun Ke-2, *Call Paper*, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Adapun tema yang diangkat dalam seminar ini adalah “*Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi*”

Seminar Nasional Tahun Ke-2, *Call Paper*, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI diselenggarakan antara lain untuk mempertemukan berbagai pihak, yaitu Pemerintah, Industri dan Perguruan Tinggi dalam membangun bangsa yang tangguh berbasis penelitian di semua bidang disiplin ilmu baik sosial maupun eksakta. Kegiatan ini juga merupakan salah satu wahana untuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, serta saling bertukar informasi untuk meningkatkan mutu baik penelitian maupun pendidikan. Lebih dari itu, melalui seminar diharapkan pula terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah, dunia industri, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga riset, sehingga tercipta sinergi yang bersifat implementatif.

Pada kesempatan ini banyak para ahli, akademisi, dan praktisi telah berhimpun di dalam seminar ini untuk menyampaikan makalah hasil-hasil penelitian dan pengabdianannya. Makalah-makalah tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah prosiding. Diharapkan prosiding ini dapat bermanfaat, turut menambah informasi, dan memperluas khasanah pengetahuan pembaca tentang upaya meningkatkan martabat bangsa berbasis sumber daya dan semoga Allah SWT meridhoi semua langkah baik kita

Yogyakarta, 18 Oktober 2016
Rektor



Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc.

**PRAKATA KETUA LPPM
UNIVERSITAS PEMBANUNGAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Ibu Retor UPN”Veteran”Yogyakarta
Yth. Bapak Wakil Direktur Utama BNI’46, Bp.Dr. Suprajarto, M.M.
Yth. Bapak VP Pertamina Upstream, Dr. Sigit Raharjo, MT
Yth. Bapak Suyoto, M.Si. (Bupati Bojonegoro)
Yth. Bapak Prof. Dr. Ainun Naim (Sekjen Kemenristekdikti)

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan segala anugerah serta kekuatan, sehingga kita senantiasa diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri guna mewujudkan pengabdian sebagai masyarakat akademik yang memiliki kepedulian atas berbagai permasalahan bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi pencerahan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuannya seperti sekarang ini.

Seminar Nasional Tahun Ke-2, *Call Paper*, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI ini adalah merupakan tatakelola ekonomi Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan meningkatkan martabat bangsa berbasis sumber daya energi & memperkokoh sinergi penelitian antar pemerintah, industri dan perguruan tinggi. Bidang Sosial, Eksak dan Pengabdian merupakan salah satu wahana penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan kajian yang dilakukan berbagi pihak untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi. Seminar ini juga diharapkan terpenuhinya prinsip tata kelola pemerintah, industri, dan perguruan tinggi akan memperkokoh martabat bangsa dan terjadi komunikasi antara dunia industri, perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga penelitian.

Seminar Nasional, *Call Paper*, dan Pameran hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI ini diikuti oleh praktisi dan akademisi dari Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia. Baik bidang Sosial, Eksak, dan Pengabdian dengan jumlah naskah yang masuk lebih dari 90 naskah.

Akhir kata, semoga semnas dan *call paper* ini bermanfaat dan saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya peserta seminar dan *call for paper* serta seluruh pelaksana kegiatan atas peran sertanya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 18 Oktober 2016
Ketua LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta

Dr. H. Heru Sigit Purwanto, MT.
NIP. 19581202 199203 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Reviewer	iii
Prakata Rektor	iv
Prakata Ketua LPPM	v
Daftar Isi	vi
Economic & Social	xi
Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada PT Bukit Asam Dalam Pengentasan Kemiskinan <i>Sri Suryaningsum, Muhammad Irhas Effendi, Raden Hendri Gusaptono, dan Berlina Ayu Suryana</i>	1
Dampak Disparitas Upah pada Masalah Sosial <i>Didit Welly Udjiyanto dan Joko Susanto</i>	9
Dampak Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 pada Laporan Keuangan Perbankan <i>Sri Luna Murdianingrum dan Marita</i>	16
Penerapan IFRS Nomor 6 pada Perusahaan Pertambangan <i>Noto Pamungkas dan Ruserlistyani</i>	26
Media Komunikasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Berbasis SMS Gateway <i>Puji Lestari, Sari Bahagiarti, dan Eko Teguh Paripurna</i>	35
Analisis Strategi Branding Ecotourism Kawasan Migas <i>Prayudi dan Kartika Ayu Ardhanariswari</i>	41
Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Magelang <i>Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik</i>	48
Pengembangan Kawasan Andalan Berbasis Potensi Ekonomi Sektoral <i>Sri Suharsih, Didit Welly Udjiyanto, Sri Astuti, dan Astuti Rahayu</i>	56
Dampak <i>Stressor</i> Kerja Terhadap Kinerja <i>Anis Siti Hartati dan Tri Mardiana</i>	61
Pengaruh Budaya, Kualitas Pelayanan, Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Perpustakaan <i>Hiras Pasaribu dan Alp. Yuwidianoro</i>	71

Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba <i>Lita Yulita Fitriani dan Sri Suryaningsum</i>	77
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diterapkan ISAK 29 pada Perusahaan Tambang <i>Sutoyo dan Sujatmika</i>	85
Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Rembang dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) <i>Asih Sri Winarti dan Wahyu Dwi Artaningtyas</i>	96
Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Ardito Bhinadi, Asih Sriwinarti, dan Wahyu Dwi Artaningtyas</i>	102
Pengentasan Kemiskinan: Motivasi dan Budaya Perempuan Dalam Mekanisme Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pendekatan Potensi di Kecamatan Berbah, Sleman (Pembentukan Kelompok Usaha Sampai Peluang Penyaluran Hasil Usaha) <i>Tri Mardiana, Sri Kussujaniatun, Sucahyo Heriningsih, Marita, dan Sadi</i>	107
Model Literasi Media di Lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi pada kec. Gondomanan Yogyakarta, dan Kec. Banguntapan Bantul DI Yogyakarta) <i>Dewi Novianti dan Siti Fatonah</i>	116
Implementasi <i>Integrated Marketing Communications</i> Vasektomi dalam Upaya Peningkatan Akseptor KB Pria Lestari Analisis Kasus di Kota Pekalongan <i>Basuki dan Panji Dwi Ashrianto</i>	122
Kampung Wisata Rejowinangun Sebagai Alternatif Pariwisata Berbasis Masyarakat <i>Ida Susi Dewanti, Meilan Sugiarto, dan Adi Soeprapto</i>	131
Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) <i>Kusharyanti, Sri Astuti, dan Dwi Sudaryati</i>	139
Motivasi dan Budaya Organizational Terhadap Kinerja dengan Mediasi Kepribadian <i>Tri Mardiana dan Sucahyo Heriningsih</i>	146
Analisis Karakteristik Individu Pengusaha Terhadap Keberhasilan dan Kegagalan Usaha Kecil Menengah <i>Sabihaini dan Januar Eko Prasetyo</i>	153

Faktor-Faktor Organisasional yang Mempengaruhi Kecenderungan Melakukan <i>Fraud</i> pada Perusahaan Sektor Keuangan di Indonesia <i>Sri Astuti, Zuhrohtun, dan Sri Wahyuni Widiastuti</i>	158
Pola Konsumsi Media TV Masyarakat Menjelang Era Penyiaran Digital di Indonesia <i>Agung Prabowo dan Kurnia Arofah</i>	168
Penggunaan E-Diplomacy pada Situs Pemerintahan di Indonesia <i>Rudi Wibowo</i>	175
Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan <i>Fraud</i> di Lingkungan Perguruan Tinggi <i>Dwi Sudaryati dan Hari Kusuma SN</i>	185
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di P. Jawa (Pendekatan Structural Vector Autoregression) PERIODE 2001 – 2012 *) <i>Bambang Sulistiyono dan Wahyu Dwi Artaningtyas</i>	194
Variabel Penentu Struktur Modal pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia <i>Nilmawati dan Hasa Nurrohim</i>	201
Iklan Politik dalam Perspektif Pemilih Pemula <i>Ida Wiendijarti dan Reny Triwardani</i>	211
Faktor Lingkungan, Faktor Motivasional dan Kepribadian Individual Dalam Kerangka Model Hubungan Perilaku <i>Knowledge Sharing</i> <i>Ninik Probosari, Yuni Siswanti, dan Herlina Dyah Kuswanti</i>	218
Penataan Kawasan Pantai Utara Jawa Menuju <i>Agro-Ecotourism</i> <i>Marita dan Sucahyo Heriningsih</i>	227
Peran <i>Strategic Management Accounting</i> pada Perguruan Tinggi <i>Sriyono, Rahmawati, Bandi, dan Agung Nur Probohudono</i>	237
Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi dengan Komposisi Manajemen Puncak Sebagai Variabel Pemoderasi <i>Dian Indri Purnamasari dan Ratna Hindria</i>	246
Implementasi Model Prediksi Laba Berdasar <i>Cost Stickiness</i> <i>Windyastuti dan Kunti Sunaryo</i>	256

Desain Kurikulum Guna Mempercepat Masa Tunggu Memeroleh Pekerjaan Bagi Lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan	264
<i>Sri Suharsih, Astuti Rahayu, dan Joko Susanto</i>	
Posisi Strategis Karang Taruna Dalam Pendidikan Politik Pemilih Pemula	269
<i>Susilastuti Dwi Nugrahajati, Basuki Agus Suparno, dan Adi Soeprapto</i>	
Perbedaan Pengaruh Latihan Fartlek dan Circuit Training Terhadap Peningkatan Kemampuan Vo₂Max pada Pemain Sepak Bola	277
<i>Sumintarsih, Tri Saptono dan Wahyu Wibowo EY</i>	
Dampak Struktur Kepemilikan, <i>Financial Leverage</i>, <i>Size of Board</i> dan <i>Total Assets</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Sales Growth sebagai Proksi Peluang Pertumbuhan	284
<i>Sri Dwi Ari Ambarwati Rini dan Dwi Astuti</i>	
Pemetaan Potensi Wisata, Jalur Produksi, Pemasaran, Tanaman yang Tepat, dan Pendekatan pada Unsur Tokoh Masyarakat di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro	292
<i>Sri Kussujaniyatun, Teguh Kismantoroadji, dan Hari Kusuma Satria Negara</i>	
Strategi Penguatan <i>Branding</i> Pada Produk Olahan Salak Hasil UMKM Dewi Pule Home Industri di Desa Wisata Pulesari Melalui Perancangan Desain Kemasan (<i>Packaging</i>) dan Desain Media Promosi	300
<i>Kartika Ayu Ardhanariswari dan Susanti Rina</i>	
The Effect of Innovation Strategy and Company Size on Company Financial Performance in Indonesia	307
<i>Abdul Ghofar dan Kunti Sunaryo</i>	
Evaluasi Model Inkubator Bisnis Dalam Rangka Pemberdayaan UKM	315
<i>Suratna dan Eny Endah Pujiastuti</i>	
Analisis Kontribusi Komponen Teknologi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta	325
<i>Nanik Dara Senjawati dan Sri Wuryani, Juarini</i>	
Perkembangan dan Permasalahan dalam Laporan Keuangan Partai Politik	338
<i>Sujatmika, Marita</i>	

Pengembangan Daya Dukung Fungsi Kelembagaan Program Studi Ilmu Komunikasi menuju Pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif UPN “Veteran” Yogyakarta <i>Subhan Afifi, Ida Wiendijarti, Senja Yustitia</i>	342
Kinerja Penelitian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta <i>Gogot Haryono, Joko Susanto.</i>	353
Analisis Destinasi Kompetitif Kluster Kerajinan Kajigelem Bantul <i>Sigit Haryono, Ratna Rostika, Tri Wahyuningsih</i>	358
Perbedaan Kemampuan Inovasi UKM Perempuan di Sektor Informal Sebelum dan Sesudah Pemberian Program Pendampingan <i>Sauptika Kancana dan Puji Lestari</i>	365
<i>Corporate Governance, Intellectual Capital</i> dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan <i>Sadeli dan Hastho Joko Nur Utomo</i>	371
Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Perdagangan Indonesia <i>Purwiyanta dan Rini Dwi Astuti</i>	377
Kajian Potensi Ekonomi Masyarakat di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro <i>Sadi, Tri Mardiana dan Indra Kusumawardhani</i>	386

ECONOMIC & SOCIAL

PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PT. BUKIT ASAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

oleh

¹Sri Suryaningsum, ²Muhammad Irhas Effendi
Raden Hendri Gusaptono, Berlina Ayu Suryana
¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
²Management Department, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta, DIY, Indonesia
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta, 55283, Fax (0274) 486400
Telepon: 085729671807, Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana PT. Bukit Asam menjalankan Program CSR untuk program pengentasan kemiskinan. Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada setiap korporasi mempunyai karakteristik yang berbeda – beda. Karakter tersebut harus dikaji sesuai dengan karakter sosial, lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga dana yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan program dan ketepatan program. PT. Bukit Asam yang beroperasi di Sumatera Selatan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi ke lokasi-lokasi CSR PT. Bukit Asam dan studi pustaka dari *annual report* dan laporan CSR PT. Bukit Asam. Penelitian dilakukan di PT. Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan tambang batubara yang telah melaksanakan program CSR. Hasil dari analisis ini adalah PT. Bukit Asam yang beroperasi di Sumatera Selatan lebih mengedepankan program corporate social responsibility (CSR) berorientasi kepada internal masyarakat sekitar untuk program pengentasan kemiskinan.

Keynote: PT. Bukit Asam, CSR, Pengentasan Kemiskinan, Lingkungan, Pertambangan

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan pada ini, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. (Rudito, Budimanta, Prasetyo. 2004).

PT. Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan besar yang berkecimpung dalam dunia pertambangan berlokasi di Sumatera Selatan memiliki karakteristik tingkat standar pendidikan, kehidupan sosial lebih baik dari masyarakat yang tinggal di wilayah operasi pertambangan batubara. Perbedaan karakteristik ini memberikan dampak yang besar terhadap

pengaplikasian program CSR sebagai aturan wajib dari pemerintah bagi perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi sumber daya alam (Suryaningsum, 2015).

Menurut Suryaningsum (2009), dalam Indeks CSR, salah satu tanggungjawab korporasi terutama perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (Pasal 74 UU No. 40/2007) mineral, tambang ataupun migas adalah *corporate social responsibility* (CSR) yang merupakan gerakan etis kepedulian sebagai wujud tanggung jawab sosial dan pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (*World Business Council for Sustainable Development*). Menurut Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberlakuan Tanggungjawab *Corporate Social Responsibility*, Adhe Adhari (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR pada masing – masing perusahaan pertambangan batubara dan mineral mempunyai standar *growth center* yang berbeda – beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga implementasi CSR dilapangan harus dikaji berdasarkan karakter sosial masyarakat sekitar dan presentase dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan tersebut. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 hal yang terpenting adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di lapangan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat lokal yang berada pada daerah operasi perusahaan berupa kegiatan pelatihan, bantuan modal, dorongan, bimbingan, peluang dan prioritas ketenagakerjaan untuk menempati posisi tertinggi dalam perusahaan.

Corporate Social Responsibility

D'Amato, dkk. 2012, menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).

Jadi, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis serta pasif, semua itu hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan.

Penerapan CSR

Menurut Wibisono (2008), terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR, setidaknya terdapat empat tahap, diantaranya:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu *awareness building*, *CSR Assessment*, dan *CSR manual building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.

Langkah selanjutnya adalah dengan membuat *CSR manual*. Hasil *assessment* merupakan dasar menyusun *manual* atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli.

Manual assessment merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan *manual* CSR dibuat sebagai acuan, panduan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

2. Tahap Implementasi

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik, akibatnya tujuan program CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal padahal anggaran yang telah dikururkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang.

Dalam memulai implementasi, Wibisono (2008), menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan implementasi beserta alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, aspek tersebut diterjemahkan kedalam:

- Pengorganisasi, atau sumber daya yang diperlukan
- Penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya
- Pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan
- Pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan
- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
- Penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim atau divisi khusus yang dibentuk untuk mengelola program CSR, langsung berada dibawah pengawasan salah satu direktur atau CEO. Tujuan utama sosialisasi adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan,

sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman *Corporate Social Responsibility* yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun, sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan tentang *Corporate Social Responsibility* di dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tetapi sudah *beyond compliance*.

3. Tahap Evaluasi

Setelah program diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektifitas penerapan CSR. Terkadang ada kesan, evaluasi baru dilakukan jika ada program yang gagal sedangkan jika program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi harus tetap dilakukan, baik saat kegiatan tersebut berhasil atau gagal, bahkan kegagalan atau keberhasilan baru bisa diketahui setelah program tersebut dievaluasi.

Menurut Prayogo dan Dody (2011) dalam Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* pada industri tambang dan migas, evaluasi program *corporate social responsibility* (CSR) perlu diadakan setiap tahunnya bukan untuk tindakan mencari-cari kesalahan. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan.

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholder* yang memerlukan

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi ke lokasi-lokasi CSR PT. Bukit Asam dan studi pustaka dari *annual report* dan laporan CSR PT. Bukit Asam. Penelitian dilakukan di PT. Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan tambang batubara yang telah melaksanakan program CSR. Menurut Suryaningsumsri (2015) PT. Bukit Asam terus menerus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun kemndirian masyarakat serta terus berupaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari komitmen untuk terus menerus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang berdampak terhadap pengentasan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bukit Asam

PT. Bukit Asam berada pada wilayah Tanjung Enim yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pencapaian daerah relatif mudah karena terletak pada ruas jalan utama lintas Sumatera Jalur Tengah. Kota Muara Enim dapat dicapai dari Kota Palembang dengan kendaraan selama kurang lebih 4 jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 185 km.

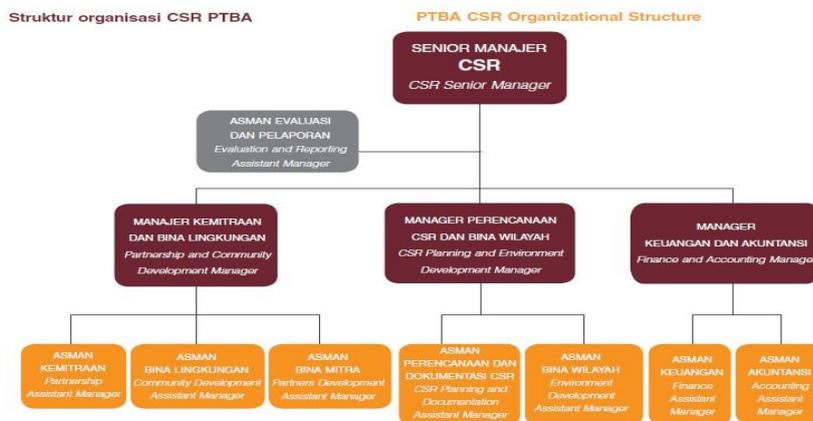
Berdasarkan Laporan Tahunan PT. Bukit Asam tahun 2014, keadaan umum masyarakat lokal di daerah Tanjung Enim Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PT Bukit Asam Tanjung Enim mempunyai dampak eksternalitas positif terhadap sosial ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Menurut Gunradi. R, Sabranto, Dkk. 2005 (dalam Laporan Lapangan Pemantauan Dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral, di Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan), lapangan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Bukit Asam terhadap masyarakat lokal memberikan keuntungan dalam hal pengurangan yang semakin sedikit dikarenakan PT. Bukit Asam memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja di PT. Bukit Asam, dan ditambah juga dengan adanya Kegiatan Usaha Bersama (KUB) antara masyarakat sekitar dengan PT. Bukit Asam.

Kegiatan Usaha Bersama yang diselenggarakan oleh PT. Bukit Asam dalam pengentasan kemiskinan memberikan dampak yang positif yaitu berkembangnya struktur ekonomi yang mengakibatkan munculnya industri – industri kecil dan rumah tangga sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha-usahanya dan memberikan sumber-sumber pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum karena semakin berkembangnya mata pencaharian di Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Situasi seperti ini dapat mendorong semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masyarakat sekitar sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Gunradi. R, Sabranto, dkk. (2005), menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat lokal juga semakin meningkat dengan adanya fasilitas transportasi yang membuat harga tanah di Daerah Tanjung Enim naik, fasilitas lingkungan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya melestarikan alam, fasilitas pendidikan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat setempat, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi masyarakat dan fasilitas umum lainnya dalam menunjang aktifitas masyarakat sehari – hari serta ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Gambar 2. Alur Penanggung Jawab Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam 2015 (Annual Report Sustainability, 2014)



Tabel 1. Bidang Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam

Bidang CSR	PT. Bukit Asam
	Pengembangan Industri Kecil
	Pengembangan Industri Besar
Ekonomi	Pelatihan Softskill
	Usaha Tani
Sosial	Kelestarian kesenian lokal daerah
	Pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan
	Kerja sama dengan Pemerintah
	Pemberian sembako kepada masyarakat kurang mampu
	Kerja sama dengan masyarakat
	Mengikutsertakan masyarakat lokal
Lingkungan	Green Mining

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa program *corporate social responsibility*(CSR) yang diterapkan di PT. Bukit Asam mempunyai orientasi terhadap *stakeholder* dan masyarakat pemangku kepentingan bisnis batubara tersebut dengan lebih melibatkan masyarakat sekitar untuk melaksanakannya memberikan dampak internal pada masyarakat sekitar yang cukup signifikan. Program-program CSR PT. Bukit Asam dalam pengentasan kemiskinan di sekitar wilayah PT. Bukit Asam beroperasi memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan masyarakat sekitar dalam program pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN

Karakteristik *corporate social responsibility* (CSR) disesuaikan dengan perusahaan pertambangan batubara beroperasi, masing – masing perusahaan mempunyai standar growth center yang berbeda – beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga dana yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan program dan ketepatan program. PT. Bukit Asam yang beroperasi di Sumatera Selatan lebih mengedepankan program

corporate social responsibility (CSR) untuk pengentasan kemiskinan yang berorientasi kepada internal masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR yang baik akan memberikan manfaat bagi perseroan yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat, memberdayakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan memberikan inovasi bagi perusahaan. Selain memberikan manfaat untuk perusahaan CSR juga memberikan dampak yang cukup untuk masyarakat sekitar dalam program pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

Ade Adhari, *Tinjauan Yuridis: Kebijakan Pemberlakuan Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR)*, Energy and Mining Law Institute (EMLI), Jakarta, 12 Februari 2015.

Annual Report Sustainability., PT. Bukit Asam. Tbk. 2012.

Annual Report Sustainability., PT. Bukit Asam. Tbk. 2013.

Annual Report Sustainability., PT. Bukit Asam. Tbk. 2014.

D'Amato, dkk. 2012, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Business A Guide to Leadership Tasks and Functions*, North Carolina.

Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. *Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 47-77

Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. *Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 78-101

Gunradi. R, Sabranto, dkk. 2005. *Pemantauan Dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral, Di Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kolokium Hasil Lapangan*. Dim.

IPPF, 2010. *Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development*, Canada. Leimona, Beria & Fauzi, Annul. 2008. *CSR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak : Positif dan Negatif.*, IBL

Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. *A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behaviour. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1, p. 38-62

Prayogo dan Dody. (2011). *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada industri tambang dan migas. Makara, Sosial Humaniora*, 15 (1).

Sampe, Evy. Sarwono. Sukanto. 2012. *Pengembangan Jejaring Organisasi Yayasan Sangatta Baru (Ysb) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 3, Hal. 471-477

Sugiarto, M..dan Wardhani, I.K. 2014. *Corporate Social Responsibility.*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Sugiarto, M..dan Wardhani, I.K. 2014. *Corporate Sustainability Reporting*. Prosiding Semnas Sinau 3. UPNV Jakarta, UPNV Yogyakarta, UPNV Jatim.

- Sugiarto, M. 2009. Membangun Keunggulan Bersaing Organisasi melalui Corporate Social Responsibility PARADIGMA FISIP UPN Veteran Yogyakarta.
- Suryaningsum, Sri. 2008. Indeks CSR. Laporan Penelitian HF Dikti RI.
- Suryaningsum, Sri. 2009. Perbedaan Paradigma Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility: Komparasi Amerika dan Eropa. Paradigma ISSN 1410-3133. Volume 13, no 2.
- Suryaningsum, Sri. Moch. Irhas Effendi. R. Hendri Gusaptono. 2015. Corporate Social Responsibility Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Model Terbaik Untuk Perusahaan Tambang. Buletin Ekonomi. ISSN 1410-2293. Vol. 13 No. 2 Desember: 183-194.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2006. Pekerjaan Sosial Industri, CSR, dan Comdev. Makalah workshop tentang Corporate Social Responsibility
- Waryanto. 2010. Pengaruh Karakteristik Good Govenance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corportae Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Skripsi S1 Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik. Fascho Publishing.
- Wibisono, Yusuf. 2008. *Membedah konsep CSR; Seri Manajemen Berkelanjutan*. CV. Ashkaf Media Grafika Surabaya. Hal 23-25.

Dampak Disparitas Upah Pada Masalah Sosial

Didit Welly Udjiyanto

Joko susanto

(jk.susanto.68@gmail.com)

Abstrak

Dalam banyak kasus terdapat suatu ironi antara pertumbuhan ekonomi regional yang tinggi, namun sebagian penduduknya miskin akibat disparitas pendapatan. Adanya disparitas pendapatan berdampak pada masalah sosial dan merupakan alasan utama untuk melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan disparitas pendapatan akan diikuti dengan kenaikan masalah kriminalitas. Disparitas pendapatan menyebabkan masyarakat yang berpendapatan rendah merasa unfair dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah hukum

Kata Kunci: dampak, disparitas, pendapatan, kriminalitas

Abstract

In many cases, there is a certain irony when regional economic growth is high, but most of the population is poor due to the income disparity. The impact of income disparities on social problems are the main reasons for doing this research. By using regression analysis, the results showed that the increase in income disparity will be followed by a rise of criminality rate. Income disparities cause low-income communities feel unfair. This condition reflected in a dysfunctional behavior that deviates from the rules of law.

Keywords: impact, income, disparity, crime,

Pendahuluan

Pesatnya pembangunan ekonomi regional telah menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sejumlah kota di pulau Jawa termasuk di DIY dan Jawa Tengah. Beberapa daerah yang pada mulanya merupakan daerah non-urban telah berkembang menjadi daerah urban. Perubahan ini diikuti dengan perubahan status dan tingkat sosial ekonomi penduduk serta berkembangnya aktivitas ekonomi (Faizah dan Hendarto, 2013). Keragaman aktivitas ekonomi di daerah urban akan lebih banyak daripada keragaman aktivitas ekonomi di daerah non-urban. Pertumbuhan suatu kota (urban) akan disertai dengan semakin banyaknya jumlah dan macam aktivitas ekonomi yang ada di kota tersebut.

Berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi di perkotaan berdampak pada heterogenitas mata pencaharian penduduknya. Kota besar memiliki prasarana yang lebih banyak seperti terminal, jalan tol, pelabuhan, bandar udara dan fasilitas umum lainnya. Dukungan infrastruktur ini menyebabkan kota-kota besar memiliki keragaman aktivitas ekonomi yang lebih banyak daripada aktivitas ekonomi di kota-kota kecil. Berbagai lapangan usaha (sektor ekonomi) dan profesi bermunculan seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi kota. Produktivitas pekerja di tiap-tiap sektor ekonomi dan profesi berbedabeda. Demikian pula halnya dengan profesi pekerja. Setiap profesi kerja membutuhkan keahlian tertentu sehingga produktivitas berbeda-beda menurut profesinya. Produktivitas pekerja terkait dengan tingkat upah. Tinggi rendahnya upah ditentukan antara lain berdasar produktivitas pekerja (Pernia dan Salas, 2006).

Disparitas produktivitas pekerja antar sektor maupun antar profesi menyebabkan timbulnya disparitas upah antar kelompok pekerja dan selanjutnya menyebabkan terjadinya

disparitas pendapatan. Berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi di perkotaan berdampak pada heterogenitas mata pencaharian penduduknya. Kota besar memiliki prasarana yang lebih banyak seperti terminal, jalan tol, pelabuhan, bandar udara dan fasilitas umum lainnya. Dukungan infrastruktur ini menyebabkan kota-kota besar memiliki keragaman aktivitas ekonomi yang lebih banyak daripada aktivitas ekonomi di kota-kota kecil. Berbagai lapangan usaha (sektor ekonomi) dan profesi bermunculan seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi kota.

Produktivitas pekerja di tiap-tiap sektor ekonomi dan profesi berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan profesi pekerja. Setiap profesi kerja membutuhkan keahlian tertentu sehingga produktivitas berbeda-beda menurut profesinya. Produktivitas pekerja terkait dengan tingkat upah. Tinggi rendahnya upah ditentukan antara lain berdasar produktivitas pekerja. Disparitas produktivitas pekerja antar sektor maupun antar profesi menyebabkan timbulnya disparitas upah antar kelompok pekerja. Disparitas upah terjadi akibat disparitas komposisi keahlian penduduk antar daerah. Perbedaan keahlian antar pekerja merupakan faktor penentu terjadinya disparitas upah (Combes et al, 2008).

Perkembangan ekonomi di DIY dan Jawa Tengah berjalan secara bersamaan sehingga perekonomian kedua propinsi tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain. Hubungan ekonomi antara dua propinsi ini ditopang oleh berkembangnya kawasan Joglo Semar yang mencakup kota Yogyakarta, Solo dan Semarang. Hal ini didukung oleh letak geografis DIY yang diapit oleh Jawa Tengah, kecuali DIY bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dengan demikian terdapat satu kesatuan ekonomi antara DIY dan Jawa Tengah. Didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka kota-kota di DIY dan Jawa Tengah tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditandai oleh berkembangnya sejumlah aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan dan jasa. Macam dan ragam kegiatan ekonomi menyebabkan munculnya berbagai lapangan usaha dan profesi dengan tingkat upah yang berbeda satu sama lain. Disparitas tingkat upah mengindikasikan adanya disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan akan berdampak pada permasalahan sosial. Potensi timbulnya masalah social meningkat seiring dengan berkembangnya kota-kota di DIY dan Jawa Tengah. Letak DIY dan Jawa Tengah yang secara geografi berdekatan memungkinkan terjadinya perpindahan penduduk (migrasi) antara kota-kota di DIY dengan Jawa Tengah.

Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis pembangunan ekonomi regional dari perspektif penduduk guna mengetahui disparitas pendapatan yang diukur dari disparitas upah (*wage gap*) di kota-kota di DIY dan Jawa Tengah, dan mengidentifikasi hubungan antara disparitas pendapatan dengan jumlah masalah sosial penduduk. Hal ini karena sering kali terdapat suatu ironi antara pertumbuhan ekonomi regional yang tinggi dengan disparitas pendapatan (Royuela *et al.*, 2014). pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali diikuti pula dengan rendahnya kualitas hidup (*quality of life*) sebagian penduduknya terutama yang bekerja pada industri manufaktur berupah rendah. Rendahnya upah sebagian pekerja menyebabkan terjadinya kemiskinan relatif yang berpotensi menimbulkan masalah sosial. Permasalahan sosial yang tinggi terjadi di daerah dengan disparitas pendapatan yang tinggi pula (Wilkinson dan Pickett, 2011).

Landasan Teori

Masyarakat suatu negara (daerah) bersifat heterogen yang secara ekonomi terdiri dari berbagai strata yang ditandai dengan kepemilikan sumber daya diantara anggota masyarakat yang juga bersifat heterogen. Potensi dan kemampuan tiap strata masyarakat berbeda-beda. Terdapat sekelompok anggota masyarakat yang memiliki sumber daya dalam jumlah yang lebih banyak daripada sekelompok masyarakat lainnya. Dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, maka permasalahan yang sering terjadi adalah kenaikan jumlah barang dan jasa tersebut sering kali tidak dapat dinikmati anggota masyarakat secara merata. Heterogenitas

pemilikan sumber daya menyebabkan tidak semua anggota masyarakat dapat berperan serta dalam proses produksi. Hal ini berarti ada sejumlah anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses produksi dan sebagai akibatnya mereka tidak mendapatkan kontribusi. Dengan kata lain mereka tidak memperoleh pendapatan.

Kondisi lain yang juga sering ditemui adalah adanya sejumlah kecil anggota masyarakat lapisan atas menikmati sejumlah besar barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian, sedangkan masyarakat lainnya (walaupun jumlahnya banyak) hanya menikmati barang dan jasa dalam jumlah yang relatif sedikit. Dengan demikian terdapat kesenjangan antar anggota masyarakat. Disparitas pendapatan ini menjadi salah satu isu (masalah) yang cukup mengganggu dan akhir-akhir ini menyita banyak perhatian.

Disparitas pendapatan telah banyak dibahas dalam dua dasa warsa terakhir. Disparitas pendapatan timbul akibat adanya pemusatan investasi ke beberapa daerah/kota tertentu. Dalam penentuan lokasi investasi, maka investor akan berupaya untuk mendapatkan daerah yang berdaya saing. Secara ekonomi daerah berdaya saing ini akan mencakup kota-kota yang memiliki sarana dan prasarana (infrastruktur) dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang mencukupi, maka proses produksi barang dan jasa di wilayah tersebut dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah. Demikian pula ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi mampu melengkapi ketersediaan modal/kapital sehingga perpaduan keduanya mampu menghasilkan proses produksi yang efisien dan efektif.

Kota yang banyak memperoleh tambahan investasi akan tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan kota menyebabkan perubahan daerah sekitar kota dari daerah yang bersifat non-urban menjadi daerah urban. Dengan kata lain terjadi aglomerasi perkotaan. Keragaman aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan pertumbuhan ukuran kota. Perusahaan-perusahaan besar akan berlokasi di kota besar yang memiliki infrastruktur lebih lengkap seperti ketersediaan jalan tol, pelabuhan dan bandar udara. Perusahaan-perusahaan ini memiliki keunggulan sehingga mereka bisa memilih pekerja berkualifikasi tinggi sesuai yang diinginkan. Keberadaan pekerja berkualifikasi tinggi dan infrastruktur memadai menjadikan proses produksi berjalan lebih efisien. Barang dan jasa dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah. Dengan demikian produk memiliki daya saing tinggi dan mampu menguasai pasaran.

Kemampuan penduduk kota untuk memanfaatkan potensi yang timbul dari aglomerasi perkotaan berbeda-beda. Penduduk yang berpendidikan tinggi mampu memanfaatkan peluang yang timbul. Mereka mampu bekerja di sektor-sektor ekonomi yang produktif. Sementara itu, di sisi lain terdapat anggota masyarakat yang gagal memanfaatkan peluang yang timbul dari aglomerasi perkotaan ini. Faktor penawaran tenaga kerja berlebih (*labor surplus*) menyebabkan outcome pasar tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja. Dengan berbagai pertimbangan dalam efisiensi produksi, maka perusahaan menentukan spesifikasi pekerja yang dibutuhkan. Spesifikasi kebutuhan akan pekerja dengan kualifikasi tertentu menjadikan tidak semua penduduk kota mampu memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Seringkali terjadi lowongan kerja di suatu industri tidak terisi, sedangkan pada saat bersamaan terdapat sejumlah pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan yang dicarinya.

Pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi penganggur atau terpaksa bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang lebih rendah. Demikian pula suatu profesi pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi lainnya. Suatu profesi pekerjaan memerlukan spesifikasi tertentu sehingga tidak semua pekerja dapat memasukinya. Hal ini menyebabkan disparitas produktivitas pekerja antar sektor ekonomi dan antar profesi. Disparitas produktivitas pekerja, baik menurut sektor ekonomi maupun profesi pekerja (jabatan) akan berdampak pada disparitas tingkat upah. Hal ini dikarenakan

produktivitas pekerja berhubungan dengan tingkat upah (Pernia dan Salas, 2006). Disparitas tingkat upah menunjukkan disparitas pendapatan antar kelompok pekerja yang tinggal di suatu kota. Hal tersebut menunjukkan adanya disparitas pendapatan. Satu kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok masyarakat lainnya berpendapatan rendah sehingga terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Tidak seluruh masyarakat kota mampu memanfaatkan peluang yang timbul dari pertumbuhan kota. Hal ini terkait dengan keragaman potensi yang dimiliki masyarakat di antaranya keragaman dalam pendidikan. Mereka yang memiliki pendidikan dan keahlian tinggi mampu memanfaatkan peluang ini, sedangkan pekerja yang tidak memiliki pendidikan dan keahlian yang cukup akan tersisih. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tinggi diikuti dengan memburuknya disparitas pendapatan (Wilkinson dan Pickett, 2011).

Potensi pertumbuhan ekonomi kota bergantung pada faktor-faktor pendukungnya di antaranya infrastruktur. Pada umumnya kota-kota besar memiliki infrastruktur yang memadai sehingga mampu menghasilkan output (barang dan jasa) dalam jumlah yang besar pula. Kota dengan ukuran lebih besar memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi pula. Akan tetapi tingginya PDRB per kapita tidak selalu menunjukkan tingginya kesejahteraan penduduknya. Hal ini karena pada umumnya distribusi pendapatan masyarakat tidak merata atau dengan kata lain terdapat disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan berpotensi menyebabkan terjadinya masalah sosial. Disparitas pendapatan menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan relatif. Penduduk yang berpendapatan rendah (miskin secara relatif) tidak mampu memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan sekunder dan tersier. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat kelas bawah merupakan penyebab masalah disparitas pada bidang-bidang sosial. Secara umum indikator sosial seperti angka kriminalitas, angka perceraian, angka bunuh diri, angka harapan hidup dan angka melek huruf merupakan ukuran kesejahteraan yang menggambarkan kondisi nyata dialami masyarakat.

Kepuasan masyarakat yang diukur dengan indikator-indikator sosial mampu menggambarkan tinggi rendahnya masalah sosial. Disparitas pendapatan menyebabkan masyarakat yang berpendapatan rendah merasa *unfair*. Wujud dari penilaian *unfair* adalah perilaku masyarakat yang disfungsi. Hal ini berarti perilaku sekelompok masyarakat menyimpang dari aturan atau norma-norma yang seharusnya. Kelompok masyarakat yang berperilaku disfungsi menjadi sumber masalah sosial yang rumit. Tindakan kelompok ini dapat mengakibatkan penderitaan masyarakat. Apabila tindakan ini berlangsung terus menerus, maka dikhawatirkan hal ini akan menurunkan pola-pola kehidupan yang disfungsi kepada keturunan atau generasi penerus sehingga masalah sosial ini menjadi masalah yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik (BP). Data penelitian akan mencakup upah pekerja, pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas. Cakupan rentang waktu penelitian adalah periode 2001-2014. Pemilihan titik awal tahun 2001 dikarenakan pada periode tersebut mulai berlakunya otonomi daerah. Adapun titik akhir pada tahun 2014 dikarenakan publikasi BPS pada tahun tersebut merupakan publikasi terbaru. Cakupan obyek penelitian meliputi Kota Yogyakarta, Solo, Salatiga, Magelang, Semarang, Pekalongan dan Tegal.

Definisi operasional dijelaskan sebagai berikut. 1). Masalah sosial diproksi dengan variabel tingkat kriminalitas yaitu jumlah kasus kriminalitas selama satu tahun. 2). Disparitas upah adalah selisih antara upah terendah (diproksi dari upah minimum kota =UMK) dengan upah tertinggi (diproksi dari upah manajer). Karena masalah ketersediaan data, maka upah manajer diestimasi berdasar UMK dikalikan rasio perbandingan antara upah pekerja produksi di bawah supervisi dengan upah manajer di Jawa Tengah dan DIY. 3).

Pertumbuhan penduduk adalah persentase penambahan penduduk kota setiap tahunnya 4). Pertumbuhan kesempatan kerja adalah persentase penambahan penduduk yang bekerja setiap tahun

Penelitian ini meliputi kondisi sosial dan ekonomi kota-kota di DIY dan Jawa Tengah periode 2001-2014. Dengan demikian data penelitian berbentuk data panel yang merupakan gabungan dari data belah silang dan runtun waktu. Data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan data belah silang atau data runtun waktu (Baltagi, 2003:5-7). Salah satu prasyarat regresi adalah variabel-variabel dalam model berkointegrasi. Untuk menguji apakah variabel dalam model berkointegrasi digunakan uji kointegrasi Pedroni.

Dampak disparitas upah pada tingkat kriminalitas diestimasi dari model berikut.

$$Y_{it} = \varphi_i + \alpha X_{1,it} + \beta X_{2,it} + \gamma X_{3,it} + e_{it}$$

Secara berturut-turut X_1 adalah disparitas upah (persen), X_2 adalah pertumbuhan penduduk (persen), X_3 adalah pertumbuhan kesempatan kerja (persen), Y adalah masalah sosial yang diproksi tingkat kriminalitas (kasus).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Pengujian kointegrasi berkaitan dengan kemungkinan adanya hubungan keseimbangan angka panjang antar variabel ekonomi seperti yang dikehendaki dalam teori ekonomi. Dalam Penelitian ini pengujian kointegrasi dilakukan berdasar model kointegrasi Kao. Hasil Pengujian kointegrasi Kao menunjukkan adanya penolakan terhadap hipotesis H_0 yang menyatakan tidak adanya kointegrasi antar variabel untuk model. Pada regresi data panel terdapat 2 (dua) model dasar yaitu model *fixed effects* dan *random effects*. Hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai m lebih besar daripada χ^2 pada derajat keyakinan ($\alpha=5\%$), maka model yang dipilih adalah *fixed effects*. Hal ini berarti hasil analisis dilakukan berdasar model *fixed effects*.

Melalui metode estimasi dengan model *fixed effects* dan reduksi terhadap parameter-parameter yang tidak signifikan diperoleh hasil estimasi yang sederhana. Hasil pengujian *redundant coefficient* menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel ($\alpha=5\%$) sehingga tidak signifikan. Hal ini berarti beberapa koefisien regresi memang tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,7392 menunjukkan bahwa sebesar 73,92 persen variasi tingkat kriminalitas dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel-variabel dependen, sisanya sebesar 26,08 persen dijelaskan oleh residual. Sementara itu nilai F hitung sebesar 31,55 dan signifikan menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat masalah sosial.

Tabel 1
Hasil Estimasi Jangka Pendek Dampak Disparitas Upah Pada Tingkat Kriminalitas
(Fixed Effects)

Nomor.	Variabel	Koefisien	<i>t</i> -statistik	<i>t</i> -tabel ($\alpha=5\%$)
1.	<i>C</i>	75,788	1,164	1,645
2.	<i>X₁</i>	0,103	3,781*	1,645
3.	<i>X₂</i>	10,197	1,534	1,645
4.	<i>X₃</i>	2,624	0,783	1,645

Variabel dependen: Tingkat kriminalitas

*Adjusted R*² = 0,739

*F*_{hitung} = 31,55

*) signifikan pada ($\alpha=5\%$)

Pembahasan

Koefisien regresi variabel disparitas pendapatan sebesar 0,103. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan disparitas pendapatan sebesar 1 juta akan diikuti dengan kenaikan tingkat kriminalitas sebesar 103 kasus (*ceteris paribus*). Disparitas pendapatan menyebabkan masyarakat yang berpendapatan rendah merasa *unfair*. Wujud dari penilaian *unfair* adalah perilaku masyarakat yang disfungsi. Hal ini berarti perilaku sekelompok masyarakat menyimpang dari aturan atau norma yang seharusnya. Kelompok masyarakat yang saling berperilaku disfungsi yang mengarah kepada kriminalitas.

Akar permasalahan konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, mengarah pada perebutan atas sumber-sumber kepemilikan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkan tambahan aset. Sering kali upaya tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Adapun variabel pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan lapangan kerja tidak berpengaruh pada tingkat kriminalitas.

Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi disparitas pendapatan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh adalah penyebaran investasi antar daerah (Kim dan Kim, 2003), peningkatan infrastruktur transportasi, desentralisasi perundingan bersama antara pekerja dan pengusaha, dan peningkatan akumulasi *human capital* (Banerjee and Jarmuzek, 2009).

KESIMPULAN

Kenaikan disparitas pendapatan akan diikuti dengan kenaikan masalah sosial (diproksi dengan tingkat kriminalitas). Disparitas pendapatan menyebabkan masyarakat yang berpendapatan rendah merasa *unfair*. Wujud dari penilaian *unfair* adalah perilaku masyarakat yang disfungsi. Perilaku sekelompok masyarakat menyimpang dari aturan atau norma-norma yang seharusnya dan melanggar kaidah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, Biswajit and Jarmuzek, Mariusz (2009), Anatomy of Regional Disparities in the Slovak Republic, IMF Working Papers No.9/145,: 1-28
- Baltagi, Badi., H., 2003. *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley and Sons.
- Combes, Pierre-Philippe, Duranton, Gilles, and Gobillon, Laurent (2008), -Spatial Wage Disparities: Sorting Matters!, *Journal of Urban Economics*, 63: 723-742
- Kim, Euijune dan Kabsung Kim I(2003). -Impacts of the development of large cities on economic growth and income distribution in Korea: A multiregional CGE model, *Papers Reg. Sci.* 82: 101–122
- Faizah, Arina Nurul dan Mulyo Hendaro, 2013, -Analisis Difusi Keruangan di Sekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta, *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2 (3): 1 – 9
- Pernia, Ernesto M. dan J. M. Ian S. Salas, 2006. Investment Climate, Productivity, and Regional Development in a Developing Country, *Asian Development Review*, 23: 70-89.
- Royuela, V., P. Veneri and R. Ramos (2014), -Income Inequality, Urban Size and Economic Growth in OECD Regions, *OECD Regional Development Working Papers*, 2014/10, OECD Publishing.
- Wilkinson, R. and Pickett, K. (2011), *The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger*, Bloomsbury Press.

DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 50 DAN PSAK 55 PADA LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN

Sri Luna Murdianingrum, Marita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional -Veteran Yogyakarta
email: luna_sri@ymail.com, Marita_farid@yahoo.com

ABSTRACT

IAS 50/55 will be applied for financial statements beginning on January 1, 2009. However, there are several obstacles faced by compilers of financial statements, DSAK-IAI decided to change the effective date of the implementation of SFAS 50 and 55 (Revised 2006) to be for periods beginning after January 1, 2010. The purpose of this study was constraints and the impact of the adoption of IAS 50 and 55 on the financial statements of banks. This study was performed to all banks listed in the Indonesian capital market. The total number of companies listed in the stock market some 31 banks. This research was conducted with the observation period 2009 to 2014 then for 6 years is a period of observation, so that data is numbered 186 in the form of financial statements annual report. The results of this study concluded that one of the challenges faced by banks in the implementation of IAS 55 is inadequate historical data held for calculating collective impairment (collective impairment). Besides obstacles in the implementation of SFAS 50, 55 (revised 2006), among others, information systems, accounting policies, the availability of data, human resources, financial statement comparability, availability of data, feeding the data and time reporting.

Keyword: SFAS No. 50 (Revised 2006), SFAS No. 55 (Revised 2006), the impact of SFAS 50 and 55.

ABSTRAK

PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010. Tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui kendala dan dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 pada laporan keuangan perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal sejumlah 31 bank. Penelitian ini dilakukan dengan periode amatan 2009 sd 2014 Maka selama 6 tahun adalah jangka waktu observasi, sehingga datanya berjumlah 186 laporan keuangan dalam bentuk annual report. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (*collective impairment*). Selain itu kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sistem informasi, kebijakan akuntansi, ketersediaan data, sumber daya manusia, komparabilitas laporan keuangan, ketersediaan data, *feeding* data dan waktu pelaporan.

Kata Kunci: PSAK No. 50 (Refisi 2006), PSAK No. 55 (Refisi 2006), dampak penerapan PSAK 50 and 55.

1. PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (PAPI, 2008)

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan acuan standar yang berlaku umum di Indonesia seperti pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), *International Accounting Standard (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS)*, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan dan lain-lain. PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan bagian standar yang diterapkan pada penyusunan laporan keuangan perbankan.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai penerapan dan dampak implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 pada laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dimana penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006), -Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan^{||} dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), -Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran^{||}, berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif yang dimulai. (BRI, 2010). Sehingga pada pelaksanaannya terdapat perbedaan dan dampak yang diakibatkan dari penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 di Laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008) kebijakan akuntansi Umum, kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
 - 2) Mengambarkan substansial ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) Mencakup semua hal yang material

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

- a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan
- c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

2.2 State of the Art

Penelitian, Murdianingrum (2005) sudah melakukan penelitian pendahuluan yaitu dampak analisis pengaruh struktur modal dan tipe kepemimpinan perusahaan terhadap kelengkapan laporan keuangan.

IFRS memiliki karakteristik yang berbeda dengan standar akuntansi yang sebelumnya digunakan. Menurut Suwardjono (2011) bahwa standar akuntansi mempunyai implikasi terhadap kehidupan ekonomik, *business*, dan sosial. Teori akuntansi berperan dalam tahap pemilihan konsep teknik, dan metoda dalam penyusunan standar untuk mencapai tujuan tertentu. Karena akuntansi bersifat utilitarian, praktik akuntansi yang diterapkan harus didasarkan pada analisis kos dan manfaat untuk wilayah (negara) diterapkannya standar tersebut. Dengan kata lain, praktik akuntansi sebagai manifestasi pelaksanaan standar semestinya harus mengarahkan atau membantu ke pencapaian tujuan negara. Di Amerika, ketika menyusun kerangka konseptual, FASB menetapkan tujuan pelaporan keuangan atas dasar kondisi dan lingkungan di Amerika. Kerangka konseptual harus dirancang untuk kepentingan negara, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan dan investor. Oleh karena itu, kerangka konseptual mestinya harus direayasa dengan seksama dalam rangka mencapai tujuan negara.

2.3 Adopsi IFRS

International Accounting Standard (IAS) adalah Standar Akuntansi Internasional untuk pelaporan keuangan yang disusun oleh *International Accounting Standard Committee* (IASC). Sejak 1 April 2001, *International Accounting Standard Board* (IASB) melanjutkan peran IASC dalam penyusunan standar dan mulai menerbitkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Penting untuk membedakan antara adopsi IFRS atau konvergensi IFRS. Sedangkan Konvergensi adalah mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi banyak ditemukan di negara berkembang, (Nobes, 2010). Walaupun bukan merupakan adopsi penuh, konvergensi menunjukkan perbedaan yang minimal dengan IFRS. Perbedaan yang ada biasanya dalam hal waktu penerapan atau sedikit pengecualian dalam pengaturan standar tertentu. Pada kenyataannya beberapa negara akan mengalami kesulitan untuk melakukan adopsi IFRS secara penuh. Kendala yang mungkin dihadapi antara lain perangkat hukum, tata kelola dan juga budaya. Chen, Ding, dan Xu (2009).

Hasil penelitian berkaitan dengan adopsi IFRS untuk negara-negara Asia dilakukan oleh Suryaningsum (2012, 2013) menyatakan bahwa negara-negara yang mengadopsi IFRS memiliki kualitas laporan keuangan yang tidak berbeda dengan kualitas laporan keuangan sebelum dilakukan adopsi. Format dan bentuk saja yang membedakan laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Keberadaan standar akuntansi lokal yang mengadaptasi standar internasional (DSTD) menunjukkan kecenderungan negara tersebut akan mengadopsi IFRS. Keberadaan standar akuntansi lokal yang mengadaptasi internasional tidak dapat selalu menjadi dasar yang kuat bahwa negara tersebut akan mengadopsi IFRS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk seluruh perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada April 2014 ini (saat proposal ini dibuat) adalah sejumlah 31 bank. Penelitian ini dilakukan dengan periode amatan 2009 sd 2014 (tahun 2014 adalah diterbitkannya laporan keuangan tahun 2013). Maka selama 6 tahun adalah jangka waktu observasi, sehingga datanya berjumlah 186 laporan keuangan dalam bentuk annual report. 1 annual report yang diterbitkan perusahaan memiliki jumlah halaman sekitar 300 sd 500 halaman. Sehingga data riset dilakukan terhadap 335.200 sd 670.400 halaman.

4. PEMBAHASAN

Perubahan Mendasar dan Analisis Dampak PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Menurut Bank Mandiri (2010), perubahan mendasar dan analisis dampak PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006):

1. Klasifikasi

Aset keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi *Fair Value Through Profit/Loss* (FVTPL), *Held to Maturity* (HTM), *Available for sale* (AFS) dan *Loan & Receivables*. Kewajiban keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi FVTPL dan *Other Liabilities*. Implikasinya adalah bank-bank harus mereview klasifikasi seluruh instrumen keuangan yang dimiliki per tanggal 1 Januari 2010 sesuai dengan intensi dan kemampuan financial bank, serta berdasarkan karakteristik aset dan kewajiban keuangan dimaksud. Hal ini menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk masing-masing instrumen keuangan tersebut.

2. Effective Interest Rate

Berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), pendapatan bunga dan biaya bunga instrumen keuangan diakui sebesar *effective interest rate* (EIR). Apabila dalam suatu perolehan instrumen keuangan terdapat biaya transaksi dan/ atau *fee* yang terkait langsung (*attributable*) dengan perolehan tersebut, maka EIR instrumen keuangan harus dihitung dengan memasukkan komponen biaya transaksi dan/atau *fee* tersebut. Biaya transaksi dan *fee*, antara lain adalah sebagai berikut: pendapatan provisi kredit, denda/penalti atas opsi pelunasan sebelum jatuh tempo, *fee* kepada karyawan atas aplikasi kredit yang disetujui, biaya hadiah yang diberikan atas setiap aplikasi deposito. Implikasi atau dampaknya yaitu: bank harus mengidentifikasi biaya dan *fee* yang dapat dikategorikan sebagai biaya transaksi, bank harus menentukan tingkat materialitas biaya transaksi dan *fee* yang terkait langsung (*attributable*) yang harus diamortisasi dengan metode EIR.

3. Fair Value

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah kuotasi di pasar yang aktif, yaitu *bid price* untuk aset keuangan dan *ask price* untuk kewajiban keuangan. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Dampak atau implikasinya: bank harus melakukan *mark to market* aset keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL atau AFS dengan menggunakan *bid price* dan kewajiban keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL dengan menggunakan *ask price*, bank perlu menyesuaikan sistem yang dimiliki.

4. Impairment

Perbedaan perhitungan PPA / CKPN:

- PPA berdasarkan PBI : PPA umum wajib di bentuk sebesar 1% dari baki debit.
- PPA khusus wajib dibentuk berdasarkan tingkat kolektibilitas dengan memperhatikan prinsip 3 pilar.

CKPN berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

- Tidak terdapat ketentuan pembentukan PPA umum
- Harus mengidentifikasi adanya bukti objektif penurunan nilai dan melakukan impairment test untuk menentukan kerugian penurunan nilai aset
- Impairment test untuk aset keuangan yang individual signifikan, dilakukan secara individual dan aset keuangan yang tidak individual signifikan dilakukan secara kolektif.

Dampak terhadap Bank Secara Umum pada penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006)

Menurut Bank Mandiri, (2010), dampak terhadap bank secara umum pada penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006):

1. **Laporan Keuangan:** berdampak signifikan pada laporan keuangan perbankan karena terdapat perubahan cara pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.
2. **People / organization:** perlu meningkatkan *awareness* dan pemahaman seluruh organisasi terhadap ketentuan-ketentuan pada PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) melalui sarana training dan sosialisasi, perlu melibatkan hampir seluruh unit kerja karena penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) mempengaruhi hampir seluruh transaksi maupun produk perbankan.
3. **Business Process:** berdampak pada proses bisnis karena perlu penyesuaian prosedur dan kebijakan dalam menentukan nilai wajar, *recognition* dan *derecognition* instrumen keuangan serta perhitungan pencadangan kerugian penurunan nilai.
4. **Policy:** perlu mengidentifikasi dan mengkaji perubahan kebijakan akuntansi serta kebijakan terkait lainnya, sehubungan dengan pemberlakuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), perlu menyesuaikan kebijakan terkait lainnya sesuai perubahan tersebut.
5. **Sistem:** perlu mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan sistem untuk mendukung penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), termasuk identifikasi kebutuhan data, melakukan pengembangan sistem untuk mendukung penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006).

Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) pada Perbankan

Ketentuan transisi atas penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dilaksanakan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman di bawah ini:

1. Perhitungan Suku Bunga Efektif

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

2. Penghentian Pengakuan

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006).

3. Instrumen Keuangan Majemuk

instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).

4. Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).

5. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada awal tanggal 1 Januari 2010.

Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015 (Studi Kasus pada Bank BRI)

No	PSAK Baru	PSAK Lama	Pokok-Pokok Perubahan	Dampak ke BRI
1	PSAK 50 (2014) : Instrumen Keuangan : Penyajian	PSAK 50 (2010) : Instrumen Keuangan : Penyajian	<p>Penyesuaian ruang lingkup mengacu pada PSAK yang telah mengatur secara khusus (contoh : PSAK 68).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman aplikasi atas kriteria saling hapus aset dan liabilitas keuangan. 2. Memberikan pedoman aplikasi atas kriteria penyelesaian neto. 3. Berlaku ketentuan transisi secara retrospektif. 	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan standar yang disyaratkan. Sampai saat ini, BRI telah mengadopsi perlakuan kriteria saling hapus dan penyelesaian neto jika dan hanya jika BRI memiliki kekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan maksud penyelesaian secara neto untuk merealisasi aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.
2	PSAK 55 (2014) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	PSAK 55 (2010) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	<p>Penyesuaian ruang lingkup mengacu pada PSAK yang telah mengatur secara khusus (contoh : PSAK 68).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksi. Mengatur penjelasan mengenai pengukuran reklasifikasi derivatif melekat. Mengatur kualifikasi item lindung nilai, 2. penghentian instrumen lindung nilai, penilaian efektifitas lindung nilai dan periode pengakuan lindung nilai atas arus kas. Berlaku ketentuan transisi secara retrospektif. 	
3	PSAK 60 (2014) : Instrumen Keuangan: Pengungkapan	PSAK 60 (2010) : Instrumen Keuangan: Pengungkapan	<p>Penyesuaian ruang lingkup mengacu pada PSAK yang telah mengatur secara khusus (contoh : PSAK 68)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan bagi entitas yang memenuhi persyaratan saling hapus. 2. Pengungkapan yang disyaratkan untuk penghentian keseluruhan dan sebagian. 3. Berlaku ketentuan transisi secara retrospektif. 	BRI telah melakukan penyesuaian sesuai dengan standar yang disyaratkan, diantaranya peningkatan pengungkapan atas nilai wajar dan risiko likuiditas. Termasuk pula penyesuaian modifikasi ke sistem informasi dan pengendalian internal terkait syarat pengungkapan serta pertimbangan manajemen tentang tingkat signifikansi input dalam pengukuran nilai wajar.

Dampak Penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) Terhadap Perbankan di Indonesia

Dalam Bank Indonesia (2010), pada awalnya PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010 sesuai dengan pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008.

Sebagai entitas yang mayoritas struktur neracanya terdiri dari aset keuangan dan kewajiban keuangan, implementasi PSAK 55 dan 50 akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perbankan dibandingkan entitas pelapor lainnya dengan struktur neraca yang tidak didominasi oleh instrumen keuangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (*collective impairment*). Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan DSAK-IAI dan Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (DSPAP)-IAI memberikan masa transisi khusus yang secara standar akuntansi dimungkinkan. Bagi bank yang belum memiliki data kerugian historis yang cukup dan belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai untuk menentukan besarnya *collective impairment*, maka pembentukan *collective impairment* dapat mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sampai dengan 31 Desember 2011. Adapun bank yang tidak memiliki keterbatasan wajib tetap menerapkan perhitungan *collective impairment* sesuai PSAK 55.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan secara cukup mendasar dalam metode pengukuran dan klasifikasi instrumen keuangan yang berdampak pada perlakuan akuntansi di bank. Klasifikasi instrumen keuangan menjadi Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi yang sebelumnya hanya ada untuk surat berharga, saat ini diterapkan untuk seluruh instrumen keuangan, termasuk kredit.

Tantangan juga dihadapi bank untuk kredit, yang merupakan instrumen keuangan yang signifikan di perbankan. Kredit kemungkinan besar akan masuk dalam kategori Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang (*Loan and Receivables*) yang diukur dengan cara harga perolehan yang diamortisasi (*amortised cost*). Untuk itu, bank perlu melakukan penyesuaian pengukuran dari semula berdasarkan baki debit menjadi berdasarkan *amortised cost*.

Selain itu, penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS belum sepenuhnya mengadopsi kepentingan kehati-hatian perbankan. Cadangan yang dibentuk adalah sebesar selisih antara estimasi arus kas awal dengan estimasi arus kas setelah terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Sementara itu, sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, pembentukan cadangan didasarkan baik pada *incurred loss* maupun *expected loss* sehingga modal bank diharapkan dapat menutup potensi kerugian yang terjadi. Untuk menjembatani hal tersebut, perhitungan cadangan sesuai ketentuan Bank Indonesia akan digunakan dalam konteks perhitungan modal, sementara untuk penyajian laporan keuangan bank tetap menghitung cadangan sesuai PSAK.

Untuk memantau persiapan bank dalam menerapkan PSAK 55, Bank Indonesia telah meminta bank untuk menyampaikan *action plan* baik dalam aspek sumber daya manusia, sistem maupun proses. Selan itu, Bank Indonesia juga telah melakukan *on site visit* ke beberapa bank untuk melihat secara langsung persiapan yang dilakukan oleh bank.

Kendala-kendala Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Beberapa kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Informasi

- a. Dalam proses implementasi sistem IT sesuai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), berdasarkan kesanggupan rekanan, diketahui bahwa pengembangan sistem yang digunakan untuk penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) minimal membutuhkan waktu selama 6 bulan.
 - b. Tidak terdapat bank di Indonesia yang dapat dijadikan benchmark dalam menerapkan sistem IT yang sudah sesuai dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).
 - c. Diperlukan pemahaman yang memadai untuk dapat memastikan bahwa sistem IT yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).
 - d. Untuk mendapatkan hasil perhitungan *Probability of Default* (PD) sesuai *best practice*, harus dikembangkan sistem *risk management* terlebih dahulu agar tidak terjadi duplikasi dalam pengembangan sistem.
- 2. Kebijakan Akuntansi**
- a. Perlu disusun kebijakan akuntansi masing-masing bank yang sesuai dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya..
 - b. Perlu dilakukan simulasi terhadap metodologi yang akan ditetapkan pada kebijakan akuntansi.
- 3. Ketersediaan Data**
- Bank atau perusahaan harus memastikan ketersediaan data untuk melakukan perhitungan-perhitungan sesuai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) sebagai berikut:
- *Effective Interest Rate* (EIR)
Untuk dapat menghitung EIR instrumen kredit diperlukan data, sebagai berikut:
Data estimasi arus kas kontraktual kredit s.d. jatuh tempo (pokok dan bunga), Biaya transaksi dan pendapatan yang teratribusi langsung terhadap perolehan kredit, Jangka waktu kredit (*star date* dan *due date*), Suku bunga kontraktual, Baki debit kredit.
- Apabila data tersebut belum tersedia di sistem, perlu dilakukan *enhancement*
- *Fair Value*
Untuk dapat mengukur nilai wajar instrumen keuangan (*mark to market*), diperlukan data *bid price* untuk aset keuangan dan *ask price* untuk kewajiban keuangan..
 - *Collective Impairment*
Untuk dapat menghitung *Collective Impairment* instrumen kredit diperlukan data historis kredit minimum selama 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:
Data historis kualitas kredit yang tercermin pada rating atau kolektibilitas, Data *carrying value* kredit (nilai tercatat kredit), Data kredit hapus buku, Data *recovery* dari kredit hapus buku, Data *bucket* tunggakan kredit, *Data Loss Identification Period* (LIP).
- Apabila data tersebut belum tersedia di sistem, perlu dilakukan *enhancement*.
- *Individual Impairment*
Untuk dapat menghitung *individual impairment* instrumen kredit diperlukan data sebagai berikut:
Data estimasi arus kas untuk kredit yang secara individual signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai (*discounted cash flow method*), Data nilai pengikatan agunan dan data nilai wajar agunan, termasuk estimasi waktu likuidasi, estimasi biaya-biaya likuidasi serta dokumen legal (*fair value of collateral method*), Data suku bunga kontraktual, Data suku bunga pasar, Data EIR per rekening, Data rating per rekening atau peer debitur, Data *carrying value* kredit (nilai tercatat kredit).
- Untuk memperoleh data tersebut di atas diperlukan waktu dan *effort* yang cukup besar dan apabila data belum tersedia, perlu dilakukan *enhancement*.
- 4. Sumber Daya Manusia**
- Meskipun selama ini telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, namun akibat kompleksitas PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), pemahaman seluruh organisasi masing-masing bank dalam menerapkan PSAK tersebut masih belum cukup memadai.
- 5. Komparabilitas Laporan keuangan**

Perlu dipahami bagaimana pengaruh penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap komparabilitas laporan keuangan yang disusun masing-masing bank, mengingat ruang yang diberikan dalam penetapan kriteria, seperti aset yang termasuk *impaired*, *fee* yang harus diamortisasi dan lain-lain, cukup luas.

6. Kendala-Kendala lain yang Perlu Diperhatikan

- Proses pengumpulan data untuk melakukan perhitungan *loan impairment* memerlukan waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan.
- Belum terdapat peraturan perpajakan yang telah disesuaikan dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

Kendala-kendala Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Disamping harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan publikasi, perbankan diharuskan untuk menyusun Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), dimana terdapat beberapa kendala dalam pelaporan LBU jika menggunakan data hasil penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan data

Dengan belum tersedianya data hasil penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) secara memadai, dapat berakibat pada ketidakakuratan pengisian field pelaporan LBU 2008.

2. Feeding Data

- Sistem feeding data, khususnya yang terkait dengan carrying value loan dan hasil perhitungan loan impairment, baik yang dihitung secara individual maupun yang dihitung secara kolektif ke dalam form LBU 2008 perlu dikembangkan.
- Mengingat penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) masih belum dilakukan secara sistem, maka berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses feeding data untuk dilaporkan dalam format LBU 2008.

3. Waktu pelaporan

Proses penyusunan laporan keuangan lebih lama dikarenakan adanya proses bisnis baru dan masih terdapat proses manual yang dilakukan terkait dengan penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

5. KESIMPULAN

PSAK 50/55 akan diterapkan untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyusun laporan keuangan, DSAK-IAI memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010 sesuai dengan pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam implementasi PSAK 55 adalah belum memadainya data historis yang dimiliki untuk menghitung penurunan nilai secara kolektif (*collective impairment*). Selain itu kendala dalam penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) antara lain sistem informasi, kebijakan akuntansi, ketersediaan data, sumber daya manusia, komparabilitas laporan keuangan, ketersediaan data, *feeding* data dan waktu pelaporan.

6. REFERENSI

- Bank Indonesia. 2010. Dampak Penerapan PSAK 55 (revisi 2006) Terhadap Perbankan di Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan No. 15, September 2010. Bank Indonesia: Jakarta
- Bank Mandiri. 2010. Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006). Diskusi Implementasi PSAK Baru Antara BUMN dan Tim IFRS IAI, Bandung.
- Chen, Ding, Xu. 2009. Convergence of Accounting Standards and Foreign Direct Investment. working paper

- Marita. 2008 Pengaruh Komitmen dan Peran Informasi Manajemen Biaya Dalam Mendukung *Total Quality Management* Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya dan Implikasinya Terhadap Kinerja Manajer (Survei terhadap Manajer Divisi pada BUMN Manufaktur di Indonesia) PDM Dikti
- Marita. 2010 Model Corporate Reporting Supply Chain untuk Sektor Industri energi berdasarkan Karakteristik Negara: Pemetaan dan Komparasi pada Perusahaan-perusahaan Sektor Industri Energi di Kawasan Asia LPPM UPN —Vetranl Yogyakarta
- Marita. 2012 Analisis Kemampuan Karyawan dalam Pemakaian Informasi Berbasis Komputer Dalam Proses Penelitian
- Marita. 2011 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UKM dan UMKM di Wilayah DIY Kadin DIY
- Murdianingrum, Sri Luna. 2005. Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Akuntansi dengan Kecerdasan Emosional. *Media Akuntansi*.
- Murdianingrum, Sri Luna. 2005. Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Tipe Kepemimpinan Perusahaan terhadap Kelengkapan L/K. *Jurnal Ekonomi FE UKI*
- Nobes, C. Parker, R. (2010). *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, 11th edition. England 21
- Suryaningsum, Sri. 2012. The Impact of IFRS Adoption on Earnings Management. AAAA Proceeding. Kyoto University.
- Suryaningsum, Sri. 2013. Dampak Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba serta Konsekuensinya Terhadap Daya Deteksi Auditor. Disertasi UGM.
- www.IASplus.com, official website
- www.pwc.com, IFRS adoption by country
- www.bi.go.id

PENERAPAN IFRS NOMOR 6 PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Noto Pamungkas, Ruserlistyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
e-mail: notopamungkas@yahoo.co.id; herlissantosa@yahoo.com

ABSTRACT

IFRS number 6 on exploration and evaluation of mineral resources is a new phase in the general mining accounting treatment that can increase the relevance and reliability of financial statements. However, the application of IFRS 6 numbers is done directly by adopting PSAK number 64, so the lack of in-depth study on the application of IFRS number 6 in particular coal mining company in Indonesia.

In this study proves that the IFRS number 6 is not ready to be applied in Indonesia because it is less wise and relevant to mining conditions in Indonesia, from 15 coal companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period from 2013 to 2015 there are new companies that apply IFRS 1 number 6. thus the need for in-depth study on the application of IFRS number 6.

Keywords: *IFRS 6, IAS 64, exploration and evaluation, mining*

ABSTRAK

IFRS nomor 6 mengenai eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral merupakan sebuah fase baru dalam perlakuan akuntansi pertambangan umum yang dapat meningkatkan relevansi dan realibilitas laporan keuangan. Namun, penerapan IFRS nomor 6 ini dilakukan langsung dengan mengadopsi PSAK nomor 64, sehingga kurang adanya kajian yang mendalam mengenai penerapan IFRS nomor 6 pada perusahaan pertambangan khususnya batubara yang ada di Indonesia.

Pada penelitian ini membuktikan bahwa IFRS nomor 6 belum siap diterapkan di Indonesia karena dirasa kurang bijak dan relevan dengan kondisi pertambangan di Indonesia, dari 15 perusahaan batubara yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015 baru ada 1 perusahaan yang menerapkan IFRS nomor 6. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam mengenai penerapan IFRS nomor 6.

Kata kunci: IFRS 6, PSAK 64, eksplorasi dan evaluasi, pertambangan

1. PENDAHULUAN

Perusahaan pertambangan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Di berbagai basis data pun biasanya diklasifikasikan berbeda. Di Indonesia, kedua jenis pertambangan ini menduduki peringkat atas untuk hasil produksinya. Karena itu, dibutuhkanlah suatu metode akuntansi yang berbeda. Hal ini disebabkan industri

pertambangan memiliki beberapa aktivitas spesifik, yaitu aktivitas eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup.

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan salah satu standar akuntansi yang berlaku secara internasional dan telah digunakan diberbagai perusahaan di negara yang berbeda-beda. Adanya konvergensi IFRS yang berlaku di suatu perusahaan, khususnya di Indonesia sendiri, maka sedikit banyaknya diduga akan mempengaruhi ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan pada berbagai perusahaan terkait dan juga para pemangku kepentingan (Robert, 2015).

Penerapan IFRS dapat menunjang terwujudnya empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat relevansi yang baik sehingga informasi yang disajikan harus tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya apabila terdapat penundaan dalam pelaporannya (Hilmi dan Ali dalam Ariyani dan Budiharta, 2014).

Penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 33 revisi tahun 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 64 (IFRS nomor 6 mengenai eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral) tahun 2011 merupakan sebuah fase baru dalam perlakuan akuntansi pertambangan umum. Hal ini disebabkan pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan *principle based* dari pada *rule based*. Perusahaan-perusahaan tambang diharapkan sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 33 revisi tahun 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 64 tahun 2011 untuk kegiatan eksplorasi dan pengupasan lapisan tanah dalam pengakuan aset sehingga meningkatkan relevansi dan realibilitas laporan keuangan.

Penerapan PSAK nomor 64 langsung mengadopsi IFRS nomor 6 tanpa adanya kajian yang lebih mendalam lagi apakah relevan dengan kondisi pertambangan di Indonesia. Karena jika ternyata kurang relevan tidak dapat menunjang relevansi dan realibilitas laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standard pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh *Internasional Accounting Standards Board (IASB)*. IASB merupakan sebuah lembaga yang bertujuan mengembangkan standard akuntansi -umum di seluruh dunia. Dengan adanya standar yang berlaku secara internasional ini perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dapat dibandingkan serta dapat digunakan oleh investor di pasar modal global serta *stakeholder* lain.

Menurut Stovall dalam Istiningrum (2012), adanya konvergensi standar akuntansi yaitu IFRS dengan perencanaan konversi yang tepat sebelumnya oleh semua organisasi dan lembaga yang dipengaruhi oleh keputusan ini akan dapat meningkatkan komparabilitas laporan keuangan secara internasional, meningkatkan akses ke pasar internasional, mengurangi konvergensi laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun standar IFRS yang didasarkan pada *principle based* ini membuat penentuan standar yang digunakan menyesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan dan memerlukan *professional judgement*, sehingga membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi oleh seorang akuntan yang menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dan juga auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Pelaksanaan penerapan IFRS ke SAK di Indonesia sampai saat ini masih harus dilakukan secara bertahap atau dengan kata lain belum dapat diberlakukan di seluruh perusahaan khususnya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri karena berbagai ketentuan dan juga aturan hukum yang mengikat di Indonesia.

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi nasional bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid (Petreski, 2006). Penerapan ini juga bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Sejak tahun 2008 Indonesia mulai melakukan konvergensi IFRS sebagai wujud kesepakatan pemerintah Indonesia atas hasil pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC. Salah satu standar akuntansi keuangan yang dikonvergensi terhadap IFRS adalah standar mengenai minyak dan gas bumi. Oleh karena itulah pada 1 Januari 2012 PSAK No. 29 (revisi 1994) yang berlandaskan US GAAP dicabut dan diganti dengan PSAK No. 64 (2011): Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral yang telah mengadopsi *IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*.

IFRS 6 eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral memiliki efek yang memungkinkan entitas mengadopsi standar untuk pertama kalinya untuk menggunakan kebijakan akuntansi untuk aset eksplorasi dan evaluasi yang diterapkan sebelum mengadopsi SAK. Hal ini juga memodifikasi pengujian penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi dengan memperkenalkan indikator penurunan nilai yang berbeda dan memungkinkan nilai tercatat untuk diuji pada tingkat agregat (tidak lebih besar dari segmen).

Dalam IFRS 6 yang mengatur bidang usaha pertambangan batubara, hanya diatur mengenai kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Biaya awal sebelum kegiatan eksplorasi dan evaluasi (*pra-exploration cost*) tidak diatur secara spesifik didalam IFRS. Pengeluaran perusahaan atas aset eksplorasi dan evaluasi dicatat sebesar biaya perolehannya (*cost model*) atau sesuai dengan harga wajar (*revaluation model*). Perusahaan melakukan penelitian dan penyajian atas aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral batubara dengan cara mengklasifikasikan aset tersebut sebagai aset berwujud atau aset tak berwujud sesuai dengan sifat aset yang diperoleh dan menerakan klarifikasi tersebut secara konsisten (Pamungkas, Ruserlistyani, 2015).

Hal-hal yang menyangkut didalam IFRS 6 antara lain mengenai biaya pengembangan. Biaya pengembangan sumber daya mineral merupakan biaya yang dikeluarkan setelah cadangan terbukti sampai dengan dimulainya aktivitas produksi. Hal kedua yang terdapat dalam IFRS 6 yaitu mengenai biaya yang dikeluarkan sebelum eksplorasi dan evaluasi antara lain termasuk biaya perizinan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi (Pamungkas, Ruserlistyani, 2015).

Dalam Rosdini (2014), *International Accounting Standard Board (IASB)* menerbitkan IFRS 6 mengenai aktivitas eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan dan energi pada tahun 2004, namun baru efektif diberlakukan pada tahun 2006. Alasan penyusunan IFRS 6 adalah:

- a. Tidak ada IFRS yang secara khusus mengatur mengenai akuntansi untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi. IAS 38 dan IAS 16 tidak menyebutkan secara khusus perlakuan akuntansi untuk aktivitas tersebut.
- b. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai bagaimana pengeluaran eksplorasi dan evaluasi seharusnya diberlakukan dalam IFRS.
- c. Berbagai pembuat standar akuntansi menetapkan praktik akuntansi untuk aset eksplorasi dan evaluasi yang beragam dan terkadang berbeda dari praktik industri sehingga memerlukan perhatian untuk diseragamkan.

- d. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi bagientitas yang terkait dengan pertambangan adalah signifikan.
- e. Banyaknya entitas yang terlibat dalam pengeluaran eksplorasi dan evaluasi.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam studi ini karena evaluasi penerapan IFRS nomor 6 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang akan lebih dipahami dengan cara membandingkan kebijakan perusahaan dan kegiatan operasionalnya terkait dengan IFRS nomor 6 tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah biaya eksplorasi dan evaluasi pada perusahaan-perusahaan tambang yang berdasarkan status sudah mengimplementasikan IFRS nomor 6.

Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data mengenai laporan keuangan perusahaan, khususnya *annual report* yang berisi kebijakan akuntansi yang terkait dengan objek penelitian seperti *Mutasi Asset Under Construction*, *Reklasifikasi Biaya Pengeboran*, *Penilaian Biaya Geologi & Geofisika*, dan *Production Sharing Contract Valuation*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang di gunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan pertambangan batubara pada periode tahun 2013 sampai 2015. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan batubara pada periode 2013-2015:

Tabel
Kebijakan Akuntansi Perusahaan Batubara Periode 2013-2015

No	Nama Perusahaan	2013	2014	2015
1	ADRO (Adaro Energy Tbk)	PSAK No. 38 PSAK No. 51 PSAK No. 65 PSAK No. 67 PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 33	PSAK No. 60 PSAK No. 44 PSAK No. 66 PSAK No. 68 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 1 PSAK No. 60 PSAK No. 66 PSAK No. 67 PSAK No. 33 PSAK No. 14	PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 66 PSAK No. 69 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 14
2	ARII (Atlas Resources Tbk)	PSAK No. 1 PSAK No. 55	PSAK No. 1 PSAK No. 55 PSAK No. 14	PSAK No. 60 PSAK No. 24 PSAK No. 67 PSAK No. 7 PSAK No. 55 PSAK No. 4 PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 66 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 14 PSAK No. 1 PSAK No. 46 PSAK No. 50
3	BSSR (Baramulti Suksessarana Tbk)	PSAK No. 38 PSAK No. 22 PSAK No. 48 PSAK No. 5	PSAK No. 7 PSAK No. 48 PSAK No. 33 PSAK No. 24 PSAK No. 5	PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 66 PSAK No. 68 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 67
4	BYAN (Bayan)	PSAK No. 33 PSAK No. 60	PSAK No. 38 PSAK No. 65	PSAK No. 65 PSAK No. 48 PSAK No. 1 PSAK No. 48 PSAK No. 46 PSAK No. 24

	Resources Tbk)	PSAK No. 66 PSAK No. 68 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 7	PSAK No. 67 PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 55	PSAK No. 55 PSAK No. 10 PSAK No. 7	PSAK No. 65 PSAK No. 4 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 68 PSAK No. 7	PSAK No. 67 PSAK No. 15 PSAK No. 55 PSAK No. 66 PSAK No. 10 PSAK No. 57	
5	DEWA (Darma Henwa Tbk)	PSAK No. 38 PSAK No. 24 PSAK No. 60 PSAK No. 10 PSAK No. 55 PSAK No. 57		PSAK No. 65 PSAK No. 67 PSAK No. 24 PSAK No. 60 PSAK No. 57	PSAK No. 66 PSAK No. 68 PSAK No. 10 PSAK No. 55	PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 66 PSAK No. 68	PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 67 PSAK No. 57
6	DOID (Delta Dunia Makmur Tbk)	PSAK No. 53 PSAK No. 7 PSAK No. 25 PSAK No. 24 PSAK No. 55 PSAK No. 57 PSAK No. 60 PSAK No. 33		PSAK No. 55 PSAK No. 7 PSAK No. 57 PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 48 PSAK No. 65 PSAK No. 67	PSAK No. 53 PSAK No. 24 PSAK No. 60 PSAK No. 4 PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 66 PSAK No. 68	PSAK No. 24 PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 48 PSAK No. 60 PSAK No. 66 PSAK No. 68 PSAK No. 57	
7	GEMS (Golden Energy Mines Tbk)	PSAK No. 10 PSAK No. 22 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 30 PSAK No. 48 PSAK No. 24 PSAK No. 56 PSAK No. 5	PSAK No. 4 PSAK No. 7 PSAK No. 55 PSAK No. 16 PSAK No. 64 PSAK No. 23 PSAK No. 46 PSAK No. 57 PSAK No. 33	PSAK No. 10 PSAK No. 22 PSAK No. 55 PSAK No. 16 PSAK No. 64 PSAK No. 23 PSAK No. 46 PSAK No. 57 PSAK No. 33	PSAK No. 4 PSAK No. 7 PSAK No. 60 PSAK No. 30 PSAK No. 48 PSAK No. 24 PSAK No. 56 PSAK No. 5 PSAK No. 14	PSAK No. 55 PSAK No. 1 PSAK No. 50 PSAK No. 48 PSAK No. 24 PSAK No. 14	PSAK No. 10 PSAK No. 65 PSAK No. 60 PSAK No. 46 PSAK No. 7 PSAK No. 22
8	HRUM (Harum Energy Tbk)	PSAK No. 10 PSAK No. 38 PSAK No. 60 PSAK No. 55 PSAK No. 58 PSAK No. 48		PSAK No. 29 PSAK No. 1 PSAK No. 4 PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 66 PSAK No. 68	PSAK No. 33 PSAK No. 24 PSAK No. 15 PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 67 PSAK No. 58	PSAK No. 1 PSAK No. 46 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 67 PSAK No. 19 PSAK No. 53 PSAK No. 14 PSAK No. 55	PSAK No. 24 PSAK No. 13 PSAK No. 15 PSAK No. 65 PSAK No. 16 PSAK No. 66 PSAK No. 30 PSAK No. 48 PSAK No. 58
9	ITMG (Indo Tambangraya Megah Tbk)	PSAK No. 33 PSAK No. 38 PSAK No. 60 PSAK No. 51		PSAK No. 33 PSAK No. 60 PSAK No. 51		PSAK No. 24 PSAK No. 60 PSAK No. 1	
10	KKGI (Resource Alam Indonesia)	PSAK No. 22 PSAK No. 56 PSAK No. 57 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 66 PSAK No. 68	PSAK No. 7 PSAK No. 55 PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 65 PSAK No. 67	PSAK No. 22 PSAK No. 57 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 66 PSAK No. 15 PSAK No. 67	PSAK No. 55 PSAK No. 1 PSAK No. 15 PSAK No. 65 PSAK No. 4 PSAK No. 24 PSAK No. 68	PSAK No. 22 PSAK No. 24 PSAK No. 38 PSAK No. 55 PSAK No. 57	
11	MYOH (Samindo Resources Tbk)	PSAK No. 50 PSAK No. 55 PSAK No. 26 PSAK No. 38 PSAK No. 5	PSAK No. 60 PSAK No. 7 PSAK No. 24 PSAK No. 57	PSAK No. 55 PSAK No. 38 PSAK No. 22 PSAK No. 7		PSAK No. 1 PSAK No. 4 PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 67 PSAK No. 7	PSAK No. 24 PSAK No. 15 PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 10
12	PKPK (Perdana)	PSAK No. 38 PSAK No. 60		PSAK No. 38 PSAK No. 60		PSAK No. 1 PSAK No. 4	PSAK No. 24 PSAK No. 15

	Karya Perkasa Tbk)	PSAK No. 51 PSAK No. 55 PSAK No. 4 PSAK No. 5	PSAK No. 51 PSAK No. 55 PSAK No. 4 PSAK No. 5	PSAK No. 46 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 67 PSAK No. 7 PSAK No. 66	PSAK No. 48 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 13
13	PTBA (Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk)	PSAK No. 51 PSAK No. 38 PSAK No. 60	PSAK No. 33	PSAK No. 24 PSAK No. 46 PSAK No. 55 PSAK No. 7	PSAK No. 1 PSAK No. 67 PSAK No. 66 PSAK No. 57
14	PTRO (Petrosea Tbk)	PSAK No. 38 PSAK No. 60 PSAK No. 68 PSAK No. 55	PSAK No. 1 PSAK No. 4 PSAK No. 46 PSAK No. 55 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 14 PSAK No. 48	PSAK No. 24 PSAK No. 15 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 67 PSAK No. 23 PSAK No. 13	PSAK No. 1 PSAK No. 24 PSAK No. 15 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 67 PSAK No. 30 PSAK No. 58 PSAK No. 48
15	TOBA (Toba Bara Sejahtera Tbk)	PSAK No. 1 PSAK No. 4 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 14 PSAK No. 48 PSAK No. 7	PSAK No. 24 PSAK No. 55 PSAK No. 67 PSAK No. 22 PSAK No. 16 PSAK No. 38	PSAK No. 1 PSAK No. 4 PSAK No. 65 PSAK No. 68 PSAK No. 14 PSAK No. 48 PSAK No. 7 PSAK No. 50 PSAK No. 66	PSAK No. 24 PSAK No. 55 PSAK No. 67 PSAK No. 22 PSAK No. 14 PSAK No. 7 PSAK No. 50 PSAK No. 60 PSAK No. 27

Sumber: www.idx.co.id

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (*area of interest*) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset takberwujud.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009) Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke -Tambang dalam pengembangan pada akun -Aset pertambangan setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

Pengeluaran untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi pada *area* yang bersangkutan, dikapitalisasi ke -Tambang dalam pengembangan sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pada saat tambang dalam pengembangan diselesaikan dan tahap produksi dimulai, -Tambang dalam pengembangan ditransfer ke -Tambang pada Tahap Produktif pada akun -Aset Pertambangan, yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai. Deplesi tambang pada tahap produksi adalah berdasarkan metode unit produksi sejak daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya PKP2B atau IUP.

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang. Jika rasio pengupasan tanah aktual melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut dikapitalisasi sebagai pengupasan tanah ditanggung sebagai bagian dari aset pertambangan, secara kolektif, aset-aset ini merefleksikan investasi gabungan pada unit penghasil kas yang relevan, yang diuji untuk penurunan nilai bila kejadian dan kondisi mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan.

Penerapan IFRS nomor 6 sebenarnya mempunyai dampak yang besar terhadap perusahaan, namun banyak perusahaan yang belum menerapkan kebijakan akuntansi tersebut.

Pada penelitian Pamungkas, Ruserlistyani (2015) juga menghasilkan temuan yang sama, bahwa perusahaan minyak dan gas masih banyak yang belum menerapkan IFRS nomor 6 seperti hasil yang didapatkan saat ini pada perusahaan batubara. Kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* dirasa kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Mengingat adanya karakteristik eksplorasi yang berbeda pada masing-masing industri pertambangan dan migas di Indonesia. Terlebih lagi, PSAK 64 merupakan pengganti standar akuntansi sebelumnya yang telah dirasa cukup komprehensif mewakili masing-masing industri pertambangan dan migas, yaitu pada PSAK 29 dan PSAK 33.

Dengan adanya pencabutan PSAK 29 dapat menunjukkan bahwa PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral* dirasa masih kurang bijak karena tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk minyak dan gas bumi dan pertambangan umum.

5. PENUTUP

IFRS 6 mengenai eksplorasi dan evaluasi, mensyaratkan pengungkapan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, termasuk kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi jumlah aset, kewajiban, pendapatan dan biaya operasi dan arus kas yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral investasi.

Dengan adanya eksplorasi dan evaluasi akan menambah adanya aset eksplorasi dan evaluasi perusahaan, sehingga eksplorasi dan evaluasi sangat berpengaruh dalam laporan keuangan maupun kondisi perusahaan. Namun dengan penelitian ini membuktikan bahwa IFRS nomor 6 belum siap diterapkan di Indonesia karena dirasa kurang bijak dan relevan dengan kondisi pertambangan di Indonesia, dari 15 perusahaan batubara yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015 baru ada 1 perusahaan yang menerapkan IFRS nomor 6. Hasil yang diperoleh ini sama seperti hasil penelitian Pamungkas, Ruserlistyani (2015) mengenai penerapan IFRS nomor 6 pada perusahaan minyak dan gas.

Pada perusahaan Golden Energy Mines Tbk itupun hanya menerapkan IFRS nomor 6 pada periode 2013 dan 2014, pada periode 2015 IFRS nomor 6 sudah tidak diterapkan lagi. Hal tersebut sangat membuktikan bahwa IFRS nomor 6 belum siap diterapkan di Indonesia.

Sehingga dalam adopsi IFRS secara penuh sebaiknya penerapan adopsi standar akuntansi dilakukan setelah adanya kajian yang mendalam mengenai suatu standar. Karena dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan pertambangan yang belum siap untuk menerapkan IFRS nomor 6, terbukti dengan belum diterapkannya IFRS nomor 6 pada laporan keuangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustine. (2013). *Perbandingan Standar Akuntansi Atas Pertambangan Batubara Antara FASB, IFRS, dan PSAK*.
- Ball, R. (2006). International financial reporting standards (IFRS): Pros and cons for investors. *Accounting and Business Research*, International Accounting Policy Forum, 5-27.
- Barth, M.E., Landsman, W.R., & Land, M.H. (2008). International accounting standards and accounting quality. *Journal of Accounting Research* 46:467-498.
- Barth, M.E., Landsman, W.R., Lang, M., & Williams C. (2006). Accounting quality: International accounting standards and US GAAP. Working paper, University of North Carolina and Stanford University.
- Chen, KH; Shimerda, TA, 1981,||An Empirical Analysis of Useful Financial Ratio,|| *Financial Management*. pp.51-60.
- Christensen, H.B., Lee, E., & Walker M., (2008). Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption? AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1013054>

- Daske, H. 2006. Economic Benefits of Adopting IFRS or US-GAAP – Have the Expected Costs of Equity Capital Really Decreased? *Journal of Business, Finance, and Accounting* 33: 329-373.
- Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi R. (2007). Adopting a label: Heterogeneity in the economic consequences of IFRS adoption, Working paper, University of Pennsylvania and University of Chicago.
- Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi R. (2008). Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences. *Journal of Accounting Research*, 46, 1085-1142.
- Foster, G., 1986, *Financial Statement Analysis*. Prentice-Hall International Edition, Second Edition.
- Gordon, E.A., B.N. Jorgensen, and C.L. Linthicum. 2008. Could IFRS Replace US GAAP? A Comparison of Earnings Attributes and Informativeness in the US Market. Working paper.
- Hail, L., C. Leuz, and P. Wysocki. 2009. Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the United States: An Analysis of Economic and Policy Factors. Working paper, University of Pennsylvania.
- <http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs>
- International Accounting Standards Board. 2010. The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010. IASB, London.
- Pamungkas, Ruserlistyani. (2015). Penerapan IFRS 6 dalam PSAK 64 pada Perusahaan Tambang. *Journal of Economic & Social*.
- Pamungkas, Ruserlistyani. (2016). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay untuk Perusahaan Tambang*. Seminar Internasional dalam SSBRN Symposium 2016 di Bali.
- Riveta, Oksida. (2014). *Implementasi PSAK No. 64 Tentang Perlakuan Akuntansi Biaya Eksplorasi dan Evaluasi*.
- Rosdini, Dini. (2014). *Dampak Penerapan IFRS 6 terhadap Konservatisme pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di Australia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Schipper, K. (2005). The introduction of international accounting standards in Europe: Implications for international convergence. *European Accounting Review*, 4,1-25.
- Tendeloo Van, B., & Vanstraelen, B. (2005). Earnings management under German GAAP versus IFRS. *European Accounting Review*, 14, 155-180.
- www.idx.co.id

Media Komunikasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung berbasis SMS Gateway

Oleh

Puji Lestari, Sari Bahagiarti, Eko Teguh Paripurna

UPN Veteran Yogyakarta SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283, Indonesia

Muhammad Amrun

Combine Resource Institution Yogyakarta, Jalan KH Ali Maksum 183 Sewon Bantul, Yogyakarta 55188, Indonesia

Abstract

Various problems disaster in Indonesia has been growing national awareness of the importance disaster risk reduction, especially the eruption of Mount Sinabung. This study aims to enhance communication model via SMS Gateways disasteras disaster mitigation at the local government BPBDs Karo district of North Sumatra. This study used a qualitative approach by data collection techniques of observation, interviews, and a Focus Group Discussion (FGD) in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Karo, Office of Communications and Information and around the disaster site and the displaced victims of Sinabung.. Data analysis technique is using Spreadley data analysis model. The results showed that the SMS Gateway program plays an important role as an EWS (Early Warning System), also have a role in spreading all kinds of information both pre-disaster, disaster relief and post-disaster can be easily and quickly done. In facts, the previous socialization did not deliver the result as expected. The parties that became operator SMS Gateway did not run the role that has been agreed as of SMS Gateway could not functionate optimally. There are several recommendations were issued, one of which was that the manager was moved from BPBDs to the Department of Communications and Informatics. Further assistance program is conducted by the UNDP through the Village Information System.

Keyword: SMS Gateway, disaster communication, BPBD Karo

Abstrak

Berbagai persoalan bencana di Indonesia telah menumbuhkan kesadaran nasional tentang pentingnya pengurangan resiko bencana khususnya erupsi Gunung Sinabung. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnaan model komunikasi bencana melalui SMS Gateways untuk mitigasi bencana pada BPBD Pemda Kabupaten Karo Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Dinas Komunikasi dan Informasi serta di sekitar lokasi bencana dan pengungsi korban Sinabung. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Spreadley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SMS Gateway selain berperan penting sebagai EWS (*Early Warning System*), juga berperan dalam penyebaran segala macam informasi baik pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Hanya faktanya, sosialisasi yang dilakukan pada tahun pertama belum memberikan hasil sesuai dengan diharapkan. Pihak-pihak yang menjadi operator SMS

Gateway tidak menjalankan peran sesuai dengan yang sudah disepakati sehingga SMS Gateway tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, salah satunya ialah bahwa pengelola dipindahkan dari BPBD ke Dinas Kominfo. Selanjutnya pendampingan program ini dilakukan oleh UNDP melalui Sistem Informasi Desa.

Kata Kunci: SMS Gateway, komunikasi bencana, BPBD Karo, Gunung Sinabung

Pendahuluan

Gunung Sinabung terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Gunung ini sudah lama tidak aktif (dari "*Carbon Dating*" diketahui aktivitas awan panas terjadi pada 1200 tahun yang lalu (Agus Solihin, 2014). Gunung ini meletus pada 27 Agustus 2010 dan 2013-2014, 2015 sampai awal tahun 2016 masih menyemburkan awan panas. Terakhir, pada 21 Mei 2016, Gunung Sinabung kembali meletus dengan mengeluarkan awan panas. Pemantauan secara intensif masih terus dilakukan, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman aktivitas erupsi G. Sinabung juga harus tetap dilakukan secara intensif.

Berbagai persoalan bencana di Indonesia telah menumbuhkan kesadaran nasional tentang pentingnya pengurangan resiko bencana (Hokao and Daungthima, 2013), Isu manajemen bencana menjadi salah satu dari sembilan prioritas pembangunan nasional pada 2010-2014, diarahkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian tentang komunikasi bencana sangat dibutuhkan terutama untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana melalui mitigasi bencana. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengantisipasi berbagai hal buruk yang akan terjadi didukung dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Penguatan masyarakat dalam pengelolaan mitigasi bencana alam sangat diperlukan, seperti pengelolaan informasi bencana, proses evakuasi, proses pengungsian, dapur umum, pengelolaan dana bantuan untuk pengungsi, dan lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **penyempurnaan** model komunikasi bencana berbasis masyarakat dengan SMS gateway untuk mengatasi bencana Gunung Sinabung Kab. Karo Sumatera Utara? Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menyempurnakan model komunikasi bencana melalui SMS Gateways untuk mitigasi bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karo yang terancam bencana Gunung Sinabung, khususnya masyarakat sekitar Sinabung, serta Pemda Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional dengan urgensi dapat **mengatasi masalah strategis berskala nasional terkait membentuk masyarakat tangguh bencana.**

Kajian Literatur

Kajian komunikasi bencana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain; Puji Lestari, (2007); Badri, Muhamad (2008); Nugroho (2008); Puji Lestari, Susilastuti, Retno Hendariningrum (2009); Ramli (2010), Junaedi, Fajar (2011), Ratna Noviani (2012), dan Hidayat (2012), Puji Lestari, Agung Prabowo dan Arif Wibawa (2012). Temuan hasil penelitian sebelumnya (2014) tentang model komunikasi bencana berbasis masyarakat untuk mitigasi bencana Gunung Sinabung di antaranya sebagai berikut; (1) Di kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana: Gunung berapi Sinabung (meletus th 2010, 2013, 2014 sampai artikel ini ditulis 2016 masih sering meletus, (2) Pada saat bencana meletusnya Gunung Sinabung 2010, 2013-2016 manajemen

komunikasi bencana saat tanggap darurat belum terkoordinasi dengan baik, antara lain penyebabnya adalah; belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) Manajemen Komunikasi Bencana yang dijadikan pedoman pelaksanaan penanganan tanggap darurat. (3) Sistem informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya masih ditemui banyak kendala, sumbatan informasi, akibatnya penanganan korban kurang optimal. (4) Program SMS Gateway sudah dirancang dan kerja sama dengan BPBD Karo dan pihak terkait bencana Sinabung. (5) Berkaitan dengan temuan di atas, perlu adanya tindak lanjut, guna penyempurnaan sms gateway. Mitigasi bencana sebagai wadah komunikasi antara pemda dengan warga masyarakat, guna memperlancar komunikasi dan untuk mengantisipasi bila terjadi bencana sewaktu-waktu. Sistem Peringatan Dini menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Strategi Komunikasi Kelompok (Pemda, masyarakat, relawan) perlu disempurnakan sesuai kemanafaatannya.

Penelitian ini juga merujuk pada teori informasi organisasi (West dan Turner 2008: 339-349) yang memiliki sejumlah asumsi dasar, yaitu : (1) Organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan mereka. (2) Informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang dimaksud di sini adalah ambiguitas dalam hal informasi yang diterima oleh organisasi. (3) Organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Dalam upaya mengurangi ambiguitas tersebut, organisasi mulai melakukan aktivitas kerja sama untuk membuat informasi yang diterima dapat dipahami dengan baik. Bencana Gunung Sinabung sangat terkait dengan ambiguitas informasi. Guna mengurangi kekacauan informasi, organisasi dalam hal ini BPBD Karo mengupayakan agar informasi tentang bencana Gunung Sinabung dapat dikelola secara efektif . Program SMS Gateway Sinabung merupakan salah satu media alternatif memperlancar informasi pra, saat, dan pascabencana Sinabung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat pengembangan penelitian sebelumnya yaitu model komunikasi bencana Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara yang meletus tahun 2010 sampai sekarang masih aktif. Peneliti melakukan penyempurnaan model komunikasi bencana berbasis masyarakat untuk mitigasi bencana gunung Sinabung melalui TTG SMS Gateway dan SOP Komunikasi bencana.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan *focus Group Discussion* (FGD). Observasi dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Dinas Komunikasi dan Informasi serta di sekitar lokasi bencana dan pengungsi korban Sinabung. Wawancara dan FGD dilaksanakan bersama aparat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dalam mengatasi bencana diantaranya, Bupati, Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Spreadley (1980) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis sebelum ke lapangan. Hasil studi pendahuluan data sekunder untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data selama di lapangan. Peneliti melakukan analisis data bersamaan dengan melakukan observasi dan wawancara. Bilamana peneliti merasa belum cukup terpenuhi dengan jawaban informan, peneliti melanjutkan pertanyaan hingga data yang didapatkan valid.

3. Analisis data selesai dari lapangan. Beberapa langkah dilakukan pada tahap ini, antara lain:
 - Analisis domain yaitu memberikan gambaran umum dan menyeluruh dari objek panel.
 - Analisis taksonomi yaitu penjabarannya serinci dari analisis domain melalui observasi terfokus.
 - Analisis komponensial yaitu mencari spesifik pada setiap detail struktur internal, dan
 - Analisis tema kultural yaitu mencari hubungan antar data yang hasilnya berupa temuan substantif dan formal.Hasil analisis data disusun menjadi laporan penelitian, dipresentasikan dalam seminar dan ditulis sebagai artikel jurnal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tentang manajemen komunikasi bencana merupakan penelitian lanjutan hibah Stranas sejak tahun 2014, hasil penelitian pada saat itu menemukan model komunikasi bencana Sinabung melalui program SMS Gateway Sinabung. Pada tahun 2015 UPN Yogyakarta dan Combine telah bekerja sama membangun sistem informasi peringatan dini untuk Sinabung. Sistem informasi itu berupa SMS Gateway. Sistem ini dijadikan rujukan juga untuk menjadi EWS. SMS Gateway Sinabung saat ini sudah ada dan bisa digunakan. Pengelolaan dilakukan bersama antara Combine, UPN –Veteran Yogyakarta dan BPBD dan Kominfo Kabupaten Karo. Combine sebagai pihak yang membuatkan dan server SMS. UPN –Veteran Yogyakarta menjadi fasilitator terkait pembangunan dan implementasi SMS Gateway. Sedangkan BPBD Kabupaten Karo menjadi operator dan Dinas Kominfo memberikan suport untuk pengelolaan secara teknis dan server. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk program SMS Gateway diantaranya:

1. Diskusi skema sistem informasi untuk peningkatan pengetahuan, penyampaian dan penyebarluasan informasi peringatan dini sinabung, akhirnya SMS Gateway menjadi kesepakatan sistem yang akan digunakan.
2. Pembangunan SMS Gateway untuk peringatan dini Sinabung.
3. Melakukan uji coba sistem agar sesuai dengan yang diharapkan.
4. Memfinalkan SMS Gateway dan membuat panduan untuk penggunaan.
5. Melakukan sosialisasi dan Ujicoba SMS Gateway dengan BPBD Kabupaten Karo bersama lembaga terkait yang tergerak dalam kerja – kerja penanggulangan maupun pengurangan risiko bencana erupsi gunung Sinabung.
6. Melakukan diskusi untuk pembagian peran kepada masing – masing lembaga yang menjadi operator SMS Gateway.
7. Pembuatan SOP pengelolaan SMS Gateway.

Kegiatan sosialisasi, uji coba dan diskusi pembagian peran program ini dilaksanakan pada bulan 22 – 23 April 2015 di ruang rapat BPBD Kabupaten Karo. Kegiatan itu juga dihadiri oleh asisten bupati Karo dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang bekerja untuk melakukan penanganan erupsi gunung Sinabung. Pada kesempatan tersebut, sistem diujicoba, dan hasilnya sesuai yang diharapkan dimana alur penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait gunung sinabung dapat dengan mudah dilakukan.

Dengan adanya program SMS Gateway dan penyusunan pengelola yang sudah disepakati, diharapkan segala macam informasi baik pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana dapat dengan mudah dan cepat dilakukan, sehingga masyarakat luas dengan mudah mendapatkan informasi terkini maupun perkembangan informasi yang terjadi karena gunung Sinabung. Tetapi faktanya, sosialisasi yang dilakukan pada kali pertama belum memberikan

hasil sesuai dengan diharapkan. Pihak-pihak yang menjadi operator SMS Gateway tidak menjalankan peran sesuai dengan yang sudah disepakati. Hal ini menyebabkan SMS Gateway tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya informasi yang disampaikan melalui sistem SMS Gateway. Bahkan nomor yang digunakan untuk nomor center akhirnya mati dan harus berganti nomor. Nomor yang sekarang digunakan adalah 085701005153.

Peran yang dimiliki oleh pengelola SMS Gateway sangat diperlukan karena berfungsi sebagai simpul penerima maupun penyebaran informasi. Dari hal tersebut, dilakukan evaluasi oleh peneliti dan pihak terkait yang telah bekerjasama. Hasilnya mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait dengan SMS Gateway. Salah satunya ialah bahwa pengelola perlu adanya mitra sebagai administrator yang berfungsi untuk menerima dan menyebarkan informasi. Pentingnya informasi dapat dengan mudah dan cepat sampai ke banyak pihak atau orang terutama masyarakat karena sejak erupsi tahun 2012 sampai 2016 erupsi gunung Sinabung masih terjadi pula memakan korban jiwa. Selain ancaman erupsi, banjir lahar hujan juga banyak terjadi.

Simpulan

Ketanggungan masyarakat di wilayah rawan bencana seperti Sinabung sangatlah diperlukan. Guna menciptakan hal tersebut diperlukan perhatian serius oleh berbagai kalangan baik pemerintah, swasta, maupun pihak lain yang dapat memberikan kontribusi. Program SMS Gateway sebagai salah satu luaran dari penelitian ini dirancang agar memberikan manfaat dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait Sinabung. Adanya SMS gateway diharapkan penyampaian dan penyebarluasan informasi tersebut lebih cepat, tepat, dan akurat sampai ke masyarakat terdampak sehingga penanganan bencana Sinabung lebih baik dan menekan angka korban.

Program ini bekerjasama dengan Combine, UNDP Sinabung, Jaringan Radio Komunitas republik Indonesia (JRKI), dan tim lintas sektor yang bergerak untuk Sinabung guna memaksimalkan pemanfaatan media alternatif SMS sebagai upaya pengurangan resiko bencana.

Rekomendasi

Peneliti bersama pihak mitra melakukan pemetaan fungsi pada masing-masing tim yaitu, (1) Kominfo Kabupaten Karo mengelola sistem SMS Gateway. (2) Tim UNDP memetakan orang yang menjadi operator dan pengelola SMS Gateway, (2) Tim UPN menyiapkan SOP untuk operasional SMS Gateway dan pembagian peran masing-masing pengelola, (3) Combine menjamin keberadaan program SMS Gateway, dan (4) JRKI berperan memperkuat dua radio komunitas yang ada di Desa Perteguhan, Kecamatan Simpang Empat dan Desa Batukarang, Kecamatan Payung untuk menjadi agen penyampaian dan penyebarluasan informasi.

Kegiatan SMS Gateway Sinabung ini terwujud berkat dana hibah penelitian Strategis Nasional Dikti mulai 2014 – 2016. Di mana tim peneliti berasal dari UPN Yogyakarta dengan ketua oleh Dr. Puji Lestari, SIP, M.Si dan anggota Prof. Ir Sari Bahagiarti dan Dr. Eko Teguh Paripurno, MT.

Daftar Pustaka

Hokao, Kazunori and Daungthima, Wittaya, 2013, *Analysing the Possible Physical Impact of Flood Disasters on Cultural Heritage in Ayutthaya, Thailand*, International Journal of Sustainable Future for Human Security, J-Sustain Vol. 1, No. 1. (2013) 35-39, 2013

Lestari, Puji, Eko Teguh Paripurno, dan Sari Bahagiarti, 2014-2016, *Laporan Penelitian Hibah Dikti Strategis Nasional*, UPN Veteran Yogyakarta.

West, Richard dan Turner, Lynn H, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Salemba Humanika.

<http://www.karokab.go.id/in/index.php/berita/4973-kerjasama-upn-veteran-yogyakarta-dan-pemkab-karo-dalam-mitigasi-bencana-sinabung-memanfaatkan-media-berbasis-sms> diakses tanggal 20 Agustus 2015).

<http://lppm.upnyk.ac.id/info/in/20/222/kerjasama-upn-veteran-yogyakarta-dan-pemkab-karo-dalam-mitigasi-bencana-sinabung>, diakses tanggal 25 Agustus 2016.

ANALISIS STRATEGI BRANDING ECOTOURISM KAWASAN MIGAS

Prayudi

Kartika Ayu Ardhanariswari

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP UPN -Veteran|| Yogyakarta

Email: yudhi_ahmad@yahoo.com, ardhanariswari_ayu@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana strategi branding diterapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan kawasan migas di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan. Desa ini memiliki keunikan berupa suasana penambangan minyak bumi tradisional yang bisa dirasakan setiap mata memandang. Ketika sumur minyak tua sudah mulai habis ditambang, pemerintah, masyarakat dan perusahaan minyak Pertamina berpikir bagaimana mengubah dan memberi nilai tambah pada desa ini melalui strategi branding. Strategi *branding* meliputi kegiatan menciptakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola merek secara terus-menerus sampai merek tersebut menjadi kuat atau bisa dikatakan dengan istilah *brand equity*. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana tahapan yang dilakukan dalam membranding desa yang sebelumnya kawasan sumur minyak tua, menjadi sebuah kawasan wisata baru yang memiliki nilai ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga tahapan yang dilakukan dalam membranding Desa Wonocolo sebagai desa wisata: identifikasi keunikan desa, penciptaan identitas brand dan penciptaan pesan brand. Tantangan terbesar dalam strategi branding ini adalah mengubah pola pikir masyarakat Desa Wonocolo bahwa menjadikan Wonocolo sebagai desa wisata bisa memberikan nilai ekonomi

Kata kunci: branding, ecotourism, identitas, keunikan

PENDAHULUAN

Aktivitas penambangan liar di kawasan sumur minyak dan gas bumi (migas) yang sudah tua terjadi di beberapa lokasi. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana sumur-sumur ini ditambang dengan cara yang kurang memperhatikan keselamatan jiwa dan keamanan terhadap lingkungan. Untuk mengurangi kegiatan penambangan tersebut, pemerintah berencana mengubah sumur tua itu menjadi kawasan wisata.

Harapannya adalah dengan mengubah kawasan sumur minyak tua menjadi kawasan wisata akan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Ini seperti yang dilakukan di Desa Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur. Meski akan dijadikan destinasi wisata, kegiatan penambangan minyak masih bisa tetap berjalan. Pemerintah akan menugaskan anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, untuk mengelola sumur tersebut. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan migas. Pertama, merubah pola pikir masyarakat. Mereka harus diyakinkan dan ditunjukkan bahwa merubah kawasan tambang minyak sumur tua menjadi kawasan wisata meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Bagi pemerintah, hal ini tentu saja bisa meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu tentu saja bisa meningkatkan citra sebagai kota tujuan wisata.

Kedua, mengemas daerah bekas sumur tua menjadi sebuah kawasan wisata layaknya sebuah produk. Dalam hal ini tantangan terbesar adalah mengidentifikasi keunikan dari kawasan migas yang akan dijadikan sebagai fokus utama wisata yang akan ditawarkan.

Pengembangan kawasan wisata migas juga sangat menarik jika dihubungkan dengan ecotourism. *Ecotourism* merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Berdasarkan kondisi empiris di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah pengembangan strategi branding *ecotourism* kawasan migas di desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro?

KAJIAN TEORI

Ecotourism. Definisi paling baru dari *ecotourism* menurut *The International Ecotourism Society* (TIES) adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang menjaga lingkungan, mempertahankan kesejahteraan masyarakat lokal dan melibatkan interpretasi dan edukasi khususnya pada staf dan tamu (*responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people and involves interpretation and education*) (<http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism>).

Branding. Menciptakan persepsi yang koheren dari sebuah organisasi di benak beragam pemangku kepentingan merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi. Hubungannya dengan penelitian ini, *branding* bisa dikatakan sebagai pencitraan, diperlukan agar tampilan tempat wisata tersebut lebih segar, lebih atraktif, lebih diingat orang dan pada akhirnya orang akan ramai datang berkunjung ke tempat wisata tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif. Penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran utuh yang lebih jelas dan mendalam mengenai (1) permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata migas berbasis *ecotourism* berupa strategi implementasi bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; (2) mengetahui kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan desa wisata sebagai salah satu *stakeholder* penting dalam pengembangan desa wisata.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan berdasarkan *interview guide* yang telah disusun.
2. Studi Pustaka, untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan melalui buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, seminar dan informasi sebagai penunjang penelitian seperti kebijaksanaan di bidang pendidikan tinggi serta bahan-bahan tertulis lainnya sebagai dasar penulisan.
3. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis (Ruslan, 2006: 35).

Adapun yang yang menjadi subyek penelitian adalah Desa Wonocolo yang memiliki luas 11,37 Km², dan berjarak 5,5 Km dari ibukota kecamatan yaitu Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini memiliki tanah sawah seluas 4 Ha dan tanah kering seluas 1133 Ha. Sedangkan obyek penelitian adalah srategi branding Desa Wonocolo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wonocolo: Strategi Branding sebuah Desa Wisata. Dalam konteks penelitian ini, upaya untuk menjadikan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah tujuan *ecotourism* selalu berada di benak pemangku kepentingan baik internal (masyarakatnya) maupun eksternal (pemerintah, wisatawan dan pelaku usaha) merupakan sebuah tantangan tersendiri.

Dalam konteks branding pengembangan desa wisata, pihak-pihak terkait (pemerintah Kecamatan Kedewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, PT Pertamina E&P Cepu, dan SKK Migas) mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan seperti berikut ini:

- Pemahaman masyarakat Desa Wonocolo untuk mendukung terwujudnya Desa Wisata Wonocolo.
- Perencanaan pengelolaan kawasan sumur tua menjadi Desa Wisata dan pemetaan potensi obyek wisata.
- Pembangunan sarana dan infrastruktur penunjang Desa Wisata.
- Pengelola Desa Wisata adalah masyarakat lokal.

Berikut akan diulas strategi branding ecotourism Desa Wisata Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.

Keunikan Bojonegoro dan Wonocolo.

Menurut Dr. Jatmiko Setiawan, dosen Geologi UPN Veteran Yogyakarta, menyatakan bahwa tekstur lapisan bumi Bojonegoro yang kaya minyak bisa dikategorikan ke dalam geoheritage. Apakah geoheritage? Geoheritage (berasal dari kata geo- yang berarti -bumi|| dan -heritage yang berarti -warisan||) adalah situs atau area geologi yang memiliki nilai-nilai yang penting di bidang keilmuan, pendidikan, budaya, dan nilai estetika (The Geological Society of America, 2012).

Suatu kawasan bisa diangkat menjadi wisata alam geologi jika bisa memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Berupa Geotapak Alami
- 2) Mempunyai Nilai-Nilai Penting Di Bidang Keilmuan, Pendidikan, Budaya Dan Estetika
- 3) Memiliki Akses Yang Mudah Dijangkau
- 4) Memiliki Sarana-Prasarana Umum Yang Lengkap
- 5) Masyarakat Yang Mendukung



Gambar 1. Lokasi Sumur Minyak Tua Wonocolo



Gambar 2. Minyak yang sudah diangkat dari sumur dimasukkan ke jerigen.

Kondisi sekarang, sudah mulai banyak sumur minyak tua yang berkurang dari sisi produksi sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Satu fenomena yang bisa dilihat dari peninggalan sumur minyak tradisional adalah tonggak-tonggak kayu yang diposisikan sebagai menara kerekan untuk menimba sumur minyak dari kedalaman ratusan meter ke permukaan bumi. Dari sisi keekonomian, sumur minyak tua ini mungkin sudah tidak produktif lagi. Namun disisi lain, jika kawasan sumur tua dan sekitarnya didesa Wonocolo dijadikan sebuah destinasi wisata baru, maka hal ini menjadi sebuah terobosan unik. Bahkan, bisa menjadi yang pertama di dunia.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencoba menggali potensi ini dengan mengolahnya menjadi destinasi wisata yang diberi nama *Petroleum Geoheritage Wonocolo*. Di sini pengunjung bisa ber-*selfie* dengan latar belakang pemandangan aktifitas penambangan secara tradisional. Kondisi alam di sini bisa mengingatkan orang pada pemandangan di film *Wild wild west*, Texas Amerika Serikat.

Menurut SKK Migas, ada beberapa potensi wisata sekaligus keunikan yang bisa dikembangkan di Desa Wisata Sumur Minyak Tua Wonocolo. Potensi-potensi tersebut sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar diatas menunjukkan potensi wisata Sumur Tua yang dikombinasikan dengan struktur geologis alam menarik yang dimbinasikan dengan fasilitas penunjang wisata, seperti jeep dan motor trail untuk kepentingan wisata petualangan dan keindahan alam. Dan agar ini semua tercapai, dibuatlah peta jalan (road map) pencapaian pengembangan Desa Wisata Sumur Minyak Tua Wonocolo.

Dalam rangka mengubah pola pikir atau memberikan pandangan baru pada masyarakat Desa Wonocolo, mereka kemudian diajak untuk melakukan studi banding ke Yogyakarta. Ada 2 lokasi utama yang menjadi tujuan, yakni Wisata Lava Tour Merapi dan Goa Pindul Gunung Kidul. Kedua lokasi wisata ini dipilih karena pengelolaan wisata ini murni dari masyarakat sepenuhnya. Tujuannya tentu saja menekankan perubahan pola pikir masyarakat Desa Wonocolo dan meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa merubah desa mereka menjadi desa wisata. Apalagi hal ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pertamina E & P Unit Cepu.

Identitas Brand Desa Wonocolo.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PT Pertamina dan asyarakat Desa Wonocolo, akhirnya disepakati untuk menamakan Desa Wisata Wonocolo dengan nama *The Little Teksas Wonocolo*. Penamaan ini sedikit banyak mengadopsi sebuah wilayah di Amerika yang bernama Texas dan kaya akan sumber minyak dan menjadi cadangan minyak Amerika Serikat. Selain itu kondisi iklim wilayah yang sedikit panas dan terkesan gersang juga dianggap memiliki kesamaan. Hal ini yang kemudian ditonjolkan sebagai keunikan dari Desa Wonocolo dan dikembangkanlah beragam aktivitas wisata yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah Desa Wonocolo sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selain itu, penamaan *The Little Teksas Wonocolo* juga memiliki filosofi untuk tetap memunculkan nama Wonocolo agar selalu diingat oleh mereka yang baru mau akan berkunjung (prospek) maupun yang telah berkunjung ke desa Wonocolo (konsumen). Pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah mengapa Teksas bukan Texas? Hal tersebut dikarenakan teksas diambil dari kata "Tekadnya Selalu Aman dan Sejahtera".



Gambar 4 Papan nama The Little Teksas Wonocolo dipasang di lereng desa yang memiliki kontur perbukitan.

Little Teksas Wonocolo tersebut merupakan satu-satunya destinasi wisata terkait dengan sumur minyak di Indonesia. Sehingga nanti muncul beberapa tempat yang bisa dikunjungi para pelajar untuk mengetahui proses pengambilan minyak secara tradisional juga. Ini merupakan sebuah keunikan yang bisa dijual sebagai paket wisata.

Penciptaan Pesan Brand. Setelah identitas brand dibuat, selanjutnya dalam tahapan strategi branding adalah penciptaan pesan brand. Dalam hal ini, keunikan Desa Wisata Wonocolo

sebagai desa ecotourism bekas kawasan migas menjadi keunggulan dan fokus dari pesan brand itu sendiri.

-Di Wonocolo juga ada energi terbarukan yaitu panas bumi. Jika diolah bisa menjadi geotermal. Nah, di Wonocolo kita bisa belajar energi terbarukan dan juga energi tidak terbarukan. Begitu pula, pengolahan minyak mentah di Bojonegoro juga lengkap karena ada yang diolah secara tradisional dan juga ada yang modern, ungkapannya (<http://berita.bojonegoro.com/read/4643-sumur-tua-wonocolo-jadi-destinasi-wisata-baru.html>).

Dari berita yang dimuat pada portal Berita Bojonegoro menunjukkan bagaimana pesan yang hendak disampaikan adalah Desa Wisata Wonocolo sebagai sebuah wisata alternative unik dan baru yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Dengan keunikan berfokus pada kawasan migas tua dan kekayaan geologi yang luar biasa.

Melalui penciptaan pesan brand inilah brand desa wisata tertanam dengan baik di benak public. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan beberapa media komunikasi baik above the line, below the line maupun between the line media. Penggunaan above the line media misalnya berupa pemasangan iklan di Koran local seperti Tribun Jatim, pemasangan billboard di wilayah strategis seperti jalan propinsi, dan pemberitaan di beberapa media massa lokal dan online seperti detik.com. Sedangkan penggunaan below the line seperti pengadaan beberapa acara wisata dengan menggandeng perusahaan seperti Pertamina juga telah dilakukan. Strategi lainnya juga adalah tamu-tamu dari instansi pemerintah yang mengadakan studi banding ke Kabupaten Bojonegoro juga diajak ke lokasi Desa Wisata Wonocolo ini.

Media lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah penggunaan *between the line media*, berupa media sosial yang sekarang luar biasa penggunaannya. Facebook fan page milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro misalnya, memuat aneka wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung.

Pada akhirnya, yang diuntungkan dari ini semua adalah warga Desa Wisata Wonocolo. Ketika sumur minyak mereka sudah tidak lagi bias dieksplorasi, upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadikan desa mereka sebagai sebuah destinasi wisata baru merupakan sebuah langkah yang layak diapresiasi. Bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro, semangat menjadikan Desa Wonocolo sebagai sebuah desa wisata juga merupakan perwujudan dari semangat pembangunan daerah yang berbasis pada masyarakat.

KESIMPULAN

Branding adalah proses pembentukan citra merek yang melibatkan dua unsur penting manusia (hati & pikiran; hati= nurani, pikiran=logika) agar pelanggan dapat dengan sendirinya melihat keunggulan produk dari merek tersebut dibanding dengan merek lain yang serupa sehingga pelanggan (maupun calon pelanggan) akan memilih mempercayakan pada merek tersebut.

Pengembangan strategi branding meliputi tiga aspek, yakni identifikasi keunikan produk dan target pasar, penciptaan identitas brand, dan penciptaan pesan brand. Branding ecotourism desa wisata harus memfokuskan pada aspek keunikan sebagai unsur pembeda desa wisata. Dan Desa Wonoloco, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro memiliki keunikan tersebut. Sebagai daerah bekas kawasan sumur minyak tua dan memiliki tekstur

geologis yang unik, pengembangan Desa Wonocolo sebagai kawasan ecotourism menjadi sebuah strategi branding yang tepat.

Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa dalam pengembangan strategi branding sebuah desa wisata, dukungan dari beragam pihak sangat dibutuhkan. Karena sesungguhnya membangun desa wisata sama dengan membangun daerah dan itu berarti menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Clifton, R. dan Esther M (Ed.) (2000). *The Future of Brands: Twenty-five Visions*. New York: New York University Press & Interbrand.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. New York: Sage Publications.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. (2009). *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*.
- Duncan, T. (2005). *Principles of Advertising and IMC* (edisi kedua). New York: Mc Graw-Hill.
- Einwiller, S. & M. Will. Towards an Integrated Approach to Corporate Branding-an Empirical Study. *Corporate Communication: An International Journal*. Volume 7, Nomor 2. (2002). Hal. 100-109.
- Herastuti, H. et al. (2014). Laporan Akhir Program Ipteks bagi Wilayah (IbW). LPPM UPN Veteran Yogyakarta & LP2M Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ruslan, R. (2008). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Rajawali Press.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Torfaen County Borough Council. (2006). *Stakeholder engagement-A Toolkit*. REVIT Project.
- The International Ecotourism Society (TIES). (2015). *What is Ecotourism*. Alamat Web: <http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism>
- Wall, G. *Ecotourism: Change, Impacts, and Opportunities*. *Journal of Ecotourism*. (2010).

Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Magelang

Didi Nuryadin & Jamzani Sodik

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi UPN –Veteran Yogyakarta

Email: didinuryadin@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is the arrangement of data and information and analysis of prime product and the potential development of aspects of the creation of added value, market expansion, and production technology. The location of this research is the town of Magelang, with the primary consideration that there are many small and medium industries with various products, but the industrial sector's contribution to the formation of small output. The methodology used in this study is qualitative and quantitative. The analytical tool used to achieve the purpose of the study was essentially aimed at menganalisis and evaluate the factors that will be used to determine product/commodity in the regions are : the scoring method , the value chain and AHP. The study shows that by weighting the criteria with the highest weighting is excellence, followed by criteria Acceptance criteria Stakeholders and Benefits . Through all three criteria , then a short list of featured products in a row priority is getuk , tofu crackers and cassava crackers . Furthermore , through a comparative analysis of the value chain getuk obtained that the product meets the criteria for superior products and processed cassava as the Regional Core Competence of Small Industries (KIID) The city of Magelang .

Keywords: prime product, core competence, value chain, AHP.

I. Pendahuluan

Tujuan utama pembangunan ekonomi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga harus dapat mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Dalam skala yang lebih luas tujuan pembangunan ekonomi bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar sektor, dan antar daerah/wilayah.

Pembangunan daerah dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah, berupa pemberdayaan sektor dan produk unggulan yang diharapkan memberikan dampak (multiplier) terhadap pertumbuhan ekonomi. Produk unggulan juga merupakan sumber keunggulan bersaing (mempunyai kontribusi besar dalam memberi manfaat bagi pasar) dan berpotensi untuk diaplikasikan di beragam pasar.

Produk unggulan dalam analisis lanjutan berkaitan erat dengan kompetensi inti daerah maupun kompetensi inti industri daerah (*prime mover*). Suatu kompetensi inti daerah sangat menentukan arah perkembangan dari daerah tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat segi perekonomian dari suatu daerah serta menciptakan daya saing dari tingkatan daerah sampai kepada tingkatan negara. Adapun kompetensi inti daerah harus bercirikan: (1) mengembangkan sebuah produk baru atau jasa baru dan dapat dilakukan prospek ke masyarakat umum; (2) memiliki sesuatu yang unik dan sulit ditiru oleh daerah lainnya.

Sebagai salah satu kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi unggulan utama meliputi industri menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk: pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Kegiatan usaha industri yang ada di Kota Magelang sebagian besar adalah

industri menengah dan kecil dan berorientasi kepada kebutuhan rumah tangga. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga tersebar hampir di semua wilayah, dengan aneka industri jenis makanan hingga produk kerajinan.

Namun demikian, secara sektoral lapangan usaha industri pengolahan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir hanya mampu memberikan kontribusi terhadap output (PDRB) sebesar 13 - 14 persen (BPS, 2015). Berbagai masalah di tingkat kebijakan maupun pelaku usaha seperti daya saing produk, bahan baku, perluasan akses pasar dan belum fokusnya perhatian pemerintah daerah terhadap industri lokal yang berbasis kepada kompetensi inti menjadikan sektor industri sektor industri pengolahan pengolahan Kota Magelang jalan di tempat.

Industri yang berkembang di Kota Magelang saat ini adalah industri yang terkait dengan imej Kota Magelang sebagai Kota Jasa, Kota Transit dan Kota Pendidikan diantaranya industri makanan, jajanan, kerajinan. Posisi wilayah yang strategis dan perkembangan sektor perdagangan, jasa serta pariwisata merupakan faktor pendorong bagi perkembangan industri kecil dan menengah. Di samping itu, keberadaan kampus Perguruan Tinggi di wilayah ini juga turut mendorong perkembangan industri kreatif berskala kecil.

Posisi wilayah sebagai simpul bagi Kabupaten di sekitarnya serta kedekatan secara geografis dengan DIY juga menjadikan Kota Magelang sebagai pasar barang-barang hasil industri dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan membantu pemerintah daerah setempat dalam merumuskan roadmap produk unggulan berbasis kompetensi inti agar daya saing produk industri kecil dan menengah semakin meningkat. Di samping itu, dengan dikenalnya produk unggulan dengan ciri unik dan tidak mudah ditiru, maka nilai ekonomis produk juga akan meningkat.

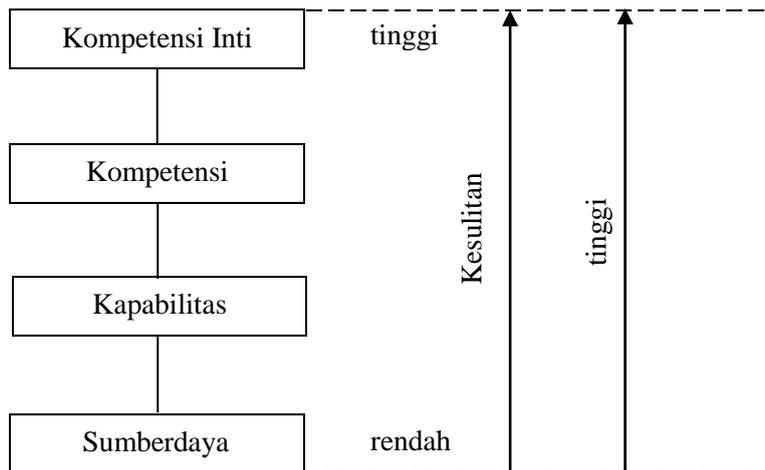
II. Tinjauan Pustaka

2.1. Kompetensi Inti (*Core Competence*)

Kompetensi inti adalah sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan. Gary Hamel dan C.K. Prahalad (1990) memperkenalkan konsep kompetensi inti (*core competence*) sebagai gabungan proses pembelajaran dan keterampilan koordinasi yang memungkinkan perusahaan menghasilkan produk-produk tertentu. Kompetensi inti (*core competence*) merupakan kumpulan keterampilan dan teknologi yang memampukan perusahaan untuk menyediakan manfaat tertentu bagi pelanggannya.

Kompetensi inti dimanifestasikan dalam bentuk produk inti (*core products*) yang berperan sebagai penghubung antara berbagai kompetensi yang ada dengan produk akhir. Produk inti memungkinkan terjadinya proses penciptaan value pada produk jadi. Bilamana suatu organisasi memiliki produk inti yang berhasil, maka organisasi tersebut dapat memperluas jumlah penggunaan produk tersebut untuk mencapai keunggulan biaya. (Contoh: Honda memiliki produk inti berupa mesin-mesin berbahan bakar bensin; produk inti tersebut digunakan pada berbagai produknya, seperti berbagai kendaraan bermotor).

Menurut Javidan (1998) cara pandang Prahalad dan Hamel terlalu sempit, karena melihat konsep kompetensi, kompetensi inti dan kapabilitas sebagai hal yang sinonim. Definisi tersebut hanya terfokus pada bagian kecil dari rantai nilai organisasi, dan telah mengaburkan pengertian kompetensi dan kapabilitas. Javidan membagi kompetensi inti, kompetensi, kapabilitas dan sumberdaya menurut kesulitan dan nilainya ke dalam suatu hirarki seperti digambarkan berikut ini.



Gambar 2.1
Hirarki Kompetensi
Menurut Javidan (1998)

2.2. Produk Unggulan dan Kompetensi Inti (*Core Competence*)

Berkembangnya suatu sektor atau subsektor sebenarnya adalah cerminan dari kelompok produk atau jasa di dalam sektor tersebut. Seringkali di dalam suatu subsektor ada produk/jasa atau komoditas yang perkembangannya saat ini dan potensi pengembangannya di masa depan nyata-nyata lebih baik dari komoditas lain. Komoditas ini sering disebut sebagai komoditas unggulan daerah, karena tingginya kontribusi aktivitas dalam perusahaan komoditas terhadap perekonomian daerah. Meskipun kompetensi inti daerah tidak sama dengan konsep komoditas unggulan, penentuan kompetensi inti daerah seringkali diawali dengan penentuan komoditas unggulan prioritas. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa keunggulan suatu komoditas merupakan indikator adanya sumber-sumber keunggulan bersaing di daerah yang menyebabkan komoditas tersebut dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi, sumber keunggulan bersaing tersebut tidak selalu sama untuk setiap komoditas: sebagian komoditas tumbuh dan berkembang karena adanya faktor alam, sebagian karena adanya keterampilan yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat setempat, dan mungkin ada yang berkembang karena tradisi yang bersifat khas.

Beberapa peneliti telah mengusulkan beberapa metode untuk mengidentifikasi kompetensi inti. (Y. Zhang, 2009). Walsh dan Linton (2001) mencoba mengiktisarkan hasil dari berbagai upaya dalam mengidentifikasi kompetensi beberapa industri yang dapat dianggap sebagai "suatu bangun dasar di dalam proses mengidentifikasi kompetensi suatu (organisasi) perusahaan" dengan cara mencoba mengekstrak kompetensi inti berdasarkan hasil observasi dari 4 (empat) aspek yaitu: aspek bahan baku (*materials*), pabrikan dan perakitan (*manufacturing-fabrication and assembling*), jasa/layanan berbasis pengetahuan (*knowledge based services*) dan jasa/layanan yang terkandung pengetahuan (*knowledge embeded services*). Walsh dan Linton juga mengemukakan bahwa sebagian besar kesulitan didalam mengidentifikasi kompetensi inti muncul dikarenakan sifat kompetensi yang sifatnya bertingkat-tingkat (*hierarchical* dan multi dimensi).

Tampoe (1994) mengusulkan suatu proses untuk mengidentifikasi kompetensi inti yang disebut sebagai proses (untuk melakukan) isolasi kompetensi inti. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi produk/jasa utama dengan menganalisis arus pendapatan. Sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan produk/jasa inti kemudian kemudian diisolasi melalui kegiatan menganalisis atribut dari sumber-sumber tersebut.

Lewis (1995) mengembangkan suatu pendekatan yang bertumpu pada kegiatan lokakarya (workshop) dan diskusi untuk mengidentifikasi kompetensi inti, dan dengan melibatkan perangkat dari luar organisasi untuk melakukan analisis terhadap data dan informasi terkait secara komprehensif terhadap keseluruhan bisnis.

2.3. Studi Terkait

Kajian terhadap produk unggulan dan kompetensi inti daerah antara lain dilakukan oleh Daryono dan Wahyudi, 2008. Melalui penetapan kriteria yang meliputi nilai produksi, investasi/unit, jumlah tenaga kerja dan preferensi nara sumber, diperoleh bahwa batik dan produk batik menempati ranking pertama dalam matrik keputusan produk unggulan industri kecil. Batik Solo memiliki keunikan dalam motif, motif yang ada sangat banyak, tetapi memiliki kompetensi unggulan dominan dalam karakteristik, desain dan daya inovasi, serta makna filosofis atas motifnya. Kurniyati, 2010 menggunakan teknik scoring terhadap potensi dan berbagai variabel kompetensi inti industri Kabupaten Bangkalan adalah industri berbahan baku hutan (rakyat) dan perikanan. Kompetensi inti di Kabupaten Bangkalan masih ditentukan oleh *resource based industries* daripada *market based industries*. Dengan kata lain, kompetensi inti industri lebih banyak ditentukan oleh potensi sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan dalam proses industri, utamanya bahan baku yang berasal dari sumber daya alam manusia lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk, 2011 dengan mengaplikasikan teknik AHP menunjukkan bahwa kompetensi inti Kabupaten Tangerang adalah terkait industri tekstil dan produk tekstil. Sedangkan strategi pengembangannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal (*early stage*) melalui dukungan kebijakan pemerintah dan dukungan infrastruktur serta finansial; tahap utama (*main stage*) melalui restrukturisasi permesinan dan pengembangan sumber daya manusia; tahap akhir (*final stage*) melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kluster industri. Rahab dan Istiqomah, 2013 menggunakan teknik AHP dan Interpretive Structural Modeling untuk menganalisis faktor determinan kompetensi inti industri lokal di Kabupaten Banyumas. Hasil studi menunjukkan bahwa batik lokal merupakan industri paling potensial untuk dikatakan sebagai kompetensi inti industri lokal di Kabupaten Banyumas. Keunggulan kompetitif batik lokal didasarkan pada tiga tahap pengembangan, yakni: (1) tahap awal (dukungan infrastruktur, pembiayaan dan dukungan perizinan), (2) tahap utama (pengembangan SDM, manajemen dan pemasaran, merk dan keunikan batik dan (3) tahap akhir (peningkatan produktivitas dan inisiasi yang berhubungan dengan dukungan industri).

Niskha dkk, 2015 menggunakan teknik AHP untuk mengidentifikasi produk unggulan berbasis kluster di Kota Malang dan memilih prioritas strategi untuk pengembangan sentra produk unggulan tersebut. Dengan metode AHP, diperoleh hasil bahwa produk unggulan daerah berbasis kluster di Kota Malang adalah produk tempe dan keripik tempe yang dihasilkan oleh sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan.

III. Metodologi Penelitian

Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menetapkan produk unggulan berbasis kompetensi inti daerah. Adapun pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis profil industri kecil dan menengah, potensi pasar, daya saing produk, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan menggambarkan jawaban responden serta keputusan terhadap penetapan produk unggulan daerah. Penelitian ini berlokasi di Kota Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur dan mendalam, observasi, survey dan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan *stakeholders*. Responden dan narasumber meliputi asosiasi pelaku industri kecil dan menengah, Dinas Perindustrian dan UKM, akademisi,

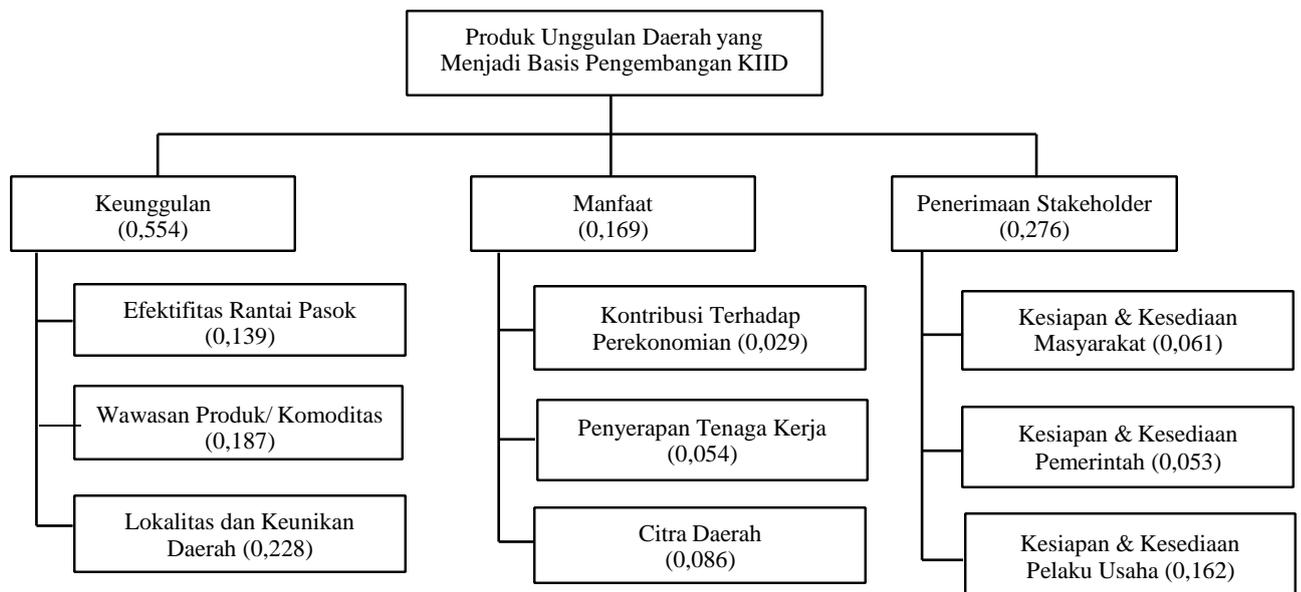
BAPPEDA, FEDEP, Kota Magelang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *porpusive sampling*.

Alat analisis utama yang digunakan meliputi teknik scoring dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah mendapatkan daftar produk unggulan, tahap selanjutnya adalah menetapkan komoditas unggulan prioritas (1 produk). Untuk itu digunakan alat analisis AHP dengan set kriteria yang ditujukan untuk menilai masing-masing komoditas unggulan. Di dalam menetapkan komoditas unggulan prioritas digunakan set kriteria yang ditujukan untuk menilai masing-masing komoditas dan berbagai segi.

IV. Analisis dan Pembahasan

4.1. Penetapan Produk Unggulan

Hasil pembobotan (skoring) dari daftar panjang produk IKM yang ada di Kota Magelang, diperoleh 5 produk IKM yang dapat dinominasikan sebagai produk unggulan daerah yakni: Getuk, Ceriping Ketela, Kerupuk Tahu, Tahu dan Mainan Anak. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap 5 (lima) produk unggulan tersebut, melalui kriteria-kriteria yang nantinya digunakan untuk menentukan satu produk unggulan daerah menggunakan perangkat AHP. Adapun hasil evaluasi terhadap kriteria-kriteria utama untuk mengevaluasi produk unggulan yang dinominasikan sebagai produk prioritas dapat dilihat sebagai berikut:



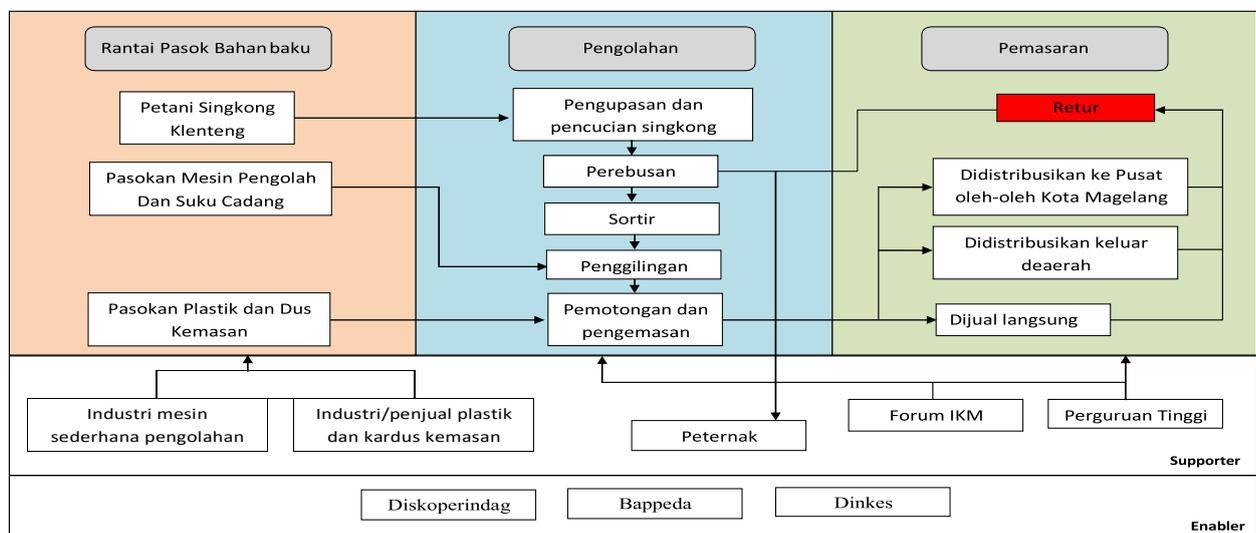
Gambar 4.1 : AHP Produk Unggulan Daerah Kota Magelang

Berdasarkan hasil pembobotan dengan metode analisis AHP diatas, kemudian dilakukan pemeringkatan terhadap 5 (lima) produk IKM unggulan yang menjadi pertimbangan untuk nantinya dijadikan dasar pemilihan produk IKM prioritas di Kota Magelang. Adapun hasil pembobotan kelima produk unggulan IKM yang dinominasikan sebagai produk prioritas yaitu Getuk (6,51), Kerupuk Tahu (4,95), dan Ceriping Ketela (4,26). Dengan demikian maka dapat direkomendasikan bahwa produk Getuk dapat menjadi produk fokus (basis) IKM Kota Magelang. Hal ini dikarenakan keunikan produk ini yang telah lama identik dan ikut membentuk citra Kota Magelang. Serta dengan pertimbangan penerimaan stakeholder yang sangat baik terhadap produk yang dapat dilihat dari terdapatnya banyak IKM produksi getuk dalam skala yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja.

4.2. Analisis Rantai Nilai Produk Unggulan Terpilih

Getuk merupakan salah satu makanan basah dari olahan singkong segar, sehingga ketahanannya hanya mencapai 2-3 hari saja. Pemasaran getuk Kota Magelang selain dipasarkan dalam kota tersebut hanya dipasarkan di kota-kota sekitar kawasan seperti Kota Semarang, Yogyakarta, dan Solo serta yang paling jauh adalah Kota Surabaya dan Jakarta. Proses produksi hingga pemasaran merupakan proses utama yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan proses oleh pendukung langsung (*supporter*) dan lembaga pendukung tidak langsung (*enabler*), dijabarkan sebagai berikut:

1. Supporter
 - a. Industri mesin sederhana pengolahan getuk dan suku cadangnya.
 - b. Industri/penjual plastik dan kardus kemasan
 - c. Forum IKM, berupa pengembangan usaha dengan dukungan fasilitasi pelatihan, dan pengurusan sertifikat usaha makanan secara bersama dan terorganisir.
 - d. Perguruan Tinggi, berupa penelitian pendukung pengembangan produk.
 - e. Peternak, menampung/mengambil sisa produksi yang tidak terpakai untuk paka ternak.
2. Enabler
 - a. Diskoperindag: Secara teknis bertanggungjawab melakukan pembinaan SDM industri, mengembangkan teknologi, dukungan pemasaran dan dukungan kelembagaan. Kemudian juga melakukan bantuan fasilitasi pengurusan sertifikat kelengkapan usaha dan fasilitasi permodalan.
 - b. Bappeda: Secara teknis bertanggungjawab melakukan perencanaan anggaran dan strategi yang bermanfaat dalam pengembangan produk unggulan daerah.
 - c. Dinkes: Secara teknis bertanggungjawab melakukan fasilitasi penyuluhan dan pembuatan SPIRT bagi IKM.



Gambar 4.6: Diagram Rantai Nilai IKM Getuk Kota Magelang

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kota Magelang memiliki Kompetensi Inti Daerah Industri Kecil (KIID) berupa hasil olahan singkong berupa produk Getuk. Produk ini memiliki potensi paling besar untuk dapat menjadi Produk Unggulan Daerah Kota Magelang. Selain merupakan produk makanan khas yang telah identik dan melekat pada citra Kota Magelang, produk ini juga telah berkembang dengan baik dan banyak diusahakan oleh pelaku usaha IKM di Kota Magelang.

Faktor seperti ketersediaan bahan baku, pelaku IKM Getuk cukup banyak dan memiliki kualitas cukup baik, serta faktor potensi pasar yang terus berkembang juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan IKM Getuk sebagai KIID Kota Magelang. Di samping itu, IKM Getuk yang merupakan hasil olahan singkong memiliki rantai nilai yang cukup potensial untuk dikembangkan, diantaranya industri rekayasa teknik (mesin pemotong dan penggiling singkong), industri plastik dan kardus kemasan, serta peternakan yang kesemuanya berada di sekitar Kota Magelang. Pemasaran Getuk juga berpeluang untuk dikemas sebagai atraksi wisata di mana pembeli dapat melihat langsung proses pengolahan singkong menjadi getuk, hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata Kota Magelang yang didukung produk unggulan daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat di rumuskan saran bagi pengembangan produk unggulan Kota Magelang yaitu:

- 1). **Peningkatan kelembagaan**
- 2). **Peningkatan mutu produk**
- 3). **Peningkatan pemasaran**
- 4). **Penguatan Rantai Pasok**

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
- Anonim, Instruksi Presiden Nomor Tahun 2009, tentang Ekonomi Kreatif.
- Anonim, Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, tentang Produk Unggulan Daerah.
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2015. *Kota Magelang Dalam Angka 2015*, BPS.
- Carr, Lawrence P, 1999 : *Value chain Analysis and management for competitive advantage*.
- Churiyah, M & Sholikhan, 2016: *Exploratory Factor Analysis: Entrepreneur Development in the Industrial Center of Sarung Tenun Ikat Lamongan*; Vol.7, No.6, 2016, Journal of Economics and Sustainable Development.
- Daryanto, Arief, 2010, *Keunggulan Daya Saing dan Teknik identifikasi Komoditas Unggulan dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Regional*, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Donelan, Joseph G., Kaplan, Edward A, 2000 : *Value Chain Analysis : A strategic approach to Cost Management*. Thomson Learning.
- Indahsari, K., 2010. Model Penentuan Kompetensi Inti Industri Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan), *Jurnal Iqtishoduna*, 6 (1).
- Javidan, Mansour. (1998). *Core Competence: What Does it Mean in Practice?*. Long Range Planning , Vol. 31 No. 1: 60-70. [http://dx.doi.org/10.1016/S0024-6301\(97\)00091-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0024-6301(97)00091-5).
- Kementerian Perindustrian, 2012. *Buku Petunjuk Teknis Penilaian, Klasifikasi Dan Pembinaan Produk OVOP*, Jakarta : Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian, 2011. *Kajian Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global, Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial* (www.kemenperin.go.id diakses tanggal 15 Agustus 2016)
- Lewis, M. (1995). *-Competence Analysis and The Strategy Process*||. Engineering Department, University of Cambridge.
- M. Tampoe, 1994, *-Exploiting the Core Competences of Your Organization*|| Long Range Planning, 27 (4), 66-77.

- Meridian Institute, Innovations for Agricultural Value Chains in Africa: Applying Science and Technology to Enhance Cassava, Dairy, and Maize Value Chains. From: merid.org. diakses tanggal 15 Agustus 2016.
- Niskha Sandriana, Abdul Hakim, Choirul Saleh, 2015: *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Klaster di Kota Malang*, Reformasi, Vol. 5, No. 1, 2015
- Porter, M.E, 1990, *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press, New York
- Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review (v. 68, no. 3) pp. 79–91.
- Rahmat Nurcahyo, T.Yuri Maemunyah, Erlinda Muslim, Saparudin, 2011: *Perancangan Strategi Pengembangan Industri di Kabupaten Tangerang Berbasis Kompetensi Inti*, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10, Number 3, 2011
- Rahab, Najmudin & Istiqomah, 2013: *Local Economic Development Strategy Based on Local Industrial Core Competence*, International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 16; 2013, Published by Canadian Center of Science and Education.
- Rose, Catherine M, Ishii Kos, 2000 : *Applying Environmental Value Chain Analysis*. From : www.deflt.ac.nec
- Simons, Francis, Jones, 2001 : The UK red Meat industry : A value Chain Analysis Approach. From : www.mlc.org.uk/forum/phasetwo/. Retrieved April 2004.
- Shank, Jhon K., Govindarajan, Vijay : *Strategic Cost Management and the Value Chain.*, Thomson Learning
- Daryono, S, & Wahyudi, M, 2008: *Analisis Kompetensi Produk Unggulan Daerah Pada Batik Tulis dan Cap Solo di Dati II Kota Surakarta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9, No.2, Desember 2008, hal 184-197.
- Walsh, S.T. and Linton, J.D. (2001). *The competence Pyramid: a framework for identifying and analysing firm and industry competence*. Technology Analysis and Strategic Management, 13(2), 165-78.
- Weiler, Jhon, Schemel, Nelson, 2003 : *Value Chain And Value Coalitions*, ICH White paper. From : WWW.ICHnet.org retrieved 3 Mei 2004.
- http://www.academia.edu/5030147/PENGETAHUAN_BAHAN_-_POHON_INDUSTRI_UMBI-UMBIAN.

PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN BERBASIS POTENSI EKONOMI SEKTORAL

Sri Suharsih
Didit Welly Udjiyanto
Sri Astuti
Astuti Rahayu

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model kawasan andalan berbasis potensi daerah. Sasaran yang dituju adalah mengidentifikasi sektor dan subsector potensial di Kabupaten Sleman. Sektor potensial di Kabupaten Sleman diidentifikasi dengan menggunakan analisis *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan Tipologi Klassen dengan memanfaatkan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral tahun 2010-2014

Berdasarkan analisis DLQ yang dilakukan terhadap PDRB sektoral di Kabupaten Sleman dapat diketahui sektor dan subsector apa yang merupakan sektor unggulan di Wilayah Kabupaten Sleman. Analisis potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Sleman ini digunakan sebagai kerangka dasar dalam mengembangkan ekonomi daerah berbasis Kawasan Andalan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan penurnan kemiskinan di Kabupaten Sleman

Abstract

The purpose of this study was to develop a model based on potential local economy. The aim pursued is to identify the potential sector and subsector of local economy in Sleman. Potential sectors and subsectors identified using by Static analysis Location Quotient (SLQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ),and Klassen Typology by utilizing the data sectoral Gross Regional Domestic Product (GRDP) 2010-2014. Based on the analysis conducted on the DLQ sektoral GRDP in Sleman sector and subsector can be determined what is the dominant sector.

I. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, Kabupaten Sleman berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan tersebut antara lain persaingan usaha yang semakin meningkat yang disertai dengan penambahan jumlah penduduk. Peningkatan dinamika masyarakat dan persaingan usaha tersebut akan terasa semakin berat dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 menjadi tantangan bagi Kabupaten Sleman untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan investasi peluang usaha baru.

Berdasarkan potensi ekonomi daerah beberapa potensi bisnis di Kabupaten Sleman sangat memungkinkan untuk dikembangkan serta digali potensinya sehingga dapat menarik investor baru. Beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman adalah antara lain adalah sektor pertanian (agrowisata), industri, perdagangan dan jasa, serta sektor pariwisata, dengan kawasan pengembangan sesuai dengan RT/RW Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Kawasan Utara (Kawasan Lereng Gunung Merapi)

Kawasan ini merupakan penyangga air bersih di Kabupaten Sleman dan Kota Jogja. Kawasan ini tepat untuk investasi di bidang produksi air mineral, eko wisata, jasa kuliner, wisata agro, budidaya agrobisnis, wisata pedesaan, dll.

2. Kawasan Timur

Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan dan sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Sebagai kawasan area *non* irigasi dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi. Investasi yang cocok adalah pemasaran dan diversifikasi produk perkebunan, pengembangan fasilitas wisata serta sarana *event* wisata untuk sejarah kepurbakalaan.

2. Kawasan Tengah

Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Melati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan baru dan jasa. Investasi yang tepat untuk kawasan ini adalah pengembangan perdagangan baru untuk skala kecil hingga besar, wisata perkotaan dan pengembangan bisnis jasa pendidikan.

4. Kawasan Barat

Kawasan ini meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Kawasan ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku sehingga sangat cocok untuk budidaya pertanian dan perikanan darat.

Hal pokok yang menjadi pertimbangan pembangunan daerah Kabupaten Sleman saat ini adalah bagaimana kawasan-kawasan di wilayah Kabupaten Sleman dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasarkan potensi sektoral dan karakteristik spesifik yang dimilikinya. Berdasarkan uraian diatas, upaya pembangunan di segala bidang dan pengembangan kawasan-kawasan di wilayah Kabupaten Sleman perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Sleman sebagai kerangka dasar dalam mengembangkan ekonomi daerah berbasis Kawasan Andalan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Pembangunan Wilayah

Pendekatan terpadu (*integrated*) merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan di wilayah pusat kota (kota utama) dan desentralisasi yang menekankan pada penyebaran investasi pada wilayah belakang (perdesaan). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan yang dilaksanakan berdasarkan pertumbuhan berimbang. Argumen mengenai pendekatan terpadu dalam lingkup spasial dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan (Rondinelli, 1985:1-2).

2.2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Andalan

Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan didalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks melibatkan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik (pemerintahan) sehingga pada hakekatnya pengembangan wilayah adalah suatu sistem pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisahkan (Nugroho, 2004 dalam Sjafrizal).

Menurut Prod'homme dalam Rondinelli (1985) dalam pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan

memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Beberapa kata kunci yang terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu:

1. Program yang menyeluruh dan terpadu.
2. Sumber daya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah.
3. Suatu wilayah tertentu.

Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah perlu ditempuh pendekatan yang cocok sesuai dengan potensi, kondisi dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga pendekatan yang diterapkan akan cocok dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan dalam pengembangan wilayah ada 2 yaitu :

1. Pengembangan wilayah pendekatan sisi permintaan
Pendekatan sisi permintaan merupakan suatu pendekatan pengembangan ekonomi wilayah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan lokal atas barang dan jasa, maka akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan industri barang dan jasa akan mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan terjadi proses *multiplier effect* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Pengembangan Wilayah Pendekatan Sisi Penawaran
Pendekatan sisi penawaran merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas-komoditas tertentu yang diproses dari sumber daya lokal. Dengan adanya ekspor ke luar wilayah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

III. Metode Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data PDRB 17 sektor ADHK Kabupaten Sleman dan DIY tahun 2010-2014 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappeda

3.2. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ) dengan *Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan kurang prospektif dengan kriteria sebagai berikut:

	SLQ	DLQ	Keterangan
1	<1	<1	Sektor bukan unggulan yang tidak berpotensi unggulan
2	<1	>1	Sektor bukan unggulan tetapi berpotensi unggulan
3	>1	<1	Sektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan
4	>1	>1	Sektor unggulan yang berpotensi unggulan

Selain analisis LQ juga digunakan analisis Tipologi Klassen untuk menentukan klasifikasi sektoral di Kabupaten sleman

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis SLQ dan DLQ

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan analisis SLQ dan DLQ terhadap sektor dan subsektor PDRB di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 -2014 dapat ditemukan sektor dan subsektor yang masuk dalam kategori sektor dan subsektor

1. Kategori **Andalan** atau **unggulan dan berpotensi unggul** di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Subsektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi
 - b. Sektor konstruksi
 - c. Sektor transportasi dan pergudangan terutama pada subsektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan pos dan kurir
 - d. Sektor *real estate* dan
 - e. Sektor jasa perusahaan
2. Kategori **Prospektif** atau **Bukan merupakan Unggulan, namun berpotensi menjadi sektor unggulan** adalah
- a. Subsector keutanan dan penebangan kayu
 - b. Subsector industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman
 - c. Subsector industri alat angkutan
 - d. Subsector industri furniture
 - e. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
 - f. Sektor Informasi dan komunikasi
 - g. Subsector angkutan darat
 - h. Sektor jasa keuangan
 - i. Subsector jasa penunjang keuangan
 - j. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social
 - k. Sektor Jasa lainnya
3. Kategori **Kurang Prospektif** atau **Sektor Unggulan namun tidak berpotensi unggul** adalah:
- a. Subsektor tanaman hortikultura
 - b. Subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya
 - c. Subsektor angkutan udara
 - d. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
 - e. Sektor jasa pendidikan
4. Kategori **tidak prospektif** atau **bukan unggulan dan tidak berpotensi unggul** adalah
- a. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kecuali subsector tanaman hortikultura dan subsector kehutanan dan penebangan kayu
 - b. Sektor pertambangan dan penggalian
 - c. Sektor industri makanan dan minuman
 - d. Subsector industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
 - e. Subsector industri barang dari logam, komputer, barang elektronik dll
 - f. Subsector Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL pada sektor industri pengolahan
 - g. Sektor pengolahan listrik dan gas
 - h. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
 - i. Subsector jasa perantara keuangan
 - j. Subsector jasa asuransi dan dana pensiun
 - k. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan asuransi

4.2. Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Sleman, dengan menggunakan data PDRB 17 Sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Sleman selama periode 2010-2014 dan PDRB DIY diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Tipologi Klassen Kabupaten Sleman
Tahun 2010 – 2014

Share Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$g_i > g$	$g_i < g$
$s_i > s$	Sektor maju dan tumbuh Pesat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi ▪ Transportasi dan Pergudangan ▪ Jasa Perusahaan ▪ Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial 	Sektor maju tetapi tertekan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan ▪ Penyediaan akomodasi dan makan minum ▪ Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
$s_i < s$	Sektor Potensial <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertambangan dan penggalian ▪ Pengadaan listrik gas ▪ Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ▪ Informasi dan komunikasi ▪ Jasa Keuangan dan asuransi ▪ Jasa lainnya 	Sektor Relatif Tertinggal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian, kehutanan, dan perikanan ▪ Perdagangan besar dan eceran ▪ Reparasi mobil dan sepeda motor ▪ Jasa pendidikan

V. Penutup

Berdasarkan analisis potensi sektoral dengan menggunakan analisis SLQ dan DLQ di Kabupaten Sleman pada Tahun 2010-2014 diketahui bahwa sektor konstruksi, sektor transportasi pergudangan, *real estate* dan jasa perusahaan merupakan sektor utama yang merupakan sektor basis di Kabupaten Sleman. Sementara itu berdasarkan analisis Tipologi Klassen sektor yang merupakan sektor maju dan tumbuh pesat adalah Konstruksi Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial

Daftar Pustaka

- Arsyad, L., 1999, **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**, Edisi Pertama, BPF – UGM, Yogyakarta
- Bappeda DIY (2014), **Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2013**, tidak dipublikasikan
- Glasson, John (1978), **An Introduction to Regional Planning: Concepts, Theory, and Practice**, Hutchinson
- Munir, Risfan dan Bahtiar Fitanto (2005), **Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan**, Local Governance Support Program (LGSP), Jakarta
- Randinelli (1985) D, **Applied Methods of Regional Analysis**, Westview
- Press Colorado. Republik Indonesia (2013), **Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan**, Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, April, Jakarta
- Sjafrizal (2012), **Ekonomi Wilayah dan Perkotaan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

DAMPAK *STRESSOR* KERJA TERHADAP KINERJA

Anis Siti Hartati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: Anissh_fe@yahoo.com

Tri Mardiana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: triana_upn@yahoo.com

Abstract

Women workers who are married and have children is a woman whose role as wife and mother to her children as well as a career woman in the job. Daily role that she exercises is not easy, housewives often face demands perceived to be balanced with the ability she has, demands like that used to make a working woman experiencing stress at work.

Stress occurs because of an imbalance between the two roles, at the same time a woman is required to work as much as possible and on the other hand plays a mother who always pay attention to the family, in addition to their depressed feelings, feeling the implementation of the role that may affect the results of other roles because of a conflict between the values of life with the role that. The sources of stress (stressor) can be categorized in three things: the stressor task demands (tekanan related work premises), stressor demands of the role (the pressure exerted as a function of the role of employees, personal demands stressors is the pressure created by the family

Keywords: *Dual Role Conflict Women, Performance and stressors.*

Abstrak

Wanita pekerja yang sudah menikah dan mempunyai anak adalah seorang wanita yang berperan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dan sekaligus sebagai wanita yang berkarir dalam pekerjaannya. Peran sehari-harinya yang dijalankannya tidaklah mudah, ibu rumah tangga seringkali menghadapi tuntutan-tuntutan yang dirasakan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimilikinya, tuntutan-tuntutan seperti itu biasa membuat seorang wanita pekerja mengalami stres dalam bekerja.

Stres terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kedua peran tersebut, pada saat yang bersamaan seorang wanita dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dan di sisi lain berperan sebagai seorang ibu yang selalu memperhatikan keluarga, selain itu adanya perasaan tertekan, merasa pelaksanaan peran yang satu akan mempengaruhi hasil peran lain karena adanya pertentangan antara nilai-nilai hidup dengan peran yang dimiliki. Sumber-sumber stres (*stressor*) bisa dikategorikan dalam 3 hal yaitu *stressor* tuntutan tugas (tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan), *stressor* tuntutan peran (tekanan yang diberikan sebagai suatu fungsi dari peran sebagai karyawan, *stressor* tuntutan pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh keluarga

Kata Kunci : Konflik Peran Ganda Wanita, Kinerja dan *Stressor*.

A. PENDAHULUAN

Perubahan demografi ditandai dengan meningkatnya jumlah wanita pekerja, hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan jumlah wanita pekerja pada tahun 2011 mencapai 48.440 juta dibandingkan tahun 2010 sebesar 47.240 juta dan tahun 2009 yang baru 46.680 juta orang. Hal ini sejalan dengan terjadinya fenomena semakin meningkatnya partisipasi kerja wanita dan peran pekerja wanita dalam dunia bisnis. Arah perkembangan wanita pekerja menunjukkan peningkatan yang cukup berarti secara kuantitatif, sedangkan secara kualitatif perkembangan karier wanita pekerja pada tugas-tugas manajerial yang secara tradisional dijabat oleh pekerja laki-laki, menjadi nyata adanya

Menurut hasil penelitian, Jacinta (2002) menyatakan bahwa wanita pekerja yang menjadi responden ingin tetap bekerja, karena pekerjaan memberikan banyak manfaat yaitu mulai dari dukungan financial, mengembangkan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan aktualisasi kemampuan, memberikan kebanggaan diri dan kemandirian (meskipun penghasilan suami mencukupi), serta memungkinkansubyek mengaktualisasikan aspirasi pribadi lain yang mendasar seperti memeberi rasa yang berarti sebagai pribadi, meskipun keterlibatan dalam berbagai peran ini dapat memberikan keuntungan psikososial seperti ; peneingkatan kepercayaan diri, moral, serta kebahagiaan, kesulitan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga.

Berperan Ganda tidak mudah untuk dijalani sekaligus, sebagai seorang pekerja dan sebagai ibu rumah tangga, Wanita pekerja yang telah menikah dan punya anak memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih berat dari pada wanita *single*. Peran Ganda pun dialami wanita pekerja tersebut selain berperan dalam keluarga juga harus berkarier, maka hal inilah yang menjadikan timbulnya konflik peran ganda, yaitu konflik antara pekerjaan-keluarga dan keluarga-pekerjaan

Konflik pekerjaan-keluarga terjadi bila ada benturan antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab di rumah, satu sisi wanita dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurus dan membina keluarga secara baik, disisi lain dituntut pula untuk bekerja sesuai dengan standar perusahaan dengan menunjukkan kinerja yang baik, contohnya perusahaan sulit menuntut lembur atau tugas luar kota pada wanita pekerja yang mempunyai anak balita.

Konflik keluarga-pekerjaan menurut Kossek dan Ozeki dalam Namasivayam dan Zhao (2006), konflik keluarga-pekerjaan merupakan konflik yang muncul ketika peran seorang dalam keluarga mengganggu peran pekerjaannya, contohnya ketika wanita karier tersebut merasa terganggu pekerjaannya karena harus mengantar anaknya atau harus menjaga anaknya.

Kondisi-kondisi konflik peran ganda pada wanita pekerja tersebut sering memicu terjadinya konflik pada kehidupan perusahaan, bila tidak ditangani secara serius akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan, salah satunya adalah rendahnya kinerja karyawan secara keseluruhan, disamping itu juga bisa menyebabkan timbulnya tekanan jiwa secara psikologis (stres) pada diri karyawan tersebut.

Menurut Gitosudarmo dan Suditta (2000), stress mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif stress pada tingkat rendah sampai tingkat moderat bersifat fungsional yang artinya berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja, sedangkan pada tingkat negatif sters pada tingkat tinggi adalah penurunan kinerja.

Menurut Warell, (2002) menyatakan bahwa wanita yang bekerja mempunyai 3 (tiga) faktor dasar yang melandasinya, yang pertama adalah kebutuhan ekonomi, sering kali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, sehingga para wanita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Faktor yang kedua adalah karena adanya aspek-aspek pendidikan yang sudah lebih tinggi, faktor ini menjadikan wanita cenderung akan memilih untuk bekerja. Faktor yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan untuk lebih dihargai dan untuk merealisasikan potensi yang dimiliki.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini mendorong wanita untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka tidak mengherankan apabila saat ini sering menjumpai wanita yang bekerja. Dalam era sekarang ini, ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat, menyebabkan semakin berkurangnya sekat-sekat yang memisahkan antara pria dan wanita untuk bekerja. Dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi ibu rumah tangga membuat sang ibu merasa tugas rumah tangga dan tuntutan pekerjaan di kantor menjadi sang ibu merasa tertekan, terancam dan menghadapi konflik. Tuntutan tugas rumah tangga tersebut dianggap sang ibu melebihi sumber daya yang dimilikinya karena semua tugas rumah tangga dikerjakan seorang diri yang mana membutuhkan keterampilan, waktu, dan tenaga yang banyak. Ketidakseimbangan antara tuntutan dengan sumber daya yang dimiliki menyebabkan seorang ibu berada dalam kondisi stres yang dirasakan. Selain itu, keadaan yang kurang harmonis di keluarga ini juga berasal dari ketidakmampuan dalam pemenuhan peran sebagai pasangan suami istri dan peran sebagai orang tua akibat terlalu sibuk dan lelah dalam pekerjaannya. Jika ibu yang bekerja tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga maka akan menimbulkan tekanan sehingga mengakibatkan ibu tersebut sering marah-marah kepada anak dan suami, kurang memperhatikan anak-anak dan suami, cepat lelah, dan lain-lain. Tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu, seperti; pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan *deadline*.

Stres yang dialami oleh ibu rumah tangga terjadi karena sang ibu menilai bahwa tugasnya membawa kerugian pada dirinya sehingga dirasakan membebani oleh seorang ibu yang bekerja. Penilaian seorang ibu yang bekerja terhadap tugas ibu rumah tangga menentukan tingkat stres yang dirasakannya. Setiap orang dalam hidupnya mempunyai satu harapan untuk lebih baik daripada waktu sekarang dan untuk dalam mencapai cita-citanya dibutuhkan suatu usaha agar dapat mewujudkannya. Menjadi seorang wanita karir menjadi dambaan setiap wanita, wanita mandiri yang mempunyai pekerjaan, berpenghasilan dan memiliki jabatan di suatu perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep emansipasi wanita, di mana wanita juga ingin dihargai dan diapresiasi sama dengan pria. Sesuai dengan kodratnya sebagai seorang ibu dan istri, tenaga kerja wanita memiliki sebuah konflik peran ganda. Kodrat wanita yang utama yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga yang berbakti pada suami dan mengayomi anak-anaknya. Sedangkan peran wanita saat ini bertambah menjadi wanita pekerja. Peran ganda wanita juga sering disebut dengan *-dual career*".

Masalah peran ganda menyulitkan kedudukan wanita yang berkarir. Adanya pandangan normatif masyarakat yang beranggapan bahwa seorang wanita karir dinilai lebih berhasil apabila ia sukses dalam pekerjaannya dan juga dalam keluarganya. Setiap peran tentu saja menuntut konsekuensi dan tanggung jawab yang berbeda. Peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja menuntut wanita karir untuk menyeimbangkan pemenuhan kewajiban dan tugasnya, sehingga akan muncul konflik peran ganda. Konflik peran inilah yang mesti diperhatikan sebagai faktor pembentuk terjadinya stres di tempat kerja.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai peran ganda wanita terhadap kinerja, dengan pembahasan pengertian konflik peran ganda, kinerja, dan stres. Konflik peran ganda dapat menimpa laki-laki maupun perempuan, namun dalam penulisan ini hanya memfokuskan pada konflik peran ganda yang terjadi pada wanita karir yang sudah menikah.

Penulisan ini bertujuan untuk dapat menjadi masukan dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antara peran ganda dengan stres kerja sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta sebagai acuan pengambilan kebijakan suatu perusahaan bagi karyawan wanita yang sudah berkeluarga. Dapat menjadi masukan bahwa konflik peran ganda berpengaruh terhadap stres kerja, sehingga keluarga dapat memberikan dukungan agar tidak menimbulkan stres dalam pekerjaanya.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Konflik Peran Ganda Wanita

Konflik sebagai suatu situasi dimana terjadi emosi dan tujuan yang tidak sesuai satu sama lain terhadap individu yang satu dengan yang lainnya kemudian menyebabkan timbulnya pertentangan. Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik diartikan sebagai kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurut Luthans (2001: 407) peran didefinisikan sebagai suatu posisi yang memiliki harapan yang berkembang dari norma yang dibangun. Individu yang terlibat dalam peran ganda bisa menghadapi pilihan perilaku yang rumit. Hal ini terjadi karena mereka harus menjalani berbagai peran yang berbeda, sementara dalam masing-masing peran itu sendiri bisa terjadi dari serangkaian peran yang kompleks.

Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir mempunyai kesulitan-kesulitan dalam memenuhi tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga, individu, istri, wanita pekerja, dan warga masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan dari salah satu peran baik sebagai individu, ibu rumah tangga, istri, warga masyarakat maupun sebagai wanita pekerja akan menimbulkan konflik, sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga. Menurut Fisher, (2001:143- 170) Konflik peran juga akan muncul disaat seorang karyawan menunjukkan harapan yang tidak sesuai sehingga membuatnya sulit atau secara efektif tidak mungkin sesuai dengan harapan pihak lain. Konflik peran ini terjadi ketika kehidupan rumah tangga seseorang berbenturan dengan tanggung jawabnya di tempat kerja, seperti masuk kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas harian, atau kerja lembur. Demikian juga tuntutan kehidupan rumah tangga yang menghalangi seseorang untuk meluangkan waktu untuk pekerjaannya atau kegiatan yang berkaitan dengan karirnya.

Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir dapat menyebabkan hambatan dalam bekerja. Bila tidak ingin seperti itu disarankan sebaiknya wanita tersebut tidak berprinsip sebagai seorang wanita super yang sanggup melakukan semua pekerjaan sendiri. Ketidakmampuan seorang wanita karir dalam menyelesaikan konflik peran ganda tersebut dapat menyebabkan mereka menampilkan sikap kerja yang negatif misalnya kurang termotivasi dalam bekerja, kurang konsentrasi, yang disebabkan urusan keluarga sehingga dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerja. Konflik akibat peran ganda yang dimiliki oleh karyawan perempuan dapat menyebabkan tingkat stres kerja yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan perempuan.

Stoner et al. (1990) menyatakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik peran ganda, yaitu:

1. *Time pressure*, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk keluarga.
2. *Family size* dan *support*, semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak konflik, dan semakin banyak dukungan keluarga maka semakin sedikit konflik.
3. Kepuasan kerja, semakin tinggi kepuasan kerja maka konflik yang dirasakan semakin sedikit.
4. *Marital and life satisfaction*, ada asumsi bahwa wanita bekerja memiliki konsekuensi yang negatif terhadap pernikahannya.
5. *Size of firm*, yaitu banyaknya pekerja dalam perusahaan mungkin saja mempengaruhi konflik peran ganda seseorang.

Dampak konflik yang terjadi dalam hidup manusia. Dampak konflik tersebut ada yang berdampak positif dan ada juga berdampak negatif. Dampak konflik yang berpengaruh dalam kinerja seseorang:

1. Dampak positif

Menurut Wijono (1993: 3) menyatakan bahwa dampak konflik positif yaitu apabila upaya penanganan dan pengelolaan konflik yang terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan dilakukan secara efisien dan efektif maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang seorang karyawan sebagai sumber daya manusia yang potensial.

2. Dampak negatif

Menurut (Wijono, 1993: 2) dampak konflik negatif disebabkan oleh kurang efektifnya pengelolaan. Kurang efektifnya pengelolaan yang dimaksud di sini yaitu adanya kecenderungan untuk membiarkan konflik semakin bertambah. Menghindari adanya sebuah konflik bukanlah keputusan yang baik, karena yang terpenting adalah menghadapi konflik tersebut dan menyelesaikannya, bukan menghindari, kemudian membiarkannya terjadi.

Dengan menjalani peran ganda, maka konsentrasi seseorang bisa terpecah. Jika hanya memfokuskan diri pada satu peran saja, maka peran yang lain akan terbengkalai. Sebagai contoh, jika seorang wanita hanya fokus pada keluarga, maka tanggung jawab pada pekerjaannya akan terbengkalai, kualitas kinerja menurun, prestasi dan produktivitas di kantor semakin memburuk. Demikian juga sebaliknya, jika wanita hanya berfokus terhadap pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab pada pekerjaan di luar rumahnya, maka situasi dan kondisi keluarganya akan memburuk.

2.2 Stressor

Stres kerja adalah suatu reaksi perasaan tertekan atau terganggu baik fisik, psikologis, maupun perilaku yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. *Stres kerja* merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Menurut Robin (2006) menjelaskan bahwa stres adalah suatu kondisi yang dinamis dalam mana seseorang individu dihadapkan pada suatu peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan individu tersebut dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Sedangkan Davis dan Newstrom (1996) menyatakan stres sebagai bentuk kondisi yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang terjadi ditempat kerja merupakan hasil reaksi emosi akibat kegagalan individu beradaptasi di lingkungan kerja dimana terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan.

Menurut Margiati (1999: 78) mengkategorikan gejala stres tersebut menjadi:

- a. Bekerja melewati batas kemampuan
- b. Keterlambatan masuk kerja
- c. Ketidakhadiran pekerjaan
- d. Kesulitan membuat keputusan
- e. Kesalahan yang sembrono
- f. Kelalaian menyelesaikan pekerjaan
- g. Lupa akan janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendiri
- h. Kesulitan berhubungan dengan orang lain
- i. Kerisauan tentang kesalahan yang dibuat
- j. Menunjukkan gejala fisik seperti pada alat pencernaan, tekanan darah tinggi, radang kulit, radang pernafasan.

Menurut Hendrix, Spencer & Gibson (1994) terdapat beberapa macam stres yang dihadapi oleh wanita, yaitu:

1. Wanita pekerja dipengaruhi oleh sumber stres (*stressor*) yang biasanya dihadapi oleh laki-laki seperti beban kerja yang berlebihan, *overskills*, *underutilization skills*, kebosanan kerja, hubungan dengan pasangan dan anak, dan masalah keuangan.
2. Sumber stres (*stressor*) yang kedua ini bersifat unik dan berasal dari pekerjaannya atau di luar pekerjaan. Yang berasal dari pekerjaan misalnya; kebosanan, rendahnya tingkat kekuasaan, permintaan tinggi dalam pekerjaan pekerjaan, dan sedikitnya promosi yang diberikan perusahaan

Leontaridi dan Ward (2002) menyatakan bahwa sumber stres kerja (*stressor*) disebabkan oleh faktor lingkungan kerja seperti tekanan kerja yang berat, manajemen yang tidak sehat dan hubungan yang buruk dengan karyawan lainnya. Gejala stres ditempat kerja dapat diamati dari perilaku para karyawan, antara lain : kepuasan kerja yang rendah, kinerja yang menurun, semangat kerja menghilang, kurangnya kreativitas, keputusan yang jelek, serta banyak melakukan pekerjaan yang tidak produktif. Stres yang dialami seorang ibu rumah tangga terjadi karena sang ibu menilai bahwa tugasnya membawa kerugian pada dirinya sehingga dirasakan membebani oleh sang ibu. Penilaian sang ibu terhadap tugas rumah tangga menentukan derajat stres yang dirasakannya. Stres pada karyawan bukanlah suatu hal yang selalu berakibat buruk pada karyawan dengan hasil kinerjanya, namun di sisi lain stres juga dapat memberikan sebuah motivasi bagi karyawan untuk memberikan rasa semangat dalam menjalankan setiap pekerjaannya untuk mencapai prestasi kerja yang baik untuk karir karyawan dan untuk kemajuan perusahaan.

Menurut Robbin (2006) ada 3 faktor yang menjadi penyebab utama Stres (*Stressor*) yaitu :

1. Faktor Lingkungan luar perusahaan seperti ketidakstabilan dalam pemerintahan yang berakibat pada tidak menentukannya jaminan kepastian hukum dan factor teknologi yang semakin cepat berubah sehingga mengharuskan seorang harus segera beradaptasi
2. Faktor Lingkungan di dalam perusahaan seperti masalah tuntutanpekerjaan atau beban kerja, kurangnya tingkat kebebasan berekspresi, hubungan antar pribadi yang tidak harmonis
3. Faktor Pribadi yaitu factor-faktor yang terjadi dari diri pribadi termasuk lingkungan pribadinya seperti masalah keluarga/ suami isteri, banyaknya kebutuhan melebihi pendapatan ataupun ketidakcocokan dalam bekerja

2.3 Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam

rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Menurut As'ad (2004: 46) mendefinisikan kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Ostroff (1992), menerangkan dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Asumsi tentang pengertian tersebut didasarkan pada individu yang dapat memuaskan kebutuhannya dengan cara mencapai apa yang menjadi tujuannya dan dapat memberi kontribusi bagi organisasi untuk meraih tujuan. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang akan dicapai nantinya.

Menurut Gibson, (1986) ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang individu:

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward system*).

Kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas yang didapat. Penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dan sesuai dengan prosedur. Sebuah perusahaan atau organisasi memiliki tingkatan pekerjaan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Semakin tinggi tingkatan pekerjaan tersebut maka akan semakin tinggi pula tanggungjawab dan imbalan yang akan diterima karyawan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah para staf pengajar wanita perguruan tinggi di DIY. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti dimana sampel yang dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang dikembangkan.

Untuk pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dosen
- b. Bekerja minimal 5 tahun
- c. Sudah menikah dan memiliki anak balita

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu: variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya, dan variabel bebas (*independent variable*) atau variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat (*dependent variable*), yaitu stres kerja (Y1) dan kinerja (Y2).
2. Variabel tidak terikat (*independent variable*), yaitu konflik peran ganda atau *work-family conflict* (X)

3.3 Data

Menggunakan data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1-5 yang diberikan kepada responden, yaitu staf pengajar di DIY.

3.4 Metode Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 21, yakni dengan metode *Path Analysis* (analisis jalur).

3.4.1 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan data yang hanya dapat diukur secara langsung. Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Pengeditan (*editing*)
2. *Coding*
3. *Scoring*
4. *Tabulating*
5. Statistik Deskriptif

3.4.2 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistic, maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu untuk mempermudah dalam menganalisis menggunakan *program SPSS for Windows*.

4. PEMBAHASAN

Dampak *Stressor* yang disebabkan karena tuntutan Tugas, Peran dan Pribadi terhadap kinerja individu dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua, disatu sisi *stressor* karena tuntutan Tugas, Peran dan Pribadi yang berlebihan (*over Stress*) akan dapat menyebabkan kinerja menurun sedangkan sebaliknya ketika tuntutan tugas, peran dan pribadi yang masih dalam tingkatan moderat justru bisa meningkatkan kinerja individu tersebut.

Peran ganda muncul ketika seorang individu menjalankan posisi yang berbeda dari organisasi atau kelompok dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh peran ganda, yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab di tempat kerja, tetapi juga bertanggung jawab di rumah. Wanita dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua bidang yang bertentangan. Wanita yang memiliki peran ganda akan bertemu dengan konflik-konflik yang timbul akibat pilihan yang sulit. Stres kerja pada karyawan perempuan adalah tanggapan seorang karyawan perempuan terhadap suatu kondisi atau kejadian yang ada di perusahaan

yang dapat mengganggu kondisi fisik dan psikologisnya. Pekerjaan wanita yang berperan ganda berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi anak-anak, berhasil mengurus rumah tangga, anak-anak serta suami, tetapi tetap dapat menyalurkan kebutuhan keluarga sebagai makhluk sosial, mampu mandiri dari segi keuangan, pengembangan wawasan, dan bangga saat menjadi wanita karir. Robbins (2003) menyatakan tingkat stres yang mampu dikendalikan mampu membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, karena membuat mereka mampu meningkatkan intensitas kerja, kewaspadaan, dan kemampuan berkreasi, tetapi tingkat stres yang berlebihan membuat kinerja mereka akan mengalami penurunan. Keinginan untuk menjalankan kedua peran tersebut dengan sempurna, terkadang saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan masalah pada kinerjanya

5. Kesimpulan

Wanita yang menjalani peran ganda, maka konsentrasinya bisa terpecah, jika hanya memfokuskan diri pada satu peran saja, maka peran yang lain akan terbengkalai. Seorang wanita hanya fokus pada keluarga, maka tanggung jawab pada pekerjaannya akan terbengkalai, kualitas kinerja menurun, prestasi dan produktivitas di kantor semakin memburuk. Demikian juga sebaliknya, jika wanita hanya berfokus terhadap pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab pada pekerjaan di luar rumahnya, maka situasi dan kondisi keluarganya akan memburuk. Gejala timbulnya stres inilah yang harus segera diatasi agar tidak mempengaruhi kinerjanya. Stres kerja yang dialami oleh wanita pekerja ini bisa disikapi dan dikelola dengan baik. Hal ini tergantung dari pengalaman kerjanya, hubungan social dengan rekan-rekan kerjanya, dan juga dukungan rekan-rekan kerjanya.

Gejala terjadinya stres ditempat kerja dapat diamati dari perilaku para karyawan, antara lain : kepuasan kerja yang rendah, kinerja yang menurun, semangat kerja menghilang, kurangnya kreativitas, keputusan yang jelek, serta banyak melakukan pekerjaan yang tidak produktif. Kinerja adalah perilaku yang nyata dan dapat ditunjukkan kepada setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan kinerjanya.

REFERENSI

- As'ad, M. (2004). -Psikologi Industrill, Seri Umum. Sumber Daya Manusia. Edisi 4. Liberty, Yogyakarta.
- Beehr, T.a. & Newman, J.E. (1978). -Job stress. Employee Health and Organization Effectiveness: A Facet Analisis Model and Literature Review. Personel Psychology.
- Davis, Keith, dan Newstorm. (1996). -Perilaku dalam Organisasill. Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Fisher, Richard. (2001). -Role Stress, The Type A Behavior Pattern, And External Auditor Job Satisfaction And Performancel, Behavioral Research in Accounting 13 : 143-170.
- Gibson. (1986). -Organisasi". Jakarta: Bina Aksara.

- Hendrix, W.H., Spencer, B.A., & Gibson, G.S., (1994). -Organizational and extraorganizational factors affecting stress, employee well-being, and absenteeism for males and females. *Journal of Business and Psychology*, 9 (2), 103-128
- Leontaridi, R.M and Ward, M.E. (2002). -Work-Related Stress, Quitting Intentions and Absenteeism. Available on line at <http://www.ssrn.com>
- Luthans, F. (2001). -Organizational Behavior. Ninth Edition. New York: Mc.Graw Hill.
- Ostroff, C. (1992). -The Relationship Between Satisfaction Attitudes and Performance an Organization Level Analysis. *Journal of Applied Psychology*, Vol.77, No. 68.
- Robbins, Stephen.P. (2006). *Perilaku Organisasi*. PT Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Robbins, Stephen . (2003). -Perilaku Organisasi. Jilid Satu. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Robbins, S. P. (2003). -Organizational Behavior. 10th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Publishers.
- Santrock, W. John. (2002). -Life-Span Development. Perkembangan Masa Hidup. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Stonner, Charles R. (1990). -Workhome role conflict in female owners of small business: an exploratory study. *Journal of small business management* , 28 (1), page 30-38.
- Wijono, S. -Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis. Satya Wacana, Semarang. 1994.
- Worell.J. (2002). -Encyclopedia of women and gender: Sex similarities and differences of society on Gender. London: Academic Press.

**PENGARUH BUDAYA, KUALITAS PELAYANAN, PENGGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA
PADA PERPUSTAKAAN**

Ketua : Dr. Hiras Pasaribu, MSi., Ak., CA

Anggota : Drs. Alp. Yuwidianoro., MSi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, kualitas Layanan dan penggunaan teknologi informasi terhadap kepuasan mahasiswa. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Manajemen, Akuntansi dan Ilmu Ekonomi; sebanyak 100 mahasiswa. Penelitian ini , adalah studi survey, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, menggunakan pengukuran data dengan skala pengukuran 5 (*Likert type item*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable empathy (kualitas layanan dan perhatian layanan perpustakaan) dan penggunaan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hasil ini memberi informasi pada pimpinan untuk menyesuaikan atau meningkatkan pelayanan karyawan perpustakaan terhadap mahasiswa pengunjung perpustakaan dan meningkatkan ketersediaan serta penggunaan teknologi informasi di perpustakaan.

Kata kunci : Budaya organisasi; kualitas layanan; teknologi informasi dan kepuasan mahasiswa.

Abstract

This study aims to determine the influence of organizational culture, quality of services and use of information technology on student satisfaction. Respondents in this study is a student of Management, Accounting and Economics; as many as 100 students. This study, is a survey study, by distributing questionnaires to the respondents, using data measurement with 5 measurement scale (*Likert type item*). The results showed that empathy variable (quality of service and attention library) and the use of information technology that significantly influence student satisfaction. These results provide information to leaders to adjust or improve services to students of library employees of library visitors and increase the availability and use of information technology in library.

Key words : Organizational culture; quality of services; information technology; student satisfaction

PENDAHULUAN

Banyak penelitian yang mengangkat kepuasan mahasiswa terhadap perpustakaan, tetapi temuannya berbeda-beda; hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan di setiap organisasi pendidikan mempunyai kinerja yang berbeda. Kinerja perpustakaan terkait dengan budaya organisasi; sumberdaya manusia yang memberi layanan dan ketersediaannya buku pustaka serta penerapan teknologi di perpustakaan. Masalah penelitian yang diajukan adalah : apakah budaya organisasi, kualitas layanan dilihat dari *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy* dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN –Veteran Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai bahan kajian untuk menyusun kebijakan dan program peningkatan kualitas layanan perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN –veteran Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi dan kepuasan didasarkan pada *Theory of Reasoned Action* (TRA oleh Fiesbean).

Kepuasan Mahasiswa

Kepuasan pelanggan adalah kepuasan atau kekecewaan yang dirasakan oleh pelanggan setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan yang diperolehnya. Tjiptono (2010) mengatakan : Kepuasan atau ketidak puasaan pelanggan adalah respon adalah pelanggan; sebagai hasil evaluasi ketidak sesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja.

Budaya Organisaasi dan Kepuasan Mahasiswa

Budaya diartikan sebagai suatu pikiran atau akal budi (Kamus Besar Bahasa Indonesia); budaya bias diartikan sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sulit berubah; sedangkan budaya organisasi adalah seperangkat asumsi yang dibangun dan dianut bersama dalam organisasi sebagai modal dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal (Poerwanto 2008). Astuty dan Ike dalam penelitiannya (2010) dan penelitian Soejono (2005) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja; demikian juga dengan penelitian Jaya, Adam Wie (2013) menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Kualitas Layanan dan Kepuasan Mahasiswa

Pelayanan atau layanan diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia); menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : 63/KEP/M/PAN/7/2003; Pelayanan (umum) diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Menurut Juran dan Deming dalam Pasaribu (2009); mengataakan bahwa kualitas adalah kesesuaian untuk pengguna (*Fitness of use*), hal ini bisa diartikan bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna; sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas layanan adalah suatu perbuatan menawarkan tercapainya kepuasan pengguna.

Dalam penelitian ini menggunakan 5 faktor yang menentukan kualitas layanan yaitu *tangibles* (bukti langsung), *reliability* (reliabilitas), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *empathy* (empati; kemudahan berelasi, komunikasi dan perhatian). Penelitian Maysaroh (2003); Pasaribu (2009) serta Ciptono dan Diana (2010) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Kepuasan Mahasiswa

Pada dasarnya sebuah perpustakaan adalah sumber informasi, pengguna mengharapkan dapat memperoleh informasi yang relevan yang luas secara efisien dan efektif; Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai teknik dan prosedur menyimpan, memproses serta mendistribusikan data dan informasi secara efisien dan efektif (Kusuma; Arif 2014). Penelitian Pasaribu (2009) dan Kusuma (2014) menyimpulkan bahwa tersedianya buku referensi dan jurnal di perpustakaan dapat meningkatkan respon positif kepuasan mahasiswa.

Hipotesis yang dikembangkan

Budaya organisasi, kualitas layanan dilihat dari *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy* dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey yang kuesioner untuk mengumpulkan data primer, dengan responden 100 mahasiswa UPN -Veteran Yogyakarta. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel dengan menggunakan skala Likert 5 item. Model penelitian untuk menguji hipotesis memakai Regresi Linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Dimana :

Y = kepuasan mahasiswa

b_i = koefisien regresi

X_1 = budaya organisasi

X_2 = *tangible*

X_3 = *reliability*

X_4 = *Responsiveness*

X_5 = *assurance*

X_6 = *empathy*

X_7 = penggunaan teknologi informasi

HASIL PENELITIAN

Dengan menggunakan spss 16, dieproleh hasil bahwa secara bersama X1,X2,X3,X4,X5,X6 dan X7 mempengaruhi kepuasan mahasiswa, artinya budaya organisasi, kualitas layanan yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan penggunaan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa jadi hipotesis penelitian terdukung. Tetapi secara parsial hanya X6 (empathy) dan X7 (penggunaan teknologi informasi) saja yang signifikan mempengaruhi kepuasan mahasiswa, hasil ini menunjukkan bahwa karakter mahasiswa UPN -veteran Yogyakarta sudah mempunyai budaya organisasi yang satu, mungkin ini sebagai indikan keberhasilan muatan mata kuliah WidyawatYasa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPN -Veteran Yogyakarta lebih menghendaki adanya empati (X6); yaitu kemudahan berelasi, komunikasi dan perhatian dari pustakawan, atau ditingkatkannya humanisme pustakawan akan meningkatkan kepuasan mahasiswa. Disisi lain X7 Juga signifikan mempengaruhi kepuasan mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa UPN -Veteran Yogyakarta, menyadari bahwa penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan manfaat yang dapat menunjang proses belajar mereka, mahasiswa menghendaki ditingkatkannya akses informasi untuk meningkatkan kepuasan mereka.

PENUTUP

SIMPULAN

1. Budaya organisasi, kualitas layanan yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan penggunaan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.
2. secara parsial hanya X6 (empathy yaitu kemudahan berelasi, komunikasi dan perhatian) dan X7 (penggunaan teknologi informasi) saja yang signifikan mempengaruhi kepuasan mahasiswa.

REKOMENDASI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan dan penggunaan teknologi informasi di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuty, Windy Fitria dan Ike DS; 2014., *Strategi Sosialisasi Budaya Organisasi kepada karyawan PT. Astra International-Tbk Honda Sales Office Region Yogyakarta.*, Jurnal Ilmu Komunikasi p.1-15.

Bintoro, Udan; (2002)., *Pengaruh Praktek Manajemen Sumberdaya manusia terhadap Budaya organisasi dan kinerja perusahaan.*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.

Chatman, Jennifer and Bersade; 1997., *Employee Satisfaction, Factor Assosiated With Company Performance, Journal of Applied Psychology*, Februari;p. 29-42.

Djokosantoso, Moelyono; 2003., *Budaya korporat dan Keunggulan Korporasi*; Elex Media Komputindo, Jakarta.

Fuadi, Arabella Oentari; 2013., *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajaakaan dan biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*; Jurnal Universitas Kristen Petra; Jakarta.

Jaya, Agam Wie; 2013., *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Devisi SDM PT. Inti Persero*; <http://Repository.Widyatama.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/4417>, Widyatama Repository, akses tanggal 15 Maret 2016.

Kotler, P.2000., *Marketing Manajemen 9th edition.*, New Jersey; Prentice Hall International Inc.

Kusuma, Arif AP; 2014., <http://www.esaunggul.ac.id/article/pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-proses-pengajaran-di-indonesia-2/>.

Kuswadi; 2004., *Cara mengukur Kepuasan Karyawan*, PT.Elex Media Komputindo. Jakarta.

Maisyaroh, Siti; 2010. *Pengaruh Manajemen Mutu Layanan Terhadap Kepuasan Peserta Didik*; Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta.

Pasaribu, Hiras; 2009., *Pengaruh Komitmen, Persepsi dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial.*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia ; Volume 6, Desember 2009.

Poerwanto; 2008., *Budaya Perusahaan*; Pustaka Belajar; Yogyakarta.

Putra, Yoan Santosa dan Eris Dianawati dan Endi Sarwoko; 2014., *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna jasa Parkir.*, <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>. Diakses 9 April 2015.

Samosir, Zurni Zahra; 2005., *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU*; Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi; Vol 1; Juni.

Suwardjono; 2008., *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*; Edisi ketiga; BPFE; Yogyakarta.

Tjiptono dan Diana; 2010., *Total Quality Managemen*; Andi Ofset; Yogyakarta.

Lampiran
Output SPSS 16

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	100	7.00	20.00	14.0100	3.28601
x2	100	7.00	20.00	13.7600	3.05214
x3	100	6.00	20.00	13.1300	2.53323
x4	100	5.00	20.00	13.8000	3.23803
x5	100	6.00	20.00	14.0900	2.81445
x6	100	8.00	20.00	13.9400	2.96382
x7	100	6.00	20.00	14.2000	2.65147
y	100	6.00	20.00	13.0200	3.02174
Valid N (listwise)	100				

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.305	2.040		-.640	.524
x1	-.011	.096	-.012	-.115	.908
x2	.004	.131	.004	.030	.976
x3	.258	.140	.216	1.847	.068
x4	.218	.121	.233	1.805	.074
x5	.010	.140	.009	.071	.944
x6	.194	.083	.190	2.333	.022
x7	.366	.110	.321	3.315	.001

a. Dependent Variable: y

PENGARUH ADOPSI IFRS TERHADAP MANAGEMEN LABA

Lita Yulita Fitriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: lita.yf@gmail.com

Sri Suryaningsum

Accounting Departement, Business And Economic Faculty,
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta, Indonesia
email: suryaningsumsri@yahoo.com

Abstract

The adoption of IFRS is a new phenomenon because it is done by Indonesia in 2012, making this a two-year financial statements are presented in a new phenomenon. The phenomenon of the adoption of IFRS is important to investigate, because the characteristics of IFRS which is very different from the characteristics of previous domestic standards. Characteristics of a principles-based IFRS, whereas the characteristics of previous domestic standards are rule-based..

This study aims to provide empirical evidence about the effect of the adoption of IFRS on earnings management and test management level difference between the earnings before and after the adoption of IFRS. The object of research is manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2009-2011 (before IFRS) and 2012-2014 (after IFRS). The sampling technique used was purposive sampling. The main variables in this study are the IFRS and earnings management.

Based on this study concluded that that was new IFRS applicable in Indonesia, the possibility can not be fully implemented as a whole and effectively so that still allow for the occurrence of earnings management. The results of this study indicate that there are no differences in earnings management statistically significant before and after the full IFRS adoption. This suggests that the presence of SFAS IFRS-based company has not been able to reduce the actions that managers oportunitis earnings management.

Keywords: *Earnings Management, Adoption of IFRS*

Abstrak

Adopsi IFRS merupakan fenomena baru karena dilakukan oleh Indonesia tahun 2012, sehingga dua tahun ini laporan keuangan disajikan dalam fenomena yang baru. Fenomena adopsi IFRS ini penting untuk diteliti, karena karakteristik IFRS yang sangat berbeda dengan karakteristik standar domestik sebelumnya. Karakteristik IFRS berbasis prinsip, sedangkan karakteristik standar domestik sebelumnya adalah berbasis aturan.

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen laba dan menguji perbedaan tingkat manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 (sebelum IFRS) dan 2012-2014 (setelah IFRS). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Variabel utama dalam penelitian ini adalah IFRS dan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa bahwa IFRS ini masih baru berlaku di Indonesia, kemungkinan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara keseluruhan dan efektif sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan secara statistik

sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PSAK berbasis IFRS di perusahaan belum mampu mengurangi tindakan oportunitis manajer yaitu pengelolaan laba.

Kata Kunci: Manajemen Laba, Adopsi IFRS, Indonesia,

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan internasional mensyaratkan perusahaan harus memahami praktik akuntansi ditempat perusahaan tersebut berkedudukan. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan hampir tanpa batas negara, sumber daya produksi (misal uang) yang dimiliki oleh seorang investor di satu negara tertentu dapat dipindahkan dengan mudah dan cepat ke negara misalnya melalui mekanisme bursa saham. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di negara lain. Investor dan kreditor serta calon investor dan calon kreditor akan menemui banyak kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan dengan standar yang berbeda-beda. Hal tersebut diatas yang mendorong timbulnya standar akuntansi internasional yaitu IFRS (International Financial Reporting Standards) yang dirumuskan oleh IASB (International Accounting Standard Board) yang sekarang ini telah diterapkan dan diadopsi di negara-negara Eropa dan Amerika pada tahun 2005.

Perbedaan persepsi akuntansi di setiap negara maka dibentuklah Standar Akuntansi Internasional yang dikenal dengan IFRS yang nantinya bertujuan memudahkan rekonsiliasi bisnis dalam lintas negara dan sekarang ini satu per satu negara di dunia telah dan mulai mengadopsi IFRS. Penerapan dan adopsi mengenai IFRS ini merupakan suatu hal yang menimbulkan perdebatan dan berbagai macam reaksi dari berbagai negara di dunia, baik reaksi yang mendukung maupun reaksi yang menentang.

Dengan mengadopsi IFRS, akan lebih membantu para investor dalam mengestimasi investasi pada perusahaan berdasarkan data-data laporan keuangan perusahaan pada tahun sebelumnya, semakin meningkatnya tingkat pengungkapan suatu perusahaan maka berdampak pada rendahnya biaya modal perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan representasi agar dapat mempengaruhi tujuan pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan manajemen kepada pemegang saham harus dapat mewakili kondisi baik buruknya kondisi ekonomi suatu perusahaan. Scott (2012) menyatakan bahwa apabila beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis memiliki informasi lebih dibandingkan pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Kondisi asimetri tersebut dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan menyembunyikan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pemegang saham. Semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi (obtaining private gains). Pihak manajemen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi dalam pelaporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Manajemen laba diduga dilakukan oleh pihak manajemen dalam proses pelaporan keuangan suatu perusahaan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (accounting methods) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut accounting regulations. Menurut Siregar dan Bachtiar (2003) perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung mengungkapkan informasi lebih sedikit dalam laporan keuangannya agar tidak terdeteksi. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan minimal cenderung melakukan manajemen laba dan sebaliknya. Sulistyanto (2008) mengemukakan bahwa keberadaan aturan dalam standar akuntansi dapat merupakan salah satu alat yang mengakomodasi dan memfasilitasi perusahaan melakukan kecurangan.

Perusahaan dapat menyembunyikan kecurangan dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang terdapat dalam standar akuntansi, sehingga standar akuntansi seolah-olah mengakomodasi dan memberi kesempatan perusahaan untuk mengatur dan mengelola laba perusahaan.

Salah satu upaya untuk mengurangi praktik manajemen laba tersebut dengan melakukan koreksi terhadap standar akuntansi. Perbaikan standar akuntansi yang saat ini sedang menjadi isu menarik adalah pengadopsian IFRS. Implementasi adopsi IFRS secara keseluruhan berlaku efektif dan wajib bagi perusahaan yang go public di Indonesia terhitung mulai 1 Januari 2012. Penetapan tersebut diharapkan mampu meminimalisasi tingkat manajemen laba di perusahaan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh adopsi IFRS terhadap praktik manajemen laba salah satunya oleh Handayani (2014), yang menyatakan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun penelitian yang dilakukan oleh Narendra (2013), menyatakan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap manajemen laba, tetapi penurunan tingkat manajemen laba tidak terlalu signifikan. Berdasarkan fakta di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menginvestigasi apakah adopsi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba di Indonesia, terutama pada sektor perusahaan manufaktur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang relevan untuk mengevaluasi penerapan adopsi IFRS di Indonesia. Selain itu, adopsi IFRS secara bertahap yang dipilih oleh DSAK membuat lebih temotivasi untuk melakukan penelitian sejenis pada periode selanjutnya, karena efek dari penerapan adopsi IFRS pada manajemen laba dimungkinkan akan berbeda di setiap tahun karena adanya kemajuan adopsi IFRS.

KAJIAN LITERATUR

1. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan karenamanajemen laba termasuk dalam kegiatan yang melibatkan potensi pelanggaran, kejahatan, dan konflik yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang bertujuan untuk menarik minat investor. Tingginya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan makan antinya akan berhubungan erat dengantingkat kualitas laba yang rendah dan manajer melakukan manajemen laba untuk menjamin laba yang berkualitas tinggi (Daniati dan Suhairi, 2006).

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba merupakan sebuah intervensi yang memiliki tujuan teretentu dalam hal pelaporan keuangan eksternal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuaidengan realitas ekonomi, sehingga kualitas laba menjadi rendah. Manajemen melakukan manajemen laba disamping untuk mendapatkan keuntungan pribadi adalah adanya keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya terlihat baik. Manajemen laba dilakukan dengan motivasi untuk menyampaikan inside information kepada investor. Dalam jangka panjang kinerja aktual perusahaan akan semakin mendekati tingkat kinerja yang dilaporkan dan para investor akan semakin meningkatkan kepercayaannya pada nilai kinerja yang dilaporkan. Sebaliknya, jikamanajemen laba dilakukan dengan motivasi untuk menunda pengakuan kinerja yang buruk maka dalam jangka panjang kinerja aktual perusahaan tidak akan mendekati nilai kinerja yang dilaporkan dan para investor akan semakin tidak mempercayai laporan 27 manajemen pada laporan keuangan (Gul, 2003). Pengukuran manajemen laba secara konvensional menggunakan *Discretionary Accruals* (DA).

Beberapa penelitian telah banyakdilakukan mengenai adopsi IFRS terhadapkualitas informasi akuntansi yang dicerminkan dengan manajemen laba di tiap negara didunia. Chen (2010) menemukan bukti empiris bahwa dengan adopsi IFRS secara mandatory dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan menurunkan manajemen laba dibandingkan

sebelum mengadopsi IFRS. Selanjutnya penelitian oleh Anggraita (2012) yang menemukan adanya penurunan manajemen laba pada masa setelah adopsi IFRS khususnya pada komponen. Mengacu pada pernyataan IAI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa IFRS dapat mempersulit tindakan manajemen laba melalui penerapan *fair value dan balance sheet approach*, maka asumsi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengadopsi IFRS secara penuh cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih kecil.

Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan. Teori agency berfokus pada dua individu yaitu principal dan agen yang masing-masing pihak yaitu agen dan principal berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan diantara principal dan agen (Scott, 1997). *Earnings management* merupakan intervensi dari pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan menaikkan atau menurunkan laba akuntansi dengan memanfaatkan atau kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi. Karena standar akuntansi memperbolehkan perusahaan untuk memilih metode akuntansi. Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Pramudji, Trihartati, (2010) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi asset tetap atau amortisasi asset tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dll.
- b. Mengubah metode akuntansi Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya: mengubah depresiasi asset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode garis lurus.
- c. Menggeser periode biaya atau pendapatan Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Contohnya: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai pada periode akuntansi periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur penjualan aset tetap perusahaan.

2. Adopsi IFRS di Indonesia

Adanya adopsi IFRS oleh seluruh negara di dunia, akan berpengaruh dan berhubungan erat dengan kualitas akuntansinya. IFRS merupakan standar pelaporan keuangan yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). IASB merupakan lembaga independen yang didanai oleh pihak swasta dan berperan dalam menyusun standar akuntansi berbasis di London. Tujuan dari IASB adalah mengembangkan standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan secara global untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diperbandingkan. IFRS merupakan standar akuntansi yang muncul karena adanya tuntutan globalisasi yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara. Perusahaan-perusahaan multinasional membutuhkan suatu standar akuntansi internasional yang dapat berlaku di seluruh negara. IFRS memberikan penekanan pada penilaian profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu (Cahyati, 2011).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (2002), tingkat konvergensi IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat yaitu:

- a. *Full Adoption*, yaitu apabila suatu negara melakukan konvergensi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan
- b. *Adopted*, yaitu bila konvergensi IFRS dilakukan oleh sebuah negara namun disesuaikan dengan keadaan negara tersebut

- c. *Piecemeal*, yaitu apabila suatu negara hanya melakukan konvergensi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan paragraf tertentu saja
- d. *Referenced*, yaitu apabila IFRS hanya dijadikan sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh pembuat standar negara tersebut
- e. *Adopted*, yaitu apabila suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Tujuan dari pembentukan IFRS adalah menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara jujur dan adil dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan standar pelaporan keuangan internasional sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dibandingkan secara internasional (Norton, 2006). Menurut Wiraharja (2010) manfaat dari diterapkannya IFRS sebagai suatu standar akuntansi adalah:

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional
2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan

3. Adopsi IFRS dan Manajemen Laba Berbasis Aktivitas Real

Manajemen laba dilakukan dengan bermacam teknik. Teknik-teknik dalam melakukan manajemen laba antara lain akrual (Jones, 1991), manipulasi aktivitas real (Roychowdhury, 2006), pendapatan diskresioner (Stubben, 2010), penstrukturan transaksi (Marquardt dan Wiedman, 2005), dan penggantian klasifikasi (McVay, 2006). Kebanyakan penelitian manajemen laba hanya memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis akrual, oleh karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan melakukan manajemen laba melalui aktivitas real, selain akrual menurut Cohen dan Zarowin (2010), McVay (2006), Roychowdhury (2006), Zang (2005)

Penelitian mengenai manajemen laba berbasis aktivitas real dikemukakan oleh Roychowdhury (2006). Roychowdhury (2006) membuat model untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real dengan menguji aliran kas operasi (CFO), kos produksi, dan biaya diskresioner. CFO merupakan aliran kas operasi yang dilaporkan dalam laporan aliran kas. Kos produksi didefinisikan sebagai jumlah dari COGS dan perubahan dalam persediaan selama periode tersebut. Biaya diskresioner didefinisikan sebagai jumlah dari biaya iklan, R&D, dan biaya administrasi & umum serta biaya penjualan. Selanjutnya Roychowdhury (2006) menggunakan ukuran tersebut untuk mendeteksi manipulasi aktivitas real di sekitar batas laba yang mendekati nol dengan menguji apakah ada nilai yang abnormal dari ketiga variabel tersebut. Roychowdhury (2006) menemukan bahwa perusahaan mencoba untuk menghindari rugi dengan menawarkan diskon yang besar yang ditunjukkan oleh peningkatan penjualan yang bersifat temporer, melakukan overproduksi untuk menurunkan kos barang terjual (COGS), dan mengurangi pengeluaran diskresioner secara agresif untuk meningkatkan margin, selain itu juga menemukan bahwa praktik ini akan berkurang ketika investor semakin pandai. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen melakukan manipulasi aktivitas real adalah keanggotaan industri, cadangan persediaan dan piutang, kesempatan tumbuh, dan adanya utang. Manajemen laba real dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen yang menyimpang dari praktik bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba (Cohen dan Zarowin, 2010; Roychowdhury, 2006).

Leuz (2010) melakukan pengujian empiris terhadap kesegeraan mengadopsi SPKI dengan manajemen laba. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa perbedaan pendekatan regulasi pelaporan akan lebih berdampak pada peran praktik pelaporan. Penelitian Leuz (2010) ini menggunakan basis manajemen laba akrual saja. Leuz (2010)

membagi tiga dan lima kluster pengadopsi SPKI, kluster-kluster ini diuji dengan kondisi manajemen laba berbasis akrual. Kluster pertama adalah negara-negara yang termasuk dalam kelompok pengadopsi standar akuntansi internasional lebih awal. Kelompok pengadopsi standar akuntansi internasional lebih awal ini memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan kelompok negara pengadopsi standar akuntansi internasional lebih lambat.

Hipotesis

Orientasi penelitian ini adalah kemutakhiran dalam menganalisis fenomena adopsi IFRS. Adopsi IFRS dilakukan oleh Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menduga terjadinya perubahan orientasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manager. Dugaan ini berdasarkan karakteristik IFRS yang sangat berbeda dengan dengan karakteristik standar domestik sebelumnya. Karakteristik IFRS berbasis prinsip, sedangkan karakteristik standar domestik sebelumnya adalah berbasis aturan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS terhadap perilaku manager dalam melakukan manajemen laba.

Pada saat belum adopsi IFRS, basis yang berlaku adalah basis aturan, sehingga kewenangan manager dalam melakukan judgment tidaklah besar. Hal ini diduga berpengaruh terhadap orientasi perilaku manager melakukan manajemen laba berbasis akrual lebih besar ketika menggunakan standar lokal pada saat perioda sebelum adopsi IFRS. Hipotesis yang diajukan adalah sebagaiberikut.

H₁: Manajemen laba berbasis akrual lebih banyak digunakan pada saat menerapkan standar lokal daripada saat sesudah adopsi IFRS.

Pada saat setelah adopsi IFRS, basis yang berlaku adalah basis prinsip, artinya aturannya sedikit jadi lebih mengandalkan judgment manager, sehingga kewenangan manager dalam melakukan judgment sangat besar. Hal ini diduga berpengaruh terhadap orientasi perilaku manager melakukan manajemen laba berbasis aktivitas real lebih besar ketika menggunakan standar lokal pada saat perioda sebelum adopsi IFRS. Manager melakukan manajemen laba berbasis aktivitas real lebih besar ketika sudah adopsi IFRS. Hipotesis yang diajukan adalah sebagaiberikut.

H₂: Manajemen laba berbasis aktivitas real lebih banyak digunakan pada saat sesudah adopsi IFRS daripada perioda standar lokal.

METODE PENELITIAN

Orientasi perilaku manager diproksi dengan manajemen laba yang digunakannya. Penghitungan proksi manajemen laba ini akan menunjukkan kecenderungan manager tersebut dalam melakukan manajemen labanya, yaitu apakah manager tersebut memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba akrual ataukah manager tersebut memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba aktivitas real. Tahun penelitian adalah enam tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Perioda ini akan dibagi menjadi dua yaitu tahun 2009 sd 2011 dan perioda tahun 2012 sd 2014.

1. Perioda tahun 2009 sd 2011 adalah perioda dimana belum melakukan adopsi IFRS. Perioda tahun ini akan dihitung kecenderungan manager melakukan manajemen labanya apakah manajemen laba akrual ataukah memiliki kecenderungan manajemen laba aktivitas real.
2. Perioda tahun 2012 sd 2014 adalah perioda dimana sudah melakukan adopsi IFRS. Perioda tahun ini juga akan dihitung kecenderungan manager melakukan manajemen labanya apakah manajemen laba akrual ataukah memiliki kecenderungan manajemen laba aktivitas real.

Populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014. Sampel adalah jumlah proporsional berdasarkan sektor industrinya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji secara empiris mengenai perbedaan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen (manajer) pada perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan secara statistik sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PSAK berbasis IFRS di perusahaan belum mampu mengurangi tindakan oportunitis manajer yaitu pengelolaan laba. Adopsi PSAK berbasis IFRS yang belum lama diterapkan di perbankan merupakan faktor penyebab pengadopsian IFRS belum dapat memberikan kontribusi yang positif pada laporan keuangan. Disamping itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan yaitu kondisi perekonomian serta peraturan di Indonesia yang berbeda dengan negara di Eropa menyebabkan perbedaan hasil dari di terapkan IFRS sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan.

Adopsi IFRS belum tentu dapat mengakomodasi karakteristik khusus suatu negara. Hal ini terjadi karena IASB sebagai standard setter dari IFRS memiliki anggota yang sebagian besar adalah negara maju. Oleh karena itu, IFRS belum tentu sepenuhnya sesuai apabila diimplementasikan di negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju, sehingga pengadopsian IFRS harus disesuaikan dengan karakteristik suatu negara agar proses harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik negara tersebut (Whardani, 2009). Ketidaksiharian dalam penerapan adopsi IFRS dengan karakteristik suatu negara inilah yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembuatan standar ini, yang salah satunya sebagai penyederhana berbagai alternatif kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dan diharapkan IFRS ini dapat membatasi pertimbangan kebijakan manajemen perusahaan terhadap manipulasi laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba. Oleh karena itu, agar penerapan adopsi IFRS dapat efektif dan sesuai dengan tujuan serta berdampak positif bagi pelaporan keuangan maka perlu dipertimbangkan adanya perbedaan karakteristik, baik dari segi perusahaan maupun negara secara luas. Adopsi IFRS ini masih baru berlaku di Indonesia, kemungkinan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara keseluruhan dan efektif sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya manajemen laba.

KESIMPULAN

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS terhadap perilaku manager dalam melakukan manajemen laba. Adopsi IFRS diharapkan akan membawa dampak positif diantaranya adalah dari sisi pelaporan keuangan. Dengan adanya adopsi IFRS maka akan tercipta suatu pelaporan yang seragam, sehingga memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan kebijakan kebijakan yang terkait dengan performa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini akan membudahkan investor lintas Negara untuk melakukan kebijakan investasinya. Konvergensi IFRS bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang relevan dan reliable sehingga akan tercipta suatu laporan yang lebih berkualitas baik untuk asset, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. Standar IFRS berbasis prinsip akan lebih condong pada penggunaan nilai wajar dan pengungkapan yang lebih banyak serta rinci diharapkan dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba.

REFERENSI

- Abhiyoga, Narendra. 2013. -Pengaruh Pengadopsian International Financial Reporting Standard (IFRS) Terhadap Manajemen Laba. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Anggraita, Viska. 2012. -Dampak Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) Terhadap Manajemen Laba di Perbankan: Peranan Mekanisme Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin.
- Barth, M. E., Landsman, W. R. & Lang, M. 2008. -International Accounting Standards and Accounting Quality. Journal of Accounting Research.
- Cahyati, Ari Dewi, 2011. -Peluang Manajemen Laba Pasca Konvergensi IFRS: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Empiris. Jurnal Akuntansi Keuangan Volume 2 Nomor 1.
- Chen, Huifa, Tang, Qingliang, Jiang, Yihong and Lin, Zhijun. 2010. -The Role of International Financial Reporting Standards in Accounting Quality: Evidence From The European Union. Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 21, No. 3.
- Daniati, Ninna dan Suhairi. 2006. -Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor dan Size Perusahaan Terhadap Expected Return Saham. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Gul, Ferdinand A., Sidney Leung, and Bin Srinidhi. 2003. -Informative and Opportunistic Earnings Management and The Value Relevance of Earnings: Some Evidence on The Role of IOS.
- Handayani, Sri. 2014. -Dampak Manajemen Laba Terhadap Relevansi Informasi Akuntansi. Jurnal Al Hisbah Vol 2 No.1.
- Schipper, K. 1989. -Earnings Management. Accounting Horizons. pp.91-102. Retrieved: February 3rd. 2007 From ProQuest Database.
- Scott, William R. 2009. -Financial Accounting Theory. Canada Prentice Hall.
- Siregar, S. V., dan Y. S. Bachtar. 2003. -Hubungan Antara Manajemen Laba Dengan Tingkat Pengungkapan Sosial. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Sri Sulistyanto. 2008. -Manajemen Laba Teori dan Model Empiris. Jakarta: Grasindo.
- Sujatmika, Sri Suryaningsum. 2010. Pengujian Implikasi Kepemilikan Saham Komparasi Empiris Untuk Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Dan Vietnam Pada Sektor Industri Consumer Goods. Laporan Penelitian Dasar UPNVY.
- Suryaningsum, Sri. 2009. Implementasi Model *Corporate Supply Chain* Dalam Gcg Terhadap Kualitas Laba Dengan *Overall Country Risk* Sebagai Proteksi Investor (Komparasi Empiris Negara-Negara Asean). *Laporan Akhir Hibah Doktor*.
- Wirahardja, Roy. 2010. -Adopsi IAS 41 Dalam Rangkaian Konvergensi IFRS di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. www.iaiglobal.or.id. Diakses 1 Agustus 2016
- Yulita, Lita. F., Suryaningsum Sri. 2016. Orientasi Perilaku Manager Dalam Melakukan Manajemen Laba Atas Fenomena Adopsi IFRS Di Indonesia. Proposal Hibah Bersaing. Kemenristek Dikti RI.

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKAN ISAK 29 PADA PERUSAHAAN TAMBANG

Sutoyo, Sujatmika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta

sutoyo@upnyk.ac.id; jatpati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether there are significant differences of financial performance before and after the mining company applied ISAK No. 29. The financial performance is measured by using a profitability ratio that consists of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), and return on Investment (ROI). This study uses the population of all mining companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2014-2015. Purposive sampling using sampling, the samples that meet the criteria that 10 companies from 39 mining companies in the period in 2014 before being applied ISAK No. 29. The analysis tool uses different test paired t-test. Results from testing in mind that there are no significant differences between the financial performance before and after application of ISAK No. 29.

Keywords : ISAK No. 29 , financial performance , test different, mining companies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan perusahaan tambang sebelum dan sesudah diterapkan ISAK nomor 29. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Profit Margin* (PM), dan *Return on Investment* (ROI). Penelitian ini menggunakan populasi semua perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2015. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*, maka sampel yang memenuhi kriteria tertentu sebanyak 10 perusahaan dari 39 perusahaan tambang pada periode tahun 2014 sebelum diterapkan ISAK nomor 29. Alat analisis menggunakan uji beda *t-test paired*. Hasil dari pengujian diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan setelah diterapkan ISAK nomor 29.

Kata kunci: ISAK nomor 29, kinerja keuangan, uji beda, perusahaan tambang.

1. PENDAHULUAN

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) nomor 29 yang berkaitan dengan biaya pengupasan tanah tahap produksi pada pertambangan terbuka akan diterapkan pada tanggal 1 Januari 2015. Secara tegas perusahaan-perusahaan pertambangan seperti PT Bukit Asam, PT Adaro, PT Kaltim Prima Coal, dan perusahaan tambang lainnya menyatakan belum siap dan akan mengaji ulang penerapan ISAK Nomor 29 ini. Karena dengan diterapkannya ISAK nomor 29 akan mempunyai dampak terhadap biaya pengupasan tanah tahap produksi yang akhirnya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tambang. Seberapa besar dampak ISAK nomor 29 terhadap kinerja keuangan perlu dilakukan penelitian. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum memutuskan menerapkan ISAK nomor 29 tersebut.

Penerapan ISAK nomor 29 ini adalah adopsi penuh (*full adoption*) atas IFRIC nomor 20 tanpa pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Adopsi penuh tanpa dilakukan penelitian sebelumnya sebenarnya cukup berisiko, oleh karena itu penelitian ini penting dilaksanakan. Fenomena ini penting dan harus diteliti, karena hal ini berkaitan dengan rekayasa sosial dalam bidang standar pelaporan keuangan bagi perusahaan pertambangan terbuka di Indonesia. Rekayasa sosial ini menyebabkan penyajian laporan keuangan perusahaan mengalami perubahan. Seberapa besar perubahan atas diterapkan ISAK nomor 29 ini perlu dilakukan penelitian. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat diketahui dampak penerapan ISAK nomor 29 apakah mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tambang terbuka.

Penelitian dilakukan dengan studi empiris berkaitan dengan ketersediaan data sekunder dari perusahaan-perusahaan tambang. Pada tahun ini disajikan pelaporan pelaksanaan ISAK nomor 29 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2015. Studi empiris ini dirancang dengan menggunakan alat analisis uji beda antara sebelum dan sesudah pelaksanaan ISAK nomor 29 terhadap kinerja keuangan yang diprosikan rasio-rasio *profitabilitas* pada perusahaan-perusahaan tambang.

Penelitian terdahulu terkait dengan dampak implementasi IFRS terhadap kinerja keuangan sudah pernah dilakukan, namun yang terkait dengan dampak ISAK nomor 29 terhadap kinerja keuangan khususnya pada perusahaan tambang sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Berdasarkan tersebut di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 29 (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 sampai 2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan secara statistik signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *profitabilitas* perusahaan terhadap nilai rasio *Return on Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)* *Profit Margin* dan *Return on net Worth* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah implementasi ISAK nomor 29.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: rasio *Return on Investment (ROA)* berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi ISAK nomor 29

H₂: rasio *Return on Assets (ROE)* berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi ISAK nomor 29

H₃: rasio *Profit Margin* (PM) berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi ISAK nomor 29

H₄: rasio *Return on Investment* (ROI) berbeda signifikan sebelum dan sesudah implementasi ISAK nomor 29

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembentukan IFRS

IFRS merupakan suatu standar akuntansi internasional yang disusun oleh *International Accounting Standar Board* (IASB), yang awal terbentuknya bernama *International Accounting Standarts Committee* (IASC). IASC dibentuk tahun 1973 di London Inggris yang saat ini mengalami perubahan yang sangat mendasar pada peraturan berkaitan dengan akuntansi. Kartikahadi *et al* (2012) menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh organisasi ini dulu bernama *International Accounting Standar* (IAS) dan sekarang menjadi *International Financial reporting Standards* (IFRS). Purba (2010) menyatakan bahwa *International Financial Reporting Standards* mencakup:

- a. *International Financial reporting Standards* (IFRS) adalah standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.
- b. *International Accounting Standar* (IAS) adalah standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.
- c. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *International Financial Reporting Interpretations Committee* yaitu setelah tahun 2001.
- d. *Interpretations* yang diterbitkan oleh *Standing Interpretations Committee* (SIC) yaitu sebelum tahun 2001.

2.2. Adopsi Standar Akuntansi

Indonesia sejak tahun 1994 sebenarnya sudah mengadopsi sebagian IAS. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diberlakukan sejak tahun 1994 adalah saduran dari IAS dan interpretasi SIC dan standar-standar yang ada pada IFRS diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyatakan bahwa tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

- a. *Full Adoption*; suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menterjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan
- b. *Adopted*; program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
- c. *Piecemeal*; suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
- d. *Referenced (Covergence)*; sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
- e. *Not adopted at all*; suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Sejak tahun 2012 Indonesia telah melaksanakan sistem akuntansinya menganut bentuk full adoption IFRS. Dengan mengadopsi penuh IFRS maka laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PASK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

Dalam melakukan konvergensi ada dua strategi adopsi yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa tahapan-tahapan tertentu, sedangkan *gradual strategy* adalah adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. *Big bang strategy* biasa digunakan oleh negara-negara maju, sedangkan *gradual strategy* lebih banyak digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

2.3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah alat untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu (Husnan 2007). Ukuran yang seringkali digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan pema-haman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis yang hanya mengemukakan data laporan keuangan saja. Selain itu, Husnan (2012) mengemukakan bahwa di antara alat-alat analisis kinerja keuangan yang selalu digunakan untuk mengukur kelemahan atau kekuatan yang dihadapi perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio.

Analisis rasio pada dasarnya merupakan kejadian masa lalu, oleh karena itu faktor-faktor yang mungkin ada pada perioda yang akan datang. Untuk itu seorang analis dituntut agar dapat memberikan hasil analisis dan intepretasi yang baik dan cermat, sebab hasil analisis akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Husnan (2007) mengemukakan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio *profitabilitas* yang terdiri dari *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* *Profit Margin (PM)*, dan *Retun on Investment (ROI)*.

2.4. Dampak Penerapan IFRS

Dampak penerapan IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dengan adanya penurunan manajemen laba dibandingkan sebelum penerapan IFRS (Ball, 2006; Barth and Lang, 2008). Pengadopsian IAS selain menurunkan manajemen laba juga menjadikan pengakuan kerugian yang lebih tepat dan meningkatnya *value relevance* atas informasi laba. Penerapan *value relevance* pada akhirnya akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan (Barth and Lang, 2008). Tanko (2009) melakukan penelitian di Negeria mengenai kinerja perusahaan yang dinilai melalui rasio sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS menunjukkan bahwa kinerja menjadi turun tetapi tidak signifikan sesudah pengadopsian IFRS.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Eropa dengan mengadopsi IFRS akan berdampak positif terhadap peningkatan laba yang terjadi (O' Connel and Sullivan; 2008). Penelitian pengadopsian IFRS di Itali menunjukkan hasil pengaruh positif terhadap laba (Cordazzo; 2007). Kondisi ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan di Kanada yang hasil rasio keuangan lebih baik sesudah pengadopsian IFRS (Blanchette dan Girard;

2011). Pazarskis et al (2011) melakukan penelitian tentang dampak implementasi IFRS terhadap rasio keuangan pada jenis perusahaan teknologi informasi di *Athens Stock Exchange* (ASE) di Yunani mengemukakan bahwa hanya rasio EBIT dan *rasio gearing* yang mengalami perbedaan signifikan dari dua belas rasio keuangan yang diteliti.

2.5. ISAK No. 29

ISAK No. 29 standar hanya mengatur pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi. Biaya pengelolaan lingkungan hidup mengikuti ketentuan dalam PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi. Dalam tambang terdapat aktivitas memindahkan sisa penambang Tahap pengembangan biaya pengupasan tanah umumnya dikapitalisasi – kemudian disusutkan. Tidak semua pengupasan terkait dengan persediaan namun dapat berupa akses menuju mineral di lapisan yang lebih tinggi.

Ruang Lingkup ISAK No 29 adalah untuk biaya pemindahan material yang timbul dalam aktivitas penambangan terbuka selama tahap produksi (biaya pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi). Permasalahan pada ISAK NO 29 adalah:

1. Pengakuan biaya pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi sebagai aset;
2. Pengukuran awal aset aktivitas pengupasan lapisan tanah; dan
3. Pengukuran selanjutnya aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Pengakuan Biaya Pengupasan Lapisan Tanah pada Tahap Produksi sebagai Aset:

1. Aktivitas pengupasan lapisan tanah direalisasikan dalam bentuk produksi persediaan.
2. Manfaatnya untuk akses menuju material – aset aktivitas pengupasan lapisan tanah
3. Persyaratan pencatatan aset: manfaat ekonomi, identifikasi komponen material yang aksesnya ditingkatkan, biaya dapat diukur dengan andal

Pengukuran Awal Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah:

1. Pada saat awal mengukur sebesar biaya perolehan ditambah alokasi overhead langsung
2. Biaya terkait aktivitas insidental tidak dimasukkan
3. Jika tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, maka entitas mengalokasikan biaya antara persediaan dan aset aktivitas pengupasan tanah

Pengukuran Selanjutnya Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah:

1. Menggunakan biaya perolehan atau jumlah revaluasian dikurangi penyusutan atau penurunan nilai.
2. Penyusutan dengan dasar sistematis selama masa manfaat, metode unit produksi
3. Masa manfaat berbeda dengan masa manfaat pertambangan

Entitas mengakui aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas
2. Entitas dapat mengidentifikasi komponen bijih mineral yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
3. Biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian, antara lain *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Profit Margin (PM)* dan *Return on Investment (ROI)*. Objek penelitian adalah laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sebelum diterapkan ISAK nomor 29 dan periode tahun 2015 setelah diterapkan ISAK nomor 2015. Sedangkan prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *non probabilitas* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2013). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Prosedur penarikan sampel

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut periode 2014 sd 2015	39
2. Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> secara berturut-turut periode 2014 sd 2015	(8)
3. Perusahaan yang belum menerapkan ISAK 29	(21)
Jumlah perusahaan yang telah menggunakan ISAK 29	10

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan maka di peroleh sebanyak 10 perusahaan pertambangan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. Jenis pengumpulan data ini *cross-section* dari pengumpulan laporan keuangan 31 Desember 2014 – 2015. Berikut adalah perusahaan tambang yang sesuai dengan kriteria dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2.
Perusahaan Tambang Periode 2014 - 2015

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2	ARII	Atlas Resources Tbk.
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.
5	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
6	HRUM	Harum Energy Tbk.
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
8	MITI	Mitra Investindo Tbk.
9	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk.
10	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

Sebelum dilakukan uji beda, data yang ada diuji normalitas terlebih dahulu. Data normal merupakan salah satu syarat uji beda. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Selanjutnya dilakukan uji beda data untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pengujian *t-test paired* dengan aplikasi SPSS 17.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan perusahaan tambang tahun 2014 sebelum diterapkan ISAK nomor 29 dan tahun 2015 sesudah diterapkannya ISAK nomor 29. Pada penelitian ini, masing-masing perpektif dalam *paired sampel t test* akan diukur dengan indikator pengukuran *profitabilitas* atas rasio *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity* atau *Return on net Worth*, *Profit Margin (PM)* dan *Return on Investment (ROI)*.

4.1. Pengujian Instrumen

Dari hasil olahan dengan menggunakan SPSS 17 yang disajikan pada tabel 3 terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* data untuk ROA, *Profit Margin (PM)*, dan ROE sebelum menerapkan ISAK nomor 29 sebesar 0,962, 0,189, 0,267 dan 0,261. Karena nilai tersebut lebih besar dari pada alpha (*Asymp.Sig. >0,05*) maka dapat disimpulkan bahwa data kinerja keuangan perusahaan dengan pengukuran ROA, ROE, *Profit Margin (PM)* dan ROI berdistribusi normal.

Tabel 3.**Hasil uji normalitas**

Keterangan	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
ROA_sebelum	,504	,962
ROA_sesudah	,838	,483
ROE_sebelum	1,086	,189
ROE_sesudah	,919	,367
PM_sebelum	1,003	,267
PM_sesudah	,941	,339
ROI_sebelum	,754	,621
ROI_sesudah	1,110	,170

Pada Tabel 3 dapat diketahui juga bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* untuk ROA setelah penerapan ISAK 29 sebesar 0,483, ROE sebesar 0,367, *Profit Margin (PM)* sebesar 0,339, dan *ROI* sebesar 0,170. Karena nilai tersebut lebih besar dari alpha (*Asymp.Sig >0,05*), maka dapat disimpulkan bahwa data kinerja keuangan perusahaan sesudah penerapan ISAK nomor 29 berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi 0,05.

4.2. Uji Hipotesis

Pengujian t-test terhadap dua sampel yaitu sebelum dan sesudah diterapkan ISAK nomor 29 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 4.**Hasil Uji t-tes-Paired**

Keterangan	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 ROA_sebelum - ROA_sesudah	.843	9	.421
Pair 2 ROE_sebelum - ROE_sesudah	.923	9	.380
Pair 3 PM_sebelum - PM_sesudah	1.182	9	.268
Pair 4 ROI_sebelum - ROI_sesudah	.915	9	.384

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa *paired sampel t-test* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,421 untuk ROA. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa tidak ada perbedaan signifikansi ROA sebelum dan sesudah diterapkannya ISAK nomor 29 karena nilai signifikansi ROA lebih besar dari 0,05. Demikian juga untuk nilai signifikansi ROE sebesar 0,380 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk Profit Margin mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,268 lebih

besar dari 0,05 yang berarti juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya ISAK nomor 29. Untuk ROI hasil *t test* juga menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,384 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

4.3. Analisis Data

Hasil uji *t-test Paired* menunjukkan signifikansi sebesar 0,421 untuk ROA, 0,380 untuk ROE, 0,268 untuk PM dan 0,384 untuk Return on Investment. Karena nilai $\text{sig} >$ dari 0,05 maka hasil penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan ISAK nomor 29. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dugaan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah menerapkan ISAK nomor 29. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanco (2012). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan karena implementasi penerapan ISAK nomor 29 di Indonesia dilakukan secara bertahap. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kebijakan tidak terlihat jelas.

Penerapan ISAK nomor 29 di Indonesia dicanangkan dilakukan secara serentak tanggal 1 Januari 2015, namun dalam kenyataannya saat penelitian dilakukan dari 39 perusahaan tambang yang menjadi populasi ternyata baru 10 perusahaan tambang yang telah menerapkan ISAK nomor 29. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tambang belum siap dengan perubahan standar ini sehingga berdampak pada perusahaan belum dapat menerapkan secara penuh. Menerapkan standar akuntansi secara penuh tentunya diperlukan persiapan sumberdaya manusia yang kompeten dan perlu didukung kapabilitas teknologi informasi yang memadai. Selain itu, sumberdaya manusia di Indonesia masih banyak melakukan beberapa penyesuaian karena sebelumnya terbiasa menggunakan standar yang mengacu pada GAAP sehingga pengetahuan tentang IFRIC atau ISAK masih sangat terbatas.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya ISAK nomor 29. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya ISAK nomor 29.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa keterbatasan dan saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Variabel rasio keuangan yang diteliti hanya rasio *profitabilitas* yang terdiri empat rasio keuangan sehingga tidak bisa melihat rasio keuangan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas rasio keuangan lainnya terutama kelompok rasio penilaian pasar seperti *price earning ratio* (PER), *price to book ratio* (PVB).
2. Periode pengamatan penelitian ini hanya 2 tahun karena implementasi ISAK nomor 29 efektif diberlakukan 1 Januari 2015 baru berjalan 1 tahun. Disarankan untuk peneliti

selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sebelum dan sesudah implementasi ISAK nomer 29.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Kuncoro Prasongko, 1996, "Model Pengendapan Batubara Untuk Menunjang Eksplorasi dan Perencanaan Penambangan", Program Studi Rekayasa Pertambangan Bidang Khusus Eksplorasi Sumberdaya Bumi Program Pascasarjana ITB, 1996.
- Barth, M.E, Landsman, W.R; & Lang, M.H (2008). International Accounting Standars and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*; 46, 467-498.
- Blanchette, M. Racicot, F- E, & Girar, J; Y (2011). The Effects of IFRS on Financial Ratio; Early Evidence in Canada, *Certified General Accountants Association of Canada*.
- Cordazzo, Michela. (2007). *The Impact of IAS/IFRS on Accounting Practice: Evidences from Italian Listed Companies*. Italy: University of Bozen-Bolzano
- Hartono, Jogyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE
- <http://www.tambang.co.id/glecore-memangkas-produksi-batubara> (diakses pada tanggal 7 April 2015).
- <http://aspindoimsa.or.id/asset/uploads/files/Keputusan%20Dirjen%20Minerba%20No.%20479%20K%20tahun%202014.pdf>(diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://marwanminer.blogspot.com/2010/02/tambang-terbuka.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://dapurtambang.blogspot.com/2014/07/metode-tambang-terbuka-dan-tambang-dalam.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://moa-desu.blogspot.com/2014/03/tam-bang-terbuka.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://www.tambang.co.id/glencore-memangkas-produksi-batu-bara-4336/> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- <http://morrislawrence1991.blogspot.com/2014/12/perbedaan-psak-33-revisi-2011-dan-isak.html> (diakses pada tanggal 7 April 2015)
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013.** Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka. Jakarta
- Kuncoro Prasongko, B., 2002, Aplikasi Model Pengendapan Batubara, BTM (Buletin Teknologi Mineral) no. 15, UPN -Veteran Yogyakarta
- Katosudjono W, 1994. Lingkungan pertambangan dan reklamasi, Direktorat Pertambangan Umum. Jakarta : Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
- Nurhakim, 2004. -Buku Panduan Kuliah Lapangan II Edisi ke – 2ll, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru

- Pazarskis, Michail, Alexandros A; Panagiotis N; Dimitrios K, 2011. *IFRS Adoption Effects in Greece: Evidence from the IT Sector*, MIBES Transactions International Journal
- Prodjotumarto Partanto, 1993. *Tambang Terbuka* ITB, Bandung
- O'Connell, Vincent; & Sullivan, Katie. (2008). The Impact of Mandatory Conversion to IFRS on the Net Income of FTS Euro first 80 Firms. *The Journal of Applied Research in Accounting and Finance*, 3 (2), 17-43
- Stermole & Stermole, 1996. *Economic Evaluation and Investment Decision Methods (9th Edition)*
- Suad Husnan, 2012, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*, Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Sutoyo dan Sujatmika. 2014. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 29 Biaya Pengupasan Tahap Produksi Untuk Tambang Terbuka. *Proposal Penelitian Hibah Bersaing*. Kemenristek & Dikti RI.

ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN REMBANG DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Asih Sri Winarti ¹⁾, Wahyu Dwi Artaningtyas ²⁾

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , UPN — Veteran IYogyakarta
Email : asihwinarti09@gmail.com
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , UPN — Veteran IYogyakarta
Email : artaningtyas@ymail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out and to analyze economic sectors in Rembang Regency which have a competitive advantage and specialization . The sectors with it are used to determine the priority regions and sectors of the typology of the base for the development of the construction of Regency. Data used in this study is secondary data in the period 2011-2014. Taken from BPS region of Rembang . Models being used in this study are Typology Klassen, Shift-Share, LQ and DLQ.

This study find out that transportation , services and insurance agriculture, forestry ,fishery ,transportation, accomodation , finance and insurance are the basic sector in Rembang Regency and so do the health service and sosial activity.

Key words: , Typology Klassen , Competitive advantage, Specialization, Shift Share

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis sektor sektor ekonomi potensial yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di kabupaten Rembang yang akan digunakan untuk menentukan sektor sektor apa saja yang akan menjadi dasar bagi pengembangan wilayah Kabupaten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode 2011- 2014 yang diambil dari BPS kabupaten Rembang . Model yang digunakkan dalam penelitian ini adalah Tipologi Klassen, Shift Share , dan DLQ.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sektor transportasi, jasa dan asuransi ,pertanian , kehutanan , perikanan ,akomodasi ,keuangan dan asuransi merupakan sektor basis di Kabupaten Rembang , demikian juga dengan aktivitas sosial.

Kata Kunci : Tipologi Klassen, Keunggulan Kompetitif, Spesialisasi, Shift Share

PENDAHULUAN

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Rembang dari tahun 2011 – 2014 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang cenderung fluktuatif. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh kontribusi dari 3 sektor terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi didorong oleh laju pertumbuhan semua sektor kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan pada tahun 2014. Dalam teori basis ekonomi dinyatakan bahwa faktor penentu utama

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2002). Sektor unggulan merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, adanya sektor unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan sektor perekonomian yang utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (Perroux dalam Kuncoro, 2002). Sektor potensial/unggulan harus memiliki kelebihan, yaitu unggul secara komparatif dan unggul secara kompetitif.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir di kabupaten Rembang cukup baik, namun upaya-upaya untuk meningkatkan PDRB masih harus terus dilakukan. Perlu upaya-upaya yang kreatif dan inovatif dari Pemda dalam memanfaatkan potensi ekonomi untuk memberikan hasil yang optimal. Apalagi pada tahun 2015, Indonesia sebagai anggota ASEAN, telah terikat pada suatu bentuk integrasi ekonomi yang telah disepakati oleh semua anggota ASEAN yaitu yang disebut dengan ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan hadirnya ajang MEA ini merupakan peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Untuk itu sangat diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Rembang sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada umumnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Rembang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua (data eksternal) yang berupa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 dari Kabupaten Rembang dan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2014. Data bersumber dari BPS berupa Rembang Dalam Angka dan Jawa Tengah Dalam Angka berbagai tahun terbitan.

Alat Analisis

1. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral, dimana merupakan perpaduan antara alat analisis LQ dengan model rasio pertumbuhan (Syafrizal, 1997).

2. Shift Share

Teknik analisis Shift Share ini menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Ditunjukkan dengan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian sehingga akan ditemukan sektor yang kompetitif di suatu daerah. Menurut Arsyad (2002) penggambaran tentang kinerja perekonomian daerah terbagi dalam tiga bidang yang saling berhubungan satu sama lain yaitu pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian tingkat nasional; pergeseran proporsional (Proportional Shift) mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan perekonomian dibandingkan dengan perekonomian nasional dan pergeseran diferensial (Differential Shift) menentukan seberapa jauh daya saing sektor

daerah (lokal) dengan perekonomian nasional. Menurut Soepomo (1993) bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan komponen-komponennya adalah:

$$\begin{aligned} D_{ij} &= N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} & C_{ij} &= Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \\ N_{ij} &= Y_{ij} (r_n) & r_{ij} &= (Y_{ijt} - Y_{ij0}) / Y_{ij0} \\ M_{ij} &= Y_{ij} (r_{in} - r_n) & r_{in} &= (Y_{int} - Y_{ino}) / Y_{ino} \\ r_n &= (Y_{nt} - Y_{no}) / Y_{no} \end{aligned}$$

Jadi untuk suatu daerah, pertumbuhan nasional / regional, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan shift share untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = y_{ij} \cdot r_n + y_{ij} (r_{in} - r_n) + y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

3. Location Quotient dan Dynamic Location Quotient

Analisis LQ berguna untuk mengidentifikasi basis ekonomi (sektor basis) suatu wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (*leading sector*) di suatu wilayah. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relative antara kemampuan sektor di daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relative ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut (Tarigan, 2005):

$$LQ = \frac{(S_i / S)}{(N_i / N)} \quad \text{atau} \quad \frac{(S_i / N_i)}{(S / N)}$$

Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modifikasi dari SLQ, dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Nilai DLQ dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} DLQ_{ij} &= (IPPS_{ij} / IPPS_i)^t \\ IPPS_{ij} &= (1 + g_{ij}) / (1 + g_j) \\ IPPS_i &= (1 + G_i) / (1 + G) \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2014

Berdasarkan hasil perhitungan klasifikasi tipologi diperoleh pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2014 sebagai berikut: Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya; Sektor yang maju tapi tertekan adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; dan sektor Administrasi, Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor yang masih dapat berkembang dengan pesat adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Jasa Pendidikan; Sektor yang relatif tertinggal adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Real Estate

2. Analisis sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2014

Semua sektor ekonomi di Kabupaten Rembang memiliki dampak bauran industri yang positif kecuali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keagamaan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib. National Growth Effects yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah terhadap perekonomian

Kabupaten Rembang menunjukkan nilai positif (Nij) pada setiap sektor ekonomi dengan nilai total output Rp 171.530.656,7 juta rupiah. Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun waktu 2011-2014, PDRB Kabupaten Rembang mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 163.049.887,3 juta rupiah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang positif pada semua sektor kegiatan ekonomi.

Adapun sektor yang kompetitif (lihat angka Cij yang positif) di Kabupaten Rembang adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Selama periode pengamatan, kedelapan sektor tersebut menunjukkan tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Adapun kesembilan sektor yang lain di Kabupaten Rembang mengalami penurunan *competitiveness* selama periode pengamatan.

3. Analisis sektor basis ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2014

Tabel 1. LQ dan DLQ Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	Rata-rata LQ	DLQ
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2,12	2,13	2,16	2,10	2,13	1,00
2	Pertambangan dan penggalian	1,51	1,50	1,49	1,49	1,50	0,89
3	Industri Pengolahan	0,50	0,52	0,54	0,58	0,54	1,54
4	Pengadaan Listrik dan gas	0,78	0,79	0,80	0,82	0,79	1,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah Limbah dan Daur Ulang	0,73	0,74	0,74	0,73	0,73	0,80
6	Konstruksi	0,76	0,75	0,69	0,75	0,74	1,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,98	0,97	0,95	0,95	0,96	0,80
8	Transportasi dan Pergudangan	1,21	1,22	1,23	1,25	1,23	1,08
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	1,02	1,01	1,03	1,07	1,03	1,23
10	Informasi dan Kominikasi	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	1,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,45	1,47	1,50	1,47	1,21
12	Real Estate	0,60	0,59	0,57	0,57	0,58	0,84
13	Jasa Perusahaan	0,82	0,81	0,84	0,83	0,82	1,08
14	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	1,39	1,37	1,37	1,38	0,87
15	Jasa Pendidikan	1,21	1,20	1,26	1,32	1,25	1,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,40	1,42	1,43	1,52	1,44	1,25
17	Jasa lainnya	1,28	1,30	1,28	1,29	1,29	1,02

Berdasarkan hasil perhitungan LQ diperoleh hasil bahwa dari 17 sektor ekonomi di Kabupaten Rembang, terdapat 9 sektor yang basis. Adapun sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Rembang dari tahun 2011-2014 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Namun demikian berdasarkan hasil perhitungan DLQ, sektor basis yang masih berpotensi untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang di Kabupaten Rembang adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya

Sektor non basis di Kabupaten Rembang tahun 2011-2014 adalah Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan. Sementara berdasarkan hasil

perhitungan DLQ, sektor non basis yang ternyata berpotensi di masa yang akan datang di Kabupaten Rembang adalah Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Perusahaan.

Jika dilihat dari kontribusinya, tiga sektor penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Rembang adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Namun jika dilihat dari nilai LQ ternyata sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor non basis dimana nilai LQ kurang dari satu. Kondisi di atas bisa dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Rembang untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang khususnya dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tipologi klassen diketahui bahwa sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Rembang tahun 2011-2014 adalah sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Sektor yang masih dapat berkembang dengan pesat adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Jasa Pendidikan. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2014 adalah sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Selama periode pengamatan, kedelapan sektor tersebut menunjukkan tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Propinsi Jawa Tengah.

Sektor ekonomi yang merupakan sektor basis adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Sektor non basis yang berpotensi menjadi sektor basis di masa yang akan datang di Kabupaten Rembang adalah Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Perusahaan.

REKOMENDASI

Terkait dengan strategi kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Rembang harus dapat mempertahankan sektor yang masuk kategori maju dan tumbuh dengan pesat, kompetitif, merupakan sektor basis dan kedepannya juga masih berpotensi menjadi sektor basis yaitu Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 2002, **Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua)**, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010-2014, **Rembang Dalam Angka**, BPS, Kabupaten Rembang.
- Badan Pusat Statistik, berbagai terbitan, **Jawa Tengah Dalam Angka**, BPS, Propinsi Jawa Tengah.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, **Analisis Spasial dan Regional**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Soepomo, Prasetyo, 1993, **Analisis Shift-share : Perkembangan dan Penerapan**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Syafrizal, 1997, **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**, Majalah Prisma . No.3 Maret 197, hal 27-38, LP3ES.
- Todaro, Michael P., 2000, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Erlangga, Jakarta.

KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ardito Bhinadi

e-mail : arditobhinadi@gmail.com

Asih Sriwinarti

e-mail : asihwinarti09@gmail.com

Wahyu Dwi Artaningtyas

e-mail : artaningtyas@ymail.com

Abstract

During five recent years, the poverty rate in Special Region of Yogyakarta (DIY) is higher than the national rate. Severity index and the depth of poverty is likely to increase. Inequality in income is also likely to increase. At the macro level, the local government has been working to increase economic growth so that development can be enjoyed by the community, including the poor. The purpose of this study was to analyze the relationship between economic growth and poverty in DIY. Results of the analysis showed that there is a positive relationship between economic growth and poverty in DIY, but the relationship is not strong. The economic growth in DIY is less sensitive to poverty rate. Required evaluation of macroeconomic policies in DIY so that economic growth be beneficial to the poor.

Keywords: Poverty, Economic Growth, Correlation, Elasticity

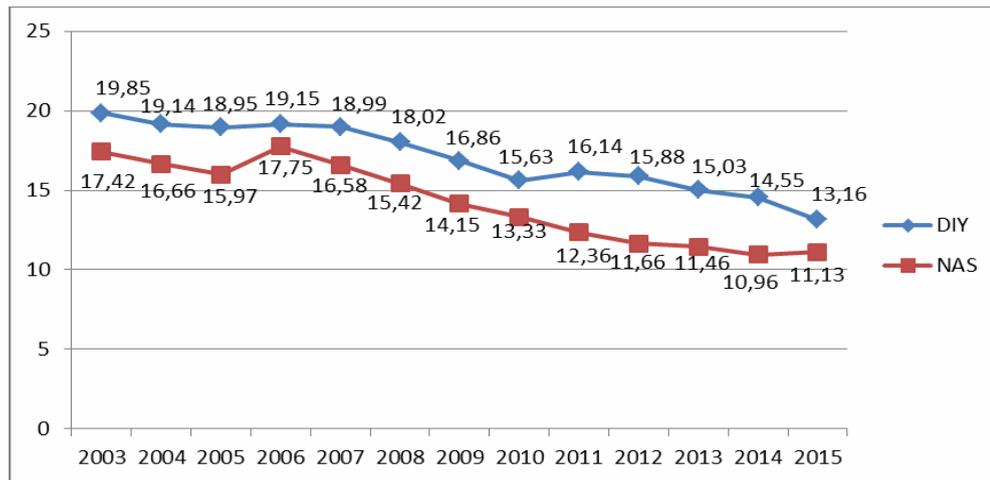
Intisari

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di DIY lebih tinggi dari pada angka kemiskinan nasional. Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan cenderung meningkat. Ketidakmerataan pendapatan juga cenderung meningkat. Secara makro, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat termasuk penduduk miskin. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di DIY. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di DIY, namun hubungannya tidak kuat. Pertumbuhan ekonomi di DIY kurang peka terhadap tingkat kemiskinan. Diperlukan evaluasi kebijakan makroekonomi di DIY agar pertumbuhan ekonomi lebih bermanfaat bagi penduduk miskin.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Korelasi, Elastisitas

PENDAHULUAN

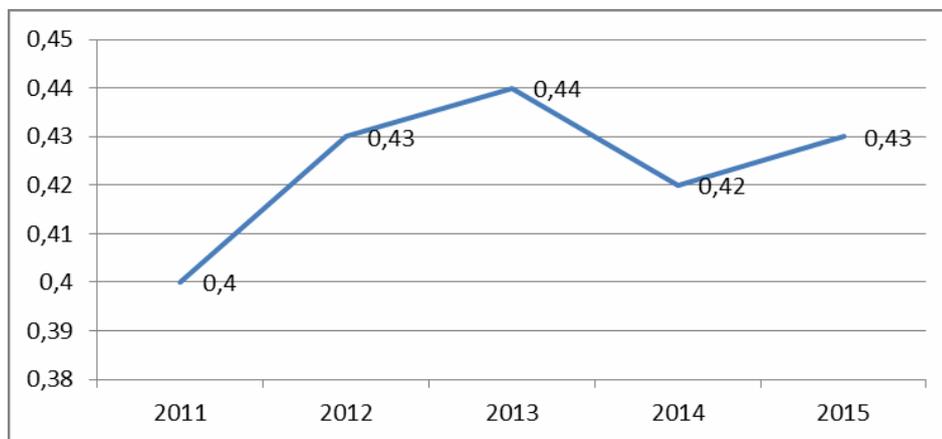
Salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih relatif tingginya angka kemiskinan dibandingkan angka kemiskinan nasional. Selama lima tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan DIY lebih lambat dibandingkan penurunan angka kemiskinan nasional (lihat Gambar 1).



Sumber: BPS DIY, 2016.

Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional dengan DIY

Selain masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, penurunan kemiskinan juga relatif lambat. Selama kurun waktu lima tahun tersebut, angka kemiskinan hanya turun sebesar 2,98 persen atau 0,596 persen per tahun. Penurunan ini terbilang rendah karena tidak mencapai 1 (satu) persen per tahun. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY penurunannya juga relatif lambat. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) selama lima tahun hanya turun sebesar 0,16; yaitu dari 2,48 pada September 2011 menjadi 2,32 pada September 2015. Indeks keparahan kemiskinan (P2) pada periode yang sama turun sebesar 0,04; yaitu dari 0,59 pada September 2011 menjadi 0,63 pada September 2015.



Sumber: BPS DIY, 2016.

Gambar 2. Trend Gini Ratio di DIY.

Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY selain dibayang-bayangi kemungkinan meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, juga diiringi dengan kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2009, koefisien Gini baru mencapai 0,38, namun pada tahun 2015 sudah mencapai 0,43. Meskipun koefisien Gini tahun 2015 ini lebih rendah daripada tahun 2013, namun dilihat dari kecenderungannya (*trend logarithmic*) semakin meningkat.

Melihat potret kemiskinan di atas diperlukan analisa dan evaluasi mendalam terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian makro. Evaluasi makroekonomi diperlukan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini telah mampu mendorong penurunan kemiskinan atau belum.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan diperlukan untuk menjawab permasalahan apakah kebijakan ekonomi makro selama ini mampu mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan telah mendapatkan perhatian penting karena pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan yang erat dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan. Kraay (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, kebijakan makro yang baik dan globalisasi bermanfaat bagi si miskin.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan yang berarti bahwa pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Agrawal (2008) menunjukkan bahwa provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mencapai penurunan yang cepat dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan meningkatnya lapangan kerja dan upah.

Sachs (2004) menyarankan empat pilar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pertama, reformasi ekonomi. Kedua, mempunyai penduduk sehat dan terdidik yang dapat berpartisipasi dalam perekonomian dunia. Ketiga, teknologi. Keempat, penyesuaian struktural khususnya diversifikasi ekspor. Reformasi ekonomi harus dikombinasikan dengan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Nizar dkk. (2013) mengemukakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) dan estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan. Oleh karenanya pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja akan tetapi lebih daripada itu pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkeadilan yaitu pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kessey (2013) yang menunjukkan bahwa sektor ekonomi, keuangan, kelembagaan dan sosial mempunyai kontribusi terbesar pada lambatnya proses pengentasan kemiskinan sehingga target MDGs yang terkait dengan pengentasan kemiskinan pada tahun 2015 tidak tercapai. Strategi untuk mencapai target terkait pengurangan kemiskinan adalah dengan memperkuat hubungan antar sektor ekonomi seperti pertanian, industri dan jasa.

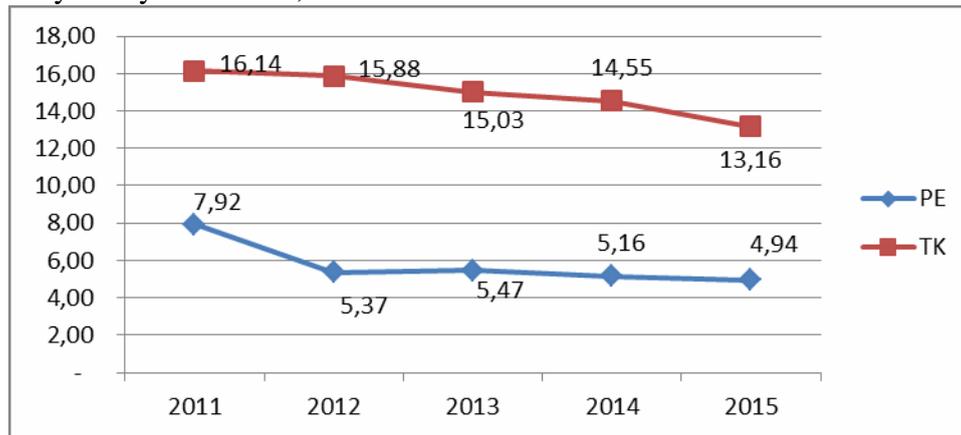
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Bappeda. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dianalisis menggunakan analisis korelasi dan elastisitas. Analisis korelasi mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Analisis elastisitas menghitung elastisitas antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi DIY pada periode pengamatan (2011-2015) semakin meningkat dan tingkat kemiskinan semakin menurun. Dari hasil analisis korelasi, ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi menurun angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Meskipun

demikian korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak cukup kuat karena nilainya hanya sebesar 0,67.



Sumber: Pemda DIY, 2016.

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di DIY

Ada delapan sektor ekonomi di DIY yang memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan meskipun angka korelasinya relatif rendah. Kedelapan sektor tersebut antara lain: 1) pertanian; 2) industri pengolahan; 3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) jasa keuangan dan asuransi; 5) real estat; 6) jasa perusahaan; 7) jasa pendidikan; dan 8) jasa lainnya. Ketika pertumbuhan ekonomi kedelapan sektor tersebut meningkat, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Disisi lain kesembilan sektor lainnya justru memiliki korelasi positif dengan tingkat kemiskinan, ketika pertumbuhan ekonomi kesembilan sektor tersebut mengalami kenaikan, tingkat kemiskinan juga mengalami kenaikan. sektor tersebut antara lain: 1) pertambangan dan penggalian; 2) pengadaan listrik dan gas; 3) informasi dan komunikasi; 4) kontruksi; 5) perdagangan besar dan eceran; 6) transportasi dan pergudangan; 7) penyediaan akomodasi dan makan minum; 8) administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Korelasinya dengan Tingkat Kemiskinan di DIY

	Kuat	Lemah
Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Informasi dan Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontruksi 2. Perdagangan Besar dan Eceran 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5. Administrasi Pemerinta, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Negatif	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estat

		6. Jasa Perusahaan 7. Jasa Pendidikan 8. Jasa Lainnya
--	--	---

Sumber: BPS 2016, data diolah.

Hasil korelasi tersebut sejalan dengan hasil analisis elastisitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DIY adalah inelastis (0,28). Artinya pertumbuhan ekonomi DIY tidak peka terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar tingkat kemiskinan dapat berkurang secara signifikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis korelasi, ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi menurun angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Meskipun demikian korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak cukup kuat. Hasil korelasi tersebut sejalan dengan hasil analisis elastisitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DIY adalah inelastis. Artinya pertumbuhan ekonomi DIY tidak peka terhadap tingkat kemiskinan.

Pemerintah daerah DIY sebaiknya mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, sektor tersebut adalah 1) pertanian; 2) industri pengolahan; 3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4) jasa keuangan dan asuransi; 5) real estat; 6) jasa perusahaan; 7) jasa pendidikan; dan 8) jasa lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Pradeep. 2008. *Economic Growth and Poverty: Evidence from Kazakhtan*. *Asian Development Review*. Vol. 24, no.2 pp. 90-115
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016 Diunduh melalui <http://bps.go.id>
- Kessey, K.D. and A. Felix, 2013. Urbanization and intensive use of space in central business district. Decongestion programme as city service response: An Appraisal *Journal of Developing Country Studies*. New York: IISTE Publication, 3(6): 89-96
- Nizar, Chairul. Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur. 2013. -Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Vol.1, No.2. ISSN: 2302-0172*
- Pattinama M J, 2009. Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku Dan Surade-Jawa Barat) *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 1-12*
- Remi, S.S. dan P. Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sachs, J. et al. -Ending Africa's Poverty Trap, || BPEA, 2004
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
http://www.cs.unsyiah.ac.id/~frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/PROS_2008_MAK3.pdf
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.

**PENGENTASAN KEMISKINAN: MOTIVASI DAN BUDAYA PEREMPUAN
DALAM MEKANISME PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS
PENDEKATAN POTENSI**

DI KECAMATAN BERBAH, SLEMAN

**(PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA SAMPAI PELUANG PENYALURAN
HASIL USAHA)**

Tri Mardiana¹⁾, Sri Kussujaniatun²⁾, Suchyo Heriningsih³⁾, Marita⁴⁾, Sadi⁵⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Program Studi Manajemen,
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: triana_upn@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Program Studi Manajemen,
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: Sri_kussujaniatun@yahoo.co.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: heriningsih_s@yahoo.co.id

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: marita_farid@yahoo.com

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Program Studi Manajemen,
Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: sadi.sadi1971@yahoo.co.id

ABSTRACT

Their Efforts to develop the economic value of women's resources emphasis on linkages potential and needs of women in a development area, in the form of a network of production to services and efforts of innovation development through efforts of resource extraction potential, the development of micro industries, trade, service as well as other investment that can create jobs and increase the income of the women in his capacity as the poor. This research is combining the psychological side of the community in improving their quality of life through the creation of joint ventures. During this measurement Gender Empowerment Measurement, HDI, GDI was never at the touch of a psychological (motivation and culture). The women members of the group of cashew have been motivated for the formation of business groups, engineering tools kacic to finally get a chance distribution of the results of operations in accordance with the approach potential through the website, the study aims to analyze the influence of organizational culture and work motivation on the performance of the women of the group of cashew Krikilan hamlet of Sleman Berbah descriptively. With descriptive statistical analysis of obtained results showed an increase in performance, behavioral changes caused by increased motivation and work culture.

Keywords: poverty alleviation, motivation, culture, women's empowerment mechanisms, GEM, GDI, a potential approach, the formation of business groups, the distribution of operating results

ABSTRAK

Adanya Upaya pengembangan nilai ekonomi sumberdaya kaum perempuan mengutamakan pada keterkaitan potensi dan kebutuhan kaum perempuan di suatu kawasan pengembangan, dalam bentuk jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya melalui upaya penggalan sumber daya potensial, pengembangan industri mikro, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan kaum perempuannya dalam kapasitasnya sebagai kelompok masyarakat miskin. penelitian ini adalah menggabungkan sisi psikologis masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pembentukan usaha bersama. Selama ini pengukuran Gender Empowerment Measurement, HDI, GDI tidak pernah di sentuh dari sisi psikologis (motivasi dan budaya masyarakat). Perempuan-perempuan anggota kelompok pengrajin mete telah dimotivasi untuk pembentukan kelompok usaha, rekayasa alat kacip sampai akhirnya memperoleh peluang penyaluran hasil usaha sesuai dengan pendekatan potensi melalui website, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasional dan motivasi kerja terhadap kinerja perempuan kelompok pengrajin mete di dusun Krikilan Berbah Sleman secara deskriptif. Dengan Analisis statistik deskriptif diperoleh hasil yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja, terjadi perubahan perilaku diakibatkan meningkatnya motivasi kerja dan budaya kerja.

Kata Kunci: pengentasan kemiskinan, motivasi, budaya, mekanisme pemberdayaan perempuan, GEM, GDI, pendekatan potensi, pembentukan kelompok usaha, penyaluran hasil usaha

1. PENDAHULUAN

Upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dua indikator penting yang mengukur hal itu disajikan dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report/HDR*) yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan *Gender-related Development Index* (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,697; sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender. Indikasi kesenjangan diperkirakan akan masih terlihat pada tahun 2013.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah *Gender Empowerment Measurement/GEM*. Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, sehingga berguna untuk mengukur ketimpangan gender di 3 (tiga) hal tersebut. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 sekitar 0,458; yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang dari separuh dari peran laki-laki. Untuk mengatasi rendahnya GDI dan GEM, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 telah dinyatakan bahwa pengarus

utama gender merupakan salah satu prinsip pengarus utama ketika melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan. Dalam kaitan itu, pada akhir tahun 2006 GDI dan GEM Hasil Penelitian pada tahun pertama ditemukan dari 41 responden yaitu ibu-ibu didusun Krikilan Berbah Sleman sebagian besar (61%) rata-rata, berpendidikan akhir setingkat SMA, berusia 40 th, menikah di usia 20 th, pekerjaan ibu RT, dan dalam kondisi sehat, sedangkan kondisi ekonomi wanita dan keinginan untuk berwirausaha, jumlah wanita yang sudah memiliki pekerjaan adalah 25 dari total 41 responden (61%) dengan rata-rata berpenghasilan Rp1.733.840;00. Sementara 16 responden (39%) hanya menggantungkan penghasilan dari suaminya. Di daerah Berbah, selisih penghasilan sebesar Rp1.733.840;00 ini termasuk selisih yang sangat besar. Dari sisi pengeluaran rata-rata per hari untuk kelompok wanita pekerja juga lebih besar dibandingkan pengeluaran rata-rata harian kelompok wanita tidak bekerja. Hal ini juga berarti bahwa kesejahteraan untuk responden yang bekerja lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak bekerja dan rata-rata ingin berwirausaha. Pada tahun ke dua dilakukan rekayasa alat kacip dan penelitian secara kualitatif serta pendampingan intensif atas prosedur pembentukan Kelompok Usaha Bersama, dan Pada tahun ke tiga yang merupakan tahun terakhir dilakukan penyaluran hasil usaha melalui website dengan alamat <https://kerajinan-krikilan.pswebstore.com>

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Budaya Organisasional

Menurut Luthans dalam Susanto (2006: 111) budaya organisasional adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang akan berlaku agar diterima oleh lingkungannya.

Menurut Sarplin dalam Susanto (2006: 120) budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dengan struktur formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut Sondang (1995: 233) budaya organisasi adalah penggabungan antara gaya kepemimpinan manajemen puncak dan norma-norma serta sistem nilai keyakinan para anggota organisasi. Menurut Deddy Mulyadi (2006: 270) budaya organisasi adalah apa yang karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan kepercayaan, nilai-nilai dan harapan.

2.2. Motivasi

Menurut Gray, et-al (dalam Winardi, 2005) menyatakan bahwa motivasi merupakan hasil sejumlah proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Menurut Bandura (2000) mendefinisikan *self efficacy* adalah rasa kepercayaan seseorang bahwa ia dapat menunjukkan perilaku yang dituntut

dalam suatu situasi yang spesifik. *Self efficacy* lebih mengarahkan pada penilaian individu akan kemampuannya. motivasi kepercayaan diri terhadap *self efficacy* berada dalam pengaturan diri terhadap motivasi. Motivasi individu banyak ditimbulkan melalui proses kognitif. Orang – orang memotivasi dirinya sendiri dengan mengarahkan tindakannya dengan melalui berbagai latihan. Mereka percaya terhadap apa yang mereka lakukan dan selalu mengantisipasi adanya hasil tindakan yang prospektif. Mereka akan mengatur tujuan yang dimilikinya dan merencanakan latihan-latihan sebelum melakukan tindakan dengan mendesainnya sesuai nilai-nilai masa depan.

2.3. Kinerja

Kinerja menurut Hasibuan (2009) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Stolovitch dan Keeps (dalam Rivai, 2005) berpendapat bahwa kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.

Sedangkan Rivai (2005) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Beberapa pengertian kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

2.4. Pengaruh Budaya Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan

Budaya organisai pada hakekatnya merupakan salah satu unsur pendukung dalam meningkatkan kinerja karyawan. Organisasi yang memperhatikan unsur budaya organisasi tersebut akan meningkatkan kualitas dari organisasi. Budaya organisasi menjadi salah satu pedoman kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih optimal.

Menurut Mangkunegara, (2013) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Wirawan (2008) budaya organisasi adalah norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam bekerja. Berdasarkan pendapatn tersebut dapat dikatakan bahwa dengan budaya organisasional yang kuat dan dipatuhi karyawan, maka kinerja karyawan akan lebih

baik. Peneliti sebelumnya Basuki (2013), menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

2.5. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Motivasi merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu mendapat perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawainya. Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam diri seseorang atau pegawai untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena adanya rangsangan dari luar baik itu dari atasan dan lingkungan kerja, serta adanya dasar untuk memenuhi kebutuhan dan rasa puas, serta memenuhi tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dan dilakukan dalam organisasi.

Agustuti Handayani (2010) telah meneliti Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan, kemudian menyatakan bahwa Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di lokasi sasaran yaitu ibu-ibu pengrajin mete yang berjumlah 41 orang, yang di ambil secara sensus.

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian

Agar suatu variabel dapat diukur, maka variabel tersebut perlu dioperasionalkan. Definisi ini memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Pada penelitian ini ada tiga variabel Budaya Organisasi (*independent variable*), Motivasi (*independent variable*) dan Kinerja (*dependent variable*).

3.3. Alat Ukur yang digunakan

Untuk memperoleh data-data dalam membahas permasalahan ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data melalui kuesioner dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dengan format tertentu dan berbagai pilihan didalamnya.

3.4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, pertimbangannya yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di dusun Krikilan, desa Kalitirto, kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Terhadap Budaya Organisasional

Interval	Kategori	Jumlah	%	Mean
1,00 sd 1,79	Sangat rendah	0	0.0%	
1,80 sd 2,59	Rendah	2	4.89%	
2,60 sd 3,39	Cukup	4	9.76%	
3,40 sd 4,19	Tinggi	21	51.22 %	
4,20 s/d 5,00	Sangat tinggi	14	34.13 %	
Jumlah		41	100.0 %	3.74

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang diambil sebagai sampel, 21 orang atau 51,22% mayoritas perempuan pengrajin mete telah memberikan penilaian tinggi terhadap variabel budaya kerja dengan rata-rata skor sebesar 3.74, yaitu berada pada interval antara 3.40 – 4.19. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pengrajin mete memiliki budaya kerja tinggi atau budaya kerja yang ketat dimana mereka bekerja lebih disiplin, tanggungjawab, efektif dan kreatif sesuai standar hasil yang telah ditetapkan karena telah terbentuknya kelompok usaha, adanya rekayasa alat kacip tradisional ke yang lebih modern dan website sebagai sarana pemasaran online distribusi hasil.

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Kerja

Interval	Kategori	Jumlah	%	Mean
1,00 sd 1,79	Sangat rendah	0	0.0%	
1,80 sd 2,59	Rendah	4	9.76%	
2,60 sd 3,39	Cukup	2	4.89%	
3,40 sd 4,19	Tinggi	25	60.98%	
4,20 s/d 5,00	Sangat tinggi	10	24.37%	
Jumlah		41	100.0%	3.61

Sumber: Data primer

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang diambil sebagai sampel, 25 orang atau 60,98% mayoritas pengrajin telah memberikan penilaian tinggi terhadap variabel motivasi kerja dengan rata-rata skor sebesar 3.61, yaitu berada pada interval antara 3.40 – 4.19. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pengrajin mete memiliki motivasi kerja yang tinggi dimana mereka bekerja dengan memiliki niat yg sungguh-sungguh untuk lebih maju, adanya jaminan keamanan dan kenyamanan kerja, adanya kesempatan untuk berkreasi sesuai standar hasil yang telah ditetapkan, hasil yang diterima dapat mendukung ekonomi rumah tangga. Motivasi tinggi disebabkan karena telah terbentuknya kelompok usaha, adanya rekayasa alat kacip tradisional ke yang lebih modern dan website sebagai sarana pemasaran online distribusi hasil.

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kinerja

Interval	Kategori	Jumlah	%	Mean
1,00 sd 1,79	Sangat rendah	0	0.0%	
1,80 sd 2,59	Rendah	2	4.89%	
2,60 sd 3,39	Cukup	3	7.32%	
3,40 sd 4,19	Tinggi	24	58.54%	

4,20 s/d 5,00	Sangat tinggi	12	29.25%	
Jumlah		41	100.0%	3.73

Sumber : Data primer

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa dari 41 responden yang diambil sebagai sampel, 24 orang atau 58,54% menyatakan tinggi. Mayoritas perempuan kelompok pengrajin telah memberikan penilaian tinggi terhadap kinerja dengan rata-rata skor sebesar 3.73, yaitu berada pada interval antara 3.40 – 4.19. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pengrajin mete menguasai pekerjaan dengan baik, cepat tanggap terhadap tugas baru, hasil kerja memenuhi target, bersedia meningkatkan hasil kerja, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk digunakan semaksimal mungkin dalam bekerja.

5. KESIMPULAN

1. Terbentuknya Kelompok Usaha, Rakayasa Alat Kacip dan Pemasaran Online melalui website menyebabkan adanya perubahan perilaku perempuan pengrajin mete sehingga berdampak pada Budaya Organisasional atau Budaya Kerjanya
2. Terbentuknya Kelompok Usaha, Rakayasa Alat Kacip dan Pemasaran Online melalui website menyebabkan adanya perubahan perilaku perempuan pengrajin mete sehingga berdampak pada tingginya Motivasi Kerjanya
3. Adanya Kelompok Usaha, Rakayasa Alat Kacip dan Pemasaran Online melalui website menyebabkan Budaya Organisasional atau Budaya Kerja dan Motivasi tinggi sehingga berdampak pada tingginya hasil atau Kinerja Perempuan Pengrajin Mete

SARAN

Kami telah memenuhi keinginan dari para perempuan kelompok pengrajin mete di dusun Krikilan Berebah Sleman untuk berwirausaha, dengan membentuk Kelompok Usaha, Merekayasa alat kacip tradisional ke yang lebih Modern serta membuat website untuk mendistribusikan dan memasarkan hasil secara online, maka saran kami kepada para pengrajin untuk terus berkarya, kreatif inovatif mengaktualkan potensi yang dimiliki. Keinginan wirausaha ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga masyarakat luas untuk membinanya. Dengan demikian akan meningkatkan perekonomian bangsa.

REFRENSI

- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organizations Behavior Structure Processes*. Irwin McGraw-Hill.
- Greenberg, J dan R. Baron. 1995. *Behavior Structure and Process*. Business Publication Inc., Plano, Texas
- Ghufro M. Nur & Risnawati Rini S. 2010. *Teori-Teori Psikologi*.
- Heriningsih, Sucahyo. 2010. -Cara Mengelola Keuangan Rumah Tangga di RT 13 RW 13 Perumnas Condongcatu, Kecamatan Depok, Sleman
- Heriningsih, Sucahyo. Jurnal Buletin Ekonomi Pengaruh kecerdasan Emosional terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Vol.7 / No.1, ISSN:1410-2293 / 2009
- Kussujaniatun, Sri. 2006. Hubungan antara Sikap Terhadap Bukti Fisik, Proses dan Karyawan dengan Kualitas Keterhubungan serta Perannya Dalam Menimbulkan Niat Ulang Membeli dan Loyalitas (Survei Pada Konsumen Member Card ALFA yang Berdomisili Di Sleman Yogyakarta) (Jurnal Humaniora Sains dan Pengajaran -INOVASI|| Vol. XIV No. 3 September 2006, ISSN 0854-4328)Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2006 Efek Komunikasi Dari Mulut ke Mulut Terhadap Sikap dan Niat Membeli Produk Prosesor AMD Athlon DSI Yogyakarta(Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi — BALANCE|| Th. III No. 6 Juli 2006, ISSN : 1693-9352)Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2007 Pengaruh Motivasi Nasabah Kredit Terhadap Keputusan Meminjam Dana (Survei Pada BPR Bank Kredit Kecamatan Juwangi Boyolali) Jurnal Ekonomi -Artavidya|| Tahun 7 No.1 Maret 2007, ISSN : 1410-8755 Terakreditasi No. 23 a/DIKTI/Kep/2004Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2007 Analisa Pengaruh Dead Endorser Terhadap Brand Personality Pada Iklan Kompas Di Televisi (Survei Pada Iklan Konsumen Surat Kabar Harian Kompas Di Kabupaten Sleman Yogyakarta) Penulis sendiri) (Jurnal Bisnis dan Ekonomi -JBE|| Vol. 14 No. 23 a/DIKTI/Kep/2004
- Kussujaniatun, Sri. 2007 Analisis Ekuitas Merek (Survei Pada Konsumen Rokok Djarum

MODEL LITERASI MEDIA DI LINGKUNGAN IBU-IBU RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA

(Studi pada kec. Gondomanan Yogyakarta, dan Kec. Banguntapan Bantul DI Yogyakarta)

Dewi Novianti

Siti Fatonah

Jurusan Ilmu Komunikasi UPN -Veteran Yogyakarta

dewinovianti_upn@yahoo.co.id

Abstrak

Maraknya perkembangan media membuat konten-konten yang ada tidak lagi dapat dikontrol. Muatan konten terbesar dari media adalah hiburan. program siaran yang tidak mendidik. Mereka lebih mengedepankan program-program hiburan yang kurang memperhatikan etika dan norma masyarakat. Mereka tidak peduli dampak negatif program siaran yang dikedepankan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kemampuan literasi media, membuat Identifikasi model penggunaan media, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi media, serta identifikasi yang dilakukan guna menunjang tercapainya tujuan penelitian berikutnya yaitu usulan kebijakan dalam mengembangkan model literasi media yang lebih efektif khususnya bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga di lingkungan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara mendalam, observasi, dan FGD. Teori yang digunakan adalah Teori Difusi Inovasi, *Social Learning Theori*, dan literasi media.. Hasil penelitian menunjukkan ada berbagai media yang digunakan oleh Ibu-Ibu Rumah tangga, tetapi yang paling dominan adalah televisi. Banyak waktu yang digunakan untuk hiburan dengan menonton acara Tv, tetapi mereka tidak menyadari dampak yang ditimbulkan oleh media ini. Ada beberapa dari ibu-ibu rumah tangga yang sudah menyadari pentingnya memilah konten media yang dikonsumsi tetapi belum secara mendalam memahami dampak yang ditimbulkan bagi anggota keluarga terutama anak-anak.

Kata kunci: Literasi media, konten media, Ibu Rumah Tangga

Pendahuluan

Maraknya media di tanah air membuat khalayak media haruslah selektif dan cerdas dalam membaca, mendengar, dan menonton konten media tersebut. Media konvensional seperti televisi, Koran, majalah, tabloid, dan radio, mempunyai andil besar dalam menyampaikan berbagai informasi. Tidak hanya media konvensional, media baru yakni media interaktif melalui internet juga tidak bisa dinafikkan berpengaruh luar biasa besar

terhadap sikap khalayaknya. Kedua macam media tersebut dapat membentuk opini publik, dapat menggerakkan massa, dan bahkan dapat merubah keadaan.

Media interaktif mengalami lompatan pengguna yang mencengangkan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI menargetkan 150 juta orang menggunakan akses internet pada 2015 (<http://www.antaraneews.com>). Media interaktif yang semakin murah dan tersebar juga menghadirkan kecemasan tersendiri. Situs pornografi, permainan *online*, media sosial telah menyita waktu dan perhatian pelajar sehingga menyita waktu dan perhatian dalam belajar. Konsep berinternet yang sehat sulit untuk diterapkan karena sifatnya yang sangat personal.

Perkembangan media tersebut telah membawa kecemasan baru, yaitu masalah isi (*content*). Media massa, khususnya televisi, diyakini banyak menghadirkan program siaran yang tidak mendidik. Mereka lebih mengedepankan program-program hiburan yang kurang memperhatikan etika dan norma masyarakat. Mereka tidak peduli dampak negatif program siaran yang dikedepankan tersebut. Misalnya adalah eksploitasi terhadap perempuan, anak, kemiskinan, humor yang rendah, gaya hidup bebas dan sebagainya.

Berbicara *literasi media* (literasi media) untuk di Indonesia boleh dikatakan baru merebak dalam dekade 2000-an, walau sebenarnya sudah menjadi wacana global Sejak dekade 1980-an. Media televisi merupakan media yang memiliki daya pikat lebih dibanding media massa lainnya. Ini dikarenakan media televisi menyita indra pandang dan dengar. Sementara media massa lainnya hanya menyita satu indra saja. Di Indonesia sendiri sampai dengan tahun 2007 tercatat populasi pesawat televisi tidak kurang dari 40 juta unit, dengan jumlah pemirsa lebih dari 200 juta orang. Hal tersebut diperkuat dengan data BPS tahun 2006 yang menyebutkan bahwa 85,86% penduduk Indonesia mempunyai kemampuan mengakses media televisi. Angka tersebut relatif tinggi, dibandingkan dengan aksesibilitas penduduk Indonesia pada media radio yang hanya sebesar 40,26% dan pada media cetak (koran/majalah) sebesar 23,46%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Indonesai masih menjadikan media televisi sebagai media utama dalam mendapatkan informasi maupun hiburan sehari-hari (Wiratmojo, 2010:47).

Terkait dengan literasi media salah satu elemen masyarakat yang paling dominan dalam keluarga terutama dalam mendidik putra putri bangsa adalah peran Ibu. Ibu-ibu rumah tangga merupakan tonggak atau tiang keluarga perlu memiliki pendidikan yang baik terutama dalam cerdas membaca media (menonton, mendengar, membaca, menelaah menyaring media). Selektivitas ini tidak bisa muncul begitu saja tanpa adanya kesadaran yang tinggi dan kepedulian dari kalangan yang telah melek media untuk dapat menyosialisasikan, menyadarkan, dan sampai pada mencerdaskan ibu-ibu rumah tangga. Sebagian besar waktu ibu-ibu rumah tangga ini dihabiskan dengan menonton acara televisi dan bermedia sosial. Tidak terkecuali ibu-ibu rumah tangga yang berada di daerah Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul.

Realita di atas menjadi sebuah permasalahan khususnya dalam hal ini rentannya warga masyarakat akan pengaruh negatif dari media. ‘Bijak dalam bermedia’ menjadi

penting bagi para pemerhati media. Warga masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih untuk mengantisipasi hal tersebut. Perlu ada suatu model gerakan literasi media.

Dari implementasi gerakan ini akan menghasilkan suatu model yang bisa diimplementasikan secara kontinyu bagi warga masyarakat yang belum melek media.

Target ibu-ibu rumah tangga pada umumnya adalah menciptakan generasi yang terpelajar dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, mereka tetap harus berinteraksi dengan media sebagai sumber informasi namun dengan *self kontrol* sebagai filternya. Inilah pentingnya literasi media.

Penelitian ini bertujuan: pertama, Memetakan kemampuan literasi media di lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul, DI Yogyakarta. Kedu, membuat Identifikasi model penggunaan media di lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul, DI Yogyakarta. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi media di lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Bantul, DI Yogyakarta.

Literasi Media

Pemahaman literasi media atau melek media secara sederhana adalah bagaimana khalayak mampu memilih atau menyaring isi pesan yang disampaikan oleh media. Khalayak mampu membedakan mana yang dianggap penting atau baik dan mana yang dianggap buruk. Pada dataran ini khalayak sudah semakin cerdas, aktif dan kritis. Bahkan khalayak tidak begitu saja mempercayai pesan yang disampaikan oleh media. Untuk itulah dibutuhkan adanya media edukasi dalam konteks literasi media. Wirodono dalam Rejeki (2010:67) mengemukakan tiga kategori khalayak yang rentan terhadap pengaruh buruk media, yakni anak-anak, remaja, dan kaum ibu.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah memetakan kemampuan literasi media dari Ibu-Ibu dasa Wisma di Lingkungan Gondomanan Yogyakarta, dan Ibu-Ibu Dasa Wisma Banguntapan Bantul DI Yogyakarta. Selanjutnya mengembangkan model yang tepat untuk dapat diimpletasikan serta dijadikan kebijakan untuk mencerdaskan Ibu-Ibu Dasa Wisma di Lingkungan Gondomanan Yogyakarta, dan Banguntapan Dasa Wisma Bantul DI Yogyakarta dalam berinteraksi dengan media.

Sumber Data ; Wawancara mendalam (*Indepth Interview*), Observasi, dan *Focused Group Discussion* (FGD)

Hasil Dan Pembahasan

Literasi Media Ibu-Ibu Dasa Wisma Kec. Gondomanan

Nara Sumber semuanya adalah ib-ibu rumah tangga. Ada yang murni sebagai ibu Rumah tangga, ada yang bermata pencaharian berwiraswasta yakni berjualan barang maupun jasa, dan buruh.

Semua narasumber merupakan aktivis organisasi yakni Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasa Wisma dan Aisyiyah. Mayoritas narasumber berpendapat bahwa media yang sering mereka konsumsi adalah televisi.

Televisi dipandang sebagai media yang murah dan mudah. Bahkan ada beberapa narasumber memiliki televisi yang lebih dari satu. Frekuensi menonton televisi narasumber ini kurang dari lima jam sehari. Mereka menonton televisi biasanya pada waktu senggang saja atau hanya sekedar mendampingi keluarga dikarenakan kesibukan sebagai aktivis dan pekerjaan..

Pada umumnya tayangan yang lebih mereka sukai adalah acara siraman rohani dan motivasi

Hal ini dikarenakan latar belakang narasumber yang merupakan seorang aktivis

organisasi keislaman sehingga mereka cenderung menyukai tayangan rohani Islam.

Budaya membaca narasumber minim. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya intensitas narasumber dalam membaca koran. Bahkan hanya ada satu orang yang berlangganan koran yakni ibu Atika, itu pun tidak rutin membaca koran.

Mayoritas narasumber asing dengan media sosial. Pengguna medsos pada forum ini hanyalah ibu Atika. Ia mendapat informasi dari medsos dan sudah paham bagaimana bersikap yang tepat saat menjumpai berita hoax.

Umumnya para narasumber bersikap peduli terhadap tayangan yang ditonton oleh keluarga mereka. Hal ini ditunjukkan dengan pendampingan menonton tayangan televisi. Akan tetapi para narasumber belum mengetahui perubahan sikap yang terjadi pada keluarga yang berumur anak-anak dan remaja saat mereka menonton tayangan yang salah. Mereka menganggap bahwa anaknya baik-baik saja.

Literasi Media Ibu-ibu Dasa Wisma Kec. Bangun Tapan Bantul

Ibu-ibu yang menjadi responden memiliki latar belakang status pekerjaan yang beragam, yakni di samping sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja sebagai PRT (pembantu Rumah

Tangga) paruh waktu, buruh, ojek, berjualan. Beberapa diantaranya memiliki pekerjaan tambahan seperti berjualan es, membantu memasak untuk hajatan, dan berjualan sembako di Pasar. Sisanya, mereka menjalani kegiatan sosial lebih banyak di kampung.

Beberapa ibu diantaranya memiliki acara favorit seperti tayangan tentang psikologi anak, Mamah Dedeh, Kick Andy, dan Mario Teguh. Tidak ada yang menyebutkan mengikuti tayangan sinetron atau pun tayangan sinetron favorit.

Mereka mengaku senang dengan tayangan tersebut karena inspiratif, informatif, dan menggugah. Salah satu ibu menolak mengikuti serial tayangan sinetron di televisi karena tidak ingin kecewa jika terlewat satu episode. Salah satu ibu yang lain mengemukakan tidak ingin rajin mengikuti tayangan sinetron karena tidak suka. Mereka cenderung menonton sinetron hanya pada saat ingin saja.

Termasuk ibu-ibu yang lain, mereka mendampingi putra-putrinya saat mereka mengonsumsi media. Jika ada tayangan kartun yang tidak pas mereka akan nasehati dan berikan pendidikan (informasi) terkait tayangan tersebut. Mereka mengaku putra-putrinya tidak memiliki acara favorit di televisi yang harus dikonsumsi setiap periode tertentu.

Simpulan

Penelitian Literasi media pada ibu-ibu rumah tangga pada kecamatan Gondomanan Yogyakarta dan Bantul, memperlihatkan bahwa setiap harinya ibu-ibu tersebut mengonsumsi media untuk hiburan dan mendapatkan informasi. Namun porsi hiburan lebih besar dibanding sebagai media informasi. Hampir semua narasumber adalah wanita pekerja dari kalangan bawah, sehingga kurang memahami apa dampak negative dari media. Media yang paling sering dikonsumsi adalah televisi. Karena sifatnya yang audio visual, sehingga daya tarik TV jauh lebih besar daripada media lainnya. Koran, majalah, dan radio sebenarnya juga digunakan oleh ibu-ibu ini sebagai sarana hiburan dan informasi. Namun sayangnya masih sangat minim yang menggunakannya, walaupun dibaca atau didengar hanya sebatas membaca headline, atau untuk mencari tugas sekolah anak.

Saran yang bisa diberikan :

1. Perlu ada sosialisasi media khususnya bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga
2. Pemerintah perlu membuat sebuah regulasi khusus bagi ibu-ibu rumah tangga untuk diberikan pelatihan-pelatihan mengenai literasi media
3. Literasi media tidak sebatas media konvensional saja, akan tetapi juga perlu diberikan kesadaran akan pentingnya media on line. Paling tidak untukantisipasi bagi anak-anak akan informasi negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran, Stanley and Dennis K Davis. 2000. *Mass communication theory*. Canada: Wadsworth
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications
- Hidayat, Dedy N.,2000, *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtunya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: PT. Gramedia,
- James, Potter W., 2005, *Literasi media*, third edition. New Delhi: Sage Publication
- Littlejohn, Stephen W. 2002. *Theories of Human Communication*. sixth edition. California: Wadsworth Publishing Company.
- McLuhan, Marshall, 2003, *Understanding Media*, London and Newyork: Routledge,
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Neuman, W Lawrence. 2000. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. fourth edition. Boston : Allyn and Bacon.
- Sasangka dan darmanto. 2010, *Ketika Ibu Rumah Tangga Membaca televisi*. Yogyakarta: Tifa
- Sendjaya, Sasa Djuarsa, Dkk, 1993, *Pengantar Komunkasi*, Jakarta: Universitas Terbuka,
- Soemandoyo, Priyo. ND. *Wacana Gender dan Layar Televisi: Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan LP3Y
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS PRESS.
- Wiratmojo, 2010, *Ketika Ibu Rumah Tangga Membaca televisi*. Yogyakarta: Tifa
- Sumber lain:
<http://www.tvri.co.id>
<http://www.antaraneews.com>
<http://www.bantulkab.go.id/kecamatan/Banguntapan.html>

**IMPLEMENTASI INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
VASEKTOMI DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSEPTOR KB PRIA
LESTARI**

Analisis Kasus di Kota Pekalongan

Basuki

Panji Dwi Ashrianto

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Jalan Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta
Email : basuki_upn@yahoo.com. Panji_adver@yahoo.co.id

Abstract

KB Paradigm already shifting from population control and fertility decline to the health of reproduction by concerning about the rights of reproduction and gender equality. One of the attempt or effort is men participation in KB whether it is by condor or vasectomy. The socialization of MOP Method is not easy. Many contradictions come from both man and wife. Religion aspect also becomes one of consideration. The first research held in Surabaya and Badung Bali discovered that the success KIE MOP were using creative strategy that combine every kind of marketing communication whether it's personal selling (face to face), advertisement (brochure), sales promotion (counseling). The success of KIE cannot use rely on only one kind of marketing communication. This is because opinion public making is important to behavioral change. To overcome this constrain, clergy and testimony from vasectomy participant were needed as supporting source. This research applied to other research locus, Pekalongan, which characterized as religious city that has many fisherman villages. The aim of this research is to discover the implementation of marketing communication of vasectomy method in Pekalongan. The research method is collecting data through observation.

The research result shows that MOP socialisation was almost never been done before. There's also no amount of target of participants. KIE implementation by applying the marketing communication for MOP gains a better response from counselor team and society. GerebekPasar was effective to create public's opinion. GerebegPasar is a counseling held in public places such as market. Marketing team was equipped with brochures and loudspeaker to gain the response from market visitors. People were enthusiast and not hesitate to ask about MOP. Counseling also effective to create public opinion because it attended by clergy, doctors and MOP participants who give satisfying amount of information. Face to face communication were effective for behavioral change because each participant candidates could ask effectively. Motivation using persona creates linkage between the officer and MOP participant candidates. After this KIE activity, there are 6 couple who join this program.

Keywords: Vasectomy, integrated marketing communication, gerebek pasar/termina.

ABSTRAK

Paradigma KB telah berubah yaitu dari pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi lebih ke arah kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender. Salah satu upaya adalah kepesertaan pria dalam ber-KB baik kondom maupun vasektomi. Sosialisasi metode MOP tidak mudah. Pertentangan berasal dari kaum pria maupun para istri. Faktor agama juga menjadi kendala tersendiri. Penelitian pertama yang dilakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Badung Bali diketahui bahwa keberhasilan KIE MOP dilakukan dengan strategi kreatif yaitu memadukan semua bentuk komunikasi pemasaran baik personal selling (*face to face*), periklanan (brosur), sales promotion (penyuluhan). Keberhasilan KIE tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dari bentuk komunikasi pemasaran. Hal ini dikarenakan pembentukan opini publik menjadi penting untuk perubahan perilaku. Untuk mengatasi hambatan lain dibutuhkan tokoh agama dan testimoni peserta vasektomi sebagai narasumber pendukung. Hasil penelitian ini diujicobakan di lokasi penelitian lain yaitu Kota Pekalongan yang memiliki karakter sebagai kota religius dan banyak kampung nelayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi komunikasi pemasaran terpadu metode vasektomi di Kota Pekalongan. Metode pengumpulan data dengan observasi pada eksperimen lapangan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini KIE MOP hampir tidak pernah dilakukan. Perolehan kepesertaan juga tidak ada target. Pelaksanaan KIE dengan penerapan komunikasi pemasaran terpadu metode MOP mendapat sambutan positif baik tim penyuluh maupun masyarakat. Gerebek pasar cukup efektif untuk membuat opini publik. Gerebek pasar adalah penyuluhan yang dilakukan di tempat-tempat umum yaitu pasar. Tim marketing dilengkapi dengan brosur dan di bantu pengeras suara cukup mendapatkan respon para pengunjung pasar. Para pengunjung cukup antusias dan tidak malu untuk menanyakan perihal MOP. Penyuluhan juga efektif untuk menciptakan opini publik karena kehadiran tokoh agama, dokter, dan peserta MOP bisa memberikan informasi yang memuaskan. Komunikasi tatap muka cukup efektif dalam perubahan perilaku karena masing-masing calon peserta bisa efektif bertanya. Periklanan dengan brosur juga membantu masyarakat lebih memahami metode MOP. Motivasi dengan calon peserta MOP. Setelah kegiatan KIE maka ada 6 pasangan yang mengikuti program vasektomi.

Kata kunci : vasektomi, komunikasi pemasaran terpadu, *gerebek pasar/terminal*

Pendahuluan

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Mesir telah menyepakati perubahan paradigma yaitu dari pengendalian populasi bergeser ke paradigma kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender. Paradigma baru ini menuntut kesadaran kaum laki-laki akan kewajibannya turut serta menjamin/mewujudkan kesehatan reproduksi perempuan (istri). Pergeseran paradigma ini mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) agar peran serta laki-laki dalam kepesertaan KB meningkat.

Menurut dr. Widi Atmoko, perkembangan metode kontrasepsi pria cukup penting karena lebih dari 40 % perempuan tidak mencapai target dalam program keluarga berencana. Sekitar 80 juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun. Kontrasepsi wanita banyak didominasi metode hormonal (suntik, pil/oral). Sementara mereka tidak tertib yang pada akhirnya memicu laju pertumbuhan. Disamping itu kontrasepsi yang dipakai wanita kurang mendukung kesehatan reproduksi: seperti metode IUD dapat menimbulkan perdarahan, metode hormonal berpengaruh pada hormon-hormon lain dalam tubuh. Sementara vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang efektif, mudah, cepat, dan aman. Selain itu kepesertaan vasektomi mendukung kesehatan reproduksi wanita (Atmoko, 2013)

Namun demikian, kepesertaan vasektomi masih sangat rendah. Banyak faktor baik yang datang dari istri, suami, atau masyarakat, bahkan pemerintah. Banyak istri yang takut suaminya akan selingkuh jika ikut vasektomi. Sementara laki-laki (suami) takut kehilangan kejantanan, kenikmatan. Opini masyarakat masih negatif yaitu memahami vasektomi adalah dikebiri dan dilarang agama. Fatwa MUI melalui ijtima ulama ke IV 2012 di Tasikmalaya memutuskan bahwa vasektomi tidak secara mutlak dan tidak halal secara mutlak. Artinya diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat direkanalisis kembali dan tidak membahayakan bagi yang bersangkutan. Sementara pemerintah belum optimal dalam mengedukasi pria untuk menjadi peserta KB terutama metode vasektomi.

Partisipasi pria/suami dalam KB adalah tanggung jawab pria/suami dalam meningkatkan kesehatan reproduksi wanita/istri sekaligus mewujudkan keluarga berkualitas. Para pria/suami harus ditumbuhkan kesadarannya bahwa akan tanggung jawabnya pada keberhasilan KB mereka dan tidak melempar tanggung jawab tersebut pada wanita/istri mereka. Mereka harus sadar akan prinsip kesetaraan gender dalam ber-KB. Mereka harus sadar bahwa kaum wanita/istri sudah menanggung beban luar biasa mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak-anak. Tidak sepatutnya jika penggunaan metode kontrasepsi juga menjadi tanggung jawabnya. Sementara penggunaan metode kontrasepsi untuk wanita lebih beresiko pada kesehatan reproduksi daripada metode kontrasepsi pada kaum pria.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan berkorelasi positif terhadap penerimaan vasektomi (Hardiani, 2013; Wahyuni, 2013). Artinya informasi yang cukup tentang vasektomi telah merubah sikap tentang vasektomi dan berujung pada peningkatan akseptor vasektomi. Informasi yang cukup memadai telah mampu merubah pandangan tentang vasektomi (sebagai metode yang positif). Untuk itu permasalahan yang muncul adalah bagaimana model Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang tepat sehingga pesan penting vasektomi dapat diterima tanpa unsur keterpaksaan.

Ada dua kasus yang menarik tentang keberhasilan KIE vasektomi yaitu di Kota Surabaya dan di kabupaten Badung. Pemerintah Kota Surabaya mampu meraih MDGs Award tahun 2013 untuk kategori kesehatan reproduksi dengan program Keberhasilan pemerintah dalam membina kelompok Vasektomi. Di kabupaten Badung ada bidang yang

memperoleh penghargaan sebagai bidan teladan nasional karena ketekunannya sebagai penyemangat KB pria. Dari dua wilayah yang mempunyai keunggulan dalam KIE vasektomi ini, penelitian ini berusaha mensistesis sebuah model alternatif KIE (model kreatif dan inovatif tentang KIE) yang bisa dijadikan program nasional untuk meningkatkan kepesertaan / akseptor KB Pria Lestari

Dari hasil penelitian di dua wilayah tersebut diketahui bahwa untuk meningkatkan peserta jumlah peserta KB Pria Lestari mereka tidak mengandalkan satu bentuk komunikasi pemasaran saja. Mereka mengembangkan strategi alternatif lain dengan sangat kreatif yaitu memadukan seluruh bentuk komunikasi pemasaran. Hasilnya adalah opini publik tentang MOP terbentuk dan perubahan perilaku yang ditandai meningkatnya peserta KB Pria Lestari yang cukup signifikan. Model ini perlu diadopsi untuk daerah lain yang ingin meningkatkan jumlah peserta KB Pria Lestari.

Kota Pekalongan adalah wilayah pesisir yang sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Seperti pada umumnya kehidupan nelayan diwarnai dengan kemiskinan, pendidikan rendah, dan kepesertaan KB rendah. Pemerintah kota Pekalongan menetapkan Kelurahan Bandengan sebagai -kampung KB untuk meningkatkan keberhasilan program KB di Kelurahan tersebut. Bandengan merupakan perkampungan nelayan yang kumuh, peserta KB rendah.

Penelitian ini akan mengobservasi keberhasilan model KIE Vasektomi di Kota Surabaya dan Kabupaten Badung untuk diujicobakan di Kota Pekalongan. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana efektifitas komunikasi pemasaran terpadu pada KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) metode vasektomi sebagai upaya peningkatan akseptor KB Pria Lestari di Kota Pekalongan?

Tinjauan Pustaka

Pemasaran menurut definisi dari AMA (*American Marketing Association*) diartikan sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikannya, dan menyampaikan nilai bagi para pelanggan serta mengelola relasi pelanggan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para *stakeholdernya*. Hasan (2008:1) menjelaskan bahwa pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan mencapai kepuasan optimal bagi stakeholder (pelanggan, karyawan, pemegang saham) dalam jangka panjang.

Pemasaran bukan sebatas distribusi produk. Pemasaran meliputi beberapa aktivitas yang kemudian tersekal dengan konsep 4P (*Product, Price, Place* dan *Promotion*). Keempat aktifitas ini harus mendapat perhatian yang sama yang kemudian disebut marketing mix (bauran pemasaran). Aktifitas yang berkaitan dengan bidang komunikasi adalah P keempat yaitu *promotion*. Komunikasi Pemasaran (promosi) didefinisikan sebagai proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkannya (*offering*) pada pasar sasaran (Sulaksana, 2007:23). Komunikasi Pemasaran menurut Keegan (1995), dalam Machfoedz (2010:16-17) didefinisikan sebagai semua elemen dalam pemasaran yang memberi arti dan mengkomunikasikan nilai kepada konsumen dan stakeholder sebuah perusahaan.

Selama ini kegiatan komunikasi pemasaran lebih dikenal untuk memasarkan produk dan jasa. Menurut Alifahmi, pemasaran juga bisa dilakukan untuk mengampanyekan ide, (konsep), menjual *event* (pertunjukan, lomba dan pameran), personal (mempopulerkan figur, calon presiden dan pemimpin), perusahaan atau institusi, hingga memasarkan tempat atau kawasan (*places marketing*) seperti memasarkan tempat wisata, kota dan kawasan industri. Pemasaran ide semacam ini populer dengan istilah Pemasaran Sosial (*Social*

Marketing). Dari sisi Komunikasi Pemasaran, pemasaran sosial dapat dikaji melalui : isi pesan, gaya komunikasi, media yang digunakan, segmen khalayak sasaran hingga efek terhadap publik. Komunikasi Pemasaran Sosial merupakan upaya untuk memanfaatkan teknik-teknik dan sumber-sumber usaha komersial untuk mencapai tujuan sosial dalam hal tersedianya perlengkapan, informasi dan pelayanan secara luas. Istilah *social marketing* (pemasaran sosial) menggambarkan esensi dari melayani kepentingan sosial melalui teknik-teknik pemasaran.

Komunikasi pemasaran memiliki beragam bentuk yaitu periklanan, humas, sales promotion, personal selling, dan lain-lain (Shimp, 2003:2). Masing-masing bentuk komunikasi pemasaran mempunyai cara kerja dan tujuan yang berbeda. Dengan demikian tidak bisa dibandingkan mana yang lebih efektif. Dalam konsep pemasaran terkini yang dilakukan adalah melakukan bauran (*mix*) dari berbagai bentuk tersebut sehingga menghasilkan tanggapan calon pengguna secara optimal (persepsi, motif, perilaku, kepuasan, dan loyalitas)

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sebuah perspektif yang melihat perilaku manusia adalah adalah pasif, dapat diubah, dapat diarahkan, dan dapat digeneralisir. Persepsi dan perilaku manusia dapat dikondisikan. Pendekatan ini lebih banyak menguji teori dari pada menemukan teori. Sifat penelitian konfirmatif (deduktif) Cresswell (1994:163). Dalam pendekatan ini melibatkan hubungan antar variabel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen lapangan yaitu percobaan yang dilakukan untuk mengetahui respon khalayak terhadap produk yang diinformasikan (Mangkunegara, 2012:52). Penelitian ini berusaha menjaring informasi-informasi empirik dari implementasi komunikasi pemasaran terpadu vasektomi di Kota Pekalongan

Subyek penelitian adalah implementasi komunikasi pemasaran terpadu vasektomi di Kota Pekalongan. Adapun obyek penelitian adalah anggota kelompok KB pria vasektomi, tenaga penyuluh BKKBN setempat, tenaga media, tokoh agama, dan masyarakat calon peserta.

Data dikumpulkan dengan observasi. Menurut Bungin (2007:116) dalam observasi ini, yang terpenting adalah pengamat (observer). Selain pengamatan, data juga dikumpulkan melalui wawancara. FGD digunakan untuk mendiskusikan hasil pelaksanaan Komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh tim. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan strategi analisis audit komunikasi (salah satu varian dari desain analisis kualitatif-verifikatif)

Hasil penelitian dan pembahasan

Realisasi target pencapaian peserta program keluarga berencana di wilayah Kota pekalongan hingga akhir tahun 2015, melampaui target yang ditetapkan 6.250 akseptor tercapai 113,06 persen, atau mencapai 7.066 akseptor KB. Pencapaian tersebut didapatkan dari berbagai program yang dilakukan oleh BMP2AKB dan semua stakeholdernya. Program KIE yang paling sering dilakukan adalah kunjungan rutin dari rumah ke rumah baik oleh

Penyuluh KB ataupun kader. Sebelum melakukan kunjungan, terlebih dahulu tim mengadakan pra konseling yang bertujuan menentukan target yang sesuai dengan kriteria. Penentuan target ini berdasarkan hasil observasi dan masukan dari para kader. Sedangkan untuk penyuluhan massa masih menginduk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti PKK, pengajian dan sebagainya. Untuk kalangan remaja, sosialisasi juga dilakukan dengan mencari kegiatan yang sesuai.

Dari jumlah tersebut peserta MOP hanya ada 6 orang dari target 16 atau 37.5 persen. Kepesertaan KB pria lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi kondom. Hasil wawancara menunjukkan bahwa metode MOP tidak disosialisasikan secara khusus. Para penyuluh hanya menyampaikan informasi MOP secara sekilas. Belum pernah ada kegiatan KIE khusus MOP. Beberapa kendala yang ditemukan dilapangan diantaranya adalah faktor agama. Kota pekalongan yang dikenal sebagai kota santri, memiliki masyarakat dengan tingkat religiusitas yang tinggi, masih berpegang teguh pada prinsip agama yang tidak memperbolehkan melakukan tindakan penghambatan dalam memperoleh keturunan. Dukungan dari tokoh agama juga masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih takut dalam hal kehalalan metode vasektomi ini.

Hal lain yang menjadi kendala metode vasektomi, yaitu pandangan masyarakat tentang vasektomi ini masih sangat tabu, sehingga masyarakat yang sudah melakukan vasektomi pun masih malu-malu untuk mengakui bahwa dia adalah peserta KB vasektomi. Hal ini berkaitan juga dengan rumor yang berkembang di masyarakat tentang akibat dari vasektomi yang dapat menyebabkan pria tidak jantan lagi. Pemahaman masyarakat bahwa vasektomi adalah sama dengan dikebiri dan sebagainya. Rumor tersebut belum terjawab, sehingga KIE yang rutin mutlak dilakukan untuk meluruskan stigma masyarakat tentang KB Vasektomi.

Kendala yang terakhir yaitu tentang kebijakan pemerintah kota pekalongan yang belum memprioritaskan vasektomi sebagai metode kontrasepsi untuk pria. Hal ini juga disebabkan jumlah anggaran yang masih sangat kecil. Untuk melakukan tindakan vasektomi pemerintah hanya menyediakan biaya sebesar Rp. 250.000 per orang. Selain itu pemerintah Kota Pekalongan belum memberdayakan para peserta vasektomi. Mereka belum terikat oleh wadah seperti komunitas/kelompok dimana pemerintah dapat melakukan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi yang belum ikut vasektomi.

Implementasi KIE yang dilakukan pada wilayah Kota Pekalongan, mengadopsi metode yang ada di Kota Surabaya dan Badung, Bali. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan serangkaian sosialisasi KIE dan Gerebek pasar. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, terlebih dahulu dilakukan koordinasi awal dengan berbagai unsur yang terlibat, seperti PLKB, Kader, akseptor KB, tokoh ulama, dan tenaga medis. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan dan sasaran mana saja yang akan dituju.

Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu penyuluhan formal. Kegiatan ini pertama ini dilakukan di Kelurahan Bandengan yang merupakan kawasan pesisir pantai dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Dalam kegiatan ini ini menghadirkan narasumber dari tenaga medis, yaitu dokter yang bertugas melakukan tindakan vasektomi, tokoh ulama, dan akseptor vasektomi untuk memberikan testimoni terkait keikutsertaan dalam vasektomi. ini dijelaskan berbagai hal terkait vasektomi, dari apa itu vasektomi, kelebihan dan kekurangan serta bagaimana tindakan vasektomi

dilakukan. Selain itu tokoh ulama menjelaskan pula vasektomi dari sisi agama, tentang bagaimana vasektomi dalam pandangan islam. Tujuan dari KIE ini adalah memberikan pemahaman yang benar baik sesuai medis ataupun non medis tentang Vasektomi. Penggunaan bahasa dan cara penyampaian pesan disesuaikan dengan karakter masyarakat yang dituju. Ceramah dan testimoni masih menjadi metode utama. Ceramah yang dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat bahkan yang hanya lulusan sekolah dasar. Selain ceramah, penyampaian testimoni oleh akseptor juga menjadi bagian yang penting dalam memberikan keyakinan pada calon akseptor.

Model komunikasi ini efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tim penyuluh dapat membawa peraga untuk menjelaskan materi MOP(khususnya tim media). Para peserta mempunyai kesempatan bertanya dengan leluasa. Tim penyuluh dapat melihat perubahan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan baik dengan wawancara atau ceklist kuesioner. Disamping itu kedekatan antara penyuluh dan peserta dapat terbentuk. Forum ini bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah-rumah untuk menciptakan perubahan perilaku.

Setelah KIE selesai dilaksanakan, selanjutnya tim yang dibentuk yang merupakan gabungan dari berbagai elemen, diantaranya penyuluh KB, Kader, akseptor dan beberapa unsur lain melakukan gerebek pasar. Gerebek pasar dilakukan untuk mendekati langsung calon akseptor. Kegiatan gerebek pasar di Pekalongan, dilakukan pada tempat yang banyak mendatangkan masyarakat, dalam hal ini dipilih pasar tiban yang aktifitasnya dimulai sore hari sekitar pukul 4 dan berakhir menjelang maghrib. Pasar tiban yang terletak di jalan kartini ini menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang berasal dari berbagai wilayah di pekalongan. Tim melakukan sosialisasi langsung dengan mengajak berdialog masyarakat yang ditemui tentang seputar vasektomi dan juga membagikan brosur berisi informasi pendukung yang membantu untuk mengilustrasikan berbagai hal tentang vasektomi. Selain itu informasi tentang kegiatan gerebek dan vasektomi juga disampaikan melalui pengeras suara pada mobil pelayanan yang berkeliling disepertaran pasar tiban tersebut.

Kegiatan serupa juga kembali dilakukan pada aktifitas pasar tiban. Kali ini yang dipilih adalah kegiatan *car free day* pada hari minggu yang berpusat di alun-alun Kota Pekalongan. Skala acara ini hampir 3 kali lipat dari pasar tiban di jalan kartini. Treatment yang dilakukan juga hampir sama seperti yang dilakukan pada gerebek sebelumnya. Sasaran dari kegiatan gerebek ini lebih luas, tidak hanya pengunjung *car free day* tetapi juga petugas-petugas yang terlibat dalam acara tersebut seperti satpol PP, Polisi dan sebagainya.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, hasil yang didapatkan cukup efektif. Terbukti dari adanya peningkatan kepesertaan MOP. Kegiatan ini berhasil menjaring kurang lebih 6 calon akseptor yang berminat untuk melakukan vasektomi, dari yang biasanya hanya 1 orang saja yang di dapatkan dari kegiatan penyuluhan sebelumnya.

Kesimpulan

Keberhasilan KIE vasektomi tidak bisa hanya mengandalkan salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Upaya menarik peserta vasektomi perlu diciptakan opini publik terlebih dahulu. Penggunaan komunikasi pemasaran terpadu sifatnya saling melengkapi.

Gerebek pasar merupakan bentuk *sales promotion*. Brosur merupakan bentuk periklanan. Dua bentuk komunikasi pemasaran ini harus mendapatkan porsi lebih besar jika tujuan utama dari KIE adalah penciptaan opini publik. Penyuluhan formal dan kunjungan ke rumah-rumah merupakan bentuk dari *personal selling*. Kegiatan ini harus mendapat perhatian lebih jika tujuan KIE adalah pada perubahan perilaku yaitu kepesertaan vasektomi. Hal yang menambah kredibilitas pesan diperlukan komunikator yang terlibat langsung yaitu dokter, tokoh agama, dan peserta (testimoni).

Daftar Pustaka

- Bungin, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. Sage Publications. California.
- Craig, Robert T. 2007. *Theorizing Communication Readings Across Tradition*. Sage Publication. Los Angeles
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. L. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (terj). Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hassan, Ali. 2008. *Marketing*. MedPress. Yogyakarta
- Kayo, Michael. 1994. *Communcation Management*. Prentice Hall. Sydney
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. 2009. *Encyclopedia Of Communication Theory*. Sage Publication. California.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. *Perilaku Konsumen*. Refika Aditama. Bandung
- Terence A., 2003, *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu* (terj.). Erlangga. Jakarta
- Locker, Kitty O & Stephen Kyo Kaczmarek. 2014. *Business Communication : Building Critical Skills*. McGraw-Hill/Irwin. New York.
- Patterson, Sally J & Janel M. Radtke .2009. *Strategic Communications for Nonprofit Organizations : Seven Steps to Creating a Successfull Plan*. John Wiley & Sons. New Jersey.
- Smeltzer, Larry & John Waltman & Donald Leonard. 1991. *Managerial Communication A Strategic Approach*. Ginn Press. Massachusett.
- Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. 2005. *Panduan Lapangan Merancang Strategi Komunikasi Kesehatan* (terjemahan dari O'Sullivan, G.A., Morgan, W., & Merritt, A.P., A Field Guide to Designing a Health Communication Strategy, MD : Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs 2003)

Rujukan Jurnal dan Hasil Penelitian

Atmoko, W., Vasektomi Metode Kontrasepsi Pria Efektif, Cepat, Aman, dan Mudah (<http://www.jurnal.medika.com/edisi-terbaru>)

Hardiani, Ratna S., Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap Suami Tentang Vasektomi (Jurnal Keperawatan Maternitas Vol 1, no 2. 2013, <http://jurnal.unimus.ac.id>)

Sukeni, Ni N., Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Bali (Disertasi pada Universitas Udayana Bali Tahun 2011)

Wahyuni, Ni Putu D.S., Hubungan Pengetahuan dan Sikap Akseptor KB pria Tentang Vasektomi serta Dukungan Keluarga dengan Partisipasi pria dalam Vasektomi (di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng (Jurnal Magister Kedokteran Keluarga Vol 1, No 1, 2013, <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>)

KAMPUNG WISATA REJOWINANGUN SEBAGAI ALTERNATIF PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Ida Susi Dewanti¹⁾, Meilan Sugiarto²⁾, Adi Soeprapto³⁾

¹ FISIP, UPN -Veteran|| Yogyakarta

email: idasusidewanti@yahoo.com

² FISIP, UPN -Veteran|| Yogyakarta

email: msugiarto89@gmail.com

³ FISIP, UPN -Veteran|| Yogyakarta

email: adi_soeprapto@yahoo.com

Abstract

In 2011 the government of Yogyakarta city promote urban tourist as a tourist destination expansion in the city of Yogyakarta. The shifting of the tourists interest nowadays not only to visit but also to interact directly, then the urban tourism could be an option for tourists. It have positive impact for the community. One of the urban tourist location is Rejowinangun. Rejowinangun called as agroeducation tourism because they focus to educate tourist about plant.

This is a descriptive study with qualitative approach. This research using primary data with interviews as the main instrument for data collection and secondary data to support the result. Respondents were management of urban tourist as a key informant and the government represented by the tourism department of Yogyakarta.

The results showed that tourism at the Rejowinangun's urban tourist already made much progress although there are still some issues that must be addressed. The development of the urban tourist has a promising opportunity in the future. Shifting traveled interests influencing travel choice for travelers where a more natural traveling and captured the daily life of a community starts to become a choice for traveler.

Keywords: *Urban Tourism, Urban Tourist, Community Based Tourism.*

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas pariwisata yang dianggap murah dan diyakini lebih ramah lingkungan, baik lingkungan sosial maupun alamiah, telah tumbuh dan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Aktivitas pariwisata baru ini memiliki berbagai bentuk, antara lain pariwisata bersenang-senang (*leisure tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata alternatif (*alternative tourism*), pariwisata alam (*geo-tourism* atau *eco-tourism*), dan pariwisata sosial (*ethnic and cultural tourism*), atau bahkan *agro-tourism* dan *green tourism*.

Konsep pariwisata berkembang sebagai reaksi terhadap pariwisata konvensional yang dianggap terlalu sempit dan rekreasi sentris. Konsep pariwisata yang lebih utuh dan berorientasi pengembangan masyarakat telah mengubah perilaku pelaku kepariwisataan, mulai dari pemerintah, operator usaha pariwisata, serta biro perjalanan wisata dalam merencanakan dan menjual produk wisata kepada para wisatawan dalam maupun luar negeri. Sebagai sebuah aktivitas pariwisata memiliki ciri-ciri: fleksibel (jadwal, jenis, dan waktu aktivitas dapat disesuaikan), pangsa pasar dengan kategori dan ciri yang jelas (*segmented*) dan mampu mencitakan relung (*niche*) pasar, terdapat hubungan/interaksi dua arah yang saling menguntungkan antara wisatawan dengan lingkungan dan masyarakat, dan disertai dengan tingkat kesadaran akan pelestarian lingkungan yang tinggi.

Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT). Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat).

Karena sifat CBT yang memperhatikan keberadaan masyarakat maka jenis pariwisata ini sangat mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Hausler and Strasdas (2003 : 3) menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut, serta memberikan pendidikan bagi pengunjung maupun masyarakat lokal mengenai pentingnya usaha konservasi terhadap alam dan budaya.

Anstrand (2006) mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Anstrand mencoba melihat *Community Based Tourism* (CBT) bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi *induced impact* dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Suansri (2003:14) menguatkan definisi *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. *Community Based Tourism* (CBT) merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.

Pantin dan Francis (2005:2) menyusun definisi *Community Based Tourism* (CBT) sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat (*tool*) untuk pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui *assessment*, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam

dan sumber daya budaya komunitas. Demartoto dan Sugiarti (2009:19) mendefinisikan CBT sebagai pembangunan pariwisata dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Definisi lain menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk mempromosikan partisipasi dan kepemilikan masyarakat lokal terhadap kepariwisataan yang dikembangkan di daerahnya (UNWTO –STEP Foundation, 2011).

a. Karakteristik Pariwisata Berbasis Masyarakat

Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Melalui konsep *Community Based Tourism*, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata, untuk itu para individu diberi keterampilan untuk mengembangkan *small business*.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, masyarakat setempat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai subjek (pelaku) dan juga sebagai objek (atraksi). Sebagai subyek, komunitas lokal memiliki karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan sosial, budaya dan ekonomi yang mungkin belum sesuai dengan aktivitas pariwisata, sedangkan sebagai atraksi, masyarakat juga harus dapat menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan wisatawan yang memiliki tuntutan spesifik.

Pembangunan kepariwisataan harus diarahkan pada pembangunan komunitas secara utuh. *Community are regarded as the vocal point of the tourism planning exercise, not the tourist* (Murphy, 1985). Konsep produk wisata yang berbasis komunitas (*community based*) melihat kepariwisataan sebagai fenomena sosial dan merupakan interaksi manusia dengan lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya. Murphy (1985) mengemukakan: "*Tourism development is a local issues because that is the level where the action takes place*". Lebih lanjut, Murphy menyatakan bahwa pariwisata yang berbasis masyarakat mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Integrasi dan koordinasi; Kelenturan dan keikutsertaan masyarakat; Pasar yang terseleksi; Kekayaan budaya setempat; Investasi dan lapangan pekerjaan secara setempat; Efek demonstrasi kebudayaan; Daya dukung dan berfungsi secara majemuk; Sinergi antar sumberdaya potensial.

b. Kampung Wisata Sebagai Pariwisata Berbasis Komunitas

Kampung Wisata, dikembangkan sebagai upaya untuk membangun ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata di suatu wilayah. Dengan konsep ini, diharapkan dapat menstimulasi perkembangan sektor lain yang terkait di wilayah tersebut. Wisata Kampung, merupakan alternatif wisata budaya atau tradisi yang diharapkan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan berbagai sektor kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, terutama peningkatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan komunitas dari kegiatan kunjungan wisata.

Kampung wisata merupakan penggabungan antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang ada (Nuryanti, 1993) sehingga dalam perwujudannya,

kampung wisata hendaknya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada, baik dari segi penyediaan fasilitas wisata maupun dari segi sirkulasi serta pengolahan ruang luar yang memiliki keanekaragaman.

James J. Spillane (1994: 63-72) berpendapat bahwa suatu objek wisata harus meliputi 5 unsur penting agar wisatawan merasa puas dalam menikmati perjalanannya, yaitu sebagai berikut.

1. Atraksi. Atraksi adalah pusat dari industry pariwisata. Atraksi merupakan sesuatu yang mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya para wisatawan tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu.
2. Fasilitas. Unsur fasilitas cenderung berorientasi pada atraksi disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung dan bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Suatu atraksi juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan.
3. Infrastruktur. Unsur Atraksi dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah jika belum terdapat infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah.
4. Transportasi. Unsur transportasi meliputi unsur pengangkutan serta moda bagi wisatawan untuk mencapai tempat wisata.
5. Keramahan (Hospitality). Unsur keramahan meliputi unsur penerimaan masyarakat lokal terhadap wisatawan. Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

Kampung wisata merupakan sebuah penggabungan ataupun integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang ada (Nuryanti, 1993). Kriteria terkait kampung wisata yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut (Kuncoroyekti, 2013).

1. Atraksi wisata. Kriteria ini meliputi semua yang mencakup kondisi alam, seni dan budaya komunitas setempat, kegiatan produksi, seperti kerajinan batik, kerajinan perak, dan atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik, unik dan atraktif di kampung tersebut;
2. Jarak Tempuh. Kriteria ini mencakup jarak tempuh dari kampung wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibu kota propinsi dan jarak dari ibu kota kabupaten/kota
3. Besaran atau luasan Kampung atau desa. Kriteria ini merupakan kriteria yang mencakup masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah kampung. kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu kampung/desa
4. Sistem kepercayaan dan sosial. Kriteria ini merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada sebuah komunitas di kampung
5. Ketersediaan infrastruktur. Kriteria ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian eksploratif (exploratory research)

Penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami objek penelitian secara lebih mendalam, mendapatkan pemahaman awal dari fenomena tertentu, mencari kemungkinan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik, serta mengembangkan metode yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan (Babbie, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kampung Wisata Rejowinangun

Kelurahan Rejowinangun merupakan satu kelurahan dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Kotagede, sebuah kecamatan diujung timur Kota Yogyakarta yang terkenal dengan perak dan bekas kerajaan Mataram. Kampung wisata Rejowinangun terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta tepatnya sebelah selatan Kebun binatang Gembiraloka. Kampung wisata ini telah dirintis sejak tahun 2010 dan dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat, pada tanggal 04 Oktober 2013 oleh Kepala dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kampung Wisata Rejowinangun diresmikan. Kelurahan Rejowinangun merupakan satu kelurahan dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Kotagede, sebuah kecamatan diujung timur Kota Yogyakarta yang terkenal dengan perak dan bekas kerajaan Mataram.

Kelurahan Rejowinangun memiliki banyak potensi yang jika dikembangkan akan sangat luar biasa, meskipun saat ini yang terkenal baru Kebun Raya Kebun Binatang (KRKB) Gembiraloka yang lokasinya berada di wilayah Kelurahan Rejowinangun. Dengan adanya tempat wisata KRKB Gembiraloka di wilayah ini, berusaha mengembangkan wilayah kelurahan dengan potensi yang ada sehingga wisatawan selain mengunjungi Gembiraloka bisa singgah di kampung wisata ini.

Sudah satu tahun terakhir ini Kelurahan Rejowinangun mengembangkan ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki semua wilayah di Kota Yogyakarta ini. Dengan wilayah semi pedesaan Rejowinangun mencoba mengembangkan Kampung Sayur dan Kampung Flori sehingga layak dijual kepada masyarakat luas. Sebagian besar rumah memiliki pekarangan sempit dan di sepanjang jalan dicoba untuk ditanami sayuran. Saat ini sudah beberapa daerah dari luar Kota Yogya yang datang berkunjung di KAMPUNG WISATA AGRO EDUKASI. Tema agro edukasi diambil karena ingin masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa bisa belajar mengenal tanaman baik tanaman sayuran, tanaman buah dan tanaman hias serta cara penanaman, perawatan, pemupukan dan pengolahannya. Untuk itu ditawarkan paket-paket wisata dengan dilengkapi homestay yang nyaman, berlatih berbagai kerajinan, mencicipi berbagai kuliner dan kesenian tradisional.

Wilayah Kelurahan Rejowinangun dengan populasi 12 ribu jiwa menerapkan lima sistem kluster agar potensi wilayah bisa berkembang dengan baik dan masyarakat bisa maju bersama. Kluster Kampung Budaya ada di RW 1 sampai dengan 5, Kluster Kampung Kerajinan di RW 6 dan 7 dengan produk unik lukis kaca terbalik, Kluster Kampung Kuliner di RW 10, Kluster Kampung Herbal di RW 8 dan 9 dengan produk unggulan jamu J'GER, serta Kluster Kampung Agro di RW 11, 12, dan 13. Sementara itu di bidang pelayanan ada Sistem Informasi Kampung (SIK) berbasis RT untuk mewadahi semua potensi di tingkat RT.

b. Potensi Klaster

Klaster Kampung Budaya. Klaster Kampung Budaya ada di RW 1 sampai 5, akan ditemukan beragam potensi seni budaya ada dan siap dikunjungi oleh wisatawan, seperti : Sanggar Tari Sekar Arum, Karawitan dan Panembromo Retno Budoyo Rini, Cokekan, Gejog lesung, Macapatan, Keroncong, Campursari, Kethoprak Sekar Budoyo, Pelatihan Bahasa Jawa, Hadroh, Siteran.

Klaster Kampung Kerajinan. Klaster Kampung Kerajinan terletak di RW 6 dan 7, disini banyak sekali pengrajin atau warga yang mempunyai usaha kerajinan. Kerajinan Batik, Kerajinan Lukis Kaca terbalik, Kerajinan Fiber, Kerajinan blangkon, Kerajinan dari Sampah An Organik, Kerajinan Akrilik, Kerajinan Sulam Pita, Kerajinan Kulit, Kerajinan souvenir.

Klaster Kampung Kuliner. Klaster Kampung Kuliner terletak di RW 10, seperti ; Bakmi Jowo Mbah Gito, Industri Pembuatan Tempe, Makanan tradisional.

Klaster Kampung Herbal. Klaster Kampung Herbal terletak di RW 8 dan 9, dengan produk jamu gendong dan jamu instan, produk unggulan jamu J'GER.

Klaster Kampung Agro. Klaster Kampung Agro terletak di RW 11, 12, dan 13. Berupa pertanian, peternakan, perikanan. Potensi Adat istiadat Tingkeban (tujuh bulanan kehamilan) dan Upacara adat wiwit pari. Potensi Situs Kuno :Benteng peleman, Nogobondo dan Situs manuk beri Inap Kampung (Home Stay). Tersedia di rumah penduduk Kampung Wisata Rejowinangun.

c. Potensi dan Persoalan dalam Pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun

Potensi dalam pengembangan Kampung Wisata Budaya Rejowinangun :

1. Atraksi. Rejowinangun memiliki banyak daya tarik wisata budaya. Rejowinangun memiliki cukup banyak atraksi yang memanfaatkan dan menjunjung tinggi budaya lokal yang meliputi kesenian daerah, event-event budaya dan upacara adat yang diadakan setiap tahun, produk-produk budaya (Keris Tosan Aji, Busana Jawa, Wayang Beber, dll), dan kuliner khas Rejowinangun.
2. Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal. Terdapat pelestarian dan pengelolaan potensi budaya lokal baik yang bersifat intangible (kesenian daerah) dan tangible (produk budaya, kuliner khas, dll) di Rejowinangun melalui sanggar-sanggar kesenian dan budaya serta catering rumahan yang tersebar di dalamnya. Terdapat pelatihan kesenian daerah yang diadakan setiap minggunya di Rejowinangun, meliputi pelatihan Seni Karawitan, pelatihan Seni Kethoprak, pelatihan Pambiwara, dll. Pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Jawa, Masyarakat Rejowinangun telah memiliki kesadaran bahwa dalam pengembangan kampung wisata ini tidak boleh merusak lingkungan
3. Fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas penginapan di sekitar Rejowinangun yang jaraknya cukup dekat, berupa hotel-hotel dan rumah penduduk yang disewakan. Terdapat fasilitas perbelanjaan yang letaknya berada di dalam maupun di sekitar Rejowinangun yang jaraknya cukup dekat. Terdapat fasilitas tempat makan yang letaknya berada di dalam maupun di sekitar Rejowinangun. Sudah cukup terpenuhinya fasilitas dasar wisata, seperti ruang publik, informasi (peta jelajah, papan petunjuk nama kampung, papan

- petunjuk arah, dll), peribadatan (masjid dan mushola), keamanan (pos keamanan, pagar pengamanan, hidran/alat pemadam kebakaran), dan sanitasi (MCK dan WC Umum)
4. Aksesibilitas & Transportasi. Lokasi Kampung Wisata Rejowinangun cukup mudah diakses wisatawan. Wisatawan dapat mencapai Rejowinangun dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun menggunakan angkutan umum.
 5. Promosi, Sudah mulai terdapat kegiatan promosi untuk Kampung Wisata Rejowinangun, walau kegiatan tersebut masih dalam skala kecil. Kegiatan promosi dilakukan dengan pembuatan brosur dan iklan di media cetak berupa artikel di koran lokal mengenai Rejowinangun.
 6. Sumber Daya Manusia. Masyarakat Rejowinangun memiliki kemauan dan kesadaran untuk mengembangkan kampungnya untuk menjadi kampung wisata. Rejowinangun telah memiliki organisasi yang bertanggungjawab atas pengembangan kampung wisata. Organisasi tersebut beranggotakan dan diketuai oleh masyarakat Rejowinangun sendiri. Sudah terdapat pelibatan masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun oleh masyarakat sendiri dan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.. Terdapat program peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan Karawitan, pelatihan Pambiwara, pelatihan Ketoprak, pelatihan sendra tari, dll, yang dilakukan dan dikoordinasi oleh masyarakat melalui sanggar-sanggar budaya di Rejowinangun.
 7. Kelembagaan & Kebijakan. Rejowinangun pernah mendapatkan dana hibah PNPM Mandiri Pariwisata untuk pengembangan kampung wisatanya
 8. Ekonomi. Masyarakat Rejowinangun memiliki kesadaran dan kemauan untuk secara sukarela menyisihkan uang demi pengembangan kampung wisata budaya, namun tentunya kemampuan masyarakat sangat terbatas sehingga dana yang ada belum mencukup

Persoalan dalam pengembangan Kampung Wisata Budaya Rejowinangun :

1. Atraksi. Atraksi wisata di Rejowinangun walaupun jumlahnya banyak namun belum dikemas dengan baik, sehingga kurang dapat menarik para wisatawan.
2. Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal. Pengelolaan dan potensi budaya lokal yang bersifat tangible, khususnya berupa cagar budaya dan bangunan bersejarah, masih kurang.
3. Fasilitas. Fasilitas penunjang wisata yang dapat mendukung pengembangan dan penyuasaan Kampung Wisata Rejowinangun, seperti area pertunjukkan kesenian, panggung kesenian, bangku penonton, dll. Pembangunan serta perbaikan fasilitas pariwisata masih berupa hal-hal kecil saja seperti pembuatan peta jelajah, papan nama kampung, dan papan petunjuk arah, sedangkan pembangunan dan perbaikan yang bersifat mayor seperti perbaikan jalan, perbaikan MCK, penataan koridor wilayah, dll, masih berupa rencana saja dan masih belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya dana.
4. Aksesibilitas & Transportasi. Belum terdapat moda transportasi umum yang nyaman untuk mencapai Kampung Wisata Rejowinangun
5. Promosi. Kegiatan promosi belum dapat dilakukan secara maksimal karena pada dasarnya Rejowinangun masih dalam proses pengembangan sehingga belum banyak yang dapat ditawarkan kepada wisatawan karena atraksi wisata Rejowinangun yang masih belum dikemas dengan baik. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi salah satu persoalan dalam hal ini.
6. Sumber Daya Manusia. Kurangnya peran generasi muda dalam pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih berupa swadana yang saat ini pengadaannya masih mandiri dari masyarakat.

7. Kelembagaan & Kebijakan. Masih belum adanya pembagian wewenang dan koordinasi yang baik antara dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun.
8. Ekonomi. Belum terdapat pengalokasian dana khusus yang berkelanjutan untuk pengembangan kampung wisata. Belum adanya investasi luar atau pihak swasta yang masuk ke dalam pengembangan Kampung Wisata Rejowinangun. Saat ini Kampung Wisata Rejowinangun masih belum dapat memberikan keuntungan sosial ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Rejowinangun.

KESIMPULAN

Tujuan pengembangan kampung wisata sebagai destinasi alternatif wisata perkotaan cukup berhasil khususnya di kampung Rejowinangun. Meskipun jumlah wisatawan yang datang belum sebanyak obyek wisata lain yang lebih dahulu ada, tetapi keberadaan kampung ini sudah mulai dikenal masyarakat. Bagi warga Rejowinangun sendiri penetapan sebagai kampung wisata mulai dirasakan dampaknya meskipun masih ada beberapa hal yang masih harus dibenahi. Namun mereka mulai bersikap lebih aktif untuk mengenalkan kampungnya sebagai kampung wisata dan terlibat dalam aktivitas yang diadakan.

REFERENSI

- Anstrand, Melker, 2006, *Community-Based Tourism and Socio Culture Aspects Relating to Tourism a Case Study of a Swedish Student Excursion to Babati (Tanzania)*.
- Pantin, D. and Francis, J., 2005, *Community Based Sustainable Tourism*, UWI SEDU
- Chucky. 1999. *-Internasional Tourism : A Global Perspective*. World Tourism Organization (WTO). Madrid Spanyol.
- Demartoto, Argyo, 2009, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Sebelas Maret University Press. Tidak diterbitkan.
- Eadington, W.R. and Smith, V. 1992. *-The Emergence of Alternative Form of Tourism*. dalam Smith, V. and Eadington, W.R. (ed).
- Suwena, I Ketut, 2010. *-Format Pariwisata Masa Depan*; dalam *-Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*. Denpasar : Penerbit Udayana University Press.
- Spillane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius: Yogyakarta

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

di Daerah Istimewa Yogyakarta

*Kusharyanti
Sri Astuti
Dwi Sudaryati*

abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan keuangan melalui sistem komputerisasi, melakukan analisis terhadap kinerja keuangannya dan mampu menyusun strategi bisnisnya dengan mengidentifikasi factor kekuatan – kelemahan – peluang – ancaman (SWOT).

Metode penelitian ini dengan cara melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM dalam mengoperasikan sistem pelaporan keuangan komputerisasi, kemudian menganalisis laporan keuangan tersebut untuk berbagai tujuan. Karena laporan keuangan bukan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, maka dibutuhkan informasi lain untuk menentukan strategi bisnisnya melalui analisis SWOT. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam menyusun *business plan*.

Secara umum, pelaku UMKM sudah mampu memahami dalam menganalisis laporan keuangan akan tetapi masih sederhana pemahamannya. Sedangkan untuk analisis SWOT dan penyusunan *business plan* mereka masih belum mampu menyusun secara tepat. Pemahaman mereka masih sangat sederhana dan tradisional.

Keywords: Analisis Laporan Keuangan, Bussiness Plan, Analisis SWOT, Sistem Pelaporan Keuangan.

A. Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan skala kecil dan menengah. SAK-ETAP muncul karena sebelumnya belum ada Standar Akuntansi Keuangan yang khusus untuk perusahaan kecil dan menengah, Standar Akuntansi Keuangan masih secara umum yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan (industri) kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam implementasinya, padahal standar ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui laporan keuangan sangat bermanfaat bagi perusahaan antara lain untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, mampu mengidentifikasi harta pemilik dan harta perusahaan,

mampu dipakai sebagai penyusunan anggaran dengan tepat, mampu menunjukkan aliran kas dan dipakai sebagai dasar penetapan pajak dengan tepat (Auliyah, 2012). Selain itu, saat ini banyak regulator yang mewajibkan perusahaan kecil dan menengah untuk menyusun laporan keuangan, antara lain dipakai sebagai dasar pengajuan dana modal dan juga untuk pelaporan perpajakan.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha kecil menengah antara lain adalah pengelolaan keuangan dan permodalan. Rendahnya kemampuan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan telah menyulitkan pihak perbankan untuk memberikan modal dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. Namun karena UMKM memiliki berbagai keterbatasan, maka kewajiban tersebut diduga tidak menguntungkan karena akan menambah biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh atas penyusunan laporan keuangan (Suhairi, 2011). Sebagai solusinya adalah dibuatnya sistem pelaporan keuangan siap pakai (komputerisasi) sekaligus analisis laporan keuangannya. Sebagai rencana pengembangan usahanya, maka perlu adanya analisis bisnis ke dalam analisis SWOT dan perencanaan bisnis.

Analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor yang berpengaruh secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini Freddy Rangkuti (2009). Setiap kegiatan bisnis perlu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi agar perusahaan (UMKM) tetap *going concern*.

Bussiness plan merupakan pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis (UMKM), serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta rencana-rencana yang akan dijalankan untuk memenuhi tujuan tersebut. *Bussiness plan* juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab memenuhi tujuan itu. *Bussiness plan* adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis/usaha yang diusulkan. Kegunaan dari *Bussiness plan* adalah kegiatan penelitian (bisnis) yang akan dilaksanakan /sedang berjalan tetap pada jalur yang direncanakan, pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dan sebagai alat untuk mencari dana dari pihak ketiga (investor, lembaga keuangan dan sebagainya).

Masih terbatasnya sumber daya UMKM akan menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Keterbatasan kemampuan menyusun laporan keuangan dan menganalisis laporan keuangan, menentukan strategi usaha dan mengidentifikasi kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman usaha mereka, merupakan factor yang sangat menghambat berkembangnya usaha UMKM. Penelitian ini memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang laporan keuangan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pernah dilakukan oleh Baas dan Schrooten (2006), hasil penelitiannya menyatakan bahwa hampir seluruh UMKM di seluruh dunia mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan informasi keuangan UMKM yang diperlukan oleh kreditur untuk pengambilan keputusan kredit. Hampir sebagian besar UMKM di Indonesia hanya mencatat jumlah uang masuk dan keluar, jumlah barang yang dibeli dan terjual serta jumlah piutang dan utang, namun belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai format yang diinginkan pihak perbankan (Jati, 2004). Menurut Rudiantoro dan Siregar (2011), kualitas pelaporan keuangan UMKM masih rendah, hal ini berdampak terhadap jumlah kredit yang mereka dapatkan dari perbankan. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2011 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UMKM. Akan tetapi, penerapan ini akan mempunyai kendala karena rendahnya pemahaman para pelaku UMKM dalam menggunakan informasi dalam SAK ETAP.

Penelitian Kusharyanti dan Astuti (2015) menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Yogyakarta menyadari pentingnya pencatatan dan laporan keuangan, namun mereka tidak mempunyai kemampuan/keahlian atau terbatas sumber dayanya untuk melakukan pencatatan. Sehingga hal tersebut belum dilakukan, laporan kegiatan usahanya masih sangat sederhana sekali. Belum memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Sebagian besar belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang benar untuk usaha mereka. Hampir seluruh pelaku UMKM Yogyakarta belum mengetahui mengenai standar akuntansi keuangan (SAK ETAP) untuk usaha mereka. Padahal SAK ETAP sudah disahkan sejak tahun 2011. Mereka belum bisa melakukan pencatatan yang memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Pencampuran uang usaha dan uang pribadi ini dianggap sebagai salah satu penyebab tidak berkembangnya usaha mereka, selain itu faktor ketekunan dan disiplin dalam pencatatan juga belum dilakukan.

C. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan datanya diperoleh melalui survei. Survei dilakukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Disperindagkop, sampai dengan tahun 2013 jumlah UMKM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 22.000. Survei dilakukan dengan cara mengelompokkan ke masing-masing kelompok usaha: mikro, kecil dan menengah. Tidak seluruh populasi akan disurvei, akan tetapi akan diambil sampel sebesar 5% dari masing-masing kelompok usaha, atau memenuhi *judgement* dalam pengambilan data oleh peneliti.

Penelitian pada tahun 1 sudah diperoleh data tentang daftar UMKM di Yogyakarta melalui Disperindagkop Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut, peneliti melakukan pengelompokan UMKM berdasarkan ukuran dan karakteristik masing-masing untuk mempermudah dalam mengidentifikasi informasi keuangan yang dibutuhkan. Kemudian berdasarkan laporan keuangan perusahaan, dilakukan analisis laporan keuangan dan analisis bisnis.

D. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan perusahaan (UMKM) pada umumnya terdiri dari neraca (posisi keuangan), laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Secara umum, tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat keputusan.

Analisis atas laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak pemakai dengan berbagai tujuan. Neraca berisikan sumber daya ekonomi (asset), kewajiban ekonomi (utang) dan modal. Analisis terhadap neraca bermanfaat untuk melihat likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan operasi dan kemampuan menghasilkan pendapatan pada periode tertentu. Laporan laba rugi meringkas hasil kegiatan selama satu periode akuntansi. Analisis laporan laba rugi memberikan informasi terkait dengan tingkat keuntungan perusahaan, tingkat fleksibilitas keuangan dan kemampuan operasional perusahaan. Fleksibilitas keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan menyesuaikan operasi terhadap kenaikan aliran kas operasional dan kemampuan menjual asset tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan. Kemampuan operasional mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai kas masuk dan keluar perusahaan. Analisis terhadap arus kas memberikan informasi mengenai (1) kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas masa datang yang positif; (2) kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dan membayar dividen; (3) kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal; (4) alasan terjadinya perbedaan-perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan dan pengeluaran perusahaan; (5) aspek kas dan non kas dari transaksi investasi dan pendanaan selama periode tertentu.

Alat analisis laporan keuangan yang sering digunakan adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar.

1. **Rasio likuiditas** mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Biasanya untuk melihat likuiditas perusahaan yaitu dengan menghitung *current ratio* dan *quick ratio (acid test ratio)*. Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi. Sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan kelebihan asset lancar, hal ini tidak bagus karena akan menghasilkan *return* yang rendah bagi perusahaan.
2. **Rasio aktivitas** mencerminkan setiap aktivitas asset. Aktivitas asset yang rendah pada tingkat penjualan yang tinggi akan mengakibatkan kelebihan dana yang tertanam pada asset tersebut, sehingga akan lebih produktif apabila ditanamkan untuk asset lain yang produktif. Rasio aktivitas yang sering digunakan adalah rata-rata umur piutang, Perputaran sediaan, perputaran asset tetap, perputaran total asset.
3. **Rasio solvabilitas**. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dengan total utang lebih besar dari total asetnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak solvable.
4. **Rasio profitabilitas**.
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats) merupakan metode perencanaan strategis perusahaan. Analisis ini untuk menentukan bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu

menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Secara garis besar, berdasarkan analisis SWOT maka berikut adalah berbagai kekuatan-kelemahan-peluang-dan ancaman UMKM sebagai obyek penelitian:

Kekuatan:

1. Usaha UMKM adalah fleksibel, bisa dilakukan oleh wira usaha dalam berbagai sector dan juga bisa dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai tingkatan.
2. Usaha UMKM mampu menampung SDM yang besar, sehingga mengurangi pengangguran.
3. Usaha UMKM mampu bertahan dalam kondisi krisis, karena sebagian besar menggunakan input sumber dalam negeri.

Kelemahan:

1. Kualitas SDM yang rendah, karena pelaku usaha berasal dari tingkat pendidikan yang beragam, dari tingkat terbawah sampai akhir.
2. Masih terbatasnya sarana dan infrastruktur bagi UMKM, seperti kebijakan pemerintah (lembaga) terhadap usaha UMKM.
3. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan, dan semangat keterpaduan berbagai pihak (pembuat kebijakan) dalam pengembangan UKM. Ini menyebabkan pemborosan dan tidak efektifnya pembinaan UKM.

Peluang:

1. Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap usaha UMKM.
2. Potensi pasar dalam negeri semakin berkembang.
3. Berkembangnya teknologi informasi.
4. Semakin berkembangnya industry.
5. Tersedianya SDM dan SDA yang banyak.

Ancaman:

1. Adanya liberalisme perdagangan dan kompetisi bisnis yang sangat kuat.
2. Rendahnya peran pemerintah dan lembaga terkait terhadap liberalism perdagangan.
3. Masih rendahnya komitmen penciptaan produk berkualitas dan penegakan etika bisnis.
- 4.

E. KESIMPULAN

Setiap aktivitas bisnis UMKM perlu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dengan benar dan tepat. Fungsinya adalah untuk mengetahui perkembangan usaha para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Banyak manfaat dari laporan keuangan tersebut, antara lain adalah untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Selain informasi keuangan, pelaku UMKM juga membutuhkan informasi lain yang dipakai untuk menentukan strategi perusahaan. Informasi tersebut dapat dianalisis dengan analisis SWOT. Agar aktivitas bisnis berjalan terarah, maka perlu adanya perencanaan bisnis yang matang melalui analisis *business plan*. Penggunaan system pelaporan keuangan komputerisasi mampu mendukung pelaku UMKM dalam pelaporan keuangan. Dengan system yang sudah tersedia, laporan keuangan akan tersusun secara lebih akurat dan tepat waktu. Lebih akurat karena sudah terstandar dalam pelaporannya, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda dalam penilaian setiap aktivitas bisnis. Analisis SWOT yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dan wawancara, membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan strategi usahanya dengan

lebih baik. Analisis *business plan* yang dilakukan oleh peneliti sangat membantu pelaku UMKM dalam menyusun kegiatan usahanya ke depan. Rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan analisis SWOT dan *business plan* serta sifat bisnis tradisional merupakan kendala yang dihadapi peneliti untuk kelangsungan penerapan hasil penelitian ini. Penerapan hasil penelitian dilakukan secara bertahap, sulit untuk secara radikal. Sehingga perlu adanya monitoring dan pendampingan dalam waktu yang lama untuk penerapan secara total.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyah Iim Ma'rifatul, 2012, Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK-ETAP pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo, Artikel Ilmiah, STIE Perbanas Surabaya.
- Bank Indonesia, 2009, Kajian Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan *Business Plan* untuk UMKM: Persiapan Bank Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM.
- Bass, Timo dan Mechthild Schrooten, 2006, Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis, *Small Business Economic*, Vo. 27.
- Freddy Rangkuti, 2009, Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis, Gramedia, Jakarta.
- Hasan Syarifuddin, 2013, Sektor UMKM Menyerap 97,3% dari Total Tenaga Kerja Indonesia, *Republika online*, Juli.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Salemba Empat Jakarta.
- Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisnami, 2004, Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan, *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II No. 8, 210-218.
- Muntoro, R. K. 1990, Praktek Akuntansi Keuangan, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- Murniati, 2002, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro.
- Rudiantoro Rizki dan Siregar Sylvia Veronica, 2011, Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP, Simposium Nasional Akuntansi ke 14, Aceh.
- Sriyana Jaka, 2010, Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Simposium Nasional: Menuju Purworejo Dinamis.

Suhairi, 2011, *Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Analisis Teknik serta Prosedur Akuntansi untuk Pengembangan Penerapan Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.*

Sukirno, Sadono dkk, *Pengantar Bisnis Edisi Pertama*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Subramanyam K.R. and John J. Wild, 2010, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.

MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANIZATIONAL TERHADAP KINERJA DENGAN MEDIASI KEPERIBADIAN

Oleh:

Tri Mardiana¹⁾, Sucahyo Heriningsih²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN -Veteran Yogyakarta

Email: triana_upn@yahoo.com.sg

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN -Veteran Yogyakarta

Email: heriningsih_s@yahoo.co.id

Abstract

The aim of writing this article to explain the influence of organizational culture on the motivation and performance by mediating personality factors such as self-esteem, self-concept, and self-confidence. Understanding of motivation and organizational culture. This paper discusses the importance of motivation and organizational culture on performance, the importance of mediation personality self-esteem, self-concept and self-confidence on the performance and the factors that influence the mediation of personality self-esteem, self-concept and self-confidence. It is believed that as motivation and organizational culture is very important to support a performance. With the motivation, can direct or control and motivate a person to take action will be the desired behavior based on the targets that have been set to achieve a goal that will be achieved, and can implement an organizational culture that is already available to run. Personality Self-esteem, self-concept and self-confidence can help in overcoming the existing problems in the organization better, because the personality of self-esteem, self-concept and self-confidence will encourage efforts to improve performance. With the motivation and organizational culture, a person's performance will increase and showed good progress.

ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena sumber daya manusia memiliki peranan sebagai subyek pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu setiap organisasi haruslah memperhatikan dan memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan baik agar organisasi dapat berkembang. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menerangkan mengenai pengaruh motivasi dan budaya organisasi terhadap Kinerja dengan mediasi faktor-faktor kepribadian seperti *Self-esteem*, *Self-concept*, dan *Self-confidence*. Motivasi dan budaya organisasi ini sangatlah penting untuk menunjang sebuah kinerja. Dengan adanya motivasi, dapat mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dicapai, dan bisa menerapkan budaya organisasi yang sudah tersedia untuk dijalankan. Kepribadian *Self-esteem*, *self-concept* dan *self confidence* dapat membantu dalam mengatasi masalah yang ada dalam organisasi dengan lebih baik, karena kepribadian *self-esteem*, *self-concept* dan *self confidence* akan mendorong usaha keras untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya motivasi dan budaya organisasi, kinerja seseorang akan semakin meningkat dan menunjukkan progres yang baik.

Kata kunci: Motivasi, budaya organisasi, kinerja dan mediasi *self-esteem*, *self-concept* dan *self confidence*

PENDAHULUAN

Berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, namun agar keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi tidaklah mudah didapatkan apabila tanpa usaha yang maksimal. Mengingat akan kebutuhan orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda tentunya cara untuk memperolehnya berbeda pula. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan yang dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam diri seseorang ada kekuatan. (Mardiana dan Heriningsih, 2014)

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja para pegawainya dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pegawai merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena memiliki bakat, tenaga, dan pemikiran yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi.

Dalam rangka memberdayakan karyawan yang ada maka perusahaan harus mampu memotivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja dengan mediasi *self efficacy* yang tepat, sehingga akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi motivasi karyawan adalah bagaimana budaya perusahaan yang berjalan atau ada di perusahaan tersebut. Budaya perusahaan menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Inti motivasi kerja dan organisasi budaya adalah dengan adanya dorongan semangat kerja dan pelaksanaan aktivitas karyawan agar mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan.

Budaya organisasi dalam artikel ini adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Kekuatan suatu budaya memengaruhi suasana sebuah organisasi dan perilaku para anggotanya.

Pada artikel pentingnya motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja, motivasi dan budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja memediasi Kepribadian *self-esteem*, *self-concept* dan *self-confidence*, pentingnya mediasi kepribadian *self-esteem*, *self-concept* dan *self-confidence* terhadap kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi kepribadian *self-esteem*, *self-concept* dan *self-confidence*.

PENGERTIAN MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA

Motivasi adalah cara terampuh untuk memberikan semangat kerja disaat para pekerja sudah merasa kelelahan atau jenuh dengan rutinitas pekerjaan yang dilakukan. Memotivasi bias dilakukan dengan memberikan solusi refreasing kepada para pekerja, tetapi refreasing bukan tentang perjalanan indah dan mewah, bukan juga perjalanan yang menghabiskan waktu sehari-hari lamanya, cukup dengan mengistirahatkan badan dan pikiran. Memotivasi diri sendiri sangatlah penting, perlu dilakukan, untuk masa depan diri, keluarga, dan juga pekerjaan. Motivasi kerja merupakan suatu keahlian dalam mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hadari Nawawi (2003:35) menyatakan bahwa suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Yang mempengaruhi motivasi kerja meliputi: uang, pujian, perhatian, persaingan, kebanggaan, perlimpahan, kesempatan, kebutuhan, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, keterampilan, masa kerja, dll.

Waldman (1994) berpendapat bahwa kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada

pada masing-masing individu dalam organisasi. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang akan dicapai. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Ostroff (1992) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

PENTINGNYA MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAPA KINERJA

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, agar mau bekerja dengan giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi motivasi karyawan adalah bagaimana budaya perusahaan yang berjalan atau ada di perusahaan tersebut. Budaya perusahaan menjadi semacam sebuah rules yang tidak tertulis dan bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Motivasi semakin penting karena manajer/pemimpin membagikan pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya perusahaan juga dapat menjadi *trademark* sebuah perusahaan apabila rules yang diterapkan itu sangat unik. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Selain itu, tekanan utama dalam perubahan dan pengembangan budaya organisasi adalah mencoba untuk mengubah nilai-nilai, sikap dan perilaku dari anggota organisasi secara keseluruhan.

Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi, tetapi dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Menurut Robbins (2003) kuat lemahnya budaya sebuah organisasi dapat dipantau dengan melihat 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Arah, apakah nilai-nilai yang hidup searah atau selaras atau mendukung tujuan-tujuan organisasi.
 - b. Penyebaran , apakah nilai-nilai budaya tersebut dihayati dan dimiliki oleh semua anggota dalam organisasi, atau hanya oleh sekelompok kecil manajer tingkat atas.
 - c. Intensitas, apakah pengaruh budaya tertentu memberi tekanan (biasanya melalui tekanan kelompok) yang kuat pada anggota organisasi hingga ditaati atau tidak.
- Sebuah kinerja seseorang yang menunjukkan pada prestasi, pasti akan selalu mendambakan penghargaan terhadap hasil pekerjaannya dan mengharapkan imbalan yang adil. Penilaian kinerja perlu dilakukan secara seobyektif mungkin karena akan memotivasi karyawan dalam melakukan kegiatannya. (Mardiana, 2004, 2009, dan 2012).

Disamping itu penilaian kinerja dapat memberikan informasi untuk kepentingan pemberian dalam gaji, promosi dan memantai pekerjaan karyawan. Berbagai cara ditempuh untuk meningkatkan kinerja karyawan misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kompensasi dan motivasi serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. Secara garis besar, kinerja dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.

Budaya perusahaan dapat mempunyai dampak yang berarti terhadap kinerja ekonomi jangka panjang. Budaya kuat membantu kinerja bisnis karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa dalam diri karyawan. Jika prestasi kerja karyawan meningkat berarti tujuan perusahaan dalam upaya memotivasi dan menerapkan budaya organisasi kepada karyawannya berhasil.

Karyawan yang telah dimotivasi akan menunjukkan suatu sikap keinginan dan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja yang maksimum, dan sikap inilah yang disebut dengan semangat karyawan dalam bekerja. Jadi pada akhirnya karyawan yang telah dimotivasi akan bersemangat dalam bekerja yang kemudian akan menunjukkan suatu upaya untuk mematuhi budaya organisasi yang diterapkan pada perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja yang optimal demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

PENTINGNYA MEDIASI KEPERIBADIAN *SELF-ESTEEM*, *SELF-CONCEPT* DAN *SELF-CONFIDENT* TERHADAP KINERJA

Self-esteem merupakan kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan pula bahwa *self esteem* berkenaan dengan: (a) kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat kita lakukan dan apa yang telah dilakukan, (b) penetapan tujuan dan arah hidup sendiri, (c) kemampuan untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. *Low self esteem* (harga diri rendah) sering dihubungkan dengan permasalahan gangguan mental seperti, depresi, kecemasan, dan permasalahan belajar. Juga beberapa kesulitan seperti, kegagalan, kerugian, dan kemunduran. Sebaliknya, *high self esteem* (harga diri tinggi) diyakini menjadi dasar bagi perkembangan mental yang sehat, kesuksesan, dan kehidupan yang efektif. *Self-esteem* diartikan dalam istilah percaya diri meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan makna yang sesungguhnya. *-self-esteem* adalah penerimaan diri sendiri, oleh diri sendiri berkaitan bahwa kita pantas, berharga, mampu dan berguna tak peduli dengan apa pun yang sudah, sedang atau bakal terjadi. Tumbuhnya perasaan aku bisa dan aku berharga merupakan inti dari pengertian *self-esteem*".

Self-concept, merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian. Seperti dikemukakan oleh Rogers bahwa konsep kepribadian yang paling utama adalah diri. Diri (*self*) berisi ide-ide, persepsi-persepsi dan nilai-nilai yang mencakup kesadaran tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan representasi diri yang mencakup identitas diri yakni karakteristik personal, pengalaman, peran, dan status sosial. *Self concept* dapat dikatakan merupakan sekumpulan yang dipegang oleh seseorang tentang dirinya.

Self concept adalah pengetahuan dan gagasan seseorang tentang dirinya serta sikap terhadap diri dan perilakunya. *Self concept* dibagi menjadi *self concept* positif dan konsep diri negatif. Individu dapat menilai hubungan dengan orang lain secara tepat dan akan menumbuhkan penyesuaian sosial yang baik. Sebaliknya, *self concept* negatif akan menggambarkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Individu akan merasa ragu dan kurang percaya diri.

Self-confidence (Kepercayaan Diri), kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang Urgen untuk dimiliki setiap individu. Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seorang anak maupun orang tua, secara individual maupun kelompok. Manfaat dari mediasi *Self-esteem*, *Self-concept* dan *Self-confident* dalam kinerja:

- a. *Self-esteem*, *Self-concept* dan *Self-confident* yang dimiliki, akan menetapkan apa yang akan ia lakukan dalam menghadapi suatu tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.
- b. *Self-esteem*, *Self-concept* dan *Self-confident* sebagai mediator yang cukup berpengaruh terhadap pemilihan karir seseorang.
- c. Memiliki keinginan untuk bertahan pada suatu tugas, bagi Individu yang memiliki *Self-esteem*, *Self-concept* dan *Self-confident* yang tinggi biasanya akan berusaha keras untuk menghadapi kesulitan dan bertahan dalam mengerjakan suatu tugas bila mereka telah mempunyai keterampilan prasyarat
- d. Memiliki kualitas usaha dalam strategi untuk memproses suatu tugas secara lebih mendalam dengan yang *Self-esteem*, *Self-concept* dan *Self-confident* tinggi.

MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA BERPENGARUH TERHADAP KINERJA MEDIASI KEPERIBADIAN

Walaupun program pemberdayaan dan budaya organisasi telah dilakukan, namun permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia masih saja terjadi di perusahaan. Permasalahan tersebut meliputi tingkat kedisiplinan, dimana hampir tiap hari ada karyawan yang terlambat selain itu juga meninggalkan tempat kerja lebih awal ataupun mangkir dari pekerjaan, kedisiplinan karyawan juga ditunjukkan dengan ruang kerja mereka yang kurang tertata rapi. Permasalahan lain yang muncul adalah masih adanya karyawan yang keluar masuk tiap tahunnya. Akan tetapi jika indikasi-indikasi dari tingkat kepuasan kerja yang rendah masih muncul, maka hal tersebut menjadi suatu masalah. Apabila karyawan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik maka, *produktivitas* kerja akan meningkat, jika *produktivitas* meningkat berarti prestasi kerja karyawan juga meningkat. Dan jika prestasi kerja karyawan meningkat berarti tujuan perusahaan dalam upaya memotivasi dan menerapkan budaya organisasi kepada karyawannya akan berhasil. Karyawan yang telah dimotivasi akan menunjukkan suatu sikap keinginan dan kesanggupan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal, dan sikap inilah yang disebut dengan semangat bekerja. Jadi pada akhirnya karyawan yang telah dimotivasi akan bersemangat dalam bekerja yang kemudian akan menunjukkan suatu upaya untuk mematuhi budaya organisasi yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi kerja yang optimal.

Kepribadian *self esteem*, *self concept* dan *self confident* sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepuasan kerja.

Budaya telah menjadi suatu konsep yang sangat penting dalam memahami individu atau kelompok manusia dalam waktu yang cukup lama. Budaya pada hakekatnya merupakan proses integrasi dari suatu perilaku manusia yang mencakup pikiran, ucapan dan perbuatan dengan proses pembelajaran. Dalam kehidupannya manusia dipengaruhi oleh budaya dimana manusia berada. Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi.

Standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan, dan merupakan bahan perbandingan, tujuan atau target tergantung dari pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang baik itu, terukur, dan mudah dipahami, menguntungkan baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. Standar kinerja mendefinisikan tentang pekerjaan yang tergolong memuaskan. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi dari seberapa karyawan yang mengerjakan pekerjaannya ketika dibandingkan dengan standar perusahaan, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan karyawan. Stres atau dalam kondisi lelah dengan adanya banyak pekerjaan dan tuntutan yang harus dilaksanakan dapat mengurangi *self-esteem*, *self concept* dan *self confident* pada diri individu, jika tingkat stres individu rendah maka tinggi *self-esteem*, *self concept* dan *self confident* sebaliknya jika stres tinggi maka faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi kepribadian *self-esteem*, *self-concept* dan *self confidence* pada individu rendah.

Self esteem berkenaan dengan kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat kita lakukan dan apa yang telah dilakukan, penetapan tujuan dan arah hidup sendiri, serta kemampuan untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. *Self-esteem* merupakan kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita. Orang yang percaya diri dengan kemampuannya cenderung untuk berhasil, sedangkan orang yang selalu merasa gagal cenderung untuk gagal, *Self concept*, merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian.

Self esteem, *self concept* dan *self confident* berhubungan dengan kinerja dimana jika seseorang memiliki *Self esteem*, *self concept* dan *self confident* yang tinggi maka cenderung untuk berhasil dalam tugasnya sehingga meningkatkan kepuasan atas apa yang dikerjakannya. Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berpikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keyakinan terhadap keberhasilan yang selalu dicapai membuat seseorang bekerja lebih giat dan selalu menghasilkan yang terbaik. Sedangkan *self esteem*, *self concept* dan *self confident* merupakan sebuah kepercayaan diri, harga diri dan rasa percaya diri tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan dengan sukses beberapa tindakan atau masa depan dan mencapai beberapa hasil

KESIMPULAN

Jika karyawan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik produktivitas kerja akan meningkat. Jika produktivitas meningkat berarti prestasi kerja karyawan juga meningkat. Dan jika prestasi kerja karyawan meningkat berarti tujuan perusahaan dalam upaya memotivasi dan menerapkan budaya organisasi kepada karyawannya pun ikut berhasil. Motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja dengan mediasi kepribadian *self esteem*, *self concept* dan *self confident* pun dapat terlaksana dengan baik demi memajukan kesejahteraan seorang pegawai ataupun perusahaan. Salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi kepada karyawan. Bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Kepuasan kerja berkaitan dengan organisasi akan terlihat dari produktivitas kinerja yang diperoleh memuaskan atau tidak memuaskan sehingga sudah tentu akan mempengaruhi juga perilaku organisasi.

REFERENSI

- Bandura, A. 1997. *Self-Efficacy: The exercise of control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Bandura, A. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mangkunegara, A.P, (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan I*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiana, Tri. Heriningsih, Sucahyo. 2014. *Pengaruh Motivasi Dan Budaya Organizational Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Self Efficacy*. Proposal Penelitian Hibah Fundamental. Kemenristek & Dikti RI.
- Mardiana, Tri. 2011. *Anteseden Kepuasan Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Intensi Turn Over (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Golongan C)*. *Jurnal Manajemen Inovasi dan Bisnis*.
- Mardiana, Tri. 2009. *Pengaruh Sumber Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Edukatif Di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta)*. Call Paper Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UPN - Veteran Jawa Timur.
- Mardiana, Tri. 2004. *Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan dan Pengalaman Kerja Terhadap komitmen Perawat RS Panti Rapih Di DI Yogyakarta*. *Jurnal Ilmiah TELAAH BISNIS*.
- Masrukin dan Waridin, 2006. *Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai*, *EKOBIS*, Vol. 7, No. 2.
- Muhid, Abd, 2009. *Self-Efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya terhadap Pendidikan)*. Tadriss. Volume4.
- Ostroff, C, 1992, *-The Relationship Between Satisfaction Attitudes and Performance an Organization Level Analysis*, *Journal of Applied Psychology*, Vol.77, No. 68.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sutanto, Aftoni, 2002, *Peran Budaya Organisasi untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan*, *Benefit*, Vol 6, No.2.
- Waldman, David A., 1994, *The Contribution of Total Anality Management to aTheory of Work performance*, *Academy of Management Review*, Vol 19 No.3, pp 210-536.

Analisis Karakteristik Individu Pengusaha Terhadap Keberhasilan dan Kegagalan Usaha Kecil Menengah

Sabihaini, Januar Eko Prasetyo

Dosen UPN -Veteran Yogyakarta

SWK 104 Ring Road, Yogyakarta 55283

E-mail: sabihaini@yahoo.com

Abstract

The success and failure of SMEs be an interesting topic to be discussed primarily related to the individual characteristics of entrepreneurs. Characteristics generally owned by an individual SMEs are the characteristics of small business owners such as locus of control, need for achievement, the tendency to take risks (risk taking), and a preference for innovation (preference to innovation). These characteristics have a major role in achieving the goals of SMEs .

Keberhasilan dan kegagalan UKM menjadi topik yang menarik untuk dibahas terutama terkait dengan karakteristik individu pengusaha. Karakteristik secara umum dimiliki oleh seorang pengusaha UKM adalah Karakteristik individu pemilik UKM seperti *locus of control*, kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*), kecenderungan mengambil risiko (*risk taking*), dan preferensi untuk berinovasi (*preference to innovation*). Karakteristik tersebut memiliki peran yang besar dalam pencapaian tujuan usaha UKM.

A. Pendahuluan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor: 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Littunen (2000) menyatakan bahwa UKM berdiri atas keputusan individu, dimana pemilik adalah sebagai manajer yang memiliki harapan atas kemampuannya dalam menjalankan usaha. Dalam menjalankan usahanya, pemilik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan dan tujuan kewirausahaan. Nilai-nilai, kepercayaan dan tujuan kewirausahaan inilah yang sangat menentukan bagaimana peluang bisnis dipertimbangkan untuk dipilih (Forsman, 2008). Dengan demikian kesuksesan UKM lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemilik (manajer) yang ditunjukkan oleh orientasi strategi (Kotey dan Meredith, 1997), karakteristik pribadi pemilik merupakan faktor terkuat yang mampu menjelaskan kinerja UKM (De Zoysa dan Herath, 2007). Tulisan ini ingin mengungkap karakteristik individu yang seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha yang keberhasilan dan kegagalan UKM.

B. Pembahasan

Karakteristik pribadi pemilik UKM dapat digambarkan dari: *locus of control*, kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*), kecenderungan mengambil risiko (*risk taking*); dan preferensi untuk berinovasi (*preference to innovation*) (Mário dkk, 2008; Watson dan Newby, 2005; Littunen, 2000; Koh, 1996). Selain itu, keberhasilan pengusaha ditentukan oleh tiga motif, yakni: *need for achievement*, *need for power*, *need for*

affiliation (McClelland, 1988), namun dari ketiga motif tersebut hanya *need for achievement* yang mencirikan seorang wirausaha (Robbins and Judge, 2012).

Boohene (2008) menyatakan bahwa kontribusi UKM terhadap perkembangan perekonomian secara keseluruhan ditentukan oleh kinerja usaha individual, dimana hasil kinerja tersebut merupakan hasil dari adopsi strategi yang dilakukan oleh pemiliknya. Hal ini disebabkan karena pada bisnis baru yang dikembangkan merupakan bagian dari strategi hidup pribadi pemilik yang secara luas dicirikan sebagai karakteristik kepribadian pemilik (penguasa). David dan Wilson (2003) menyatakan bahwa pengusaha secara sederhana diartikan sebagai orang yang memiliki karakteristik pribadi (*personal characteristics*), *risk taking*, kreativitas dan ambisi. Sementara Benzing dan Chu (2009) bahwa pengusaha lebih dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup dalam menjalankan bisnis mereka untuk memperoleh pertumbuhan dan kepuasan pribadi.

Hasil beberapa penelitian lain tentang usaha mikro dan kecil menemukan bahwa tempat usaha, usia pengusaha, jenis kelamin, latar belakang pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan serta pengalaman kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Seperti Kolvereid, 1996; Mazarol *et al*; 1999; Sinha, 1996; menyimpulkan bahwa pengusaha yang berusia muda (30-40) memiliki kinerja tertinggi. Kolvereid (1996) menemukan bahwa individu yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada yang belum memiliki pengalaman kerja. David, Leig, dan North (1995), menemukan bahwa di perusahaan kecil dimana kepemilikan dan manajemen merupakan gabungan dari keluarga dan keberhasilan sangat ditentukan oleh gaya hidup dan latar belakang keluarga. Selanjutnya, bahwa: 1) ciri dari budaya Asia yang tidak bisa dikesampingkan dalam pengelolaan usaha, 2) kekeluargaan memiliki pengaruh positif yang signifikan dan terkuat dalam pertumbuhan usaha, dibandingkan dengan variabel lain seperti kompetensi pemilik, dan tingkat profesionalisme dalam usaha dan derajat pelaksanaan perencanaan formal.

Charney and Libecap (2000) dan Sinha (1996) menemukan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja usaha kecil, meneliti tentang pengaruh pendidikan yang relevan dengan keberhasilan usaha. Sinha (1996) juga menemukan bahwa 72 persen keberhasilan usaha kecil dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang relevan dengan jenis usaha dan 67 persen pengusaha kecil yang tidak sukses adalah pengusaha kecil yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jenis usaha saat ini. Badarudin (2007) menemukan bahwa etos kerja wirausaha muslim di Batur Klaten Jawa Tengah, menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara asal daerah terhadap etos kerja, begitu pula temuan penelitian ini juga mendukung teori klasik yang dipelopori oleh Staley dan Morse (1965) menyatakan usaha kecil yang berlokasi di daerah pedesaan dan mengandalkan sumber bahan baku di sekitar lokasi akan tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan usaha kecil yang berlokasi di perkotaan.

Katz dan Green (2007) dan Longenecker *et al* (2006) menyimpulkan penelitian yang mengidentifikasi manfaat kewirausahaan bila dibandingkan dengan pekerjaan tradisional yang sudah ada organisasi. Manfaat-manfaat ini umumnya termasuk menghasilkan uang, kebebasan, meningkatkan kepuasan, fleksibilitas pribadi dan waktu keluarga, kesempatan untuk pertumbuhan. William dan Andrew (1996), menyatakan bahwa seorang wirausahawan (*entrepreneur*) adalah seseorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk menagejarnya.

Proses kewirausahaan (*entrepreneurship*) menyangkut segala fungsi, aktifitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk menagejarnya.

Kristiansen, Furuholt, Wahid (2003), penelitiannya pada usaha warung telekomunikasi di Indonesia, menemukan hubungan positif dan signifikan antara pengalaman usaha dengan tingkat keberhasilan. Staw (1991), ada bukti kuat bahwa pengusaha kecil memiliki orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis sebagai wirausaha

memiliki kinerja yang lebih baik. Duchesneau *et al.* (dalam Staw 1991), wirausaha yang berhasil adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang juga wirausaha, karena mereka memiliki pengalaman luas dalam usaha. Haswelle *et al.*; (dalam Zimmerer & Scarborough, 1998) menyatakan bahwa alasan utama kegagalan usaha adalah kurangnya kemampuan manajerial dan pengalaman. Zinger *et al.*; (2001), menyatakan bahwa kemampuan manajerial di bidang manajemen pemasaran dan keuangan, operasi dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang positif sehingga dapat membantu mengidentifikasi aktivitas manajemen kunci selama awal keberhasilan perusahaan. Helen (2008) dan Chaston (1992) menyatakan bahwa penentu keberhasilan usaha kecil terletak pada latar belakang individu seperti kemampuan manajerial. Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Kolvereid, 1996; Mazzarol *et al.* (1999) menyatakan bahwa pengaruh karakteristik individu: usia dan jenis kelamin, dan latar belakang individu, seperti pendidikan dan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil. Namun terdapat dua prakondisi utama untuk tumbuhnya usaha kecil, yakni kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang, dan kemampuan manajer untuk mengatasi hambatan manajemen. Selain itu, bahwa tingkat pendidikan pemilik-manajer dan dukungan pemerintah serta perbankan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan usaha kecil. Sementara Helen (2008) motivasi dan tujuan seorang pengusaha (manajer) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan perusahaan kecil juga reputasi perusahaan, kepedulian terhadap layanan pada pelanggan, keterampilan karyawan dan diversifikasi produk merupakan kunci pertumbuhan perusahaan kecil.

Berdasar temuan penelitian yang telah dilakukan maka faktor yang membentuk karakteristik pribadi pengusaha yakni: independen, semangat dalam bekerja (enerjik), percaya diri, kompetitif, dan berorientasi pada tujuan (Hisrich, 1988), pengalaman dalam mengelola usaha, latar belakang pekerjaan orang tua dan tingkat keterlibatan keluarga dalam mengambil keputusan perusahaan memberi pengaruh positif dan signifikan pada kinerja usaha skala kecil. Sedangkan faktor penentu keberhasilan serta hambatan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil terletak pada latar belakang individu (Helen, 2008; Chaston, 1992; Ahmed, 1995) dan pengaruh karakteristik individu yakni: usia dan jenis kelamin, dan latar belakang individu, seperti pendidikan dan pengalaman kerja yang mempengaruhi kinerja usaha kecil (Kolvereid, 1996; Mazzarol *et al.*, 1999).

C. Penutup

Berdasar hasil penelitian yang pernah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa karakteristik secara umum dimiliki oleh seorang pengusaha UKM adalah Karakteristik pribadi pemilik UKM dapat digambarkan dari: *locus of control*, kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*), kecenderungan mengambil risiko (*risk taking*); dan preferensi untuk berinovasi (*preference to innovation*). Karakteristik tersebut memiliki peran yang besar dalam pencapaian tujuan usahanya.

Daftar Pustaka

- Ahmet C. (1995) The impact of key internal factors on firm performance: An empirical study of small Turkish firms. *Journal of Small Business Management*, 31:4, 86.
- Baharuddin dan Wahyuni (2007) *Teori dan Pembelajaran Yogyakarta*: ar-Ruzz Media Group
- Benzing, C., Chu, H.M. and Callanan, G. (2005), -Regional comparison of the motivation and problems of Vietnamese entrepreneurs, *Journal of Developmental Entrepreneurship*, Vol. 10, pp. 3-27.

- Benzing, C., Chu, H.M. and Orhan Kara, Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis of Motivations, Success Factors, and Problems, *Journal of Small Business Management*, Vol. 47, pp. 58–91
- Charney Alberta and Gary D. Libecap (2000). *The Impact of Entrepreneurship Education: An Evaluation of the Berger Entrepreneurship Program at the University of Arizona, 1985-1999*, social science Research Network.
- Chaston, Ians Beryl Badger and Eugene Sadler-Smith (2001). Organizational Learning: An Empirical Assessment of Process in Small U.K. Manufacturing Firms *Journal of Small Business Management* Volume 39, Issue 2:139–151.
- David J. Llewellyn, Kerry M. Wilson, (2003) *The controversial role of personality traits in entrepreneurial psychology*, Education + Training, Vol. 45 Iss: 6, pp.341 – 345.
- David Smallbone, Roger Leig, David North, (1995) The characteristics and strategies of high growth SMEs, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 1 Iss: 3, pp.44 - 62
- De Zoysa, A. & Herath, S. Kanthi. (2007). The impact of owner/managers' mentality on financial performance of SMEs in Japan: An empirical investigation. *Journal of Management Development*, 26 (7), 652-666.
- Helen Reijonen, (2008) Understanding the small business owner: what they really aim at and how this relates to firm performance: A case study in North Karelia, Eastern Finland, *Management Research News*, Vol. 31 Iss: 8, pp.616 – 629
- Hian Chye Koh, (1996) Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics: A study of Hong Kong MBA students, *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 11 Iss: 3, pp.12 - 25
- Hisrich, Robert D (1988). The Entrepreneur in Northern Ireland: Characteristics, problems, and, S. (2003). A study of the factors influencing the operating location decisions of small firms. *Property Management*, 21(2), 190-208.
- Ivan Zinger, Cherami Wichmann, and DA. Andrews (2001) Psychological Effects of 60 days in Administrative Segregation, *Canadian Journal of Criminology*, Vol (43): 47- 83
- Katz, Jerome A, and Green, Richard P., (2014), *Entrepreneurial small business*, 4th edition, New York, NY McGraw-Hill/Irwin
- Kolvareid, L.(1996). Prediction of employment status choice intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 21, 47-57
- Kristiansen, S., Furuholt, B., & Wahid, F. (2003). Internet cafe entrepreneurs: pioneers in information dissemination in Indonesia. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 4(4), p.251-263.
- Littunen, Hannu (2000), Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol (6): 295-310
- Longenecker, J. G., C. W. Moore, J. W. Petty, and L. E. Palich. (2006), *Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis*, Mason, Oh:South-Western.
- Mário Raposo, Arminda do Paço, João Ferreira, (2008) Entrepreneur's profile: a taxonomy of attributes and motivations of university students, *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 15 Iss: 2, pp.405 – 418

- Mazzarol, T., & Choo, S. (2003). A study of the factors influencing the operating location decisions of small firms. *Property Management*, 21(2), 190-208
- Mazzarol, T., Volery, T., Doss, N., & Thein, V. (1999). Factors influencing small business start-ups. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 5(2), 48-63.
- McClelland, D. 1988. *Human Motivation*, Cambridge University Press
- Robbins, Stephen and Judge, Timothy A., 2012, *Organizational Behavior* 15th Edition, Published by Prentice Hall
- Rosemond Boohene, Alison Sheridan, Bernice Kotey, (2008) Gender, personal values, strategies and small business performance: A Ghanaian case study, *Equal Opportunities International*, Vol. 27 Iss: 3, pp.237 - 257
- Sinha, P., Balas, B. J., Ostrovsky, Y. and Russell, R. (2006). *Face recognition by humans. In Face Recognition: Advanced Modeling and Methods*, Academic Press.
- Staw, B. M. (1991). Dressing up like an organization: When psychological theories can explain organizational action. *Journal of Management*, 17(4), 805
- WatsonJohn, Rick Newby, (2005) Biological sex, stereotypical sex-roles, and SME owner characteristics, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 11 Iss: 2, pp.129 - 143
- William D. Bygrave and Andrew Zacharakis (1996). *Entrepreneurship*. 3rd edition, Wiley
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (1998). *Essentials of entrepreneurship and small business management* (2nd ed.). New York: Prentice Hall.

Faktor-Faktor Organisasional yang Mempengaruhi Kecenderungan Melakukan Fraud pada Perusahaan Sektor Keuangan di Indonesia

Sri Astuti

Zuhrohtun

Sri Wahyuni Widiastuti

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor organisasional perusahaan perbankan yang melakukan fraud di Indonesia. Data amatan dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai tahun 2014.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, data dipilih dengan menggunakan teknik sampling. Data amatan dalam penelitian ini sebanyak 45, dan diolah dengan menggunakan alat analisis regresi logistic. Adapun variable yang diteliti adalah fraud. Sedangkan factor-faktor organisasional perusahaan adalah pengungkapan risiko dan independensi fungsi auditor intern serta opini auditor independen.

Hasil pengujian membuktikan bahwa tidak ada variable organisasional perusahaan maupun opini auditor independen yang berpengaruh signifikan terhadap indikasi fraud di perusahaan perbankan.

Keywords: Faktor organisasional, fraud, opini auditor.

A. Latar Belakang Penelitian

Fraud menurut *International Standards on Auditing number 99* dapat didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal (Amiruddin dan Sundari, 2012).

Berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisasi adanya *fraud*, seperti meningkatkan kultur perusahaan melalui implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Karena melalui implementasi *good corporate governance* (GCG) akan mendorong efisiensi kinerja sumber daya perusahaan serta menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Selain itu juga membentuk dan mengefektifkan fungsi audit intern. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran auditor intern saat ini sangat berat, mereka dituntut untuk melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi perbaikan dalam manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola dengan menggunakan pendekatan sistematis (Tugiman, 2015).

Financial Statement Fraud merupakan tindakan rutin yang menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan (AICPA 1987). APB (1998) mengakui bahwa fraud yang dilakukan oleh manajemen adalah sulit untuk dideteksi selama berlangsungnya audit laporan keuangan karena manajemen mempunyai cara tersendiri untuk menyembunyikan fraud. Penelitian tentang fraud pernah dilakukan oleh Loebbecke et al (1989), bahwa fraud dilakukan karena ada kondisi yang mendukung dalam entitas dan manajer. Bell dan Carcello (2000) mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong adanya *fraudulent financial reporting* adalah lingkungan pengendalian yang lemah, pertumbuhan perusahaan yang cepat, laba yang rendah, prediksi laba manajemen salah, dan status kepemilikan perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menemukan bukti bahwa fungsi pengendalian intern yang diprosikan dengan peran direksi ekstern akan meningkatkan pengendalian perusahaan, sehingga akan menekan adanya fraud yang dilakukan oleh manajemen. Young (2000) meneliti bahwa komite audit merupakan barisan depan dalam mengantisipasi tindakan fraud terhadap laporan keuangan. Akan tetapi Beasley (1996) dan Dechow et al (1996) menemukan bukti yang berbeda, bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dalam pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan posisi komite audit yang tidak independen.

Manajemen risiko perusahaan atau yang juga dikenal dengan *enterprise risk management* adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Tujuan perancangan ERM menurut Beasley et al (2006) adalah untuk meminimalkan risiko portofolio yang dihadapi perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan dapat berupa risiko keuangan dan risiko non keuangan.

Penelitian di Indonesia yang menghubungkan faktor manajemen risiko terhadap *fraudulent financial reporting* masih relatif sedikit. Sebagian besar peneliti meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Seperti Meizaroh dan Lucyanda (2011), Suhardjanto dan Dewi (2011), Simanjuntak dan Lusi (2012). Mereka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko, tidak meneliti dampak dari pengungkapan manajemen risiko tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Seperti kasus Enron, WorldCom, Kimia Farma, Bakrie and Brothers dan Bank Century (www.Bapepam.go.id). Dampak dari kasus ini adalah kepercayaan pengguna laporan keuangan semakin berkurang terhadap kelengkapan dan keandalan angka-angka akuntansi di laporan keuangan. Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan seperti investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin berubah (Almilia dan Retrinasari, 2007). Hal ini menimbulkan banyak permintaan kepada perusahaan publik untuk memperluas praktik pengungkapan dalam laporan tahunan, tidak hanya mengungkapkan informasi keuangan saja tapi memperluas pengungkapan informasi risiko.

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perusahaan harus menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko. Peraturan lain yang mengatur tentang pengungkapan resiko adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002. Disebutkan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham/pemilik modal, kreditor, dan stakeholders, salah satunya faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.

Melihat begitu besarnya tuntutan peran auditor intern dalam *good governance* dan manajemen risiko, maka penelitian ini akan melakukan pengujian peran fungsi auditor intern dan pengungkapan risiko manajemen dalam mengantisipasi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraud fraudulent financial reporting*). Berdasarkan data survey perkembangan auditor intern di 107 negara, diketahui bahwa peran auditor intern dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan hanya sebesar 44% (Tugiman, 2015). Jika peran auditor intern dalam perusahaan terlalu rendah, maka akan mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Selain menguji peran auditor intern, penelitian ini juga akan menguji faktor pengungkapan manajemen risiko terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *fraud*. Pengungkapan manajemen risiko perusahaan sangat diperlukan, karena berisikan proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Tujuan perancangan manajemen risiko menurut Beasley et al (2006) adalah untuk meminimalkan risiko portofolio yang dihadapi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi pengawas perusahaan, maka pengungkapan risiko tidak terlalu dibutuhkan (Oliviera et al., 2011), sehingga hal ini bisa menurunkan adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Pengungkapan mengenai manajemen risiko di Indonesia masih sebatas pengungkapan sukarela, kecuali untuk industri perbankan. Sehingga masih banyak ragam pengungkapannya. Penelitian di Indonesia yang menghubungkan faktor manajemen risiko terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan masih relatif sedikit. Sebagian besar peneliti meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

B. Tinjauan Pustaka

Agency theory menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen (Manajemen) dan principal (pemilik). Teori ini mengansumsikan bahwa manajer sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajemen risiko perusahaan atau yang juga dikenal dengan *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Tujuan perancangan ERM menurut Beasley et al (2006) adalah untuk meminimalkan risiko portofolio yang dihadapi perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan dapat berupa risiko keuangan dan risiko non keuangan.

Terdapat penelitian tentang hubungan antara Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko, hasilnya perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat resiko reputasi pribadi mereka (Lopes dan Rodrigues, 2007 dalam Oliviera et al., 2011). Sehingga untuk mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih luas.

Penelitian James (2003) menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan menganggap fungsi audit internal yang melapor pada manajemen senior kurang mampu memberikan perlindungan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa fungsi auditor intern tidak independen, dan dimungkinkan aktivitas auditor intern dibatasi ruang lingkupnya. Sehingga perlu adanya objektivitas fungsi audit internal melalui struktur pelaporan yang lebih kuat, yakni dengan tanggungjawab pengawasan fungsi internal audit secara langsung oleh komite audit. Uzun et al, 2004 dalam Mattousi dan Gharbi (2011) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi direktur independen dari luar perusahaan, semakin kecil pula kecenderungan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Faktor-Faktor Organisasional terkait dengan Financial Statement Fraud

Kecurangan pelaporan keuangan kemungkinan dapat ditemukan ketika auditor mencurigai adanya kesalahan akuntansi atau kurangnya penjelasan mengenai pengelolaan transaksi dan saldo akun. Akan tetapi, kecurangan ini sering ditemukan karena kesulitan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan menjadikan perusahaan bangkrut. Penelitian tentang fraud pernah dilakukan oleh Loebbecke et al (1989), bahwa fraud dilakukan karena ada kondisi yang mendukung dalam entitas dan manajer. Bell dan Carcello (2000) mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong adanya fraudulent financial reporting adalah lingkungan pengendalian yang lemah, pertumbuhan perusahaan yang cepat, laba yang rendah, prediksi laba manajemen salah, dan status kepemilikan perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menemukan bukti bahwa fungsi pengendalian intern yang diproksikan dengan peran direksi ekstern akan meningkatkan pengendalian perusahaan, sehingga akan menekan adanya fraud yang dilakukan oleh manajemen. Young (2000) meneliti bahwa komite audit merupakan barisan depan dalam mengantisipasi tindakan fraud terhadap laporan keuangan. Akan tetapi Beasley (1996) dan Dechow et al (1996) menemukan bukti yang berbeda, bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dalam pelaporan keuangan. Beasley (2000) menguji *corporate governance* antara sampel perusahaan yang melakukan *fraud* dengan yang tidak melakukan *fraud*, mereka menemukan bukti bahwa perusahaan yang melakukan *fraud* hanya memiliki sedikit komite audit. Hal ini dimungkinkan komite audit tidak independen dan kurang bekerja secara maksimal. Sedangkan perusahaan sampel yang tidak melakukan *fraud*, lebih banyak menempatkan direksi eksternnya.

Berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisasi adanya fraud, seperti meningkatkan kultur perusahaan melalui implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Karena melalui implementasi *good corporate governance* (GCG) akan mendorong efisiensi kinerja sumber daya perusahaan serta menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Selain itu juga membentuk dan mengaktifkan fungsi audit intern. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran auditor intern saat ini sangat berat, mereka dituntut untuk melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi perbaikan dalam manajemen risiko, pengendalian pengendalian intern dan proses tata kelola dengan menggunakan pendekatan sistematis (Tugiman, 2015).

Auditor internal sebaiknya tidak melakukan audit yang berkaitan dengan risiko manajemen dan tata kelola, jika pengendalian intern organisasi belum memadai. Pengendalian intern organisasi memadai dinyatakan dalam opini auditor ekstern dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Tugiman, 2015). Berdasarkan data survey perkembangan auditor intern di 107 negara, diketahui bahwa peran auditor intern dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan hanya sebesar 44% (Tugiman, 2015).

Berdasarkan teori-teori di atas, serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Peran fungsi auditor intern berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *fraud*.

H2: Pengungkapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *fraud*.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan kriteria: perusahaan menyampaikan *annual report* secara terbuka dan data tersedia lengkap.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari www.idx.co.id, dan data laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Angka 1 menunjukkan bahwa perusahaan diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan, dan angka 0 jika perusahaan tidak diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan. Perusahaan terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan diprosikan dengan menggunakan model Beneish M-Score.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen risiko dan efektivitas fungsi audit intern perusahaan. Variabel manajemen risiko diukur dengan menggunakan jumlah pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan variabel efektivitas fungsi auditor intern diukur dari tingkat independensi fungsi auditor intern dalam perusahaan. Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini auditor. Opini ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Angka 1 menunjukkan opini auditor selain wajar, dan angka 0 menunjukkan opini auditor wajar. Seperti pendapat Tugiman (2015), menyatakan bahwa pengendalian intern organisasi yang memadai akan ditunjukkan dalam opini auditor ekstern dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi logistik, yang diolah dengan menggunakan software SPSS. Adapun model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Fr = \beta_0 + \beta_1 MR + \beta_2 AI + \beta_3 O + \varepsilon$$

Dalam hal ini: (FR): Fraud, diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 jika perusahaan adalah manipulator dan 0 jika non manipulator; (MR): Manajemen Risiko, diukur dari jumlah pengungkapan risiko; (AI): Efektivitas fungsi pengendalian intern, diukur dari tingkat independensi fungsi auditor intern dalam perusahaan; (O): Opini auditor ekstern; (ε): *error term*

Setelah dilakukan pengolahan data, maka akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Hipotesis penelitian akan didukung jika nilai signifikansi t dari hasil pengolahan regresi menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 5%.

Untuk menentukan perusahaan manipulator atau non-manipulator, diidentifikasi dengan menggunakan analisis Beneish M-Score. Apabila nilai M-Score di bawah -2.22 maka kemungkinan perusahaan tersebut *prudent*, tetapi apabila M-Score lebih besar dari -2.22 maka kemungkinan perusahaan tersebut melakukan manipulasi pada laporan keuangannya.

Data dan Pembahasan

Tahun amatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai 2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel. Adapun gambaran data penelitian ini ditunjukkan dalam table 1 berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi

	Kriteria	Jumlah	Prosentase
Posisi AI	1	28	0.62
	2	17	0.38
		45	
Risiko	3	6	0.13
	4	4	0.09
	5	4	0.09
	7	1	0.02
	8	30	0.67
	45		
Opini	1	37	0.82
	0	8	0.18
		45	
Fraud	1	42	0.93
	0	3	0.07
		45	

Posisi auditor intern dalam perusahaan dikategorikan ke dalam tingkatan independensinya. Tingkat independen tertinggi adalah diberi nilai 1, yaitu posisi auditor berada di bawah presiden/direktur/dewan komisaris. Berdasarkan amatan, maka sebagian besar posisi auditor intern adalah sangat independen (62%). Sedangkan posisi auditor intern di bawah direktur utama diberi angka 2. Sebanyak 38% posisi auditor intern dalam amatan adalah kurang independen. Semakin independen posisi auditor intern, maka semakin rendah kemungkinan adanya fraud di dalam perusahaan.

Jumlah pengungkapan risiko paling banyak adalah 8 tipe risiko, yaitu sebanyak 67%. Jumlah pengungkapan yang semakin banyak menunjukkan transparansi informasi perusahaan. Sehingga hal ini akan menekan adanya fraud di dalam perusahaan.

Opini auditor yang diberikan sebagian besar (83%) adalah wajar tanpa pengecualian. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak perbankan sudah wajar dan bebas dari salah saji material dan fraud.

Sedangkan indikasi adanya perusahaan melakukan fraud adalah relative kecil, yaitu hanya 7%. Hal ini dikarenakan untuk menilai perusahaan benar-benar melakukan fraud hanya melalui pengukuran. Selain itu tingginya regulasi perbankan akan sangat menekan kemungkinan perusahaan perbankan melakukan fraud.

Berdasarkan analisis regresi logistic, maka table 2 ditunjukkan hasil analisis regresi.

Tabel 2. Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a AI	18.608	8680.825	.000	1	.998	1.206E8
RISK	-14.188	3299.878	.000	1	.997	.000
OPINI	.916	1.378	.442	1	.506	2.500
Constant	95.998	27789.662	.000	1	.997	4.913E41

a. Variable(s) entered on step 1: AI, RISK, OPINI.

Berdasarkan hasil olah regresi logistic diketahui bahwa tidak ada satu variable independen yang mampu memprediksi perusahaan perbankan melakukan fraud. Hal ini dikarenakan beberapa factor. Jika dilihat dari distribusi frekuensi data yang ada pada table 1 di atas, maka sebagian besar perusahaan perbankan sudah mematuhi regulasi perbankan dengan baik. Auditor internal sudah memiliki tingkat independensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga bisa menekan adanya indikasi fraud dalam pelaporan keuangan serta mampu mengevaluasi efektivitas pengendalian perusahaan, yang manahal ini punya peranan penting terhadap tindakan fraud. Banyaknya jumlah pengungkapan risiko menandakan keterbukaan informasi perusahaan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan, maka semakin sedikit risiko fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan fraud biasanya akan membatasi jumlah pengungkapan informasi, hal ini dilakukan untuk menutupi informasi yang tidak akurat.

Sebagian besar opini auditor adalah wajar tanpa pengecualian. Berarti perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang berlaku serta tidak mengandung salah saji material dan fraud. Auditor menjamin kebenaran akan opini tersebut, karena apabila auditor bertindak gegabah dalam memberikan opini, maka bisa diberi sanksi baik profesi maupun oleh klien-kliennya. Selain itu tingginya regulasi perbankan akan menuntut perusahaan untuk patuh terhadap regulasi tersebut, sehingga akan berpikir panjang apabila melakukan fraud.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah menguji factor-faktor organisasional perusahaan perbankan yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan perbankan melakukan fraud. Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa tidak ada factor organisasional yang mampu mengindikasikan perusahaan perbankan melakukan fraud.

Berdasarkan distribusi frekuensi, maka sebagian besar perusahaan perbankan sudah menjalankan atau mematuhi regulasi perbankan dengan bagi. Posisi dan sikap auditor intern yang sangat independen, tingkat pengungkapan informasi yang tinggi, serta kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan yang tinggi hal ini bisa dilihat dari opini auditor yang diberikan.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, antara lain adalah pengukuran perusahaan melakukan fraud menggunakan prediksi. Sehingga tidak mampu memberikan gambaran fraud yang sesungguhnya. Sehingga untuk penelitian berikutnya bisa mengenakan prediksi yang lebih akurat. Selain hal itu, pengukuran organisasional hanya menggunakan jumlah pengungkapan risiko dan posisi auditor intern. Penelitian berikutnya bisa menggunakan ukuran yang berbeda dan menambah variable penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L Spica dan Retrinasari Ika, 2007, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengaruh dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI, Proceedings Seminar Nasional FE Universitas Trisakti, hal 1-14 .
- Amran, Azlan, A.M. Rosli Bin dan B. C. H. Mohd Hassan, 2009, Risk Reporting: An Explanatory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Reports, Managerial Auditing Journal, Vol. 24 No. 1, pp. 39-57.
- Amiruddin dan Sundari, 2012, Fraud: Bagaimana Mendeteksinya?, Repository Unhas.
- Beasley, M.S., 1996, An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud, The Accounting Review, pp. 443-465.
- Bell, T.B. & Carcello, J.V, 2006, A Decision Aid for Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting, Auditing 19 (1), pp. 169-184.
- Carcello, J., Neal, T., 2000, Audit Committee Composition and Auditor Reporting, The Accounting Review 75(4): pp. 453-457.
- Dechow, P. M., R.G. Sloan, and A.P. Sweeney, 1996, Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC, Contemporary Accounting Research, pp. 1-36.

- Suhardjanto Djoko dan Dewi Aryane, 2011, Pengungkapan Risiko Financial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 15 (1): p. 105-118.
- Fama, Eugene F and Michael C. Jensen, 1983, Agency Problems and Residual Claims, *Journal of Law & Economics*, Vol 26.
- ICAEW, 2002, Mandatory Rotation of Audit Firms (ICAE: London), <http://www.icaew.co.uk/publicassets>.
- James, K, (2003), The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention, *Accounting Horizons*, Vol. 17 No. 4, pp. 315-327.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Lobbecke. J.K., Eining M.M., & Willingham, J.J, 1989, Auditor's Experience with Material Irregularities Frequency, Nature, and Detectability, *Auditing* 9(1), pp. 1-28.
- Matoussi Hamadi and Ines Gharbi, 2011, Board Independence And Corporate Fraud: The Case Of Tunisian Firms, *The Economic Research Forum (ERF)*, www.erf.org.eg.
- Meizaroh dan Lucyanda, J, 2011, Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Banda Aceh.
- Oliveria, Jonas, Lucia Lima Rodrigues and Russel Craig, 2011, Risk-Related Disclosures by Non-Financial Companies, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26, No. 9, pp. 817-839.
- Simanjuntak, Binsar H dan Widiastuti, Lusy, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Tugiman Hiro, 2015, Perkembangan dan Tuntutan Peran Auditor Internal Saat ini, *Kongres Nasional Akuntan XII dan HUT Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Young, M.R., 2000, *Accounting Irregularities and Financial Fraud*, Harcourt Inc., San Diego.

POLA KONSUMSI MEDIA TV MASYARAKAT MENJELANG ERA PENYIARAN DIGITAL DI INDONESIA

Agung Prabowo, Kurnia Arofah

FISIP UPN _Veteran_ Yogyakarta

email: Agoeng_prab@yahoo.com

FISIP UPN _Veteran_ Yogyakarta

email: Nia.tjiptono@gmail.com

Abstract

The series of activities in the framework of the migration of analog to digital broadcasting has been implemented. In accordance with the digital broadcasting migration roadmap, in 2017 it should be broadcasting in Indonesia is using digital technology. A series of processes that have been implemented to produce large capital players who will dominate the digital broadcasting industry. While local players are small capital did not get a chance. In addition to problems at the level of regulation, socialization and preparation in the community as an end user technology is also not addressed. While consumer education looks very minimal with yet shown by the public knowledge about the policies and digital technology. The research carried out in the digital village and using the qualitative approach. Data was collected by indepth interview and focus group discussion. The result shows that public knowledge about migration and also digital TV is very poor. In the other hand, public is already familiar with smartphone to consume the media

Keywords: *Digital TV, Migration, Digital Media education.*

PENDAHULUAN

Migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital merupakan suatu keniscayaan. Meskipun di Indonesia proses ini mengalami penundaan, bukan berarti teknologi analog akan terus dipertahankan. Saat ini seluruh negara di benua Eropa, Amerika dan Australia telah menyelesaikan proses migrasi. Kondisi global menunjukkan bahwa 85% wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan televisi digital. Jepang melakukan analog *switch off* pada Juli 2011, Korea Desember 2012, China tahun 2012, UK Oktober 2012. Di sebagian besar negara Asia, kecuali negara di Asia Barat, juga hampir selesai. Di Asean Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam peralihan teknologi penyiaran digital.

Siaran TV digital di Laos sudah dimulai pada tahun 2007 dengan menggunakan teknologi *Digital Terrestrial Multimedia Broadcast* (DTMB) seperti yang digunakan Cina dan diprediksi akan melakukan *analogue switch off* pada tahun 2020. Sedangkan di Kamboja, telah memulai siaran digital pada September 2015. Laos menggunakan teknologi DTMB Korea Selatan dan *Digital Video Broadcasting Terrestrial* (DVBT) Eropa dan telah mengoperasikan 60 channel digital baik nasional dan internasional. Saat ini siaran TV digital Kamboja telah menjangkau 70 persen populasi.

Di Vietnam migrasi digital dipersiapkan lebih rapih. Pesawat TV yang berukuran lebih dari 32 inches di pasaran sudah harus dilengkapi dengan tuner digital. Artinya konsumen terlindungi dari upaya curi gudang pabrikan untuk menghabiskan stok pesawat TV analog. Vietnam menggunakan teknologi sistem DVB-T2?MPEG4 yang menggantikan sistem DVBT/MPEG2 sebelumnya. Negara yang masuk Asean belakangan ini melakukan *analogue switch off* di provinsi Danang pada 2015 kemarin. Singapura merupakan negara yang progresif dalam melakukan migrasi. Negara _kecil_ ini telah melakukan *switch off*

siaran analog pada tahun 2016 ini dengan menggunakan sistem teknologi yang sama dengan yang akan digunakan Indonesia, yaitu DVB-T2. Sedangkan di Brunei akan melakukan *switch off* pada Juni 2014, Malaysia Desember 2015, Singapura tahun 2015, Thailand dan Filipina 2015. (<http://www.tvdigital.kominfo.go.id>).

Indonesia merencanakan *switch off* pada 2012. Namun rencana tersebut sepertinya masih belum jelas mengingat hingga awal 2016 ini, *analog switch off* belum bisa dilaksanakan. Proses digitalisasi penyiaran terestrial di Indonesia tertunda lantaran Permenkominfo no 22 tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran TV digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) dibatalkan oleh PTUN dan diperkuat oleh PTTUN Jakarta atas gugatan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) yang didukung oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Kompleksitas tahapan migrasi, terutama kasus Indonesia, adalah begitu banyaknya pelaku industri penyiaran dengan kondisi kekuatan modal yang berbeda. Kompleksitas ini berdampak pada rumitnya pembuatan regulasi yang harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan stake holder. Kerumitan inilah yang akhirnya memunculkan gugatan oleh asosiasi TV lokal yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi dalam regulasi yang ada. Permenkominfo no 22 tahun 2011 dianggap hanya berpihak kepada pemodal besar dan tidak mengayomi pemain lokal yang berniat berpartisipasi dalam dunia penyiaran digital.

Proses migrasi penyiaran paling tidak membutuhkan persiapan pada dua level. Pertama level regulasi, yang menyangkut seperangkat aturan yang dipakai sebagai pedoman bagi para pelaku industri penyiaran. Kedua level publik yang merupakan sasaran (*end user*) dari industri ini. Tahapan peralihan sebenarnya bisa dilakukan pemerintah dengan terlebih dahulu menyelesaikan segala persoalan regulasi dan selanjutnya dengan sendirinya publik akan menyesuaikan perkembangan teknologi ini. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Jerman yang beranggapan bahwa masyarakat yang mampu akan segera mengadopsi dan yang kurang mampu akan pelan-pelan menyesuaikan diri. Namun cara ini jelas tidak pluralis. Masyarakat diposisikan sebagai objek yang tidak punya pilihan dan 'dipaksa' untuk mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintahnya.

Sementara pendekatan yang lebih baik adalah mempersiapkan keduanya, baik regulasi yang menyangkut pelaku industri maupun publik sebagai pengguna secara proporsional. Artinya industri diberi insentif kemudahan untuk mempersiapkan diri dan masyarakat diberi edukasi yang juga memungkinkan untuk mempersiapkan diri.

KAJIAN LITERATUR

Sambil menunggu selesainya pembahasan revisi UU penyiaran di DPR, saat ini Kemenkominfo kembali melakukan siaran uji coba TV digital. Siaran dimulai pada 15 Juni hingga 15 Desember 2016 dan memungkinkan untuk diperpanjang. Uji coba ini bersifat non komersial dan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia, TVRI, penyedia konten dan industri perangkat. Tidak seperti sebelumnya yang melibatkan konsorsium televisi, pada uji coba kali ini diikuti oleh 36 perusahaan dari berbagai daerah.

Pengalaman di beberapa negara dalam melakukan migrasi penyiaran analog ke digital menunjukkan banyak hal yang harus dipikirkan dan dikelola secara cermat. Di Inggris misalnya, persiapan untuk proses tersebut dilakukan selama 17 tahun dengan mengadakan sekian serial studi mendalam dan simultan tentang perilaku penonton, daya beli masyarakat, *cost benefit analysis*, aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi tersebut, kesiapan teknologi, standarisasi teknologi, sampai pada serangkaian regulasi yang harus dipersiapkan untuk mengaturnya. Bahkan di Inggris, juga dipersiapkan langkah-langkah jangka panjang untuk mengelola pesawat TV analog yang tidak dipakai lagi oleh masyarakat.

Untuk kasus Indonesia, pengetahuan responden tentang rencana pemerintah untuk melakukan migrasi teknologi penyiaran masih sangat rendah (Prabowo dan Arofah, 2015). Penelitian dilakukan di RT 36 Tamansari Yogyakarta merupakan masyarakat melek internet. Kampung ini dijuluki -Kampung CyberII. Namun demikian, pengetahuan mereka tentang rencana pengembangan penyiaran digital masih rendah. Demikian halnya mengenai pengetahuan tentang seputar teknologi penyiaran digital dan keuntungannya bagi masyarakat. Artinya persiapan infrastruktur apa saja yang harus mereka siapkan, sama sekali belum diketahui. Sisi lain yang menarik adalah meskipun pengetahuan mereka tentang rencana digitalisasi penyiaran rendah, namun pola konsumsi media mereka sudah mendukung untuk beradaptasi dengan penyiaran digital.

Hingga saat ini pemerintah melalui kementerian Kominfo masih menayangkan iklan mengenai TV digital di TVRI. Namun karena minat masyarakat untuk menonton TVRI menurun, iklan ini seperti tidak menjadi agenda publik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah disain pendidikan publik mengenai TV digital. Mendasarkan pada hasil penelitian tahun pertama dimana hampir seluruh responden mengkonsumsi media baru, maka rekayasa disain penelitian ini berbasis pada media baru dengan asumsi akan mampu menjangkau lebih besar audiens secara personal.

Sosialisasi Penyiaran Digital di Indonesia

Sejak niat untuk melakukan migrasi teknologi digital dicanangkan, persiapan pemerintah lebih terfokus pada aspek industrinya saja. Itupun terbatas pada wilayah yang hanya bisa diakses pemodal besar dan kunci bisnis di industri ini, seperti masalah pengelola *multiplexing*. Hingga sebelum semua regulasi tentang digitalisasi penyiaran dianulir oleh MA, pemerintah telah menyelesaikan lelang pengelola *multiplexing* di 15 zona layanan. Hasilnya sudah diduga, pemenangnya adalah industri penyiaran bermodal besar, seperti MNC grup, Media Indonesia, Trans Corp dan lainnya.

Logika pemerintah lebih mengutamakan pemain besar menjadi mudah dibaca manakala memafhumkan bahwa industri ini adalah industri padat modal. Logika yang dibangun lebih pada logika otoritarianisme. Publik diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki banyak pilihan. Ketika teknologi digital sudah beroperasi, hanya ada dua pilihan bagi publik, mengganti perangkat televisi atau tidak bisa menerima siaran. Untuk mengganti pun sosialisasi mengenai perangkat apa yang harus diganti atau ditambahkan, dimana memperolehnya, berapa harganya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ini tidak dikomunikasikan secara optimal.

Untuk menghadapi migrasi dari televisi analog ke televisi digital, salah satu TV lokal di Yogyakarta mengaku sama sekali belum melakukan persiapan atau menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hal yang saat ini sedang dipikirkan adalah bagaimana dengan keputusan yang telah dibuat seperti siaran berjaringan yang harus dimulai Desember 2008, tetapi praktiknya belum seperti yang diatur di dalam UU. Pengelola stasiun tersebut sedang menunggu keputusan lebih lanjut, termasuk di dalamnya spesifikasi perangkat teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan siaran TV digital.

Model digital yang paling sesuai menurut pengelola stasiun TV lokal adalah model TV Lokal seperti yang ada sekarang ini. Namun sampai saat ini masih belum ada regulasinya. Kondisi sekarang kalau PH mau memasok program sudah dapat dilakukan. PH harus mempunyai sponsor dan membeli jam tayang di televisi lokal. Sampai saat ini pengaturan *traffic* siaran tv lokal masih sangat rumit. Apalagi kalau harus menerima program dari PH maka akan lebih rumit lagi.

Digitalisasi dipandang akan membuat banyak peluang PH untuk memproduksi. TV yang diberi hak siar bisa menyiarkan lebih banyak program. Masalahnya adalah apakah TV yang punya frekuensi mampu membeli program dari PH. Apabila tidak mampu, maka mereka akan memproduksi sendiri karena dari segi ekonomi dirasa lebih praktis dan efisien. Wacana PH masih baru sebatas wacananya pemerintah. Bagi TV lokal praktik seperti itu masih dirasa sangat jauh.

Bagi stasiun TV lokal perubahan total harus dilakukan mulai dari perubahan transmiter. Pada rencana digitalisasi saat ini, posisi TV lokal masih menunggu. Akan lebih baik apabila terlebih dahulu *pilot project* yang direncanakan dimatangkan. Selanjutnya dibuat disain yang pas dan sesuai dengan kondisi industri TV lokal. TV lokal merasa selalu menjadi obyek dan dianaktirikan dibanding dengan TV Jakarta. Hal itu bisa dilihat dari keputusan televisi berjaringan yang belum ada tindak lanjutnya. Penataan frekuensi belum mengarah pada *diversity of content maupun ownership*. Realitas di lapangan praktik kebijakan tersebut masih mengambang.

Apabila proses digitalisasi antara TV lokal dengan TV Jakarta tidak bersamaan, maka tv lokal akan ketinggalan. Belum jelasnya regulasi, apakah TV Jakarta akan berjaringan dengan tv lokal ketika diberlakukan digitalisasi atau tidak, inipun membingungkan pengelola TV lokal. Sementara praktik dari aturan UU penyiaran seperti siaran nasional empat jam selebihnya untuk siaran tv lokal, belum teralisasi sebagaimana yang diharapkan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh kedalaman informasi mengenai pola perilaku penggunaan media TV maupun media digital di masyarakat. Penelitian dilakukan di lingkungan -Kampung Cyberl RT 36 Tamansari Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena sudah dapat pengakuan sebagai kampung yang -melek teknologi informasi, sehingga diasumsikan memiliki indikator yang lebih terukur untuk tujuan penelitian ini.

Data akan dikumpulkan dengan cara:

1. Survei dengan menggunakan daftar pertanyaan. Survey dilakukan terhadap rumahtangga di wilayah obyek penelitian.
2. Fokus Group discussion untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dari hasil survei tersebut. FGD akan melibatkan baik rumah tangga penduduk pendatang ataupun penduduk asli dengan kriteria tingkat ekonominya.
3. Pengamatan perilaku menonton TV rumah tangga di wilayah Wedomartani. Pengamatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman terhadap *habit* mereka berkaitan dengan media TV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti banyak disampaikan oleh pelaku dan pemerhati penyiaran, bahwa persiapan pemerintah untuk melakukan migrasi ke teknologi digital tidak disosialikan dengan baik. Pelaku industri penyiaran, terutama TV lokal. Maka tidak mengherankan apabila asosiasi TV Lokal Indonesia mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Agung Permenkominfo no 22 tahun 2012, melalui putusannya tanggal 3 april 2013. Selanjutnya, keputusan PTUN Jakarta dalam sidang putusan perkara nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, Majelis Hakim menyatakan pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi digital.

Di pihak masyarakat sendiri terungkap bahwa mereka belum mengetahui tentang digitalisasi penyiaran. Jenis teknologi televisi saja dari 20 informan mengaku tidak tahu. Terdapat 5 (lima) informan yang mengaku tahu teknologi TV digital, namun ketika ditanya

mengenai perbedaan antara TV digital dan analog hanya 1 (satu) responden yang bisa menjawab. Itupun jawaban yang sangat mendasar mengenai TV digital.

Dilihat dari aspek pendidikannya, pengetahuan tentang TV digital dikuasai oleh informan lulusan S1. Sementara empat yang lain yang lulusan SMA, meskipun mengaku mengetahui, namun tidak bisa menjawab perbedaan antara TV analog dan TV digital. Namun ketika ditanya mengenai rencana pemerintah akan melakukan *cut off* pada tahun 2018, separuh (9 orang) menyatakan sudah tahu. Informasi ini sebenarnya tidak begitu memberi keyakinan ketika digali lebih dalam pengetahuan mereka mengenai *road map* migrasi penyiaran digital oleh pemerintah.

Informasi ini sebenarnya memperkuat beberapa fenomena yang muncul ketika peneliti mengikuti berbagai forum yang membicarakan perihal digitalisasi penyiaran. Berbagai level profesi mengungkapkan bahwa apa perbedaan TV analog dan digital, mulai dari spesifikasi pesawat penerima siaran (pesawat TV), kualitas siaran apalagi tentang teknologi siaran, jenis siaran digital maupun aspek bisnisnya.

Sosialisasi siaran perlu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan spesifikasi televisi ketika membeli televisi. Migrasi penyiaran ke digital merupakan keniscayaan, sehingga masyarakatpun harus mengikuti teknologi ini. Ketika seluruh negara di dunia telah berpindah ke teknologi digital, maka pabrikan televisi tidak lagi memproduksi pesawat TV analog. Adapun pesawat yang terlanjur diproduksi analog, akan dilempar di pasar dan menyasar pembeli yang tidak faham teknologi. Hal inilah yang menjadikan penting bahwa pengetahuan masyarakat mengenai teknologi digital agar tidak dimanfaatkan oleh penjual televisi.

Pentingnya pengetahuan ini berkait dengan kecenderungan kepemilikan pesawat TV masyarakat. Saat ini ada kecenderungan dalam satu rumah tidak hanya terdapat satu pesawat televisi. Televisi tidak hanya tersedia di ruang keluarga, melainkan di setiap kamar terdapat televisi. Hampir 50 persen informan mengaku memiliki lebih dari satu televisi, bahkan tiga televisi di rumahnya. Apabila dikaitkan dengan pendapatan responden, kepemilikan televisi lebih dari satu tidak ditentukan oleh pendapatannya yang berlebih. Bisa dikatakan responden memiliki pendapatan rata-rata, namun kepemilikan televisi seperti menjadi prioritas. Dari fenomena ini bisa diartikan bahwa pola konsumsi siaran televisi tidak lagi komunal, melainkan mengarah ke personal.

Kebiasaan dasar untuk menghadapi era konvergensi media di sisi yang lain sudah ditunjukkan oleh informan. Kebiasaan tersebut adalah mengkonsumsi internet. Semua responden mengaku telah mengenal dan menggunakan internet. Dilihat dari polanya, informan lulusan SMA ke atas mengakses internet lebih lama dibanding pendidikan di bawahnya. Bahkan tiga di antaranya mengakses internet lebih dari 4 (empat) jam. Kebiasaan mengkonsumsi internet ini perlu ketika era penyiaran digital berlaku. Selain menyiarkan program acara, TV digital juga menyajikan menu interaktif maupun menu lain yang cara mem-*browsing*-nya mirip seperti pada internet.

Pola konsumsi yang mengarah ke personal ini memang bisa dipastikan bahwa kebutuhan mobile TV (TV bergerak) akan meningkat. Artinya televisi akan selalu menyertai keberadaan individu. Kebutuhan ini hanya bisa dipenuhi oleh teknologi digital. Perkembangan *device* yang semakin simpel dan portabel, seperti smartphone, ikut mempengaruhi perubahan pola menonton TV. Beberapa pabrikan *handphone* (HP) mengantisipasi kebutuhan ini dengan memproduksi HP yang sekaligus sebagai receiver siaran TV. Namun teknologinya masih analog. Perkembangan berikutnya memang jenis HP seperti ini tidak begitu berkembang karena *broadcaster* sudah mulai berpindah ke digital.

Saat ini *broadcaster* yang tertarik bermain di wilayah *streaming* TV semakin banyak. Didukung oleh perkembangan teknologi smartphone yang semakin canggih, konvergensi media memupuk semakin cepatnya era konvergensi media. Jumlah kanal yang

terbatas, serta kebutuhan siaran televisi yang semakin personal, maka tumbuhlah penyiaran digital mobile yang berbasis pada jasa provider telekomunikasi.

Industri lebih cepat membaca tren ini, meskipun dilihat dari respon informan, menonton televisi dari HP belum dilakukan. Ada beberapa software berbasis android yang memberi fasilitas untuk menonton mobile TV. Namun karena siaran ini berbasis internet dan membutuhkan kuota yang tidak sedikit, para responden masih belum melakukan aktivitas menonton siaran TV dari HP mereka.

Bisnis televisi memang merupakan bisnis yang seksi dan menjanjikan. Dilihat dari perilaku konsumsi televisi masyarakat memang mengindikasikan hal itu. Informan menggambarkan pola konsumsi televisi 3 – 4 jam. Dalam kategori pemirsa TV, konsumsi ini termasuk kategori hard viewer.

Kesimpulan

Pembatalan semua regulas yang berkaitan dengan televisi digital oleh MA bukan berarti migrasi penyiaran dari analog ke digital menjadi berhenti. Teknologi terus berkembang, sementara Indonesia bisa dikatakan sebagai konsumen teknologi, belum berperan sebagai produsen, khususnya teknologi penyiaran digital. Perangkat transmiter hingga receiver industri penyiaran hampir seluruhnya dikuasai negara lain. Di sisi lain negara produsen teknologi sudah bermigrasi teknologinya ke digital, sehingga tidak lagi memproduksi perangkat analog.

Sejatinya pola konsumsi dan *media habit* responden yang diamati sudah berpotensi untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital. Namun ketika ditanya mengenai permasalahan penyiaran digital di Indonesia, responden yang bisa dikatakan melek teknologi, mengaku belum mengetahui. Artinya terdapat pola sosialisasi yang kurang memadai yang dilakukan pemerintah. Selain permasalahan dengan pelaku industri belum beres, migrasi ke teknologi digital juga masih menghadapi persoalan di tingkat konsumennya.

Rekomendasi untuk disain sosialisasi kepada publik mengenai penyiaran digital adalah melalui media sosial, terutama instagram. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil *Focus Group Discussion* (FGD), kecenderungan konsumsi media sosial yang semakin meningkat di kalangan generasi muda yang di sisi lain merupakan generasi emas penyiaran digital. Sementara media instagram dipilih karena memiliki kemampuan hiperteks yang lebih efektif untuk dibanding media yang lain.

Daftar Pustaka

- Braet, Olivier, Ballon, Pieter**, 2008, *Cooperation Models for Mobile Television in Europe*, *Telematics and Informatics* 25 (2008), 216-236
- Drury, et al.**, 2001, *Coding and Modulation for Digital Television*, Kluwer Academic Publishers, Norwell Massachusetts
- Prabowo, Agung dan Nia Arofah**, 2015. *Information and Communication Technology dan Literasi Media Digital*. Surabaya: Aspikom
- Shin, Dong H**, 2006, *Socio-Technical Challenges in The Development of Digital Multimedia Broadcasting : A Survey of Korean Mobile Television Development*, *Technological Forecasting and Social Change*, 73 (2006), 1144-1160

Strabhaar, LaRose, 2000, Media Now, *Communication Media in Information Age*, Wadsworth, Belmont USA.

Tayadoni, et al , 1999, *Terrestrial Digital Broadcasting : Convergence and Its Regulatory Implications*, Telecommunications Policy 23 (1999) : 175-199

Weber, Joseph, Newberry, Tom, 2007, *IPTV Crash Course*, McGraw Hill, New York

Wibawa, Arif, Afifi, Prabowo, 2012, Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, nomor 2, Mei-Agustus 2010.

PENGGUNAAN E-DIPLOMACY PADA SITUS PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Rudi Wibowo, FISIP UPNVY

email: rudiretno@yahoo.com

Edwi Arief Sosiawan, FISIP, UPNVY

email: edwias@upnyk.ac.id

Abstract

Conditions of globalization requires each country to collaborate state and non-state actors in international relations diplomacy. The increasing convergence and the use of communication technology makes the capabilities relations and diplomacy is increasing and increasing. One way to gain support diplomacy performance and relationships is through e-diplomacy. All state and non-state actors have the opportunity to build a network of communication technologies in order to have the opportunity to make cooperation with all international actors. E-diplomacy plays an important role to support the activities of branding, relationships and transactions with other countries. But several obstacles is faced by some countries and non-state actors in the implementation of e-diplomacy. Those problems are located in the field of technical and content in addition to serious persolanan in the field of human resources and policy orientation for optimum use of the various media in e diplomacy.

Keywords: e - diplomacy, the Internet, globalization

PENDAHULUAN

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi inilah sebuah negara dapat membangun image atau citra tentang dirinya dalam kerangka membangun nilai tawar atau state branding.

Perkembangan diplomasi pada awalnya didominasi oleh negara. Negara melalui Departemen Luar Negerinya menerapkan praktek-praktek diplomasi yang berkaitan dengan masalah kenegaraan seperti perjanjian internasional, konferensi internasional, hubungan bilateral, hubungan multilateral dan sebagainya.

Dalam konteks perkembangan informasi, kemajuan teknologi internet semakin mempermudah komunikasi antar aktor dalam hubungan internasional.. Dalam hubungan dunia internasional fungsi internet memiliki banyak manfaat. Fakta ini, terlihat dari aktifitas penggunaan internet ini dalam berbagai bidang kehidupan mulai ekonomi, politik, budaya, serta diplomasi. Perkembangan teknologi internet telah merubah praktek diplomasi yang selama ini didominasi oleh pemerintah di sebuah negara. Perkembangan teknologi internet ini menjadikan diplomat tidak lagi sebagai aktor satu-satunya yang mengurus dan berperan dalam hubungan antar negara. sehingga menyebabkan metode diplomasi tradisional yang didominasi oleh diplomat semakin kabur.

Diplomasi elektronik secara umum dapat dipahami sebagai pemanfaatan web serta teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu mencapai tujuan diplomatik suatu negara. Konsep e-diplomasi ini muncul dan berkembang sebagai respon pemerintah terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Diplomasi elektronik dijalankan dengan harapan adanya transparansi kinerja pemerintah yang dapat membawa dampak positif terhadap kinerja pemerintah tersebut (Champion & Danby, 2012).

Beberapa pengambil keputusan pada negara-negara yang telah maju melihat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini sebagai sebuah peluang untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif dan efisien baik kepada masyarakat di lingkup domestik maupun kepada masyarakat internasional. Selain itu penggunaan e diplomacy yang semakin meluas juga dikarenakan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan negara dan didukung dengan tingkat penguasaan teknologi yang semakin tinggi.

Untuk menunjang kinerja multi jalur diplomasi, maka pada akhir tahun 2007 Kemlu RI membuat portal yang mengintegrasikan setiap perwakilan RI di seluruh dunia. Ini juga merupakan suatu jawaban terhadap kekurangan atau tantangan pelaksanaan diplomasi publik yang sebelumnya ditujukan publik terhadap Kemlu RI.

Namun, walaupun ketersediaan sarana untuk mengakses *e-diplomacy* semakin meningkat, hambatan dan tantangan implementasi pelaksanaan *e-diplomacy* secara umum masih tetap ada. Pada tataran implementasi di lapangan penerapannya masih amat berserak. Beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *e-diplomacy* di Indonesia adalah sebagai berikut : a). Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Artinya distribusi infra struktur untuk keperluan *e-diplomacy* di semua lembaga-lembaga negara yang melakukan praktek *e-diplomacy* masih belum merata b). Langkanya sumber daya manusia (SDM) yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang relatif baru. Lembaga pemerintah umumnya masih jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-diplomacy*.

Sumber Daya Manusia (SDM) selaku *brainware* merupakan faktor penentu utama keberhasilan di bidang pengembangan e-government dan tidak dapat ditawar lagi, karena perannya yang sangat strategis akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam implementasinya. Kesiapan hardware dan software yang cukup canggih saja belumlah cukup apabila tidak diimbangi dengan dukungan brainware atau sumber daya manusia yang memadai, karena posisi manusia secara utuh dalam perannya sebagai perencana, pelaksana dan pengendali serta pengevaluasi terhadap jalannya proses masih belum ada yang menggantikannya. c). Pada sisi lain pemanfaatan teknologi informasi masih merupakan unsur yang sensitif bagi suatu misi diplomatik karena terjadinya ketimpangan teknologi antar negara yang sedang menjalin hubungan dan kerja sama

Secara umum, sebenarnya pembangunan web lembaga pemerintahan memiliki dua fungsi utama. Pertama, penerapan e-government atau penerapan fungsi pemerintahan melalui internet. Dalam fungsi ini, pemerintah melalui web site-nya memberikan informasi tentang kegiatan pemerintahan, kebijakan pemerintah, layanan publik seperti saran dan tanya jawab antara pemerintah dengan masyarakat. Kedua, berkaitan dengan *e-diplomacy* atau peluang hubungan dengan berbagai pihak diluar negeri. Mengingat cakupan layanan internet meliputi seluruh dunia maka penggunaan web site menjadi sangat efektif untuk

mempromosikan kekayaan dan keunikan yang dimiliki negara serta dalam menjalin hubungan kerjasama internasional.

Beberapa penelitian tentang web site lembaga pemerintah di Indonesia dalam konteks keperluan e-diplomacy menunjukkan bahwa pembuatan situs e-diplomacy lembaga pemerintah masih banyak memiliki kekurangan, baik dari sisi tampilan dan terutama pada isi, informasi yang ditampilkan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Seger Hasani³ (n.d mencatat bahwa penggunaan web site e-diplomacy lembaga pemerintah sebagai sarana untuk mempromosikan potensi wisata negara dan hubungan diplomatik berjalan tidak efektif karena kadang dibangun dengan sederhana dan kurang interaktif. penelitian tersebut juga menunjukkan web site e-diplomacy lembaga pemerintah memiliki banyak kelemahan , baik secara teknik maupun isi (technical and content)

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menjawab dan memberikan penjelasan fenomena manajemen e-diplomacy oleh pihak lembaga-lembaga negara sebagai media diplomasi dalam kaitannya hubungan antara negara di bidang politik, ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu maka penelitian ini, mengambil rumusan masalah : “ **Bagaimana implementasi manajemen e-diplomacy melalui situs lembaga negara Pemerintah Republik Indonesia ?** “

KAJIAN LITERATUR

E-Diplomasi

Metode diplomasi baru dalam dunia maya, banyak terminology seperti *-cyber diplomacy*”, *“internet diplomacy*”, *“digital diplomacy*”, dan *e-diplomacy*, diciptakan dan relevan dalam penelitian akademik. *E-diplomacy* sendiri merupakan salah satu kesempatan yang diberikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi global yaitu internet. Dalam diplomasi internet telah berhasil mendemokratisasikan diplomasi dalam bentuknya yang unik. Diplomasi dengan menggunakan internet sendiri merupakan salah satu cara dalam melakukan diplomasi yang pada gilirannya akan memberikan akses yang sangat luas kepada aktor-aktor lain selain negara yang sangat banyak untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dikenal (Oktavia Maludin: 2001).

E-Diplomacy ini merupakan untuk sarana khusus dalam berdiplomasi yang menitikberatkan pada usaha memperoleh dan mengelola informasi yang berkaitan dengan diplomasi melalui internet.

Konsep *e-diplomacy* merupakan sebuah sarana khusus dalam berdiplomasi yang menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan diplomasi melalui internet. E-diplomacy juga dibangun untuk merespon informasi-informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan negara yang dilakukan di dunia maya.

Ketika berbicara tentang diplomasi Internet, beberapa sarjana menempatkan definisi ke depan spesifik tentang hal itu dari perspektif yang berbeda. Yang pertama berfokus pada pengaruh teknologi internet. Jamie F. Metz menyatakan bahwa "jaringan yang fleksibel dan lincah, terus-menerus dapat mengkonfigurasi ulang sendiri untuk mengatasi tantangan baru. Dan biaya yang lebih rendah dari tindakan kolektif, membuat kelompok-kelompok besar dan berbeda lebih mampu mengatur dan peristiwa pengaruh dari sebelumnya (Jamie F. Metz: 2001, 85). Yang lain adalah dari perspektif diplomatik Elloit Zunpick menguraikan

metode untuk mengatasi urusan luar negeri dan hubungan internasional melalui alat teknologi komunikasi internet (Elliot Zupnick: 1999, 8-11).

Niat diplomasi internet adalah untuk menjaga dan mempromosikannya politik, ekonomi, militer dan wisata budaya. Dan modus diplomatik adalah untuk melakukan pertukaran internasional dan komunikasi dengan menggunakan teknologi internet.

Pemetaan ini menunjukkan bagaimana *e-diplomacy* sedang dimanfaatkan di negara dan penyebaran cepat dan menyebar luas di seluruh Departemen (Fergus Hanson: 2012, 3). Secara tradisional, diplomasi bersifat tertutup dan hanya dilakukan oleh para diplomat dan wakil-wakil pemerintah resmi. Sedangkan era keterbukaan tidak memungkinkan untuk menutup informasi dan mempertahankan kerahasiaan dan kepemilikan informasi secara eksklusif. Lebih jauh lagi, ide dan modal bergerak cepat dan tidak dapat dihalangi di antara jaringan global pemerintah, perusahaan dan organisasi-organisasi swasta.

Pada dasarnya perkembangan teknologi informasi ini telah meningkatkan tuntutan keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan dalam hubungan global. Menanggapi perkembangan ini kemudian muncul konsep-konsep seperti virtual diplomacy atau diplomacy without diplomat. Oleh karena itu setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan dengan luar negeri saat ini dituntut untuk dipublikasikan kepada publik. Perkembangan diplomasi ini telah mengubah praktik diplomasi tradisional dan menurunkan peran Duta Besar dan para diplomat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dengan pendekatan multidisipliner serta kajian secara kritis. Metode kualitatif sendiri merupakan pemaparan fakta-fakta untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada suasana alamiah yang memaparkan situasi atau peristiwa. (Rakhmat, 45, 1999).

Data penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer akan mencakup hasil analisis isi dan content dalam penggunaan web oleh lembaga pemerintahan untuk diplomasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen terkait, jurnal dan internet. Dalam menganalisis penelitian terlebih dahulu akan melakukan klasifikasi, diverifikasi dan diinterpretasikan

Pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu pengujian dengan jalan meminta sumber lain sebagai pembanding hasil penelitian dan untuk lebih meyakinkan pernyataan yang ada. Pengujian ini dilakukan melalui diskusi dengan para ahli politik dan ahli komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum E-diplomacy di Indonesia

E-Diplomacy merupakan bentuk diplomasi modern yang melibatkan publik sebagai negosiator yang berperan dalam pelaksanaan mencapai sebuah kepentingan melalui wadah internet sebagai media komunikasi dan informasi antara pihak- pihak yang berdiplomasi yang akhirnya akan mencapai pada tingkat negosiasi. Untuk memparsemonikan penelitian ini maka peneliti menspesifikan bidang *e diplomacy* pada penggunaan dan pemanfaatan website sebagai bagian dari media *e-diplomacy*.

***E-diplomacy* lembaga resmi negara**

1. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Lembaga resmi pelaksana diplomasi negara yang utama adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga pilar kementerian (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Oleh karena itu kementerian ini memiliki posisi penting dalam diplomasi.

E-Diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu adalah memanfaatkan web sebagai media informasi diplomatik. Web Kemenlu beralamat di kemlu.go.id. Pemberian alamat ini sudah sesuai domain web pemerintahan yang menggunakan sub domain go dan id sebagai sub domain lembaga resmi negara. Secara *front office* web Kemenlu memiliki banyak menu namun penempatan menu yang berada pada posisi *balance* menyebabkan mudah untuk mencari fasilitas informasi yang ditawarkan dalam setiap menu.

Web kemenlu disediakan dalam bentuk 2 versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Point menarik adalah dalam web Kemenlu disediakan menu dokumentasi siaran pers (*press release*), sorotan media (*media corner*) dan informasi penting (*highlight*). Menu informasi tersebut merupakan penyediaan informasi diplomatik yang bersifat resmi sehingga wartawan asing maupun dalam negeri dapat mengaksesnya untuk referensi berkaitan dengan kejadian dan peristiwa diplomatik.

Meskipun terdiri dari dua versi namun *content* informasi diplomatik yang disediakan adalah kurang lebih sama. Perbedaan dari dua versi web tersebut adalah jika web dalam versi bahasa Indonesia lebih ditujukan untuk keperluan penyampaian informasi diplomatik dalam kaitannya transparansi ke publik masyarakat tentang kegiatan dan aktivitas Kemenlu. Web dalam versi bahasa Indonesia tersebut juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya tentang aktivitas yang berhubungan dengan keperluan kunjungan ke negara lain, pelaporan warga negara Indonesia di luar negeri serta pelayanan kaitannya dengan kegiatan diplomatik.



Gambar 1. Web Kemenlu

Sedangkan web Kemenlu versi bahasa Inggris tentunya lebih berorientasi ditujukan untuk keperluan kaitan relasi diplomatik dengan negara lain beserta warga negara asing yang memiliki kepentingan dengan Indonesia dalam kaitan keperluan ekonomi, sosial dan politik. Jika dibandingkan dengan web Kemenlu versi bahasa Indonesia maka web versi bahasa Inggris lebih lengkap *content* informasinya beserta informasi lain yang berkaitan dengan keperluan diplomasi.

Secara umum pemanfaatan web Kemenlu sebagai *e-diplomacy* dapat dilihat dari ketersediaan menu informasi yang berada pada *homepage* (beranda/halaman utama) dalam web Kemenlu. Ketersediaan informasi dalam web Kemenlu ini merupakan pengejawantahan salah satu tugas pokok diplomasi yaitu Memberikan informasi, bahan-bahan keterangan dan laporan mengenai perkembangan penting dunia kepada negaranya serta informasi yang dibutuhkan oleh negara lain dalam hubungan diplomatik. Menu informasi yang ada dalam web Kemenlu dibagi ke dalam beberapa menu yang meliputi : ABOUT US, NEWS MISSION, FOREIGN POLICY, VISION AND MISSION, ASEAN, ARCHIVE serta SERVICES.

Menu Informasi yang disampaikan melalui web tersebut umumnya menyampaikan tentang kebijakan serta tatanan diplomasi yang dilaksanakan oleh Kemenlu dalam melakukan relasi dengan negara lain disertai dengan penyampaian informasi umum dan general untuk konsumsi publik. Informasi yang berkaitan dengan aktivitas diplomasi diletakkan pada menu khusus yang disebelah kanan web yang memberikan kemudahan bagi mereka yang akan mengakses informasi tentang kebijakan dan tatanan politik relasi dengan negara dan waraga negara lain.

Menu services yang disediakan oleh Kemenlu dalam kaitannya dengan *e-diplomacy* meliputi : a) Consular & Visa Services yaitu merupakan pemberian informasi tentang layanan konsuler bagi dokumen visa untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam aktivitas relasi antar individu dan organisasi antar negara. b) *Protocol Guidelines* merupakan petunjuk keprotokolan bagi warga negara asing serta diplomat asing dalam kaitannya penyediaan fasilitas kenegaraan untuk keperluan urusan relasi antar negara. c) *Diplomatic Facilities* merupakan informasi berkaitan dengan penyediaan fasilitas bagi diplomat dan konsuler . d) *Media Services* yaitu menu informasi yang diperlukan bagi perijinan dan regulasi media asing dalam liputannya di negara Republik Indonesia. Pada menu ini terdapat penjelasan detail yang dikaitkan dengan liputan dan kunjungan wartawan asing selama di Indonesia.

Optimasi penggunaan teknologi komunikasi untuk keperluan *e-diplomacy* juga dilakukan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi dalam penyampaian informasi khususnya diplomasi pariwisata. Peletakan fasilitas diplomasi melalui media sosial juga berada pada posisi kanan web yang mudah dikenali dan diakses oleh pengguna web Kemenlu.

Penggunaan media sosial sebagai sarana *e-diplomacy* meliputi twitter, facebook dan youtube. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam penggunaan penyampaian informasi diplomasi. Media twitter lebih diutamakan untuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan diplomasi di jajaran Kemenlu serta Kedutaan Besar RI di negara-negara lain. Pemilihan media sosial twitter memang sudah tepat untuk penyampaian informasi yang bersifat cepat dengan karakter informasi teks, grafik dan video. Kemenlu dan KBRI diseluruh dunia memiliki link dan mention di fasilitas media sosial ini sehingga semakin mempermudah distribusi informasi diplomasi.

Sedangkan untuk media sosial facebook lebih banyak digunakan untuk menyampaikan informasi dokumentasi tentang aktivitas Kemenlu beserta KBRI yang ada di beberapa negara. Informasi yang bersifat dokumentasi tersebut umumnya berisi tentang event-event yang dilaksanakan staf Kemenlu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk media sosial youtube lebih banyak digunakan untuk dokumentasi kegiatan internal Kemenlu yang berada di Jakarta yang berisikan tentang kegiatan pelatihan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah serta kebijakan internal kemenlu. Namun walaupun bersifat dokumentatif informasi dalam media sosial ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi dengan negara lain untuk menunjukkan kapabilitas diplomat Indonesia

serta agenda acara di masing-masing KBRI yang memiliki sejumlah kegiatan promosi pariwisata dan budaya.

E-diplomacy bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari *soft diplomacy* yaitu usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan yang meliputi kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi hingga pertukaran ahli dan sebagainya. Pada bidang pariwisata maka aktor pemerintahan yang melakukan *e-diplomacy* adalah Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kegiatan *e-diplomacy* yang dilakukan Kemenpar melalui web adalah sebagai berikut :

Bila melihat web Kemenpar dengan versi bahasa Indonesia terlihat bahwa web ini belum memiliki kriteria kredibel untuk dikatakan sebagai media *e-diplomacy*. Web Kemenpar versi bahasa Indonesia hanya menampilkan informasi-informasi tentang peristiwa serta potensi pariwisata di Indonesia. Sebagai media *e-diplomacy* web Kemenpar tidak banyak menyediakan fasilitas untuk mendukung diplomasi bidang pariwisata. Informasi yang disediakan lebih berorientasi pada data statistik tentang perkembangan pariwisata dan bukannya informasi promosi wisata.

Penampilan secara *front office* juga tidak menarik sebagai sebuah web untuk kegiatan *e-diplomacy*. Pada sisi lain desain *lay out* web yang terlihat *clutter* atau tata letak yang tak beraturan, beberapa grafis tidak bisa ditampilkan penuh. Bahkan video yang disediakan sebagai promosi *e-diplomacy* secara *soft* ternyata tidak dapat diputar dan mengalami *buffering* yang sangat lama.

Kondisi yang sama juga terlihat pada web versi bahasa Inggris. Web Kemenpar versi bahasa Inggris tidak berbeda kontennya dengan web versi bahasa Indonesia yang hanya berisikan informasi dan *press release* tentang event-event agenda pariwisata di Indonesia. Fasilitas diplomasi dalam web ini dapat dikatakan tidak ada. Padahal Kemenpar merupakan lembaga negara yang seharusnya ikut terjun dalam diplomasi dalam rangka mempromosikan budaya dan pariwisata di Indonesia agar terjadi hubungan multilateral di antara negara-negara lain.

Dalam hal variasi penggunaan media sosial sebagai *e-diplomacy* sama sekali tidak digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya ada kelemahan dalam diplomasi pariwisata melalui *e-diplomacy* karena tidak optimalnya implementasi *e-diplomacy* dalam bidang pariwisata.



Gambar 2: e-diplomacy Kemenpar menggunakan web.

E-diplomacy bidang Perdagangan

Dalam hal diplomasi perdagangan dan ekonomi memang berada pada posisi sangat membutuhkan mengingat Indonesia merupakan *middle-income country* yang memiliki pengaruh penting dalam proses pembuatan kebijakan internasional.

Ekonomi Indonesia yang sudah sedemikian terbuka secara aktif terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral. Oleh karena itu peran diplomasi perdagangan menjadi sangat sentral sebagai perpanjangan kepentingan nasional pada proses negosiasi dan pembuatan kebijakan di tataran internasional.

Pelaku lembaga negara dalam hal diplomasi perdagangan adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan salah satu fungsinya memberikan telaahan mengenai masalah kerjasama perdagangan internasional serta mempertahankan aset dagang negara dalam pertukaran perdagangan dengan negara lain.

Web Kemendag versi Indonesia berisikan informasi potensi perdagangan serta data statistik yang digunakan sebagai referensi dari pelaku bisnis yang akan mengimplementasikan perdagangan antar negara. Data-informasi yang ada dalam web Kemendag terdiri dari informasi umum seputar perdagangan di Indonesia, profile ekonomi, perijinan dan publikasi perdagangan. Informasi ini juga ditambah dengan highlight ulasan intel pasar, dan informasi pameran. Informasi highlight lainnya berupa index kurs nilai tukar uang dan harga bahan pokok pangan

Banyaknya menu dalam web Kemendag menyebabkan *lay out* yang tertata terlihat penuh dan *clutter*. Secara *front office* dapat dipahami mengingat informasi dan fasilitas yang diberikan kepada publik juga beragam. Semangat dalam penyampaian informasi ke publik sebagai salah satu cara diplomasi perdagangan merupakan semangat dari adanya web Kemendag ini.

Kemendag memandang penting menyampaikan perkembangan sektor perdagangan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya karena sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam kegiatan perekonomian. Hal ini merupakan tujuan dari Situs Kemendag untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan sektor perdagangan dengan memuat informasi mengenai kebijakan perdagangan, data terbaru dalam kegiatan perdagangan Indonesia.

Web Kemendag terus diperbaiki secara terus menerus dan bertahap. Tahap dari web

Kemendag saat ini mengoptimalkan pengembangan sistem pelayanan on-line. Pengguna web Kemendag tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Karena diplomasi perdagangan harus berhubungan dengan banyak negara maka web Kemendag yang digunakan untuk diplomasi perdagangan menggunakan empat versi bahasa yang meliputi bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Jepang, China dan Korea. Pemilihan versi 3 bahasa negara di asia dimungkinkan karena Indonesia sudah memiliki intensitas yang tinggi dalam perdagangan dengan ke tiga negara tersebut.

Situs Kemendag dengan berbagai versi bahasa asing tersebut memiliki kesamaan dalam konten informasi dengan versi bahasa Indonesia. Konten yang sama dengan penambahan informasi khusus berada pada informasi *highlight* yang memang memiliki relasi dengan pengguna dan pemangku kepentingan dari negara luar.

Informasi *highlight* Info Perdagangan Kita berisikan informasi yang terbagi dalam beberapa kategori yang meliputi : a)Peluang Pasar ; berisikan peluang komoditi yang dapat diperdagangkan di berbagai negara di seluruh dunia. b)Peluang Produk ; berisikan informasi tentang produk-produk yang ditawarkan dan dicari oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari berbagai negara di seluruh dunia. c)Profil Komoditas ; berisikan komoditas unggulan dalam negeri yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dari negara lain untuk membeli ataupun menggunakan komoditas yang tersedia. d)Direktori Perusahaan ; link ini berisikan tentang informasi daftar Perusahaan eksportir terdaftar atau

resmi juga daftara perusahaan importir terdaftar. Selain dua informasi tersebut juga disediakan direktori perusahaan besar yang beroperasi di Indoensia beserta komoditas yang dihasilkan. e) Agreements ; merupakan fasilitas informasi yang menampilkan dokumen-dokumen kerjasama baik nilateral dan multilateral dalam bidang perdaganagn yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menjalankan perdagangan di Indoensia melalui pemangku kepentingan dari berbagai negara. f). Memo Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri : berisi informasi tentang kebijakan pemasangan iklan, pengawasan produk tembakau dan kebijakan perdagangan rumput laut.

Informasi highlight Profile Ekonomi berisikan informasi tentang Produk Dosmetik Bruto, Jumlah uang yang beredar, nilai Inflasi, Nilai tukar mata uang serta ekspor – impor. Masih dalam link *highlight profile* ekonomi adalah informasi Indonesia Export and Import merupakan diplomasi perdagangan dengan menampilkan neraca perdagangan ekspor dan impor Indonesia yang disertai dengan informasi detail perdagangan yang berlangsung dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

Link Informasi berikutnya adalah *Trading Index* yang berisikan informasi tentang indeks perdagangan untuk mengukur kemajuan dari arus perdagangan di Indonesia yang meliputi indeks spesialisasi perdagangan, tingkat penetrasi pasar serta indeks keunggulan komparatif.

Informasi *highlight* yang ke tiga adalah *Trade Licensing* atau Perijinan Perdagangan. Link informasi disini berisikan informasi seputar perijinan ekspor dan impor . Pada link disini disediakan fasilitas pengajuan permohonan ijin disertai dengan beberapa pelayanan yang bersifat *online* untuk mempermudah para pelaku diplomasi perdagangan mengajukan perijinan.

KESIMPULAN

Berdasar pada paparan uraian hasil penelitian dapat dianalisi dan diambil kesimpulan implementasi *e-diplomacy* di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga negara. Secara umum manajemen *e-diplomacy* telah optimal dilaksanakan dalam bidang diplomasi politik dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan serta variasi teknologi komunikasi oleh masing-masing lembaga negara yaitu Kemenlu dan Kemendag.

Pada bidang politik Kemenlu sebagai ujung tombak pelaksanaan diplomasi telah berhasil memanfaatkan teknologi komunikasi yang tersedia sebagai sarana diplomasi termasuk di dalamnya berkaitan dengan administrasi ke imigrasian. Peluang menggunakan media sosial juga optimal dilakukan oleh kemenlu meskipun tidak semua media sosial digunakan untuk keperluan diplomasi namun lebih untuk penggunaan dokumentasi.

Pada bidang perdagangan, lembaga negara yaitu kemendag juga telah optimal dalam menggunakan teknologi komunikasi untuk keperluan *e-diplomacy*. Semua layanan informasi dalam bidang perdaganag secara bilateral maupun multilateral sudah disediakan dalam wen Kemendag. Namun sayang walaupun sudah memanfaatkan layanan online dalam registrasi dan perijainan proses ekspor dan impor, Kemendag masih belum banyak memanfaatkan layanan on line untuk keperluan lainnya, seperti layanan tanya jawab atau FAQ bagi para pemangku kepentingan.

Sedangkan pada bidang pariwisata, nampak sekali Kemenpar selaku lembaga pionir ternyata justru mengabaikan pemanfaatan *e-diplomacy* dalam optimalisasi diplomasi bidang pariwisata. Web kemenpar tidak dapat digunakan secara optimal dalam promosi pariwisata sementara Kemenpar dalam webnya sama sekali tidak menyediakan fasilitas online untuk dokumen dan administrasi pariwisata internasional yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan.

Pembenahan yang masih perlu dilakukan secara umum agar pelaksanaan e-diplomacy adalah adanya fasilitas dalam satu web khusus untuk kegiatan diplomasi bidang politik, perdagangan dan pariwisata. Dalam web khusus tersebut disediakan layanan on line dokumen dan administrasi secara real time untuk memenuhi kebutuhan diplomasi ke tiga bidang tersebut, sehingga Indonesia akan semakin mendapatkan posisi bargaining dalam bidang diplomasi diantara negara-negara lain di dunia.

REFERENSI

Barston, R.P, 1996, *Modern Diplomacy*, Pearson Education, London

Benedick, Richard E., 1998. "*Diplomacy For The Environment*" dalam *Environmental Diplomatic*. Washington DC: The Johns Hopkins University

Champion, Nick dan Michael Danby. (2012). Chapter 4 – *E-Diplomacy* [Online]. Tersedia dalam:

http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jfadt/overseas%20representation/report/chapter4.htm. [Diakses pada 8 Maret 2015]

Eban, Abba, 1983, *The New Diplomacy : International Affairs in the Modern Age*, Random House, New York

Elliot Zupnick: 1999, *Visions And Revisions: The United States In The Global Economy*, Basic Books

Diamond, Louise dan John McDonald, n.d. *Multitrack Diplomacy: a System Approach to Peace*. Washington DC: Institute of Multitrack Diplomacy. dalam Djelantik, Sukawarsini, 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fergus Hanson, 2012, *Revolution @State: The Spread of Ediplomacy*, Lowy Institute, Nsw

Jamie F. Metz: 2001, *e-Diplomacy Form*, Stanford press

Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Press

Oktavia Maludin: 2001, *E-Diplomasi Dalam Confidence Building Measures: studi kasus Australia dalam Asean Regional Forum*;Oktavia Maludin;Depok;Universitas Indonesia

Sosiawan, Edwi Arief, 2003, *Teori Komunikasi Virtual*, Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY

Thurlow, Crispin etc, 2008, *Computer Mediated Communication*, Sage Publications, California

Zainal A. Hasibuan: 2007, *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, UI Press

www.december.com/cm/mag/1997/jan/decpro.html)

PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN FRAUD DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Dwi Sudaryati¹⁾, Hari Kusuma SN²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

email : sudaryati_dwi@yahoo.com, harikusuma_sn@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to reveal potential fraud symptoms occurred in the university environment and the role of internal auditors in detecting and preventing fraud. This research was conducted with a qualitative approach. Source data used are primary data. Determination the source of the data in a qualitative study using purposive sampling. Respondents in this study consisted of a team of Quality Assurance Agency and a Lecturer who once served as an internal auditor in the Quality Assurance Agency.

The results showed that the SPI has been formed in June 2016, with the task of covering the financial field supervision, supervision of state property (management of state assets), Monitoring the process of governance institutions, and also surveillance in the determination of Human Resources. However, the role of SPI is not maximized due to the prevention of fraud understanding between the auditor with management have not been the same. The reason rationalization becomes an important element in the fraud because the perpetrator to justify his actions. Justification is quite difficult to manage because a person will commit fraud to justify a variety of reasons. Fraud prevention will be maximized when Rector and chairman Higher Education makes the internal auditor's report as a basis for policy making.

Keywords: Fraud, Fraud Detection and Prevention, Internal Auditor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan *symptom fraud* yang berpotensi terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi serta peran auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Tim Badan Penjaminan Mutu dan dosen yang pernah menjabat sebagai auditor internal pada Badan Penjaminan Mutu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI sudah terbentuk pada bulan Juni 2016, dengan tugas meliputi Pengawasan Bidang keuangan, pengawasan barang milik negara (pengelolaan aset negara), Pengawasan proses tata kelola institusi, dan juga pengawasan dalam penentuan Sumber Daya Manusia. Namun, peran SPI belum maksimal karena pemahaman terhadap pencegahan *fraud* antara auditor dengan manajemen belum sama. Alasan rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran inilah yang cukup sulit dikelola, karena seorang akan melakukan kecurangan dengan melakukan pembenaran dengan berbagai alasan. Pencegahan *fraud* akan maksimal ketika Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi menjadikan laporan auditor internal sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: *Fraud*, Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*, Auditor Internal

1. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam pengembangan pendidikan di sebuah negara khususnya Indonesia. Selain fungsi sebagai pengembangan pendidikan Perguruan Tinggi juga memiliki fungsi Ekonomi. Perguruan Tinggi mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat, bantuan baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari *stakeholder* mendorong pihak manajemen untuk menghasilkan laporan berkualitas yang terbebas dari unsur *fraud*. Semakin tingginya biaya pendidikan di tingkat Perguruan tinggi menyebabkan biaya yang dikelola Perguruan Tinggi menjadi tidak sedikit. Sebagai pengelola dana, maka Perguruan Tinggi harus memiliki tata kelola yang baik agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan.

Hasil Audit BPK RI sepanjang tahun 2008-2010 terhadap Universitas Indonesia terkait pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp 625.624.105,07 dan juga kelebihan pembayaran sebesar Rp2.091.194.514,-. UGM pada tahun 2003 dan 2004 mendapatkan opini *disclaimer* oleh BPK RI. Kasus – kasus korupsi pada lingkungan perguruan tinggi seperti korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2010 pada 16 perguruan tinggi (Tempo, edisi 09 November 2012). Menambah daftar hitam praktik *fraud* di perguruan tinggi. Dalam pencegahan *fraud* fenomena –fenomena pada perguruan tinggi tersebut menunjukkan auditor internal belum bekerja secara maksimal. Tindakan *fraud* yang terjadi di lingkungan Perguruan tinggi dapat diantisipasi lebih dini oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan cara mengidentifikasi jenis *fraud* yang dilakukan sehingga dapat diketahui gejala yang mungkin terjadi atas tindakan tersebut.

Perguruan Tinggi melalui auditor internal harus mampu mendeteksi kondisi-kondisi yang menimbulkan *fraud* dan melakukan pencegahan. Auditor internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan adanya internal audit yang memadai, segala kekurangan atau kesalahan dan tindakan-tindakan lain yang merugikan perusahaan akan dapat ditekan seminimal mungkin. Internal audit mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang tercapainya efektivitas penerapan pengendalian intern karena melalui fungsi ini maka dapat dijaga agar semua prosedur, metode ataupun cara yang merupakan unsur internal audit dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern yang diterjemahkan oleh Departemen Pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang satuan Pengawas Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Tim yang berada didalam SPI PTN sering kali disebut sebagai Auditor Internal. Aktivitas auditor internal bukanlah mencari-cari kesalahan namun membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (The IIA Research Foundation, 2011:2).

Penelitian tentang auditor internal telah banyak dilakukan akan tetapi penelitian yang dilakukan di Perguruan Tinggi masih relatif jarang, dikarenakan karakter yang berbeda dari organisasi tersebut memungkinkan adanya *symptom* yang khas yang harus dikenali oleh auditor. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengungkapkan *symptom fraud* yang berpotensi terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi serta peran auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sawyer (2009: 7) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor

internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha. Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan bukti serta efektivitas penerapan pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, penjagaan aktiva, kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi atau program.

Menurut Flostoiu (2012) Auditor internal membantu manajemen dalam mendisain serta memelihara kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern. Auditor internal juga bertanggungjawab untuk menilai kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang memberikan jaminan kualitas dan integritas proses pelaporan keuangan (Amrizal, 2004).

Secara lebih spesifik peran dan fungsi SPI Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah auditor yang mengacu pada Permendiknas No 47. Tahun 2011 adalah melakukan pengawasan non akademik meliputi: a) Pengawasan penyusunan program; b) Pengawasan kebijakan dan program; c) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) Pendampingan dan review laporan keuangan; f) Pemberian saran dan rekomendasi; g) Penyusunan laporan hasil pengawasan, serta yang terakhir adalah evaluasi hasil pengawasan.

Menurut Tuanakota (2007:159) ada ungkapan yang secara mudah didalam menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah : *fraud by need, by greed and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita hendak mencegah *fraud* hilangkan atau tekan semaksimal mungkin penyebabnya. Penyebab *fraud* dijelaskan sebagai *triangle fraud* yaitu bahwa *fraud* terjadi karena; 1) *Opportunity*, dijelaskan bahwa *fraud* terjadi ketika adanya kesempatan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan kecurangan. Sehingga banyak terjadinya korupsi di Indonesia ini sebagian besar dilakukan oleh para pejabat yang memiliki -kekuatan untuk berbuat *fraud*. 2) *Rationality*, alasan kedua terjadinya *fraud* adalah rasionalitas kondisi yang terjadi pada oknum tersebut. Seorang pegawai bergaji rendah dan bergaya hidup tinggi akan berbuat *fraud* karena tuntutan pemenuhan kebutuhan 3) *Pressure*, tekanan dapat terjadi karena banyak hal, misal ancaman pemecatan dari perusahaan, tekanan untuk melakukan balas budi, dan sebagainya. Gejala yang terjadi dalam tindakan penyimpangan laporan keuangan terdiri dari ketidaknormalan laporan keuangan, pertumbuhan yang cepat, laba yang tidak biasa, kelemahan dalam pengendalian internal, sifat agresif dari eksekutif manajemen, obsesi atas harga jual saham dari eksekutif manajemen dan *micromanagement* yang dilakukan oleh eksekutif manajemen.

Singleton and Singleton (2010:40) mengkategorikan *fraud* menjadi beberapa hal yaitu: 1) *Fraud as a crime*, semua perbuatan kecerdikan manusia yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara pemalsuan atau salah saji. Tidak ada diskripsi khusus mengenai *fraud* tersebut namun secara umum adalah segala perbuatan tidak jujur maka itu *fraud* 2) *Corporate fraud*, Setiap kecurangan yang dilakukan oleh, untuk atau terhadap sebuah perusahaan bisnis. Kecurangan ini dilakukan oleh manajemen agar perusahaannya mendapatkan laba atau melaporkan yang tidak jujur. 3) *Management fraud*, merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri. Kecurangan ini mudah terjadi karena adanya *power* melakukan *fraud*. 4) *Layperson*, Kecurangan yang dilakukan oleh perseorangan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan institusi perusahaan tempat dia bekerja. Kecurangan yang dilakukan adalah dengan mengkonversi langsung kas atau aktiva lainnya untuk kekayaan pribadi.

Tahap deteksi atas tindakan *fraud* berbeda dengan investigasi, pada tahap ini berupaya untuk mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan

fraud. Sedangkan pada tahap investigasi sudah dilakukan upaya untuk menentukan siapa yang berbuat *fraud*. Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu metode induktif dan metode deduktif. Metode Induktif dilakukan dengan cara *commercial data-minning software* dan *digital analysis of company databases*. Sedangkan metode deduktif dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini; a) memahami bisnis proses organisasi; b) memahami jenis *fraud* yang mungkin terjadi, c) menentukan gejala yang sering terjadi; d) menggunakan database dan sistem informasi untuk mencari gejala tersebut; e) berdasarkan gejala yang ada kemudian ditentukan apakah terjadi tindakan *fraud* atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan gejala tersebut terjadi (Albercht, 2003).

Peran internal audit dalam mendeteksi setidaknya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Coram *et.al.*, (2006) bahwa organisasi dengan fungsi audit internal lebih memungkinkan untuk mendeteksi dan melaporkan *fraud* jika dibandingkan mereka yang memiliki fungsi internal audit. Sedangkan Amrizal (2004) menyebutkan bahwa penempatan struktur internal kontrol yang baik akan memaksimalkan pendeteksian dan pencegahan kecurangan.

Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Senat Universitas, Rektorat, Dekanat ataupun manajemen dibawahnya dan personil lain dalam perguruan tinggi untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai. Menurut Tuanakotta (2007:162) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Pengendalian internal ini berfungsi sebagai pagar untuk mencegah pencuri masuk, namun bagaimanapun kokohnya pengendalian internal tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdas dan mempunyai nyali melakukannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan informan untuk mendapatkan informasi yang maksimal adalah informan kunci (*key informan*) terhadap obyek penelitian.

Setelah sumber data ditentukan, selanjutnya diperlukan teknik pengumpulan data agar mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari penelitian dan memenuhi standar data yang diharapkan. Individu-individu yang akan menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari Tim Badan Penjaminan Mutu dan dosen yang pernah menjabat sebagai auditor internal Badan Penjaminan Mutu.

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Peran auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Prasetyono dan Haryadi, B (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang naturalisme dimana peneliti sebagai instrumen utama untuk mengeksplorasi, memahami, serta menganalisa fakta dan data yang nampak untuk mengungkapkan makna sosial, pola pikir, serta alasan dibalik tindakan para pelaku sosial. Metode kualitatif menjadi pilihan oleh peneliti sebagai upaya untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Lapangan Model *Miles and Huberman*. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification*. Teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan teori.

Pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian (Moelong, 2007:330).

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Auditor melakukan audit dalam waktu yang sangat singkat untuk mengaudit *auditee* yang jumlahnya sangat banyak. Sebagai gambaran sebuah tim Audit yang beranggotakan tiga orang akan mengaudit bagian atau satker sebanyak tiga satker selama waktu dua minggu. Dalam proses audit normal maka dibutuhkan lima orang auditor untuk mengaudit satu bagian dengan waktu pengerjaan dua minggu. Namun dengan organisasi Tata Kerja yang baru telah diwadahi bagian Satuan Pengawas Intern yang mempunyai bidang atau ruang lingkup audit keuangan, sumber daya manusia, Aset dan tata kelola.

Auditor Internal

Satuan Pengawas Intern sebagai auditor internal berdasarkan Permendiknas No 16 Tahun 2009 dan diubah menjadi Permendiknas No 47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawas Intern. Auditor Internal adalah melakukan pengawasan non akademik meliputi: a) Pengawasan penyusunan program; b) Pengawasan kebijakan dan program; c) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) Pendampingan dan review laporan keuangan; f) Pemberian saran dan rekomendasi; g) Penyusunan laporan hasil pengawasan, serta yang terakhir adalah evaluasi hasil pengawasan. Berikut adalah peran SPI yang disampaikan oleh informan 1, selaku anggota SPI:

-Satuan Pengawas Intern ini memiliki fungsi dan peran adalah mendukung dan membantu rektor melaksanakan kegiatan pengelolaan. SPI yang baru bulan juni 2016 belum memiliki bentuk dan program audit yang pasti. Tahapan ini akan disusun pada tahun 2016, sehingga saat awal bekerja pada tahun 2017 untuk melakukan audit laporan keuangan 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Tahapan awal yang akan disampaikan oleh SPI kepada unit-unit yaitu dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap kegiatan masing-masing satker (bagian). Langkah awal yang akan dilakukan oleh SPI adalah dengan memastikan apakah Rencana Strategi Perguruan Tinggi telah sesuai dengan Visi dan Misi sehingga apabila sudah sesuai maka kegiatan-kegiatan dibawahnya akan menyesuaikan, maka SOP yang disusun akan sesuai dengan aturan yang berlakul.

Pernyataan dari Informan 1 didukung oleh Informan 2, seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini :

-Bahwa peran SPI saat ini adalah melakukan pendampingan, pengawasan terhadap kegiatan atau program kerja institusi. Hal ini menjadi sangat penting karena prosedur yang dahulu dianggap benar saat ini setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri sudah tidak tepat atau menyalahi aturan. Hal inilah yang menjadi kecemasan SPI mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi yang tepat. Sehingga program kerja awal yang akan dilakukan SPI adalah meminta Satker untuk menyusun SOP yang telah sesuai dengan aturan Perguruan Tinggi Negeri, kemudian melakukan evaluasi SOP dan yang terakhir memeriksa kepatuhan dalam pelaksanaan SOP.

Kedua pernyataan diatas merupakan gambaran peran dan langkah yang akan dilakukan oleh SPI didalam pendampingan. Sesuai dengan amanat Permendiknas no 47 Tahun 2011, walaupun SPI baru saja dibentuk dan belum maksimal, SPI berusaha untuk dapat melakukan

pengawasan yang tepat. Pengawasan yang akan dilakukan oleh SPI sampai beberapa periode kedepan belum sampai taraf *assurance* karena masih dalam proses penataan. Pengawasan yang akan dilakukan oleh SPI meliputi Pengawasan Bidang keuangan, pengawasan barang milik negara (pengelolaan aset negara), Pengawasan proses tata kelola institusi, dan juga pengawasan dalam penentuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Perguruan Tinggi.

SPI Perguruan Tinggi kami belum melakukan banyak kegiatan, seperti penyusunan program pengawasan. Baik program pengawasan kebijakan, keuangan, kepegawaian, tata kelola dan juga pengelolaan aset. Pengawasan melalui audit yang saat ini telah dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu, sudah memiliki pedoman dan kertas kerja audit. Namun dengan berubahnya status dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Negeri tentunya banyak aturan yang harus dipenuhi. Ketaatan terhadap peraturan yang semakin banyak ini yang belum sepenuhnya terakomodir oleh audit program maupun kertas kerja yang lama.

Peran dan Fungsi Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud

Auditor internal memiliki peran yang sangat penting terkait pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Sebuah paradigma lama adalah auditor mencari-cari kesalahan didalam melaksanakan audit atau hal ini adalah auditor berusaha melakukan pendeteksian terjadinya fraud disebuah institusi. Paradigma lama ini telah bergeser menjadi auditor internal adalah mitra, rekan kerja, partner kerja dalam mencapai tujuan. Dengan paradigma baru inilah auditor haruslah dilibatkan dalam setiap kegiatan Perguruan Tinggi. Pelibatan mulai dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, evaluasi hingga tindak lanjut. Hal ini sesuai dengan tugas Auditor Internal yang diatur di Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor Kep.275/B/Kp.2009 tentang petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Informan 2:

-SPI saat ini belum berfungsi dengan semestinya, karena beberapa kebijakan atau kegiatan operasional Perguruan Tinggi belum melibatkan SPI dari awal. Tidak terlibatnya SPI dari awal ini berdampak pada suatu program atau yang semestinya berjalan harus tertunda bahkan terhenti karena tidak sesuai dengan aturan. Kedepan SPI akan meminta untuk dilibatkan dalam setiap aktivitas dari kegiatan Perguruan Tinggi.¶

Senada dengan Informan 2, Informan 1 juga menyampaikan seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini :

-Pencegahan *fraud* yang paling baik adalah dengan melakukan pengawasan atau pendampingan mulai dari awal penyusunan program. Kemudian dilanjutkan dengan menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun. Dengan ditaatinya SOP seluruh kegiatan operasional dan prosedur di Perguruan Tinggi maka akan *Fraud akan* mampu dicegah.

Namun opini yang muncul berikutnya adalah:

-Tugas SPI tidak sampai melakukan pengungkapan *fraud* , karena tugas utama SPI adalah membantu manajemen dalam hal ini Rektor mencapai tujuan. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran sebagai temuan yang muncul dalam laporan audit, sepenuhnya diserahkan kepada Rektor.¶

Pandangan yang sama dengan Informan 1 muncul dari Informan 3, seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini :

-Belum adanya pemahaman yang sama antara auditor dengan manajemen. Ketidak samaan ini terlihat dari temuan-temuan auditor internal yang telah disampaikan didalam laporan tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan

rekomendasi yang disampaikan. Sehingga pencegahan *fraud* akan maksimal ketika Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi menjadikan laporan auditor internal sebagai bahan pengambilan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi temuan, dan rekomendasi yang disampaikan auditor internal akan bertahap menjadi lebih baik

Beberapa pernyataan diatas dari para auditor memberikan gambaran bahwa peran SPI di Perguruan Tinggi adalah dalam pencegahan *fraud*. SPI saat ini belum sampai pada pencegahan *fraud* ataupun pendeteksian munculnya *fraud*. Belum maksimalnya peran SPI dikarenakan pemahaman terhadap pencegahan *fraud* diseluruh pihak yang belum sama. Belum adanya SOP yang telah disesuaikan dengan aturan-aturan baru setelah menjadi PTN yang harus di taati menjadi alasan utama.

SOP yang akan disusun oleh setiap bagian/ satker hendaknya mengarah pada lima pilar pengendalian intern yang direkomendasikan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Pengendalian Internal yang direkomendasikan *COSO* yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi serta monitoring dan evaluasi. SPI yang belum memaksimalkan untuk melakukan pencegahan *fraud* maka dapat memulai dengan menyusun SOP yang mengacu pada lima pilar pengendalian internal *COSO*.

Pencegahan *fraud* dapat diawali dengan pemahaman *triangel fraud* yang menjadi dasar munculnya kecurangan disebuah institusi. Teori *triangel fraud* ini di ungkapkan oleh Cressey,(1953) dalam ratmono, et all (2014) bahwa terdapat tiga kondisi yang selalu hadir saat terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ketiga kondisi tersebut adalah tekanan (*preasure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang kemudian dikenal dengan istilah *fraud triangle*.

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seorang melakukan kecurangan seperti kebutuhan keuangan, dan stiasional. Ketika kebutuhan utama yaitu keuangan didalam seorang bekerja sudah diberikan dengan sesuai serta pemahaman terhadap aturan mulai dari pimpinan hingga staff. Kedua adalah kesempatan, biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi lemah. Pengendalian internal yang disusun dengan mengacu pada *COSO* maka maka kesempatan untuk melakukan kecurangan akan berkurang.

Ketiga adalah rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran inilah yang cukup sulit dikelola, karena seorang akan melakukan kecurangan dengan melakukan pembenaran dengan berbagai alasan, misal belum tahu aturan baru, takut program tidak berjalan, kesalahan penganggaran dan alasan lain sebagai pembenaran.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Simpulan penelitian ini terhadap dua hal yaitu peran dan fungsi auditor internal serta peran auditor internal dalam pencegahan *fraud*.

1. Sesuai dengan yang diamanatkan Permendiknas No 47. Tahun 2011 adalah melakukan pengawasan non akademik meliputi Pengawasan penyusunan program, Pengawasan kebijakan dan program hingga Penyusunan laporan hasil pengawasan. Peran auditor internal di SPI yang belum maksimal, karena belum terlibatnya secara fungsi dan tugas mulai dari penyusunan program pelaksanaan hingga pelaporan.
2. Ruang lingkup pemeriksaan. Saat ini auditor hanya identik memeriksa laporan keuangan, namun seharusnya auditor internal memeriksa segala hal mengenai kegiatan operasional Perguruan Tinggi yang dapat memberikan nilai tambah. Seperti halnya pemeriksaan terhadap kepegawaian dan juga Organisasi Tata kelola.

Saran

1. Auditor internal diberi peran dan fungsi lebih luas sesuai dengan Permendiknas no 47 Tahun 2011, agar auditor internal mampu melakukan pengawasan dan pendampingan sebagai mitra kerja manajemen dengan maksimal tanpa ada batasan ruang lingkup.
2. Menciptakan budaya pengendalian internal yang baik, sesuai dengan yang diamanatkan COSO. Pengendalian internal dibangun mulai dari lingkungan pengendalian, pengendalian aktivitas, komunikasi hingga monitoring dan evaluasi. Apabila segala tahapan COSO berjalan dengan baik maka pencegahan terhadap *fraud* akan berjalan dengan maksimal.
3. Meningkatkan peran manajemen dalam hal ini pihak eksekutif/ Rektor/ Dekan/ Kepala Biro/ Ketua Jurusan dan segala yang berkepentingan terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi. Seperti halnya penyikapan atas temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal agar ditindak lanjuti dengan baik.

REFERENSI

- Albrecht, W.S. 2003. *Fraud Examination*. Southwestern. Thomson
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh internal audit.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2011. *Fraud Examiners Manual*. USA
- Brown, Sally. 2012. *Internal Audit in Higher Education*. Routledge, 2012. UK.
- Prastyono. Asy'ari dan Bambang Haryadi. 2013. Peran dan Fungsi Satuan Pengawas Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Perguruan Tinggi X. *JAFFA*. Vol.01 No.2 Oktober 2013. Hal.99-112
- Flostoiu, Sebastian. 2012. The Relationship Between Internal Audit And Fraud. *Bultein stiintific*. Vol 1(33) 2012
- Moelong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya
- Negara, Hari KS. 2015. Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan. *Buletin Ekonomi* Vol.13
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Tentang Pengendalian Intern
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011. Tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Sawyer, B Lawrence. et al. 2005. *Internal Auditing*. The IIA: Salemba Empat.
- Singleton & Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition Wiley Corporate F&A
- Standar Profesional Audit Internal (SPAI), standar 120.2
- Sudaryati, Dwi. 2009. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Audit Dalam Mendukung Good Corporate Governance. *Jurnal Sosial dan Budaya Universitas Muria Kudus*, ISSN: 1979-6889 Vol. 2, No. : 2/Juni./2009.
- Sudaryati, Dwi. 2010. Auditing Forensik dan Value For Money Audit . *Jurnal Sosial dan Budaya Universitas Muria Kudus* ISSN:1979-6870 Volume 4, No:2/Desember/2010 Hal. 152-168. http://jurnal.umk.ac.id/?page_id=1460 -- <http://eprints.umk.ac.id/152/>

Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta

The Institute of Internal Auditors. 2009. Guide to Internal Auditing Second Edition.
Statement on Auditing Standards No.99

Tuanakota, T.M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI)

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di P. Jawa
(Pendekatan Structural Vector Autoregression)
PERIODE 2001 – 2012 *)**

Oleh :

Drs. R. Bambang Sulistiyono, M.Si. **)
Wahyu Dwi Artaningtyas, SE. MSi. **)

Abstract

Distribution growth of GDP at constant prices by province in Java P average of 15 percent for the provinces of Jakarta, East Java and West Java; Banten, Central Java and Yogyakarta average of 8 percent over other areas outside Java Island. When viewed from the Human Development Index (HDI) value is high above the provincial level of national value, but always accompanied by a relatively high poverty rate even surpassed the national poverty level. It is certainly no problem in the structural determinants of poverty itself, especially at the provincial level. Factors of poverty is an important factor that can determine the level of poverty such as the Human Development Index; Gini index is a measure of the relative levels of income inequality; GDP growth rate in constant prices in 2000; Consumer Price Index (CPI) which is a reflection of the rate of inflation; Unemployment Rate (TPT) according to the level of education is a reflection of the employment field; The number of households that have Improved Sanitation (MSL) itself is a reflection of the housing sector. Long-term goal of this study was to determine strategies and policies in order to reduce structural poverty to match Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Specific targets to be achieved in this research is to want to know how big the impact of short-term and long-term on the changes in the factors determinant above the provincial level of structural poverty in affecting change in P Java.

Methods to be used in achieving the above objectives through the analysis of the degree of pass-through in each group that is the factors of poverty with that can be calculated via Cholesky decomposition, with the hope of identifying the structural shocks from models Structural Vector Autoregression (SVAR) during the period 2001-2012 can be seen.

Keywords :

Structural poverty, Factors of Poverty, SVAR Model.

*) Dirangkum dari Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2014-2015

***) Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN -Veteran|| Yogyakarta

RINGKASAN

Distribusi pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut Propinsi yang ada di P Jawa rata-rata sebesar 15 persen untuk propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat; propinsi Banten, Jawa Tengah dan DIY rata-rata 8 persen di atas daerah lain di luar P Jawa. Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat propinsi nilainya tinggi diatas nilai nasional namun selalu disertai dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi bahkan melampaui angka kemiskinan tingkat nasional. Hal ini tentu ada masalah dalam determinan kemiskinan struktural itu sendiri khususnya di tingkat propinsi. Faktor-faktor kemiskinan merupakan suatu faktor penting yang dapat menentukan besarnya tingkat kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Gini yang merupakan pengukuran tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif; laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan 2000; Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan cerminan dari tingkat inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan yang merupakan cerminan dari bidang ketenagakerjaan; Jumlah rumah tangga yang memiliki Sanitasi Layak (MSL) sendiri yang merupakan cerminan dari sektor perumahan.

Tujuan jangka panjang penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi dan kebijakan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan strukturalnya (agar sesuai dengan Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) .

Target khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui seberapa besar dampak jangka pendek maupun jangka panjang atas perubahan faktor-faktor determinan di atas pada tingkat propinsi dalam mempengaruhi perubahan kemiskinan struktural di P Jawa.

Metode yang akan dipakai dalam mencapai tujuan di atas melalui analisis derajat *pass through* pada masing-masing kelompok yang ada dalam factor-faktor kemiskinan dengan yang dapat dihitung melalui *Cholesky Decomposition*, dengan harapan identifikasi guncangan struktural dari model *Structural Vector Autoregression* (SVAR) selama kurun waktu 2001 – 2012 dapat diketahui.

Kata Kunci :

Kemiskinan Struktural, Faktor-faktor Kemiskinan, Model SVAR.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan struktural telah menarik perhatian peneliti, karena ada sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Lemahnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan faktor determinan kemiskinan kurang mendapat perhatian yang serius sehingga berimplikasi negatif terhadap perkembangan kemiskinan struktural di daerah.

Tingkat kemiskinan struktural dalam hal ini dapat diukur melalui angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks ini semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan struktural di atas, besar kecilnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor kemiskinan seperti : Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah suatu indeks yang mengukur pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang

berdasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Disamping itu tingkat kemiskinan di beberapa propinsi di Jawa terlihat turun tapi tingkat ketimpangan yang di ukur dengan Indeks Gini (IG) malah meningkat yang oleh Bank Dunia ditunjukkan dalam bentuk persentase. Faktor lainnya adalah pertumbuhan PDRB yang merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang dihadapi oleh sebuah perekonomian daerah. Lemahnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus (melalui perubahan Indeks Harga Konsumen) memberikan implikasi terhadap perubahan kemiskinan struktural di daerah. Variabel lain dalam faktor kemiskinan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan pendidikan yang meupakan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan akibat tidak ada kesempatan. Kelompok inilah yang belum mampu menyerap banyak tambahan tenaga kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial. Demikian pula dengan jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum sendiri yang layak untuk dikonsumsi (MSL) merupakan salah satu cerminan bahwa kemiskinan masih relatif tinggi.

Permasalahan yang ingin di kaji dan ingin dicari jawaban (solusi) nya adalah : (1) bagaimana perilaku pergerakan masing-masing kelompok faktor kemiskinan tingkat propinsi di P. Jawa, (2) bagaimana pengaruh dan dampak perilaku pergerakan faktor kemiskinan terhadap perubahan tingkat kemiskinan strukturalnya, (3) bagaimana peranan masing-masing kelompok faktor kemiskinan dapat menjelaskan fluktuasi kemiskinan struktural baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kajian Pustaka

Banyak para ahli kemiskinan, melihat kemiskinan sebagai kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial, masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka (Hadi Prayitno dan Budi Santoso, 2003;102-103). Salah satu ciri umum dari kondisi masyarakat yang miskin adalah tidak memiliki sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh, tidak layak huni. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), pemerintah memaknai kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Pendekatan yang digunakan meliputi: *basic needs* (menekankan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sebagai sumber kemiskinan); *income poverty* (menekankan tiadanya kepemilikan aset dan alatn produksi), *basics capability* (menekankan keterbatasan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat); *social welfare* (tekanan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan); serta *subjective* (cara pandang kemiskinan dari sudut orang miskin pandangan orang miskin sendiri).

Metode Penelitian

Peta jalan (roadmap) penelitian yang peneliti lakukan adalah dari data-data determinan kemiskinan (Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Gini; Tingkat Pengangguran Terbuka; Indeks Harga Konsumen; PDRB menurut lapangan usaha (sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; Jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum) dan tingkat kemiskinan struktural (yang terdiri dari Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan) yang sudah menjadi stasioner pada *first difference*, kemudian dikointegrasikan melalui model SVAR. Dua/lebih variabel yang tidak stasioner sebelum didiferensi namun stasioner pada tingkat diferensi pertama, besar kemungkinan akan terjadi

kointegrasi; yang berarti terdapat hubungan (keseimbangan) jangka panjang di antara keduanya. Namun dalam jangka pendek ada kemungkinan terjadi ketidakseimbangan (*disequilibrium*), artinya kedua variabel hanya menunjukkan trend saja bukan karena hubungan antar keduanya atau ada yang mengatakan bahwa apa yang diinginkan (*desired*) belum tentu samadengan apa yang terjadi sebenarnya sehingga diperlukan adanya penyesuaian (*adjustment*).

Bila melihat peta hubungan antar variabel yang ada dalam identifikasi setiap factor-faktor kemiskinan yang saling berhubungan dan mempunyai dampak dinamis dari gangguan yang bersifat random dalam bentuk struktural maka digunakanlah model struktural VAR yang terestriksi yang dikenal dengan nama SVAR. Model SVAR ini digunakan untuk menganalisis adanya *shock* variabel-variabel dalam model di atas dengan cara melakukan peramalan.

Diharapkan dari analisis model ini dampak jangka pendek adanya perubahan factor-faktor di atas dapat terlihat secara jelas. Dari dampak ini akan dilakukan identifikasi beberapa kemungkinan kebijakan ekonomi yang dapat diusulkan dalam rangka untuk mengurangi/menanggulangi kemiskinan struktural.

Hasil Penelitian

Dengan adanya keserentakan diantara factor-faktor kemiskinan dimana semua faktor tersebut harus diperlakukan dalam keadaan yang sama dan adil (*equal footing*) sehingga tidak ada apriori perbedaan antar faktor endogen dan eksogen maka dibawah ini kami sajikan hasil estimasi model VAR (*Vector Autoregressive Model*).

Hasil estimasi model VAR untuk variabel D(P₁) :

$$\begin{aligned}
 D(\mathbf{P}_1)_t = & -2,3027 + 0,1338 D(IG)_{t-1} + 1,3479 D(IG)_{t-2} + 3,5027 D(IG)_{t-3} + 3,4802 D(IG)_{t-4} \\
 & \begin{matrix} t & [-1,2128] & [0,1382] & [1,1130] & [0,7067] & [0,6638] \end{matrix} \\
 & + 0,0080 D(IHK)_{t-1} - 0,0018 D(IHK)_{t-2} - 0,0025 D(IHK)_{t-3} - 0,0013 D(IHK)_{t-4} \\
 & \begin{matrix} & [0,5154] & [-0,2590] & [-0,3677] & [-0,2137] \end{matrix} \\
 & + 0,1151 D(IPM)_{t-1} - 0,1489 D(IPM)_{t-2} - 0,0394 D(IPM)_{t-3} + 0,0986 D(IPM)_{t-4} \\
 & \begin{matrix} & [0,2294] & [-0,1993] & [-0,0811] & [0,4150] \end{matrix} \\
 & - 0,0071 D(MSL)_{t-1} + 0,0530 D(MSL)_{t-2} - 0,0155 D(MSL)_{t-3} - 0,0204 D(MSL)_{t-4} \\
 & \begin{matrix} & [-0,1903] & [0,9410] & [-0,3566] & [-0,7070] \end{matrix} \\
 & - 0,2781 D(\mathbf{P}_1)_{t-1} - 0,3590 D(\mathbf{P}_1)_{t-2} - 0,0065 D(\mathbf{P}_1)_{t-3} - 0,2043 D(\mathbf{P}_1)_{t-4} \\
 & \begin{matrix} & [-0,7151] & [-1,0427] & [-0,0217] & [-0,7110] \end{matrix} \\
 & + 0,1168 D(PDRB)_{t-1} + 0,0101 D(PDRB)_{t-2} + 0,2102 D(PDRB)_{t-3} + 0,1849 \\
 D(PDRB)_{t-4} & \begin{matrix} & [0,7248] & [0,0582] & [1,1133] & [0,9445] \end{matrix} \\
 & - 0,0093 D(TPT)_{t-1} - 0,0105 D(TPT)_{t-2} + 0,0627 D(TPT)_{t-3} - 0,0354 D(TPT)_{t-4} + e_t \\
 & \begin{matrix} & [-0,1101] & [-0,1304] & [0,6922] & [-0,3835] \end{matrix}
 \end{aligned}$$

Untuk variabel Indeks Gini (IG) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Gini D(IG) pada 3 (tiga) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif tertinggi baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 4 (empat) tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Harga Konsumen D(IHK) pada 1 (satu) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif tertinggi walaupun pengaruhnya relatif kecil, baru disusul dengan tingkat

pertumbuhan angka Indeks Gini pada 3 (dua) tahun sebelumnya yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia D(IPM) hanya ada dua yang berpengaruh positif terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu pertumbuhan angka Indeks Pembangunan Manusia pada satu tahun sebelumnya dan empat tahun sebelumnya, sedang unatu dua dan tiga tahun sebelumnya bahkan malah berpengaruh negatif.

Untuk variabel pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum sendiri yang layak untuk dikonsumsi D(MSL) hanya pada periode satu tahun sebelumnya berpengaruh positif sedang periode lainnya berpengaruh negatif.

Sedang untuk variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan sendiri untuk semua kurun waktu sebelumnya berpengaruh negatif, disamping itu seluruh variabel pertumbuhan PDRB mempunyai pengaruh positif.

Untuk variabel PDRB seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Indeks keparahan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berpengaruh positif hanya periode waktu untuk tiga tahun sebelumnya sedang kurun waktu yang lainnya berpengaruh negatif walau nilainya relatif kecil.

Hasil estimasi model VAR untuk variabel D(P₂) :

$$\begin{aligned}
 D(\mathbf{P}_2)_t = & -3,8839 + 0,0298 D(IG)_{t-1} - 1,1070 D(IG)_{t-2} + 3,8087 D(IG)_{t-3} + 1,5689 D(IG)_{t-4} \\
 & \quad \quad \quad [-1,8247] \quad \quad [0,0297] \quad \quad [-0,8300] \quad \quad [0,7024] \quad \quad [0,2665] \\
 & + 0,0165 D(IHK)_{t-1} + 0,0049 D(IHK)_{t-2} + 0,0064 D(IHK)_{t-3} + 0,0057 D(IHK)_{t-4} \\
 & \quad \quad \quad [0,9894] \quad \quad [0,6701] \quad \quad [0,8714] \quad \quad [0,8956] \\
 & + 0,6490 D(IPM)_{t-1} - 1,1999 D(IPM)_{t-2} + 0,8975 D(IPM)_{t-3} - 0,2920 D(IPM)_{t-4} \\
 & \quad \quad \quad [1,2911] \quad \quad [-1,5763] \quad \quad [1,7201] \quad \quad [-1,1062] \\
 & - 0,0012 D(MSL)_{t-1} - 0,0271 D(MSL)_{t-2} + 0,0332 D(MSL)_{t-3} - 0,0153 D(MSL)_{t-4} \\
 & \quad \quad \quad [-0,0289] \quad \quad [-0,4674] \quad \quad [0,7085] \quad \quad [-0,5045] \\
 & + 0,1274 D(\mathbf{P}_2)_{t-1} + 1,0365 D(\mathbf{P}_2)_{t-2} + 0,8231 D(\mathbf{P}_2)_{t-3} + 1,4710 D(\mathbf{P}_2)_{t-4} \\
 & \quad \quad \quad [0,1453] \quad \quad [1,1634] \quad \quad [1,0556] \quad \quad [1,7945] \\
 & + 0,3010 D(PDRB)_{t-1} + 0,2498 D(PDRB)_{t-2} - 0,2486 D(PDRB)_{t-3} + 0,3734 \\
 & \quad \quad \quad [1,7193] \quad \quad [1,3780] \quad \quad [-1,1857] \quad \quad [1,7185] \\
 & - 0,0149 D(TPT)_{t-1} - 0,0522 D(TPT)_{t-2} + 0,0866 D(TPT)_{t-3} + 0,1687 D(TPT)_{t-4} + e_t \\
 & \quad \quad \quad [-0,1682] \quad \quad [-0,5864] \quad \quad [0,8677] \quad \quad [1,5762]
 \end{aligned}$$

Untuk variabel Indeks Gini (IG) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Gini D(IG) pada 3 (tiga) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif terbesar baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 4 (empat) tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan Indeks Keparahhan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) terlihat bahwa pertumbuhan angka Indeks Harga Konsumen D(IHK) pada 1 (satu) tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif tertinggi walaupun pengaruhnya relatif kecil, baru disusul dengan tingkat pertumbuhan angka Indeks Gini pada 3 (dua) tahun sebelumnya yang mempunyai pengaruh positif juga terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia D(IPM) hanya ada dua yang berpengaruh positif terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu pertumbuhan angka Indeks Pembangunan Manusia pada tiga tahun sebelumnya dan satu tahun sebelumnya, sedang dua dan empat tahun sebelumnya bahkan pengaruhnya negatif.

Untuk variabel pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki Sumber Air Minum sendiri yang layak untuk dikonsumsi D(MSL) hanya pada periode tiga tahun sebelumnya berpengaruh positif sedang periode lainnya berpengaruh negatif.

Sedang untuk variabel Indeks Keparahan Kemiskinan sendiri untuk semua kurun waktu sebelumnya berpengaruh positif, dengan urutan empat, tiga, satu baru dua tahun sebelumnya.

Untuk variabel PDRB yang berpengaruh negatif hanya pertumbuhan PDRB tiga tahun sebelumnya sedang waktu yang lainnya semua berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berpengaruh positif hanya periode waktu empat dan tiga tahun sebelumnya sedang kurun waktu yang lainnya berpengaruh negatif walau nilainya relatif kecil terhadap pertumbuhan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun berjalan.

Pembahasan Hasil

Bila dilihat dari faktor Indeks Kedalaman Kemiskinan, faktor Indeks Gini tiga atau empat tahun sebelumnya dan faktor pertumbuhan PDRB tiga atau empat tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang besar disamping faktor-faktor lainnya dalam penelitian ini. Indeks Gini dan PDRB merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya distribusi pendapatan. Semakin lebar distribusi pendapatan akan menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan semakin jauh dari garis kemiskinannya. Sedang faktor IPM berpengaruh positif dan faktor TPT berpengaruh negatif menempati urutan ke tiga dan ke empat dalam mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. IPM seharusnya berpengaruh negatif berarti ada kesalahan dalam menentukan besar kecilnya alokasi dana yang diperuntukkan dalam pemberdayaan pembangunan manusia yang sesuai dengan program pengentasan kemiskinan.

Bila dilihat dari faktor Indeks Keparahan Kemiskinan sebelumnya, faktor Indeks Gini tiga atau empat tahun sebelumnya dan faktor pertumbuhan PDRB tiga atau satu tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang besar disamping faktor-faktor lainnya dalam penelitian ini. Indeks Gini dan pertumbuhan PDRB merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya distribusi pendapatan. Semakin lebar distribusi pendapatan akan menyebabkan Indeks Keparahan Kemiskinan semakin jauh dari garis kemiskinannya. Sedang faktor IPM berpengaruh positif dan faktor TPT berpengaruh positif menempati urutan ke empat dan ke tiga dalam mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. IPM seharusnya berpengaruh negatif berarti ada kesalahan dalam menentukan besar kecilnya alokasi dana yang diperuntukkan bagi pemberdayaan pembangunan manusia yang tentunya harus sesuai dengan program pengentasan kemiskinan.

Simpulan

Faktor Indeks Gini dan PDRB memberi pengaruh positif terbesar terhadap pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan yang seharusnya memberikan pengaruh negatif dalam jangka pendek. Atas ke dua faktor tersebut dimungkinkan terjadinya distribusi pendapatan yang begitu lebar (semakin menjauh dari garis kemiskinannya). Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan selalu ada kendala (tidak sesuai dengan yang diharapkan).

Daftar Rujukan

- Agung Eddy Suryo Saputro dan Agung priyo Utomo. (2010), *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2007*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010, Jakarta.
- Andriopoulou Eirini dan Tsakoglou : *The Determinants of Poverty Transitions in Europe and the Role of Duration Dependence* yang diunduh dari <http://www.ftp.iza.org/dp5692.pdf> pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 07.30 WIB
- Angus Deaton, Allesandro Tarozzi : *Price and poverty in India* yang diunduh dari http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Prices_and_Poverty_in_India.pdf yang diunduh pada tanggal 2 Februari 2011 pukul 22.30 WIB
- Bambang Sulistiyono (2012) , -*Analisis Keterkaitan Antara Indeks Kedalaman Kemiskinan Dengan Indeks Harga Konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta* , BULETIN EKONOMI; Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN -Veteran Yogyakarta, Volume 10, Nomor 1, April 2012, Yogyakarta.
- Bambang Sulistiyono dan Karyono (2013) , -*Analisis VAR (Vector Auto Regressive) dan GCT (Granger Causality Test) Terhadap Keterkaitan Antara PDRB menurut lapangan Usaha Dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta* Penelitian Dasar LPPM UPN -Veteran Yogyakarta (dalam proses untuk penerbitan sebuah jurnal).
- Bogale Ayalneh, Hagedorn dan Korf Benedikt : *Determinants of poverty in rural Ethiopia* yang diunduh dari http://www.eaae14.hu-berlin.de/ress-en/problemorientierung-en/Ressourcenuarmut-en/bogale_qjia_ethiopia.pdf?switchLanguage&set language=en pada tanggal 21 April 2014 pukul 07.45
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*, 4th Edition, McGraw-Hill, Inc, Singapore.
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa. (2003). *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramon Jose G. Albert dan Monina Paula Collado : *Profile and Determinants of Poverty in the Philippines* diunduh dari http://nscb.gov.ph/ncs/9thncs/papers/poverty_Profile.pdf pada tanggal 21 April 2014 pukul 09.15
- Said Farah, Musaddiq Tareena dan Mahmud Mahreen : *Macro level Determinants of Poverty: Investigation through poverty mapping of districts of Pakistan* diunduh dari <http://www.pide.org.pk/psde/25/pdf/AGM27/Farah%20Said.pdf> pada tanggal 21 April 2014 pukul 10.10
- Usman, Bonar, at all.: *Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*, diunduh dalam <http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak.pdf> pada tanggal 21 Februari 2011 pukul 10.30 WIB
- Waskhito, dalam *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan) Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta* yang diunduh di <http://crackbone.wordpress.com/pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-perkotaan-pnpm-perkotaan-ditinjau-dari-aspek-ekonomi-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-kota-yogyakarta/> pada pukul 4.30 hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012.
- Wing Wahyu Winarno. (2007), *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan E-Views*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Variabel Penentu Struktur Modal Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

¹ Nilmawati Fakultas Ekonomi, UPN -Veteran Yogyakarta

email: nilmaoke@yahoo.com

² Hasa Nurrohim Fakultas Ekonomi, UPN -Veteran Yogyakarta

email: hasanurrohimpk@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to identify and examine the variables that may influence the decision to use the company's debts. This study focus on Confidence (as a measure of overconfidence of managers) and included variables such as the Liquidity, Profitability, Size, Tangible Asset, Growth, and Cash Flow, which may affect the use of debt by the company's decision. Multiple regression was used to test the effect of these variables on Leverage. Using all companies listed on the Indonesian stock exchange as a sample, the results showed that Confidence significant positive effect on Leverage. These results support theoretical opinion in behavioral finance that manjer presumptuous tend to issue more debt.

Keyword: overconfidence, struktur modal, behavioral finance

A. Pendahuluan

Menurut Tomak (2013) dalam teori keuangan tradisional, seorang individu dianggap rasional dalam pengambilan keputusan penggunaan hutang. Dalam penelitian-penelitian terkait teori tradisional (Trade off theory, pecking order theory, agency theory), pengaruh personality/kepribadian dari pengambil keputusan diabaikan. Hal ini berbeda dengan *behavioral finance* (Uckar:2012). *Behavioral finance* muncul dari studi empiris dari perilaku investor dan peserta di pasar keuangan. Melalui pembentukan pola psikologis tertentu, *behavioral finance* berusaha untuk mendeteksi perilaku yang tidak konsisten dari asumsi rasionalitas investor dan efisiensi pasar. Jadi dalam *behavioral finance* perilaku dari investor dan manajemen diyakini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang mereka ambil.

Salah satu hal utama (dominan) dalam penelitian *behaviour finance* adalah *overconfident*. *Overconfidence* berhubungan dengan *over* estimasi dari kualitas dan ketepatan informasi (sinyal tentang kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang) yang tersedia untuk individu, atau *under* estimasi dari volatilitas proses yang melibatkan ketidakpastian di masa mendatang. *Overconfidence* dapat dianalogikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang berfikir bahwa dia lebih kompeten dan lebih ahli dibanding orang lain (Barros dan Silveira, 2009).

Dari sisi manajer, Ukar (2012) menyebutkan jika manajer *overconfident* bahwa saham perusahaan dibawah nilai pasar, hal ini akan membuka masalah *mispricing*. Dalam kondisi ini *cost of capital* tidak diperhitungkan dengan baik, kesalahan mungkin terjadi dalam keputusan tentang kelayakan dari proyek-proyek investasi. Artinya, bisa saja karena manajer *overconfidence* maka proyek dengan *present value* negatif, karena dia salah meyakini, akan menjadi positif. Oleh karena keyakinan manajer bahwa saham *underpriced*, manajer akan memilih menerbitkan utang sebagai sumber pembiayaan untuk proyek investasi tersebut. Sebagai hasil dari *overconfidence* manajerial ini, akan terjadi penggunaan utang yang berlebihan, rasio utang tinggi dan dengan demikian probabilitas *financial distress* perusahaan juga akan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Meftah dan Oliver (2007) menemukan bahwa manajemen yang *confident* secara negatif signifikan mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Demikian pula penelitian lain yang dilakukan oleh Azouzi dan Jarboui's (2012) menunjukkan bahwa *emotional bias* dari CEO, yang diukur dengan *optimism*, *loss aversion*, dan *overconfidence* mempunyai peran penting dalam menjelaskan pilihan struktur modal. Hasil menunjukkan *overconfidence* berpengaruh negatif terhadap pilihan dana internal, hutang, dan ekuitas. Sedangkan Barros and Silveria (2007) menemukan bahwa *optimism/overconfidence* berpengaruh positif signifikan terhadap *leverage*.

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa perilaku merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar. Tidak terkecuali dalam pengambilan keputusan pendanaan. Selain menyoroti variabel *overconfidence*, penelitian ini juga memasukkan variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol yang selama ini dimasukkan dalam penelitian-penelitian terkait struktur modal. Variabel-variabel yang dimaksud seperti: likuiditas perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, jaminan yang dimiliki perusahaan, pertumbuhan, dan aliran kas.

B. Tinjauan Pustaka

Trade Off Theory

Modigliani and Miller (1963) mengawali *Trade-off Theory* ketika mereka memasukkan pajak pendapatan perusahaan ke dalam teori irrelevant mereka. Kerangka pemikiran baru ini menciptakan manfaat hutang dari pengurangan pembayaran pajak. Myers (1984) kemudian mengembangkan model dengan memperkenalkan *debt to value ratio*, dengan memasang penghematan pajak dengan biaya yang timbul dari kondisi kesulitan keuangan dari penggunaan hutang. Menurut Sunder dan Myers (1999) Normalnya, struktur modal yang optimal membutuhkan *trade-off*, sebagai contoh antara manfaat pajak dengan biaya kesulitan keuangan ketika perusahaan meminjam terlalu banyak. Nilai maksimum perusahaan akan menyamakan manfaat dan biaya dari penggunaan hutang.

Pecking Order Theory

Pecking Order Theory awalnya disampaikan oleh Myers dan Majluf (1984) sebagai upaya untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pembiayaan perusahaan. Teori ini menyatakan, bahwa ada hirarki pembiayaan dimana sumber dana internal lebih disukai

daripada pendanaan eksternal dan ekuitas hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Tujuan utama teori ini adalah untuk menekankan asimetri informasi yang muncul antara manajer perusahaan dan calon investor, di mana manajer lebih menguasai informasi, yang pada gilirannya menciptakan masalah *adverse selection* (Myers, 1984)

Agency Theory

Manajemen merupakan agen dari pemilik perusahaan/pemegang saham. Para pemilik berharap agen akan bertindak untuk kepentingan mereka. Untuk itu, manajemen harus diberikan intensif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti, pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan pengawasan tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang disebut biaya agensi (*agency cost*).

Behavioral finance

Sedangkan menurut Byrne dan Utkus (2013) studi *behavioral finance* adalah psikologi dari pengambilan keputusan keuangan. Kebanyakan orang tahu bahwa emosi mempengaruhi keputusan keuangan. *Behavioral finance* memperluas analisis ini untuk peran bias dalam pengambilan keputusan, seperti misalnya, penggunaan aturan sederhana praktis untuk membuat keputusan investasi yang kompleks. Dengan kata lain, *behavioral finance* mengambil wawasan penelitian psikologis dan menerapkannya untuk pengambilan keputusan keuangan.

Literatur struktur modal berisi sebagian besar studi teoritis dan empiris yang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu struktur modal. Serta juga baru-baru ini pendapat jika perilaku atau faktor-faktor psikologis berpengaruh pada keputusan struktur modal (Ritter, 2003). Dalam studi literaturnya, Uckar (2012) mengatakan bahwa *behavioral finance* memiliki titik awal yang berbeda. *Behavioral finance* muncul dari studi empiris dari perilaku investor dan peserta di pasar keuangan. Dengan demikian, melalui pembentukan pola psikologis tertentu, *behavioral finance* berusaha untuk mendeteksi perilaku yang tidak konsisten dengan asumsi rasionalitas investor dan efisiensi pasar.

Overconfidence dan Capital Structure

De Bondt and Thaler (1995) dalam Barros dan Silveira (2009) mengatakan: mungkin temuan paling kuat dalam *psychology of judgment* adalah bahwa manusia *overconfident*. Bahkan Rubinstein (2001) dalam Barros dan Silveira (2009) seorang peneliti terkenal yang mempertahankan paradigma rasionalitas dalam keuangan menyebutkan: saya sudah lama meyakini investor adalah *overconfident*. Rata-rata investor meyakini dirinya lebih pintar dari rata-rata investor.

Overconfidence berhubungan dengan *over* estimasi dari kualitas dan ketepatan informasi (sinyal tentang kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang) yang tersedia untuk individu atau *under* estimasi dari volatilitas proses yang melibatkan ketidakpastian. Analog, *overconfidence* dapat membuat seseorang berfikir bahwa dia lebih kompeten dan lebih ahli dibanding orang lain (Barros dan Silveira, 2009).

Ukar (2012) menyebutkan jika manajer *overconfident*, manajer meyakini bahwa saham perusahaan dinilai dibawah nilai pasar, hal ini membuka masalah *mispricing*. Dalam kondisi ini, dimana *cost of capital* tidak didefinisikan dengan baik, kesalahan mungkin terjadi dalam keputusan tentang kelayakan dari proyek-proyek investasi. Artinya, karena manajer *overconfidence* maka proyek dengan *present value* negatif, karena dia salah meyakini, menjadi positif.

Begitu juga, karena keyakinan bahwa saham *underpriced*, manajer akan memilih menerbitkan utang sebagai sumber pembiayaan untuk proyek-proyek investasi tersebut. Sebagai hasil dari *overconfidence* manajerial, akan terjadi penggunaan utang yang berlebihan, rasio utang tinggi dan dengan demikian probabilitas *financial distress* tinggi.

Penelitian Terdahulu

Mefteh dan Oliver (2007) menemukan bahwa manajemen *confident* dengan menggunakan proxy industry sentiment indices secara negatif signifikan mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Sampel penelitian mereka adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Perancis. Sedangkan Barros and Silveria (2007) menemukan bahwa optimism/overconfidence berpengaruh positif signifikan terhadap *leverage*.

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1}: *Overconfidence* berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

Selain variabel *behavior*, dalam penelitian ini juga dimasukkan variabel-variabel lain seperti: Likuiditas, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi berarti semakin sedikit kebutuhannya akan utang, hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk digunakan dan sebaliknya perusahaan yang tidak atau kurang memiliki kas mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk menggunakan utang. Hasil penelitian Eriotis N, Vasiliou D, Ventoura-Neokosmida Z, (2007), Ozkan, A, (2001), dan Viviani JL, (2008) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a2}: Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

Profitabilitas, profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar kebutuhannya dengan dana yang dihasilkan secara internal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ozkan, A, (2001), Viviani JL, (2008) dan Bauer P, (2004) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang perusahaan.

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a3}: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

Ukuran Perusahaan, perusahaan yang berukuran besar cenderung untuk menggunakan utang lebih banyak, hal ini dikarenakan mereka mempunyai tingkat probabilitas kebangkrutan yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan Eriotis N, Vasiliou D, Ventoura-Neokosmida Z, (2007), Ozkan, A, (2001), Viviani JL, (2008), dan Bauer P, (2004) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a4}: Size berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

Tangible fixed asset, *tangible fixed asset* perusahaan yang besar menjadikan perusahaan lebih terjamin, sehingga membantu perusahaan untuk dapat memperoleh lebih banyak utang. Hasil penelitian Degryse, H., Goeij, P., Kappert, P., (2010), dan Harc, M., (2015) menunjukkan bahwa *tangible asset* perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a5}: *Tangible fixed asset* berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

Pertumbuhan, perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi cenderung memiliki proyek yang lebih berisiko. Penggunaan utang yang tinggi menimbulkan biaya agensi dan melindungi perusahaan dari risiko investasi. Oleh karena itu perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi lebih memilih tingkat utang yang rendah. Penelitian yang dilakukan Eriotis N, Vasiliou D, Ventoura-Neokosmida Z, (2007), Ozkan, A, (2001), dan

Bauer P, (2004) menyebutkan bahwa *growth* (pertumbuhan) berpengaruh negative terhadap struktur modal.

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a6}: Pertumbuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

Cash Flow, perusahaan yang memiliki *cash flow* lebih memungkinkan untuk menggunakan dana internalnya, sehingga akan menggunakan utang yang lebih kecil. Penelitian oleh Shenoy C, dan Koch D Paul, (1996), menyebutkan bahwa *volatilitas cash flow* berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

Dari uraian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a7}: *Cash Flow* berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan

C. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *go public* yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2010-2013. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan selain sektor keuangan dan perbankan.

Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Leverage, yaitu jumlah utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dibagi dengan *Total Asset*.

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah

1) *Overconfidence*, yang diukur dengan *proxy*:

Conf: *Consumer Confidence Index* (CCI) adalah Index yang mengukur kondisi keuangan, hasrat konsumsi dan keyakinan rata-rata konsumen disebuah negara. CCI yang tinggi menunjukkan *Confidence* yang tinggi.

2) *Liquidity* diukur dengan membagi *Current Asset* dengan *Current Liability*

3) Profitabilitas (*Profitability*), diukur dengan rasio *EAT/Total Asset*

4) Ukuran perusahaan (*Size*) diukur dengan menggunakan logaritma dari *Total Asset*

5) *Tangible* digunakan untuk mengukur jaminan yang dimiliki perusahaan. Ukuran yang digunakan *Fixed Asset/Total Asset*.

6) *Growth* dihitung dengan mencari prosentase perubahan EAT.

7) *Cash Flow*, dihitung dari *net cash flow* yang dimiliki perusahaan

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, dengan model yang diajukan sebagai berikut:

$$LEVERAGE = a_0 + a_1CONF + a_2Likuiditas + a_3Profitabilitas + a_4Size + a_5Tangible + a_6Growth + a_7CashFlow + \varepsilon$$

D. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil uji regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel Confidence terhadap Leverage dengan mengontrol variabel bebas lainnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Regresi Berganda

Keterangan	Dependen Variable Leverage		
	Koefisien	t hitung	prob. Sig
Konstanta	-10,382	-2.853	0,005 **
CONFIDENCE	0,106	3,264	0,001 ***
LIQUIDITY	-0,0041	-0,037	0,970
PROFITABILITY	-0,034	-0,209	0,834
SIZE	-0,047	-0,925	0,355
TANGIBLE	0,098	0,556	0,579
GROWTH	0,00040	1,418	0,157
CASHFLOW	-0,00055	-0,011	0,991
R ²	0,029		
F hitung	2,207		
prob F hitung	0,032**		

Keterangan: *** sig 1%, 5%, dan 10%

** sig 5% dan 10%

* sig 10%

Tabel ini menyajikan persamaan regresi yang diajukan. Persamaan regresi yang dapat dibentuk dari ringkasan uji regresi berganda pada tabel 1 sebagai berikut:

$$\text{LEVERAGE} = -10,382 + 0,106 \text{ CONF} - 0,0041$$

Likuiditas -0,034 Profitabilitas

-0,047 Size + 0,098 Tangible +

0,0004 Growth + 0,00055 CashFlow

Uji F

Hasil uji F yang terdapat pada tabel 1 dua menunjukkan nilai F hitung sebesar 2,207, dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,032 lebih kecil dari α yang ditentukan. Sehingga secara bersama seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel Leverage.

Uji t

Hasil uji parsial atau uji t juga dapat dilihat pada tabel 1. Hasil menunjukkan variabel Confidence memiliki koefisien sebesar 0,106 dengan t hitung 3,264, dan tingkat probabilitas signifikansi 0,001 lebih kecil dari α yang ditentukan. Berarti variabel Confidence berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Leverage.

Liquiditas berpengaruh negatif terhadap variabel Leverage dengan koefisien sebesar -0,004101 dengan t hitung -0,037, dan tingkat probabilitas signifikansi 0,97 lebih besar dari α yang ditentukan, pengaruh tersebut tidak signifikan. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap variabel Leverage dengan koefisien sebesar -0,034 dengan t hitung -0,209, dan tingkat probabilitas signifikansi 0,834 lebih besar dari α yang ditentukan, pengaruh tersebut tidak signifikan. Size berpengaruh negatif terhadap variabel Leverage dengan koefisien sebesar -0,047 dengan t hitung -0,925, dan tingkat probabilitas signifikansi 0,355 lebih besar dari α yang ditentukan, pengaruh tersebut tidak signifikan. Tangible berpengaruh positif terhadap variabel Leverage memiliki koefisien sebesar 0,098 dengan t hitung 0,556, dan tingkat probabilitas signifikansi 0,579 lebih besar dari α yang ditentukan, pengaruh tersebut tidak signifikan.

Growth berpengaruh positif terhadap variabel Leverage dengan koefisien sebesar 0,00040018 dengan t hitung 1,418 dan tingkat probabilitas signifikansi 0,157 lebih besar dari α yang ditentukan, pengaruh tersebut tidak signifikan. CashFlow berpengaruh negatif terhadap variabel Leverage memiliki koefisien sebesar -0,00055 dengan t hitung -0,011, dan tingkat probabilitas signifikansi 0,991 lebih besar dari α yang ditentukan, pengaruh tersebut tidak signifikan.

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Confidence sebagai proxy keyakinan yang berlebihan dari manajer (overconfidence) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Leverage. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keyakinan diri seorang manajer akan mengakibatkan semakin tingginya penggunaan hutang yang akan digunakan perusahaan.

Overconfidence menyebabkan manajer overestimasi terhadap return di masa yang akan datang dari proyek investasi mereka dan underestimasi terhadap risiko yang dihasilkan. Hal ini mengantarkan para manajer untuk menggunakan pendanaan hutang (Oliver, 2009) dalam Park C and Kim H, (2009).

Hasil regresi menunjukkan variabel Likuiditas berpengaruh negatif terhadap variabel Leverage tetapi tidak signifikan. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi berarti semakin sedikit kebutuhannya akan utang, hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk digunakan. Pengaruh negatif likuiditas pada leverage ditemukan dalam penelitian Eriotis N, Vasiliou D, Ventoura-Neokosmida Z, (2007), Ozkan, A, (2001), dan Viviani JL, (2008)

Demikian pula untuk variabel Profitabilitas, berpengaruh negatif terhadap variabel Leverage tetapi tidak signifikan. Profitabilitas, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi menggunakan utang relatif kecil. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaannya dengan dana yang dihasilkan secara internal. Pengaruh negatif profitabilitas pada leverage ditemukan dalam penelitian Ozkan, A, (2001), Viviani JL, (2008) dan Bauer P, (2004)

Variabel Size berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Leverage. Perusahaan yang memiliki ukuran aset besar cenderung memiliki hutang kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menjalankan perusahaan sehingga tidak membutuhkan banyak hutang.

Untuk variabel Tangible menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan. *Tangible fixed asset*, *tangible fixed asset* perusahaan yang besar menjadikan perusahaan lebih terjamin, sehingga membantu perusahaan untuk dapat memperoleh lebih banyak utang. Pengaruh positif tangible asset pada leverage ditemukan dalam penelitian Degryse, H., Goeij, P., Kappert, P., (2010), dan Harc, M., (2015)

Untuk variabel Growth diperoleh hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Leverage. Perusahaan yang sedang tumbuh membutuhkan pendanaan yang besar, sehingga kemungkinan besar akan mencarinya dari sumber dana hutang. Pengaruh positif growth pada leverage ditemukan dalam penelitian Awan M Hayat, Ishaq M., Ali Raza, Qureshi Azeem (2010).

Sedangkan untuk variabel Cashflow berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Leverage. Perusahaan yang memiliki *cash flow* lebih memungkinkan untuk menggunakan dana internalnya, sehingga akan menggunakan utang yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk membiayai operasional perusahaan

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Confidence berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Leverage. Variabel Confidence menunjukkan keyakinan yang berlebihan dari manajer (*overconfidence*) berkaitan dengan over estimasi akan kualitas dan ketepatan informasi (sinyal akan kemungkinan masa yang akan datang) yang diperolehnya atau under estimasi dari volatilitas dari suatu proses yang melibatkan ketidakpastian. Manajer yang secara kognitif bias dikarenakan terlalu yakin akan memilih untuk menerbitkan hutang lebih banyak dibandingkan dengan manajer yang rasional. Hasil ini mendukung pendapat teoritis dalam behavioral finance bahwa manajer yang terlalu yakin cenderung untuk menerbitkan lebih banyak hutang.

Saran

Bagi manajemen perusahaan, ketika mengambil keputusan terkait pendanaan sebaiknya memahami dan mengetahui bahwa perilaku mereka terkait dengan keyakinan yang berlebihan (*overconfidence*) akan kemampuan dirinyadapat mengakibatkan keputusan yang salah.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mencari dan menggunakan ukuran-ukuran *overconfidence* lainnya yang dapat dimasukkan dalam pengujian, begitu pula ukuran penggunaan hutang. Hal ini agar hasil yang diperoleh bukti lebih kuat jika dihasilkan konsistensi hasil penelitian dengan menggunakan berbagai ukuran variabel.

Daftar Pustaka

- Awan M Hayat, Ishaq M, Ali Raza, dan Qureshi Azeem, 2010, How growth opportunities are related to corporate leverage decisions?, *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 7, Issue 1.
- Azouzi, M.A., Jarboui, A. (2012). -CEO Emotional Bias and Capital Structure Choice, Bayesian Network Method, *Journal of Business Excellence and Management*, Vol.2, No.2, pp. 47-70
- Barros, L.A.B.D.C., Silveira, A.D.M.D. (2009). -Overconfidence, managerial optimism, and the determinants of capital structure, *Brazilian Review of Finance*, Vol. 6, No. 3, pp. 293-335
- Bauer P, 2004, Determinants of capital structure: empirical; evidence from Czech Republic. *Cze. The Journal of Economic Financial*, 54(1-2), pp. 2-21.
- Byrne, A., Utkus P.S., *Behavioral Finance*,
<https://www.vanguard.co.uk/documents/portal/literature/behavioural-finance-guide.pdf>
- Chira, I., Adams, M., Thornton, B. 2008, Behavioral Bias Within The Decision Making Process, *Journal of Business & Economics Research*, Vol.6, No.8, pp. 11-20
- De Bondt, Werner F. M.; Thaler, Richard H. Fi, 1995, Decision-Making In Markets And Firms: A Behaviora Perspective. In: Jarrow, Robert Handbooks in operations research and management science: Finance. Amsterdam: Elsevier, 1995.
- Degryse, H., Goeij, P., Kappert, P. 2010, The impact of firm and industry characteristics on small firms capital structure, *Small Bus Econ*, Vol. 38, No. 4, pp. 431-447.
- Eriotis N, Vasiliou D, Ventoura-Neokosmizi Z, 2007, How firm characteristics affect capital structure: an empirical study. *Managerial Finance*, 33(5), pp. 321-331
- Mefteh, S, dan Oliver, B.R, 2007. *Capital structure choice: the influence of confidence in France*, French Finance Association
- Modigliani, F dan Miller, M., 1963, Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: Correction, *American Economic Review*, Vol. 53 No. 3, pp. 43-453
- Myers, S. C. 1984. The Capital Structure Puzzle, *Journal of Finance*, 34, pp. 575-592.
- Myers, S., dan Majluf, N., 1984, Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have, *Journal of Financial Economics*, vol. 13 no. 2, pp. 187-221

- Oliver R Barry, 2016, The Impact of Management Confidence on Capital Structure, Working paper, School of Finance and Applied Statistics, Faculty of Economics and Commerce, Australian National University, Canberra, 0200, Australia, Access in: 13/9/2016.
- Ozkan, A, 2001, -Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data, *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 28, pp. 175-198
- Park C and Kim H, 2009, The Effect Of Managerial Overconfidence On Leverage, *International Business & Economics Research Journal*, Vol. 8, NO. 12, pp.115-126
- Ritter, R.J. 2003, Behavioral Finance, *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol. 11, No.4, pp. 429-437
- Rubinstein, M, 2001, Rational markets: yes or no? The affirmative case, *Financial Analysts Journal*, Vol.57, No. 3, p. 15-29..
- Şen. M, and Oruç. E, 2009, Behavioral Dimension of Cross-Sectoral Capital Structure Decisions: ISE (Istanbul Stock Exchange) Application, *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 28, pp. 33-41
- Shenoy Catherine, Koch D Paul, 1996, The firm's leverage-cash flow relationship
Journal of Empirical Finance 2, pp. 307-331
- Sunder, S. L., dan Myers, C. S, 1999, Trade-Off Theory, Pecking Order Theory and Market Timing Theory: A Comprehensive Review of Capital Structure Theories, *Journal of Financial Economics*, Vol. 51, pp. 219-244
- Tomak, S., 2013, The impact of overconfidence on capital structure in Turkey, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.3, No.2, pp. 512-518
- Uckar, D. (012,. *Behavioral Elements in Capital Structure Management*, Conference Proceedings: International Conference of the Faculty; 2012, p. 168
- Viviani JL , 2008, Capital structure determinants: an empirical study of French companies in the wine industry, *Int. J. Wi. Bus. Res.*, 20(2), pp.171-194.

IKLAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF PEMILIH PEMULA

Ida Wiendijarti

Reny Triwardani

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP

Email : idawiendijarti@yahoo.co.id,

reny.triwardani@gmail.com

Abstract

New voters are part of a group of people who have the right to vote in the election. They need a political reference associated with the introduction of representatives of the people or political party that later became political choices of them. In a multiparty system, political parties should compete openly in the general election. Political ads becoming one of the campaign. The results of the first study in 2015, the voters in the DIY shows that political advertising party which winning the 2014 election is still a political reference though not the only one. Based on the analysis performed reception which found that there are different readings of ad impressions voters against political parties which the winner of the 2014 election which is dominant position, negotiating position, and the position of the opposition. Differences reading position based on contextual aspects behind them. In advanced research aimed at developing political advertising as a medium of socialization with the inclusion of voters in the realm of political advertising production itself that is expected to produce more insightful political advertisements of political literacy. The research has implications on the development model of the design and production of political advertising for the first time voters in Indonesia.

Keywords: new voters, political advertising party, a medium of socialization

Abstrak

Pemilih pemula adalah bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilu. Mereka membutuhkan referensi politik terkait dengan pengenalan wakil rakyat atau partai politik yang nantinya menjadi pilihan politiknya. Dalam sistem multipartai, partai politik harus bersaing secara terbuka dalam pemilihan umum. Iklan politik menjadi salah satu bentuk kampanye yang dilakukan. Hasil penelitian tahun pertama (2015) pada pemilih pemula di DIY menunjukkan bahwa iklan politik partai pemenang Pemilu 2014 masih menjadi referensi politik sekalipun bukan satu-satunya. Berdasarkan Analisis Resepsi yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat perbedaan pembacaan pemilih pemula terhadap tayangan iklan partai politik pemenang Pemilu 2014 yakni posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Perbedaan posisi pembacaan dilandasi aspek-aspek kontekstual yang melatarbelakanginya. Pada penelitian lanjutan bertujuan untuk mengembangkan iklan politik sebagai media sosialisasi dengan melibatkan pemilih pemula dalam ranah produksi iklan politik itu sendiri sehingga diharapkan mampu menghasilkan iklan politik yang lebih berwawasan literasi politik. Penelitian ini memiliki implikasi model pada pengembangan desain dan produksi iklan politik bagi pemilih pemula di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilih pemula, iklan partai politik, media sosialisasi,

Pendahuluan

Iklan politik menjadi salah satu instrumen media kampanye politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memaparkan agenda atau program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat untuk memberikan suara pada penyelenggaraan Pemilu. Pada dasarnya, iklan politik bertujuan hampir sama dengan iklan komersial, yakni memilih suatu produk tertentu, yang dalam hal ini produk yang dimaksudkan ialah partai politik, bagaimana kemudian partai politik mendapatkan dukungan suara terbanyak dari pemilih. Iklan politik yang berlebarnya di televisi secara langsung ataupun tidak langsung tentu memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Televisi masih memiliki kekuatan sebagai media audio visual yang mampu memberikan informasi dalam bentuk visual dan audio secara detail dibanding media komunikasi yang lain, disamping kemudahan penggunaan televisi sebagai sarana informasi yang aktual dan faktual.

Penggunaan iklan politik di berbagai media televisi membuktikan bahwa iklan masih menjadi media sosialisasi yang efektif dalam memberikan referensi politik tentang segala informasi yang berkaitan dengan partai politik baik visi misi, ideologi, program-program kerja dan para calon legislatif yang sedang bersaing mendapatkan dukungan politik dari konstituen atau pemilih. Pada konteks Pemilu 2014, belanja iklan partai politik di televisi sepanjang kampanye terbuka pemilihan umum legislatif (Pileg) mencapai Rp 340 miliar (Kompas.com, 2014).

Iklan partai politik dikemas sedemikian rupa, masih berpusat pada calon atau tokoh partai politik dengan mengangkat dan menciptakan isu politik yang kredibel dan berkualitas. Pertarungan pesan politik partai politik dalam iklan menjadi arena bebas yang hadir di media televisi. Iklan partai politik pun disajikan dalam bentuk-bentuk yang paling persuasif dengan memasukkan nilai-nilai yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Pada situasi ini, pemilih memiliki referensi politik yang beragam dari pelbagai tayangan iklan partai politik yang muncul di televisi.

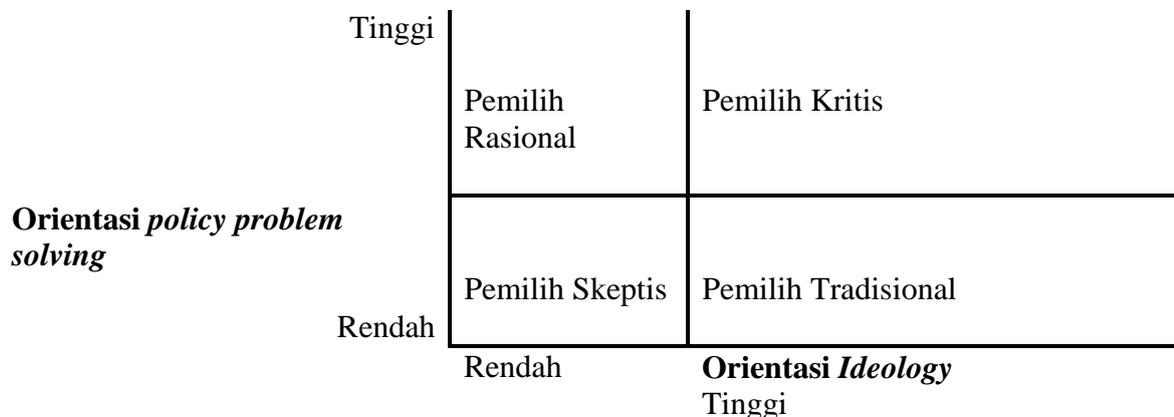
Tinjauan Pustaka

Iklan merupakan kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk mengenalkan suatu produk kepada khalayak. Pemuatan iklan di media massa merupakan salah satu bentuk aktivitas yang saling menguntungkan baik bagi produsen maupun pengelola media, karena produsen dapat menginformasikan produknya pada khalayak luas dan bagi media adanya iklan merupakan pendapatan utama untuk memperoleh keuntungan. Definisi iklan politik ialah proses komunikasi dimana orang sumber (biasanya calon politik atau partai) membeli kesempatan untuk mengekspos penerima pada pesan politik melalui saluran massa dengan efek yang diinginkan yakni mempengaruhi sikap, keyakinan dan atau perilaku politik mereka (Kaid, 1980). Iklan politik menjadi ajang media promosi bagi kepentingan calon atau partai yang ditujukan kepada pemilih sebagai khalayak sasaran yang disajikan pada saluran komunikasi massa. Literasi politik dalam konteks Pemilu dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mendefinisikan kebutuhan mereka terhadap substansi politik terutama perihal Pemilu, memiliki kemampuan untuk mengakses informasi seputar kandidat yang mewakili mereka nantinya.

Pemilih pemula merupakan kelompok masyarakat yang berumur 17-20 tahun, yang mana mereka baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Karakteristik pemilih pemula adalah sebagai berikut (1) Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), (2) Belum memiliki pengalaman memilih, (3) Memiliki antusias yang tinggi, (4) Kurang rasional, (5) Pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam Pemilu, (6) Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, (7) Memiliki rasa

ingintahu, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda (Setiajid, 2011:19).

Pada bagan konfigurasi pemilih, dapat diketahui bagaimana kategori pemilih dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya.



Gambar 2.1. Bagan Konfigurasi Pemilih

Sumber: Firmanzah, 2012

Dalam konfigurasi pertama, pemilih rasional menunjukkan pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving* dan berorientasi rendah pada faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai atau kontestan dalam program kerjanya. Konerja partai atau calon kontestan biasanya termanifestasikan pada reputasi dan image yang berkembang dimasyarakat. Selanjutnya, pemilih kritis merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan nasional maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih jenis ini ialah pemilih yang akan selalu menganalisa kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih ini akan menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan keberpihakan pada partai yang mana dan selanjutnya akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan.

Pada konfigurasi berikutnya, pemilih tradisional memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih jenis ini bisa dimobilisasi selama masa periode kampanye dan memiliki loyalitas tinggi pada partai politik. Ideologi menjadi landasan utama perilaku pemilih. Pemilih di Indonesia mayoritas masih tergolong pada pemilih jenis ini. Sedangkan pemilih skeptis merupakan pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Bahkan keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik sangat kurang dikarenakan ikatan ideologi yang memang rendah sekali. Pada pemilih jenis ini sangat rentan mendorong terjadi tingginya angka golput karena keengganan pemilih untuk memberikan suaranya.

Marketing politik telah menjadi suatu fenomena. Tentunya terdapat beberapa asumsi yang dapat dilihat untuk memahami marketing politik yang memang konteks dunia politik memiliki perbedaan dengan dunia usaha. Politik erat kaitannya dengan pernyataan nilai, yang mana isu politik bukan sekadar produk yang diperdagangkan melainkan terdapat keterikatan symbol yang menghubungkan individu-individu.

Kondisi di mana masyarakat memiliki level literasi politik yang memadai sangat penting bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Stoker (2005) menyatakan bahwa sifat mendasar dari politik dalam sistem demokrasi sungguh rumit. Tanpa direcoki dengan korupsi dan kolusi sekalipun, upaya untuk mengagregasi kepentingan, mengelola negosiasi, lalu

muncul dengan satu keputusan yang disetujui bersama merupakan hal yang sangat sulit. Mengingat kompleksnya sistem, institusi serta mekanisme yang ada maka ia pun menyebut warga negara sebagai political amateurs, para amatir dalam politik. Yakni yang pihak yang berpartisipasi dalam politik secara sporadis, piece meal, dengan kapasitas secara relatif lebih rendah dibanding para profesional politik seperti lobbyist, aktivis LSM, kader parpol, anggota dewan.

Metode Penelitian

Hasil penelitian tahun pertama (2015) pada pengembangan iklan politik sebagai media sosialisasi berbasis *Reception Analysis* pada pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan temuan bahwa pemilih pemula melakukan pembacaan iklan politik secara berbeda-beda. Pada iklan partai pemenang Pemilu 2014 ditemukan juga bahwa produksi pesan iklan partai cenderung mengutamakan pendekatan pemasaran politik yang menempatkan partai politik sebagai produk yang dipasarkan kepada konsumen, dalam hal ini pemilih pemula masih dipandang sebagai konsumen iklan.

Pada tahun kedua ini (2016), penelitian diarahkan pada pengembangan iklan politik sebagai media sosialisasi dengan menggunakan metode *participatory action research*, Subjek dalam penelitian ini adalah pemilih pemula dengan daerah pemilihan di DIY yang telah mengenal dan menonton iklan politik parpol pemenang pemilu.



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan interpretasi terhadap Iklan Partai Politik Pemenang Pemilu 2014

Sebagaimana temuan penelitian tahun pertama (2015), bahwa pemilih pemula melakukan interpretasi yang berbeda-beda terhadap iklan partai politik pemenang Pemilu 2014. Berdasarkan analisis resepsi pada beberapa kelompok pemilih pemula, perbedaan posisi penerimaan sangat dipengaruhi pada latar belakang kehidupan masing-masing informan.

Tabel 5.1. Analisis Resepsi Kelompok Pemilih Pemula

Kelompok Pemilih Pemula	Preferred Meaning		
	PDI-P	GOLKAR	GERINDRA
1 st Group	Negotiated	Oppositional	Negotiated
2 nd Group	Negotiated	Oppositional	Oppositional
3 rd Group	Negotiated	Negotiated	Negotiated
4 th Group	Dominant	Negotiated	Dominant
5 th Group	Dominant	Dominant	Dominant

Selama diskusi kelompok, semua informan setuju bahwa iklan politik menjadi media pencitraan bagi partai politik. Pesan yang muncul kuat dalam iklan-sarat bermuatan janji politik belaka. Dalam hal ini, mereka paling sering melihat iklan PDI-P, Golkar dan Gerindra iklan di televisi. Mereka kadang-kadang juga melihatnya dari saluran You Tube. Bagi

mereka, iklan partai politik memberikan informasi umum tentang partai politik. Pada iklan partai PDI-P misalnya, mereka memahami bahwa pesan iklan ini mencoba untuk menyelesaikan masalah pangan di Indonesia dengan menghentikan makanan impor dan memperkuat kemandirian pangan meskipun mereka tidak yakin apakah itu bisa benar-benar terjadi jika PDIP yang terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan.

Sementara itu, dalam iklan Golkar, mereka benar-benar tidak bisa menangkap apa yang pihak niat Golkar dengan pesan yang disebutkan "Zaman Enak zaman Golkar". Sebuah saksi dalam iklan hanya memberikan kesan bahwa masa kepemimpinan tidak mewakili apa makna pesan iklan. Iklan yang bernuansa testimoni memberikan informasi yang tidak memadai bagi pemilih pemula mengenai rekam jejak partai politik ini. Terlebih, dalam pengetahuan sebagaimana informan, partai ini telah berkuasa cukup lama pada masa Orde Baru dan tergolong pada pemerintahan yang otoriter.

Iklan Gerindra mengambil celah untuk mengembangkan berbagai sektor kehidupan dengan gerakan perubahan. Kelompok pertama cenderung untuk menegosiasikan makna PDIP dan iklan Gerindra, tetapi mereka sangat memilih untuk pembacaan oposisi pada iklan Golkar partai yang tidak memiliki tujuan yang jelas sama sekali dalam menunjukkan periode perbandingan mengenai partai, misi visi atau bahkan program-programnya.

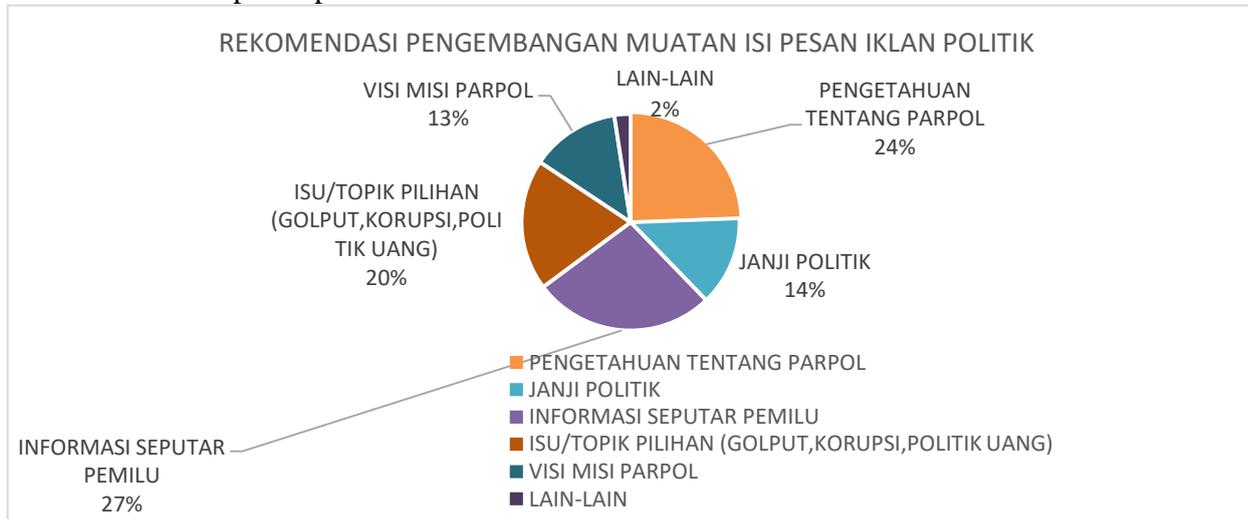
Pemilih pemula menyadari bahwa informasi politik diperlukan sebagai referensi politik sebelum waktu pemungutan suara. Setiap kelompok terdiri dari 5-7 orang yang datang dari konstituen yang berbeda. Setiap informan dalam kelompok menafsirkan iklan partai politik yang sama, tetapi posisi bacaan dari isi pesan dapat berbeda. Ada tiga posisi bacaan seperti membaca dominan, membaca dinegosiasikan, dan membaca oposisi (Jensen, 1999:234). (1) **Dominan-hegemonik**, adalah posisi pemaknaan dimana khalayak mengartikan dan membaca makna sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh pembuat makna. Pada kaitan ini, iklan partai politik PDI-P, Golkar dan Gerindra memiliki kesamaan penguatan visi misi dalam pesan iklan yang ditampilkan., (2) **Negosiasi**, proses pemaknaan tayangan iklan visual pada posisi negosiasi, dialami oleh informan. Masing-masing kelompok diskusi terarah melakukan mekanisme negosiasi sederhana pada pemaknaan iklan politik parpol yang mereka lihat, (3) **Oposisi** adalah posisi pemaknaan oposisi atau berlawanan. Artinya, pemaknaan media yang coba ditawarkan oleh produsen diartikan secara berlawanan dengan pemaknaan baru yang khalayak sampaikan.

Rekonstruksi iklan partai politik dalam perspektif Pemilih Pemula

Perbedaan interpretasi pemilih pemula terhadap iklan politik memberikan suatu pertanyaan lanjutan pada fungsi iklan politik sebagai media sosialisasi. Iklan politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan partai politik atau kontestan dalam Pemilu namun iklan politik harus dipertimbangkan cukup luas sebagai pesan apapun yang disampaikan melalui saluran media massa sebagai bentuk sosialisasi politik juga. Penggunaan iklan politik dalam kampanye politik menjadi media strategis untuk mempromosikan calon politik, partai, isu atau kebijakan dan segala informasi lainnya yang berkenaan dengan kontestan. Pemilih pemula juga sepakat memandang bahwa iklan partai politik memiliki peran sebagai media sosialisasi bagi mereka.

Secara spesifik pemilih pemula juga mengemukakan kecenderungan muatan isi pesan iklan partai politik masih berpusat pada memberikan pengetahuan umum dan membangun citra partai politik. Terpaan iklan partai politik masih sangat berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan keputusan dalam memilih siapa kontestan atau partai politik yang akan didukung pada pemilihan umum. Temuan penelitian ini sejalan dengan analisis resepsi yang dilakukan pada tahun sebelumnya (2015) yang menemukan perbedaan interpretasi atas tayangan iklan partai politik khususnya partai politik pemenang Pemilu 2014. Keberbedaan interpretasi ini

memberikan masukan bagi partai politik sebagai produsen iklan politik untuk mengembangkan muatan isi pesan politik yang disampaikan. Strategi mengemas pesan politik sangat berperan dalam mengarahkan masyarakat dalam memaknainya. Pesan yang diangkat harus sesuai dengan isu-isu politik yang sedang berkembang dalam masyarakat. Selama periode kampanye pemilu, masyarakat akan menerima informasi dalam jumlah besar. Jika pesan politik relatif seragam, maka masyarakat akan sulit melakukan identifikasi dari manakah sumber pesan politik tersebut.



Dari hasil penelitian terlihat adanya harapan tersirat bagi partai politik untuk menyajikan iklan politik yang membangun identitas partai politik sekaligus mendidik masyarakat untuk melek politik. Hal ini membuat partai politik sebagai organisasi yang terorganisir mengambil inisiatif untuk mentransfer sekaligus merumuskan pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan benar sehingga bias persepsi tentang isu politik antara partai politik dengan masyarakat itu dapat direduksi.

Penutup

Pada analisis resepsi khalayak media, pemilih pemula sebagai pemirsa iklan tidak hanya sebagai konsumen dari isi media, tetapi juga sebagai produser makna. Pembaca/pemirsa belum tentu melakukan pembacaan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat teks atau dengan kata lain khalayak melakukan interpretasi makna yang terdapat di dalam teks secara aktif. Pemilih pemula merupakan active audience. Terdapat perbedaan meresepsi antara masing-masing pemirsa dalam memaknai isi tayangan iklan politik partai politik sesuai sudut pandang mereka berdasarkan pengalaman dan latar belakang sosial politik masing-masing pemirsa tayangan iklan politik partai politik pemenang Pemilu 2014.

Pada penelitian lanjutan ini, ditemukan bahwa pemilih pemula memiliki harapan besar pada partai politik untuk melaksanakan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui iklan partai politik yang beredar atau sudah ada dimasyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi, Nugroho Tri, 2012 : -Mengkaji Khalayak Media Dengan Metode Penelitian Resepsi, dalam *Jurnal Acta Diurna*, Volume 8 No.1
- Firmanzah.2012. Marketing Politik. Antara Pemahaman dan Realitas. Edisi revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Jensen, Klaus Bruhn, 1999 : -Media Audience, Reception Analysis; mass communication as the social production of meaning, *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*, London : Routledge.
- Lee, Monle ,2004 : *Prinsip-prinsip Periklanan dalam Perspektif Global*, Jakarta : Prenada Media
- Morley, David,1986: *Family Television:Cultural Power and Domestic Leisure*, London : A Comedia Book
- Nimmo, Dan, 1993: Komunikasi politik ; Komunikator, Pesan dan Media . Penerjemah Tjun Suharman. : Goodyear Publishing Co.**
- O'Sullivan,Tom ,1994: *Key Concept in Communication and Cultural Studies*, London: Routledge**
- Padmopuspito,Asia, 1993: Teori Resepsi dan Penerapannya dalam *Jurnal DIKSI* No.2 Th.1 Mei**
- Setiajid, 2011. Orientasi Politik Yang mempengaruhi Orientasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilih pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2011, *Integralistik*, No.1/Th.XXI/2011, Januari-Juni,pp.18-33.**

**FAKTOR LINGKUNGAN, FAKTOR MOTIVASIONAL DAN KEPERIBADIAN
INDIVIDUAL DALAM KERANGKA MODEL HUBUNGAN PERILAKU
KNOWLEDGE SHARING**

Ninik Probosari*

Email: ninik1973@yahoo.co.id

Yuni Siswanti*

Email: yuni_sis2@yahoo.co.id

Herlina Dyah Kuswanti*

Email: hdkuswanti@yahoo.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis -UPN Veteran Yogyakarta

Abstract

The purpose of this research is to test and analyze the relationship of motivational factors, environment, behavior knowledge sharing and innovation capabilities as an individual with individual personality moderating.

To achieve the objectives and outcomes of the research will be used Hierarchical Regression Analysis. The object to be used as a sample are employees of Bank Syariah in DIY. The results of this study indicate that the organizational climate, Organizational Citizenship Behaviour (OCB), Social Capital, Trust and Job Satisfaction partial effect on behavior Knowledge sharing (KS). Other results showed that the Individual Personality moderating influence Environmental Factors on behavior KS. KS positive effect on Individual Innovation Capability.

Keywords: *motivational factors, environmental factors, individual personality, behavior knowledge sharing, individual innovation capabilities.*

1. PENDAHULUAN

Bagian terpenting dari *knowledge management* adalah bagaimana mendukung individu dalam organisasi untuk melakukan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) mengenai apa yang mereka ketahui (Orr dan Perssin, 2003). Secara konsep, perilaku *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) didefinisikan sebagai tingkatan sejauhmana seseorang secara aktual melakukan *knowledge sharing* (Bock dan Kim, 2002). *Knowledge Sharing* dapat pula dipahami sebagai sikap dimana seseorang bersedia untuk menyediakan akses kepada yang lain mengenai pengetahuan dan pengalamannya (Hansen & Avital, 2005).

Menurut Yoo & Torrey (2002) perilaku *knowledge sharing* dipengaruhi bukan hanya oleh Faktor Motivasional namun juga Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dalam hal ini meliputi dua variabel. Dua variabel tersebut adalah (1) iklim organisasional dan (2) *Organizational Citizenships Behavior (OCB)*. Jika suatu organisasi memiliki iklim organisasional yang buruk untuk perilaku *knowledge sharing* maka akan sulit bagi organisasi tersebut untuk berubah. Sehingga diperlukan suatu iklim organisasional yang kondusif untuk dapat terjadinya perilaku *knowledge sharing* dalam suatu organisasi (Wang&Noe, 2010; Yang Jing et.al, 2008; Ninik&Herlina, 2013).

Untuk terwujudnya *knowledge sharing* dalam organisasi tentunya harus dibangun dari kemauan yang kuat dari karyawan dan tentu saja harus didukung oleh organisasi. *Organizational Citizenships Behavior (OCB)* merupakan bagian dari lingkungan organisasi yang mampu mendorong perilaku *knowledge sharing* (Wasko&Faraj, 2005; Chiu et.al. 2006; Yang & Farn, 2010). Ninik&Herlina (2013) menyatakan bahwa OCB akan memfasilitasi pengembangan hubungan antara karyawan, yang selanjutnya akan mengarah pada perilaku *altruistic* (mementikan kepentingan orang lain).

Menurut kajian Wang&Noe (2010) salah satu hal yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan berbagi pengetahuan diantaranya adalah *kepuasan kerja*. Apakah benar atau tidak pernyataan ini, memang masih harus diuji dengan riset. Maka penelitian ini mencoba memasukkan unsur *Kepuasan kerja* sebagai salah satu variabel dari faktor motivasional. Faktor motivasional dalam penelitian ini terbedakan dalam tiga dimensi yakni (1) modal sosial yang diukur dengan menggunakan instrumen Chua (2002), (2) trust, yang diukur dengan instrumen dari Zeits et.al (1997) dan Mayer et.al (1995), Kharabsheh (2007), (3) kepuasan kerja diukur dengan Minnesota Satisfaction Quotionaire dan berpedoman pada hasil kajian Wang & Noe (2010).

Trust membuat segalanya menjadi mudah (Francis Fukuyama, 2003). Hubungan antara karyawan yang berbasis trust merupakan prasyarat bagi efektivitas proses *knowledge sharing* (Pasaribu, 2009; Col-lins & Smith, 2006). Meskipun penelitian secara parsial menunjukkan hubungan positif antara trust dengan perilaku *knowledge sharing* (Sondergaard, 2007; Wu et.al, 2007), namun beberapa peneliti memperdebatkan keterhubungan tersebut (Mooradian et.al, 2006; Renzl, 2008). Hal ini didasarkan pada hasil sebaliknya yang ditemukan oleh Bakker et.al (2006). Bakker et.al (2006) menyatakan bahwa trust tidak secara signifikan memiliki keterkaitan dengan perilaku *knowledge sharing*.

Keterkaitan *kepuasan kerja* terhadap *knowledge sharing*, bahkan belum pernah diteliti. Namun demikian sudah ada yang melakukan kajian yakni Wang dan Noe (2010). Menurut Wang&Noe (2010) *kepuasan kerja* diprediksi akan mampu mendorong perilaku *knowledge sharing*.

Keterkaitan antara faktor organisasional dan motivasional terhadap perilaku *knowledge sharing* diperkuat/dimoderasi oleh kepribadian individual. Ada ketidakkonsistenan hasil antara riset yang dilakukan Constant et.al, (1996); Cabrera et.al (2006), dan Lin (2007) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki sifat openness cenderung memiliki kemampuan *knowledgesharing* lebih baik dibanding individu dengan sifat tertutup, dengan riset Wasko&Faraj, 2005; dan Bordia et.al, 2006. Maka dari itu, dalam penelitian akan dimasukkan variabel kepribadian individu sebagai variabel pemoderasi.

Sementara itu organisasi yang banyak menerapkan perilaku *knowledge sharing* dengan baik akan mempengaruhi kemampuan individual dalam bekerja (Lin, 2007; Plessis, 2007; Ussahawanitchakit, 2007; Hilmi A, et al.; 2009, Ninik&Herlina, 2013). Hasil yang

sama juga berlaku dalam hubungan *Knowledge sharing* dengan *absorptive capacity* para karyawan (Zahra dan George (2002); ; Liao et al, 2007; Ninik&Titik, 2012).

Atas dasar pemaparan di atas, riset ini akan dilaksanakan di dunia perbankan. Sebagai organisasi publik, keberadaan bank dalam hal kinerja belum nampak (dalam Pasaribu, 2009). Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pelaksanaan *knowledge sharing* dalam organisasi publik. Munculnya *knowledge sharing* di dunia perbankan juga dipicu oleh adanya tuntutan pelanggan akan adanya layanan terbaik. Riset ini akan dilakukan di Bank Syariah di Propinsi DIY.

Penelitian ini dilakukan untuk menambah dan memperkaya teori tentang -perilaku *knowledge sharing* disamping mengisi celah riset yang belum banyak dikaji oleh peneliti di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam jangka panjang diharapkan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap peran SDM dalam berperilaku *knowledge sharing* khususnya pada organisasi publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keterkaitan Iklim Organisasional dengan Perilaku *Knowledge Sharing*

Iklim organisasional adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan dan ini adalah mekanisme motif yang tersembunyi. Sementara Xie Hefeng (2007) menyatakan bahwa persepsi individu/staf terhadap lingkungan organisasi mempunyai pengaruh krusial pada *knowledge sharing* dalam organisasi. Menurut Organ dan Ryan (1995) bahwa iklim organisasional dapat menjadi penyebab yang kuat untuk berkembangnya *knowledge sharing* dalam suatu organisasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Li.et.al, 2010; Wang&Noe, 2010; Yang Jing et.al, 2008; Ninik&Herlina, 2013), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa iklim organisasional secara signifikan dan positif mempengaruhi perilaku *knowledge sharing*.

2.2. Keterkaitan OCB dengan Perilaku *Knowledge Sharing*

Perilaku ekstra peran dikenal juga sebagai *organizational citizenship behavior* (OCB), atau perilaku prososial. Smith *et al.* (dalam dalam Bragger *et al.*, 2005) pada awalnya mendefinisikan perilaku ekstra peran sebagai perilaku kebebasan di organisasi yang tidak dipaksa dengan ancaman atau sanksi atau pemecatan. Penelitian Bateman dan Organ (1983) menyebutkan bahwa individu yang memiliki tingkat OCB tinggi akan cenderung memberikan kontribusi *knowledge* ke rekan kerja lainnya di organisasi yang sama untuk kebaikan bersama. Hal senada diungkapkan pula oleh Wasko&Faraj, 2005; Rita Susanti, 2009; Yang&Farn, 2010; Ninik&Herlina, 2013.

2.3. Keterkaitan Modal sosial dengan Perilaku *Knowledge Sharing*

Prusak (2001) memberikan definisi atau pengertian modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Di dalam *knowledge management*, tanpa *Modal sosial* tidak mungkin terjadi *knowledge sharing*, tidak ada keterbukaan dalam penyebaran pengetahuan (Collins & Smith, 2006; Chiu et.al, 2006; Ninik&Herlina, 2013).

2.4. Keterkaitan Trust dengan Perilaku Knowledge Sharing

Robbins (2006) bahwa *trust* adalah pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak oportunistik. *Trust* dapat menstimulir evolusi komitmen yang lebih kuat dalam hubungan antar mitra kerja, meningkatkan kolaborasi dan menciptakan minat mental *capacity building* diantara anggota organisasi (Francis Fukuyama, 2003). Di dalam *knowledge management*, tanpa *trust* tidak mungkin terjadi *knowledge sharing*, tidak ada keterbukaan dalam penyebaran pengetahuan (Sondergaard, 2007; Wu et.al, 2007; Ninik&Titik, 2012).

2.5. Keterkaitan Kepuasan Kerja dengan Perilaku Knowledge Sharing.

Selanjutnya, topik yang berkembang dari aspek perilaku adalah kepuasan kerja. Seperti diketahui kepuasan kerja adalah sekumpulan perasaan dan kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang pekerjaan mereka yakni perasaan positif dan negatif (Yousef, 2000 dalam Muafi et.al (2014). Menurut kajian Wang&Noe (2010) *kepuasan kerja* diprediksi akan mampu mendorong perilaku *knowledge sharing*. Berdasar dari prediksi tersebut, maka dari itu Wang dan Noe menyarankan untuk memasukkan variabel tersebut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2.6. Keterkaitan Kepribadian Individu, Faktor Lingkungan Dan Perilaku Knowledge Sharing.

Kepribadian mengacu pada perbedaan individu dalam pola karakteristik berpikir, merasa dan berperilaku. Studi tentang kepribadian secara umum berfokus pada dua bidang: yang pertama, memahami perbedaan individu dalam karakteristik kepribadian tertentu, seperti sosialisasi atau lekas marah; kedua, memahami bagaimana berbagai bagian seseorang datang bersama-sama secara keseluruhan (*American Psychological Association*). Keterkaitan antara faktor lingkungan dan motivasional terhadap perilaku *knowledge sharing* diperkuat/dimoderasi oleh kepribadian individual. Kajian terhadap hubungan ini telah dilakukan oleh Wang&Noe (2010).

2.7. Keterkaitan Perilaku Knowledge Sharing dengan Kemampuan Inovasi Individual.

Penelitian Hilmi A, et. al (2009) menemukan bahwa perilaku *knowledge sharing* mampu meningkatkan kemampuan individu untuk memiliki kinerja lebih baik. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa perilaku *knowledge sharing* berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan inovasi individual (Luciana et al, 2008; Hilmi A, et al.; 2009, Ninik&Herlina, 2013). Perusahaan yang mampu mendorong karyawannya untuk mengkontribusi *knowledge* yang dimiliki ke dalam kelompok atau organisasi, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan karyawannya untuk menciptakan ide baru dan mengembangkan peluang usaha baru, yang pada gilirannya aktivitas tersebut akan mendorong pengembangan *innovation capability* (Darroch dan McNaughton, 2002).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah survei, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis *Hierarchical Regression Analysis* (Ghozali, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bank syariah di propinsi DIY. Dalam penelitian ini didistribusikan kuesioner sebanyak 130 kuesioner untuk diisi oleh responden pada 3 bank syariah, kuesioner yang bisa diolah sebanyak 87 kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan berpedoman pada kriteria bahwa responden sudah bekerja minimal 2 tahun. Dari

hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki koefisien signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan adalah valid. Demikian juga dengan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha di atas 0,5 artinya bahwa seluruh variabel adalah reliabel.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil persamaan regresi mengenai pengaruh iklim organisasional terhadap perilaku *knowledge sharing* menunjukkan bahwa iklim organisasional berpengaruh terhadap perilaku *knowledge sharing*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Organ dan Ryan (1995) bahwa iklim organisasional dapat menjadi penyebab yang kuat berkembangnya *knowledge sharing*. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Li et al (2010); Wang & Noe, 2010; Yang Jing et al, 2008 dan Ninik&Herlina (2013). Ruggles (1998), untuk bisa membuat perilaku *knowledge sharing* berjalan dengan baik dalam suatu organisasi diperlukan adanya iklim organisasional yang kondusif.

Sementara hasil penelitian tentang pengaruh OCB terhadap perilaku *knowledge sharing* menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan. Penelitian Bateman dan Organ (1983) menyebutkan bahwa individu yang memiliki tingkat OCB tinggi akan cenderung memberikan kontribusi *knowledge* ke rekan kerja lainnya di organisasi yang sama untuk kebaikan bersama. Kemudian orang-orang yang merasa bahwa dirinya bebas dan bukan korban akan lebih berkomitmen terhadap organisasi dan akan menampilkan banyak perilaku *extra role* atau OCB, yaitu salah satunya dengan menampilkan perilaku *knowledge sharing* secara sukarela kepada anggota organisasi lainnya (Wasko&Faraj, 2005; Rita Susanti, 2009; Yang&Farn, 2010; Ninik&Herlina, 2013).

Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa modal sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*. Hasil ini mendukung penelitian Nonaka, 1991; (Collins & Smith, 2006; Chiu et al, 2006; Ninik&Herlina, 2013). Hubungan antara karyawan yang berbasis Modal sosial merupakan prasyarat bagi efektivitas proses *knowledge sharing* (Nonaka, 1991), terutama bila kolaborasi dalam transfer *knowledge* mengandung pengetahuan yang rumit, misalnya transfer pengetahuan yang harus dilakukan dengan tatap muka. Di dalam *knowledge management*, tanpa *Modal sosial* tidak mungkin terjadi *knowledge sharing*, tidak ada keterbukaan dalam penyebaran pengetahuan (Collins & Smith, 2006; Chiu et al, 2006; Ninik&Herlina, 2013).

Trust dapat menstimulir evolusi komitmen yang lebih kuat dalam hubungan antar mitra kerja, meningkatkan kolaborasi dan menciptakan minat mental *capacity building* diantara anggota organisasi (Francis Fukuyama, 2003). Di dalam *knowledge management*, tanpa *trust* tidak mungkin terjadi *knowledge sharing*, tidak ada keterbukaan dalam penyebaran pengetahuan (Sondergaard, 2007; Wu et al, 2007; Ninik&Titik, 2012). Hasil penelitian tersebut di atas didukung dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa *Trust* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*.

Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*. Hasil ini mendukung kajian yang dilakukan oleh Wang&Noe (2010) dimana *kepuasan kerja* diprediksi akan mampu mendorong perilaku *knowledge sharing*. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa kepribadian individual memoderasi pengaruh faktor motivasional (iklim organisasional dan OCB) terhadap perilaku *knowledge sharing*. Kepribadian dalam hal ini mengacu pada sifat keterbukaan seseorang.

Keterkaitan antara faktor lingkungan terhadap perilaku *knowledge sharing* diperkuat/dimoderasi oleh kepribadian individual. Hasil ini mendukung kajian terhadap keterkaitan kepribadian individual terhadap perilaku *knowledge sharing* yang telah dilakukan oleh Wang&Noe (2010). Hasil ini juga mendukung riset yang dilakukan oleh Cabrera et.al (2006) dan Lin (2007) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki sifat *openness* cenderung memiliki kemampuan *knowledge sharing* lebih baik dibanding individu dengan sifat tertutup. Namun hasil ini bertentangan dengan riset Wasko&Faraj, 2005; dan Bordia et.al, 2006.

Hasil penelitian ini juga memberi bukti bahwa perilaku *knowledge sharing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan inovasi individual. Penelitian mendukung riset yang dilakukan oleh Hilmi A, et. al (2009). Perilaku *knowledge sharing* mampu meningkatkan kemampuan individu untuk memiliki kinerja lebih baik. Hasil penelitian ini juga memperkuat riset yang telah dilakukan oleh Darroch & McNaughton (2002), Luciana et al (2008) dan Ninik&Herlina (2013) yang memberikan gambaran bahwa perilaku *knowledge sharing* berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan inovasi individual. Perusahaan yang mampu mendorong karyawannya untuk mengkontribusi *knowledge* yang dimiliki ke dalam kelompok atau organisasi, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan karyawannya untuk menciptakan ide baru dan mengembangkan peluang usaha baru, yang pada gilirannya aktivitas tersebut akan mendorong pengembangan *innovation capability* Sementara itu Plessis (2007) menyatakan bahwa *tacit knowledge sharing* berpengaruh positif terhadap *individual innovation capability*.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Iklim organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*; 2). OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*; 3). Modal Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*; 4). Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*; 5). Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *knowledge sharing*; 6). Kepribadian Individual memoderasi pengaruh Iklim organisasional dan OCB terhadap perilaku *knowledge sharing*; 7). Perilaku *knowledge sharing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Inovasi Individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimas D, 2009, Analisis sistem antrian dan mutu pelayanan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa, Tesis, Tidak Dipublikasikan, UGM.
- Bakker M, Lendeers R, Gabbay S.M, Kratzer J & Van Engelen J.M, 2006, *Is truth really social capital? Knowledge sharing in product development projects*, The learning organization, 13 (6), 594-605.
- Bateman & Organ, 1983, *Job Satisfaction And Good Soldier: The Relationship Between Affect Employee Citizenship*. Academy of Management Journal, 26, 587-595)

- Bock & Kim Y, 2002, *Breaking The Myths Of Rewards: An Exploratory Study Of Attitudes About Knowledge Sharing*, Information Resources Management Journal, Vol. 15(2), pp. 14-21.
- Bolino, M.C, Turnley, w.H, & Bloodgood, J. 2002. Citizenship behavior and the creation of the Social capital in Organizations. *Academy of Management Review*, 27(4), 505-522
- Bordia, P, Immer B&Abusah, D, 2006, Differences in sharing knowledge interpersonally and via database, *European Journal of Work and Organization Psychology*, 15(3), 262-280.
- Bragger, J.D., Rodriguez, O., Kutcher, E.J., Indovino, L., Rosner, E. 2005. Work-family conflict, work-family culture, and organizational citizenship behavior among teachers. *Journal of Business and Psychology*, 20(2) pp 222-235.
- Cabrera & Cabrera, 2002, *Knowledge Sharing Dilemmas*, *Organizational Studies*, 23 (1), 687.
- Cahyani, Dwi P, 2011, Tingkat kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Kinerja Perbankan syariah, Tesis Tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Chiu, C, Hsu, M, H wang&T.G, 2006, Undersatnading knowledge sharing in virtual communities, *Decision Support Systems*, 42(3), 1872-1888.
- Chowdhurry, 2005, The role affect and cogniton based trust in complex knowledge sharing, *Journal of Managerial Issues*, 17(3), 310-326.
- Chua, A. 2002, *The Influence of Social capital on Knowledge Creation*. *Journal of Intellectual Capital*, 3(4): 375-392.
- Collins, L, and Smith, A, 2006, *Discovering Entrepreneurship: An Exploration Of A Tripartite Approach To Developing Entrepreneurial Capacities*, *Journal of European Industrial Training*, June, pp. 188-206.
- Constant, D, Kiesler, S&Sproull, L , 1994, What's mine is ours or is it?a study of attitudes about information sahring, *Information Systems Research*, 5(4), 400-421.
- Darroch & McNaughton. 2002. Examining the link Between Knowledge Management and Types of innovation. *Journal of Intellectual Capital*, 3(3), 210-222.
- De Long & Fahey, 2000, *Diagnosing Cultural Barriers to knowledge management*, *Academy of Management Executive*, 14(4), 113-127.
- De Long D.W&Fahey, 2000, *Diagnosing Cultural Barriers to knowledge management*, *Academy of Management Executive*, 14(4), 113-127.
- Francis Fukuyama. 2003, [*Social Capital And Civil Society*](#), paper prepared for delivery at the [IMF](#) Conference on Second Generation Reforms, October.
- Ghozali, 2008, *Structural Equation Model, Metode alternatif dengan PLS*, BP Undip Semarang.

- Hansen, S., and Avital, M. 2005. *Share and Share a Like: The Social and Technological Influences on Knowledge Sharing Behavior*. Sprouts: Working Papers on Information Environments, System and Organizations. Vol. 5, No. 1, pp. 1-19.
- Hilmi A, Rajesri G, Kadarsah S & Imam S. 2009. Hubungan Knowledge Sharing Behavior Dan Individual Innovation Capability. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 11. No. 2. Desember.
- Kankanhalli, A., Tan, B.C.Y & Wei, K.K, 2005, *Contributing Knowledge to Electronic Knowledge Repositories: an Empirical Investigation*, *MIS Quarterly*, 29(1), 113-143.
- Kharabsheh, A Model of Antecedents of KS, *The electronic journal of knowledge management*, Vol 5 Issue 4, pp. 419-426.
- Liao, S.H., Wu, C.F., and Chih, C. C., 2007. -Knowledge Sharing, Absorptive Capacity, and Innovation Capability: An Empirical Study of Taiwan's Knowledge Intensive Industries. *Journal of Information Science*, Vol.33, No.3.p.1-20.
- Lin, F.H. 2007. Knowledge Sharing And Firm Innovation Capability: An Empirical Study. *International Journal of manpower*. Vol. 28, No. 3, pp. 315-322.
- Luciana, Rajesri, Ari Samadhi & Iman S. 2008. *Hubungan Anatara Knowledge Sharing Capability, Absorptive Capacity, Dan Mekanisme Formal: Studi Kasus Industri Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia*. *Jurnal Tehnik Industri*. Vol. 10. No.2. Desember
- Mayer C. Roger, James H. Davis and F. David Schoorman, 1995, *An Integrative Model of Organizational Trust*, *The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3 (Jul., 1995), pp. 709-734
- Muafi, Ninik P&Anis S.H, 2014, Pola Hubungan Peran SDM, sistem kerja Berkinerja Tinggi dan perilaku dalam Kerangka Arsitektur Strategis SDM, Laporan Fundamental, UPNVY.
- Ninik P& Herlina D.K, 2014, *Perilaku Knowledge sharing: anteseden dan pengaruhnya terhadap kemampuan inovasi individual*, *Jurnal Manajemen*, UMY, Edisi April.
- Ninik&Titik, 2012, Anteseden Perilaku KS dan Pengaruhnya terhadap Absorptive Capacity Dengan mekanisme formal sebagai variabel pemoderasi, Laporan penelitian dasar, tidak dipublikasikan.
- Ninik, P & Yuni S. 2011. Iklim Organisasi, *Organizational Citizenship Behavior* dan *Trust* Sebagai Prediktor Perilaku *Knowledge Sharing*. *Jurnal Karisma*. Edisi April.
- Nonaka I. 1991. *The Knowledge Creating Company*. Oxford University Press, new York.
- Organ dan Ryan, 1995, *A Meta Analytic Review Of Attitudinal And Dispositional Predictors Of KS*
- Orr, E & Persson, M. 2003. *Performance Indicators for Measuring Performance of Activities in Knowledge management Projects*, Master Thesis, Department of Informatics, University of Gothenburg.
- Pasaribu, M, 2009, *Knowledge Sharing*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Perry Smith, 2006, Social yet creative: the of social relationship in facilitating creativity, *Academy of Management Journal*, 49(1), 85-101.
- Plessis, M.D. 2007. *The role of knowledge management in innovation*, retrieved from <http://www.up.as.za/dspace/bitsream/DuPlessis/pdf>. on 5th August.
- Prusak. 2001. Where Did Knowledge Management Come from? *IBM Systems Journal*. Vol. 40 no. 4.
- Renzl, B, 2008, Trust in management and knowledge sharing, *Omega*, 36(2), 206-220.
- Rita Susanti, 2009, *Pengaruh OCB Dan Persepsi Atas Dukungan Organisasi Terhadap KS Dengan Jenis Kelamin Sebagai Moderator Pada Karyawan PT. TELKOM INDONESIA Kandatel Yogyakarta*. Tesis. Tidak dipublikasikan. UGM.
- Robbins, S, 2006, *Perilaku Organisasi*, Edisi X, Indeks-Kelompok Gramedia.
- Sekaran, U, 2000, *Research Methods For Business*, 3rd ed, John Wiley & Sons, New York.
- Setiarso, 2006, *Knowledge Sharing: Siapa Yang Mengelola Knowledge?*, Ilmu Komputer.com.
- Soondergaard S, Kerr M, & Clegg C, 2007, Sharing knowledge: Contextualising socio technical thinking and practice, *The Learning Organization*, 14(5), 423-435.
- Tobing, P.L., 2007. *Knowledge Management: Konsep, Arsitektur dan Implementasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ussahawanitchakit, P. 2007. *Innovation Capability and Export Performance: An Empirical Study of Textile Business in Thailand*, *International Journal of Business Strategy*, Vol 7, No. 1, pp. 1-9.
- Wang, Seng & Noe, Raymon, 2010, *Knowledge sahring: Areview and directions for future*, *Human Resouce Management Review*, 20, 115-131.
- Wasko M & Faraj S, 2000, It is what one does: why people participate and help others in electronic communities of practice, *The Journal of strategic Information Systems*, 9(2-3), 155-173.
- Yang , S.C & Farn, C.K, 2010, *Exploring Tacit Knowledge Sharing Intention and Behavior within Workgroup from the Perspectives of Social Capital and Behavioral Control*, 11th Pacific-Asia Conference on Information System.
- Yang Jing, Je Xiaofen, Liu Xiaofang & Bao Gongmin, 2008, *Knowledge Sharing Climate: A Literature Review*, *Science of Science Management of S & T*, 112-115.
- Yoo, Y. & Torrey, B. 2002, *National Culture and Knowledge Management in a*
- Zahra, S.A and George, G., 2002. ||Absortive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension.|| *Academy of Management Review*, Vol.27.p.185-203
- Zeitz G, Johannesso R, Ritchie J & Edgar, J.R, 1997, *An employee survey measuring Total Quality Management Practices and Culture*, *Group and Organizations Management*, 22 (4): 414-444.

PENATAAN KAWASAN PANTAI UTARA JAWA MENUJU AGRO-ECOTOURISM**Marita**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: marita_farid@yahoo.com

Sucahyo Heriningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta
email: heriningsih_s@yahoo.com

Abstract

The concept of agro-ecotourism is a community approach became standard in the process of structuring the area of tourism, which involves people who are in it is a very important factor for the success of the tourism product. This study was conducted in one of the northern coastal region of Java, Bojonegoro which is an area of dry climate with very little rainfall, resulting in some agricultural crops less fertile. To attract tourists to Bojonegoro must begin by structuring the region became interesting attractions for tourists as well as build the local economy to be further improved.

This type of research is the applied field research and Participatory Action Kaji (Participatory Action Research / PAR). The best strategy for the development of the northern coastal region in Bojonegoro is to do with the concept of regional arrangement and economic development

Keywords: *Region, Agro-ecotourism, Travelers*

Abstrak

Konsep *agro-ecotourism* merupakan pendekatan masyarakat menjadi standar baku dalam proses penataan kawasan pariwisata, dimana melibatkan masyarakat yang berada didalamnya merupakan faktor yang sangat penting bagi kesuksesan produk wisata. Penelitian ini dilakukan di salah satu kawasan pantai utara Jawa yaitu Bojonegoro yang merupakan daerah yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat kecil, sehingga mengakibatkan beberapa tanaman pertanian kurang begitu subur. Untuk menarik wisatawan ke Bojonegoro harus diawali dengan penataan kawasan yang menjadi obyek wisata yang menarik bagi wisatawan sekaligus membangun ekonomi masyarakat agar lebih meningkat.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian Lapangan dan Kaji Tindak Partisipatif (*Participatory Action Research/ PAR*). Strategi terbaik untuk pengembangan kawasan pantai utara di Bojonegoro adalah dengan melakukan konsep penataan kawasan dan pembangunan ekonomi

Kata Kunci: *Kawasan, Agro-ecotourism, Wisatawan*

PENDAHULUAN

Kawasan pantai utara Jawa merupakan daerah yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat kecil, sehingga mengakibatkan beberapa tanaman pertanian kurang begitu subur. Salah satu kawasan yang mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi dengan perkiraan cadangan minyak mencapai 600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik adalah Bojonegoro. Migas Bojonegoro diperkirakan mampu menyumbang 20 % produksi nasional. Bojonegoro yang luas wilayahnya 230.706 Ha (28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan) dan dilalui oleh sungai Bengawan Solo berpotensi ditingkatkan tata kotanya dengan tanaman yang spesifik lokasi.

Beberapa tanaman hortikultura menjadi andalan Bojonegoro seperti belimbing, bahkan hutan jati tumbuh subur di lahan hutan seluas 93.833,36 Ha (40,67 % dari luas Kab. Bojonegoro). Akan tetapi daya serap wisatawan ke Bojonegoro masih sangat kecil, bahkan bisa disebut hanya sebagai tempat transit saja. Untuk menarik wisatawan ke Bojonegoro harus diawali dengan penataan kawasan yang menjadi obyek wisata yang menarik bagi wisatawan sekaligus membangun ekonomi masyarakat agar lebih meningkat. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha bersama untuk terus mengangkat pariwisata di Bojonegoro dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal yang berada di dalamnya. Pada tahap pertama akan dibuat demplot budidaya tanaman hias yang mampu tumbuh di lahan kering dengan cuaca kering dan panas.

Lahan di sekitar kawasan tersebut hampir semuanya berjenis tanah lempung merah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa jenis tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tanah lempung akan cenderung kering dan pecah-pecah di musim panas tetapi akan tergenang air apabila musim hujan sehingga menyebabkan terhambatnya masuknya udara ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah sebagai ekosistem bagi flora dan fauna yang dapat mendukung dalam penumbuhan tanaman yang diusahakan para petani sebagai sumber penghidupan. Bahan amelioran organik hasil penelitian Fakultas Pertanian UPN akan digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah di Bojonegoro. Bahan amelioran ini merupakan bahan pembenah tanah, sehingga tanah-tanah di Bojonegoro yang kandungan lempungnya tinggi akan diperbaiki sehingga dapat lebih subur.

Untuk penanaman dalam luasan areal yang cukup luas diperlukan bibit dalam jumlah besar dan seragam dengan perbanyakkan setek. Perbanyakkan setek secara konvensional membutuhkan waktu lama sebelum bibit siap ditanam di lapangan dan kematian cukup tinggi, hal ini disebabkan lamanya pertumbuhan akar yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan tunas (Yufidi dan Handayani, 1998). Pertumbuhan akar yang lambat dapat dipacu dengan pemberian zat pengatur tumbuh dari golongan auksin. Auksin berfungsi untuk mempercepat proses fisiologi dengan menstimulasi pembelahan sel sehingga memungkinkan pembentukan sistem perakaran yang lebih baik pada setek

Hasil penelitian Aini et al., (1999), menunjukkan zat pengatur tumbuh auksin (Rootone F) dapat meningkatkan persentase tumbuh setek bambu jepang (*Dracaena godseffiana*) sebesar 90,40 % pada konsentrasi 200 ppm. Hasil penelitian Irwanto (2001), menunjukkan pemberian zat pengatur tumbuh auksin (IBA) dengan tingkat konsentrasi 100 ppm dapat meningkatkan persentase setek hidup pada setek pucuk meranti putih (*Shorea montigena*) rata-rata sebesar 83,33 %. Bahan setek yang akan digunakan mempengaruhi pertumbuhan akar setek, sehingga perlu dipilih bagian yang baik yaitu tidak terlalu muda dan terlalu tua. Bahan setek yang terlalu muda akan lebih cepat membentuk akar dibandingkan bahan setek yang tua, tetapi jika terlalu muda proses penguapannya sangat tinggi sehingga setek menjadi lemah dan mati. Ketersediaan unsur hara terutama karbohidrat dan nitrogen sangat mempengaruhi perkembangan akar dan tunas setek. Batang atau cabang yang berwarna

kekuningan mempunyai kandungan karbohidrat dan nitrogen yang tinggi. Karbohidrat dan nitrogen berfungsi sebagai penghasil energi, sehingga mempercepat proses terbentuknya akar (Wudianto, 2000). Tersedianya bibit yang cepat tumbuh akan menentukan pertumbuhan selanjutnya, bahkan waktu dan hasil panen lebih baik (Danoessastro, 1976). Hasil penelitian Elisabeth (2004), menunjukkan ukuran diameter setek berpengaruh terhadap pertumbuhan setek batang jati (*Tectona grandis* L.F).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penataan Kawasan

Konsep *agro-ecotourism* merupakan pendekatan masyarakat (*community approach*) menjadi standar baku dalam proses penataan kawasan pariwisata, dimana melibatkan masyarakat yang berada didalamnya merupakan faktor yang sangat penting bagi kesuksesan produk wisata. Gagasan untuk menciptakan kampung wisata menjadi alternatif pilihan model pengembangan pariwisata dalam konteks lokal. Dengan mendesain suatu perkampungan menjadi lokasi wisata akan mendongkrak perekonomian komunitas local. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam pariwisata didaerahnya dengan lebih kreatif dalam membaca peluang usaha yang mampu mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan warga secara keseluruhan, sehingga akan tercipta masyarakat mandiri secara sosial, ekonomi dan selalu menjaga kelestarian budaya lokal dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada.

Di samping itu, karena nilai jual yang dipertahankan adalah keunikan, karakter dan potensi lokal, maka kelestarian budaya lokal menjadi tanggung jawab seutuhnya kepada penghuni dan mencegah terjadinya deteriorasi ekologis. Ekses negatif demoralisasi yang biasanya meresahkan masyarakat akibat industri pariwisata mampu terproteksi dengan kekuatan dan kearifan budaya lokal sebagai sistem sosial yang melingkupi tatanan bermasyarakat.

Beberapa Potensi agro dan culture yang dapat dikembangkan di Bojonegoro misalnya:

1. Wisata hutan jati dan berjalan kaki (*hiking*) menyusuri kawasan hutan beserta satwa liar yang ada di dalamnya.
2. Wisata sumur-sumur minyak tua yang perlu dilestarikan keberadaannya, sebagai wisata edukasi tentang pengambilan minyak dari dalam bumi.
3. Wisata budaya asli Bojonegoro yang memungkinkan dilestarikan untuk mendukung agro-ecotourism.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya pengembangan pariwisata dengan konsep agro-ecotourism diperlukan peran beberapa pihak yaitu *local government*, *NGO*, dan *university*. Peran pemerintah dan dinas terkait daerah dalam pengembangan kampung wisata sebagai fasilitator bagi munculnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan masyarakat serta mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh masyarakat setempat serta mengarahkan pembangunan yang diidamkannya secara lebih integral.

NGO diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk pembentukan komunitas Guide, sehingga *guide – guide* yang ada dapat diorganisir, dibimbing dan dibina secara teratur. Selain itu perlu dibentuk komunitas perhotelan, serta komunitas produsen serta artshop untuk menentukan standar harga yang sama untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sempurna yang akan merugikan pengrajin. Beberapa faktor perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan NGO, yaitu:

1. Pendampingan Komunitas

Untuk menjaga potensi budaya diperlukan usaha bersama dari penggiat seni dan budaya dan ekonomi untuk mengemas produk tersebut agar kuantitas dan kualitas lebih baik. Untuk itu diperlukan pendampingan komunitas, sehingga potensi budaya dapat tetap terjaga.

2. Pembuatan modul

Pada kegiatan belajar membuat atau menari di kampung Prawirotan dan Sosrowijayan dapat dibuat modul pembelajaran, sehingga aktivitas pengajaran membuat dan menari dapat terjaga kualitasnya. Pembuatan buku saku kampung wisata yang berisi peta rute sepeda dan tempat – tempat yang menarik di dalam kampung wisata tersebut, disertai dengan fasilitas – fasilitas yang terdapat di dalamnya, termasuk informasi produk yang istimewa/khas di kampung wisata.

3. Pameran Seni dan pertunjukan seni budaya secara rutin

Untuk mempromosikan potensi perlu dilaksanakan even-even budaya berskala besar di sekitar lokasi pariwisata seperti pameran batik dan kerajinan serta pertunjukan seni budaya tradisional. Penyelenggaraan even – even budaya harus didukung dengan upaya promosi yang gencar dengan didukung stakeholders yang terdiri dari unsur masyarakat kampung wisata, pelaku pariwisata dan pemerintah serta dinas terkait.

Perguruan tinggi bertugas melakukan penelitian dan memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah dan Stakeholders kampung wisata untuk memperkuat institusi agar tetap berjalan, menjaga kelestarian budaya lokal dan mengembangkan penelitian yang dapat mengembangkan potensi – potensi yang terdapat di kampung wisata yang disesuaikan dengan karakter masing – masing kampung.

B. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Misi awal pendekatan pengembangan ekonomi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan *ecotourism* yaitu "*planning for habitability*", dimana *habitability* diartikan secara *holistic* dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Konsep ini yang akan digunakan untuk mengembangkan investasi dan industri pariwisata seni dan pelestarian kebudayaan lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan komunitas lokal daerah wisata. Pengembangan analisis kampung wisata menyangkut tiga variabel induk yaitu folk(f)-place(p)-work(w) atau social-fisik – ekonomi.

Penanganan wilayah seharusnya dilakukan secara utuh, tidak hanya sekedar penataan ruang dan desain sarana prasarana. Sejalan dengan perkembangan permasalahan di kampung wisata untuk mengembangkan investasi dan industri dalam rangka peningkatan komunitas local maka dalam penelitian ini akan diaplikasikan konsep tersebut melalui perencanaan ekonomi lokal kampung wisata sebagai berikut :

1. Pengembangan daya saing kampung wisata.

Potensi dan atribut lokal yang unik akan membantu pengembangan daya saing. Untuk membantu daya saing tiap komunitas lokal perlu memahami dan bertindak berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk membuat komunitas lokalnya menarik bagi kegiatan bisnis.. Daya saing bisa diukur dengan beberapa indikator yaitu

- a. Struktur ekonomi : komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah serta tingkat investasi
 - b. Potensi wilayah yang *non tradable* : lokasi, prasarana, SDA, citra daerah
 - c. SDM yang mendukung kegiatan industri kampung wisata
 - d. Kelembagaan dan perilaku masyarakat, serta budaya yang mendukung produktivitas kampung budaya
2. Pengembangan *Business Cluster*
Pengembangan *cluster* dikonsentrasikan pada kegiatan yang mendorong dan mendukung kerjasama antar perusahaan *art and culture* dan pengembangan kelembagaan, menyangkut beberapa pendekatan yaitu :
 - I. Pengembangan *network* pemasaran bersama
 - II. Membentuk basis promosi dan investasi bersama
 - III. Menyediakan informasi yang spesifik untuk cluster
 - IV. Mendukung riset bersama
 - V. Mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan
 3. Pengembangan Kelembagaan yang menunjang *local community education*
Dalam hal ini proses pembelajaran bukan mengajari masyarakat, namun belajar bersama masyarakat dengan :
 - a. Kemitraan : proses dan implementasi pengembangan kampung wisata dilaksanakan secara kolektif antara masyarakat, pemerintah dan dinas terkait daerah, NGO, dan university
 - b. Kontrol : Proses dialog antar stakeholder dapat digunakan sebagai fungsi control. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Local (PEL) kampung wisata akan sukses jika dilaksanakan sesuai dengan azas good governance, ada kepercayaan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Untuk itu lembaga self-control melalui forum PEL komunitas kampung wisata sangat diperlukan.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian di mulai bulan April sampai Oktober 2016.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian Lapangan dan Kaji Tindak Partisipatif (*Participatory Action Research/ PAR*). Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini secara umum antara lain adalah :

1. Pembuatan demplot untuk menguji kesuburan lahan di kawasan Bojonegoro dengan tanaman bougenvil yang sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Identifikasi potensi, masalah, peluang dan tantangan dalam pengembangan *agro-ekowisata* dalam rangka peningkatan kesejahteraan komunitas lokal daerah wisata di Bojonegoro. Identifikasi dilakukan dengan cara :Pengumpulan data primer

melalui survei dan observasi langsung menggunakan alat kuesioner dan checklist, pengumpulan data sekunder dari SKPD dan instansi terkait

3. Analisis potensi, masalah, peluang dan tantangan dalam pengembangan agrowisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan komunitas lokal daerah wisata di Bojonegoro.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan uji aspek teknis budidaya menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dengan dua faktor. Faktor I adalah berbagai macam konsentrasi zat pengatur tumbuh auksin yang terdiri atas empat taraf yaitu : Konsentrasi 0 ppm (Kontrol); 50 ppm; 75 ppm; 100 ppm. Faktor kedua adalah variasi setek yang terdiri atas tiga taraf yaitu ; bagian pangkal, tengah dan pucuk.

Perlakuan tersebut di ulang sebanyak 3 kali dan tiap unit percobaan terdiri atas 10 tanaman sehingga jumlah setek yang dibutuhkan $(4 \times 3) \times 3 \times 10 = 360$ setek. Tiap unit percobaan diambil tiga tanaman sampel.

PEMBAHASAN

Agrowisata dapat memunculkan peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan pekerjaan mereka. Agrowisata dapat menjadi media promosi untuk produk lokal, dan membantu perkembangan regional dalam memasarkan usaha dan menciptakan nilai tambah dan *-direct-marking* merangsang kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah dimana agrowisata dikembangkan.

Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan prasarana kawasan pantai utara menuju *agro-ecotourism*:

1. Pembangunan pasar agro
2. Peningkatan Infrastruktur
3. Bantuan peralatan pengolahan
4. Sarana transportasi.
5. Membuat PERDA/PERBUP/SK tentang pengelolaan *agro-ecotourism*;
6. Adanya promosi wisata
7. Peran koperasi di tingkatkan
8. Pelatihan SDM Pertanian Hortikultura dan Pemandu Wisata
9. Perbanyak Green House & Kegiatan Pertanian
10. Perbaiki kualitas produk dengan standart ekspor
11. Bimbingan & Penyuluhan untuk Petani dan Pemandu Wisata

Pengembangan kawasan pantai utara sebagai objek pariwisata pantai seharusnya lebih fokus kepada peluang dan kekuatan yang dimiliki. Strategi yang berfokus pada kekuatan dan peluang yang dimiliki adalah *growth oriented strategy*. Strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan daerah pesisir pantai salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama antara tiga pilar *good governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kerjasama tersebut harus didukung dengan kesiapan masing-masing pilar untuk melakukan optimalisasi peran masing-masing.

Optimalisasi peran masing-masing pilar dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi

hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, efisien, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Strategi pengembangan di kawasan pantai utara sebagai objek pariwisata pantai di Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Strategi formulasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah dengan membuat rencana induk atau dokumen perencanaan seperti Master Plan, DED (Detail Engineering Design, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, pembuatan skala prioritas pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata.
2. Strategi implementasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan kontrol. Koordinasi dilaksanakan bersama masyarakat, instansi lain dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Strategi evaluasi yang terjadi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga bersifat internal dan eksternal. Evaluasi internal terjadi di dalam tubuh organisasi sebagai salah satu respon terhadap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mengevaluasi terkait pengelolaan Teleng Ria dan pemerintah mencoba untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih terbuka untuk publik dan dapat diakses masyarakat.
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kawasan pantai utara sebagai objek pariwisata pantai adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung dalam pengembangan kawasan pantai utara memiliki potensi daya tarik wisata atau objek pariwisata berupa daerah pesisir pantai yang cukup banyak, adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, pemerintah yang peduli dalam bidang pengembangan pariwisata. Hal-hal tersebut didukung dengan peluang yang ada yaitu adanya sistem pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, tidak kenal waktu, batas dan wilayah.
 - b. Faktor penghambat pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia internal pariwisata dan pengelola baik secara kualitas maupun secara kuantitas, terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, misalnya akses jalan menuju obyek pariwisata, serta terbatasnya dana yang tersedia dalam pengembangan daerah pesisir sebagai obyek pariwisata pantai.

KESIMPULAN

Eko-agrowisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak aspek yang harus terintegrasi dengan baik. Penataan ruang, penyediaan fasilitas penunjang, pelayanan, pengelola/pelaksana yang handal, promosi, serta keterlibatan masyarakat lokal yang terakomodasi, memerlukan penanganan yang baik dan profesional. Pengembangan eko-agrowisata di kawasan pantai utara memerlukan lebih banyak perhatian, terutama hal lingkungan sekitarnya. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antar berbagai instansi terkait, Kehutanan-Pekerjaan Umum-Perhubungan-Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peterenaka- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Kepolisian – lainnya. Strategi terbaik untuk pengembangan kawasan pantai utara di

Bojonegoro adalah dengan melakukan konsep penataan kawasan dan pembangunan ekonomi

Antara pariwisata dan pertanian dapat saling mengisi dan menunjang dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata dan produk pertanian Indonesia dalam rangka meningkatkan perolehan devisa dari komoditi ekspor non migas. Sebagai negara agraris, sector pertanian merupakan sector yang dominan dan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Upaya peningkatan dan penganekaragaman usaha pertanian terus ditingkatkan secara intensif dan terencana, baik yang secara tradisional maupun modern merupakan potensi kuat yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

REFERENSI

- Abidin, Z. 1983. *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Zat Pengatur Tumbuh*. Angkasa. Bandung. 85 Hlm
- Acharya, P., 2001. *Impact of tourism in economic and socio-cultural aspects of Lumbini VDC; an anthropological case study*. Master's dissertations submitted to Tribhuvan University, Nepal.
- Aini, N. Moenarni dan D. Gandana. 1999. Pengaruh Macam Ruas Batang dan Konsentrasi Rotone F terhadap keberhasilan dan pertumbuhan setek bamboo jepang (*Dracaena godseffiana*) Kultivar Mawar. *HABITAT*. Hlm 11 : 49.
- Anonim. 2007. *Grow Quick Scientific Effort*. Tropical Flora. Jakarta. 1 Hlm
- BTDC, 2009. *Findings of visitors' opinions survey 2008*. Bhaktapur Tourism Development Committee (BTDC), Bhaktapur, Nepal.
- CBS, 2004. *Nepal Living Standards Survey 2003/04*. Central Bureau of Statistics, Kathmandu.
- Dahlan, I., (2004). *Opportunities for Agro-Eco-Tourism in Bario Highlands*. Special Papers Presented in: Seminar on Opportunities for Agro-Eco-Tourism in Bario Highlands, Bario Seminar and Festival, 11-14 May 2004, Miri. (unpublished)
- Dangol, D.R. and B. Ranabhat, 2007. *Developing Agro-ecotourism in Nepal*. NTTR, Nov. 12-25, 2007, Nepal. pp.30-33.
- Danoessastro, H. 1976. *Zat Pengatur Tumbuh dalam Pertanian*. Yayasan Pembina Pertanian UGM. Yogyakarta. 115 Hlm.
- Danu dan J. Tampubolon, 1993. Pengaruh Jumlah Mata Ruas Stek dan Konsentrasi IBA Terhadap Pertumbuhan Stek Batang *Gmelina arborea* LINN. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Balai Teknologi Perbenihan. Departemen Kehutanan. Bogor

- Dwijoseputero, D. 1992. *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*. Agromedia Pustaka. Jakarta. 232 Hlm.
- Elisabeth, M. H. 2004. *Pengaruh Rootone F dan Ukuran Diameter Batang Setek terhadap Pertumbuhan dari Setek Batang Jati (Tectona grandis L.F)* Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Ambon. 56 Hlm
- Gardner, Peace & Mitchell. 1991. *Fisiologi Tanaman Budidaya*. Universitas Indonesia. Jakarta. Gaspar, T., C. Kevers, C. Penel, H. Greppin, D.M. Reid, and T.A. Thorpe. 1996. Plant hormones and plant growth regulators in plant tissue culture. *In Vitro Cell Dev. Biol.Plant* 32: 272-289.
- Gurning, T.M. 1994. Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh terhadap Pertumbuhan Akar Setek Yunas Samping Tanaman Anyelir Tipe Standar (*Dianthus caryphllum L.*). *Prosiding Symposium Hortikultura Nasional*. Hlm 231-233.
- Hartman, H.T dan D.E Kester. 1978. *Cit. Harry, P. 2003. Plant Propagation Principles and Practitices Prentice Hlml International Inc. New Jersy. Hlm 320-321*
- Irwanto. 2001. *Pengaruh Hormone IBA (Indole Butyric Acid) Terhadap Persen Jadi Setek Pucuk Meranti Putih (Shorea montigena)*. [Skripsi]. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Ambon. 26 hlm
- Kastono, D., H, Sawitri, dan Siswandono. 2005. Pengaruh Nomor Ruas Setek dan Dosis Pupuk Urea terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kumis Kucing(*Orthosiphon aristatus*). *Ilmu Pertanian* Vol.12 No.1. Hlm 56-64
- Kusumaningrum, A. 2007. *Pertumbuhan Setek Euphorbia milli dengan Aplikasi lama Perendaman Setek dalam Larutan NAA dan Panjang Setek Cabang Lateral*. [Skripsi]. Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian UPN -VETERAN|| Yogyakarta. 48 Hlm
- Lakitan, B. 1996. *Fisiologi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 188 Hlm
- Make,J.,(2004).HorticulturaldevelopmentstrategiesforBariowiththeemphasizeon agro-eco-tourism. Paper presented in:Seminar onOpportunities forAgro-Eco-TourisminBarioHighlands,BarioSeminarandFestival,11-14May2004,Miri.
- Make,J.(2006).Rebranding Bario: FromBackpackers HeaventoPremium Rural Health-BasedAgro-Eco-TourismDestination.PaperpresentedinOrangUluNational AssociationTourismSeminarcumWorkshop.24–26February2006,DynastyHotel,Miri.

- Mariska, Darwati dan Moko, H. 1987. Perbanyak Setek Panili Dengan Zat Pengatur Tumbuh Pada Berbagai Media Tumbuh. *Edisi Kusus LITTROIII (2)*. 93 Hlm.
- Raharja dan W. Wiryanata. 2003. *Aneka Cara Memperbanyak Tanaman*. Agromedia Pustaka. Jakarta. Hlm 35-43
- Riyadi imron dan Tahardi J.S. 2005. Pengaruh NAA dan IBA terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tunas Kina. *Jurnal Bioteknologi Pertanian. Vol 10. No2*. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia. Bogor. Hal 45 – 50
- Salisbury, F.B and C.W.Ross.1995. *Plant Physiology* (Fisiologi Tumbuhan, alih bahasa Lukman dan Sumaryono). Edisi Ke-3. ITB. Bandung.343 hlm
- Waldan, N,K. 2007. *Warna-Warni Bougenvil*.<http://www.tabloidnova.com>. 11 Desember 2007. 2 Hlm
- Wattimena G.A. 1987. Zat Pengatur Tumbuh Tanaman. Diktat Lab. Kultur Jaringan. IPB. 247 Hlm.
- Wudianto, R. 2000. *Membuat Setek, Cangkok, dan Okulasi*. Penebar swdaya. Jakarta. Hlm 46-76
- Yufidi dan Handayani. 1998. *Pembiakan Vegetatif, Pengantar Agronomi*. Departemen Peranian IPB. 173 Hlm.

**PERAN STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING PADA
PERGURUAN TINGGI**

**Oleh:
Sriyono¹;
Rahmawati²; Bandi³ dan Agung Nur Probohudono⁴**

¹FEB - UPN "Veteran" Yogyakarta

^{2,3,4}FEB - Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: ¹sriyono_upnvy@yahoo.com; ²rahmaw2005@yahoo.com;

³bandi.ssm@gmail.com ; ⁴agungnurprobo@yahoo.com

ABSTRACT

Research the application of strategic management accounting in the organization have been conducted in several countries, mainly done on a profit-oriented organization and the results show the application of SMA can boost organizational performance. While peneltian application of SMA in Indonesia is still relatively small. This study aimed to find empirical evidence of the application of strategic management accounting (SMA) on the organization in Indonesia, especially in higher education.

The research sample is the manager program of study (universities) in DIY. Data analysis techniques in this research using regression analysis. The analysis showed that universities in Yogyakarta has implemented SMA, but its implementation had no significant effect on performance (accreditation) program of study (universities).

Keywords: Strategic Management Accounting, Performance

ABSTRAK

Penelitian penerapan strategic management accounting pada organisasi telah dilakukan di beberapa negara terutama banyak dilakukan pada organisasi yang berorientasi laba dan hasilnya menunjukkan penerapan SMA dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan peneltian penerapan SMA di Indonesia relatif masih sedikit. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris penerapan strategic management accounting (SMA) pada organisasi di Indonesia terutama pada perguruan tinggi.

Sampel penelitian adalah pengelola program studi (perguruan tinggi) di DIY. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menerapkan SMA, namun implementasinya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (akreditasi) program studi (perguruan tinggi).

Kata kunci: *Strategic Management Accounting, Kinerja*

1. PENDAHULUAN

Semakin tingginya tingkat intensitas persaingan perguruan tinggi. Untuk dapat bersaing, bertahan, dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif, maka organisasi harus mampu memahami dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Sasaran dan tujuan organisasi menjadi target kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik apabila didukung praktik akuntansi manajemen yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan selaras dengan rencana strategi organisasi. Praktik akuntansi manajemen seperti ini dikenal dengan nama *strategic management accounting* (SMA). Penggunaan informasi SMA dapat membantu manajer dalam mengadopsi dan mengimplementasikan rencana-rencana organisasi dalam merespon lingkungan serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan dan menetapkan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi (Mia dan Clarke, 1999).

Penelitian yang berkaitan penerapan SMA telah dilakukan di beberapa Negara terutama pada organisasi yang berorientasi laba (Hassan *et al.*, 2011; Fowzia, 2011; Said *et al.*, 2010; Noordin *et al.*, 2009; Simon, 2007; Poincelot dan Wegmann, 2006; Hyvonen dan Jarvinen, 2003; Guilding *et al.*, 2000; Mia dan Clarke, 1999; Balkin dan Mejia, 1987). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMA pada organisasi yang berorientasi laba telah dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik.

Pada sisi yang lain penelitian SMA pada organisasi yang tidak berorientasi laba (organisasi sektor publik) relatif masih sedikit. Organisasi yang berorientasi laba dan organisasi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik *private organization* dengan organisasi sektor publik dapat ditinjau dari tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, *stakeholders* yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan (Mardiasmo, 2002). Untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian yang berkaitan SMA maka penelitian pada organisasi sektor publik perlu dilakukan. Perguruan tinggi merupakan bagian dari organisasi sektor publik. Akreditasi program studi (perguruan tinggi) menjadi salah satu sasaran dan tujuan, dan menjadi salah satu indikator kinerja program studi (perguruan tinggi). Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa berdasarkan hasil akreditasi BAN PT tahun 2014 tingkat akreditasi program studi (perguruan tinggi) relatif masih rendah, dan kondisi ini menunjukkan kinerja program studi (perguruan tinggi) relatif masih rendah (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2014). Semakin meningkatnya persaingan pada perguruan tinggi dengan bertambahnya perguruan tinggi di daerah menjadi salah satu permasalahan pada manajemen perguruan tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pengelola untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya. Oleh karena itu, penerapan SMA pada perguruan tinggi sangat dibutuhkan.

Penelitian terhadap penerapan SMA di Indonesia relatif masih sedikit (belum banyak dilakukan) terutama pada organisasi sektor publik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris penerapan SMA pada perguruan tinggi di Indonesia. Apakah pada perguruan tinggi sudah menerapkan SMA? dan apakah SMA mampu menghasilkan kinerja (akreditasi) yang lebih baik?.

2. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

SMA merupakan "A form of management accounting in which emphasis is placed on information which relates to faktor s external to the firm, as well as non-financial information and internally generated information" (Simmonds, 1981). Sedangkan menurut Roslender dan Hart (2003) SMA merupakan suatu pendekatan umum untuk mengintegrasikan wawasan akuntansi manajemen dan manajemen pemasaran dalam kerangka manajemen strategis. Beberapa konsep SMA menurut Roslender dan Hart (2003) adalah:

1. SMA sebagai upaya untuk menggabungkan ide-ide strategis dalam akuntansi manajemen dengan mengambil alat strategi generik dan melihat informasi manajemen akuntansi apa yang dapat digunakan untuk mendukung strategi.
2. SMA dirancang untuk menyelaraskan akuntansi manajemen dengan manajemen pemasaran untuk posisi strategis. Pandangan ini tampak pada alat-alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dan menggunakan akuntansi manajemen dalam alat tersebut.
3. SMA hanya sebagai nama untuk mengelompokkan berbagai banyak pendekatan kontemporer dalam akuntansi manajemen yang telah dikembangkan yang memiliki implikasi strategis. Ada sejumlah pendekatan kontemporer akuntansi manajemen yang telah ditandai sebagai teknik SMA karena kandungan berorientasi eksternal dan pasar mereka.

SMA dapat dilihat melalui dua perspektif yaitu: pertama, SMA dapat dipahami sebagai satu set teknik akuntansi yang berorientasi strategis; kedua, SMA dapat dilihat sebagai keterlibatan akuntan dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan/organisasi (Simon dan Guilding, 2008b). Guilding *et al.* (2000) mengklasifikasikan teknik SMA menjadi lima kategori yaitu: penetapan biaya yang berorientasi strategi (*strategic costing*); perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja (*strategic planning, control and performance measurement*); pengambilan keputusan strategis (*strategic decision-making*); *competitor accounting*; dan *customer accounting*.

Kinerja merupakan ukuran dari hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama (Robbins, 1994a). Bastian (2001) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan strategis organisasi.

Hubungan antara SMA dan kinerja organisasi dalam penelitian ini mendasarkan pada teori organisasi dan teori kontinjensi. Menurut Otley (1980) teori kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen, yang dapat menyediakan dan memberikan informasi untuk digunakan berbagai macam tujuan perusahaan. Islam dan Hu (2012) melakukan *review* beberapa peneliti akuntansi manajemen terhadap teori kontinjensi, hasilnya menunjukkan bahwa teori kontinjensi diaplikasikan oleh peneliti akuntansi manajemen untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) kesesuaian antara pengendalian dan struktur organisasi, (2) pengaruh terhadap kinerja, dan (3) investigasi faktor-faktor kontinjensi dan pengaruh mereka terhadap kinerja.

Hakekat teori kontinjensi adalah "tidak ada satu cara terbaik yang bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan" (Gudono, 2014). Teori organisasi dikembangkan untuk memahami dan menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan dalam organisasi, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Fahmi, 2014). Teori organisasi menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikonstruksi untuk meningkatkan efektifitas organisasi yang pada akhirnya tercapainya tujuan (kinerja) organisasi (Robbins, 1994b).

Sasaran dan tujuan program studi (perguruan tinggi) merupakan target kinerja yang tertuang dalam renstra organisasi. Pengembangan dan implementasi praktik akuntansi manajemen harus dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Praktik akuntansi manajemen yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi adalah praktik akuntansi manajemen yang selaras dengan rencana strategi organisasi dikenal dengan nama *strategic management accounting*. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan SMA mampu mencapai kinerja yang lebih baik (Meznar dan Johnson, 2005; Poincelot dan Wegmann, 2006; Aldeen dan Feridun, 2006; Simon, 2007; Fauzi dan Idris, 2010; Banker *et al.*, 2011; Fowzia, 2011; Hassan *et al.*, 2011; Akenbor dan Okoye, 2012; Cadez dan Guilding, 2012; Marin, 2012; Aksoylu dan Aykan, 2013).

Meznar dan Johnson (2005) menemukan adanya kesesuaian strategi antara *Business-Government Relations (BGR) strategy* dan *BGR structure* perusahaan yang mengarah pada peningkatan *BGR performance*. Hasil penelitian Poincelot dan Wegmann (2006) menunjukkan bahwa indikator non-finansial merupakan informasi SMA yang relevan dapat digunakan untuk mendorong kinerja perusahaan manufaktur di Perancis. SMA berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Simons, 1987). Said *et al.* (2010) meneliti penerapan SMA pada pemerintah daerah di Malaysia, dan hasilnya menunjukkan bahwa teknik SMA berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Keselarasan antara strategis posisi perusahaan dan struktur pelaporan CIO perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Banker *et al.*, 2011). Hassan *et al.* (2011) menemukan bahwa penerapan SMA perusahaan manufaktur di Malaysia dapat meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan SMA pada perusahaan manufaktur di Nigeria dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan Akenbor dan Okoye (2012). Cadez dan Guilding (2012) menemukan bahwa SMA berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Cadez dan Guilding (2012) tingkat kinerja yang sama dapat dicapai dengan menggunakan alternatif struktur dan strategi yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kinerja organisasi dengan pilihan dan implementasi strategi, struktur dan sistem organisasi. Marin (2012) menemukan penggunaan sistem manajemen strategis berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian Aksoylu dan Aykan (2013) menunjukkan bahwa teknik SMA berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur di propinsi Kayseri Turki. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka dapat maka hipotesis 1 (H_1) yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Implementasi SMA berpengaruh terhadap Kinerja (Akreditasi) Program Studi pada perguruan tinggi di DIY.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh program studi (perguruan tinggi) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pertimbangan bahwa Yogyakarta sebagai kota pelajar menjadi salah satu barometer pendidikan tinggi di Indonesia. Sampel penelitian adalah pengelola program studi (perguruan tinggi) di DIY. Pengelola program studi (perguruan tinggi) dipilih sebagai responden dengan alasan bahwa mereka cukup memahami strategi yang dipilih dan diterapkan serta memahami dalam pengelolaan baik dari aspek finansial maupun non finansial yang berkaitan dengan penyusunan dan implementasi program kerja dan anggaran program studi (perguruan tinggi). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* dengan alasan agar penelitian ini benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dari objek yang tepat.

3.2. Variabel dan Definisi Operasional

Kinerja merupakan ukuran dari hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama (Robbins, 1994a). Instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja Organisasi dalam penelitian ini adalah Akreditasi Program Studi dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert jawaban responden, yaitu (1) Sangat kurang, (2) Kurang, (3) Cukup, (4) Baik dan (5) Sangat Baik (BAN-PT, 2014).

Strategic management accounting merupakan satu set teknik akuntansi yang berorientasi strategis dan keterlibatan akuntan dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan (Simon dan Guilding, 2008a). Instrumen yang digunakan untuk mengukur SMA adalah mengembangkan instrumen SMA Simon dan Guilding (2008a), dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert jawaban responden, yaitu (1) tidak pernah, (2) jarang, (3) Kadang-kadang, (4) Pernah dan (5) Selalu (Simon dan Guilding, 2008a).

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh SMA terhadap Kinerja (Akreditasi) program studi pada perguruan tinggi di DIY.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner disebarkan sejumlah 400 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali sejumlah 69 kuesioner, dan terdapat 2 responden pengisiannya tidak lengkap sehingga dikeluarkan dalam proses berikutnya. Oleh karena itu, jumlah data (kuesioner) yang diolah sejumlah 67 kuesioner yang terdistribusi dalam beberapa perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi di DIY sudah menerapkan SMA (Tabel 1). Sistem penetapan biaya sudah berorientasi pada strategi perguruan tinggi. Perencanaan pengendalian dan pengukuran kinerja sudah mendasarkan pada strategi perguruan tinggi. Sistem penetapan biaya produk/jasa pendidikan secara eksplisit sudah mempertimbangkan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan sudah

mendasarkan pada informasi pesaing, serta sudah melakukan penilaian finansial (keuangan) terhadap faktor-faktor kekuatan dari *brand* perguruan tinggi. Disamping itu pengelola PT juga melakukan penilaian biaya pesaing yang berfokus pada informasi struktur biaya pesaing, melakukan penilaian dan monitoring terhadap pesaing untuk menilai posisi organisasi dan perumusan strategi organisasi, dan melakukan evaluasi kinerja pesaing berdasarkan informasi keuangan yang dipublikasikan sebagai dasar merumuskan strategi organisasi. Pengelola perguruan tinggi juga sudah melakukan penilaian atas manfaat yang diperoleh dari customer tertentu, dan melakukan penilaian atas manfaat dan biaya yang diharapkan oleh customer terhadap produk atau jasa tertentu.

Tabel 1: Tingkat Penerapan SMA pada Perguruan Tinggi di DIY

No.	Dimensi SMA	Ket.	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu	Total
1	Strategic Costing	Jumlah	0	3	11	42	11	67
		%	0%	5%	16%	62%	16%	100%
2	Strategic planning, control and performance measurement	Jumlah	0	3	9	36	20	67
		%	0%	4%	13%	53%	30%	100%
3	Strategic decision making	Jumlah	0	3	12	45	6	67
		%	0%	5%	18%	68%	9%	100%
4	Competitor Accounting	Jumlah	2	12	19	28	6	67
		%	3%	18%	28%	41%	9%	100%
5	Customer Accounting	Jumlah	1	7	14	38	7	67
		%	2%	10%	20%	56%	11%	100%
Rata-rata		Jumlah	1	6	13	38	10	67
		%	1%	9%	19%	56%	15%	100%

sumber: data diolah

Hasil pengujian pengaruh implementasi SMA terhadap kinerja (akreditasi) program studi pada perguruan tinggi di DIY menunjukkan besarnya tingkat signifikansi (P) sebesar 0,743 dan nilai *standardized coefficients* (Beta) sebesar 0,042 (Tabel 2). Hasil ini dapat disimpulkan bahwa implementasi *strategic management accounting* secara statistik tidak berpengaruh terhadap Kinerja (Akreditasi) program studi. Dengan demikian Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh implementasi *Strategic Management Accounting* terhadap Kinerja (Akreditasi) program studi pada Perguruan Tinggi di DIY Tidak Terdukung. Meskipun sebagian besar Perguruan Tinggi di DIY sudah menerapkan SMA (Tabel 1), namun pengembangan dan implementasi *Strategic Management Accounting* tersebut belum dapat mendorong peningkatan kinerja (akreditasi) program studi yang lebih baik. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Poincelot dan Wegmann (2006), Said *et al.* (2010), Banker *et al.* (2011), Hassan *et al.* (2011), Akenbor dan Okoye (2012), Cadez dan Guilding (2012), Marin (2012), dan Aksoylu dan Aykan (2013), yang menunjukkan bahwa penerapan SMA berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Tabel 2: Hasil Uji Pengaruh SMA terhadap Kinerja Organisasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	Standardized Coefficients (Beta)	Sig.	Kesimpulan
<i>Strategic Management Accounting</i> (SMA)	Kinerja Organisasi (Akreditasi)	.042	.743	Tidak Signifikansi

sumber: data diolah

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menerapkan *Strategic Management Accounting* (SMA), namun penerapan SMA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (akreditasi) program studi (perguruan tinggi).

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi pengelola program studi (perguruan tinggi) dalam mengembangkan SMA sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja perguruan (akreditasi) program studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akenbor, C. O., dan E. I. Okoye. 2012. The Adoption of Strategic Management Accounting in Nigerian Manufacturing Firms. *An International Journal of Arts and Humanities (AFRREV UAH)*, Bahir Dar, Ethiopia. 1 (3): 270-287.
- Aksoylu, S., dan E. Aykan. 2013. Effects of Strategic Management Accounting Techniques on Perceived Performance of Businesses. *Journal of US-China Public Administration*. 10 (10): 1004-1017.
- Aldeen, A. H., dan M. Feridun. 2006. Impact of Strategic Initiatives in Management Accounting on Corporate Financial Performance: Evidence from Amman Stock Exchange. *Managing Global Transitions*. 4.
- Balkin, D. B., dan L. R. G. Mejia. 1987. Toward A Contingency Theory Of Compensation Strategy. *Strategic Management Journal*. 8: 169-182.
- BAN-PT. 2014. <http://ban-pt.kemdiknas.go.id>.
- Banker, R. D., N. Hu., P. A. Pavlou, dan J. Luftman. 2011. CIO Reporting Structure, Strategic Positioning and Firm Performance. *MIS Quarterly*. 35 (2): 487-504.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Cadez, S., dan C. Guilding. 2012. Strategy, strategic management accounting and performance: a configurational analysis. *Industrial Management & Data Systems*. 112 (3): 484-501.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2014. <http://dikti.go.id>.
- Fahmi, I. 2014. *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Edited by Muslim A. Djalil. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, H., dan K. M. Idris. 2010. The Performance Implications of Fit among Environment, Strategy, Structure, Control System and Social Performance. *Issues in Social and Environmental Accounting*. 3 (2): 117-142.

- Fowzia, R. 2011. Strategic Management Accounting Techniques: Relationship with Business Strategy and Strategic Effectiveness of Manufacturing Organizations in Bangladesh. *World Journal of Management*. 3 (2): 54-69.
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Guilding, C., K. S. Cravens, dan M. Tayles. 2000. An International Comparison of Strategic Management Accounting Practices. *Management Accounting Research*. 11 (1): 113-135.
- Hassan, N. H. N., N. M. N. Muhammad, dan Z. Ismail. 2011. Strategic Management Accounting Practice In Malaysia: Case of Manufacturing Sector. *Journal of Finance, Accounting and Management*. 2 (2): 23-38.
- Hyvonen, T., dan J. Jarvinen. 2003. ICT and Accounting In The Strategy Process. *Frontiers Of E-Business Research*.
- Islam, J., dan H. Hu. 2012. A Review of Literature on Contingency Theory in Managerial Accounting. *African Journal of Business Management*. 6 (5): 5159-5164.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marin, J.-C. 2012. The Impact Of Strategic Planning and The Balanced Scorecard Methodology On Middle Managers' Performance In The Public Sector. *International Journal of Business and Social Science*. 3 (1): 114-127.
- Meznar, M. B., dan J. J. H. Johnson. 2005. Business-Government Relations Within a Contingency Theory Framework: Strategy, Structure, Fit, and Performance. *Business & Society*. 44 (2): 119-143.
- Mia, L., dan B. Clarke. 1999. Market Competition, Management Accounting Systems and Business Unit Performance. *Management Accounting Research*. 10: 137-158.
- Noordin, R., Y. Zainuddin, dan M. Tayles. 2009. Strategic Management Accounting Information Elements: Malaysian Evidence. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*. 4 (1): 17-34.
- Otley, D. T. 1980. The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. *Accounting, Organizations and Society*. 5 (4): 413-428.
- Poincelot, E., dan G. Wegmann. 2006. Perspectives on non-financial indicators as a strategic management accounting tool: A French inquiry. *FARGO-Centre de recherche en Finance, ARchitecture et Gouvernance des Organisations*: 1-28.
- Robbins, S. P. 1994a. *Essential of Organizational Behavior, Fourth Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- . 1994b. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi (Terjemahan)*. Jakarta: Arcan.

- Roslender, R., dan S. J. Hart. 2003. In Search Of Strategic Management Accounting: Theoretical and Field Study Perspectives. *Management Accounting Research*. 14: 255-279.
- Said, J., W. S. Hui, R. Othman, dan D. Taylor. 2010. The Mediating Effects Of Organizational Learning Orientation On The Relationship Between Strategic Management Accounting Information Use and Organizational Performance. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*. 5 (2): 11-29.
- Simmonds, K. 1981. Strategic management accounting. *Management Accounting*,. 59: 26-29.
- Simon, C. 2007. A Configuration Form Of Fit In Management Accounting Contingency Theory: An Empirical Investigation. *The Business Review, Cambridge*. 7 (2): 220.
- Simon, C., dan C. Guilding. 2008a. An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. *Accounting, Organizations and Society*. 33: 836-863.
- . 2008b. Strategy and Strategic Management Accounting: A Investigation Of Organizational Configurations. In *Manchester Business School Research Seminar – June 18, 2008*.
- Simons, R. 1987. Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis. *Accounting, Organizations and Society*. 12: 357-374.

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP
KINERJA ORGANISASI DENGAN KOMPOSISI MANAJEMEN
PUNCAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

Dian Indri Purnamasari

Ratna Hindria

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Email: indri_mtc@yahoo.com

Abstract

This study empirically whether the management information system affect the performance of the organization with the composition of top management as moderating variables. The research object is the head of the management of university both state and private universities and hypothesis testing using Moderated Regression Analysis. The test results showed that the management information system affect the performance of an organization Universities, that influence is positive which means that the better a management information system will enhance the performance of university, while the composition of top management has no effect as the moderating variable between SIM and performance at university. This means that the composition of the top management does not strengthen management information system influence on the performance of an organization (university).

Keywords: *system, management, performance, moderation, university.*

1. PENDAHULUAN

Saat ini perusahaan dihadapkan pada kebutuhan akan Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM menjadi keunggulan dalam persaingan dan peningkatan kinerja. Keberadaan SIM sebagai alat untuk menyediakan informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan berbagai pihak dalam organisasi, dan kebutuhan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. SIM bahkan menjadi salah satu syarat keunggulan bersaing pada saat ini.

Berbagai penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa SIM digunakan oleh organisasi dan manajemen puncak, sebagai alat manajemen yang strategik dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja (Lin, 2006; Hagan *et.al.*, 2007). Berbagai keunggulan penggunaan SIM dalam organisasi mampu

mempengaruhi peningkatan kinerja dalam organisasi, dan beberapa penelitian terdahulu mengkonfirmasi hal tersebut, yaitu Fuller dan Cooper (1996), Choe (2006) dan Gil (2009).

Beberapa penelitian tentang pengaruh SIM terhadap kinerja juga dilakukan tidak hanya pada sektor swasta, akan tetapi pada sektor publik yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Adapun hasil penelitian pada sektor publik menyimpulkan bahwa SIM mempengaruhi kinerja yang menjadikan organisasi lebih efisien, berkualitas, dan fleksibel dalam memberikan pelayanan jasanya (Kaul, 1997). Gil dan Hartman (2006) melakukan penelitian sejenis pada sektor publik, yaitu rumah sakit di Spanyol dan hasilnya menyatakan bahwa SIM meningkatkan kinerja rumah sakit, yaitu efisiensi biaya, fleksibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien dan masyarakat.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena pada Perguruan Tinggi sering muncul fenomena pengembangan SDM yang berbeda dengan pengembangan SDM di korporasi. Terdapat *gap generation* yaitu keberagaman usia yang kurang diperhatikan karena kebutuhan manajemen puncak dan jumlah mahasiswa yang tidak stabil. Selain itu Perguruan Tinggi juga memiliki fenomena keterbatasan dana untuk pengembangan kualitas SDM dan minimalnya pencapaian standar. Sektor jasa pendidikan dipilih sebagai obyek dalam penelitian ini karena sektor ini memerlukan penggunaan SIM untuk meningkatkan kinerja dalam menghadapi persaingan, khususnya di Yogyakarta sebagai kota yang memiliki berbagai Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta. Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji secara empiris apakah SIM berpengaruh terhadap kinerja organisasi dengan komposisi manajemen puncak sebagai variabel pemoderasi.

Tinjauan Pustaka

Keberadaan SIM sebagai alat untuk menyediakan informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan berbagai pihak dalam organisasi, dan kebutuhan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. SIM bahkan menjadi salah satu syarat keunggulan bersaing pada saat ini, keberadaan SIM mampu memberikan berbagai keuntungan dan keunggulan bagi organisasi dan hal ini dapat digunakan dalam persaingan, antara lain (O'Brien, 1996):

1. *Cost Leadership*
Penggunaan SIM berbasis teknologi mampu mengurangi biaya dalam sebuah proses produksi, misalnya biaya pemasaran dan administrasi.
2. *Differentiation Strategy*
Penggunaan SIM mampu memberikan keunggulan strategi yang berbeda dari organisasi lainnya, misalnya penggunaan web atau aplikasi perangkat lunak yang memudahkan interaksi dengan *stakeholder*.
3. *Innovation Strategy*
Strategi inovasi organisasi dapat didukung dengan SIM berbasis teknologi, misalnya berinteraksi secara langsung lewat berbagai teknologi dengan konsumen.

4. *Growth Strategy*

Berbagai strategi yang diterapkan pada keuntungan tersebut di atas, mampu meningkatkan pertumbuhan organisasi, baik dari sisi non keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan keuangan.

5. *Alliance Strategy*

Organisasi dalam menggunakan SIM mampu melakukan interaksi dengan stakeholder sebagai salah satu strategi beraliansi secara optimum. Aliansi dapat menjadi mata rantai proses keberlangsungan organisasi secara kuat dan berkesinambungan.

Lederer dan Mendelow (1987) menyimpulkan bahwa top manajemen ikut menentukan suksesnya informasi yang dapat dikelola oleh bawahan. Apabila top manajemen tidak menyadari efektivitas proses informasi, sangat mungkin sistem yang ada tidak dipahami dengan maksimal dan hanya melihat komputer sebagai alat saja. Berikut alasan mengapa proses informasi gagal menjadi sumber informasi Lederer dan Mendelow (1987):

- a. Manajemen tidak menyadari bahwa sistem memiliki informasi yang luar biasa, tidak hanya sekedar suatu alat teknologi.
- b. Manajemen tidak menemukan manfaat dari suatu teknologi, justru sebaliknya menimbulkan kesulitan bagi organisasi dalam pengadaan dan penggunaan.
- c. Manajemen tidak mampu melihat informasi sebagai sumber daya bisnis yang harus dikelola jangka panjang.
- d. Manajemen melihat informasi sebagai biaya bukan manfaat ekonomi jangka panjang.
- e. Manajemen hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek bukan jangka panjang, khususnya terkait dengan sistem informasi.

Proses informasi yang baik akan memberikan ketepatan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini partisipasi anggaran. Ketepatan informasi tersebut akan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi yang pada akhirnya mampu mendukung partisipasi anggaran dalam organisasi.

Pengembangan Hipotesis

SIM bertujuan memberikan ketersediaan permintaan akan informasi bagi pengguna, salah satunya adalah pihak manajemen, yang nantinya terdapat *value* yang tersampaikan bagi manajemen untuk suatu pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja (Gil, 2009). Gil (2009) membedakan tujuan strategis atas ketersediaan informasi SIM menjadi dua yaitu tujuan pengurangan kos dan tujuan strategis terkait fleksibilitas. Hasil penelitian Gil (2009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara SIM dengan kinerja organisasi diukur dengan fleksibilitas dan pengurangan kos.

Manajemen sebagai pengelola suatu organisasi memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap kegunaan SIM dalam peningkatan kinerja, dukungan tersebut dapat semakin kuat apabila manajemen memiliki komposisi beberapa hal, antara lain usia, pengalaman kerja, pendidikan, dan pengalaman

dalam pengembangan diri melalui berbagai kegiatan selain pendidikan formal (Hambrick dan Mason, 1984).

Lederer dan Mendelow (1987) menyimpulkan bahwa top manajemen ikut menentukan suksesnya SIM yang dapat dikelola oleh bawahan. Apabila top manajemen tidak menyadari efektivitas proses informasi, sangat mungkin sistem yang ada tidak dipahami dengan maksimal dan hanya melihat komputer sebagai alat saja.

Komposisi manajemen puncak ikut memperkuat pengaruh SIM terhadap kinerja suatu organisasi, apabila manajemen puncak terdiri berbagai usia, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan pengalaman di luar pendidikan formal, maka kemampuan melakukan analisis atas sebuah informasi akan lebih optimum dan koheren sehingga pengambilan keputusan akan semakin mampu meningkatkan kinerja (Carpenter *et al.*, 2004). Simons *et al.* (1999) dalam penelitiannya menyimpulkan juga bahwa komposisi manajemen puncak yang heterogen atau beragam akan mampu memberikan perspektif beragam dalam kegiatan operasional dan aktivitas organisasi sehingga memperkuat pengaruh SIM terhadap kinerja organisasi.

Komposisi manajemen puncak yang beragam, lebih efektif dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman ilmu pengetahuan, kemampuan, pengalaman, intuisi, dan perspektif (Gupta dan Givindarajan, 1984). Semakin beragam komposisi manajemen puncak dalam sebuah organisasi, akan semakin memberikan nilai tambah bagi SIM dan pencapaian kinerja yang lebih optimum. Gil (2009) menyimpulkan bahwa keberagaman manajemen puncak memperkuat pengaruh SIM terhadap kinerja pada sebuah sektor publik rumah sakit di Spanyol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis:

- H₁: SIM berpengaruh terhadap kinerja pada sebuah organisasi Perguruan Tinggi.
- H₂: Komposisi manajemen puncak memperkuat pengaruh SIM terhadap kinerja pada sebuah organisasi Perguruan Tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian adalah organisasi sektor jasa pendidikan, yaitu Perguruan Tinggi (PT) baik Negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

1. PT merupakan organisasi yang juga membutuhkan penerapan SIM dalam pengelolaan untuk bersaing dan peningkatan kinerja.

2. PT merupakan organisasi yang memiliki banyak komposisi latar belakang manajemen sebagai pengelola, baik itu latar belakang pendidikan, usia, pengalaman, dan pengembangan sumber daya manusia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural dalam pengelolaan PT baik negeri maupun swasta di Yogyakarta. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria bahwa pejabat struktural tersebut telah menduduki posisi minimal selama 2 tahun. Adapun yang menjadi alasan kriteria tersebut adalah dalam kurun waktu tersebut maka responden telah beradaptasi dan mampu menguasai SIM organisasi secara keseluruhan sehingga mampu memberikan penilaian terhadap SIM dan kinerja organisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan, dengan pertimbangan untuk mendapatkan data opini individu dari responden yang dituju (Jogiyanto, 2011). Metode ini juga banyak digunakan secara luas pada beberapa penelitian terdahulu dalam bidang yang sejenis dengan penelitian ini, dengan demikian dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan data primer melalui pengiriman kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini kepada para responden sesuai dengan kriteria.

Definisi Operasional Variabel

Semua instrumen variabel dalam penelitian ini menggunakan 6 skala *Likert* jawaban responden, yaitu dimulai dengan skala tertinggi Sangat Setuju Sekali (SSS), Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Tidak Setuju Sekali (TSS), dan skala terendah adalah Sangat Tidak Setuju Sekali (STSS). Hal tersebut dilakukan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, antara lain menghindari munculnya skala jawaban keragu-raguan agar responden lebih terkonsentrasi pada jawaban yang lebih pasti dan berdasarkan hasil penelitian Chomeya (2010) yang menyatakan bahwa untuk penelitian menggunakan kuesioner yang menanyakan tentang hal-hal secara individu menyimpulkan bahwa penggunaan skala 6 tersebut memiliki level diskriminan dan reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan 5 skala.

- a. SIM adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan (McLeod, 2007). Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh penelitian terdahulu yang menanyakan tentang perbedaan dimensi informasi, luas lingkup, ketepatan waktu, aggregasi, dan integrasi (Gil, 2004).
- b. Kinerja adalah bagaimana suatu organisasi diukur menggunakan fokus pada kinerja strategik dan fleksibilitas (Govindarajan, 1984). Variabel ini diukur menggunakan 9 pertanyaan yang dikembangkan oleh Gil (2009), menanyakan tentang situasi personal, tanggungjawab desentralisasi, dan berbagai program pengurangan biaya.

- c. Komposisi Manajemen Puncak adalah keberagaman latar belakang manajemen puncak sebagai pengelola manajemen organisasi (Gil, 2009). Variabel ini diukur menggunakan 4 karakteristik demografi, yaitu usia, pengalaman kerja, pendidikan, dan pengalaman dalam pengembangan diri melalui berbagai kegiatan selain pendidikan formal.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Data dalam penelitian tidak akan berguna apabila instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reliabilitas dan validitas (Copper dan Schindler, 2001). Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan tetap konsisten, pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dengan indikator suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,5 (Hair *et al.*, 1998). Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik instrumen penelitian mampu mengukur konsep yang seharusnya diukur. Pengujian ini dilakukan menggunakan matriks korelasi antar instrumen dengan indikator suatu instrumen dikatakan valid apabila masing-masing kurang dari tingkat signifikansi 0,05 (Hair *et al.*, 1998).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apakah kehadiran sebuah variabel memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pilot Test

Sebelum kuesioner diberikan kepada responden yang sesungguhnya, peneliti melakukan *pilot test* untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen serta menghindari pertanyaan yang kurang jelas, persepsi yang berbeda atas pertanyaan, dan mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. *Pilot test* dilakukan terhadap 44 responden yang terdiri dari para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Adapun hasil *pilot tes* adalah pengujian reliabilitas untuk variabel Pengembangan SIM adalah *Cronbach Alpha* 0,870 lebih besar dari 0,5 sehingga variabel tersebut adalah reliabel dan variabel Kinerja adalah *Cronbach Alpha* 0,814 lebih besar dari 0,5 sehingga variabel tersebut adalah reliabel. Adapun pengujian validitas menunjukkan bahwa variabel Pengembangan SIM dengan 12 item pertanyaan, keseluruhan dinyatakan valid, dan variabel Kinerja dengan 9 item pertanyaan, keseluruhan dinyatakan valid.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model	t	Sig.
(Constant)	4.841	.000
SIM	4.093	.000
Moderasi	-.580	.563

Tabel 1. Pengujian Hipotesis

Variabel	t	Sig.
SIM	4.093	0.000
Moderasi	-.580	0.583

Nilai signifikansi pada tabel menunjukkan 0.000 lebih kecil dari Alpha (5%) artinya bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) berpengaruh terhadap kinerja pada sebuah organisasi Perguruan Tinggi (H_1 diterima). SIM mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan manajemen di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gill (2009). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terhadulu oleh Carpenter *et al.* (2004) dan Gil (2009) bahwa SIM berpengaruh terhadap kinerja organisasi, dalam penelitian ini adalah organisasi pendidikan PT.

SIM merupakan kebutuhan penting dalam aktivitas dan kegiatan sebuah organisasi. Dengan adanya SIM yang baik dan terkoordinasi, maka kinerja akan terdukung dan mengalami peningkatan yang baik. Dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitasnya, PT sangat terbantu dengan adanya SIM yang baik bagi internal (segenap sivitas akademika), maupun eksternal (masyarakat sekitar), dengan kata lain seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap PT tersebut merasakan dampak dan manfaat dari SIM. Dampak tersebut juga akan memberikan peningkatan kinerja yang baik bagi PT tersebut. Diharapkan ke depan PT tetap senantiasa mengepankan pengembangan SIM bagi berbagai pihak sehingga peningkatan kinerja lebih optimum.

Adapun variabel pemoderasi menunjukkan nilai signifikansi 0.563 lebih besar dari Alpha (5%) artinya variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh SIM terhadap kinerja pada sebuah organisasi Perguruan Tinggi (H_2 ditolak). Komposisi manajemen puncak tidak memperkuat keberadaan SIM dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa di dama

organisasi PT dimungkinkan tidak adanya keberagaman komposisi manajemen puncak.

Hal tersebut terjadi karena organisasi pada PT pada umumnya pejabat struktural berada pada rentang usia yang sama, sama-sama muda apabila secara sistem PT tersebut mengedepankan kemampuan generasi mudanya, atau sama-sama usia senior apabila PT tersebut masih konvensional dengan paradigma senioritas, jarang yang mampu mengkombinasikan perpaduan usai demi sebuah regenerasi pimpinan. Dengan komposisi usia yang hampir sama, secara kurang lebih juga menunjukkan pengalaman yang juga hampir sama sehingga tidak terjadi komposisi pengalaman yang berbeda. Demikian halnya dengan pendidikan baik sektor formal maupun informal (pelatihan), pada umumnya struktural pada organisasi PT akan memiliki latar belakang ilmu yang sama dengan fakultas atau jurusan masing-masing, demikian juga pelatihan yang diikuti akan secara umum sama dengan latar belakang pendidikan, bukan pada peran sebagai manajemen organisasi.

Berdasarkan hal-hal dan analisis tersebut di atas berbeda dengan penelitian terdahulu lebih pada dikarenakan obyek penelitian yang berbeda. Karakteristik organisasi manufaktur akan sangat berbeda komposisi manajemen puncak dengan organisasi PT.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. SIM berpengaruh terhadap kinerja pada sebuah organisasi Perguruan Tinggi, pengaruh tersebut adalah positif yang artinya semakin baik sebuah SIM akan meningkatkan kinerja PT.
2. Komposisi manajemen puncak tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi antara SIM dan kinerja pada PT. Artinya komposisi manajemen puncak tidak memperkuat pengaruh SIM terhadap kinerja pada sebuah organisasi Perguruan Tinggi.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain akses terhadap manajemen puncak PT dan kesibukan diantara mereka, sehingga jumlah responden terbatas. Penelitian ini juga tidak memisahkan antara responden dari PTN dan PTS yang secara definisi memiliki beberapa perbedaan karakteristik organisasi terutama penggunaan anggaran. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti memanfaatkan akses forum komunikasi pimpinan PT dan juga membuat perbedaan persepsi antara PTN dan PTS, dapat juga dengan memasukkan variabel lain, misalnya penggunaan anggaran dalam pengembangan SIM.

5. REFERENSI

- Carpenter, M.A., Geletkanycz, M.A., dan Sanders W.G. 2004. *Upper Echelons Research Revisited: Antecedents, Elements, and Consequences of Top Management Team Composition*. *Journal of Management*. 30, 749-778.
- Choe, J. M. 1996. The relationships among performance of accounting information systems, influence factors and evolution level of information systems, *Journal of Management Information Systems*. 12 (4), p. 215-239.
- Cooper, D. dan Schindler, P. 2001. *Business Research Methods*, 7th edition, McGraw Hill, Singapore
- Fuller-Love, N dan Cooper, J. 1996. *Competition or co-operation? Strategic Information Management in the National Health Service: A Case Study of the Ceredigion NHS Trust*. *International Journal of Information Management*. 16(3), 219-232.
- Gil, D.N 2009. *Management Information System and Strategic Performances: The Role of Top Team Composition*. *International Journal of Information Management*. 29, 104-110.
- Gujarati, D. N. 1995. *Basic Econometrics*, McGraw-Hill Higher Education.
- Gupta, A., dan Govindarajan, V. 1984. *Business Unit Strategy, Managerial Characteristics, and Business Unit Effectiveness at Strategy Implementation*. *Academy of Information Management*. 27, 397-405.
- Hagan D., Watson, O., dan Barron, K. 2007. *Ascending into order: A Reflective Analysis from a Small Open Source Development Team*. *International Journal of Information Management*. 27, 397-405.
- Hair, J., Rolph A., Ronald T. dan William B. 1998. *Multivariate Data Analysis*, 5th edition, Prentice Hall International Inc, New Jersey.
- Hartman, Frank dan Victor, S, Mass. 2010. Why Business Unit Controllers Create Budget Slack: Involvement in Management, Social Pressure, and Machiavellianism, *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 22, No. 2, p. 27-49.
- Jogiyanto, H. 2011. *Pedoman Survei Kuesioner: Pengembangan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*, BPF, UGM.
- Kaul, M 1997. *The New Public Administration: management Innovation in Government*. *Public Administration and Development*. 17, 13-26.
- Kreitner, R. Dan Kinicki, A. 2001. *Organization Behavior*, 5th Edition, McGraw-Hill.
- Lederer, A.L, dan Mendelow, A.L. 1987. Information Resource Planning: Overcoming Difficulties in Identifying Top Management's Objective, *MIS Quarterly*. Vol. 11, No. 3, September, p. 389-399.

- Lin,A. (2006). *The Acceptance an Use of a business to business Information System*. International Journal of Information Management.26, 386-400.
- Shin, Jae-Hwa; Cameron, Glen, T., dan Cropp, Fritz. 2006. Occam's Razor in The Contingency Theory: A national Survey on 86 Contingency Variables, *Public Relations Review*. 32, p. 282-286.
- Simons, T., Pelled, L.H., dan Smith, K.A. 1999. *Making use Difference: Diversity, Debate, and Decision Comprehensiveness in Top Mangement Teams*. Academy of Management Journal. 42, 662-673.

IMPLEMENTASI MODEL PREDIKSI LABA BERDASAR *COST STICKINESS*

Windyastuti, S.E., M.Si.
windyastuti.wijaya@gmail.com

Kunti Sunaryo, S.E., M.Si., Ak.
kunti73@yahoo.co.id

Abstrak

Kos stickiness berdampak negatif pada akurasi prediksi laba. Semakin tinggi cost stickiness, semakin tidak akurat prediksi laba. Ketidakakuratan prediksi laba menyebabkan laba yang dilaporkan akan memberikan informasi yang kurang penting bagi prediksi laba periode mendatang. Semakin tinggi cost stickiness, semakin rendah kepercayaan investor terhadap informasi tentang laba sehingga semakin lemah pula respons investor terhadap pengumuman laba. Implementasi dari model prediksi laba berdasar kos stickiness telah dilakukan melalui simulasi dan sosialisasi tentang model estimasi laba dasar model komputer berbasis Microsoft Office Excel telah dikembangkan. Melalui implementasi model tersebut, diharapkan investor, kreditor, manajemen perusahaan maupun masyarakat dapat melakukan koreksi terhadap prediksi mereka tentang besaran laba apabila derajat cost stickiness dinilai relatif tinggi. Kata Kunci: model, prediksi, laba, cost stickiness, implementasi

Abstract

Cost stickiness has negative impact on earnings prediction accuracy. Higher the cost stickiness, higher inaccurate profit predictions. Inaccurate profits prediction cause reported earnings will provide less important information for forecast future periods. Higher the cost stickiness, lower investors confidence to information about earnings, so they response weakly to the earnings announcement. Implementation of profit prediction model based cost stickiness has been done through simulation and dissemination of earnings estimation model based on Microsoft Office Excel. Through the implementation of the expected investors, creditors, management companies and the general public can make corrections to their predictions about the profit if the degree of cost stickiness relatively high.

Keywords: model, prediction, profit, cost stickiness, implementation

Pendahuluan

Textbook tradisional menyatakan bahwa perubahan kos sejalan secara simetris dengan perubahan penjualan bersih. Akan tetapi hasil beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa kos merespons secara asimetrik terhadap penurunan dan kenaikan penjualan bersih (Kama dan Weiss, 2010). Besarnya penurunan kos yang disebabkan penurunan penjualan bersih lebih kecil dibandingkan besarnya kenaikan kos yang disebabkan kenaikan penjualan bersih ekuivalen. Perilaku kos ini disebut *sticky*.

Anderson *et al* (2007) menunjukkan adanya perbedaan slope kurva kos pada saat penjualan meningkat dan pada saat penjualan menurun. Slope kurva kos pada saat penjualan

bersih menurun lebih kecil daripada slope kurva kos pada saat penjualan bersih meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kos sulit untuk turun. Temuan dari beberapa penelitian terakhir menunjukkan pentingnya analisis perilaku *kos stickiness* dalam bidang akuntansi kos (Banker *et.al*, 2011).

Perolehan laba merupakan salah satu target kinerja perusahaan termasuk perusahaan. Untuk itu, akurasi prediksi laba perlu diperhatikan oleh perusahaan. Akurasi prediksi laba dipengaruhi banyak faktor diantaranya derajat *cost stickiness*. *Cost stickiness* berdampak negatif pada akurasi prediksi laba. Kenaikan *cost stickiness* berdampak pada penurunan akurasi prediksi laba (Windyastuti *et al*, 2015). Semakin tinggi *cost stickiness*, semakin tidak akurat prediksi laba. Hal ini berarti semakin besar kesalahan dalam prediksi laba. Pada perusahaan yang menghadapi *cost stickiness*, akurasi prediksi laba semakin rendah. Dengan kata lain kesalahan dalam prediksi laba akan lebih besar (Abarbanell, *et al.*, 1995)

Besarnya kesalahan prediksi laba menunjukkan rendahnya akurasi prediksi laba. Kepercayaan investor terhadap laba yang diumumkan mengurangi kepercayaan sehingga akan memberikan respons yang lemah terhadap pengumuman laba yang sifatnya tidak akurat. Ketidakakuratan prediksi laba menyebabkan laba yang dilaporkan akan memberikan informasi yang kurang penting bagi prediksi laba periode mendatang. Semakin tinggi *cost stickiness*, semakin rendah kepercayaan investor terhadap informasi tentang laba sehingga semakin lemah pula respons investor terhadap pengumuman laba (Windyastuti *et al*, 2015).

Faktor *cost stickiness* merupakan sinyal bagi investor. *Cost stickiness* yang tinggi akan diikuti kesalahan prediksi laba yang tinggi pula. Kondisi ini mirip dengan sinyal buruk (*bad news*) bagi akurasi prediksi laba (Kama dan Weiss, 2013). Investor harus melakukan koreksi terhadap besaran laba yang diumumkan perusahaan. Sebaliknya apabila *cost stickiness* rendah, maka kesalahan prediksi laba rendah pula. Keadaan ini merupakan suatu sinyal baik (*good news*). Dalam hal ini investor mampu memprediksi laba secara lebih tepat sehingga keputusan yang dibuatnya juga lebih tepat.

Dalam kasus penurunan aktivitas perusahaan, adanya faktor *cost stickiness* menyebabkan kos menjadi lebih tinggi karena proses penyesuaian yang berjalan lebih lambat (Kim dan Wang, 2014). *Cost stickiness* menyebabkan penyesuaian kos relatif kecil sehingga kos yang dapat dihemat juga relatif kecil. Hal ini mengakibatkan penurunan laba pada perusahaan yang menghadapi *cost stickiness* lebih besar daripada perusahaan yang tidak menghadapi *cost stickiness*. Penurunan laba yang lebih besar meningkatkan variabilitas dalam distribusi laba sehingga prediksi laba menjadi tidak akurat.

Variabilitas akan menjadi lebih tinggi perusahaan yang menghadapi *cost stickiness* daripada variabilitas perusahaan yang tidak menghadapi *cost stickiness*. Variabilitas kesalahan prediksi akan meningkat seiring dengan peningkatan derajat *cost stickiness* (Novak dan Popesco, 2014). Dalam menghadapi hal tersebut analis akan menyadari bahwa perilaku kos sangat berperan. Pada perusahaan yang menghadapi *cost stickiness*, kesalahan prediksi menjadi lebih besar baik pada saat aktivitas perusahaan meningkat maupun menurun.

Dalam dunia bisnis, prediksi akurat diperlukan agar dapat memberikan gambaran tentang masa depan suatu perusahaan. Untuk itu para pihak yang berkepentingan dengan informasi tentang pasar modal perlu memikirkan akurasi besaran laba dalam laporan keuangan. Para pihak yang berkepentingan perlu melakukan koreksi terhadap besaran laba dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada umumnya dalam laporan keuangan tersebut perhitungan laba belum mempertimbangkan aspek *cost stickiness*. Laba yang dilaporkan bisa saja berbeda dengan laba sesungguhnya terutama apabila perusahaan menghadapi masalah *cost stickiness*.

Tinjauan Pustaka

Kos Stickiness

Dalam literatur akuntansi kos mencakup kos tetap, kos variabel, dan kos semi-variabel. Besar kecilnya kos tetap tidak dipengaruhi perubahan output. Sementara itu, kos variabel merupakan kos yang totalnya berhubungan dengan perubahan output secara proposional. Kos semi-variabel merupakan kos yang totalnya dipengaruhi volume sumber daya tapi tidak proposional. Untuk kos semi variabel, besarnya perubahan kos tergantung pada perubahan tingkat aktifitas. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kos meningkat lebih tinggi saat volume aktivitas meningkat dibanding penurunan kos saat volume aktivitas menurun (Anderson et al, 2003). Perilaku kos ini disebut *sticky*.

Kos dikatakan *sticky* apabila penurunan kos akibat penurunan penjualan bersih lebih kecil daripada kenaikan kos akibat kenaikan penjualan bersih yang sama (Weiss, 2010). *Kos stickiness* timbul akibat pertimbangan (*deliberation*) manajer dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan adanya kos penyesuaian (*adjustment cost*). Manajer harus mempertimbangkan kos penyesuaian bila mereka ingin menambah atau mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan. Misal untuk sumber daya tenaga kerja, terdapat kos penyesuaian yang berkaitan dengan penurunan jumlah pekerja seperti pembayaran pesangon dan penurunan moral pekerja yang tersisa. Sebaliknya apabila manajer memutuskan untuk menambah jumlah pekerja, maka kos penyesuaian berupa biaya rekrutmen dan pelatihan pekerja. Sementara itu, untuk sumber daya kapital (misalnya mesin), maka kos penyesuaian pada saat penjualan bersih turun berupa kos penyetalan ulang mesin. Sebaliknya pada saat penjualan bersih meningkat maka kos penyesuaian berupa kos pemasangan mesin-mesin.

Manajer akan kesulitan untuk mengurangi jumlah pekerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini dikarenakan perusahaan harus membayar sejumlah pesangon kepada pekerja yang terkena PHK. Di samping itu adanya PHK menyebabkan pekerja kekhawatiran dan ketidakpuasan bagi pekerja termasuk mereka yang tidak terkena PHK. Ketidakpuasan pekerja akan diikuti dengan banyaknya kasus pemogokan. Pemogokan mengakibatkan hilangnya jumlah jam kerja dan membuat kacau target produksi yang sudah ditetapkan. Selama pemogokan, perusahaan tidak dapat menghasilkan output, sedangkan perusahaan biasanya sudah terikat perjanjian dengan pembeli untuk mengirimkan output sesuai dengan pesanan. Pemogokan juga merugikan pihak pekerja karena yang bersangkutan bisa kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja (Barutu, 2003: 8).

Kesulitan manajer berikutnya adalah pada saat mengurangi jumlah kapital (mesin) yang berupa kos penyetalan ulang dan depresiasi mesin. Penurunan penjualan bersih menyebabkan perusahaan harus menurunkan skala produksi. Ujud penurunan skala produksi adalah penggunaan mesin-mesin produksi di bawah kapasitas terpasang (*underutilized*). Dengan asumsi kurva kos rata-rata (*average cost*) berbentuk parabola terbuka ke atas, maka penurunan skala produksi mengakibatkan kos per unit output meningkat. Agar tidak mengalami kerugian, maka perusahaan menaikkan harga outputnya. Akan tetapi kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan mudah. Di pasar output, perusahaan memiliki banyak pesaing. Apabila perusahaan menaikkan harga outputnya, sedangkan pesaing tidak menaikkan harga output (atau kenaikan harga output pesaing lebih kecil), maka perusahaan akan kehilangan pangsa pasar.

Selanjutnya penurunan skala produksi juga mengakibatkan sejumlah mesin tidak dipergunakan dalam proses produksi. Walaupun demikian, perusahaan tetap menanggung kos perawatan (*maintenance*) untuk mesin-mesin tersebut. Apabila perusahaan memutuskan untuk menjual mesin yang tidak dipergunakan, maka harga jual mesin turun secara tajam dibandingkan harga pada saat membeli mesin tersebut. Faktor informasi asimetri menjadikan pembeli mempersepsikan bahwa kondisi mesin bekas dijual tersebut buruk. Hal

ini berarti kos penyesuaian lebih besar pada saat pengurangan jumlah sumber daya daripada kos penyesuaian pada saat penambahan sumber daya (Banker, 2011).

Kenaikan *cost stickiness* diikuti dengan kenaikan kesalahan prediksi laba. Semakin tinggi *cost stickiness*, semakin besar pula kesalahan dalam prediksi laba. Kesalahan dalam prediksi baik pada saat volume aktivitas perusahaan meningkat maupun menurun, akan lebih besar pada perusahaan yang menghadapi *cost stickiness*. Hal ini berarti akurasi prediksi laba semakin rendah. Penurunan akurasi prediksi laba menyebabkan laba yang dilaporkan akan memberikan informasi yang kurang penting bagi prediksi laba periode mendatang. Tingkat kepercayaan investor terhadap laba yang diumumkan akan berkurang. Semakin tinggi *cost stickiness*, semakin rendah kepercayaan investor terhadap informasi tentang laba. Pelaku pasar akan merespons dengan lemah pengumuman laba dari perusahaan yang menghadapi *cost stickiness*.

Metode

Berikut tahapan kegiatan penelitian untuk tahun kedua

1. Simulasi Penghitungan ROE dengan Memasukkan Cost Stickiness.

Para pihak yang berkepentingan dengan informasi tentang pasar modal perlu melakukan koreksi terhadap besaran laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada umumnya dalam laporan keuangan tersebut, perhitungan laba belum mempertimbangkan aspek *cost stickiness*. Laba yang dilaporkan bisa saja berbeda dengan laba sesungguhnya terutama apabila perusahaan menghadapi masalah *cost stickiness*. Berdasar model komputer berbasis *Microsoft Office Excel* yang dikembangkan pada tahun pertama dilakukan simulasi dan sosialisasi tentang model estimasi laba dimaksud. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan investor, kreditor, manajemen perusahaan maupun masyarakat secara umum dapat melakukan koreksi terhadap prediksi mereka tentang besaran laba apabila derajat *cost stickiness* dinilai relatif tinggi.

2. Sosialisasi Program Komputer Penghitungan ROE Berdasar Cost Stickiness

Sosialisasi dilakukan melalui diseminasi dengan kalangan akademik dan praktisi serta dengan melalui pembuatan blog. Di kalangan akademisi, diseminasi dilakukan dengan cara mengundang pengajar atau mahasiswa dalam sebuah diskusi ilmiah maupun workshop. Sementara itu untuk kalangan praktisi bisa melalui workshop dan pendampingan. Diharapkan pengetahuan tentang *cost stickiness* dapat meluas.

Pembuatan Blog atau situs diperlukan karena hampir semua pihak yang berkepentingan dengan informasi laporan keuangan menggunakan jaringan komputer (internet). Di samping itu, internet telah dikenal dan digunakan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat. Sosialisasi dalam bentuk blog merupakan sarana yang murah dan efisien. Penampilan blog dibuat menarik dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga masyarakat tertarik untuk mengunjungi dan membaca isi blog. Mereka bisa dengan mudah mengetahui dan mempelajari pertimbangan aspek *cost stickiness* dalam memprediksi besaran laba yang diumumkan perusahaan. Dengan demikian masyarakat yang berkepentingan dengan pasar modal tidak memberikan respons yang keliru terhadap laporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya berdasar hasil sosialisasi tersebut akan dapat diperoleh kelebihan sekaligus kekurangan dari program komputer yang dibangun berdasar hasil penelitian tahun pertama. Untuk itu, di tahun kedua penelitian ini juga dilakukan penyempurnaan program komputer tentang prediksi laba agar lebih bisa mendekati kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian pengguna program komputer ini dapat merespons pengumuman laba secara bijaksana sehingga mampu membuat keputusan secara tepat.

3. Pembuatan Buku Tentang *Cost Stickiness*

Selama ini pembahasan tentang *cost stickiness* masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan *cost stickiness* masih merupakan topik yang relatif baru dan belum banyak dikenal secara luas. Penelitian tentang *cost stickiness* juga masih jarang dilakukan. Informasi tentang *cost stickiness* beserta implikasinya masih sangat sedikit.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi lain di luar blog yang dapat menjelaskan mengapa pelaku pasar modal perlu mempertimbangkan aspek *cost stickiness*. Buku tersebut akan memuat teori *cost stickiness* dan beberapa hasil penelitian tentang *cost stickiness* di Indonesia, termasuk penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dikarenakan kondisi pasar modal Indonesia berbeda dengan kondisi pasar modal di negara-negara maju. Pasar modal di Indonesia termasuk pasar yang tidak efisien, sedangkan pasar modal negara maju merupakan pasar yang efisien. Pasar modal dikatakan tidak efisien bila informasi tidak dapat diperoleh dengan sempurna oleh investor. Hal ini menyebabkan harga-harga saham tidak mencerminkan informasi yang ada di pasar. Untuk itu, mereka perlu mengetahui informasi yang lebih banyak dan terperinci agar dapat membuat keputusan secara tepat.

Hasil dan Pembahasan

Simulasi Penghitungan *ROE* dengan Memasukkan *Cost Stickiness*.

Pada umumnya dalam laporan keuangan tersebut, perhitungan laba belum mempertimbangkan aspek *cost stickiness*. Laba yang dilaporkan bisa saja berbeda dengan laba sesungguhnya terutama apabila perusahaan menghadapi masalah *cost stickiness*. Berdasar model komputer berbasis *Microsoft Office Excel* yang dikembangkan pada tahun pertama dilakukan simulasi dan sosialisasi tentang model estimasi laba dimaksud.

Simulasi dimulai dengan menuliskan besaran pendapatan bersih untuk tiap triwulan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan ke 4 pada pos yang bersesuaian dalam program excel. Dengan mencermati laporan keuangan triwulan perusahaan baik manufaktur maupun perbankan, selama 4 triwulan tersebut maka dapat diidentifikasi terhadap pos pendapatan bersih atau pendapatan operasional bersih untuk menentukan saat terjadinya penurunan pendapatan (operasional) bersih. Setelah periode terjadi penurunan pendapatan bersih dapat diidentifikasi, maka dilakukan pula identifikasi saat terjadi kenaikan pendapatan (operasional) bersih. Angka –angka pos pendapatan (operasional) bersih baik saat turun maupun naik dimasukkan dalam program excel dan disertai pula dengan angka-angka pos pemasaran, administrasi dan umum (PAU). Setelah angka-angka pos pendapatan (operasional) bersih dan kos pemasaran, administrasi dan umum (PAU) maka program akan mengkalkulasi besaran koreksi kesalahan prediksi laba. Koreksi kesalahan bisa bernilai positif maupun negatif. Hal ini berarti program akan melakukan koreksi apakah prediksi laba terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Hasil simulasi pada dengan mengambil sampel laporan keuangan PT Indofood Tbk menunjukkan bahwa penurunan penjualan bersih pada triwulan 3. Selanjutnya kondisi triwulan 3 dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya untuk mendapatkan besaran kesalahan prediksi laba. penjualan bersih terjadi pada triwulan ke 3. Data pada triwulan ke 3 dimasukkan (entry) pada bagian **Triwulan Saat Terjadi Penurunan Penjualan Bersih**. Sementara itu triwulan sebelumnya merupakan triwulan terdekat yang ditandai dengan kenaikan pendapatan operasional bersih. Dengan demikian data triwulan ke 2 dimasukkan (entry) ke pada bagian **Triwulan Saat Terjadi Kenaikan Penjualan Bersih**. Selanjutnya kos pemasaran, administrasi dan umum yang bersesuaian dimasukkan pada kolom yang terdapat pada program.

Tabel 1.
Pendapatan Operasional Bersih PT Indofood Tahun 2015.

Nomor	Triwulan	Penjualan Bersih (juta rupiah)	Keterangan
1	Triwulan 1	15021	Benchmark
2	Triwulan 2	17613	Naik
3	Triwulan 3	14930	Turun
4	Triwulan 4	16497	Naik

Sumber: laporan keuangan PT Indofood 2015

Berdasar data penjualan bersih dan kos pemasaran administrasi dan umum (PAU) PT Indofood tahun 2015, maka diperoleh besaran persentase kesalahan prediksi laba sebesar 10,088 %. Dengan demikian apabila kos stickiness diperhitungkan maka ROE menjadi sebesar 30,57 %. Sementara itu ROE yang tercantum dalam laporan keuangan sebesar 34,00. ROE yang tercantum pada laporan keuangan terlalu tinggi apabila faktor kos stickiness diperhitungkan.

Tabel 2.
Penghitungan Persentase Kesalahan Prediksi Laba industri Manufaktur

Nama Perusahaan : Indofood			
Tahun : 2015			
Triwulan saat terjadi Kenaikan Penjualan Bersih		Triwulan Saat Terjadi Penurunan Penjualan Bersih	
Kos PA&U Triwulan Berjalan	926	Kos PA&U Triwulan Berjalan	846
Kos PA&U Triwulan Sebelumnya	809	Kos PA&U Triwulan Sebelumnya	926
Penjualan Bersih Triwulan Berjalan	17613	Penjualan Bersih Triwulan Berjalan	14930
Penjualan Bersih Triwulan Sebelumnya	15021	Penjualan Bersih Triwulan Sebelumnya	17613
Penjualan Bersih Triwulan I	15021		
Penjualan Bersih Triwulan II	17613		
Penjualan Bersih Triwulan III	14930		
Penjualan Bersih Triwulan IV	16497		
ROE		34.000	
persentase kesalahan prediksi laba (persen)		10.088	
ROE terkoreksi		30.570	

2. Sosialisasi Program Komputer Penghitungan ROE Berdasar Cost Stickiness

Sosialisasi dilakukan melalui diseminasi dengan kalangan akademik dan praktisi serta dengan melalui pembuatan blog. Di kalangan akademisi, diseminasi dilakukan dengan cara mengundang pengajar atau mahasiswa dalam sebuah diskusi ilmiah maupun workshop. Sementara itu untuk kalangan praktisi bisa melalui workshop dan pendampingan. Diharapkan pengetahuan tentang *cost stickiness* dapat meluas.

Sosialisasi Program Komputer Penghitungan ROE Berdasar Cost Stickiness telah dilakukan pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2016. Acara tersebut mengambil tempat di ruang pertemuan Primer Koperasi UPN -veteran|| Yogyakarta. Dalam sosialisasi tersebut hadir beberapa pelaku bisnis dan kalangan akademisi. Berbagai masukan diberikan oleh peserta dan akan ditindak lanjuti pada penelitian-penelitian berikutnya.

Di luar sosialisasi, maka upaya pemasyarakatan kos stickiness dilakukan melalui blog. Dalam blog ini dimuat beberapa artikel tentang kos stickiness dan kajian-kajian terkait

kos stickiness. Dengan demikian semua pihak yang tertarik dengan kos stickiness dapat mengikuti perkembangan topik ini. Diharapkan mahasiswa yang tertarik dalam mengembangkan penelitian-penelitian tentang kos stickiness.



Gambar 1.
Blog Kos Sticky

3. Pembuatan Buku Tentang *Cost Stickiness*

Selama ini pembahasan tentang *cost stickiness* masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan *cost stickiness* masih merupakan topik yang relatif baru dan belum banyak dikenal secara luas. Penelitian tentang *cost stickiness* juga masih jarang dilakukan. Sebagai sarana sosialisasi lain di luar blog, maka buku ini memuat teori *cost stickiness* dan beberapa hasil penelitian tentang *cost stickiness* di Indonesia, termasuk penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti.

Publikasi buku kos stickiness dilakukan melalui LPPM pada tahap awal dicetak sejumlah buku kos stickiness yang telah dibagikan antara lain pada saat sosialisasi program perhitungan ROE di kantor Primer Koperasi yang telah dihadiri sejumlah kalangan mulai dari akademisi sampai pelaku bisnis. Selanjutnya buku ini dalam proses untuk mendapatkan ISBN melalui LPPM UPN Press.

Kesimpulan

Implementasi dari model prediksi laba berdasar kos stickiness telah dilakukan melalui simulasi dan sosialisasi tentang model estimasi laba dasar model komputer berbasis Microsoft Office Excel yang dikembangkan pada tahun pertama dilakukan maksud. Melalui implementasi tersebut, diharapkan investor, kreditur, manajemen perusahaan maupun masyarakat secara umum dapat melakukan koreksi terhadap prediksi mereka tentang besaran laba apabila derajat *cost stickiness* dinilai relatif tinggi.

Ucapan terima kasih.

Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada DP2M Kementerian Ristek Dikti yang telah memberikan bantuan melalui hibah Penelitian Produk Terapan.

Daftar Pustaka

- Abarbanell, J.S., W. Lanen, dan R. Verrecchia. 1995. Analysts' forecasts as proxies for investor beliefs in empirical research. *Journal of Accounting and Economics* 20: 31–60.
- Ardiansyah, Misnen, 2009: Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan, *Sosio-Religia*, Vol. 8(3):750-771
- Kama, Itay dan Dan Weiss, 2013. –Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs? *Journal of Accounting Research* :Vol 5(1): 201-224.
- Kim, Jeong-Bon dan Ke Wang, 2014. Labor Unemployment Risk and Sticky Cost Behavior Working Paper, City University of Hong Kong
- Law, Averil M dan Kelton, W. David, 2000., *Simulation Modeling and Analysis*, McGraw Hill Publishing Co, New York,
- Novák, P., Popesko, B. (2014), Cost Variability and Cost Behaviour in Manufacturing Enterprises, *Economics and Sociology*, Vol. 7 (4): 89-103.
- Ramadanty, Sari, 2014., –Penggunaan Komunikasi Fatis Dalam Pengelolaan Hubungan Di Tempat Kerja, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 5 (1):1-12.
- Windyastuti, Kunti Sunaryo dan Sri Hastuti, 2015, Respons Investor Terhadap Pengumuman Laba Industri Perbankan Yang Menghadapi Kos *Stickiness*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan (forth coming)*.

DESAIN KURIKULUM GUNA MEMPERCEPAT MASA TUNGGU MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI LULUSAN PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

Sri Suharsih
Astuti Rahayu
Joko Susanto

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana desain kurikulum yang harus diterapkan agar masa tunggu lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan dapat diperpendek sesuai dengan target yang ditentukan. Analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan digunakan sebagai landasan untuk penyusunan kurikulum. Data dan informasi kebutuhan kurikulum diperoleh survei, wawancara, dan observasi yang dilakukan terhadap alumni dan pengguna.

Abstract

This study aims to analyze how the curriculum design should be applied so that the waiting period for Department of Economic Development Graduated. By descriptive analysis this research identification gaps between the competencies of graduates with the demand of workforce. Data and information is used sourced from interviews and observations to alumni and users .

I. Pendahuluan

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan memperoleh tugas dan tanggung jawab secara formal untuk mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam. Mahasiswa sebagai peserta didik dan generasi muda yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, senantiasa perlu dibimbing dan dikembangkan (Suyati et al, 2010).

UPN -Veteran' Yogyakarta telah menghasilkan ribuan lulusan. Sesuai dengan visi dan misi, lulusan perguruan tinggi ini berkarakter disiplin, memiliki daya juang dan kreatifitas yang dilandasi oleh jiwa bela negara. Secara lebih khusus, Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN -Veteran' Yogyakarta menjalankan fungsinya untuk mendidik mahasiswanya menjadi ekonom yang aplikatif dengan karakter disiplin, kejuangan, kreatifitas dan bela negara.

Berbekal berbagai kemampuan sebagaimana dirumuskan dalam karakter lulusan program studi Ekonomi Pembangunan, maka lulusan program studi ini diharapkan dapat mengisi lowongan kebutuhan akan tenaga terdidik dan terampil seiring dengan pesatnya laju pembangunan ekonomi nasional. Di samping menjadi pekerja pada berbagai sektor ekonomi, lulusan program studi ini juga dapat menjadi wiraswasta yang sukses. Dengan demikian diharapkan program studi ini mampu menghasilkan manajer-manajer pembangunan sehingga mampu berkontribusi dalam mengurangi pengangguran serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi

Berdasar Tracer study, diperoleh informasi bahwa sebagian besar alumni bekerja di sektor keuangan dan perbankan, serta menjadi wiraswasta. Akan tetapi apa pula alumnus

yang bidang kerjanya agak berbeda dengan pendidikan yang telah mereka terima selama menjadi mahasiswa seperti mereka yang bekerja di bidang pemasaran, suatu bidang kerja yang selama ini menjadi domain Program Studi Manajemen. Masa tunggu lulusan program studi Ekonomi Pembangunan juga relatif lama. Masa tunggu tersebut masih di atas 1 tahun. Lamanya masa tunggu menunjukkan adanya permasalahan antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi lulusan yang dihasilkan berdasar kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan. Lamanya masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan berdampak negatif pada nilai akreditasi program studi. Nilai akreditasi Program Studi Ekonomi Pembangunan yang tidak optimum (di bawah akreditasi A) mencerminkan proses pembelajaran yang belum optimum. Hal itu berarti masih terdapat sejumlah kekurangan yang timbul antara lain karena program studi belum dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Masih terdapat unit-unit kegiatan yang beroperasi di bawah kapasitas yang seharusnya. Hal ini merupakan suatu kerugian karena sebenarnya program studi tersebut mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Guna mengoptimalkan kegiatan operasional program studi sesuai dengan kapasitasnya, maka perlu ditelaah permasalahan yang terjadi. Dari sisi tenaga pengajar, maka program studi Ekonomi Pembangunan memiliki SDM yang memadai. Program Studi ini didukung oleh sejumlah 5 orang dosen berpendidikan S3 (dokter) dengan 1 orang guru besar (professor). Selain itu, semua dosen program studi Ekonomi Pembangunan sudah berpendidikan S2 dan memiliki pengalaman kerja yang cukup. Dengan demikian seharusnya program studi Ekonomi Pembangunan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kinerja yang selama ini terjadi.

Dukungan SDM yang mencukupi sebenarnya memungkinkan program studi Ekonomi Pembangunan untuk mempersingkat masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan. Untuk itu melalui penelitian ini akan ditelaah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan panjangnya masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan. Selanjutnya dalam penelitian akan dikaji faktor apakah yang menjadi penyebab lamanya masa tunggu tersebut. Apabila faktor penyebab lamanya masa tunggu sudah teridentifikasi, maka akan dapat dicarikan solusi berupa desain kurikulum untuk mengatasi masalah tersebut.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Kurikulum

Menurut UU no. 20 tahun 2003, kurikulum adalah -Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Bab I Pasal 1 ayat 19).

2.2. Fungsi Kurikulum

Kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Fungsi Kurikulum adalah sebagai berikut...

1. Fungsi Penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*) : Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dilingkungannya karna lingkungan bersifat dinamis artinya dapat berubah-ubah.
2. Fungsi Integrasi (*the integrating function*) : Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utut yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat.
3. Fungsi Diferensiasi (*the differentiating function*) : Kurikulum berfungsi sebagai diferensiansi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan disetiap siswa yang harus dihargai dan dilayani.

4. Fungsi Persiapan (*the propaedeutic function*) : Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa kejenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat, jika tidak melanjutkan pendidikan.
5. Fungsi Pemilihan (*the selective function*) : Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Fungsi Diagnostik (*the diagnostic function*) : Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya.

III. Metode Penelitian

3.1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah keseluruhan alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN -Veteran Yogyakarta yang lulus pada tahun 2013, 2014 dan 2015 yang tersebar di berbagai kota. Hal ini berarti subyek penelitian adalah populasi alumnus Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN -Veteran Yogyakarta selama tiga tahun terakhir.

3.2. Alat Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dari sisi deskriptif, penelitian ini akan memuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang faktor-faktor penyebab lamanya masa tunggu lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN -Veteran Yogyakarta. Terhadap berbagai faktor penghambat dilakukan pengkategorian sehingga dapat dilakukan pengelompokan. Selanjutnya berdasar kategori faktor penghambat tersebut dilakukan penelaahan untuk dapat dicarikan solusinya. Solusi tersebut diwujudkan dalam suatu desain kurikulum agar kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dapat dikurangi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis literature dan hasil kuesioner terhadap alumni Prodi Ekonomi Pembangunan, sebagian besar menyatakan bahwa kurikulum yang baik dan siap kerja merupakan kurikulum yang menggunakan konsep *link and match*

4.1. Konsep *Link and Match*.

Konsep keterkaitan dan kesepadanan (*Link and Match*) antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan mantan Mendiknas Prof. Dr. Wardiman perlu dihidupkan lagi.

Contoh nyata *Link and Match* dengan program magang. Perbaikan magang, dimaksudkan agar industri juga mendapatkan manfaat. Selama ini ada kesan yang mendapatkan manfaat dari magang adalah perguruan tinggi dan mahasiswa, sedangkan industri kebagian reponya.

Di sisi lain, produk dari Perguruan Tinggi menghasilkan sesuatu yang amat berharga dan bukan hanya sekedar kertas tanpa makna, yaitu produk kepakaran, produk pemikiran dan kerja laboratorium. Produk-produk ini masih sangat jarang dilirik oleh industri di Indonesia. Produk kepakaran yang sering dipakai adalah yang bersifat konsultatif. Tetapi produk hasil laboratorium belum di akomodasi dengan baik. Menjalankan *Link and Match* bukanlah hal yang sederhana. Karena itu, idealnya, ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program *Link and Match* yaitu perguruan tinggi, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah. Dari ketiga komponen tersebut, peran perguruan tinggi merupakan keharusan dan syarat terpenting. Kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut.

Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi untuk menyukseskan program *Link and Match*. Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu perguruan tinggi di Indonesia diketahui, keahlian (kompetensi) yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja adalah kemampuan komputasi (komputer), berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan kemampuan akuntansi. Selain itu, perguruan tinggi juga harus mampu memprediksi dan mengantisipasi keahlian (kompetensi) apa yang diperlukan dunia kerja dan teknologi sepuluh tahun ke depan.

Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan *Link and Match* sangat besar. Karena itu, diharapkan semua *stake holders* dunia pendidikan bersedia membuka mata dan diri dan mulai bersungguh-sungguh menjalankannya. Perguruan tinggi harus lapang dada menerima bidang keahlian (kompetensi) yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah utama. Perusahaan juga harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang ingin magang (bekerja) di perusahaan tersebut.

4.2. Pendapat Alumni Mengenai Kurikulum

Selain konsep *Link and Match* beberapa pendapat alumni terkait dengan kurikulum Prodi Ekonomi pembangunan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Masukan alumni

No	Masukan Alumni	%
1	Perlu diajarkan untuk <i>how to solve</i> , belajar sesuatu yang baru	20
2	Adanya konsentrasi sangat membantu dalam dunia kerja	40
3	Teori yang aplikatif dan multidimensi akan dapat membantu didunia kerja	15
4	Hanya < 20% yg terpakai, sisanya ilmu terapannya	5
5	Skill presentasi sering dipakai didunia kerja	20

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa adanya konsentrasi sangat membantu dalam dunia kerja merupakan masukan yang paling besar persentasenya yaitu sebesar 50%, kemudian diikuti dengan *how to solve*, presentasi saat kuliah, teori aplikatif multidimensi serta *skill* presentasi

4.3. Pendapat Alumni Mengenai Skill Dunia Kerja

Pendapat alumni mengenai skill apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja disajikan oleh tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2 . Kebutuhan Skill Dunia Kerja

1. Melakukan presentasi, karena akan meningkatkan <i>skill</i> komunikasi
2. Mengikuti organisasi himpunan, karena dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang baru dan lomba antar kampus
3. Perlu adanya konsentrasi agar lebih memudahkan mahasiswa dalam mencari kerja yang sesuai
4. Mandiri, percaya diri karakter ini dapat dibentuk secara non akademik melalui organisasi
5. Prodi sebaiknya memfasilitasi pelatihan seperti <i>debating, writing, public speaking</i>
6. Mandiri adalah yang terpenting ditanamkan sejak mhs baru
7. Skill komputer, komunikasi, pengalaman organisasi
8. lulusan ekonomi sebaiknya memahami <i>cash flow</i> dan pajak

- | |
|--|
| 9. Sosialisasi dan bertutur kata yang sopan |
| 10. Perlu ada magang dan sebaiknya dilaksanakan dengan kesiapan yang matang karena disitulah belajar masuk dunia kerja |

Berdasarkan tabel 2 skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum adalah unsur peningkatan kemampuan skill dalam proses pembelajaran dari pelaksanaan kurikulum tersebut

IV. Penutup

Berdasarkan analisis yang sudah diuraikan kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan seharusnya menerapkan konsep *Link and Match* merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, atau dengan kata lain *Link and Match* ini adalah keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaannya. Dengan adanya keterkaitan ini maka pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dapat mengadakan hubungan-hubungan dengan dunia usaha/industri.
2. Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan pada saat ini sudah menerapkan Konsep *Link and Match* yaitu dengan Mata Kuliah Magang dan Kuliah Lapangan

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, R (2010), **Pengertian dan Definisi Kurikulum**, <http://rinosusilodewantara.blogspot.co.id/2010/02/pengertian-dan-definisi-kurikulum-dalam.html>. Diakses pada 28 Agustus 2016
- Geni ZEN, Siti Renggo, Ninuk Lustyantie, , dan Yusi Asnidar (2009), **Penelusuran Jenis Pekerjaan Para Alumni Jurusan Bahasa Prancis Fakultas Bahasa Dan Seni**, Universitas Negeri Jakarta.
- Hamalik, Oemar (2007), **Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum**, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution, S (2006), **Azas-Azas Kurikulum**, Jakarta: Bumi Aksara
- Rangkuti, Fredy (2002), **Analisis SWOT: Teknik membedah Kasus Bisnis**, Gramedia Pustaka Utama.
- Sirait, Evi Usi Rimona dan M.A. Muhkyi (2007). **The 1st PPM National Conference on Management Research "Manajemen di Era Globalisasi" Lembaga Manajemen PPM** , 7 November 2007
- Subandijah (1993), **Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum**, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

POSISI STRATEGIS KARANG TARUNA DALAM PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA

Susilastuti Dwi Nugrahajati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta
susilastuti_dn@yahoo.com

Basuki Agus Suparno

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta
basuki.agus@gmail.com

Adi Soeprapto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta
adi_soeprapto@upnyk.ac.id

Abstract

In Indonesia, political education is often understood partially to the size of its quantitative voter participation rates. Political education can not be interpreted solely on the use of the voting rights or the democratic party elections. Political education is essentially a long-term process towards the realization as active citizens in the process of nation building. In this kind of concept, the community and state will become a strong pillar of democracy. One of the objectives of political education is an early voters group, this group should not have a definite orientation of political choices and often become the target of election contestants. Misconception of their political understanding eventually make them became passive group at any stage of political process. In the process of political education toward early voters, one of which has a strategic position is opinion leaders, who are groups of people that have more knowledge than other community groups. Karang Taruna at Minggir village, Sleman regency become one of the opinion leaders in the political education process because they are actively involved in the electoral process and rural development planning process and Karang taruna activist are acting as the spearhead of this political education at local level.

Key words : political education, early voters, opinion leader, karang taruna

PENDAHULUAN

Pendidikan politik perlu dikembangkan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang harus terlibat secara aktif dalam setiap proses politik yang akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan secara aktif harus diselaraskan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kesadaran ini semakin penting, mengingat pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat memberikan masukan kepada pemerintah dalam setiap proses pembuatan keputusan publik, antara lain melalui proses *public hearing*, pengaduan-pengaduan melalui webside resmi pemerintah, serta masukan melalui sarana media sosial.

Pendidikan politik memberi kesadaran bahwa politik adalah persoalan pengelolaan kepentingan publik yang baik. Ada banyak aktor politik yang dapat menjalankan peran dalam pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Pendidikan politik secara konstitusional dijalankan oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekolah, pendidikan tinggi, NGO, organisasi sosial kemasyarakatan dan seterusnya merupakan sumber pengetahuan politik bagi pemilih pemula. Namun *platform* pendidikan politik tidak sama dari aspek prioritas dan titik berat yang sama. Belum adanya platform yang sama dalam memberi titik tekan dan prioritas terhadap persoalan-persoalan apa yang dapat membangun kesadaran warganegara yang berkarakter.

Pemilih pemula sejak Pemilu 2014 menjadi kelompok strategis yang digarap secara khusus oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain pemilih pemula kelompok strategis lain yang digarap KPU adalah kelompok perempuan, kelompok marginal, disabilitas dan kelompok agama. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih kelompok ini dalam melakukan sosialisasi KPU dibantu relawan demokrasi. Ketika pemilu di berbagai level selesai diselenggarakan maka pendidikan politik harus tetap dilakukan. Tentunya tidak bisa lagi mengandalkan relawan demokrasi karena mereka segera dibubarkan begitu pemilu legislatif telah selesai diselenggarakan.

Pendidikan politik yang diasumsikan bukan sekedar meningkatkan partisipasi pemilih perlu terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat yang telah memiliki pemahaman politik yang lebih holistik. Untuk menjaga kontinuitas –virus tentang politik ini perlu dilakukan sehingga masyarakat, khususnya pemilih pemula menjadi familiar terhadap hal-hal yang terkait politik, tidak hanya berhubungan dengan pemilihan umum.

Desa melek politik adalah salah satu terobosan untuk mengembangkan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Dalam mengembangkan desa melek politik ini salah satu *opinion leader* yang bisa dioptimalkan perannya adalah Karang Taruna. Karang Taruna sebagai organisasi pemuda yang sudah sangat eksis sejak jaman pemerintahan Orde Baru perlu dioptimalkan perannya menjadi ujung tombak bagi pendidikan politik di tingkat pedesaan. Penting kiranya untuk melihat bagaimana menempatkan Karang Taruna sebagai *opinion leader* di Desa Melek Politik

Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana peran Karang Taruna sebagai *Opinion Leader* pendidikan politik bagi pemilih pemula di Desa Melek Politik? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui menempatkan Karang Taruna sebagai *opinion leader* pendidikan politik bagi pemilih pemula di Desa Melek Politik, (2) Metode yang bisa dikembangkan Karang Taruna sebagai *opinion leader* bagi pendidikan politik pemilih pemula di desa melek politik.

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendidik insan manusia untuk mempunyai pengetahuan atas suatu hal kemudian dengan pengetahuan yang dimiliki maka akan membentuk sikap atau perilakunya atas suatu hal. Pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan harus melibatkan tiga unsur

sekaligus dalam hubungan dialektis antara tiga aspek yakni pendidik, yang dididik dan realitas dunia. Masalah pertama dan kedua adalah subyek yang sadar, sementara masalah yang ketiga adalah obyek yang tersadari atau disadari. Hubungan dialektif semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan yang mapan selama ini.

Fakih (2000) menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sarana untuk -memproduksi kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat upaya untuk pembebasan. Tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan = ideologi yang dominan' yang tengah berlaku dimasyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif kearah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, obyektif maupun -*detachmen*" dari kondisi masyarakat.

Gagasan pendidikan kritis, sebagaimana yang dilansir Azra (2006) merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan sistem politik demokrasi, mengingat didalamnya terdapat proses transformasi realitas, termasuk realitas politik yang pada gilirannya bertujuan membentuk masyarakat sipil (*civil society*). Pertama, pendidikan merupakan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan kekuasaan secara mendasar, karena pendidikan menjadi ajang terjalannya makna, hasrat, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam tentang apa sesungguhnya yang disebut manusia dan apa yang menjadi impiannya. Ketiga, pendidikan merupakan tempat untuk merumuskan dan memperjuangkan masa depan. Pendidikan juga menjadi ajang untuk menuangkan komitmen yang tinggi dari para pendidik guna menciptakan sistem politik yang emansipatif, bukan sekedar memenuhi tuntutan pedagogis semata.

Pendidikan politik mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat mempunyai kesadaran sebagai warga negara. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun sebuah ikatan yang kokoh antara masyarakat dan negara (dalam hal ini semua komponen yang ada dalam negara) sehingga akan muncul sebuah relasi yang saling menguatkan.

Pendidikan politik dirujuk sebagai tempat sandaran penting bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem politik yang sedang terancam. Pendidikan politik, sebagaimana diungkapkan oleh Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik merupakan proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis yang diarahkan pada sistem tertentu. Pendidikan politik dapat berorientasi integratif dan berorientasi kelompok atau partai. Kedua sifat pendidikan ini menampakkan karakter yang berbeda namun menuju ke arah yang sama yaitu untuk kepentingan negara.

Soemarno (2002) mengemukakan, pendidikan politik yang dilaksanakan negara bertujuan (1) mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), (2) menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara (3) memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai.

Penelitian tentang pendidikan politik dilakukan Estu Miyarso, (2009) melakukan penelitian tentang –Pendidikan Politik Mahasiswa (Studi Kasus Netralitas Ormawa UNY dalam Pemilu 2009) . Iqbal M Mujtahid dan Hascaryo (2013) melakukan penelitian tentang pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melibatkan teman sebaya dalam pendidikan politik juga dikembangkan. Metode pendidikan sebaya (*peer education*) yang merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman yang memiliki usia sebaya . (Djamarah dalam Anggorowati, 2011),

Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemModel pengembangan pendidikan politik ini bagi pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan berdasarkan pada model pendidikan politik yang telah dirumuskan dalam penelitian Strategis Nasional tahun 2013 (Soeprapto,Susilastuti dan Suparno, 2013).

Salah satu sasaran pendidikan politik adalah pemilih pemula. Pemilih pemula bukanlah pemilih yang tidak mempunyai referensi politik sama sekali sehingga sering diasumsikan mereka merupakan kelompok pemilih yang masih bisa dengan mudah dipengaruhi orientasi politiknya. Mengacu pendapat Almond dan Verba (1990: 16) maka orientasi politik pemula ini dikategorikan menjadi, (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada kandidat, (2) orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan (3) orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya.

Setiajid (2011) menguraikan karakter pemilih pemula sebagai berikut: (1) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) Peter Reason dalam Guba (2019) merupakan penelitian partisipatif yang paling banyak digunakan oleh para ilmuwan sosial. Penelitian ini sangat penting terutama dalam memberi penekanan pada subyek yang diteliti untuk melakukan, memproduksi dan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan memberdayakan dan mencerahkan mereka melalui pendampingan dan keterlibatan peneliti di dalam proses-proses produksi sosial tersebut.

Seperti yang dikatakan Reason (1994:328) bahwa penelitian partisipatoris berimplikasi pada sebuah usaha pada bagian masyarakat untuk memahami peran pengetahuan sebagai instrument kekuasaan dan control. Tujuan primer penelitian tindakan partisipatoris adalah melakukan pencerahan dan membangunkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan bersama dengan penelitinya.

Tujuan penelitian tindakan partisipatif mengarah pada dua hal sekaligus yakni: a) menghasilkan pengetahuan dan tindakan yang secara langsung berguna bagi kelompok masyarakat melalui penelitian, pendidikan orang dewasa, dan tindakan sosial politik. Kedua, penelitian ini melakukan pemberdayaan melalui konstruksi terhadap pengetahuan

dan ketrampilan yang mereka miliki. Proses ini dikenal dengan istilah: *a process of self awareness through collective self inquiry and reflection* (Reason, 1994:328)

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian tindakan partisipatif ini mencakup: desain riset, pengumpulan data, analisis data dan pada tahap berikutnya memunculkan proses-proses kolaboratif dan dialog yang memberdayakan, memotivasi, meningkatkan self esteem dan mengembangkan solidaritas komunitas.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah Karang Taruna di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggi, Kabupaten Sleman. Desa ini dipilih karena organisasi pemuda yang dilahirkan pada masa pemerintahan Orde Baru sangat aktif dan terlibat dalam berbagai proses pembangunan desa. Karang Taruna diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam proses pendidikan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Pendidikan politik berbeda dengan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih dilakukan hanya sebatas pada pemahaman bagaimana warga negara menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Pendidikan politik sering rancu dengan pendidikan pemilih.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan sebagai leader untuk pelaksanaan pendidikan politik, khususnya pada pemilih pemula. Dalam perkembangannya, Karang Taruna tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga mewakili aspirasi pemuda dalam proses perencanaan program pembangunan dan terlibat dalam pelaksanaan dan melakukan evaluasi, termasuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak di antara aktivis Karang Taruna juga ambil bagian dalam pelaksanaan pemilu seperti menjadi anggota PPS tingkat Desa, relawan demokrasi pada pemilu 2014.

Pengalaman tersebut setidaknya menjadi modal aktivis Karang Taruna untuk mudah berinteraksi dengan masyarakat, terutama pemuda. Potensi yang dimiliki ini bila diasah dengan pengetahuan yang menyeluruh tentang politik maka aktivis Karang Taruna bisa opinion leader tentang politik di wilayahnya. Aktivis Karang Taruna dengan pengalamannya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya pemilih pemula agar bisa memiliki sikap sebagai warga negara yang baik..

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) aktivis Karang Taruna di Desa Sendangsari Kecamatan Minggiir, Kabupaten Sleman mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum di berbagai level di wilayahnya. Mereka juga aktif dalam keguatan musyawarah desa yang membahas program-program pembangunan di desa, mereka juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

Aktivitas yang dilakukan oleh aktivis Karang Taruna pada dasarnya adalah aktivitas politik. Namun ketika dilontarkan pertanyaan tentang pemahaman politik, sejauh mana memantau hasil pemilu mereka masih sangat terbatas. Politik masih dipahami sebatas pemilu setelah itu selesai. Mereka belum ada inisiatif untuk memantau hasil pemilu bahkan menagih janji politik yang pernah disampaikan para kandidat.

Ketidakmampuan mengawal proses politik sampai tuntas menyebabkan muncul persepsi yang kurang baik tentang proses pergantian kekuasaan paling kontitusional ini. Dalam persepsi peserta FGD, janji politik tidak pernah direalisasikan dengan baik bahkan sangat bertolak belakang. Salah satu contohnya, pada saat kampanye, kandidat menjanjikan mendorong masyarakat yang sebagian besar petani dengan berbagai pembangunan infrastruktur pendukung. Namun setelah terpilih, justru banyak lahan pertanian yang diijinkan beralih fungsi sebagai perumahan.

Berdasarkan pemahaman itu maka prosesnya pendidikan politik dilakukan bersifat *nurture*. Artinya proses pendidikan politik ini memang harus dilakukan secara terencana, struktur dan berdasarkan pada indikator-indikator tertentu sebagai tolak ukur pencapaiannya. Pendidikan politik dilakukan dalam tataran level kognitif, pembentukan sikap dan perilaku politik. Secara spesifik tujuan pendidikan politik dilakukan dalam kaitannya dengan kondisi objektif dan subjektif terhadap situasi politik yang berkembang.

Untuk menyiapkan aktivis Karang Taruna bisa menjadi *opinion leader* bagi pemilih pemula tentang politik maka mereka diberikan pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan politik secara konseptual, ideologi bangsa Pancasila, tata hirarki undang-undang, tahapan-tahapan penjangkauan aspirasi masyarakat, penyusunan proposal kegiatan, implementasi politik dalam keseharian, Metode yang bisa digunakan adalah metode ceramah, role playing maupun diskusi-diskusi terbatas. Karang Taruna bisa memanfaatkan sarana pertemuan formal yang telah berkembang sebelumnya.

Aktivis Karang Taruna bisa menggunakan pertemuan-pertemuan informal untuk menjangkauan aspirasi warga sebelum dibawa ke jenjang tingkat dusun, desa, dan kecamatan. Pengetahuan manajemen, organisasi juga perlu diberikan. Sangat holistiknya persoalan yang berhubungan dengan politik. Pengetahuan dan skill yang sangat holistik akan memudahkan perasn Karang Taruna untuk menularkan virus tentang politik.

KESIMPULAN

1. Pendidikan politik berbeda dengan pendidikan pemilih sehingga pemilihan konten sangat diperlukan agar tidak ada kekeliruan pemahaman.
2. Pendidikan politik akan menyasar pada level kognitif, pembentukan sikap dan perilaku politik.
3. Aktivis Karang Taruna bisa dimanfaatkan untuk menjadi *opinion leader* atau pemuka pendapat tentang politik bagi kelompok pemilih pemula.

REFERENSI

- Azra, Azyumardi, 2006, Paradigma baru Pendidikan Nasional : Rekonstruksi dan Demokratisasi Cet.2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2000, Pendidikan Populer (Membangun Kesadaran Kritis), Cetakan Pertama, Desember, REaD Book, Yogyakarta.
- Firdaus, Mohammad, 2003, *Dampak Pendidikan Politik yang dilakukan PPSW terhadap Partisipasi Politik Perempuan Lapis Bawah (Studi Kasus Anggota Kelompok Perempuan Melati di Pondok Rangon* , Tesis, Program Studi Sosiologi, Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia

- Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Newbury Park: Sage.
- KPU Provinsi DIY, 2011, Pemilu 2009, Pemilukada 2010 dan 2011 di Provinsi DIY dalam angka, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press
- Makalunsenge, Indrus dkk, 2014, *Pengaruh Reklame Politik Pilwako terhadap Sikap Pemilih Pemula di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat*, Jurnal Acta Diurna, Vol. III.No 3 tahun 2014
- Mantra, Ida Bagoes, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardatillah, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Munculnya Golput, (Studi Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009)*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
- Miles, M.B. and Huberman, A.M, 1994, *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods*, London, SAGE Publications.
- Mujtahid, Igbal, 2013, Pendidikan Politik Terpadu bagi Masyarakat Meneju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Call of Paper Fisip Universitas Terbuka.
- Muzzakar, Milastri, 2010, *Pendidikan Alternatif sebagai Model Pemberdayaan Perempuan di Sekolah Perempuan Ciliwung di Rawajati Barat Jakarta*, Skripsi, Jurusan Pengembangan Dakwah Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasiwan, 2005, *Model Pendidikan Politik : Studi kasus PKS DPD Sleman*, Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan, November, Th. XXIV, No. 3
- Piliang, Indra J. 2008. *Kaum Remaja dan Demokrasi*. Jakarta; Kibar.
- Prihatmoko, Joko J, 2009, *Ancaman Krisis dan Ikhtisar Sistemis KPU dalam Pengembangan Demokrasi Elektoral-Formal*, Makalah dalam diskusi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dengan tema -Wajah Demokrasi di Indonesia di Semarang, 30-31 Maret 2009.
- Pambudi, Himawan S, Erry Syahrian, Yanuardi. 2003. *Politik Pemberdayaan. Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama
- Reason, P. (1994). Human inquiry as discipline and practice. In P. Reason (Ed.), *Participation in human inquiry* (pp. 40–56). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rubyanti, Rika, 2009, *Pengaruh Popularitas terhadap Pilihan Pemilih pemula (Fenomena masuknya artis dalam politik)*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiajid, 2011, *Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi pemilih pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang tahun 2010*, *Integralistik*, No.1/Th. XXII/2011, Januari-Juni, pp.18-33.
- Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sukardi, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan ke delapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Sukemi, BM. 2004. *Sikap dan Perilaku Politik Anggota badan Legislatif Daerah ditinjau dari Sosialisasi Politik*. Disertasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.
- Sulastri, Endang 2011, *Peran Pendidikan Pemilih melalui mata pelajaran PKn untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu (Kada)*, Materi Sosialisasi Guru PKn, Jakarta.
- Sumarno, AP, 2002, *Komunikasi Politik*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Suprojo, 2014. *Agung Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pasca ketetapan Komisi Pemilihan Umum tentang 10 partai peserta pemilu 2014 dalam pembangunan politik masyarakat*, jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/.../25

ABSTRAK**PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN FARTLEK DAN CIRCUIT TRAINNING TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN VO₂MAX PADA PEMAIN SEPAK BOLA****Oleh: Sumintarsih, Tri Saptono, Wahyu Wibowo EY**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh latihan Fartlek terhadap peningkatan kemampuan VO₂Max pada pemain Sepak bola, 2) Pengaruh *Circuit Training* terhadap peningkatan kemampuan VO₂Max pada pemain sepak bola 3) Perbedaan pengaruh latihan Fartlek dan *Circuit Training* terhadap peningkatan kemampuan VO₂Max.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain sepak bola Seyegan United, Gendengan, Margodadi, Seyegan, Sleman Yogyakarta yang berjumlah 60 pemain. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling, besarnya sampel yang diambil sebanyak 40 pemain. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Uji T. Uji prasyarat analisis data dengan menggunakan uji normalitas (uji Lilliefors dengan $\alpha = 0.05$) dan uji homogenitas varians (uji Bartlet dengan $\alpha = 0.05$).

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) ada pengaruh latihan *fartlek* terhadap peningkatan kemampuan VO₂ Max pada pemain sepakbola, terbukti dari hasil rata-rata pretest 6.4650 dan hasil posttest 7.2905 dengan peningkatan rata-rata 0.8255. 2) ada pengaruh *circuit training* terhadap kemampuan VO₂ Max pada pemain sepakbola, terbukti dari hasil rata-rata pretest 5.9400 dan hasil posttest 6.5950 dengan peningkatan rata-rata 0.655. 3) ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan *fartlek* dengan hasil $t_{hitung} - 4.701$ dan *circuit training* $t_{hitung} - 2.779$ pada taraf signifikansi 5%.

Kata kunci: Latihan Fartlek, *Circuit Training* dan Kemampuan VO₂Max.

ABSTRACT**EFFECT OF FARTLEK TRAINNING DIFFERENCES AND THE IMPROVEMENT OF CIRCUIT TRAINNING VO₂ MAX ABILITY IN FOOTBALL PLAYERS****By: Sumintarsih, Tri Saptono, Wahyu Wibowo EY**

The study aims to determine: 1) The Effect of Fartlek training to increase the ability of VO₂max on football players, 2) The Effect of Circuit training to increased ability of VO₂max on football players 3) The different of effect Fartlek training and Circuit training to increase the ability of VO₂ max.

The study using an experimental method. The population in this study are football player Seyegan United, Gendengan, Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta consist of 60 players. The sampling technique used was purposive random sampling, sample size taken as 40 players. This research data analysis techniques are use traditional T Test. Test prerequisite data analysis using normality test (test Lilliefors with $\alpha = 0.05$), and the homogeneity of variance (Bartlet test with $\alpha = 0.05$).

The results of the study as follows: 1) An effect found in Fartlek Training, there are increasing on Vo₂ Max number ability on football players, proved by the average yeild of 6,465 for each pre test and 7,2905 for post test, the average are 0,8255. 2). There was an effect on the ability of vo₂ Max circuit Training, the evident are 5.9400 at pre test and 6,5950 in post test . The average increase are 0,655. 3). There is a significant differece between fartlek training result t count – 4701 and – 2779 circuit training t count -2779 at significant level of 5%.

Keywords: Fartlek Training, Circuit training and VO₂max. ability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepak bola adalah cabang olahraga yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat yang dimainkan oleh dua tim untuk berusaha memasukkan bola ke gawang tim lawan. Masing-masing tim terdiri dari 11 pemain, sehingga dengan demikian satu tim tersebut sering disebut sebagai kesebelasan. Permainan sepak bola adalah usaha untuk lebih banyak memasukkan bola ke gawang lawan serta menghindari masuknya bola ke gawangnya sendiri dengan cara menguasai bola dan merebutnya kembali ketika bola dikuasai oleh tim lawan.

Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa pertandingan sepak bola dimainkan selama 2 kali 45 menit dengan diberikan waktu istirahat antar babak selama 10 menit. Namun apabila dalam sebuah pertandingan harus dicari pemenangnya, sementara pada saat itu terjadi kedudukan yang sama atau disebut seri, maka akan diberikan babak perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit tanpa waktu istirahat. Melihat lamanya seluruh waktu pertandingan sepak bola tersebut, maka sangat dibutuhkan kondisi fisik yang dapat mendukung penampilan pemain agar mampu bermain selama waktu pertandingan yang sudah disyaratkan tersebut. Adapun komponen kondisi fisik yang dituntut agar pemain dapat melakukan pertandingan dalam waktu yang sangat lama tersebut adalah kemampuan daya tahan paru jantung. Artinya semakin baik daya tahan paru jantung seseorang, maka dia akan mampu untuk bertanding atau berlatih dalam waktu yang lama dan tetap dapat berkonsentrasi selama waktu pertandingan tersebut.

Penerapan latihan kondisi fisik haruslah terprogram secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan, serta dilandasi oleh pertimbangan keilmuan dan akademik yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertimbangan ini perlu diperhatikan agar pencapaian target kondisi fisik pemain dalam sebuah tim akan tercapai secara efektif dan efisien. Maka pemilihan metode latihan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan pemilihan metode latihan yang tepat akan bisa menghasilkan pencapaian target yang lebih efektif dan efisien.

Mengingat demikian penting dan mendesaknya pemahaman atas permasalahan tentang pencapaian standar kondisi fisik pemain sepak bola secara efektif dan efisien melalui pemilihan metode latihan yang tepat, maka kami bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul –Perbedaan Pengaruh Metode Latihan Fartlek dan Circuit Training terhadap Peningkatan Kemampuan VO₂Max pada Pemain Sepak bola.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh latihan Fartlek terhadap peningkatan kemampuan VO₂Max pada pemain sepak bola?
2. Adakah pengaruh *Circuit training* terhadap peningkatan kemampuan VO₂Max pada pemain sepak bola?
3. Adakah perbedaan pengaruh latihan fartlek dan circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO₂Max pada pemain sepak bola?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Latihan

Metode adalah cara atau alat untuk mencapai tujuan. Metode latihan merupakan prosedur dan cara pemilihan jenis latihan dan penataannya menurut kadar kesulitan kompleksitas dan berat badan (Nossek, 1982:15). Latihan merupakan aktifitas olahraga yang sistematis dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara *progresif* dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang ditentukan (Bompa, 1994: 10). Proses latihan adalah lebih banyak lebih baik, yang harus memulai tahapan awal, dan kemudian dilakukan secara berkelanjutan untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi (Weinberg & Gould, 2007: 490). Jadi dapat disimpulkan bahwa metode latihan adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pemberian atau pelaksanaan latihan guna membantu anak dalam mencapai tujuan yang ditentukan

2.2 Latihan *Fartlek*

Latihan *fartlek* adalah metode latihan yang digunakan untuk melakukan latihan dengan memainkan kecepatan. Ada dua macam *fartlek* yaitu intensitas tinggi dan intensitas rendah. *Fartlek* adalah bentuk aktifitas lari seperti *Hallow sprint* yang dilakukan dengan cara jalan, jogging, *sprint* dan jalan secara terus menerus.

Untuk membedakan antara metode *fartlek* dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah, terutama pada bentuk rangkaian latihan yang dilakukan. Pada metode *fartlek* dengan intensitas rendah bentuknya lari dengan jalan, jogging, diselingi *sprint*, dan jalan secara terus menerus. Sedangkan *fartlek* dengan intensitas tinggi hanya dilakukan dengan cara jogging dan diselingi lari cepat (*sprint*) selain itu durasi, jarak, dan waktu lari cepat juga merupakan pembeda antara intensitas tinggi dan rendah. Semakin panjang durasi latihannya semakin tinggi intensitasnya. Metode ini lebih sering digunakan sebagai variasi latihan agar olahragawan tidak cepat bosan dan dilaksanakan pada saat periode persiapan. (Sukadiyanto & Dangsin Muluk, 2011 : 72)

2.3 *Circuit Training*

Circuit training adalah salah satu metode latihan untuk meningkatkan daya tahan. Pada *circuit training* biasanya terdiri dari beberapa item untuk melaksanakan latihan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu. Jika latihan telah menyelesaikan satu item maka segera pindah ke item yang lain tanpa diselingi *interval* maupun *recovery*, demikian seterusnya sampai selesai seluruh item yang disediakan. Maka latihan tersebut dinamakan satu sirkuit. Atlet bebas dalam memulai latihan dari item mana saja yang disediakan. Maka dari itu dalam menyusun urutan item latihan sebaiknya diusahakan sasaran otot yang ditingkatkan berseling. Artinya otot yang diberikan beban latihan sebaiknya berganti-ganti pada setiap urutan item latihan. Sebagai contoh urutan latihan dimulai dari *skipping*, *push-ups*, lompat pagar *sit-ups*, *squatthrust*, dan *back-ups*. Bentuk latihan sirkuit dapat menggunakan beban pemberat, berlari, berenang, bersepeda dan *stretching* pasif maupun aktif atau dinamis (senam kalistenik).

2.4 Kemampuan VO_2Max .

Menurut Sukadiyanto (2011: 83) Kemampuan VO_2Max adalah kemampuan organ pernafasan manusia untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya pada saat latihan (aktifitas fisik). Adapun cara menghitung VO_2Max yang paling sederhana dan mudah adalah dengan cara lari menempuh jarak tertentu atau menempuh waktu tertentu.

2.5 Landasan Teori.

Permainan sepak bola sifatnya adalah *intermittent*, yaitu pengeluaran energi menggunakan *power* dengan intensitas tinggi terutama gerakan eksplosif seperti melakukan menendang bola, dribbling, shooting. Dalam bermain sepak bola pemain harus melakukan gerakan seperti lari cepat, berhenti dengan seketika dan segera bergerak lagi, gerak meloncat, menjangkau, bola, melakukan dribbling, menendang bola, shooting. Gerakan tersebut harus dilakukan berulang selama permainan berlangsung, akibat proses gerakan itu akan menimbulkan kelelahan yang akan berpengaruh langsung pada kerja jantung, paru, sistem peredaran darah, pernapasan, kerja otot dan persendian tubuh. Adapun sistem energi yang diperlukan dalam permainan sepak bola adalah: a) *ATP-PC* sebesar 80%, b) *LA-O₂* sebesar 20% (Fox, 1988: 290).

Ciri-ciri sistem energi aerobik: 1) intensitas kerja sedang, 2) lama kerja lebih dari 3 menit, 3) irama gerak (kerja) lancar dan terus-menerus (kontinyu), 4) selama aktifitas menghasilkan karbondioksida + air (*CO₂ + H₂O*). Aktifitas yang sumber energinya berasal dari sistem aerobik cenderung menggunakan *power* yang rendah dan berhubungan erat dengan ketahanan kardiorespirasi (Sukadiyanto & Dangsina Muluk, 2011: 40).

Proses yang konsisten ini memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan secara leluasa tanpa menimbulkan kelelahan dan ini adalah dasar dari pada penyesuaian peningkatan energi. Program-program latihan fisik yang tepat dapat mengarahkan ke peningkatan kapasitas untuk produksi *energy aerobic*. Secara singkat dapat diketahui bahwa *ATP* merupakan sumber energi yang sewaktu-waktu dapat digali tubuh, yang memungkinkan otot menyediakannya dalam tiga cara yaitu: 1) dengan sistem *ATP-PC* untuk kegiatan yang berat dan singkat, 2) dengan sistem *LA* untuk kegiatan yang berat berjangka sedang, 3) dengan sistem oksigen untuk kegiatan yang tidak begitu berat berjangka panjang.

Sumber energi yang diperlukan dengan mudah dan tepat dapat dianalisa berdasarkan atas waktu yang diperlukan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan misalnya kegiatan: 1) kurang dari 30 detik, *ATP-PC*, 2) 30 detik-1,5 menit, *ATP-PC* dan *LA*, 3) 1,5 menit-3 menit, *LA* dan oksigen, 4) Lebih dari 3 menit oksigen.

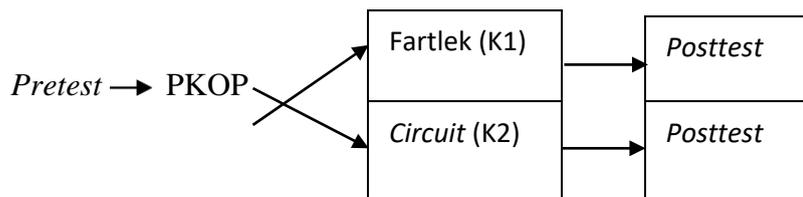
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.2 Jenis atau Desain Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen, yang menggunakan dua kelompok yang memperoleh perlakuan (*treatment*) yang berbeda. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 3) –Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuanl.

Dalam penelitian ini adalah melakukan eksperimen dengan menggunakan uji perbedaan Uji T, dengan menggunakan tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*). Eksperimen adalah eksperimen yang hampir atau semua taraf sebuah faktor dikombinasikan atau disilangkan dengan semua taraf tiap faktor lainnya yang ada dalam eksperimen (Sudjana, 2002: 148)



Keterangan :

- Pretest : Tes awal (Kemampuan VO₂Max)
 PKOP : Pembagian kelompok dengan cara *ordinal pairing*
 K1 : Kelompok Eksperimen 1
 K2 : Kelompok Eksperimen 2
 Posttest : Test akhir (Kemampuan VO₂Max)

Dalam gambar diatas dapat dijelaskan bahwa subyek eksperimen diberikan test awal, selanjutnya melakukan eksperimen dengan satu kelompok dengan latihan Fartlek dan satu kelompok *circuit training*. Adapun pembagian kelompok bisa digambarkan dalam table dibawah ini.

Adapun pembagian kelompok ke dalam penelitian ini dengan cara *ordinal pairing* yaitu setelah tes awal di ranking kemudian subyek yang memiliki prestasi setara dipasang-pasangkan ke dalam kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 diberikan treatmen latihan fartlek, sedangkan kelompok 2 diberikan treatmen *circuit training*.

3.2 Cara Kerja

Teknik pengumpulan data dengan tes awal (*Pre-test*) dan tes akhir (*post-test*). Sesuai dengan variabel, untuk mengambil data penelitian instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah mengambil data kemampuan VO₂Max.

Kemampuan VO₂Max diukur dengan tes dan pengukuran dengan tes *Multistage Fitness Test* (Validasi Sukadiyanto 2010: 87). Data kemampuan VO₂Max diukur dengan tes lari sepanjang 20 meter bolak balik mengikuti irama yang sudah disediakan. Sampel yang digunakan adalah pemain sepak bola Seyegan United Sleman, Yogyakarta. Alamat Gendengan, Margodadi, Sayegan, Sleman, Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengujian Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis data perlu diuji distribusi kenormalannya. Uji normalitas di ujikan pada masing-masing data penelitian. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogrov Sumirnov*, pada taraf signifikan $\alpha = 0.05$ dengan $(p > \alpha) = \text{Normal}$. Data yang diperoleh Hasil uji normalitas yang dilakukan pada tiap kelompok dinyatakan normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan varian antara kelompok 1 dan kelompok 2. Uji homogenitas menggunakan uji *Levene's Test* dengan uji F, jika nilai signifikansi $(p > 0.05)$ berarti Homogen dan jika nilai signifikansi $(p < 0.05)$ berarti tidak homogen. Hasil uji homogenitas data antara kelompok 1 dan kelompok 2 dinyatakan homogen.

4.2 Pembahasan dan hasil penelitian

1. Pengujian Hipotesis 1

Ada pengaruh latihan fartlek terhadap peningkatan kebugaran jasmani, Dari hasil perhitungan diperoleh mean pretest sebesar 6.4650 dan mean *posttest* sebesar 7.2905, mean peningkatan 0.8255 dengan demikian menyatakan ada pengaruh latihan fartlek terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max pada pemain sepak bola.

2. Pengujian Hipotesis 2

Ada pengaruh circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max , Dari hasil perhitungan diperoleh mean pretest sebesar 5.9400 dan mean *posttest* sebesar 6.5950, mean peningkatan 0.6550 dengan demikian menyatakan ada pengaruh circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max pada pemain sepak bola.

3. Pengujian hipotesis 3

Uji signifikansi hipotesis yang berbunyi Ha: ada perbedaan pengaruh latihan fartlek dan circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max, dan Ho: ada perbedaan latihan fartlek dan circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max pada pemain sepak bola. Dari hasil perhitungan latihan fartlek $t_{hitung} - 4.701$ dan circuit training $t_{hitung} - 2.779$ pada taraf signifikansi 5 %. Dengan demikian diterima hipotesis yang menyatakan ada perbedaan pengaruh latihan fartlek dan circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ada pengaruh latihan fartlek terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max pada pemain sepak bola. Peningkatan kemampuan VO2 Max meningkat secara signifikan dengan menggunakan latihan fartlek.
2. Ada pengaruh circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max pada pemain sepak bola. Kemampuan VO2 Max meningkat secara signifikan dengan menggunakan circuit training.
3. Ada perbedaan yang signifikan pengaruh latihan fartlek dan circuit training terhadap peningkatan kemampuan VO2 Max pada pemain sepak bola. Latihan fartlek menunjukkan nilai lebih baik di bandingkan dengan circuit training.

DAFTAR PUSTAKA

- Bompa, T.O. (1994). *Theory and methodology of training*. York University: Departement of Physical Education
- Fox, E.L. (1988). *The physiological basis of physical education and athletics*. United States of America: Saunders College publishing.
- Nossek, j. (1982). *General theory of training*. Logos: Pan african press.

Sudjana. (2002). *Desain dan analisis eksperimen*. Bandung: Tarsito.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Depdikbud

Sukadiyanto.,& Dangsina Muluk. (2011). *Pengantar teori dan metodologi melatih fisik*. Bandung: CV Lubuk Agung.

Weinberg, R.S & Gould, D. (2007). *Foundations of sport and exercise psychology*. United States: Human

Dampak Struktur Kepemilikan, *Financial Leverage*, *Size of Board* dan *Total Assets* terhadap Nilai Perusahaan dengan Sales Growth sebagai Proksi Peluang Pertumbuhan

Sri Dwi Ari Ambarwati¹⁾, Rini Dwi Astuti²⁾

¹ Fak. Ekonomi, UPN Yogyakarta

email: dwiari73.sw@gmail.com

²Fak. Ekonomi, UPN Yogyakarta

email: rinidwiastuti@upnyk.ac.id

Abstract

This study examines the effect of ownership structure, financial leverage, Size of board director, and total assets on the performance of companies with low and high growth opportunities using Sales Growth Rate (SRGR). This study was performed on companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2014 period is 128 companies, and samples that meet the criteria of the study is 88 companies (49 companies with a high SRGR and 39 companies with low SRGR) for 5 years so that the number of observations were 245 SRGR observation for companies with 195 to SRGR High and low. The results of the second year of research with proxy Sales Rate of Growth shows that empirically that the ownership structure, financial leverage, Size of board director, and sales growth has simultaneously influence on the performance of companies with low and high growth opportunities. Partially findings is that institutional ownership variable size of board directors and significant effect on the performance of companies with high growth opportunities. While the ownership structure Insider (Insid), financial leverage (LEV) and Total assets partially no effect on the performance of companies with high growth Opportunities. As for low growth opportunities, partially it is found empirical evidence that insider ownership variables, institutional ownership and total assets significantly affect the performance of companies with low growth opportunities. For institutional ownership structure revealed a significant effect on performance but at a rate of 10% alpha tolerated. While financial leverage and the size of the board directors partially no effect on the performance of companies with low growth Opportunities. The latter finding implies that the differences proxy for growth opportunities PER and SRGR provide different findings on the variable determinant of the company's performance.

Keyword: *ownership structure, financial leverage, opoortunities growth, sales growth rate*

PENDAHULUAN

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa peluang pertumbuhan (*growth opportunities*) mempengaruhi hubungan antara nilai perusahaan/kinerja dan keputusan keuangan perusahaan (Smith and Watts, 1992; Chen and Liu, 2010, Reyna & Encalada, 2012). Namun tidak ditemukan bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan insider. Ini isu yang menarik karena konflik kepentingan yang baru akan muncul antara pemegang saham minoritas dan mayoritas. (Shleifer & Vishny, 1997)

Penelitian terkait sebelumnya oleh peneliti dengan menggunakan proksi PER menghasilkan temuan secara empiris struktur kepemilikan, *financial leverage*, *Size of board director*, dan *sales growth* memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities rendah dan tinggi*. Sedangkan secara parsial ditemukan bukti empiris bahwa variabel *financial leverage* dan *size of board director* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities rendah*. Untuk perusahaan dengan *growth opportunities tinggi*, jika dilihat pengaruhnya secara parsial maka ditemukan bukti empiris bahwa variabel kepemilikan institusional, *financial leverage* dan *size of board director* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities tinggi*.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA)

Penelitian terkait dilakukan oleh Reyna & Encalada (2012) pada perusahaan di Mexico tentang pengaruh struktur kepemilikan, *financial leverage* dan proporsi direktur terhadap nilai perusahaan dengan membedakan ada tidaknya peluang pertumbuhan untuk sampel yang ditelitinya. Kepemilikan keluarga/insider, komposisi dan ukuran direktur serta leverage keuangan memainkan dua peran yaitu bisa meningkatkan kinerja jika tidak ada proyek investasi tapi memiliki pengaruh negatif jika ada peluang pertumbuhan. Masalah baru muncul antara pemegang saham mayoritas dan minoritas pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun demikian konsentrasi kepemilikan, hutang dan board director hanya sebuah mekanisme dalam perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan.

Hasil penelitian Ahmad, et.al (2012) pada perusahaan Malaysia menemukan bukti empiris bahwa struktur modal seperti hutang jangka pendek dan total hutang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini mendukung temuan Reyna & Encalada (2012) dan membuktikan tulisan sebelumnya oleh Ross (1977), Heinkel (1982) and Noe (1988) yang menyatakan bahwa penambahan leverage dengan menambah hutang perusahaan memberikan implikasi positif bagi nilai perusahaan dan kinerja. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hadlock and James (2002) dalam Reyna & Encalada (2012) dimana mereka menyimpulkan bahwa perusahaan lebih menyukai hutang karena untuk mengantisipasi pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Gleason et.al (2000) menguji hubungan antara kinerja dan leverage dengan menggunakan proksi kinerja return on assets. Hasil penelitian adalah total hutang memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja, kemudian dua implikasi dapat disimpulkan yaitu struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan koefisien negatif menunjukkan secara umum penggunaan hutang yang lebih besar bagi perusahaan menyebabkan pengaruh negatif itu. Struktur modal juga tidak hanya merupakan penentu kinerja, ukuran (*size*) perusahaan juga merupakan penentu kinerja perusahaan yang lebih besar akan menghasilkan return on asset yang lebih besar pula dibanding perusahaan kecil. Hasil ini didukung oleh Agarwal, et.al (2001) ketika hutang memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Namun profitabilitas perusahaan berhubungan positif dengan sales dan sales growth. Penelitian ini juga selaras dengan Hames and Chen (2004) dalam Reyna-Encalada (2012) dimana rasio hutang memiliki hubungan negatif dengan kinerja namun size memiliki hubungan positif terhadap kinerja.

Mesquita and Lara (2003) menemukan bukti empiris bahwa hutang jangka panjang tidak berpengaruh terhadap return on equity dan bertanda negatif, namun hutang jangka pendek memiliki tanda positif. Abbor (2005) melakukan penelitian di Ghana dan menemukan bukti bahwa hutang jangka pendek memiliki hubungan positif signifikan terhadap return on equity (ROE), dia menganggap bahwa hutang jangka pendek tidak mahal dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Hasil ini juga menyatakan bahwa profitabilitas mampu ditingkatkan dengan sales dan sales growth. Untuk hutang jangka panjang memiliki hubungan negatif signifikan dengan kinerja. Artinya peningkatan dalam hutang jangka panjang berhubungan dengan pengurangan profitabilitas dan lebih mahal. Implikasinya adalah posisi hutang berhubungan dengan peningkatan profitabilitas, rasio hutang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas. Selain itu terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan (size) dan sales growth.

Berdasarkan beberapa hasil riset sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga terdapat pengaruh signifikan secara serempak dan parsial struktur kepemilikan, financial leverage, size dan sales growth terhadap kinerja pada perusahaan dengan *Sales rate of growth* tinggi.

H₂ : Diduga terdapat pengaruh signifikan secara serempak dan parsial struktur kepemilikan, financial leverage, dan size terhadap kinerja pada perusahaan dengan *Sales rate of growth* rendah.

Penelitian ini berbeda dengan tahun sebelumnya pada proksi peluang pertumbuhan yaitu menggunakan Sales Rate Growth (SRGR) diharapkan juga menjadi masukan bagi perusahaan dalam membuat keputusan pendanaan dan struktur kepemilikan apakah benar-benar mampu meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan manajer untuk dapat membuat kebijakan yang mendukung pemilihan pendanaan dan komposisi pemilikan saham yang tepat dengan memperhatikan pula peluang pertumbuhan yang menguntungkan. Sedangkan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan dan pendanaan terhadap kinerja dengan membedakan peluang pertumbuhan tinggi dan rendah dan menambah referensi dalam bidang manajemen keuangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Penelitian lanjutan ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014 ada 127 perusahaan, dan sampel yang memenuhi kriteria penelitian adalah 88 perusahaan (49 perusahaan dengan SRGR tinggi dan 39 perusahaan dengan SRGR rendah) selama 5 tahun sehingga jumlah observasi sebesar 245 observasi untuk perusahaan dengan SRGR Tinggi dan 195 untuk SRGR rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2010 – 2014 dan dari ruang penelusuran UPN -Veteran Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Analisis estimasi data dari seluruh model persamaan regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program EVIEWS *versi 6*. Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Q_{\text{High-SRGR}} = \alpha + \beta_1 \text{INSD}_{it} + \beta_2 \text{INST}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{SIZE}_{it} + \beta_5 \text{TA}_{it} + e_{it} \dots (\text{model 1})$$

$$Q_{\text{Low-SRGR}} = \alpha + \beta_1 \text{INSD}_{it} + \beta_2 \text{INST}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{SIZE}_{it} + \beta_5 \text{TA}_{it} + e_{it} \dots (\text{model 2})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis Regresi OLS untuk Perusahaan dengan Growth Opportunities Rendah

Berdasarkan hasil olah data regresi OLS menggunakan program evIEWS maka diperoleh hasil statistik sebagai berikut:

{insert table}

Sehingga persamaannya:

$$Y_{\text{RENDAH}} = 29.98454 - 0.727779 \text{INSD} - 0.673488 \text{INST} - 4.261539 \text{LEV} - 12.87980 \text{SIZE} + 8.410887 \text{ASSET} + e$$

Berdasarkan olah data regresi OLS diatas maka dapat dapat dibuktikan secara empiris bahwa struktur kepemilikan, financial leverage, Size, dan total assets memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities rendah. Sedangkan secara parsial diperoleh hasil bahwa kepemilikan insider (INSID) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities* rendah, hal ini berhubungan dengan teori keagenan dimana kepemilikan insider memainkan peranan penting dalam mengurangi masalah keagenan. Temuan ini tidak mendukung penelitian Reyna & Encalada (2012), Conell & Servaes (2007), Ambarwati, et.al, (2011). Kepemilikan institusional (INST) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah artinya semakin besar kepemilikan institusional maka dapat mengurangi penggunaan ekuitas eksternal sehingga kinerja perusahaan semakin baik. *Financial leverage* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah, hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan rendah biasanya lower leveraged. *Size of board director* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah. Artinya banyaknya direktur dari luar perusahaan tidak terlalu memainkan fungsi kontrol pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah. *Total Assets* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan rendah. Temuan ini selaras dengan penelitian Abbor (2005) dan Ambarwati & Astuti (2014).

b. Hasil Analisis Regresi OLS untuk Perusahaan dengan Growth Opportunities Tinggi

Berdasarkan hasil olah data regresi OLS menggunakan program evIEWS maka diperoleh hasil statistik sebagai berikut:

Sehingga persamaannya:

$$Y_{\text{TINGGI}} = 37.02401 - 0.159601 \text{INSD} - 0.140876 \text{INST} - 1.20E07 + \text{LEV} - 1.236330 \text{SIZE} + 3.98E-08 \text{ASSET}$$

Berdasarkan olah data regresi OLS diatas maka dapat dapat dibuktikan secara empiris bahwa struktur kepemilikan, financial leverage, Size, dan total assets memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities tinggi. Berdasarkan analisis statistik diperoleh hasil bahwa kepemilikan insider (INSID) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities* tinggi, hal ini berhubungan dengan fungsi kontrol, dimana perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi cenderung memanfaatkan pihak eksternal dalam mekanisme monitoring. Namun arah hubungan yang negataif sudah sesuai teori dimana semakin tinggi kepemilikan insider maka semakin rendah pula kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi. Kepemilikan institusional (INST) memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi artinya semakin besar kepemilikan institusional maka dapat mengurangi penggunaan ekuitas eksternal sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Temuan ini senada pada perusahaan dengan growth opportunities rendah. *Financial leverage* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi *Financial leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities tinggi, hal ini terjadi karena leverage/hutang hanya akan berperan pada meningkatnya kinerja perusahaan jika perusahaan menghadapi growth opportunities yang kemudian digunakan manajer untuk melakukan investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan. *Size of board director* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan growth opportunities tinggi. Artinya perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi membutuhkan kontrol manajemen dari pihak eksternal lebih tinggi sehingga bisa mengurangi masalah keagenan yang muncul. Semakin banyak pihak eksternal dalam mekanisme monitoring semakin meningkatkan kinerja perusahaan. *Total Assets* mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi akan menggunakan pendanaan eksternal lebih besar sehingga total aset tidak banyak digunakan sebagai kapitalisasi perusahaan.

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan table, grafik(gambar), dan ata bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

c. KESIMPULAN

Penelitian ini sudah bisa membuktikan bahwa secara empiris bahwa struktur kepemilikan, *financial leverage*, *Size of board director*, dan *total assets* memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities* tinggi.

Jika dilihat pengaruhnya secara parsial maka ditemukan bukti empiris bahwa variabel kepemilikan institusional dan *size of board director* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities tinggi*. Sedangkan Struktur kepemilikan Insider (INSID), *financial leverage* (LEV) dan *Total asets* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan *growth Opportunities tinggi*.

Penelitian ini sudah bisa membuktikan bahwa secara empiris bahwa struktur kepemilikan, *financial leverage*, *Size of board director*, dan *sales growth* memiliki pengaruh secara serempak terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities* rendah.

Jika dilihat pengaruhnya secara parsial maka ditemukan bukti empiris bahwa variabel kepemilikan insider, kepemilikan institusional dan *total assets* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan *growth opportunities rendah*. Untuk struktur kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja namun pada tingkat alpha ditolerir 10%. Sedangkan *financial leverage* dan *size of board director* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan *growth Opportunities rendah*.

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang bisa disampaikan untuk perbaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan struktur corporate governance atau tata kelola perusahaan dan total aset karena berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan *growth opportunities rendah dan tinggi*

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mencoba menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga ditemukan hasil penelitian yang lebih robust.

REFERENSI

Abor, 2005, The Effect of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Listed Firms in Ghana, *The Journal of Risk Finance*, Vol. 6, No. 5, pp 438-445

Agarwal, R and Elston, JA 2001, 'Bank-firm relationships, financing and firm performance in Germany', *Economics Letters*, vol.72, pp.225-232.

Agus Harjito, 2006, Substitution Relationship between the Agency Problem Control Mechanisms in Malaysia, *Siasat Bisnis*, p 111-117

Ahmad, Abdullah and Roslan, 2012, Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms, *International Review of Business Research Papers Vol. 8. No.5. July 2012. Pp. 137 - 155*

Brigham, E and Houston, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Penerbit Salemba, Edisi kesepuluh

Chen, C., & T. Steiner. (2005). Tobin's q, managerial ownership, dan analyst coverage: A nonlinear simultaneous equations model. *Journal of Economics and Business* 52: 365-382.

Eisenhardt, 1999, Agency Theory an Assesment and Review, *Academy of Management Review*, vo. 14, no. 1, pp 57-74

Gozali, 2005, *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi ketiga, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

Gleason KC, Mathur LK and Mathur I ,2000, 'The interrelationship between cultures, capital structure, and performance: Evidence from European retailers', *Journals of Business Research*, vol.50, pp.185-91

Kallapur, et.al, 1999, The Asosiation Between Investment Oportunity Set Proxies and Realized Growth, *Journal of Business Finance and Accounting*, pp 505-519

La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny.1997. Legal Determinants of External Finance. *Journal of Finance*.52. 1131-1150

La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny.1999. Corporate Ownership Around the World. *Journal of Finance*.54. 471-517

La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny. 2000.Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*.58(1-2).3-27

La Porta,R,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer dan R.W.Vishny. 2000. Agency Problem and Dividend Policies Around The World. *Journal of Finance*. 60. 1-33.

Mayer, C. ,1996, Corporate Governance, competition, and performance, *Jornal of Law and Society*, 24, 152-76

McConnell and Servaes, H. 1995, Equity Ownership and the two faces of debt, *Journal of Financial Economics*, 39, 131-57

Mesquita and Lara 2003, _Capital structure and profitability: The Brazilian case_, Working paper, Academy of Business and Administration Sciences Conference, Vancouver, July 11-13

Modigliani, F and Miller, M 1958, _The cost of capital, corporation finance and the theory of investment_, *The American Economic Review*, vol. 48 no. 3, pp. 261-97.

Modigliani, F and Miller, M 1963, _Corporate income taxes and the cost of capital: A correction_, *American Economic Review*, vol. 53, pp. 443-53.

Reyna-Encalada, 2012, Ownership Structure, Firm Value and Investment Opportunity Sets: Evidence from Mexican Firm, *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, Volume 8, Issue 3, pp 35-37

Riahi-Belkaouli & Picur, 2001, Investment Opportunity Sets Dependence of Dividend Yield and Price Earnings Ratio, *Managerial Finance*, Volume 27 Number 3

Smith and Watts, 1992, The Investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies, *Journal of Finacial Economics*, 32, pp 263-292

Weston, J.Freud and Brigham, F.Eugene. 1992. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jilid Dua. Erlangga : Jakarta.

Wilopo dan Sekar Mayangsari. 2002. Pengaruh Struktur Kepemilikan,Perilaku Manajemen Laba,Free Cash Flow Hypotesis dan Economic Value Added: Pendekatan Path Analysis.Simposium Nasional Keuangan In Memorium Prof.Dr.Bambang Riyanto.Hal:87-112.

Tabel OLS Peluang Pertumbuhan rendah

Total panel (balanced) observations: 195

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.98454	41.73331	0.718480	0.4751
INSD	-0.727779	0.214294	-3.396171	0.0012
INST	-0.673488	0.184294	-3.654423	0.0005
LEV	-4.261539	2.802727	-1.520497	0.1333
SIZE	-12.87980	9.299479	-1.385002	0.1709
ASET	8.410887	4.110279	2.046306	0.0448
R-squared	0.230072	Mean dependent var	18.76786	
Adjusted R-squared	0.169921	S.D. dependent var	20.98703	
S.E. of regression	19.12101	Akaike info criterion	8.821269	
Sum squared resid	23399.23	Schwarz criterion	9.013997	
Log likelihood	-302.7444	Hannan-Quinn criter.	8.897823	
F-statistic	3.824926	Durbin-Watson stat	1.401109	
Prob(F-statistic)	0.004290			

Tabel OLS Pertumbuhan Tinggi

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.02401	6.429231	5.758699	0.0000
INSD	-0.159601	0.142441	-1.120475	0.2631
INST	-0.140876	0.077095	-1.827308	0.0683
LEV	1.20E-07	1.27E-07	-0.945628	0.3449
SIZE	-1.236330	0.524408	-2.357572	0.0188
ASET	3.98E-08	2.76E-08	1.441788	0.1501
R-squared	0.027426	Mean dependent var	20.69161	
Adjusted R-squared	0.016221	S.D. dependent var	23.47186	
S.E. of regression	23.28072	Akaike info criterion	9.146670	
Sum squared resid	235224.4	Schwarz criterion	9.202399	
Log likelihood	-2006.267	Hannan-Quinn criter.	9.168655	
F-statistic	2.447685	Durbin-Watson stat	1.744638	
Prob(F-statistic)	0.033303			

PEMETAAN POTENSI WISATA, JALUR PRODUKSI, PEMASARAN, TANAMAN YANG TEPAT, DAN PENDEKATAN PADA UNSUR TOKOH MASYARAKAT DI KECAMATAN MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO

Sri Kussujaniyatun¹, Teguh Kismantoroadji², Hari Kusuma Satria Negara³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
email: sri_kussujaniyatun@yahoo.co.id

²Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
email: kismantoroadji@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
email: harikusuma05@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam membangun suatu kawasan seringkali mengabaikan konsep ekonomi hijau. RIP UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bidang tata kelola publik memberi arah bagi pengembangan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kesadaran menghijaukan lahan yang harus ditumbuhkembangkan dengan konsep pelestarian alam, sehingga produksi pengolahan akar kayu tetap tumbuh dengan baik yang didukung dengan semakin hijaunya lingkungan. Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, dimana data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis. Analisis data yang dilakukan akan menghasilkan pemetaan yakni pemetaan potensi wisata, pemetaan tanaman yang tepat di bekas lokasi tambang kapur agar menambah asri lingkungan, pemetaan jalur produksi, pemetaan jalur pemasaran, dan pendekatan pada unsur tokoh masyarakat serta tokoh pemerintah daerah adalah membuat program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. Luaran yang akan dicapai setiap tahun penelitian ini adalah memberi sumbangan pemikiran dalam tata kelola publik dengan membuat *best practice model* model terbaik untuk proyek percontohan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro.

Kata Kunci: Pemetaan Potensi Wisata dan alam, Pemetaan Jalur Produksi, Jalur Pemasaran, Tanaman yang Tepat, Pendekatan Tokoh Masyarakat.

Abstract

Problems in building a region often ignore the concept of a green economy. RIP UPN "Veteran" Yogyakarta in the field of public governance to give directions for the development of strategies for regional development program based tourism root wood processing and enrichment of the ecosystem in the former land of limestone mining Bojonegoro. PUPPT aims to build awareness of greening the land to be cultivated with the concept of nature conservation, so the production processing wood roots continue to grow well-supported by increasingly green environment. The basic method of research used in this research is descriptive analytic method, where data is collected initially prepared, described and then analyzed. Data analysis will produce a mapping of the mapping of tourism potential, mapping the right plant in the former mining site of lime that adding a beautiful environment, mapping production lines, mapping marketing channels and approaches to elements of community leaders and leaders of local government is to create program strategies for regional development roots-based travel wood processing and enrichment of the ecosystem in the former land of limestone mining Bojonegoro. Outcomes to be achieved each year of this study is to provide contributions to the public governance best practice models to create the best model for a pilot project program development strategy based tourist region root wood processing and enrichment of the ecosystem in the former land of limestone mining Bojonegoro.

Key words: Mapping Potential and nature, Mapping Production Line, Line Marketing, Right Plant, Community Leader approach.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan dalam membangun suatu kawasan seringkali mengabaikan konsep ekonomi hijau. Pengembangan strategi wisata berbasis pengolahan akar kayu menimbulkan kesan bahwa terjadi pembalakan kayu secara besar-besaran yang kemudian akarnya diolah. Lahan tambang tradisional kapur di wilayah Margomulyo merupakan wilayah pegunungan kapur di Bojonegoro. Lahan pertambangan kapur ini semakin habis dan masyarakat mulai mengolah akar-akar kayu. Lahan kapur ini merupakan lahan yang bagus bagi

pertumbuhan tanaman jati.

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Strategi Pengembangan Wilayah Pengolahan Akar Kayu Berbasis *Eco Green* di Lahan bekas Pertambangan Kapur sesuai dengan RIP UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bidang tata kelola publik memberi arah bagi program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro.

2. TINJAUAN PUSTAKA

RIP UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bidang tata kelola publik memberi arah bagi pengembangan program strategi pengembangan wilayah wisata berbasis pengolahan akar kayu dan pengkayaan ekosistem di lahan bekas pertambangan kapur Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberi sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu dan pembangunan bangsa dengan membuat *best practice model* pemanfaatan pengelolaan dengan mempertahankan dan bahkan pengkayaan ekosistem.

Strategi Pengembangan Wilayah Wisata

Lahan tambang tradisional kapur di wilayah Margomulyo merupakan wilayah pegunungan kapur di Bojonegoro. Dalam hal membangun strategi pengembangan wisata Kussujaniatun, 2006 menyatakan bahwa sinergi semua pemangku kepentingan akan membentuk percepatan dalam membangun pengembangan wisata di suatu wilayah.

Berkaitan dengan potensi ekonomi pengolahan akar kayu ini perlu suatu pemasaran yang baik. Dalam hal strategi pemasaran promosi yang dibangun bisa dimulai dengan efek komunikasi dari mulut ke mulut Kussujaniatun, 2006. Selain itu yang perlu dikembangkan sesuai dengan Kussujaniatun 2007a, 2007b, 2008 adalah pentingnya membangun merek dan citra, termasuk dalam hal ini adalah pengembangan strategi wisata.

Kussujaniatun, 2009a dan 2009b menyatakan bahwa analisis strategi loyalitas sangat penting dilaksanakan. Strategi membangun loyalitas ini bisa dimulai melalui produk diferensiasi. Dalam hal ini, wilayah Margomulyo Bojonegoro sebagai bekas lahan tambang kapur yang mampu mengelola sisa-sisa akar atau bonggol kayu dengan nilai seni yang tinggi perlu memosisikan sebagai wilayah penghasil produk olahan akar kayu yang melestarikan dan peduli lingkungan hijau sebagai basis potensi wisata ekonomi hijau.

Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. Dalam hal ini akar kayu yang diolah menjadi wisata alam yang luar biasa indahnya jika digabung dengan *eco green*.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro periode 2013-2018 mengenai Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah salah satu poin menyebutkan bahwa Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta desa wisata, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini akan melakukan langkah pasti dalam usaha pengembangan potensi wisatanya.

3. METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analitik, dimana data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis (Surakhmad, 1998). Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survai terhadap responden, yaitu teknik pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan interview yang sangat terstruktur (Cooper dan Schindler, 2006). Analisis data yang dilakukan akan menghasilkan pemetaan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data yang tersedia dan survei terhadap pembuat kebijakan yaitu pejabat Dinas Pariwisata, pelaku usaha, pemetaan lingkungan, pemetaan ekosistem, kekayaan tanaman.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi pada tahun pertama adalah pemetaan. Pemetaan tersebut dilakukan dengan cara observasi data-data dari pemerintah maupun masyarakat yang sudah ada dan juga melakukan wawancara, observasi terhadap kebutuhan pemetaan yang tepat. Pemetaan terhadap potensi wisata, tanaman yang tepat di bekas lokasi tambang kapur, jalur produksi dan pemasaran akar kayu serta pendekatan unsur tokoh masyarakat.

4.1 Pemetaan Potensi Wisata

Hasil penelitian yang pertama merupakan pemetaan potensi wisata pada Kecamatan Margomulyo.

a. Rest Area

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki rencana untuk membangun dua lokasi *rest area* yang akan berfungsi sebagai pintu masuk Kabupaten Bojonegoro. Pemerintahan Kecamatan Margomulyo merencanakan berlokasi di tanah kas desa. Tanah kas desa yang direncanakan berlokasi di daerah Watu Jago, semula direncanakan di sekitar perajin akar kayu atau Desa Geneng. Namun karena ketidakadaan lokasi maka dipindahkan ke Desa Margomulyo. Pemerintah Kabupaten menganggarkan sebesar Rp 200.000.000,- di tahun 2017 untuk membangun *rest area* yang berfungsi sebagai lokasi display.

Lokasi *Rest Area* atau *display* ini memang haruslah dikonsepsi dan didesain dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dijadikan sebagai lokasi pemasaran atau penjualan produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Margomulyo khususnya seperti kerajinan akar kayu, batik jonegoro, olahan jagung, olahan jambu biji merah, dsb.

b. Wisata Budaya Samin

Nawacita yang diikuti dengan revolusi mental merupakan program utama dari pemerintah Indonesia. Revolusi mental dapat dikembalikan atau dikembangkan seperti di Era Pemerintahan sebelumnya yaitu dengan kembali kepada Kearifan Lokal. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro adalah budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Suku Samin. Suku samin terletak di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo yang berada dikawasan hutan memilili luas 74.733 hektare. Lokasi tersebut berjarak sekitar 4,5 Km dari ibu kota Kecamatan Margomulyo.

c. Desa Wisata Anggoro Kasih

Pengembangan dan pemanfaatan lokasi yang berada di daerah Kecamatan Margomulyo adalah dengan pembuatan Desa Wisata yang diharapkan akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Konsep dari Desa Wisata yang bernama Anggoro Kasih ini merupakan wisata alam yang berlokasi di sekitar area Sungai Bengawan Solo yang menjadi sentra penanaman Jambu Biji. Desa Wisata Anggoro Kasih telah di resmikan pada 22 Desember 2015 oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro. Desa Wisata ini direncanakan akan diisi dengan arena *Flying Fox*, *Outbound*, *Tracking*, lokasi perkemahan dan sebagainya.



Gambar 1
Lokasi Desa Wisata Anggoro Kasih

4.2 Pemetaan Tanaman

Pengembangan tanaman di Daerah Di Kecamatan Margomulyo sebagian besar merupakan tanaman Jagung 63%, padi 23%, Ubi Kayu 12% dan Kedelai 2%. Hasil pertanian Jagung di Kecamatan Margomulyo merupakan hasil panen terbesar di Kabupaten Bojonegoro. Namun pertanian ini tidak terlalu meningkatkan perekonomian masyarakat Margomulyo.

Tabel 1
Data Tanaman di Kecamatan Margomulyo Tahun 2016

No	Desa	Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
1	KALANGAN	62	552	9	25
2	NGELO	52	176	10	95
3	MARGOMULYO	237	642	25	100
4	SUNBERJO	405	704	55	224
5	MEDURI	241	690	15	150
6	GENENG	104	291	-	15
Jumlah Masing-masing		1101	3055	114	609
Jumlah Keseluruhan			4879		
Prosentase		23%	63%	2%	12%

Sumber: Data Primer

Dengan mengambil celah pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana didalam pasalnya menyebutkan bahwa daerah KPS selebar 100 m dari tepi sungai dapat digunakan untuk masyarakat namun bukan tanaman produksi, haruslah tanaman Kayu. Sehingga UPT pertanian melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sedang mengembangkan Tanaman Jambu disekitar Sungai Bengawan Solo. Saat ini tanaman jambu biji yang telah ditanam sebanyak 9500 batang, yang tersebar pada kelompok tani.

Tabel 2
Distribusi Penanaman Jambu Biji

NO	NAMA	JUMLAH PETANI	KAWASAN KPS	KAWASAN NON KPS	JUMLAH TOTAL
	POK TAN	JAMBU (Orang)	(Batang)	(Batang)	(Batang)
1	Subur Muda	31	5303	697	6000
2	Rukun Santoso	35	1340	160	1500
3	Lestari	10	1265	735	2000
Jumlah		76	7908	1592	9500

Sumber: Data Primer

4.3 Jalur Produksi

Kerajinan akar kayu di Kecamatan Margomulyo merupakan salah satu pusat kerajinan akar kayu

yang cukup besar di Indonesia. Kerajinan akar kayu merupakan, kerajinan yang didapat dari hasil penggalian akar kayu jati yang telah berusia cukup tua 40-80 Tahun. Saat ini di Kecamatan Margomulyo terdapat 78 Perajin Akar Kayu.

a. Persediaan Bahan Baku

1) Lokasi pengambilan bahan baku

Kerajinan akar kayu yang dimulai dan berkembang cukup lama yaitu sejak tahun 2002. Sehingga kerajinan akar kayu ini membutuhkan banyak bahan baku untuk diolah oleh perajin. Berdasarkan survai melalui wawancara kepada perajin akar kayu maka bahan baku yang diperoleh sebagian besar dari kabupaten disekitar Bojonegoro.

Tabel 3
Lokasi Pengambilan Bahan Baku

No	Kota	Jumlah
1	Bojonegoro	30%
2	Blora	30%
3	Panjalu	30%
4	Kudus & Madiun	10%

Sumber: Data Primer

2) Ketersediaan bahan baku

Permasalahan yang sering dihadapi oleh industri furnitur adalah ketersediaan bahan baku (Sutopo, dkk., 2012). Bahan baku akar kayu merupakan bahan baku yang sulit diperbarui, bahan baku akar kayu saat ini diperoleh dari beberapa kota seperti pada tabel diatas. Perajin di Kecamatan Margomulyo memiliki persediaan antara Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sesuai dengan kepemilikan modal dari masing-masing perajin. Bahan baku yang dimiliki oleh perajin dalam bentuk yang beragam, ada yang berukuran kecil dan juga berukuran besar.

b. Pengolahan

1) Waktu Pengolahan

Waktu pengolahan Akar Kayu memang tergantung oleh jenis barang yang akan diolah. Apabila barang dengan ukuran kecil seperti tempat buah, asbak, meja kecil maka setiap perajin dapat menghasilkan 10-20 unit barang setiap harinya. Namun untuk barang dengan ukuran yang cukup besar misal kursi, meja kopi dan beberapa barang lain membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu. Kegiatan tersebut mulai dari pembelian, produksi dan hingga jual.

2) Biaya pengolahan

Efisiensi dan kualitas barang merupakan kunci utama pada proses produksi. Biaya produksi ini dapat kita kelompokkan menjadi 2 jenis produk yaitu Barang Standar dan barang Seni.

3) Barang Standar

Barang standar ini merupakan jenis barang yang standar atau biasa dipesan atau dibuat oleh perajin. Jenis barang standar ini seperti kursi, meja, tempat buah dan sebagainya. Biaya pengolahan barang ini sekitar 30% dari harga beli barang. Setelah dilakukan pemrosesan barang dan dilakukan penjualan, maka harga barang dapat meningkat sampai 200% atau hampir 2 kalinya harga beli barang. Barang yang dihasilkan merupakan barang setengah jadi, karena apabila dilakukan pengolahan hingga finishing maka tidak memberi nilai tambah yang signifikan.

4) Barang Seni

Barang seni pada hakekatnya tidak memiliki harga standar atau rata-rata harga, dikarenakan barang seni ini merupakan barang yang diperoleh dan dibentuk kondisi alam. Harga jual barang ini bisa mencapai 1000% dari harga beli. Dikarenakan barang dibeli oleh pengepul yang tidak mengetahui seni dan dijual kepada kolektor. Misal, Membeli bahan baku Rp 1.500.000,- biaya pengolahan Rp. 300.000,- dapat dijual hingga Rp 20.000.000,-

Salah satu yang menjadi kendala bagi perajin di Margomulyo adalah ketidak mampuan pengelolaan barang hingga sesuai spesifikasi terbaik/ siap export. Sehingga barang yang dihasilkan merupakan barang setengah jadi. Barang dengan kualitas export misal kadar air tertentu. Kondisi inilah yang membutuhkan oven yang cukup besar, sedangkan di Kecamatan Margomulyo belum

memiliki karena terbatasnya dana. Biaya sewa oven di Yogyakarta perhari sampai Rp 550.000.-. Biaya yang sangat tinggi inilah menjadikan kesulitan tersendiri bagi perajin akar kayu.

c. Desain Produk

Perajin Akar Kayu di Kecamatan Bojonegoro telah memiliki desain produk yang cukup banyak. Namun inovasi untuk mengembangkan desain masih sangat kurang, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan pelatihan kepada perajin akar kayu. Saat ini desain yang dibuat oleh perajin akar kayu sebagian besar merupakan dari pesanan pembeli.

4.4 Jalur Pemasaran

Pemasaran adalah faktor utama untuk pengembangan sebuah usaha. Saluran distribusi pemasaran perlu dikelola dengan baik, promosi perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penjualan (Kussujaniatun, 2006a). Pemasaran atau penjualan akar kayu di Kecamatan Margomulyo memiliki rantai yang sangat panjang, bahkan seorang perajin mengatakan hingga sembilan rantai. Panjangnya rantai penjualan ini yang menjadikan perajin akar kayu Kecamatan Margomulyo tergantung pada *buyer*.

a. Lokasi penjualan

Lokasi penjualan akar kayu di Kecamatan Margomulyo sebagian besar berada di lokasi perajin atau dapat dikatakan pembeli datang ke lokasi.

b. Identifikasi Pembeli

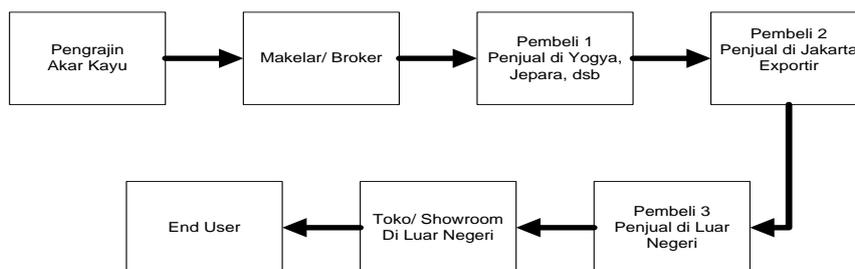
Pembeli akar kayu Kecamatan Margomulyo adalah toko/badan usaha/ perorangan yang akan menjual barangnya lagi kepada pihak lain. Pembeli akar kayu sebagian berasal dari kota-kota di Jawa dan Bali.

Tabel 4
Kota Asal Pembeli

ASAL KOTA					
PEMBELI AKAR KAYU					
1	YOGYA	33,19%	11	BLORA	1,77%
2	JEPARA	21,90%	12	BLITAR	1,11%
3	SOLO	13,94%	13	CIREBON	0,66%
4	BALI	9,29%	14	NGAWI	0,44%
5	SUKABUMI	5,53%	15	JAKARTA	0,22%
6	KLATEN	5,31%	16	MOJOKERTO	0,22%
7	BOJONEGORO	4,20%	17	PASURUAN	0,22%
8	MAGELANG	2,43%	18	SARADAN	0,22%
9	MAGETAN	2,21%	19	SERANG	0,22%
10	SEMARANG	1,99%	20	SRAGEN	0,22%

Sumber: Data Primer

Namun pembeli yang berasal dari Yogyakarta, Jepara hingga kota Sragen didominasi oleh para penjual yang akan menjual barangnya lagi. Pembeli yang menggunakan barangnya sendiri atau *end user* sangatlah sedikit. Ketergantungan perajin kepada para pembeli yang merupakan penjual mengakibatkan para perajin tidak memiliki margin laba yang lebih besar. Panjangnya jalur distribusi ini berdampak pada harga yang murah dari perajin, karena sebagian besar pembeli bukanlah *end user*.



Gambar 4 *flowchart* penjualan dari perajin akar kayu hingga *end user*

c. Ketersediaan Badan usaha

Perajin di Kecamatan Margomulyo belum ada yang memiliki Badan Usaha, seluruh perajin hanya menggunakan nama pribadi sehingga terdapat batasan didalam bertransaksi.

d. Kemampuan melakukan penjualan langsung (internet dan bahasa asing)

Terbatasnya informasi dan kemampuan perajin akar kayu di Kecamatan Margomulyo menjadikan batasan didalam melakukan penjualan langsung kepada konsumen *end user*. Apalagi sebagian besar konsumen akhir merupakan orang luar negeri yang memerlukan kemampuan komunikasi, badan usaha, serta kemampuan untuk melakukan export-import antar negara.

e. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penjualan

Banyak faktor yang menentukan penjualan dan pemasaran akar kayu diantaranya adalah bahan baku, pengolahan, kondisi stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri, kondisi perekonomian global.

f. Nilai penjualan

Transaksi Jual-Beli di Kecamatan Margomulyo sangatlah tinggi, dimana berdasarkan data yang tercatat di Paguyuban Jati Aji terdapat 50 sampai 80 Truk pengiriman setiap bulannya. Nilai transaksi untuk setiap truknya berkisar antara Rp 30.000.000,- sampai dengan Rp 40.000.000,- sehingga total transaksi untuk setiap bulannya di Kecamatan Margomulyo antara 1,5M – 3,2 M. Apabila di Kecamatan Margomulyo terdapat 78 Perajin maka rata-rata setiap perajin mampu mendapatkan omset antara 19 Juta hingga 41 Juta.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian strategi pengembangan wilayah wisata pengolahan akar kayu berbasis *eco green* di lahan bekas pertambangan kapur adalah:

1. Strategi pengembangan wilayah wisata, berdasarkan pengamatan dan pemetaan yang dilakukan pengembangan wisata adalah: 1) *Rest area* 2) Wisata Budaya Suku Samin 3) Agrowisata Anggoro Kasih.
2. Pemetaan Tanaman, tanaman yang sedang dan akan dikembangkan oleh Kecamatan Margomulyo adalah dengan penanaman Jambu Biji disepanjang aliran Sungai Bengawan Solo.
3. Jalur Produksi. Pemetaan jalur produksi untuk usaha akar kayu ini telah dilakukan mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi dan pemasaran.
4. Jalur Pemasaran. Proses pemasaran akar kayu ini merupakan sebuah skema yang sangat panjang hingga *end user*.

6. REFERENSI

- Cooper, Donald R., dan Pamela, S. Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis, Volume 1. PT Media Global Edukasi. Jakarta.
- Kismantoroedji, Teguh. 2008. Bantuan Benih Kedelai dan Dampaknya Terhadap Kelembagaan Petani di Gunungkidul DIY Prosiding Seminar 2008
- Kismantoroedji, Teguh. 2008 Problematika Ketersediaan dan Agribisnis Perbenihan Padi di Kabuapten Bantul Prosiding Seminar 2008 UPN "Veteran" Yk V
- Kismantoroedji, Teguh. 2008 Kajian Program Desa Mandiri Pangan Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Prosiding Seminar 2010 UPN "Veteran" Yk V
- Kismantoroedji, Teguh. 2008 Community –Based Agri-ecotourism in Kulon Progo and Bantul Regency Prosiding Seminar 2011 UPN "Veteran" Yk V
- Kussujaniatun, Sri. 2006. Hubungan antara Sikap Terhadap Bukti Fisik, Proses dan Karyawan dengan Kualitas Keterhubungan serta Perannya Dalam Menimbulkan Niat Ulang Membeli dan Loyalitas (Survei Pada Konsumen Member Card ALFA yang Berdomisili Di Sleman Yogyakarta). Penulis sendiri (Jurnal Humaniora Sains dan Pengajaran "INOVASI" Vol. XIV No. 3September 2006, ISSN 0854-4328).
- Kussujaniatun, Sri. 2006. Efek Komunikasi Dari Mulut ke Mulut Terhadap Sikap dan Niat Membeli Produk Prosesor AMD Athlon DSI Yogyakarta. Penulis sendiri (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi "BALANCE" Th. III No. 6 Juli 2006, ISSN : 1693-9352).
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Pengaruh Motivasi Nasabah Kredit Terhadap Keputusan Meminjam Dana (Survei Pada BPR Bank Kredit Kecamatan Juwangi Boyolali). Penulis sendiri Jurnal

- Ekonomi "Artavidya" Tahun 7 No.1 Maret 2007, ISSN : 1410-8755 Terakreditasi No. 23 a/DIKTI/Kep/2004
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Analisis Pengaruh Dead Endorser Terhadap Brand Personality Pada Iklan Kompas Di Televisi (Survei Pada Iklan Konsumen Surat Kabar Harian Kompas Di Kabupaten Sleman Yogyakarta). Penulis sendiri) (Jurnal Bisnis dan Ekonomi "JBE" Vol. 14 No. 23 a/DIKTI/Kep/2004).
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Analisis Ekuitas Merek (Survei Pada Konsumen Rokok Djarum 76 Di Yogyakarta). Penulis sendiri. (Jurnal Kajian & Riset Manajemen "Karisma" Vol. 1 Nomor 2, April 2007, ISSN : 1978-404X)
- Kussujaniatun, Sri. 2007. Analisis Pengaruh Citra, Kualitas dan Kepuasan Terhadap Loyalitas (Studi Empiris pada BPR Danagung Yogyakarta). Penulis sendiri (Jurnal Bisnis dan Manajemen "Bisma" Vol. 1 No.1, April 2007, ISSN : 1978-3108)
- Kussujaniatun, Sri. 2008. Anteseden Perilaku berganti Merek pada mobil Nissan Grand Livina di Yogyakarta. Penulis ke 2 Karisma-Prodi Manajemen UPN Vol IV, no 3 ISSN:1978-404X. Desember 2010
- Kussujaniatun, Sri. 2008. Pengaruh Pengetahuan Produk, Nilai dan Kualitas yang dipersepsikan terhadap Kepuasan Pelanggan mobil Toyota di Yogyakarta Jurnal Bisnis dan Manajemen "Bisma" 2009, Vol 5, No 1.ISSN : 1978-3108. April 2011
- Kussujaniatun, Sri. 2009. Analisis Strategi membangun Loyalitas konsumen melalui Differensiasi produk. (Survai pada pengguna sepeda motor "Yamaha Mio" di Kab Sleman) Seminar Nasional V Call for Paper UTY. ISBN: 978-979-1334-25-9, 18 juli 2009.
- Kussujaniatun, Sri. 2009. Analisis Segmentasi Pasar Produk Shampo Zinc (Proceding) Seminar Nasional, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jatim. ISSN: 978-979-3100-28-9. 30 April 2009.
- Kussujaniatun, Sri. 2014. Pengentasan Kemiskinan: Motivasi dan Budaya perempuan dalam mekanisme Pemberdayaan Perempuan berbasis Pendekatan potensi di Kecamatan Berbah Sleman. Seminar Nasional,Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jogjakarta. Proceeding SINAU 3, 2014
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Surakhmad, Winarno. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik. edisi kedelapan. Bandung: Tarsito (anggota IKAPI).
- Sutopo, W., Devi, A.O.T., Hisjam, M., dan Yuniaristanto. 2012. A Model for Procurement and Inventory Planning for Export-Orientated Furniture Industry in Indonesia: A Case Study. *Proceeding of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2012* Vol 11, IMECS 2012, March 14-16, 2012, Hongkong.
- World Bank (1997), *World Development Report 1997-The State in a Changing World*, Washington, DC: World Bank.
- <http://purnamiap.blogspot.com/2014/09/makalah-perkembangan-ekonomi-indonesia.html>

**STRATEGI PENGUATAN *BRANDING* PADA PRODUK OLAHAN SALAK
HASIL UMKM DEWI PULE HOME INDUSTRI DI DESA WISATA PULESARI
MELALUI PERANCANGAN DESAIN KEMASAN (*PACKAGING*)
DAN DESAIN MEDIA PROMOSI**

Kartika Ayu Ardhanariswari

Susanti Rina

Abstrak

Selama ini kemasan produk menjadi salah satu yang dianggap sepele bagi sebagian pelaku *home industry*, salah satunya UMKM Dewi Pule di Desa Wisata Pulesari. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah produk olahan salak hasil UMKM Dewi Pule masih dikemas secara sederhana dan kurang menarik. Contohnya adalah produk bakpia salak yang masih dikemas secara sederhana menggunakan plastik mika dan kertas label yang tidak rapi, tidak bertahan lama dan kurang higienis. Padahal produk olahan salak bisa menjadi profit bagi masyarakat, didukung dengan meningkatnya sektor wisata Desa Pulesari. Untuk itu pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa Wisata Pulesari dalam meningkatkan profit dengan penguatan strategi branding melalui perancangan desain kemasan dan media promosi produk olahan salak hasil UMKM Dewi Pule. Pengabdian tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, (1) re-desain kemasan pada produk olahan salak. Diharapkan bahwa dengan kemasan (*Packaging*) yang menarik akan meningkatkan omset atau produksi; (2) membuat desain media promosi pada produk olahan salak. Karena masalah paling mendasar selain *Packaging* adalah masalah promosi, maka media promosi sangat diperlukan untuk membantu UMKM Dewi Pule di Desa Wisata Pulesari.

Kata Kunci: *home industry*, *branding*, desain kemasan (*packaging*), media promosi

Pendahuluan

Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia. Dimana persaingan dalam bidang perdagangan akan semakin ketat, bahkan bukan hanya proses penjualan saja yang ketat tetapi trik dan strategi branding dan pemasaran akan menjadi syarat. Untuk itu masyarakat Indonesia sudah harus siap menghadapi dan mempersiapkannya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelemahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait dengan tantangan MEA tersebut adalah berkaitan erat dengan pemasaran dan branding produk. Perlu diketahui bahwa keberhasilan pemasaran suatu barang, tidak hanya ditentukan oleh mutu barang serta usaha promosi yang dilakukan, tetapi juga dalam upaya yang sama oleh mutu dan penampilan kemasan itu sendiri. Karena itu mutu lain dari sebuah kemasan dinilai dari kemampuannya dalam memenuhi fungsi, di mana kemasan dituntut untuk memiliki daya tarik yang lebih besar daripada barang yang dibungkus di dalamnya. Keberhasilan daya tarik kemasan ditentukan oleh estetika yang menjadi bahan pertimbangan sejak awal perencanaan bentuk kemasan, karena pada dasarnya nilai estetika harus terkandung dalam keserasian antara bentuk dan penataan desain grafis tanpa melupakan kesan jenis, ciri dan sifat barang yang diproduksi.

Branding adalah bagian yang sangat mendasar dari kegiatan pemasaran yang sangat penting untuk dimengerti atau dipahami secara keseluruhan. Sampai di level tertinggi yaitu level organisasi, yang mana akan dibahas dalam tesis ini, branding itu akan diasosiasikan dengan organisasi itu sendiri dan produk-produk dari organisasi itu biasanya akan dibuat terstruktur dan akan diasosiasikan dengan nama merek atau brand yang lebih spesifik. Branding adalah upaya aktif membangun sebuah brand sebuah proses pembangunan brand. Brand adalah persepsi, pengalaman, harapan terhadap sebuah produk, jasa, pengalaman, personal, ataupun organisasi; merupakan gabungan dari berbagai atribut, baik secara nyata maupun tidak nyata, disimbolisasikan dalam merek dagang, dan apabila dikelola secara baik akan menciptakan nilai dan pengaruh.

Menurut Iwan Wirya (1999), kemasan yang baik adalah kemasan yang bisa melindungi isi produk tersebut terhadap cuaca dan proses alam lainnya. Kemasan juga digunakan sebagai wadah agar barang mudah dibawa, tetapi harus juga bisa berkomunikasi agar bisa menerangkan dan merefleksikan produk, citra, brand atau merk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari promosi dan pemasaran, tentunya dengan pertimbangan mudah untuk dikenali, dilihat, dipahami, dan diingat. Kemudian dikatakan bahwa daya tarik suatu kemasan sangatlah penting untuk menarik minat konsumen dan mempengaruhi tindakan konsumen baik secara sadar maupun tanpa disadari. Selain itu desain suatu kemasan yang optimal mampu memberikan impresi spontan dan langsung atas tindakan konsumen di tempat penjualan, karena tujuan akhir dari desain kemasan adalah menciptakan penjualan.

Ben Hargreaves, dalam bukunya *-Eat me: delicious, desirable, successful food packaging design.* Mengatakan bahwa dalam dunia produk makanan, sebuah produk yang sederhana dengan desain kemasan yang tepat dapat menjadi sebuah karakter yang unik dan sangat istimewa. Seiring dengan derap kemajuan ekonomi kita, telah pula dimulai menggiatkan ekspor barang-barang produksi dalam negeri ke berbagai negara. Upaya ini tentunya harus didukung oleh mutu barang dan sekaligus mutu kemasannya yang berwibawa dan berdaya jual. Mengenai perencanaan kemasan ekspor ini dapatlah dicatat beberapa yang seyogyanya layak menjadi bahan pertimbangan bagi para produsen dan perencana grafis Indonesia.

Alasan mendasar akan pentingnya Program Pengabdian Bagi Masyarakat Internal LPPM UPN Veteran Yogyakarta ini dilaksanakan di Desa Wisata Pulesari karena Desa Pulesari Desa yang bisa dikatakan siap akan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Desa Pulesari merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Indonesia yang akan diikuti dalam sebuah Program Dunia Internasional (STD) Sustainable Tourism Development pada tahun 2016. Kunjungan wisatawan pada tahun 2013 mulai Maret-Desember telah mencapai 6.035 wisatawan nusantara, kemudian ditahun berikutnya yaitu tahun 2014 mulai bulan Januari-Desember mencapai 32.178 wisatawan nusantara dan 14 wisatawan mancanegara, maka dari itu Desa Wisata Pulesari di tahun 2015 menargetkan kunjungan yang cukup drastis pada tahun ini akan tetapi terhitung mulai Januari-Juni tahun 2015 sudah mencapai 20.055 wisatawan nusantara dan 13 wisatawan mancanegara.

Tabel 1. Inventarisasi Kendala yang Dihadapi Kelompok Industri UMKM Dewi Pule Home Industri di Desa Wisata Pulesari

No.	Ketua Kelompok Industri	Jenis Usaha	Kendala
1.	Ibu Suranti	Produksi Dodol Salak	Packing Produk dan Pemasaran
2.	Ibu Pamsih Lestari	Produksi Geplak Salak	Packing Produk dan Pemasaran
3.	Ibu Ammarudin	Produksi Eting-enting Salak Produksi Nogosari Salak	Packing Produk dan Pemasaran
4.	Ibu Saekhan	Produksi Krupuk Salak Produksi Wajik Salak	Packing Produk dan Pemasaran
5.	Ibu Siti Awaliyah	Produksi Jenang Salak Produksi Nastar Salak	Packing Produk dan Pemasaran
6.	Ibu Iswaryanti	Produksi Bakpia Salak Produksi Wingkos Salak	Packing Produk dan Pemasaran
7.	Bp. Rumanto	Kerajinan Seni tari Kerajinan Gantungan Kunci	Packing Produk dan Pemasaran

Desa Wisata Pulesari selain menawarkan paket wisata, juga memiliki 6 jenis produk olahan salak. Produk olahan salak di desa pulesari memiliki potensi yang sangat besar mengingat pengunjung desa wisata Pulesari semakin meningkat dari tahu ke tahun. Yang menjadi hambatan dan permasalahan adalah produk olahan salak hasil UMKM Desa Wisata Pulesari masih dikemas secara sederhana dan kurang menarik. Contohnya adalah produk bakpia salak yang masih dikemas secara sederhana menggunakan plastik mika dan kertas label yang tidak rapi, tidak bertahan lama dan kurang higienis. Padahal produk olahan salak bisa menjadi profit bagi masyarakat, ditambah potensial wisata pada Desa Pulesari. Untuk itu pengabdian ini untuk membantu masyarakat desa Wisata Pulesari untuk meningkatkan profit melalui penguatan strategi branding melalui perancangan desain kemasan dan media promosi produk olahan salak hasil UMKM Desa Wisata Pulesari.

Metode Perancangan

Data yang dibutuhkan dalam untuk penguatan strategi branding meliputi data verbal dan data visual. Data tersebut kemudian dipergunakan sebagai acuan bahan dasar pembuatan konsep perancangan desain kemasan dan media promosi produk olahan salak hasil UMKM Home Industry Dewi Pule Desa Wisata Pulesari. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara langsung ke tempat pengabdian untuk memperoleh data yang ada. Observasi lapangan dilakukan di Desa Wisata Pulesari, Kecamatan Turi, Kab. Sleman, Yogyakarta.

b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara/interviewer kepada responden, dan jawaban dicatat atau direkam dengan alat perekam. Teknik ini cocok digunakan untuk mengetahui pendapat, tanggapan, keyakinan, perasaan, motivasi dan proyeksi masa depan seseorang. Wawancara dengan nara sumber dilakukan dengan pengelola desa wisata dan beberapa penduduk yang memiliki informasi mengenai olahan *home industry*, dan informasi lain yang mendukung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berarti pengumpulan data secara visual atau hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai data, melalui media kamera maupun video, sebagai penyempurna data-data diatas. Berbagai arsip (dokumen) yang ada di Desa Wisata Pulesari, yang mendukung dan berhubungan dengan subyek yang akan dibahas.

Pembahasan

1. Desain Kemasan sebagai Daya Tarik

Kemasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 537) berarti hasil mengemas/bungkus pelindung barang dagangan. Kemasan atau packaging adalah ilmu, seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan atau dijual atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Menurut Widiatmoko (Concept 2007: 20) bahwa secara hakiki *packaging* merupakan upaya manusia untuk mengumpulkan sesuatu yang berantakan kedalam satu wadah serta melindunginya dari gangguan cuaca. Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemasan adalah suatu benda yang dapat digunakan untuk tempat/wadah yang dikemas dan dapat memberikan perlindungan bagi produk di dalamnya sesuai dengan tujuannya.

Menurut Jaswin (2008: 15) cara-cara pengemasan sangat erat berhubungan dengan kondisi komoditas atau produk yang dikemas serta cara transportasinya. Pada prinsipnya pengemas harus memberikan suatu kondisi yang sesuai dan berperan sebagai pelindung bagi kemungkinan perubahan keadaan yang dapat memengaruhi kualitas isi kemasan maupun bahan kemasan itu sendiri.

Daya tarik pada kemasan menurut Wiryana (1999), dapat digolongkan menjadi dua yaitu daya tarik visual dan daya tarik praktis. Keduanya merupakan hal yang penting dalam desain kemasan, daya tarik visual berhubungan dengan estetika kemasan sedangkan daya tarik praktis berhubungan dengan penggunaannya. Pola dasar dan bentuk kemasan pias edamame ini dirancang berdasarkan daya tarik praktis dari kemasan yaitu mudah dibawa, menjamin dapat melindungi produk, mudah dibuka tutup kembali untuk disimpan, dan kemasan yang sesuai untuk produk dengan alternatif volume untuk pembelian. Selain itu, berdasarkan tingkat kesiapan pakai berdasarkan teori Dameria (2014), kemasan akan dirancang menggunakan kemasan siap rakit atau disebut juga wadah lipatan. Diperlukan perakitan sebelum tahap pengisian produk. Pemakaian kemasan siap rakit ini memiliki keuntungan yaitu menghemat ruang penyimpanan. Sedangkan untuk kemasan praktisnya menggunakan kemasan siap pakai.

Identitas merek/ produk yang akan ditampilkan pada kemasan adalah produk olahan salak dengan menampilkan positioning pendukung pada desain kemasan dengan menggunakan warna-warna yang mendukung. Gaya desain yang digunakan adalah menggunakan elemen-elemen desain ilustrasi tapi berkesan modern. Gaya desain tersebut digunakan untuk meningkatkan nilai produk dan mengesankan bahwa produk ini yang pertama sebelum diikuti merek lain. Kesan modern memberikan kesan higienis serta menyesuaikan dengan selera target audience. dan berbeda dengan produk olahan salak lainnya.

Menurut Rustan (2009) fungsi merek, yaitu sebagai identitas, tanda kepemilikan, tanda jaminan kualitas dan untuk mencegah peniruan. Namun produk olahan salak produksi Desa Wisata Pulesari ini belum memiliki merek yang konsisten pada setiap kemasannya, maka dari itu dibuatlah merek baru untuk membuat olahan produk salak ini lebih dikenal dan dapat dibedakan dengan produk lain yang diaplikasikan pada tiap kemasan. Kemasan yang dibuat untuk produk olahan salak desa wisata Pulesari ini ada beberapa macam dengan kegiatan diversifikasi produk melalui variasi jenis dan ukuran material kemasan. Bentuk Kemasan yang pertama yaitu kemasan Bakpia salak yang berisi 10 pcs. Selanjutnya agar menarik dan memudahkan membawa maka disediakan juga *paperbag*.



Gambar 1. Kemasan produk olahan salak desa wisata Pulesari sebelum redesign

Untuk memperkuat UMKM di Desa Pulesari salah satu strategi yang penting dilaksanakan adalah membuat desain kemasan dan promosi yang menarik dan bernilai jual. Strategi branding perlu dilakukan agar dapat membangun image dan identitas produk yang mempengaruhi konsumen agar memiliki persepsi yang positif terhadap produk, karakter, kemampuan, penampilan, maupun penawaran yang di promosikan. Apalagi dalam rangka memasuki era perdagangan bebas baik skala nasional, regional, maupun global yang tidak lepas dari dukungan dan pengaruh media sosial.



Gambar 2. Redesign kemasan produk olahan salak desa wisata Pulesari

Melalui re-desain dan dengan kemasan (*Packaging*) yang menarik akan meningkatkan omset atau produksi pada produk olahan salak yang dilakukan oleh UMKM Dewi Pule Home

Industri di Desa Wisata Pulesari. Dengan seperti itu, kemasan yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi produk yang dijual. Maka desain kemasan merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM.

2. Pentingnya Media Promosi melalui Kemasan (*Packaging*)

Secara teoritis, promosi (dalam hal ini promosi pariwisata) adalah salah satu dari usaha pemasaran. Promosi dapat diartikan sebagai usaha memperkenalkan suatu produk (dalam hal produk wisata) kepada pelaku pasar (dalam hal pasar yang telah maupun yang berpotensi menjadi wisatawan). Adapun ciri-ciri dari promosi adalah : (1) beranjak dari produksi, dan berkaitan dengan upaya memacu kemungkinan suatu penjualan, (2) promosi biasanya dilakukan dengan perantara media, seperti iklan, publisitas dengan segala macam cara, dan hubungan masyarakat, (3) promosi tidak mencakup kebijakan secara menyeluruh, karena promosi tidak memberikan umpan balik, yaitu memperbaiki produk, (4) promosi meliputi seluruh kegiatan yang direncanakan, salah satu diantaranya adalah penyebaran informasi, (5) promosi dilakukan melalui berbagai saluran media masa, seperti surat kabar, radio, dan televisi (Wahab, 2003:151).

Penetapan status desa wisata pada suatu desa atau daerah tertentu yang memiliki potensi budaya tanpa diimbangi dengan usaha promosi menjadikan penetapan status desa wisata tersebut hanya sebatas pada level identifikasi atau labeling saja. Pada konteks ini, tujuan kegiatan promosi bukanlah semata-mata sebagai salah satu usaha dalam manajemen pemasaran atau proses yang berhubungan dengan kegiatan penjualan suatu produk atau jasa tertentu. Promosi dapat dipahami sebagai upaya menyebarkan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan desa wisata. Promosi melalui media komunikasi tertentu bertujuan untuk memasyarakatkan budaya lokal pada masyarakat luas.

Desa Pulesari merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Indonesia yang akan diikuti dalam sebuah Program Dunia Internasional (STD) Sustainable Tourism Development pada tahun 2016. Kunjungan wisatawan pada tahun 2013 mulai Maret - Desember telah mencapai 6.035 wisatawan nusantara, kemudian ditahun berikutnya yaitu tahun 2014 mulai bulan Januari-Desember mencapai 32.178 wisatawan nusantara dan 14 wisatawan mancanegara, maka dari itu Desa Wisata Pulesari di tahun 2015 menargetkan kunjungan yang cukup drastis pada tahun ini akan tetapi terhitung mulai Januari-Juni tahun 2015 sudah mencapai 20.055 wisatawan nusantara dan 13 wisatawan mancanegara. Potensi wisata, budaya dan produk industri rumahan yang menjadi aset budaya lokal memuat ide-ide, tradisi, nilai-nilai kultural, dan perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Melihat potensi wisata yang dimiliki Desa Wisata Pulesari, usaha promosi di desa ini belum dilakukan secara optimal. Salah satu diantaranya adalah upaya penguatan promosi pada hasil olahan industri rumahan (*home industry*). Suatu media promosi yang lebih efektif, kreatif dan mampu mengkomunikasikan berbagai potensi wisata akan menjadi suatu pesan yang dapat ditangkap secara baik dan menarik bagi khalayak sasaran sangat perlu dikembangkan oleh desa Desa Wisata Pulesari khususnya pengelola desa wisata.

Salah satu pendekatan promosi hasil olahan industri rumahan (*home industry*) yang bisa dilakukan Desa Wisata Pulesari menggunakan pendekatan desain kemasan (*packaging*). Desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, dan membedakan sebuah produk di pasar. Pada akhirnya desain kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi secara unik (Klimchuk dan Krasovec, 2007). Oleh karena itu, sebuah kemasan bagi sebuah produk yang dibuat harus berbeda diantara kemasan produk lain agar target market dapat melihat kemasan produk yang dirancang. Selain itu, untuk memenangkan hati target harus melakukan sebuah *trend research* agar target dapat melihat dirinya dalam suatu kemasan produk yang didasari pada *pemikiran long term design* karena kemasan yang baik adalah apabila dapat diterima masyarakat dan bertahan lama di pasaran.

Kesimpulan

Usaha promosi produk olahan salak yang dilakukan oleh UMKM Home Industry Dewi Pule masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi wisata yang dimiliki Desa Wisata Pulesari. Oleh karena itu perlu sebuah pendekatan promosi usaha, salah satu diantaranya adalah upaya penguatan promosi pada hasil olahan industri rumahan (*home industry*) melalui pendekatan desain kemasan (*packaging*). Melalui re-desain dan dengan kemasan (*Packaging*) yang menarik akan meningkatkan omset atau produksi pada produk olahan salak. Dengan seperti itu, kemasan yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi produk yang dijual.

Proses pendekatan desain kemasan (*packaging*) dapat dilakukan dengan konsep berdaya tarik dan bernilai jual yaitu bagaimana menciptakan sebuah desain yang berorientasi pada penguatan industri rumahan melalui efektifitas nilai jual produk. Selain konsep desain kemasan, juga perlu diperhatikan jenis media yang dibuat. Pemilihan media yang digunakan sebagai media promosi dilakukan berdasarkan jangkauan pasar, efektifitas biaya, keunggulan dan keandalannya didalam membawakan pesan yang informatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Yogyakarta yang telah membiayai kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Kecamatan Turi, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Desky, MA. 1999. *Manajemen Perjalanan Wisata*. Jakarta : Adicita Karya Nusa.
- A, Yuyun., Gunarsa, Delli. 2011. *Cerdas Mengemas Produk Makanan & Minuman*. Jakarta Selatan: Penerbit Agro Media Pustaka.
- Jaswin, M. 2008. *Packaging Material and Its Applications*. Jakarta: Indonesian Packaging Federation.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000. Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta.
- Klimchuck, M.R., Krasovec, S.A. 2006. *Desain Kemasan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rustan, Suriyanto. 2009. *Mendesain Logo*. Jakarta: PT Gramedia. Pustaka Utama
- Sanyoto, Ebdi Sadjiman. 2006. *Metode Perancangan Komunikasi Visual Periklanan*. Yogyakarta: Dimensi Press.
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wirya, Iwan. 1999. *Kemasan Yang Menjual*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

THE EFFECT OF INNOVATION STRATEGY AND COMPANY SIZE ON COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE IN INDONESIA

Abdul Ghofar¹⁾; Kunti Sunaryo²⁾

Fakultas Ekonomi, UPN –Veteran|| Yogyakarta
abdul_ghofar21@yahoo.com
Fakultas Eknomi, UPN –Veteran|| Yogyakarta
kunti_73@yahoo.co.id

Abstract

Globalization has brought changes in the business environment and competition. Global competition becomes something that must be faced by the company if it wants to survive. Innovation is one of the strategic key requisites to reach market. Knowing there is still a gap research on innovation strategy and company performance, it indicates that this research has many possibilities for further research. Most of the research on innovation in company performance is done by using primary data. There is not a lot of research that uses financial statements as secondary data about the effect of innovation strategy on the company performance. In this research, another variable which is company size is added as moderation variable in order that the result of this research is able to provide a stronger impact between innovation strategy variable and company performance variable.

Keywords: Innovation Strategy, Size and Performance

PENGARUH STRATEGI INOVASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Abdul Ghofar¹⁾; Kunti Sunaryo²⁾

Fakultas Ekonomi, UPN –Veteran|| Yogyakarta
abdul_ghofar21@yahoo.com
Fakultas Eknomi, UPN –Veteran|| Yogyakarta
kunti_73@yahoo.co.id

Abstrak

Globalisasi telah membawa perubahan pada lingkungan bisnis dan persaingan. Persaingan global menjadi sesuatu yang harus dihadapi perusahaan apabila ingin tetap bertahan dan bersaing di pasar global. Inovasi merupakan salah satu prasyarat kunci strategiknya agar perusahaan mampu meraih pasar. Masih adanya kesenjangan penelitian (*gap research*) tentang strategi inovasi dan kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa penelitian ini

masih memiliki banyak peluang untuk diteliti lebih lanjut. Sebagian besar penelitian tentang inovasi terhadap kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan data primer. Penelitian yang menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan tentang pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja belum banyak dilakukan. Penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dengan maksud agar hasil penelitian dapat memberikan dampak yang makin kuat antara variabel strategi inovasi dengan variabel kinerja perusahaan.

Kata Kunci: Strategi Inovasi, Ukuran Perusahaan, Kinerja

PENDAHULUAN

Inovasi merujuk pada berbagai definisi dan memiliki arti yang sangat luas. Inovasi merupakan cara untuk terus membangun dan mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui introduksi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk-produk dan pelayanan-pelayanan, pengembangan pasar baru dan memperkenalkan bentuk-bentuk baru organisasi. Penelitian Jaruzelski dan Dehoff (2007) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu *strategic alignment* dan *customer focus*. *Strategic alignment* mengacu pada kesesuaian antara strategi inovasi terhadap keseluruhan *corporate strategy*, sedangkan *customer focus* mengacu pada upaya perusahaan untuk memberikan perhatian pada kebutuhan konsumen pada setiap rangkaian pada setiap fase dalam rantai nilai inovasi yaitu dari tahap penggalan ide, pengembangan ide sampai pada pemasarannya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan beragamnya hasil penelitian, simpulan beberapa peneliti menunjukkan tidak adanya pengaruh strategi inovasi dengan kinerja perusahaan (Shamsuddin et.al 2012). Sementara hasil penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh antara strategi inovasi dengan kinerja perusahaan (Rosli dan Sidek 2013; Dave et.al 2013; Ayaydin dan Karaaslan 2014; Tsuma et.al 2015)

Berdasarkan beberapa simpulan dari beberapa peneliti di atas menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (*gap research*) yaitu, penelitian tentang strategi inovasi dan kinerja perusahaan masih dalam posisi yang belum simpul. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai hasil penelitian ini masih memiliki banyak peluang untuk diteliti lebih lanjut dan kemungkinan belum banyak digunakannya variabel kontingensi dalam menyelesaikan penelitian ini dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian, beberapa peneliti telah menambahkan variabel lain yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dengan maksud agar hasil penelitian tersebut memberikan dampak yang makin kuat antara variabel strategi inovasi dengan variabel kinerja perusahaan. (Niu. P, et al., 2010); Hung,K.T, et al.,2008; Craig.J. dan D.Clay,2006). Atas dasar beberapa penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang strategi inovasi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

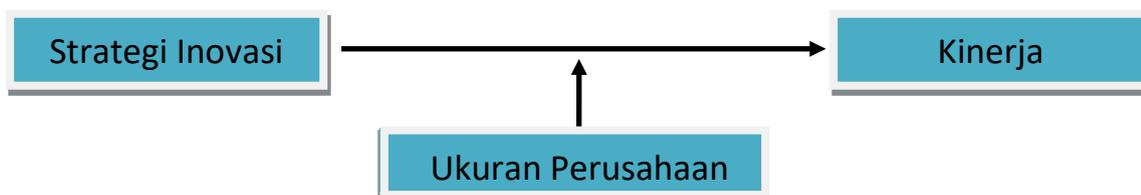
TELAAH LITERATUR

Aktivitas inovasi dan pengembangan produk pada perusahaan manufaktur yang dikaitkan dengan kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan produktivitas dan persaingan global. Inovasi manufaktur mencakup penciptaan, pemilihan dan pengembangan/peningkatan produk, proses dan teknologi (Zahra, *et al.*, 1993; Lucas dan Ferrel, 2000). Inovasi tersebut dapat meningkatkan posisi global perusahaan manufaktur dan membantu mereka mencapai status sebagai produsen barang yang berkualitas kelas dunia. Penggunaan teknologi baru, penciptaan dan pengenalan (komersialisasi) atau memasarkan produk baru tersebut dan mengadopsi proses produksi yang inovatif, perusahaan dapat memecahkan masalah persaingan secara efektif (Swamidass, 1986; Gobelly dan Brown, 1993; Salaman dan Storey, 2002). Dalam rangka melakukan inovasi proses produksi, perusahaan harus mengembangkan strategi inovasi secara formal dan menyeluruh. Strategi ini menjelaskan tujuan perusahaan dalam melakukan inovasi dengan menjelaskan hasil akhir (apa yang dikembangkan) dan caranya (bagaimana mencapainya).

Shamsuddin *et al.* (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate entrepreneurship* terhadap kinerja perusahaan di Malaysia. Salah satu dimensi *corporate entrepreneurship* adalah inovasi. Penelitian menggunakan data primer dan hasilnya menunjukkan bahwa inovasi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Rosli dan Sidek (2013) meneliti pengaruh inovasi terhadap kinerja perusahaan kecil dan menengah di Malaysia. Penelitian menggunakan data primer seperti pada penelitian sebelumnya dan hasilnya membuktikan bahwa inovasi produk dan inovasi proses mempengaruhi kinerja perusahaan. Dave *et al.* (2013) meneliti tentang pengaruh *research and development* (R & D) terhadap kinerja keuangan perusahaan IT yang terdaftar di S & P index. Hasilnya bahwa *research and development* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimediasi oleh variabel kinerja pemasaran. Ayaydin dan Karaaslan (2014) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang difokuskan pada faktor *research and development* (R & D) dan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di Turki. Hasilnya menunjukkan bahwa *research and development* (R & D) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas perusahaan. Tsuma *et al.* (2015) melakukan penelitian tentang proses inovasi terhadap kinerja perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer dan hasilnya menunjukkan bahwa proses inovasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

METODE PENELITIAN

Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability random sampling* dengan metode *purposive random sampling*. Beberapa Kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan adalah :

1. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan periode 2010-2014.
2. Perusahaan yang mengungkapkan biaya *research and development* pada laporan keuangannya periode 2010-2014.

Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen penelitian ini adalah strategi inovasi (X1) dan ukuran perusahaan (X2). Strategi inovasi diukur secara kuantitatif yaitu besarnya jumlah biaya *research and development* perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total asset perusahaan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja perusahaan (Y) yang diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *moderated regression analysis* (MRA). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$1). Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$2). Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1.X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kinerja perusahaan

X₁ : Strategi inovasi

X₂ : Ukuran perusahaan

X₁X₂ : Interaksi (moderasi)

e : error term

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi berganda, dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Populasi penelitian adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 berjumlah 361 perusahaan. Sesuai dengan kriteria pengambilan sampel yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan mencantumkan biaya riset dan pengembangan terdapat 13 perusahaan. Berikut hasil pengolahan statistik deskriptif data penelitian :

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	65	.00494	.45693	.0961802	.11973160
RND	65	4750000	1E+011	1E+010	2.993E+010
UP	65	9E+009	2E+013	3E+012	5.346E+012
Valid N (listwise)	65				

Berdasar tabel di atas dari 65 data observasi nilai rata-rata ROA sebesar 0.0961802, sedangkan biaya riset dan pengembangan sebesar 100 juta rupiah dan rata-rata ukuran perusahaan sebesar 5.346 trilyun rupiah.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian menyatakan bahwa model penelitian adalah model yang baik karena lolos dari penyimpangan asumsi klasik.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian akan diuji dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil pengujian regresi yang pertama menguji pengaruh strategi inovasi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 ^a	.483	.466	.96374	1.654

a. Predictors: (Constant), LnUP2, LnRND2

b. Dependent Variable: LnROA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53.806	2	26.903	28.965	.000 ^a
	Residual	57.585	62	.929		
	Total	111.391	64			

a. Predictors: (Constant), LnUP2, LnRND2

b. Dependent Variable: LnROA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.405	4.355		1.471	.146
	LnRND2	6.863	.907	.890	7.563	.000
	LnUP2	-9.164	1.686	-.640	-5.435	.000

a. Dependent Variable: LnROA

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasar hasil pengujian regresi yang pertama terlihat bahwa strategi inovasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.0 di bawah 0.05. Nilai *adjusted R square* sebesar 0.466 yang artinya bahwa kontribusi strategi inovasi dan ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja sebesar 46,6% sedangkan sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya (Rosli dan Sidek 2013; Dave et.al 2013; Ayaydin dan Karaaslan 2014; Tsuma et.al 2015) bahwa strategi inovasi berpengaruh terhadap kinerja.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap kinerja akan dilakukan pengujian regresi yang kedua yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.731 ^a	.535	.512	.92173	1.669

a. Predictors: (Constant), ABSMOD, LnRND2, LnUP2

b. Dependent Variable: LnROA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59.567	3	19.856	23.371	.000 ^a
	Residual	51.825	61	.850		
	Total	111.391	64			

a. Predictors: (Constant), ABSMOD, LnRND2, LnUP2

b. Dependent Variable: LnROA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.190	4.469		.490	.626
	LnRND2	6.502	.879	.843	7.398	.000
	LnUP2	-7.659	1.713	-.535	-4.471	.000
	ABSMOD	.566	.218	.242	2.604	.012

a. Dependent Variable: LnROA

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasar pengujian regresi yang kedua terlihat bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.012 di bawah 0.05. Nilai *adjusted R square* meningkat menjadi sebesar 51.2% yang berarti bahwa

ukuran perusahaan memperkuat pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan inovasi maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini memperkuat fenomena perusahaan di Indonesia bahwa strategi inovasi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki total aset yang besar. Perusahaan tersebut melakukan strategi inovasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat bertahan dalam persaingan.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Tujuan utama penelitian adalah menganalisis pengaruh strategi inovasi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Penelitian difokuskan pada data laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan selama periode 2010 – 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian juga memperlihatkan dampak ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia dengan pengujian *moderated regression analysis* (MRA).

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya melihat dampak strategi inovasi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Masih ada variabel kontijensi lainnya yang bisa mempengaruhi strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan seperti likuiditas dan leverage.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuah, A. 1998. *Innovation Management: Strategies, Implementation and Profits*.
- Ayyadin, Hasan dan Ibrahim Karaaslan. 2014. The Effect of Research and Development investment on Firm's Financial Performance: Evidence from Manufacturing Firms in Turkey. *The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management Vol. IX Fall*.
- Dave, Priyanka: Varun Wadhwa: Shrey Aggarwal and A. Seetharaman. 2013. The Impact of Research and Development on the Financial Sustainability of Information Technology (IT) Companies Listed on the S&P 500 Index. *Journal of Sustainable Development; Vol. 6, No. 11; 2013*
- Ellitan, Lena. 2006. Strategi Inovasi dan Kinerja Perusahaan Manufaktur di Indonesia : Pendekatan Model Simultan dan Sekuensial. *Jurnal Manajemen Vol. 6 Nomor 1 November 2006*.

Rosli, Mohd and Syamsuriana Sidek. 2013. The Impact of Innovation on The Performance of Small and Medium Manufacturing Enterprises: Evidence from Malaysia. *Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprise* <http://www.ibimapublishing.com/journals/JIMSME/jimsme.html> Vol. 2013.

Shamsuddin, Sofian: Jaizah Othman: Mohamad Asmady Shahadan and Zukarnain Zakaria. 2012. The Dimensions of Corporate Entrepreneurship and the Performance of Established Organization. *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives* Vol. 1, Issue 2, p. 111-131.

Tsuma, Ronald Songoro: Maniagi G. Musiega: Odhiambo Alberts and Dr. Musiega Douglas. 2015. Effects of Financial Innovations on Financial Performance of Savings and Credit Co-operative Societies in Kenya: A case of Kakamega Teachers Co-operative Society Limited. *International Journal of Business and Management Invention* 2319 – 8028, www.ijbmi.org Volume 4 Issue 6 June. 2015 PP-78-89.

Evaluasi Model Inkubator Bisnis Dalam Rangka Pemberdayaan UKM

Suratna dan Eny Endah Pujiastuti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN -Veteranll Yogyakarta

Suratno_ab@yahoo.co.id

Eny_endah@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to develop and evaluate business incubator models applied to Small and Medium Business (SMB) by paying attention SMB's backgrounds including education, business experience, productivity, market area, technology mastery, and independence. This study formulated business incubator models appropriate with different SMB's characteristics. These SMB's characteristics such as experience, production total amount, financial strength, market scope, sale revenue, technology mastery, and independence.

This study type was qualitative descriptive to investigate the effectiveness of business incubator method. Data collection technique employed in this study was questionnaire, interview, FGD and observation. Responses, opinions, and observation results were deeply analyzed to find out their effectiveness. This study results were business incubator models evaluation.

The business incubator was designed to be three models; business incubator models for Beginner SBM, Semi-Independent SBM, and Independent SBM. This study result showed that business incubator models which paid attention to SBM characteristics would effectively improve their performance. Therefore, before implementing SBM development programs, the SBMs had to be grouped first and the business incubator models would be adjusted according to the requirement of each group. Business incubator model variation included objectives, achievement strategies, programs/activities, materials and applied learning methods.

Key Words: Small and Medium Business, Business Incubator Model

A. Latar Belakang

Pengangguran masih menjadi persoalan bangsa yang belum terpecahkan. Hal ini dipicu karena rendahnya kesempatan kerja yang dapat diakses oleh penduduk.

Usaha Kecil Menengah menjadi solusi untuk memecahkan persoalan rendahnya kesempatan kerja. Tumbuhnya UKM di banyak tempat membawa keuntungan bagi masyarakat untuk bekerja di sector non formal. Idealnya jumlah UKM yang semakin tinggi dibarengi dengan kualitas pengelolaan UKM yang semakin profesional. Tingginya jiwa kewirausahaan harus diimbangi dengan kemampuan manajerial serta teknikal sehingga akan menjaga kelangsungan UKM tersebut.

Proses pemberdayaan UKM di masyarakat melalui program abdikemas perguruan tinggi selayaknya mendapatkan supporting dari hasil penelitian. Proses pemberdayaan yang sifatnya *try and error* akan sangat merugikan UKM karena UKM akan kehilangan waktu, tenaga, dan biaya, bahkan kesempatan mendapatkan keuntungan karena kehilangan waktu untuk mengikuti berbagai pelatihan. Disamping itu lembaga penyelenggara pelatihan tidak lagi dipercaya oleh UKM karena tidak menghasilkan apapun atau jika menghasilkan tidak signifikan. Kondisi seperti ini harus dihindarkan dengan melakukan kajian yang lebih mendalam tentang model-model pemberdayaan UKM.

Model pemberdayaan UKM yang lazim dilakukan disebut dengan incubator bisnis. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi usaha. Hasil penelitian tahun pertama telah memperoleh rancangan Model-model Inkubator Bisnis dan telah diuji efektifitasnya untuk kelompok UKM Makanan Olahan di Bantul. Model tersebut

harus diuji efektifitasnya pada kelompok sasaran yang lain sehingga akan dapat menemukan model inkubator bisnis yang benar-benar handal. Pada penelitian tahun pertama telah dirancang tiga model inkubator bisnis yang diterapkan untuk tiga tingkatan UKM yakni UKM Pemula, UKM Semi Mapan, dan UKM Mapan. Oleh karena itu penelitian tahun kedua dirancang untuk menganalisis Model Inkubator Bisnis Dalam Rangka Pemberdayaan UKM dengan sasaran UKM yang berbeda.

Permasalahan yang Diteliti

Permasalahan yang diteliti terkait dengan efektifitas model incubator bisnis untuk memberdayakan UKM. Pada penelitian tahun pertama telah dirancang Model Inkubator Bisnis yang diterapkan pada UKM di Bantul Yogyakarta. Efektifitas model tersebut sangat perlu diujicobakan pada sasaran yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik UKM makanan olahan di wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah?
2. Apakah model inkubator bisnis untuk kategori UKM Pemula, UKM Semi Mapan, dan UKM Mapan efektif ?

Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Menganalisis karakteristik UKM makanan olahan kering di wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah.
2. Mengetahui efektifitas model inkubator bisnis untuk kategori UKM Pemula, UKM Semi Mapan, dan UKM Mapan efektif.

Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini urgen untuk dilakukan dengan berbagai alasan:

1. Meningkatnya jumlah UKM baru yang saat ini harus segera direspon dengan melakukan analisis model pemberdayaan yang tepat.
2. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau lembaga lain yang turut andil dalam pemberdayaan UKM.
3. Terbukanya masyarakat ekonomi Asia berpotensi meningkatnya persaingan sehingga proteksi terhadap UKM sangat perlu dilakukan agar mampu bersaing dengan meningkatkan pemberdayaan UKM menjadi lebih mandiri.

Temuan Inovatif

Inkubator bisnis bukan merupakan hal yang baru, namun inovasinya terletak pada pengembangan yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan model-model incubator bisnis yang relevan untuk karakteristik UKM yang berbeda-beda. Misalnya model incubator bisnis untuk UKM pemula akan berbeda dengan UKM yang sudah lama karena sasarannya juga berbeda. Pada banyak kasus, pelatihan yang diberikan tidak dibedakan menurut karakteristik UKM nya. Temuan ini menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Studi terkait dengan incubator bisnis telah banyak dilakukan dewasa ini mengingat begitu penting peran incubator bisnis dalam pemberdayaan UKM terutama UKM yang baru saja mulai dan manfaatnya yang besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Berikut hasil penelitian terkait yang relevan dengan isu yang diangkat

Studi Pustaka Inkubator Bisnis

Inkubator menurut keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 81.2/kep/M.KUKM/VIII/2002 adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Inkubator bisnis menurut Sofyan (1999) adalah suatu model pendekatan baru yang diterapkan untuk mempercepat penciptaan calon pengusaha baru atau peningkatan kualitas usaha kecil-menengah yang tangguh dan profesional.

Implementasi model inkubator bisnis dapat menjadi dua katagori menurut keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 81.2/kep/M.KUKM/VIII/2002 adalah :

1. *In wall* adalah inkubasi dengan cara pengusaha kecil atau calon pengusaha baru yang sedang dibina dikonsentrasikan di dalam suatu gedung atau kawasan tertentu dan manajemen inkubator menyediakan berbagai pelayanan penyewaan tempat dan konsultasi manajemen.
2. *Out wall* adalah inkubasi dengan cara pengusaha kecil atau calon pengusaha baru yang sedang dibina tidak ditempatkan di dalam satu gedung atau kawasan yang dikelola Tim manajemen inkubator bisnis, tetapi berada di tempat usahanya masing-masing dan tetap aktif mengikuti tahap-tahap pembinaan secara terprogram dan berkelanjutan.

Tujuan inkubator bisnis menurut Al-Mubarakhi dan dam Busle (2011) adalah pertumbuhan ekonomi, menambah inovasi, membangun kreativitas, transfer teknologi, komersialisasi teknologi, meningkatkan struktu organisasi, membuat pekerjaan baru dan pekerjaan yang ber\kelanjutan, akselerasi pengembangan bisnis, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan nilai bagi steakholder, memanfaatkan peluang, dan pengembangan budaya entrepreneurship

Kajian Penelitian Terdahulu

1. Pembelajaran Berbasis Inkubator Industri (*Industrial Incubator Based Learning/IIBL*) untuk Mengembangkan Potensi Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Klaster Teknologi Industri

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A.E Tontowi, Aliq, A.M Sriasih, Subagyo, N Radhani dan Aswandi dengan judul Pembelajaran Berbasis Inkubator Industri (*Industrial Incubator Based Learning/IIBL*) untuk Mengembangkan Potensi Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Klaster Teknologi Industri dengan subyek penelitian mahasiswa teknik industri, teknik mesin. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis inkubator industri atau IIBL dapat digunakan sebagai model pembelajaran untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik.

2. Kajian Inkubator Bisnis dalam rangka Pengembangan UMKM

Penelitian dilakukan oleh Bank Indonesia dengan judul Kajian Inkubator Bisnis dalam rangka Pengembangan UMKM. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui Inkubator Bisnis. Peranan inkubator bisnis menjadi strategis karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan wirausaha baru, dan dapat menjadi wadah dalam mengimplementasikan berbagai inovasi yang dihasilkan oleh berbagai pihak umumnya perguruan tinggi.
- b. Mengingat pentingnya peranan inkubator, maka inkubator bisnis harus mendapat dukungan dari pemerintah serta pihak terkait dalam bentuk kebijakan maupun anggaran yang memadai serta berkesinambungan.
- c. Upaya pengembangan UMKM melalui inkubator bisnis dapat dilakukan oleh berbagai institusi, terutama perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- d. Terkait dengan pelaksanaan inkubator bisnis terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu hasil, nilai tambah dan best practise
- e. Secara teoritis pengelolaan inkubator bisnis harus dapat menyediakan pelayanan 7S, yaitu space, shared, services, support, skill development, seed capital dan synergi.
- f. Dari berbagai pengalaman beberapa negara yang melaksanakan program inkubator bisnis diperoleh benchmark yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1) tahap pembentukan inkubator bisnis, 2) tahap operasional inkubator bisnis, 3) tahap evaluasi jasa inkubator bisnis.

3. Profil Inkubator dalam Penciptaan Wirausaha baru

Penelitian yang dilakukan oleh Riana Panggabean dengan judul Profil Inkubator dalam Penciptaan Wirausaha Baru, dengan tujuan untuk mengetahui profil inkubator di Indonesia dan implementasi konsep inkubator bisnis dalam mendukung penciptaan wirausaha baru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan usaha pengembangan UKM melalui inkubator belum sesuai dengan konsep dasar inkubator terutama implementasinya di lapangan.
- b. Kinerja inkubator dalam menciptakan wirausaha baru masih rendah, hal ini disebabkan:
 - 1) pembinaan yang dilakukan umumnya secara outwall. Padahal idealnya dilaksanakan in wall
 - 2) status otonom lembaga yang menangani inkubator belum dapat dilaksanakan
 - 3) manajer inkubator belum bekerja secara full time
 - 4) fasilitas terbatas karena belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas yang dimiliki seperti fasilitas yang dimiliki Perguruan Tinggi (hasil penelitian dan teknologi)
 - 5) kurangnya komitmen dan dukungan semua pihak (pemerintah pusat, pemda, dunia usaha dll) dalam operasionalisasi program inkubator

4. *The Roadmap of International Business Incubations Performance*

Hasil riset yang dilakukan oleh Michael Busler (2011) menunjukkan bahwa efektifitas inkubator bisnis dipengaruhi oleh budaya kewirausahaan, teknologi, pekerja, inovasi, dan diferensiasi ekonomi lokal. Oleh karena itu perlu diupayakan agar inkubator bisnis yang dilakukan mampu menyajikan lima hal di atas agar efektif.

5. Pembelajaran Berbasis Inkubator Bisnis (Business Incubator Learning/BIBL) Untuk mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Endah Pujiastuti dan Humam Santoso dengan judul Pembelajaran Berbasis Inkubator Bisnis (Business Incubator Learning/BIBL) Untuk

mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembelajaran Berbasis Inkubator Bisnis (*Business Incubator Learning/BIBL*) dapat digunakan untuk menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan. Selain itu metode inkubator bisnis dapat digunakan untuk mata kuliah lain yang menggunakan SCL (*student center learning*).

6. Inkubator Bisnis Dalam Rangka peningkatan Softskill Mahasiswa

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Endah Pujiastuti, Suratna, Humam Santoso dengan judul Inkubator Bisnis dalam rangka Peningkatan Softskill mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Inkubator bisnis merupakan sebuah metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan soft skill mahasiswa terutama mengembangkan jiwa kewirausahaan. Model inkubator bisnis yang tepat untuk mengembangkan soft skill adalah dengan memberikan pengetahuan praktis lebih banyak dibandingkan dengan memberikan teori.

C. METODE PENELITIAN

a. Disain Penelitian:

Metode Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tertentu. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Langkah dalam penelitian ini selama pelaksanaan penelitian :1) Mengumpulkan Informasi, 2) Desain model, 3) Validasi model, 4) Perbaikan model, 5) uji coba model/ implementasi model.

b. Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau dipilih secara sengaja. Karakteristik wilayah penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu suatu desa yang memiliki UKM dan menghasilkan produk olahan hasil pertanian. Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagai lingkungan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra UKM. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa Kabupaten Semarang memiliki keunikan dan juga perbedaan dari pada kabupaten yang lain yaitu memiliki banyak pengusaha kecil dari berbagai bidang dan tingkatan yang bergabung dengan membentuk kelompok-kelompok.

c. Metoda pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan contoh secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria telah memenuhi persyaratan, yakni telah mengikuti pelatihan atau pendampingan UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, atau pihak lain. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah anggota Kelompok UKM Kabupaten Semarang yang terdiri dari bidang usaha makanan olahan, perikanan, batik, dan kerajinan.

d. Informan

Informan penelitian ditentukan dan dipilih secara sengaja sesuai dengan karakteristik penelitian, yaitu: (1) para pemilik UKM, (2) penyelenggara pelatihan/pendampingan UKM; (3) Pemerintah Daerah (Dinas terkait di Pemda Kab Semarang). Pemilihan ahli atau pakar menurut Marimin (2001) harus memiliki kemampuan mengumpulkan data dan informasi kompleks serta memiliki kemampuan menginterpretasikan data sebagai suatu kegiatan terencana

e. Jenis Data

Menurut sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk deskripsi

berupa berbagai keterangan menyangkut hal-hal yang bertalian dengan materi penelitian ini. Data berupa angka diperlukan sebagai data pelengkap seperti produktivitas, laba perusahaan, luas pasar sasaran, dan lain sebagainya.

f. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data primer meliputi hasil wawancara bersama UKM, pengelola pelatihan/pendampingan UKM, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam pemberdayaan UKM.

g. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman FGD dan wawancara mendalam atau indepth interview. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka yang sesuai dengan focus penelitian. Pada pelaksanaannya, baik FGD maupun wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa perekam suara.

h. Teknik Pengumpulan Data :

Dalam penelitian ini, secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan 4 (empat) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu :

- (1) **Indeep Interview**; teknik wawancara mendalam akan dilakukan baik terhadap informan. Hasil wawancara akan direkam dengan menggunakan alat rekam *Walkman (tape recorder)*.
- (2) **Observasi**; Teknik observasi dilakukan terhadap fenomena yang terjadi di komunitas lingkungan binaan. Data observasi akan didokumentasikan melalui alat rekam *Handycam*.
- (3) **Focus Group Discussion (FGD)**; suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. FGD dilakukan kepada UKM yang sebelumnya dikelompokkan berdasarkan karakteristik UKM.
- (4) **Dokumentasi**, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk meramu dan menempatkan terminologi dan sumber-sumber teori dalam penelitian ini yaitu teori yang menyangkut pemberdayaan UKM di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

i. Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan. Beberapa tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- Mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik UKM (jenis usaha, produktivitas, luas pasar, jumlah karyawan, pengalaman UKM)
- Menilai harapan responden terhadap program pemberdayaan UKM
- Mendeskripsikan kondisi UKM sebelum mendapat pelatihan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait
- Mendeskripsikan kondisi UKM setelah mendapat pelatihan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait
- Menilai efektivitas berdasarkan kondisi produksi, keuangan, pemasaran, tenaga kerja, prospek bisnis, inovasi, teknologi, dan kemandirian.
- Menyusun rancangan model incubator bisnis berdasarkan tingkat efektifitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan.
- Implementasi Model Incubator Bisnis
- Evaluasi Efektivitas Model Inkubator Bisnis

D. HASIL PENELITIAN

Penerapan Model Inkubator Bisnis

Desain model incubator bisnis telah ditemukan dan ditetapkan pada penelitian tahun pertama. Pada penelitian tahun kedua ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari efektivitas model incubator bisnis. Penerapan model dilakukan pada tiga kelompok UKM yang telah dibagi berdasarkan karakteristik responden dengan masing-masing kelompok berjumlah 30 (tiga puluh) orang UKM. Kelompok UKM meliputi Kelompok UKM Pemula, UKM Semi Mapan, dan UKM Mapan.

Secara umum masing-masing kelompok memiliki karakteristik sebagai berikut:

Kelompok UKM	Karakteristik
UKM Pemula	<ul style="list-style-type: none"> - Usia usaha berkisar antara 0 - 3 tahun. - Omset penjualan berkisar antara 0 - 5 juta per bulan - Tenaga kerja 0 – 2 orang karyawan - Lingkup pemasaran : local - Modal kerja : <20 juta
UKM Semi Mapan	<ul style="list-style-type: none"> - Usia usaha berkisar antara 4 - 10 tahun. - Omset penjualan berkisar antara 6 - 30 juta per bulan - Tenaga kerja 3 – 10 orang karyawan - Lingkup pemasaran : Regional - Modal kerja : 20-100 juta
UKM Mapan	<ul style="list-style-type: none"> - Usia usaha berkisar antara > 10 tahun. - Omset penjualan berkisar antara > 30 juta per bulan - Tenaga kerja > 10 orang karyawan - Lingkup pemasaran : Nasional/internasional - Modal kerja : > 100 juta

Masing-masing kelompok memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda dalam penerapan incubator bisnis. Berikut tujuan dan sasaran masing-masing kelompok disajikan dalam table berikut:

Kelompok UKM	Tujuan	Sasaran
UKM Pemula	Meningkatkan motivasi berwirausaha dan meningkatkan wawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan semangat berwirausaha - Meningkatkan wawasan, ketrampilan,

	dan kemampuan dalam merintis usaha.	dan pengalaman dalam merintis usaha baru
UKM Semi Mapan	Meningkatkan kualitas produk, pangsa pasar dan omset penjualan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas produk dan standarisasi - Meningkatkan pangsa pasar - Meningkatkan omset penjualan dan keuntungan. -
UKM Mapan	Meningkatkan kualitas produk berstandar internasional, pangsa pasar internasional dan omset penjualan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas produk dan standarisasi internasional - Meningkatkan pangsa pasar internasional - Meningkatkan omset penjualan dan keuntungan. - Meningkatkan wawasan hukum bisnis baik nasional maupun internasional

Masing-masing kelompok UKM mendapatkan pelatihan dalam program incubator bisnis dengan materi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Berikut materi yang diberikan untuk masing-masing kelompok:

Kelompok UKM	Materi
UKM Pemula	<ul style="list-style-type: none"> - Ice breaking - Pelatihan motivasi - Teknik produksi - Standar Kualitas Produk - Manajemen pemasaran

	umum - Manajemen keuangan - Pembukuan sederhana - Kunjungan industri
UKM Semi Mapan	- Ice breaking - Pelatihan motivasi - Teknik Inovasi produksi - Standar Kualitas Produk - Standarisasi halal dan POM - Teknik Pemasaran Online - Manajemen keuangan - Akuntansi Keuangan - Kunjungan industri
UKM Mapan	- Ice breaking - Pelatihan motivasi - Teknik Inovasi produksi - Standar Kualitas Produk SNI - Standarisasi halal dan POM - Teknik Pemasaran Online - Manajemen keuangan Internasional - Akuntansi Keuangan - Bahasa dan Budaya Lintas Negara - Transaksi Internasional - Ekspor Impor - Kunjungan industri

Efektivitas Inkubator Bisnis

Penerapan model incubator bisnis yang dilakukan pada penelitian ini diuji efektivitasnya dengan menggunakan teknik wawancara dan Focus Group Discussion. Para peserta incubator bisnis diminta memberikan penilaian terhadap implementasi model yang telah dilakukan. Selanjutnya hasil FGD dirangkum dan dianalisis untuk menentukan efektivitas model. Indikator keberhasilan untuk masing-masing kelompok berbeda-beda. Berdasarkan indikator keberhasilan maka dapat disimpulkan bahwa model incubator bisnis yang memperhatikan karakteristik responden, efektif diterapkan pada UKM dalam meningkatkan kinerja.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Model incubator bisnis yang telah dirancang dengan memperhatikan karakteristik responden dan mengelompokkan responden menjadi UKM Pemula, UKM Semi Mapan, dan UKM Mapan dinilai efektif meningkatkan kinerja UKM.

- b. Model inkubator bisnis yang efektif adalah model yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Tujuan, sasaran, dan materi dalam incubator bisnis harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta incubator bisnis. Inkubator bisnis yang kurang memperhatikan karakteristik peserta akan memiliki tingkat efektivitas yang relative kecil.

Saran

- a. Saran bagi penyelenggaraan program incubator bisnis untuk mendata dan mengklasifikasi UKM terlebih dahulu serta mengetahui kebutuhan calon peserta sebelum memulai program. Harus dihindari incubator bisnis atau pelatihan yang hanya memiliki target menghabiskan dana dengan tujuan dan sasaran yang tidak terukur.
- b. Pemberian materi pada incubator bisnis harus dirancang sesuai kebutuhan peserta termasuk kedalaman materi sehingga akan menghasilkan efektivitas yang tinggi.
- c. Saran bagi penelitian berikutnya hendaknya meneliti model incubator bisnis bagi peserta yang pernah atau sedang mengalami trauma, seperti korban bencana alam, resesi ekonomi, korban PHK, dan lain-lain mengingat perlu adanya pendekatan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Busler, Michael. 2011. *The Roadmap of International Business Incubations Performance, Journal of International Business and Cultural Studies*
- Humam Santoso, Eny Endah Pujiastuti, Suratna, 2009, Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Inkubator Bisnis, Hasil penelitian
- Humam Santoso, 2011, Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Untuk Peningkatan Jiwa Kewirausahaan bagi Pemuda Desa Tirtonirmolo, Hasil penelitian
- Pujiastuti, Eny Endah, Humam Santosa, Suratna, 2010, Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Inkubator Bisnis, Laporan Penelitian Dosen Muda
- Tontowi, Aliq, Subagyo, Ramdhani , Aswandi, 2004, *Pembelajaran Berbasis Inkubator Industri sebagai model pembelajaran untuk mengembangkan potensi jiwa kewirausahaan mahasiswa klaster teknologi industri*, UGM
- Panggabean, Riana, 2007, Profil Inkubator dalam Penciptaan Wirausaha Baru, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, No. 1
- Suratna dan Pujiastuti, 2015, Pengembangan model inkubator bisnis dalam rangka Pemberdayaan UKM, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPNB -Veteran|| Yogyakarta

ANALISIS KONTRIBUSI KOMPONEN TEKNOLOGI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KINERJA PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UPN -VETERAN|| YOGYAKARTA

**ANALYSIS OF TECHNOLOGY COMPONENTS CONTRIBUTION AND
THEIR INFLUENCE TO THE PERFORMANCE
ON STUDY PROGRAM MASTER OF AGRIBUSINESS
AGRICULTURE FACULTY UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

Oleh: Nanik Dara senjawati*¹⁾, Sri Wuryani, Juarini Magister

Agribisnis Fakultas Pertanian UPN -Vetweran|| Yogyakarta

*¹⁾ nanikdarasenjawati@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis kontribusi masing-masing komponen teknologi sistem pembelajaran 2) Menentukan klasifikasi tingkat teknologi sistem pembelajaran, 3) Menganalisis pengaruh komponen teknologi terhadap kinerja di program studi Magister Agribisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pelaksanaan studi kasus. Penentuan responden menggunakan metode *judgment sampling*, sedangkan penentuan ukuran sampel menggunakan metode *quota sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Technometric* dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing komponen teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis berturut-turut adalah: *Humanware* 32,22%, *Orgaware* 28,37%, *Infoware* 23,11% dan *Technoware* 16,30%, Klasifikasi tingkat teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis termasuk dalam kategori sedang dengan tingkat teknologi semi modern. Sementara itu, seluruh komponen teknologi berpengaruh terhadap kinerja program studi Magister Agribisnis. Pengaruh terbesar ditunjukkan oleh komponen *technoware*.

Kata Kunci : Kontribusi, komponen teknologi, teknologi pembelajaran, kinerja

ABSTRACT

The objective of this research were to 1) analyze technology components contribution on the learning technology, 2) determine classification of technology level and 3) analyze influence of technology components to the performance on Study Program Master of Agribusiness. Descriptive in Case Study was using as method in this research and respondent was determined by quota sampling method. Technometric and multiple regression linier method were using for data analysis. The results of this research shows that contribution of technology components to learning technology were Humanware (32.22%), Orgaware (28.37%), Infoware (23.11%) and Technoware (16.30%), respectively. The Technology level was classified into semi modern in the moderate position. Meanwhile, all technology components were significantly influential to the performance on study program Master of Agribusiness and. The biggest influence was showed by technoware.

Keywords : Contribution, technology component, learning technology, performance.

PENDAHULUAN

Program Studi Magister Agribisnis sebagai lembaga pendidikan yang ditujukan bagi sarjana dari berbagai disiplin ilmu memiliki visi menjadi program studi pilihan bidang Manajemen Agribisnis berbasis IPTEKS dan berwawasan global tahun 2020. Sesuai dengan visi program studi yang berwawasan global, program studi Magister Agribisnis dituntut untuk melakukan proses transformasi pendidikan yang mendorong segala aktivitas program studi menuju ke arah globalisasi. Kekuatan yang mendorong proses globalisasi antara lain kemajuan teknologi. Harahap (2008) menjelaskan teknologi merupakan penerapan (aplikasi) dari sains (pengetahuan) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mempercepat pencapaian tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Hamid (2008) menyebutkan bahwa dalam bidang pendidikan, untuk tetap dapat bertahan dalam persaingan berbasis pengetahuan, perlu dilakukan transformasi kinerja organisasi untuk mencari keunggulan yang bisa menjamin terjaganya eksistensi institusi pendidikan dalam persaingan yang makin ketat. Dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, program studi Magister Agribisnis harus memiliki kinerja yang baik dengan tingkat performansi yang tinggi. Program studi Magister Agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kualitas melalui komponen teknologi yang dimiliki sehingga mampu bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Teknologi menurut *United Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (UNESCAP) merupakan kombinasi dari empat komponen dasar yaitu *technoware*, *humanware*, *infoware*, dan *organware* yang berintegrasi secara dinamis dalam suatu proses transformasi. Menurut Jerusalem dkk. (2007), berdasarkan nilai kontribusi, institusi dapat menggunakannya untuk menyusun prioritas pengembangan komponen teknologi sebagai upaya peningkatan mutu institusi secara keseluruhan.

Kontribusi komponen teknologi penting untuk diketahui, karena dengan mengetahui tingkat kontribusi dapat dilihat komponen teknologi apa yang berkontribusi rendah maupun yang berkontribusi tinggi bagi kinerja program studi Magister Agribisnis. Selain melihat dari kontribusi masing-masing komponen teknologi, juga akan dilihat posisi tingkat klasifikasi teknologi yang dimiliki program studi Magister Agribisnis. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan menghasilkan suatu rekomendasi bagi program studi Magister Agribisnis mengenai komponen teknologi mana yang harus ditingkatkan, diperbaiki, dan dikuasai supaya program studi mampu berwawasan global dan memiliki kinerja yang baik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kontribusi masing-masing komponen teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis.
2. Menentukan klasifikasi tingkat teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis.
3. Menganalisis pengaruh komponen teknologi terhadap kinerja program studi Magister Agribisnis.

TINJAUAN PUSTAKA

Daim dkk.(2011) dalam Ridhwan dkk.(2014) mengungkapkan bahwa penilaian teknologi membantu industri dalam menentukan keputusan bagi industri untuk mengembangkan industrinya. Metode yang digunakan adalah metode teknometrik berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh UNESCAP. Kriteria umum yang dapat digunakan sebagai acuan pemilihan pengukuran perlu ditetapkan untuk melakukan penilaian kecanggihan dari keempat komponen teknologi.

Penilaian kompleksitas atau kecanggihan mutakhir atau *State Of The Art* (SOTA) dari tiap-tiap komponen teknologi diawali dengan penilaian terhadap masing-masing kriteria *technoware*, *humanware*, *infoware*, dan *orgaware* berdasarkan kriteria UNESCAP. Kriteria penilaian kompleksitas komponen teknologi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Batas Bawah dan Batas Atas Komponen Teknologi

Komponen	Limit (batas)	
	Lower (bawah)	Upper (atas)
<i>Technoware</i>	LT :	UT :
<i>Humanware</i>	LH :	UH :
<i>Infoware</i>	LI :	UI :
<i>Orgaware</i>	LO :	UO :

Sumber : UNESCAP (1989) dalam Nazaruddin (2008)

- Menghitung nilai SOTA masing-masing komponen teknologi dengan rumus sebagai berikut :
 - Komponen *technoware* :
$$ST_i = - \left[\frac{\sum}{\dots} \right]$$
 - Komponen *humanware* :
$$SH_j = - \left[\frac{\sum}{\dots} \right]$$
 - Komponen *infoware* :
$$SI_k = - \left[\frac{\sum}{\dots} \right]$$
 - Komponen *orgaware* :
$$SO_l = - \left[\frac{\sum}{\dots} \right]$$
- Penentuan kontribusi komponen teknologi
 - Komponen *technoware* :
$$Ti = - \left[\dots \right]$$
 - Komponen *humanware* :
$$Hj = - \left[\dots \right]$$
 - Komponen *infoware* :
$$Ik = - \left[\dots \right]$$
 - Komponen *orgaware* :
$$Ol = - \left[\dots \right]$$
- Penilaian intensitas kontribusi komponen teknologi (β) digunakan pembobotan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menggunakan *pairwise comparison matrix*
- Perhitungan koefisien kontribusi komponen teknologi atau *Technology Coefficient Contribution* (TCC) dengan rumus sebagai berikut :

$$TCC = T^{\beta t} \times H^{\beta h} \times I^{\beta i} \times O^{\beta o}$$

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pelaksanaan studi kasus. Penentuan responden pada penelitian ini menggunakan metode *judgment sampling*, ukuran sampel ditentukan dengan metode *quota sampling*. Dalam penelitian responden yang terdiri dari : 3 orang dari pimpinan fakultas, 3 orang karyawan program studi, 8 mahasiswa aktif , dan 7 alumni program studi Magister Agribisnis

Kontribusi Teknologi dan Klasifikasi Tingkat Teknologi dianalisis dengan metode *Technometric* yang merujuk pada ketentuan UNESCAP. Analisis pengaruh komponen teknologi terhadap kinerja digunakan Analisis regresi linier berganda dengan persamaan :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = kinerja program studi Magister Agribisnis (skor)

a = konstanta

β_i = koefisien X_i

X_1 = *technoware* (skor)

X_2 = *humanware* (skor)

X_3 = *infoware* (skor)

X_4 = *orgaware* (skor)

ε = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Komponen Teknologi

1. Tingkat Kecanggihan Atau Sofistikasi Komponen Teknologi

Hasil perhitungan tingkat kecanggihan atau sofistikasi komponen teknologi ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kecanggihan Komponen Teknologi Sistem Pembelajaran

	<i>Technoware</i>	<i>Humanware</i>	<i>Infoware</i>	<i>Orgaware</i>
	Skor 1	Skor 4	Skor 2	Skor 1
Lower	Fasilitas manual (<i>manual facilities</i>)	Kemampuan melakukan setup (<i>setting-up abilities</i>)	Informasi penggambaran (<i>describing fact</i>)	Kerangka kerja perjuangan (<i>striving frameworks</i>)
	Skor 4	Skor 6	Skor 5	Skor 6
Upper	Fasilitas fungsi khusus (<i>special purpose facilities</i>)	Kemampuan melakukan adaptasi (<i>adaptation abilities</i>)	Informasi pemahaman (<i>comprehending facts</i>)	Kerangka kerja pencarian peluang (<i>prospecting frameworks</i>)

Sumber : Data primer diolah (2016)

Tabel 2 menunjukkan bahwa komponen *technoware* memiliki tingkat kecanggihan terendah berada pada tingkat fasilitas manual dan tingkat tertinggi

berada pada tingkat fasilitas fungsi khusus. Hal ini berarti bahwa program studi Magister Agribisnis masih menggunakan peralatan yang mengandalkan kemampuan tangan untuk pengoperasiannya, namun sudah diimbangi peralatan yang dioperasikan secara khusus dan pengendalian operasi sepenuhnya dilakukan operator.

Tingkat kecanggihan komponen *humanware* yang terendah berada pada kemampuan melakukan set-up sedangkan yang tertinggi berada pada kemampuan melakukan adaptasi. Hal ini berarti sumber daya manusia memiliki tingkat pendidikan lebih dari SMA, dengan frekuensi pelatihan yang tinggi sehingga memiliki kemampuan *hard skill* dan *soft skill* yang memadai (Nazaruddin, 2008).

Komponen *inforeware* memiliki tingkat kecanggihan komponen teknologi terendah berupa informasi penggambaran, sedangkan tingkat kecanggihan tertinggi berupa informasi pemahaman. Informasi penggambaran menunjukkan informasi yang berupa penjelasan-penjelasan dalam bentuk *hardfile* setebal 1 lembar. Informasi penggambaran ini berupa informasi yang ditempelkan di papan informasi yang berfungsi sebagai pemberitahuan kepada mahasiswa, alumni, dosen, pengurus Program Studi, maupun karyawan.

Tingkat kecanggihan komponen *orgaware* yang terendah adalah kerangka kerja perjuangan dan tertinggi kerangka kerja pencarian peluang. Kerangka kerja perjuangan merupakan pengaturan program studi yang sepenuhnya dikelola oleh universitas dan fakultas. Sedangkan kerangka kerja pencarian peluang menunjukkan bahwa Program Studi berhak mengembangkan diri di bawah pengawasan universitas dan fakultas.

2. Kompleksitas Atau Kecanggihan Mutakhir Atau *State Of The Art* (SOTA)

Hasil perhitungan SOTA masing-masing komponen teknologi ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai SOTA Komponen Teknologi Sistem Pembelajaran di Program Studi Magister Agribisnis

	<i>Technoware</i>	<i>Humanware</i>	<i>Inforeware</i>	<i>Orgaware</i>
Jumlah Skor	140	70	42,5	65
Rata-rata	6,36	8,75	7,08	8,13
SOTA = (1/10) x rata-rata	0,64	0,88	0,71	0,81

Sumber : Data primer diolah (2016)

Nilai SOTA menunjukkan kompleksitas atau kecanggihan mutakhir komponen tersebut, semakin tinggi nilai skornya dan mendekati 1, maka semakin kompleks dan canggih komponennya. Nazaruddin (2008) menjelaskan bahwa nilai SOTA merupakan persentase keadaan teknologi fasilitas yang diteliti terhadap fasilitas yang dianggap terbaik di dunia.

3. Nilai Kontribusi Komponen Teknologi

Hasil perhitungan kontribusi masing-masing komponen teknologi disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai Kontribusi Komponen Teknologi Sistem Pembelajaran di Program Studi Magister Agribisnis

		<i>Technoware</i>	<i>Humanware</i>	<i>Inforeware</i>	<i>Orgaware</i>
Tingkat	Lower (L)	1	4	2	1
Kecanggihan	Upper (U)	4	6	5	6
SOTA (S)		0,64	0,88	0,71	0,81

Kontribusi	$(1/9) \times [L+S(U-L)]$	0,32	0,64	0,46	0,56
Komponen	persentase	16,30	32,22	23,11	28,37

Sumber : Data primer diolah (2016)

Komponen teknologi yang paling besar berperan dalam proses transformasi teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis adalah komponen *humanware*. Komponen *humanware* memegang peranan penting dalam proses transformasi teknologi sistem pembelajaran, karena didukung oleh pengajar yang kompeten serta pengelola prodi dengan kemampuan melakukan adaptasi.

Sedangkan rendahnya kontribusi komponen *technoware* dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan peralatan yang dibutuhkan untuk digunakan selama proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Jerusalem dkk. (2007), bahwa dengan mengetahui nilai kontribusi, institusi dapat menggunakannya untuk menyusun prioritas pengembangan komponen teknologi sebagai upaya peningkatan mutu institusi secara keseluruhan.

B. Klasifikasi Teknologi dan Tingkat Teknologi

Klasifikasi teknologi dan tingkat teknologi program studi Magister Agribisnis ditentukan berdasarkan nilai *Technology Coefficient Contribution* (TCC). Hasil perhitungan nilai beta berdasarkan kebijakan Dekan, Wakil Dekan I (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat), serta Wakil Dekan II (sarana prasarana, keuangan, SDM, dan kerja sama) ditunjukkan pada tabel 5.

Intensitas komponen teknologi menunjukkan prioritas pengembangan komponen teknologi. Menurut Jerusalem dkk. (2007), dalam *technometric*, intensitas kontribusi komponen (*Intensity Of Importance*) berfungsi untuk menentukan prioritas pengembangan ataupun peningkatan mutu, dimana pengembangan tersebut dimulai dengan prioritas pengembangan pada komponen teknologi yang mempunyai nilai intensitas kontribusi komponen tertinggi.

Tabel 5. Nilai Intensitas Kontribusi Komponen Teknologi (Nilai β) Sistem Pembelajaran di Program Studi Magister Agribisnis

Nama	Bidang	Nilai Beta (β)			
		<i>Technoware</i>	<i>Humanware</i>	<i>Infoware</i>	<i>Orgaware</i>
Dekan		0,44	0,12	0,38	0,05
Wakil Dekan I	Pengajaran	0,63	0,12	0,18	0,07
	Penelitian	0,61	0,13	0,20	0,06
	Pengabdian masyarakat	0,61	0,13	0,20	0,06
Wakil Dekan II	Sarana prasarana	0,41	0,15	0,39	0,05
	Keuangan	0,60	0,16	0,17	0,06
	SDM	0,36	0,16	0,25	0,23
	Kerja sama	0,45	0,14	0,30	0,12
Rata-rata		0,51	0,14	0,26	0,09

Sumber : Data primer diolah (2016)

Dengan demikian, berdasarkan tabel 5, maka prioritas pengembangan adalah komponen *technoware*, kemudian komponen *infoware*, selanjutnya komponen

humanware, dan komponen *orgaware* menjadi prioritas terakhir untuk dikembangkan. Setelah mengetahui nilai intensitas komponen teknologi, maka dapat dihitung nilai *Technology Coefficient Contribution* (TCC) sebagai berikut:

$$TCC = T^{\beta_t} \times H^{\beta_h} \times I^{\beta_i} \times O^{\beta_o} = 0.32^{0.51} \times 0.64^{0.14} \times 0.46^{0.26} \times 0.56^{0.09} = 0.41$$

Berdasarkan **klasifikasi teknologi** termasuk dalam **klasifikasi sedang (0,3 < TCC < 0,5)**, sedangkan berdasarkan **tingkat teknologi** termasuk dalam kategori **semi modern (0,3 < TCC < 0,7)**.

C. Pengaruh komponen teknologi terhadap kinerja program studi Magister Agribisnis

Hasil analisis pengaruh komponen teknologi terhadap kinerja program studi Magister Agribisnis disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil analisis pengaruh komponen teknologi terhadap kinerja program studi Magister Agribisnis

Keterangan	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	47,981*	3,268	0,043
<i>Technoware</i>	6,571*	3,032	0,032
<i>Humanware</i>	2,146*	5,826	0,025
<i>Infoware</i>	5,434*	2,824	0,046
<i>Orgaware</i>	3,329*	2,622	0,022
R Square	0,671		
F hitung	5,962		0,024

Sumber : Data primer diolah (2016)

Keterangan : * signifikan pada alpha 5%

Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien regresi komponen *technoware* yang tertinggi. Besarnya pengaruh komponen *technoware* dalam meningkatkan kinerja program studi menjadi pendorong pihak pengelola program studi dan pimpinan fakultas untuk meningkatkan komponen *technoware*. Namun jika dikaitkan dengan tingkat kontribusinya yang paling rendah, komponen *technoware* perlu diperhatikan dan dikembangkan. Nilai intensitas kontribusi komponen *technoware* yang tertinggi menjadikan komponen *technoware* ini harus diprioritaskan dalam pengembangan komponen teknologi untuk mendukung kinerja program studi. Dukungan komponen *technoware* dengan fasilitas-fasilitas yang lebih canggih akan mengefektifkan dan mengefisienkan pekerja pengelola program studi, sehingga kinerja program studi Magister Agribisnis akan lebih baik.

KESIMPULAN

1. Kontribusi masing-masing komponen teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis : *Humanware* 32,22%, *Orgaware* 28,37%, *Infoware* 23,11%, dan *Technoware* 16,30%
2. Klasifikasi tingkat teknologi sistem pembelajaran di program studi Magister Agribisnis termasuk dalam kategori sedang dengan tingkat teknologi semi modern
3. Komponen teknologi berupa *technoware*, *humanware*, *infoware*, dan *orgaware*, berpengaruh nyata terhadap kinerja program studi Magister Agribisnis.

PUSTAKA

Hamid, E.S. 2008. *Membangun Daya Saing Institusi Pendidikan Berbasis Kompetensi Dasar Organisasi* <jurnal.uji.ac.id/index.php/Unisia/article/download/167/158> Diakses 10 Januari 2016

- Harahap, P. 2008. *Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan*<<https://vandha.wordpress.com/2008/06/22/pemanfaatan-teknologi-dalam-pendidikan/>> Diakses tanggal 11 Januari 2016
- Jerusalem, M.A., K. Komariah, K. Asiatun, dan M Nugraheni. 2007. *Implementasi Metode Technometric Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMK Kelompok Pariwisata*. Jurusan Pendidikan Teknik Boga Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Dipublikasikan pada Jurnal Kependidikan UNY
- Nazaruddin. 2008. *Manajemen Teknologi*. Yogyakarta :Penerbit Graha Ilmu
- Ridhwan, M. A., R. Astuti, B.S.D. Dewanti. 2014. *Penilaian Tingkat Teknologi Industri Susu Pasteurisasi Koperasi Susu "SAE" Pujon Dengan Metode Technometric*<<http://skripsitipftp.staff.ub.ac.id/files/2014/10/JURNAL-Muhammad-Ridhwan-A.pdf>> Diakses tanggal 10 Januari 2015

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Sujatmika, Marita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional -Veteran Yogyakarta
email: (jatmika_zan@yahoo.com), (marita_farid@yahoo.com)

ABSTRACT

Financial reporting practices of political parties in Indonesia and still require review more, with regard to the discourse issued by the Interior Minister Tjahjo Kumolo who knowingly disseminated concerning the financing of political parties from the state budget amounting to Rp 1 trillion per year. The discourse will be studied further after the elections (Elections) 2019. This type of research is empirical, Sampling done randomly. In each of the major islands in Indonesia in order to get data based on characteristics of the voters in five major islands of Indonesia, the island of Java, Sulawesi island, the islands of Borneo, Sumatra island, and the island of Papua. Penggunaan tight control over the state budget for political parties to be followed by harsh sanctions if there are violations, including the dissolution of political parties. This is expected to improve the financial reporting system of political parties in Indonesia, particularly the issue of financial reporting of political parties to be transparent, timely, and in its implementation. Please note that the financial statements submitted political parties, both campaign finance reports and annual reports are very inadequate and incomplete presentation. Even a bit of a political party's annual reports.

Keywords: Financial Reports, Political Party, Transparency

ABSTRAK

Praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia dirasa memerlukan tinjauan yang lebih, berkenaan dengan adanya wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dianggap sengaja dihembuskan mengenai pembiayaan partai politik dari APBN sebesar Rp 1 triliun per tahun. Wacana tersebut baru akan dikaji lebih lanjut setelah Pemilu (Pemilu) 2019. Jenis penelitian ini adalah empiris, teknik Penyampelan dilakukan secara random. Pada masing-masing pulau besar di Indonesia dengan tujuan mendapatkan mendapatkan data berdasarkan karakteristik pemilih di lima besar kepulauan Indonesia, yaitu pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Papua. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik. Hal ini diharapkan akan memperbaiki sistem pelaporan keuangan partai politik di Indonesia, khususnya masalah pelaporan keuangan partai politik agar transparan, tepat waktu, dan dalam pelaksanaannya. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang disampaikan partai politik, baik laporan dana kampanye maupun laporan tahunan sangat tidak memadai dan paparnya tidak lengkap. Bahkan sedikit dari partai politik yang membuat laporan tahunan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Partai Politik, Transparansi

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kinerja partai politik pastilah tak lepas dari anggaran. Anggaran tersebut pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa perlu adanya tinjauan yang lebih terhadap praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia. Mengingat baru-baru ini terdengar wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dianggap sengaja dihembuskan mengenai pembiayaan partai politik dari APBN sebesar Rp 1 triliun per tahun. Wacana tersebut baru akan dikaji lebih lanjut setelah Pemilu 2019.

Berkenaan dengan hal itu, bijak rasanya jika kita mengevaluasi kembali mengenai praktik pelaporan keuangan partai politik yang selama ini ada di negara kita. Perlu diketahui pula bahwa jika terdapat keterbatasan pada pedoman akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, akan mampu mengakibatkan lemahnya sarana yang dapat dipergunakan sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan.

Persoalan yang muncul adalah bahwa ada banyak sumbangan yang diberikan secara spontan oleh para pendukung partai politik baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Sumbangan ini ada yang diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai fasilitas, dukungan kampanye, atau pengeluaran uang tunai yang dikelola sendiri, dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan misalnya transportasi, untuk mengangkut masa pada saat rapat akbar atau untuk calon legislatif dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak memadai bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali.

Sumbangan natura lain yang tidak muncul di dalam laporan keuangan adalah biaya-biaya rapat raksasa. Biaya-biaya ini antara lain membayar artis (penyanyi, pelawak, band, dan sebagainya), panggung, dan sebagainya. Selain itu, dana pembuatan bendera, poster, spanduk, dan iklan, hanya sedikit yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau dilihat dari intensifnya dan ekstensifnya penyebaran informasi dari partai-partai besar, maka dana tersebut secara logika awam pasti jauh lebih besar dari yang dilaporkan, tetapi yang muncul dalam laporan keuangan kampanye jauh lebih sedikit.

Banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya secara jelas. Bahkan menurut para auditor, banyak sumbangan yang hanya menerakan kata-kata -Hamba Allah dalam kolom nama dan alamat penyumbang. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk memberikan sumbangan melewati batas maksimum yang diizinkan undang-undang dengan memberikan sumbangan lebih dari satu kali dengan nama -Hamba Allah tersebut.

Ada pinjaman dari pribadi yang melebihi batas maksimum sumbangan individu, namun pinjaman ini tidak dengan akta perjanjian kapan dibayar dan untuk berapa lama. Dugaan kami ini hanya digunakan sebagai taktik untuk menghindari batas maksimum sumbangan individu. Tidak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebih dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan KPU, yaitu sebesar Rp 110 milyar pada saat itu. Partai-partai kecil pada umumnya hanya melaporkan penggunaan keuangan dari jumlah dana kampanye yang diterima dari pemerintah yaitu sebesar Rp 150 juta saja atau yang Rp 1 milyar saja. Mungkin mereka tidak berhasil menggalang dana dari publik, namun ada juga yang bersih keras menyatakan bahwa kewajiban mereka membuat audit hanyalah sebatas audit untuk dana yang mereka terima dari pemerintah saja.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 State of the art

Peneliti telah lebih dahulu melakukan dua penelitian awal berkaitan dengan laporan keuangan. Sujatmika (2002) meneliti Relevansi siklus anggaran dalam otonomi daerah, selain itu pada tahun 2011 Sujatmika dkk. Meneliti tentang tata kelola negara. Partai politik merupakan institusi publik yang mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Dukungan dari segenap pihak menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2.2 Kebijakan (Prosedur) Internal Pengelolaan Dana

Salah satu mekanisme pengelolaan dana internal partai adalah berkaitan dengan Pengaturan tentang dana rutin ini biasanya menyangkut apakah dana rutin ini boleh disalurkan partai untuk dana kampanye kepada kandidat-kandidat partai. Pengaturan mengenai ini penting, karena kalau diperbolehkan, maka dana rutin dapat mengatasi kesulitan partai karena adanya batasan-batasan sumbangan kampanye. Dana rutin biasanya lebih longgar pengaturannya. *Mekanisme pengelolaan dana rutin. Kebanyakan negara mengatur agar pengelolaan dana rutin partai dipisahkan dengan dana kampanye. Bahkan sebagian mensyaratkan agar partai membuka rekening khusus untuk kampanye setiap kandidat.* Kebijakan internal pengelolaan dana partai politik sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas laporan keuangan partai, transparansi laporan keuangan partai, keterbukaan dana partai, dan akses informasi keuangan bagi publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang selama 2 tahun. Berikut ini adalah rancangan penelitian untuk tahun 1 dan tahun ke 2.

Tahun 1 adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari partai politik.
3. Data sekunder berupa laporan keuangan dan kebijakan umum partai dalam mengelola dana partai politik.
4. Menganalisis Kebijakan internal pengelolaan dana partai politik
5. Menganalisis dan memberi skor indeks untuk data laporan keuangan yang diperoleh dari partai politik.
6. Analisis dan skor indeks berdasarkan bobot skor dan komponen berikut ini:
 - a. Akuntabilitas laporan keuangan partai,
 - b. Transparansi laporan keuangan partai,
 - c. Keterbukaan dana partai,
 - d. Akses informasi keuangan bagi publik

Tahun 2 adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian ini adalah empiris.
2. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengisian instrumen kuesioner yang mendalam disertai wawancara mendalam pada satu per satu responden.
3. Teknik Penyampelan dilakukan secara random. Pada masing-masing pulau besar di Indonesia dengan tujuan mendapatkan data berdasarkan karakteristik pemilih di lima besar kepulauan Indonesia, yaitu pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Papua.
4. Variabel dependen adalah tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih partai.
5. Variabel independen adalah akuntabilitas laporan keuangan partai, transparansi laporan keuangan partai, keterbukaan dana partai, Kebijakan (prosedur) internal pengelolaan dana, akses informasi keuangan bagi publik.
6. Alat analisis yang akan digunakan adalah regresi.

4. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan oleh Partai Politik di Indonesia

Pengaturan terhadap pengendalian politik uang sebenarnya dapat dijumpai dalam undang-undang yang mengatur partai politik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik:

1. Pasal 34 ayat 1 dan 2 berbunyi: (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: (a) iuran anggota; (b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
2. Pasal 34A ayat 1, 2 dan 3 dimana ayat tersebut berbunyi: Ayat (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan Secara Berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (3) Hasil audit atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
3. Pasal 35 ayat 1 dan 2, dimana ayat (1) berbunyi, sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari: (a) perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; (b) perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan (c) perusahaan dan / atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan / atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Ayat (2) berbunyi, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik.
4. Pasal 37 dimana pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir.
5. Pasal 38 berbunyi hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.
6. Pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 dimana ayat (1) pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ayat (2) penelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Ayat (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: (a) laporan realisasi anggaran Partai Politik; (b) laporan neraca; dan (c) laporan arus kas.

Menurut Emmy (2008) Sesuai dengan dasar hukum pelaporan keuangan dan audit partai politik oleh partai di Indonesia dapat dilihat fakta bahwa:

1. Tidak diatur secara jelas maksud dan bentuk laporan keuangan dimaksud, sehingga walaupun IAI memakai PSAK 45, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan format tersendiri.
2. Format laporan keuangan yang ditetapkan MA tidak memenuhi syarat sebagai laporan keuangan (hanya melaporkan penerimaan dana, pengeluaran dana, dan sisa dana) bahkan tidak memenuhi PSAK 45 yang ditetapkan oleh IAI.
3. Terjadi ketidakseragaman dan ketidakcukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh partai politik.

Menurut Emmy (2008) Temuan lemahnya pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap Laporan Keuangan Partai Politik antara lain:

1. Laporan-laporan tersebut mengikuti Pedoman Akuntansi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai laporan keuangan, dan tidak sebagaimana lazimnya sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan aktivitas, dan laporan arus kas beserta catatan laporan keuangan yang menyertainya.
2. Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan bahwa untuk laporan keuangan partai politik dapat dipakai PSAK 45. Maka jika merujuk pada pedoman akuntansi yang dikeluarkan IAI, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi standar yang dikeluarkan IAI.
3. Sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan hanya terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas. Laporan hanya disusun dengan dasar kas bukan akrual dan tidak akan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan selayaknya.
4. Laporan itu hanya merupakan laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, bukan merupakan laporan konsolidasi partai dari tingkat ranting, cabang, daerah dan wilayah.

Kelemahan-kelemahan dari hal yang telah ditemukan di atas disebabkan juga karena pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur keuangan ini sangat lemah dan sangat sedikit mengatur mengenai hal ini. Ada banyak kelemahan yang dipakai oleh partai untuk menghindari aturan-aturan tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain tidak ada batasan atau larangan mengenai jumlah dana yang boleh diterima dari pemerintah.

Tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan sumbangan dan fasilitas yang didapat pada tiap level manajemen partai, sehingga banyak sumbangan dalam bentuk tunai dan natura yang tidak tercatat. Tidak ada kewajiban untuk mencatat seluruh sumbangan yang dipakai untuk kepentingan partai ke dalam catatan keuangan partai yang dikelola sekjen dan bendahara. Tidak ada aturan yang memisahkan antara dana kampanye dan dana rutin partai.

Bentuk Dasar Pengaturan Keuangan dalam Politik

Herbert E Alexander (2003) mengemukakan terdapat 3 bentuk dasar pengaturan keuangan dalam politik, yaitu:

1. *Pertama*, keterbukaan publik (*public disclosure*) untuk memberikan berbagai informasi kepada publik, selama mau pun setelah kampanye tentang pengaruh uang terhadap pejabat-pejabat terpilih dan untuk membantu mengurangi eksese-ekses dan tindakan penyalahgunaan, dengan cara meningkatkan risiko-risiko politik yang harus ditanggung oleh mereka yang melakukan praktik-praktik seperti itu.

2. *Kedua*, pembatasan-pembatasan pengeluaran (*expenditure limits*)—untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pembekakan biaya, dan oleh adanya beberapa kandidat yang mempunyai lebih banyak uang dari yang lainnya.
3. *Ketiga*, pembatasan pemberian sumbangan (*contributions restrictions*)—untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya kandidat-kandidat yang mengikatkan diri pada kepentingan-kepentingan tertentu.

Langkah Komisi Pemilu (KPU) mengatur pelaporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu lewat Peraturan KPU (PKPU) No. 17/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dinilai belum menyentuh substansi. Oleh karena laporan dana kampanye hanya sebatas memenuhi syarat administrasi saja. Laporan dana kampanye partai politik hanya disebutkan nominalnya, tidak dari mana asal dana kampanye tersebut. Dana kampanye partai politik di Pemilu 2014 lalu, sangat rawan dengan tindak pidana pencucian uang, sementara itu 12 pasal mengenai dana kampanye, ditambah 4 pasal tentang sanksi pidana pelanggaran dana kampanye legislatif dalam UU No.8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sama sekali tidak akan mampu menjerat tindak pidana pencucian uang dan tidak cukup luas, rinci dan spesifik untuk menjadi dasar penegakan hukum atas berbagai bentuk penyimpangan.

Langkah maju bagi KPU untuk mengajak kerja sama dengan PPATK dalam mengawasi dana kampanye dan diharapkan ke depannya dapat membantu pelaporan dan audit dana kampanye Pemilu 2014. Ini mampu menekan kecenderungan pelanggaran aturan-aturan dana kampanye. Akuntabilitas dan transparansi keuangan serta dana kampanye partai politik merupakan salah satu prinsip utama demokrasi prosedural yang harus dijalankan. Salah satunya dalam bentuk laporan dan audit keuangan partai politik dan dana kampanye. Ini dilakukan baik sebagai perwujudan transparansi kelembagaan maupun guna mencegah terjadinya korupsi politik pada Pemilu 2014.

Tinjauan Terhadap PSAK 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik

Standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Sedangkan PSAK sendiri adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba. Dalam audit yang dikordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 inilah yang dipakai. Ada tiga pendapat dalam hal ini untuk pemakaian PSAK. Pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan/pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut.

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik. Karena karakter partai politik tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Beberapa karakteristik khusus partai politik tersebut antara lain: jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik; perjuangan utama partai politik dilakukan melalui Pemilu, kepentingan publik yang lebih besar; dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik

sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan partai politik. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur partai politik. Karena faktor kekuasaan yang dimiliki partai politik, maka aturan-aturan keuangan partai politik harus lebih ketat untuk mencegah korupsi politik dan dominasi kelompok-kelompok kepentingan.

5. KESIMPULAN

Laporan keuangan yang disampaikan partai politik, baik laporan dana kampanye maupun laporan tahunan sangat tidak memadai dan paparannya tidak lengkap. Bahkan laporan tahunan tidak banyak yang membuat. Padahal ini dimandatkan oleh undang-undang yang masih berlaku pada saat studi ini dibuat yaitu UU No. 2/2008 tentang Partai Politik. Laporan yang ada tidak memenuhi sistem pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Sementara itu, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga dipakai untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba lain.

Untuk itu, partai politik harus mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi pelaporan keuangan secara cukup terbuka dan cukup mewakili kegiatan partai tersebut secara nasional. Terlebih lagi, dengan adanya wacana kenaikan dana bantuan yang akan diberikan kepada partai politik yaitu sebesar Rp 1 triliun. Walaupun pada kenyataannya, banyak yang beranggapan saat ini partai politik dirasa belum perlu mendapatkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang diwacanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena hal itu dirasa masih terlalu prematur dan berlebihan. Pembiayaan melalui bantuan partai politik yang selama ini telah digulirkan sebagai sumber pembiayaan dengan besaran disesuaikan jumlah perolehan suara, masih belum jelas penggunaan serta mekanisme pertanggungjawabannya. Seharusnya lebih dioptimalkan penggunaannya, sehingga kewajiban partai politik secara mendasar seperti melakukan pendidikan politik, pembenahan pola rekrutmen dapat dipenuhi.

Diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik. Semoga akan menjadi tambahan tanggung jawab bagi pelaku dalam partai politik. Hal ini diharapkan akan memperbaiki sistem dalam partai politik di Indonesia, khususnya masalah pelaporan keuangan partai politik agar transparan, tepat waktu, dan dalam pelaksanaannya tidak tersangkut masalah korupsi seperti yang dikhawatirkan kebanyakan para petinggi di negara ini.

Kemudian, sekiranya perlu juga diadakan modifikasi atau pedoman khusus standar akuntansi keuangan untuk partai politik. Diharapkan dengan adanya fakta tersebut dapat mendorong berbagai pihak, dalam hal ini DPR, KPU, Mahkamah Agung dan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk duduk bersama dan menyepakati standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik termasuk dana kampanye.

Rekomendasi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Sampai dengan saat ini, belum ada standar akuntansi keuangan, baik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi profesi akuntan Indonesia maupun oleh lembaga pengawas partai politik (Mahkamah Agung dan Komisi Pemilu), yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan bagi partai politik.

Dengan dasar adanya perbedaan karakteristik, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, diperlukan adanya standar

akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi.

6. REFERENSI

Basri, Seta. 2012. Sistem Politik Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia. Halaman 59

Hafild, Emmy. 2008. Tinjauan Terhadap Praktik Pelaporan Keuangan Partai Politik. Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Halaman: 29-36

Hafild, Emmy. 2008. Terhadap PSAK-45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik. Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Halaman: 37-54

Alexander, Herbert E. 2003. Financing Politics

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia

[**http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia**](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia)

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

<http://merdeka.com/Pemilu-2014/mendagri-soal-dana-rp-1-t-kalau-parpol-terbukti-korupsi-dibubarkan.html>

<http://sikluscom.blogspot.com/2011/12/rangkuman-sistem-dan-klasifikasi-partai.html>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/20/nlh55-pengamat-pemberian-dana-bantuan-untuk-parpol-berlebihan>

[laporan partai politik 2014.](#)

Marita. 2008 Pengaruh Komitmen dan Peran Informasi Manajemen Biaya Dalam Mendukung *Total Quality Management* Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya dan Implikasinya Terhadap Kinerja Manajer (Survei terhadap Manajer Divisi pada BUMN Manufaktur di Indonesia) PDM Dikti

Marita. 2010 Model Corporate Reporting Supply Chain untuk Sektor Industri energi berdasarkan Karakteristik Negara: Pemetaan dan Komparasi pada Perusahaan-perusahaan Sektor Industri Energi di Kawasan Asia LPPM UPN –Vetran|| Yogyakarta

Marita. 2012 Analisis Kemampuan Karyawan dalam Pemakaian Informasi Berbasis Komputer Dalam Proses Penelitian

Marita. 2011 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UKM dan UMKM di Wilayah DIY Kadin DIY

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

Radikun, dkk. 2008. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Sujatmika. 2002. Relevansi siklus anggaran dalam otonomi daerah. Buletin Ekonomi FE UPNVY

Sujatmika. 2004. Analisis pengaruh fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Pemda Bantul 2004

Sujatmika. 2006. Kecerdasan emosional dalam meningkatkan kinerja organisasi. Prosiding Seminar Nasional: Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional. ISBN: 978-979-18024-0-6.

Sujatmika. 2008. Struktur kepemilikan Saham Level Pertama Terhadap Operating Revenue Per Turn Over (Komparasi Empiris Untuk Negara-negara Asean). Buletin Ekonomi

Sujatmika. 2011. Implikasi Tata Kelola negara dan Tata Kelola Perusahaan pada Struktur Kepemilikan. Prosiding Seminar Nasional: Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional. ISBN: 978-979-180240-6

Undang-Undang Partai Politik. 2013. Fokusindo Mandiri: Bandung.

**Pengembangan Daya Dukung Fungsi Kelembagaan
Program Studi Ilmu Komunikasi menuju Pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif
UPN “Veteran” Yogyakarta**

**Subhan Afifi
Ida Wiendijarti
Senja Yustitia**

Program Studi Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta

Email : subhanaffi@yahoo.com

Abstrak

Rencana Strategis (Renstra) UPN “Veteran” Yogyakarta No. 332/UN62/X2015 menyebutkan bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi akan dikembangkan menjadi Fakultas Komunikasi Kreatif (FKK) pada tahun 2018. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tingkat kelayakan kondisi sarana prasarana pembelajaran seperti sumber daya manusia, kurikulum, dan laboratorium, serta institusi dalam mendukung pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif sebagai institusi yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan metode studi kasus. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Prodi Ilmu Komunikasi layak untuk dikembangkan menjadi Fakultas Komunikasi Kreatif dengan memperhatikan beberapa aspek kelayakan yang berdasar pada kondisi internal serta tren keilmuan serta industri yang berkembang di Indonesia.

Kata Kunci : applied science, industry kreatif, komunikasi, Fakultas Komunikasi Kreatif

A. Pendahuluan.

Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta berdiri sejak Tahun Akademik 1995/1996 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI No.0370/0/1994 dan Kep/10/IX/1994 tanggal 29 Nopember 1994. Kegiatan akademik pertama kali dimulai pada tanggal 26 Agustus 1995. Prodi ini mendapatkan status terdaftar dari Ditjen Dikti Mendikbud No 63/Dikti/Kep/1996 tanggal 13 April 1996 dan telah berstatus terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk kedua kalinya berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi Nomor : 020/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dengan nilai B. Sejak 14 Mei 2014 Prodi Ilmu Komunikasi mendapatkan akreditasi A berdasarkan SK BAN Perguruan Tinggi nomor 140/SK/BAN-PT/Akred/S/V2014.

Pada awal berdirinya, Prodi Ilmu Komunikasi mengkhususkan diri pada bidang kajian jurnalistik. Seiring perkembangan tuntutan keilmuan dan perkembangan industri, bidang kajian saat ini berkembang pada bidang jurnalistik, *public relations*, *advertising* dan *broadcasting*. Ke depan Prodi Ilmu Komunikasi akan berkembang menjadi Fakultas Komunikasi Kreatif, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan industri yang terus berkembang, sehingga keberadaan

Fakultas baru ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang komunikasi. Pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif didasari beberapa alasan berdasarkan aspek kemanfaatan baik terhadap institusi, masyarakat dan bangsa. Bagi institusi yakni Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta, keberadaan Fakultas Komunikasi Kreatif ini diharapkan mampu meningkatkan posisi universitas sebagai salah satu kiblat pendidikan tinggi di DIY-Jateng. Hadirnya Fakultas Komunikasi Kreatif dengan cakupan yang lebih luas (dibandingkan saat menjadi prodi) membuat UPN –Veteran Yogyakarta akan menjadi pionir dalam pengembangan industri kreatif di level akademik. Hingga kini di Indonesia belum ada fakultas serupa yakni yang menggabungkan bidang keilmuan murni (Ilmu Komunikasi) dengan telaah praktis yang hadir karena merespon kebijakan pemerintah di bidang industri kreatif. Hal ini juga sudah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPN ‘Veteran’ Yogyakarta No. 332/UN62/X 2015, yang menyebutkan bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah ada akan dikembangkan dengan membentuk program studi-program studi baru sehingga membentuk Fakultas Komunikasi Kreatif pada tahun 2018.

Kontribusi industri kreatif pada perekonomian nasional semakin naik, karena kebijakan pemerintah yang mengarah pada peningkatan industri kreatif, sebagai salah satu unggulan dan Yogyakarta merupakan salah satu basis industri kreatif di Indonesia. Hal ini didukung dengan arah kebijakan negara yang menjadikan industri kreatif menjadi *key economics issue* di Indonesia. Di mana rencana aksi ekonomi kreatif pemerintah melibatkan berbagai kementerian (pendidikan dan riset) sehingga disinilah peluang universitas untuk berperan serta apalagi pemerintah sudah merancang cetak biru pengembangan industri kreatif hingga 2025.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) bagaimana kelayakan kondisi sarana prasarana pembelajaran seperti sumber daya manusia, kurikulum, dan laboratorium, serta institusi dalam mendukung pendirian pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif, dan (2) bagaimana roadmap rencana pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif.

B. Metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan metode studi kasus (DEPDIKNAS, 2008). Metode studi kasus digunakan untuk menggambarkan keadaan atau mencari fakta dan keterangan secara faktual dengan cara melakukan observasi dan survey secara menyeluruh keadaan sarana sarana dan prasarana yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi UPN ‘Veteran’ Yogyakarta dan membandingkan dengan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Komunikasi yang ada di Yogyakarta. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group*

Discussion/FGD), wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. FGD adalah metode kualitatif yang lazim digunakan untuk melacak hal-hal tertentu yang tampaknya ingin ditonjolkan atau menjadi prioritas bagi responden atau subjek penelitian (Pawito, 2007 : 124-125). Sedangkan wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2007 : 111). Sedangkan yang dimaksud observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (dalam Basuki, 2006).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

C.1. Urgensi Pengembangan Prodi Ilmu Komunikasi dan Perkembangan Dunia Kreatif

Awal mula pendidikan Ilmu Komunikasi di Indonesia bernama publisistik. Akademi yang pertama kali yang membuka jurusan publisistik adalah Akademi Ilmu Politik (cikal bakal Fakultas Sosial Politik UGM) tahun 1949. Selanjutnya, pada 5 September 1949 di Jakarta didirikan Pendidikan Tinggi Djurnalistik (sekarang bernama IISIP). Jurusan yang sama juga dibuka di UI (1959), Unhas (1961), Undip (1967). Pada tahun 1960 di Unpad didirikan Fakultas Djurnalistik dan Publistik (sejak 1983 berubah FIKOM). Fakultas yang sama juga dibuka di Universitas Moestopo (Beragama) tahun 1962.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta kesadaran akan pentingnya informasi memberikan peluang yang besar bagi lulusan bidang Ilmu Komunikasi untuk berkiprah di bidang komunikasi maupun di luar bidang komunikasi baik di instansi pemerintah maupun swasta.

Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan akan lulusan Ilmu Komunikasi oleh dunia kerja. Kebutuhan ini mengacu pada jumlah media cetak dan elektronik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di lain sisi, industri kreatif juga turut berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2006. Dijelaskan dalam buku terbitan Kementerian Perdagangan tahun 2008 bahwa terdapat 14 subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan di Indonesia. Subsektor tersebut adalah 1) Periklanan, 2) Arsitektur, 3) Pasar seni dan barang antik, 4) Kerajinan, 5) Desain, 6) Fesyen, 7) Video, film dan fotografi, 8) Permainan interaktif, 9) Musik, 10) Seni pertunjukkan, 11) Penerbitan dan Percetakan, 12) Layanan Komputer dan piranti lunak, 13) Televisi dan radio, 14) Riset dan pengembangan (<http://dgi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/hasil-konvensi-pengembangan->

ekonomi-kreatif1.pdf akses 10 Agustus 2016). Penentuan subsektor industri kreatif lantas diikuti dengan berbagai rumusan rencana aksi dan kebijakan.

Konsep Industri kreatif diformalisasikan melalui Department of Media, Culture and Sport (DCMS) lewat 2 dokumen pemetaan kreatif yang dipublikasikan pada tahun 1998 dan 2001. Menurut DCMS yang dimaksud industri kreatif adalah *"those activities which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential or wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property"* (Antariksa).

Sebagai sebuah strategi keberadaan ekonomi kreatif membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dalam dokumen model Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, sektor ini setidaknya membutuhkan keterlibatan 3 pihak yakni kalangan akademik, bisnis dan pemerintah. Hal ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi institusi pendidikan untuk mengambil peran dalam proses implementasi industri kreatif di Indonesia. Sub sektor industri kreatif juga sangat berhubungan dengan dunia komunikasi.

C2. Aspek-Aspek Kelayakan Rencana Pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif (FKK)

Aspek Kemanfaatan dan Keunggulan

Fakultas Komunikasi Kreatif terdiri dari 3 program studi, yakni S1 Ilmu Komunikasi, S1 Public Relations dan S1 Periklanan. Pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif didasari beberapa alasan berdasarkan aspek kemanfaatan baik terhadap institusi, masyarakat dan bangsa. Bagi institusi yakni Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Yogyakarta, keberadaan Fakultas Komunikasi Kreatif ini mampu meningkatkan posisi universitas sebagai salah satu kiblat pendidikan tinggi di DIY-Jateng. menjadi pionir dalam pengembangan industri kreatif di level akademik. Hingga kini di Indonesia belum ada fakultas serupa yakni yang menggabungkan bidang keilmuan murni (Ilmu Komunikasi) dengan telaah praktis yang hadir karena merespon kebijakan pemerintah di bidang industri kreatif.

Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi terdiri dari : 5 orang berpendidikan S3, 13 orang S2, dan 5 orang sedang menempuh pendidikan S3. Dari sisi kepangkatan fungsional Lektor Kepala S3 : 2 orang, Lektor Kepala S2 : 2 orang, Lektor S3 : 3 orang, Lektor S2 : 10 orang, Asisten Ahli S2 : 3 orang, dan belum memiliki fungsional S2 : 5 orang. Dari 23 orang total dosen tetap yang dimiliki 16 orang telah tersertifikasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar ada keselarasan dengan dunia kerja (*link and match*) maka sebuah fakultas haruslah memiliki laboratorium yang dapat digunakan untuk mendekatkan mahasiswa dengan kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Saat ini laboratorium yang dimiliki adalah : (1) Laboratorium fotografi, (2) Laboratorium audiovisual, yang juga dimanfaatkan untuk TV Kampus (UPN TV) yang telah mengudara setiap hari, dan televisi *streaming*, (3) Laboratorium radio, (4) Laboratorium multimedia, (5) Laboratorium pers, dan (6) Laboratorium public relations.

Selain untuk praktikum, laboratorium tersebut dapat digunakan untuk pelatihan, untuk kegiatan Kelompok Studi Mahasiswa (KSM), produksi program, dan lain-lain. Hal yang perlu dilakukan adalah menambah jumlah peralatan sehingga memenuhi rasio pembelajaran.

Aspek Kurikulum Berbasis KKNI

Kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi telah mengalami perubahan dengan menyesuaikan dengan pedoman KKNI yang diberlakukan oleh pemerintah. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan/ atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi (Permendikbud No. 73/2013 pasal 2 ayat 1)

Pada level Prodi terjadi perubahan signifikan karena hadirnya Prodi Hubungan Masyarakat (Humas) yang akan menjadi prodi tersendiri. Ditinjau dari definisinya, PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Jefkins, 2004:10). Sesuai dengan definisi tersebut dan hasil tracer study di lapangan, pada kurikulum Prodi Humas disebutkan bahwa profil lulusan dibagi kedalam 3 kelompok besar yakni PR Corporate, PR Consultant dan Humas pemerintah. Ketiga profil tersebut telah melalui proses analisis dengan melihat kondisi internasional, ASEAN dan nasional serta SDM yang telah dimiliki. Sedangkan pada level Prodi Ilmu Komunikasi, profil lulusan dibagi kedalam 4 kelompok besar yakni praktisi, birokrat, entrepreneur dan akademisi. Hal tersebut juga dirumuskan melalui tahapan yang ketat misalnya dengan melakukan tracer study dan diskusi dengan pengguna (*user*) lulusan.

Aspek Pendanaan

Pengelolaan keuangan UPN -Veteran Yogyakarta yang sudah berstatus menjadi negeri membuat penganggaran dan keuangan berbasis pengelolaan keuangan negara..

Aspek Keberlanjutan

Berikut adalah rencana keberlanjutan yang berhubungan dengan penambahan jumlah dosen serta target mahasiswa. Jumlah dosen harus selalu ditambah untuk mempertahankan rasio ideal dosen dan mahasiswa.

Tabel 1

Rencana Pengembangan Jumlah Dosen

Tahun	Jumlah mahasiswa (5 Angkatan Terakhir)	Jumlah Dosen	Rasio Dosen Mahasiswa
2015	1337	38	1 : 35
2016	1867	53	1 : 35
2017	2311	66	1 : 35
2018	2773	79	1 : 35
2019	3200	91	1 : 35

Aspek Kerjasama Institusi

Selama menjadi prodi, kerjasama telah dikembangkan pada berbagai level dan aspek. Pada level pendidikan kerjasama difokuskan untuk mendorong adanya perbaikan mutu pendidikan misalnya dengan bekerjasama dengan Chulalongkorn University Thailand dengan mengadakan pengiriman mahasiswa untuk belajar di kampus ini selama 1 semester. Rintisan kerjasama juga dilakukan pada level institusi yang menjadi target sasaran lulusan mahasiswa yakni media cetak, elektronik, industri, perusahaan nasional dan multinasional, pemerintah pusat – daerah serta beberapa lembaga non-profit. Kerjasama yang telah terjalin ini nantinya akan diperluas dan diperdalam saat menjadi Fakultas Komunikasi Kreatif.

C4. Pengembangan Menuju Fakultas : Belajar dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya dan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara

Untuk memperluas wawasan dan belajar dari universitas lain yang telah lebih dulu mengembangkan fakultas yang prospektif dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, telah diadakan kegiatan studi banding. Kegiatan ini dilaksanakan ke Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya dan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara.

1. Fakultas Industri Kreatif (FIK) Universitas Surabaya

Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya merupakan fakultas termuda yang dimiliki oleh UBAYA saat ini. Dalam proses pembelajarannya, Fakultas Industri Kreatif UBAYA tidak hanya memberikan kemampuan pelatihan individu, namun juga kemampuan bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk menumbuhkan sektor ini. Dengan adanya koneksi, maka manfaat kreativitas dapat diakui oleh bisnis multinasional dan diminati dalam berbagai industri. Pilihan Universitas Surabaya mendirikan Fakultas Industri Kreatif diakui pengelolanya merupakan terobosan untuk memanfaatkan peluang berkembangnya industri kreatif di tingkat global maupun nasional.

2. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi (FEK) Universitas Bina Nusantara

Universitas Bina Nusantara (Binus) merupakan salah satu PTS yang berkembang cepat dan dikenal memiliki inovasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Di universitas ini, program studi Ilmu Komunikasi ditempatkan pada posisi strategis dengan dijadikan sebagai fakultas bersama program studi yang berada pada rumpun ekonomi. Keunikan yang ditemukan pada fakultas ini adalah penggunaan istilah Komunikasi Pemasaran (*Marketing Communication*) dan Komunikasi Massa (*Mass Communication*) sebagai *brand* yang disosialisasikan kepada publik sebagai konsentrasi, walaupun secara resmi program studinya adalah Ilmu Komunikasi.

Komunikasi Pemasaran (*Marketing Communication*, atau populer dengan sebutan *MarComm*) dalam pandangan universitas ini adalah bidang studi lintas disiplin yang mengkombinasikan konsep Pemasaran dan Ilmu Komunikasi. *MarComm* memiliki 2 konsentrasi yaitu : *Marketing Public Relations (MPR)* and *Corporate Public Relations (CPR)*. Pada *MPR*, mahasiswa belajar tentang branding produk, *IMC (Integrated Marketing Communication)*, teknik negosiasi dan lobi, periklanan dan keahlian menulis untuk pemasaran dalam konteks komunikasi. Sedangkan pada *CPR*, dipelajari bagaimana mengelola reputasi korporat, mengembangkan *corporate social responsibility programs*, dan juga penulisan pemasaran dalam konteks komunikasi. Semua konsentrasi ini dilaksanakan dalam dukungan teknologi komunikasi dan informasi sebagai ciri khas dari Universitas Binus. Model pendidikan dikombinasikan antara belajar di kampus (3 tahun) dan magang di dunia industri baik nasional maupun internasional (1 tahun). Pertukaran pelajar (*student exchanges*) dilaksanakan dengan universitas di dalam dan luar negeri, seperti : Universitas Padjajaran University, Hanyang University(Korea), Han University (Belanda), dan University of Southern Indiana (USA).

Kompetensi Lulusan *MarComm* Binus : Mampu menerapkan teori dan praktek dalam bidang ilmu komunikasi. Mampu menerapkan kemampuan analisis dalam menyelesaikan problem dan penelitian bidang komunikasi. Mampu menciptakan peluang dalam industri

komunikasi. Mampu menerapkan pengetahuan fundamental dalam komunikasi pemasaran. Mampu menerapkan bahasa asing dalam konteks isu-isu global komunikasi pemasaran. Mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru dalam bidang komunikasi.

Untuk Program Mass Communication merupakan konsentrasi selain Marketing Communication. Program ini lebih memfokuskan penyiapan lulusan untuk menjadi professional di bidang komunikasi massa. Pembedanya lebih pada bidang kajian yang lebih menekankan pada komunikasi secara keilmuan dan media massa.

C5. Rencana Pendirian FKK UPN "Veteran" Yogyakarta : Persepsi dan Harapan Mahasiswa

Pada FGD yang dilakukan dengan mahasiswa pada dasarnya mereka menyambut baik ide dan rencana pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif UPN -Veteran Yogyakarta. Peserta FGD menganggap bahwa pendirian FKK adalah salah satu bentuk pengembangan dan kemajuan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dijabarkan kedalam bentuk yang lebih operasional. Misalnya unsur *'_kreatif'* yang seperti apa yang akan dikembangkan. Selain itu, ketersediaan SDM dan infrastruktur menjadi hal yang cukup penting untuk dipikirkan.

Dukungan atas pendirian FKK salah satunya dilatarbelakangi pertumbuhan dunia media massa, new media serta industry kreatif. Di bidang pertelevisian misalnya, selain dibutuhkan kemampuan bidang Ilmu Komunikasi, juga dituntut untuk kreatif. Kreativitas inilah yang kini memegang peranan cukup penting mengingat persaingan industry televise begitu ketat. Satu hal yang menjadi catatan dari seluruh peserta FGD adalah selain memberikan warna kreativitas pada pendirian fakultas, namun *'_rasa'* akademik atau keilmuan sebaiknya tidak lepas dari jati diri FKK.

Konsekuensi dari pendirian FKK adalah sarana prasarana yang harus terus ditingkatkan, baik yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar maupun fasilitas pendukung. Infrastruktur yang paling penting adalah ketersediaan laboratorium dengan standar dan spesifikasi yang mendukung pembelajaran. Penyediaan fasilitas pembelajaran tersebut menjadi hal vital yang harus segera dipenuhi. Agar terdapat sinkronisasi antara kebutuhan dan ketersediaan alat, kegiatan studi banding menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Selain infrastruktur, kampus sebagai tempat belajar dan diskusi juga perlu di rekonstruksi. Mahasiswa seharusnya menjadi lebih nyaman untuk melakukan aktivitas kreatif dan akademik di kampus. Sekali lagi, hal tersebut digunakan untuk mewujudkan atmosfer kreatif yang perlu dibangun saat pendirian FKK. Infrastruktur dan SDM pengajar sangat berhubungan erat dengan kurikulum. Beberapa hal yang penting pada kurikulum adalah terkait

kelengkapan materi yang diterima mahasiswa dan sejauh apa kurikulum tersebut membawa mahasiswa memahami realitas yang terjadi. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat mendekatkan mahasiswa pada kondisi di lapangan serta merespon perkembangan jaman. Dalam kalimat yang lebih singkat, kurikulum FKK harus mampu menjembatani antara bidang akademis dan praktis.

Pelayanan prima juga harus menjadi bagian yang integral pada FKK. Nafas kreatifitas seharusnya tidak hanya milik tenaga pengajar dan mahasiswa saja namun juga melekat pada SDM yang berada di sektor pelayanan. SOP yang baik menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan FKK.

D. Roadmap Rencana Pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif

Pendirian FKK dilakukan melalui perencanaan yang matang. Salah satunya dengan memetakan kelebihan, kekurangan serta peluang melalui analisis SWOT. Secara umum kekuatan yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi sebagai cikal bakal FKK adalah adanya animo mahasiswa yang sangat tinggi, aktivitas dosen mahasiswa baik di dalam maupun LN, serta telah diakuinya gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Komunikasi. Selain itu, industri kreatif yang sedang berkembang serta belum adanya Fakultas Komunikasi Kreatif di Jateng dan DIY menjadi kelebihan tersendiri. Terakhir, pihak universitas memberikan dukungan penuh serta ketersediaan SDM yang mumpuni.

Di lain pihak terdapat beberapa kelemahan seperti kurikulum yang sudah ada dianggap kurang merespon perkembangan global, sarana dan prasarana yang masih kurang, perubahan teknologi serta data tracer studi yang belum maksimal. Kendati demikian, terdapat beberapa peluang yang bisa diidentifikasi yakni tren global menuju era komunikasi kreatif sejalan dengan ide pendirian FKK. Pemerintah juga memberikan ruang bagi dunia akademik sebagai penggerak industri kreatif serta banyaknya peluang kerja baru yang berbasis Ilmu Komunikasi. Beberapa hal yang mungkin menjadi ancaman adalah perkembangan masyarakat yang cenderung pragmatis dan tuntutan dunia usaha terhadap SDM yang kreatif dan adaptif semakin tinggi. Selain itu, persaingan antar fakultas Komunikasi di Indonesia, termasuk semakin banyak prodi yang memberikan sentuhan inovasi baik pada kurikulum maupun manajemen penyelenggaraan institusi. Yang terakhir, perkembangan teknologi dan tren global yang bergerak semakin cepat.

E. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prodi Ilmu Komunikasi UPN -Veteran - Yogyakarta layak dikembangkan menjadi Fakultas Komunikasi Kreatif (FKK) UPN -Veteran Yogyakarta dengan memperhatikan beberapa aspek kelayakan yakni; (1) Prodi Ilmu Komunikasi telah kuat pada level prodi sehingga memiliki modal awal sebagai dasar pendirian FKK. Hal tersebut tercermin pada minat calon mahasiswa, sumber daya tenaga pengajar, fasilitas pendukung pendidikan, kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang baik serta akreditasi A diperoleh pada tahun 2014, (2) Pendirian fakultas merupakan salah satu upaya pengembangan dan konsekuensi dari status universitas yang telah menjadi universitas negeri, (3) Tren keilmuan yang mendukung arah pengembangan jurusan yang pada akhirnya mengarah pada pendirian fakultas, (4) Perkembangan dunia industry yang mengarah pada industry kreatif memicu insan pendidikan untuk terlibat langsung. Industri kreatif juga sangat berkaitan dengan bidang keilmuan Komunikasi, (5) Perkembangan media mainstream dan new media yang mengubah lanskap media di Indonesia menuntut PT untuk menghasilkan lulusan yang lebih mumpuni dengan spesialisasi yang jelas.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi dan saran kepada pimpinan UPN -Veteran Yogyakarta untuk merealisasikan rencana pendirian Fakultas Komunikasi Kreatif, sesuai dengan rencana strategis yang telah dirumuskan. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung upaya penciptaan atmosfer kreatif, dan peningkatan mutu dosen yang menguasai ranah akademis dan praktis

DAFTAR PUSTAKA

Antariksa, Basuki. *Konsep ekonomi Kreatif: Peluang dan Tantangan Dalam Pembangunan Indonesia*.

Basuki, Heru. (2006). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Universitas Gunadarma

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group

DEPDIKNAS. (2008). *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan.

Jefkins, Frank. (2004). *Public Relations Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : LKis

Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*.

RI, Departemen Perdagangan. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015*. Jakarta: Departemen Perdagangan.

Rencana Strategis (Renstra) UPN "Veteran" Yogyakarta No. 332/UN62/X 2015

<http://dgi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/hasil-konvensi-pengembangan-ekonomi-kreatif1.pdf> akses 10 Agustus 2016.

KINERJA PENELITIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

¹Gogot Haryono dan ²Joko Susanto.

¹ Industrial Engineering Department, Industrial Engineering Faculty,

²Managemen Department, Economic and Business Faculty,

Universitas Pembangunan Nasional -Veteran|| Yogyakarta, DIY, Indonesia.

Jl. Babarsari 2 Yogyakarta 55281 (Kampus Unit 1) Telp. +62 274 485288, 488991

Email: gogotharyono53@gmail.com

Abstrak: Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa Universitas Pembangunan Nasional -Veteran|| Yogyakarta dapat mewujudkan sikap kemandirian dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan penelitian sampai tahun 2016 hingga dapat merubah menjadi Utama yang sebelumnya adalah Madya.

A. Latar Belakang

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa UPN -Veteran|| Yogyakarta dapat menjadi mandiri. UPN -Veteran|| Yogyakarta yang sebelumnya menjadi madya telah meningkat menjadi utama. Kata Madya berasal dari India (Sansekerta), bermakna tengah, dapat digunakan nama perusahaan, nama merek produk, nama tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan utama bermakna terbaik. Perusahaan atau Instansi yang paling baik dan unggul dari yang lainnya.

B. Teori

Dalam Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi (2013), menjelaskan bahwa Manajemen Penelitian menggambarkan kemampuan lembaga untuk mengelola kegiatan penelitian, mencakup adanya kelembagaan penjaminan mutu beserta kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu, meliputi *Rekrutmen Reviewer Internal*, *Desk Evaluasi Proposal*, *Seminar Pembahasan Proposal*, *Penetapan Pemenang*, *Kontrak Penelitian*, *Monitoring* dan *Evaluasi (Monev) Internal*, *Seminar Hasil Penelitian Internal*, *Pelaporan Hasil Penelitian*, *Tindak Lanjut Hasil Penelitian (Jurnal, HKI, TTG)*, *Kegiatan Pelatihan*, dan *Sistem Penghargaan /Reward*. Selain hal-hal yang terkait dengan sistem penjaminan mutu sebagaimana disebut diatas, manajemen penelitian juga mencakup data penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah, baik di tingkat internasional, nasional, dan regional. Penyelenggaraan forum ilmiah adalah forum pertemuan ilmiah yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam bentuk seminar, lokakarya, konferensi, dan *ekspose* hasil-hasil penelitian, dalam tingkat internasional, nasional atau regional. Batasan persyaratan forum tersebut antara lain: Forum ilmiah tingkat internasional: dihadiri peserta sekurangnya 50 orang, menggunakan bahasa resmi PBB, minimal diikuti oleh pembicara dan peserta dari 3 negara asing yang jumlahnya paling sedikit 20% dari seluruh peserta. Forum ilmiah tingkat nasional: peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi di luar propinsi perguruan tinggi penyelenggara. c. Forum ilmiah tingkat regional: dihadiri peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam satu propinsi. Data penyelenggaraan forum ilmiah meliputi nama kegiatan, unit pelaksana, mitra/sponsor, skala forum ilmiah (internasional, nasional, dan regional), waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. 4. Luaran Penelitian Luaran penelitian berupa publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, dan luaran penelitian lainnya. Publikasi ilmiah meliputi data artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak

terakreditasi (ber-ISSN) dengan batasan sebagai berikut. Jurnal Internasional adalah jurnal yang sudah terindeks secara internasional (Thomson Reuter, Scopus dan yang setara). Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN dan telah terakreditasi oleh Dikti atau LIPI. Jurnal Nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang telah memiliki ISSN namun belum terakreditasi. Data publikasi artikel pada jurnal terbit secara cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: NIDN, nama dosen, program studi, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia *on-line*). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama.

Dalam pengertian Riadi (2014), kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan serta sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya.

C. Metode Penelitian

Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pengumpulan data kami melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh berbagai informasi mengenai koperasi yang akan direvitalisasi.

D. Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil Penelitian dan Pengabdian hingga tahun 2016.

SKIM	2013	2014	2015	2016
PUPT	3	4	5	16
Fundamental	6	5	13	9
Hibah bersaing	16	23	32	33
Disertasi Doktor	2	2	0	3

Strategis Nasional	4	4	2	1
Jumlah	31	42	52	62
Jumlah Dana	1.614.500.000	2.410.000.000	3.584.000.000	4.469.500.000

Pada tahun 2013 jumlah dosen yang melakukan penelitian yakni terdapat 31 dosen, dengan rincian penelitian PUPT terdapat 3 dosen, fundamental 6 dosen, hibah bersaing 16 dosen, disertasi doktor 2 dosen dan strategis nasional terdapat 4 dosen, sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.614.500.000.

Pada tahun 2014, jumlah dosen yang mengikuti penelitian meningkat menjadi 42 dosen, dengan rincian PUPT 4 dosen, fundamental 5 dosen, hibah bersaing 23, disertasi doktor 22 dosen dan strategis nasional 4 dosen, sehingga mengeluarkan dana Rp. 2.410.000.000.

Pada tahun 2015, jumlah dosen yang melakukan penelitian meningkat menjadi 52 dosen, dengan rincian PUPT 5 dosen, fundamental meningkat menjadi 13 dosen, hibah bersaing menjadi 2 dosen, namun disertasi doktor kosong di tahun ini, dan strategis nasional pun menurun hanya 2 dosen saja, sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.584.000.000.

Pada tahun 2016, meningkat hingga 62 dosen, dengan rincian PUPT meningkat drastis menjadi 16 dosen, fundamental menurun menjadi 9 dosen, hibah bersaing menjadi 33 dosen, disertasi doktor menjadi 3 dosen, serta strategis nasional hanya 1 dosen, sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp. 4.469.500.000.

PENGABDIAN

SKIM	2013	2014	2015	2016
IbK	1	1	0	1
IbM	7	10	9	11
IbPE	0	1	2	1
IbW	3	3	3	0
IbW CSR	0	0	0	1
KKN PPM	2	2	3	0
Jumlah	13	17	17	14
Jumlah Dana	820.500.000	1.095.060.000	1.126.000.000	743.800.000

Pada tahun 2013, SKIM Pengabdian terdapat 13 dosen dengan rincian IbK terdapat 1 dosen, IbM terdapat 7 dosen, IbW 3 dosen dan KKN PPM 2 dosen, sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp. 820.500.000.

Pada tahun 2014, terdapat 17 dosen yang melakukan Pengabdian, dengan rincian IbK 1 dosen, IbM 10 dosen, IbPE 1 dosen, IbW 3 dosen dan KKN PPM 2 dosen sehingga mengeluarkan dana sebesar 1.095.060.000.

Pada tahun 2015, terdapat 17 dosen pula yang melakukan Pengabdian, dengan rincian IbM 9 dosen IbPE 2 dosen, IbW 3 dosen, dan KKN PPM 3 dosen, sehingga mengeluarkan dana sebesar 1.126.000.000.

Pada tahun 2016, terjadi penurunan karena hanya terdapat 14 dosen yang melakukan Pengabdian, dengan rincian IbK 1 dosen, IbM meningkat menjadi 11 dosen, IbPE 1 dosen dan IbW CSR 1 dosen sehingga mengeluarkan dana sebesar 743.800.000.

PENELITIAN INTERNAL 2016

SKIM	Jumlah Judul	@	Jumlah
Penelitian Terapan	25	17.500.000	437.500.000
Penelitian Dasar	20	15.000.000	300.000.000
Penelitian Kluster	12	30.000.000	360.000.000
Penelitian Kelembagaan	10	10.000.000	100.000.000
Bantuan TA/Skripsi Mahasiswa	60	3.000.000	180.000.000
Jumlah Dana			1.377.500.000

Dalam melakukan penelitian internal 2016, mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.377.500.000 dengan rincian yakni dalam melakukan penelitian terapan, terdapat 25 judul penelitian yang masing-masing memerlukan dana Rp. 17.500.000 sehingga menjadi Rp. 437.500.000.

Dalam penelitian dasar, terdapat 20 judul penelitian yang masing-masing memerlukan dana sebesar Rp. 15.000.000 sehingga menjadi Rp. 300.000.000.

Dalam penelitian kluster, terdapat 12 penelitian yang masing-masing memerlukan dana sebesar Rp. 30.000.000 sehingga menjadi Rp. 360.000.000.

Dalam penelitian kelembagaan, terdapat 10 judul penelitian yang masing-masing memerlukan dana sebesar Rp. 10.000.000 sehingga menjadi Rp. 100.000.000.

Dalam melakukan bantuan TA/Skripsi mahasiswa yakni terdapat 60 judul yang masing-masing memerlukan dana sebesar Rp. 3.000.000 sehingga menjadi Rp. 180.000.000.

HKI	2016	
Hak Cipta	23	
Paten	4	(dalam proses)
	2	(diterima/ <i>granted</i>)

Dalam penelitian HKI pada tahun 2016 terdapat 23 hak cipta. Terdapat 4 paten yang sedang dalam proses, dan 2 sudah diteriam/*granted*.

E. Kesimpulan dan Saran

UPN -Veteran Yogyakarta dapat mewujudkan kemandirian karena telah tercapainya peningkatan penelitian dan pengabdian hingga tahun ini. Berdasarkan hasil penelitian kinerja Penelitian Perguruan Tinggi tahun 2014-2015, LPPM UPN -Veteran Yogyakarta masuk dalam kelompok Mandiri urutan 22 dari Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, maka memerlukan dana penelitian internal yang lebih besar sebagai pendamping.

Daftar Pustaka

Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi. (2013). Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta

Riadi, Muchlisin. (2014). Pengertian, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja. <<http://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-Kinerja.html>> (diakses pada tanggal 15 September 2016).

ANALISIS DESTINASI KOMPETITIF KLUSTER KERAJINAN KAJIGELEM BANTUL

Sigit Haryono, Ratna Rostika, Tri Wahyuningsih

Abstract

Inherited resources, created resources, supporting resources, demand conditions, destination management and situational conditions are all factors that shape Competitive Destinations. High competitive destinations will increase the competitiveness that led to the prosperity of society. Inherited resources craft clusters Kajigelem face the challenges of the availability of quality raw materials. The availability of adequate infrastructure is important to improve the competitiveness of this cluster. While demand conditions are seen from awareness, perception and preference have high competitiveness, particularly for products Kasongan. However, efforts need to be strengthened for other craft industries. Therefore we need a good destination management, in the form of government intervention to provide training according to the needs of the craftsman, and the provision of facilities in the form of events and various facilities to improve the performance of SMEs in the midst of a relatively stable situational conditions.

Abstraksi

Sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi situasional merupakan faktor-faktor yang membentuk Destinasi Kompetitif. Destinasi kompetitif yang tinggi akan meningkatkan daya saing yang berujung pada kemakmuran masyarakat. Sumberdaya asal kluster kerajinan Kajigelem menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan daya saing kluster ini. Sementara kondisi permintaan yang dilihat dari *awareness*, *perception* dan *preference* memiliki daya saing yang tinggi, khususnya untuk produk Kasongan. Namun demikian perlu usaha yang keras untuk industri kerajinan yang lain. Oleh karena itu diperlukan manajemen destinasi yang baik, berupa campur tangan pemerintah untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan para perajin, dan penyediaan fasilitas berupa *event* dan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kinerja UKM tersebut di tengah kondisi situasional yang relatif stabil.

Pendahuluan

Pada masa kini perkembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan keunikan dan keindahan budaya serta keindahan alam saja tetapi juga tergantung pada industri yang mendukung. Industri yang mendukung sektor pariwisata ini salah satunya adalah industri kerajinan. Industri kerajinan mendukung sektor pariwisata karena industri ini yang mensuplai cinderamata atau souvenir yang akan dibawa pulang oleh para wisatawan.

Salah satu industri kerajinan yang berkembang adalah industri kerajinan yang ada di Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi percontohan bagi tumbuhnya industri kreatif. Perkembangan industri kreatif di daerah ini tumbuh pesat seiring dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata di daerah ini. Tabel 1 menunjukkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan semakin banyak dari tahun ke tahun. Data tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan adalah sebesar 1.311.009 orang, dengan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 2 milyar lebih. Pada tahun berikutnya yaitu 2009 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1.439.260 dengan kontribusi ke PAD sebanyak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Data terakhir tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul adalah

sebanyak 2.153.404 dengan kenaikan kontribusi ke PAD sebanyak 450% dibanding lima tahun sebelumnya (2008).

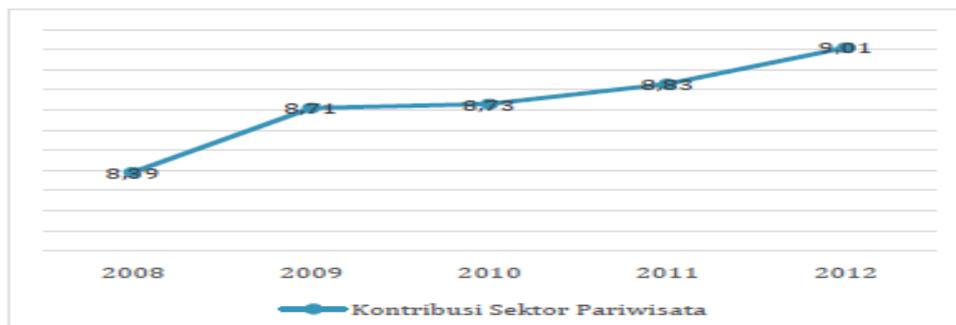
Tabel 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi PAD

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2008	1.311.009	2.144.605.950,00
2009	1.439.260	4.361.159.125,00
2010	1.496.626	4.596.019.826,00
2011	1.740.417	5.289.407.718,00
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.153.404	9.120.764.368,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

LAKIP Kabupaten Bantul, 2013

Kenaikan jumlah wisatawan yang jelas berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dijelaskan melalui Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sumber: LAKIP Kabupaten Bantul 2013.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat jelas bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada PDRB yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sektor pariwisata memberikan kontribusi ke PDRB sebanyak 8,05%. Data terakhir pada tahun 2012 sektor pariwisata memberikan kontribusi ke PDRB sebesar 9,01.

Kenaikan jumlah wisatawan yang berakibat pada peningkatan PAD membawa efek pada pertumbuhan industri pendukung. Kerajinan tangan sebagai industri pendukung sektor pariwisata tidak dapat dielakkan juga menikmati pertumbuhan yang tinggi ini. Bantul sebagai salah satu Kabupaten yang berhasil menggiatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan tidak tinggal diam untuk memanfaatkan momentum ini dengan membuat suatu kebijakan *One Product One Village (OVOP)*. Pembentukan kluster kerajinan ini bertujuan agar tiap klasternya memiliki daya saing yang tinggi. Dengan memiliki daya saing maka industri ini akan mampu memberikan kontribusi yang tinggi pada PAD.

UKM Kerajinan Kabupaten Bantul telah membuktikan keberhasilannya dengan tidak hanya menjadi *supporting industry* bagi sektor pariwisata tetapi juga mampu memberikan kontribusi sebesar 80% dari ekspor UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (Agrofarm, 2014). Namun demikian, meskipun memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekspor kerajinan DIY industri ini masih lemah dalam persaingan global. Tantangan UKM kerajinan ini adalah lemahnya inovasi dan pemasaran. Pada industri kreatif, inovasi menjadi kata kunci

yang mutlak untuk memiliki daya saing. Inovasi produk yang lemah akan berakibat pada pemasaran yang kurang maksimal. Selera dan preferensi pelanggan yang selalu berubah mengikuti jaman mutlak diperlakukan inovasi sebagai solusi.

Teori Destinasi Kompetitif yang dikemukakan oleh Ritchie and Crouch (2003) serta Dwyer and Kim (2003) menyatakan bahwa daya saing akan terbentuk melalui sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, strategi persaingan, dan globalisasi. Destinasi Kompetitif Kajigelem yang merupakan kluster kerajinan yang berlokasi di Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi berarti meliputi identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut untuk melihat daya saing kluster tersebut.

Tinjauan Pustaka

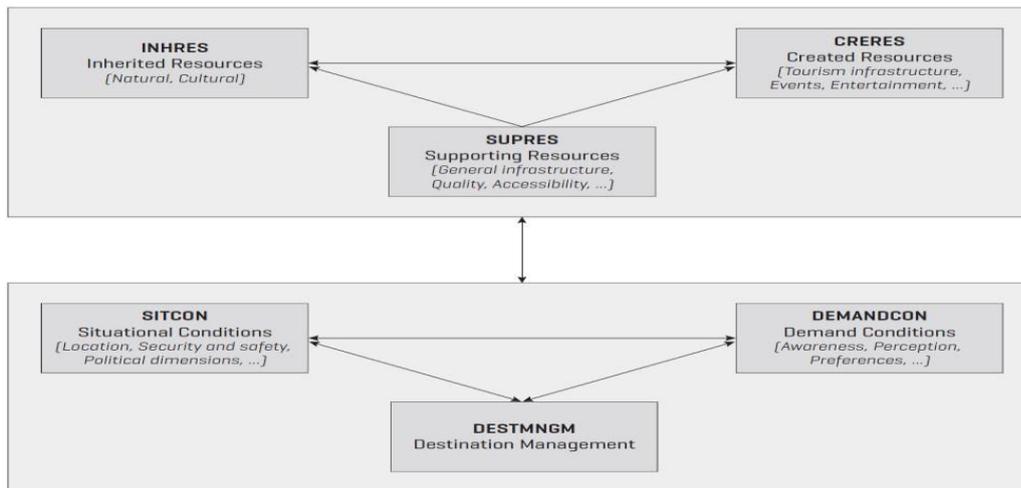
Pengertian *Destination Competitiveness* (Destinasi Kompetitif)

Ada beberapa definisi tentang destinasi kompetitif. Crouch and Ritchie (1999) mendefinisikan destinasi kompetitif dengan pendekatan ekonomi kemakmuran. Pendekatan ini secara khusus berlaku untuk destinasi kompetitif tingkat nasional. Hal ini dianggap wajar untuk memeriksa destinasi kompetitif yang berfokus pada ekonomi kemakmuran, karena bangsa-bangsa yang menjadi pemain di pasar pariwisata internasional bertujuan mendorong kesejahteraan ekonomi penduduk, serta kesempatan untuk mempromosikan negara sebagai tempat untuk hidup, perdagangan, berinvestasi, melakukan bisnis dan sebagainya (Dwyer & Kim, 2003).

Hassan (2000) mendefinisikan destinasi kompetitif sebagai kemampuan untuk menciptakan dan mengintegrasikan nilai tambah produk dengan tetap menjaga posisi pasar relatif terhadap competitor. Dwyer dan Kim (2003) mengusulkan bahwa destinasi kompetitif adalah kemampuan suatu destinasi untuk memberikan barang-barang dan jasa yang lebih baik dibanding destinasi lain (Dwyer & Kim, 2003). Sedangkan Ritchie and Crouch menyatakan destinasi kompetitif adalah kemampuan satu negara untuk menciptakan nilai tambah dan dengan demikian meningkatkan kekayaan nasional dengan mengelola aset dan proses, daya tarik, agresivitas dan kedekatan dan dengan mengintegrasikan hubungan ini dalam model ekonomi dan sosial yang memperhitungkan modal alam tujuan dan pelestariannya untuk generasi mendatang (Ritchie, Crouch, 2003).

Model *Destination Competitiveness* (Destinasi Kompetitif)

Model destinasi kompetitif dikemukakan oleh Dwyer and Kim (2003). Dwyer mengemukakan bahwa destinasi kompetitif terbentuk oleh enam faktor yaitu sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi permintaan. Gambar 2 merupakan Model Destinasi Kompetitif yang dikembangkan oleh Dwyer and Kim (2003).



Gambar 2: Model *Destination Competitiveness*

Sumberdaya asal adalah sumberdaya alami dalam destinasi wisata seperti keadaan alam dan budaya (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Sumberdaya buatan adalah sumberdaya yang dibuat oleh manusia dengan sengaja (infrastruktur, tempat belanja, festival, event) (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Sumberdaya pendukung adalah sumberdaya yang melengkapi industri utama (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Manajemen destinasi adalah pengelolaan untuk meningkatkan daya tarik sumberdaya, efektivitas dan kualitas klaster, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menghadapi persaingan (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Faktor permintaan adalah permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang ditawarkan (Crouch and Ritchie (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Kondisi situasional adalah lokasi, keamanan, lingkungan makro dan mikro, serta persaingan harga (Omerzel-Gomezelj and Mihalic, 2008).

Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah para perajin yang ada di Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi (Kajigelem) Kabupaten Bantul. Teknik sampling dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) kepada para perajin. Teknik FGD ini dilakukan dengan alasan bahwa masalah yang diteliti ini tidak dapat dipahami dengan metode survai, selain itu FGD dilakukan adalah untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat, dan FGD merupakan metode yang cocok bagi permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dan melibatkan masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kluster kerajinan Kajigelem Kabupaten Bantul dengan pendekatan destinasi kompetitif yang meliputi kondisi-kondisi sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi situasional.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kluster keajinan Kajigelem Bantul maka dapat dieoleh data berkaitan dengan Destinasi Kompetitif yang meliputi faktor-faktor sumberdaya asal, sumberdaya buatan, sumberdaya pendukung, kondisi permintaan, manajemen destinasi, dan kondisi permintaan adalah sebagai berikut:

Sumberdaya Asal

Sumberdaya asal menurut Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012) adalah sumberdaya alami dalam destinasi wisata seperti keadaan alam dan budaya. Kluster

kerajinan yang ada di Kasongan Jipangan Gendeng dan Lemahdadi mengelola sumberdaya alam untuk bahan baku yang berasal dari lingkungan sekitar. Bahan baku berupa tanah untuk kerajinan keramik dan bambu untuk kerajinan kipas pada awalnya berasal dari daerah asal. Namun untuk saat ini kondisinya sudah tidak memungkinkan mereka untuk mengandalkan sumberdaya asal. Hal ini karena ketersediaan bahan baku berupa tanah liat sudah tidak sepenuhnya berasal dari Kasongan. Demikian juga dengan bambu yang dulunya bahan baku berasal dari daerah asal untuk saat ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa Kluster kerajinan di Kajigelem Bantul ini menghadapi ancaman tentang ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku ini akan mempengaruhi kelancaran produksi dan mempengaruhi kualitas produk. Pada masa lalu tanah liat Kasongan yang membuat produk keramik Kasongan mempunyai kualitas yang baik. Demikian juga dengan bambu yang baik yang semakin sulit untuk ditemukan.

Sumberdaya Buatan

Menurut Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012), sumberdaya buatan adalah sumberdaya yang dibuat oleh manusia dengan sengaja (contohnya infrastruktur, tempat belanja, festival, event). Kluster kerajinan Kajigelem memiliki didukung oleh infrastruktur berupa jalan yang memadai untuk lalu lintas distribusi bahan baku dari daerah asal bahan baku ke lokasi produksi, maupun distribusi dari lokasi produksi untuk membawa produk jadi ke pasar. Namun demikian sumberdaya buatan berupa tempat belanja atau showroom untuk memamerkan hasil kerajinan masih perlu ditingkatkan jumlah maupun kualitas venue. Showroom yang ada sekarang masih menyatu dengan rumah para perajin tinggal sehingga masih terkesan sederhana.

Salah satu sumberdaya buatan lain yang mempengaruhi destinasi kompetitif adalah event berupa pameran. Pameran diadakan sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran. Pameran bertujuan untuk memberitahu keberadaan produk kerajinan dan sebagai alat branding suatu produk. Pameran diadakan secara berkala untuk memamerkan produk-produk kerajinan Kajigelem baik di Yogyakarta maupun luar daerah. Untuk mengkomunikasikan produk kerajinan dalam rangka mendapatkan buyer kegiatan pameran yang dilakukan masih kurang dari yang diharapkan. Setiap perajin untuk memperoleh kesempatan untuk mengikuti pameran lokal masih secara bergilir. Sedangkan pameran di luar daerah masih jarang diikuti.

Sumberdaya Pendukung

Sumberdaya pendukung adalah sumberdaya yang melengkapi sumberdaya utama (Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Faktor pendukung industri kerajinan Kajigelem ini adalah sektor pariwisata. Pertumbuhan wisatawan yang ada di Kabupaten Bantul (Tabel 1) membawa efek pada tingkat pertumbuhan industri kerajinan ini. Kerajinan merupakan faktor pendukung sektor pariwisata demikian juga bahwa pariwisata merupakan *supporting industry* bagi industri kerajinan.

Manajemen Destinasi

Manajemen destinasi adalah pengelolaan untuk meningkatkan daya tarik sumberdaya, efektivitas dan kualitas klaster, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menghadapi persaingan (Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), Kim (2012)). Manajemen destinasi terkait dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja UKM Kerajinan di Kajigelem ini. Usaha-usaha yang dilakukan dapat berupa pelatihan, pendampingan maupun insentif yang diberikan dalam bentuk modal maupun pengurangan pajak.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja UKM Kerajinan Kajigelem. Namun pelatihan yang dilakukan baru sebatas pelatihan yang sifatnya menjalankan program yang bersifat top down. UKM kerajinan membutuhkan

pelatihan yang memang dibutuhkan oleh para perajin yang bersifat bottom up. Jadi pelatihan yang diselenggarakan harus berawal dari suatu analisis kebutuhan. Di samping kualitas pelatihan, kuantitas pelatihan pun juga dibutuhkan lebih banyak karena selama ini pelatihan yang diselenggarakan belum dapat menjangkau seluruh perajin yang ada.

Kondisi Permintaan

Kondisi permintaan menurut Ritchie and Crouch (2003), Dwyer and Kim (2003), dan Kim (2012)) adalah permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Kondisi permintaan menurut Tanja *et al.*, (2011) meliputi *awareness*, *perception* dan *preference*. *Awareness* berkaitan dengan tingkat perhatian atau popularitas dari produk kerajinan UKM Kajigelem. *Perception* berkaitan dengan persepsi pasar terhadap produk kerajinan UKM Kajigelem. Sedangkan *preference* berkaitan dengan pilihan yang bersifat afektif bahwa produk kerajinan Kajigelem lebih baik dibandingkan produk yang lain, sehingga menjadi pilihan.

Produk kerajinan berupa keramik dari Kasongan memiliki popularitas yang tinggi. Setiap kali menyebut produk keramik maka yang teringat pertama adalah Kasongan. Fakta ini membuktikan bahwa produk Kasongan memiliki tingkat *awareness* yang tinggi. Dilihat dari persepsi pasar, produk kerajinan keramik Kasongan dipersepsikan sebagai produk kerajinan keramik yang bernilai tinggi. Tingkat *awareness* yang tinggi, ditambah dengan *perceive quality* yang baik maka membuat produk keramik Kasongan menjadi *preference* dalam arti bahwa pasar lebih menyukai produk keramik Kasongan ini dibandingkan produk keramik yang dihasilkan di daerah lain. Namun demikian untuk produk kerajinan yang lain masih perlu dikembangkan mengingat produk yang dibuat hanya berupa *mass product*, bukan suatu produk yang mempunyai nilai tinggi.

Kondisi Situasional

Kondisi situasional adalah lokasi, keamanan, lingkungan makro dan mikro, serta persaingan harga (Omerzel-Gomezelj and Mihalic, 2008). Lokasi mempunyai peran besar terhadap tingkat keberhasilan industri karena lokasi berkaitan dengan keterjangkauan. Keterjangkauan bahan baku dari lokasi produksi maupun keterjangkauan pasar. Demikian juga dengan faktor keamanan, lingkungan makro berupa situasi politik dan ekonomi, maupun lingkungan mikro berupa *presser group* maupun kreditur, serta persaingan harga dari produsen lain yang menawarkan barang sejenis.

UKM Kajigelem terletak pada lokasi yang strategis atau mudah dijangkau. Faktor letak ini membuat para perajin tidak kesulitan memperoleh distribusi bahan baku maupun mendistribusikan hasil kerajinan mereka. Kondisi keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang stabil ditunjang dengan lingkungan makro dan mikro yang relatif stabil membuat kinerja UKM Kajigelem relatif stabil.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi yang telah dipaparkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Sumberdaya asal Kajigelem masih relatif baik meskipun mulai terjadi ketergantungan sumberdaya dari daerah lain. Kebutuhan mendesak yang harus dilakukan pihak yang berwenang untuk memikirkan ketersediaan pasokan bahan baku yang berkualitas. Infrastruktur yang ada di Kabupaten Bantul sangat mendukung perkembangan UKM, namun yang perlu diperhatikan agar sumberdaya buatan memiliki daya saing yang tinggi adalah kualitas maupun kuantitas event yang perlu ditingkatkan. Peningkatan event berupa pameran perlu dilakukan untuk meningkatkan *awareness* agar Kajigelem tidak hanya terkenal karena Kasongan tetapi juga produk kerajinan lainnya.

Sumberdaya pendukung Kajigelem memiliki daya saing yang tinggi karena pertumbuhan pariwisata yang tinggi. Permasalahan yang muncul adalah pada manajemen destinasi yang masih perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan pelatihan yang harus disesuaikan dengan

kebutuhan para perajin. Kondisi permintaan UKM yang berada di Kajigelem dilihat dari awareness, perception dan preference khususnya untuk produk kerajinan Kasongan memiliki daya saing yang tinggi. Namun untuk produk kerajinan lainnya masih perlu usaha keras untuk meningkatkannya. Kondisi situasional kluster Kajigelem memiliki daya saing yang tinggi yang dapat dilihat pada kondisi keamanan, lingkungan makro maupun mikro yang relatif stabil.

Daftar Pustaka

- Agrofarm, 2014, IKM Bantul diharapkan mampu bersaing di asean economic community 2015, *Agrofarm*, April 2014, diakses dari <http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian469/ikm-bantuldiharapkan-mampu-bersaing-di-asean-economic-community-2015/#.U1tCWVfi-8A>, April 2014.
- Armenski Tanja, Armenski,, Marković Vladimir, Davidović Nemanja, Jovanović Tamara. **2011**, Integrated Model of Destination Competitiveness, *Geographica Pannonica*, Volume 15, Issue 2, 58-69
- Crouch, G. I., and B. Ritchie J.R. 1999. Tourism, competitiveness and societal prosperity. *Journal of Business Research* 44 (3): 137–152.
- Dwyer, L., and C. Kim. 2003. Destination competitiveness: Determinants and indicators. *Current Issues in Tourism* 6 (5): 369–414.
- Hassan, S. S. 2000. Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. *Journal of Travel Research* 38 (3): 239–245.
- Kim, N, 2012, *Tourism destination competitiveness, globalization, and strategic development from a development economics perspective*, PhD Dissertation in Recreation, Sport and Tourism University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul 2013
- Omerzel- Gomezelj, D., Mihalic, T. 2008. Destination competitiveness-Applying different mod-els, the case of Slovenia. *Tourism Management* 29 (2), 294-307.
- Ritchie, JR, & Crouch, GI, 2003, *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*, CABI Publishing, Wallingford, UK.

PERBEDAAN KEMAMPUAN INOVASI UKM PEREMPUAN DI SEKTOR INFORMAL SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERIAN PROGRAM PENDAMPINGAN

(Studi pada UKM Perempuan di Bisnis Sektor Informal di DIY)

Sauptika Kancana dan Puji Lestari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Yogyakarta

s_kancana@yahoo.com

pujilestariupn@gmail.com

Abstract

Now businesses in the informal sector are required to be able to survive in the midst of competition with companies that are already established. The ability to absorb knowledge and skills as the main weapon to be able to compete in the innovation of products quality. This capability can be done with a variety of training models, one model of training provided to SMEs in the informal sector is to provide assistance. This research is a type of quantitative research, using different test analysis by using One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test to determine differences in treatment before and after the Mentoring program. Data obtained from respondents who totaled 40 people, using a sampling method is based on the probability that existing clusters in the district of DIY. The results of the analysis and discussion of data is known, P value ($0.025 < 0.05$), then H_0 is rejected, it means that there is a difference of innovation in informal sector business which are owned by women before and after mentoring program

Key words: innovation capability, mentoring program

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era MEA sudah diambang pintu. Usaha sektor informal merupakan salah satu penyokong kekuatan ekonomi masyarakat. Sektor informal mampu menggerakkan serta meningkatkan pendapatan khususnya bagi golongan ekonomi lemah. Hasil penelitian Hibah Bersaing tahun ke-1 telah teridentifikasi beberapa kelompok UKM Perempuan pada sektor informal di DIY yang berasal dari 5 (lima) wilayah, yaitu Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul dan Kotamadya. Hasil identifikasi jenis usaha secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu : usaha konveksi, makanan, jasa dan ternak. Dari pengumpulan data dari keempat kelompok tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dirasakan oleh UKM di sektor informal yang dimiliki oleh para perempuan, yaitu:

- i. Kurangnya SDM
- ii. Manajemen Keuangan
- iii. Branding
- iv. Kompetitor
- v. *Moody*
- vi. Bahan-bahan dasar yang terkadang susah diperoleh
- vii. Tempat (Lokasi bisnis)
- viii. Pengelolaan Limbah
- ix. Keamanan

1.1 Masalah Penelitian

UKM perempuan di sektor informal selama ini belum didukung sebuah model atau arah yang jelas dalam upaya pemberdayaannya. Sementara ini UKM perempuan disektor informal berkembang dan berjalan apa adanya dan belum ada strategi dan manajemen yang baik. Pada tahun ke-2 ini perlu dilakukan ujicoba model temuan tahun ke-1 tentang Model Pemberdayaan UKM perempuan disektor informal di DI Yogyakarta. Pada uji model di tahun ke 2 dua ini dilakukan dengan cara membandingkan metode pelatihan dengan cara pendampingan sebelum dan sesudah pendampingan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tahun ke-2 dilakukan untuk mendapatkan metode pelatihan yang tepat bagi model Pemberdayaan UKM perempuan disektor informal di DI Yogyakarta.

1.3 Urgensi penelitian.

Penelitian di tahun ke dua ini perlu dilakukan untuk mendapatkan model yang tepat sesuai dengan karakter perempuan yang bergerak di bisnis sektor informal sehingga produktifitas usaha yang mereka jalankan bisa berhasil dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Strategi Inovasi

Schumpeter, dalam Avermaete, et.all, (2003) mendefinisikan inovasi sebagai "1) pengenalan produk baru; 2) pengenalan metode produksi baru; 3) pembukaan pasar baru; 4) pembukaan sumber pasokan baru; 5) menjalankan organisasi yang baru dalam suatu industry. Sementara Hemert et,all, (2013) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengeksploitasi pengetahuan merupakan kunci utama dalam mencapai inovasi yang berhasil. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat ahli lain Chesbrough, H. (2006) bahwa inovasi terbuka (*open innovation*) yaitu bagaimana perusahaan mengelola pengetahuan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk mengembangkan inovasi perusahaan serta untuk memperluas pasar hasil dari inovasi yang sudah dilakukan di saat para pemain usaha harus memiliki wawasan yang lebih baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya agar mampu melakukan inovasi yang berhasil. Namun demikian kinerja inovasi yang rendah tidak akan memberikan nilai komersial yang tinggi, hal ini berbeda dengan kinerja inovasi yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pada perusahaan, hal ini biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan di sector jasa di kota dengan siklus pada tahap mature (puncak) Ferreira, J J.M, et.all (2015).

Pemberdayaan UKM Perempuan dan Sektor Informal

Spring (2009) sebagaimana dikuti oleh kancana (2015) menyatakan Usaha di sektor Informal biasanya mengacu pada kegiatan bisnis yang tidak terdaftar, tidak diatur, dan tidak membayar pajak, yang termasuk jenis usaha ini antara lain perusahaan jasa, kegiatan produksi rumahan, dan usaha kaki lima. Sebaliknya, sektor formal termasuk suatu kegiatan usaha yang berpajak, terdaftar, dan diatur bisnis. Usaha di sektor informal cenderung didominasi oleh perempuan khususnya di negara-negara sedang berkembang (ibid). Produktifitas usaha yang dimiliki perempuan di sektor informal merupakan masalah utama yang sering dihadapi. Kurangnya ketrampilan dan pengetahuan di bidang usaha yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Chen (2012) bahwa pengusaha di sektor informal membutuhkan aset produktif, teknis dan keterampilan bisnis, dan layanan infrastruktur untuk lebih mampu bersaing di pasar.

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Terdapat perbedaan tingkat kemampuan Inovasi sebelum dan sesudah diberikan program Pendampingan”

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, karena data yang terkumpul bersifat angka-angka yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden dimana jawabannya direkap dalam tabulasi sederhana untuk kemudian akan diolah dengan metode statistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di 5 (lima) Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, dimana masing-masing wilayah terdapat perwakilan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perempuan yang memiliki usaha di sektor informal di wilayah Yogyakarta. Sedangkan teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara *cluster sampling*, yaitu dengan perwakilan perempuan yang mempunyai usaha kecil di sektor informal dari beberapa wilayah yang tersebar di Propinsi DI. Yogyakarta yang berjumlah 40 orang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kuesioner dengan menggunakan skala Likert 5 (lima), kuesioner diberikan kepada perempuan pemilik usaha di sektor informal di DIY.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis uji beda dengan menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Untuk melihat adanya perbedaan kemampuan inovasi sebelum dan sesudah diberikan program pendampingan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dimana pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas signifikansinya. Hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Nilai
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,8075
	Std. Deviation	,61331
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,095
	Negative	-,114

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Kolmogorov-Smirnov Z	1,019
Asymp. Sig. (2-tailed)	,250

Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya varian data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah varian data dari penelitian ini sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t test. Jika nilai signifikansi <0,05, maka dikatakan bahwa varian data dalam penelitian ini tidak sama. Jika signifikansi >0,05, maka dikatakan bahwa varian data dalam penelitian ini sama.

Test of Homogeneity of Variances

Nilai

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,768	1	78	,188

Berdasarkan hasil perhitungan dengan spss dapat diketahui bahwa nilai signifikansi varian data dalam penelitian ini mempunyai varian yang sama karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,188>0,05).

Independent Sample T Test

Uji Independent Sample t-Test

Group Statistics

Inovasi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai Sebelum Pendampingan	40	3,6550	,68835	,10884
Setelah Pendampingan	40	3,9600	,49032	,07753

Tabel 3.57
Hasil Independent Sample T-Test

		Motivasi Kerja
		Equal variances assumed
Levene's test for	F	1,768
Equality of Variance	Sig.	,188
t.test for equality of	t	-2,282
Means	df	78
	Sig. (2-tailed)	,025
	Mean	-,30500

Difference	
Std.	,13363
Error Difference	
95% Confidence lateral Lower	-,57103
Of the	
Difference Upper	-,03897

Sumber: data primer diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 3.57, P value ($0,025 < 0,05$) maka H_0 ditolak, artinya bahwa ada perbedaan inovasi ukm perempuan sebelum dan sesudah pendampingan. Dapat dilihat pada tabel 3.56 *Group Statistics* terlihat rata-rata (mean) untuk inovasi ukm perempuan sebelum pendampingan adalah 3,6550 dan untuk inovasi ukm perempuan setelah pendampingan 3,9600 artinya bahwa rata-rata inovasi ukm perempuan setelah pendampingan lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi ukm perempuan sebelum pendampingan.

Jika nilai t_{hitung} positif, berarti bahwa rata-rata inovasi ukm perempuan sebelum pendampingan lebih tinggi daripada setelah pendampingan, jika nilai t_{hitung} negatif maka inovasi ukm perempuan lebih rendah daripada setelah pendampingan. Dapat dilihat pada tabel 3.57, bahwa nilai t_{hitung} adalah negatif yang berarti inovasi ukm perempuan sebelum pendampingan lebih rendah daripada setelah pendampingan.

3.6. Hasil Uji Hipotesis

3.6.1 Independent Sample t-Test

Tabel 3.58
Hasil Perbedaan Motivasi Kerja

Motivasi Kerja	P-Value	Sign.	Keterangan
Sebelum Pendampingan dan Setelah Pendampingan	0,025	0,05	H_0 Ditolak

Sumber: data primer diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 3.58, dapat dilihat secara keseluruhan hasil hipotesis perbedaan inovasi ukm perempuan di DIY sebelum dan sesudah pendampingan yaitu dengan hasil signifikansi $< \alpha$ ($0,05 < 0,021$) hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya ada perbedaan inovasi ukm perempuan sebelum dan sesudah pendampingan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan inovasi ukm perempuan sebelum dan sesudah pendampingan. Rata-rata (mean) untuk inovasi ukm perempuan sebelum pendampingan adalah 3,6550 dan untuk inovasi ukm perempuan setelah pendampingan 3,9600 artinya bahwa rata-rata inovasi ukm perempuan setelah pendampingan lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi ukm perempuan sebelum pendampingan. Ini berarti para perempuan pemilik UKM perempuan di sektor informal menjadi lebih produktif dan inovatif setelah mendapatkan program pendampingan. Hal ini beralasan mengingat rata-rata sebagian besar dari mereka berpendidikan SLTA ke bawah dimana tingkat kemampuan kognitif mereka lebih bisa mencerna apabila diberikan program pendampingan dalam menjalankan usaha mereka dibandingkan dengan program pelatihan yang lain.

6. REFERENSI

Avermaete, T.; Viaene, J.; Morgan, E J.; Crawford, N. (2003). "Determinants of innovation in small food firms", *European Journal of Innovation Management*, Vol. 6 Iss: 1, pp.8 - 17

Chen, M. A, (2012) *The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies*. WIEGO Working Paper No, 1 August 2012

Chesbrough, H. (2006). "Open Business Models: How to thrive in the New Innovation Landscape".

Harvard Business School Press, Boston.

- Ferreira, J J M., Fernandes, C I., Alves, H., Raposo, M L. (2015). "Drivers of innovation strategies: Testing the Tidd and Bessant (2009) model" *Journal of Business Research* JBR-08278; No of Pages 9.
- Hemert, P V., Nijkamp, P., Masurel, E. (2013), "From Innovation To Commercialization Through Networks And Agglomerations: Analysis Of Sources Of Innovation, Innovation Capabilities And Performance Of Dutch Smes, *SPECIAL ISSUE PAPER*, Open Access At Springerlink.Com Ann Reg Sci (2013) 50:425–452
- Kancana & Lestari; (2015) *Proceeding: Asean Forum on Business Education*
- Spring, A; (2009) *African Women in the Entrepreneurial Landscape: Reconsidering the Formal and Informal Sectors*, *Journal of African Business*, 10:11–30

CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Oleh:

Sadeli

sadelisahadati@gmail.com

Hastho Joko Nur Utomo

hasthojn@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine and explain the effect of Corporate Governance and Intellectual Capital on Corporate Performance in the company based on knowledge and technology that go public in Indonesia. The sampling technique is purposive sampling. Generalize Structural Component Analysis (GSCA) is used to analyze data. The result of the study shows that Corporate Governance significantly effect on Intellectual Capital and Corporate Performance. Intellectual Capital significantly effect on Corporate Performance.

Key words: Corporate Governance, Intellectual Capital, Corporate Performance

1.1 Latar Belakang

Pasar bebas yang melanda dunia menjadikan tingkat persaingan semakin ketat. Aliran Barang, Jasa, Modal, bebas keluar masuk antar Negara, tidak terkecuali dengan Indonesia dengan pasar bebas ASEAN. Pemberlakuan pasar bebas ASEAN yang sudah mulai berlaku pada awal 2016 akan semakin meningkatkan persaingan yang berdampak pada kinerja perusahaan di Indonesia terutama pada industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, tidak terlepas dari peran manajer perusahaan dalam menjalankan roda perusahaan sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif terhadap pesaing. Untuk itu *Corporate Governance* mempunyai peran penting sebagai fungsi pengawasan agar manajer menjalankan perusahaan sesuai tugasnya.

Daya saing perusahaan terutama perusahaan dalam industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi terletak pada *intellectual Capital* (IC). Kebutuhan dan manfaat dari IC untuk perusahaan dalam sektor pengetahuan, termasuk teknologi tinggi dan industri jasa cukup besar; karenanya, mereka cenderung untuk berinvestasi secara substansial dalam IC. Fakta ini membuat teknologi tinggi dan layanan sektor industri yang tepat dan menarik untuk penelitian IC (Appuhami, 2015). *Intellectual Capital* akan mendorong keunggulan kompetitif perusahaan (Kamukama *et al.*, 2011) dan menjadi faktor kuat bagi perusahaan dalam meningkatkan kompetensi kompetitif perusahaan dalam mencapai kesuksesan (Wang, 2008). *Intellectual Capital* merupakan Kunci keunggulan kompetitif, karena *Intellectual Capital* sebagai modal yang langka, unik dan tidak mudah untuk ditiru, oleh sebab itu maka *Intellectual Capital* perlu selalu ditingkatkan. Kualitas *Intellectual Capital* sebagai asset strategis terletak pada hubungan potensial antara *Intellectual Capital* dengan Kinerja Perusahaan (Kommenic, 2012).

Penerapan mekanisme *Corporate Governance* diyakini oleh sejumlah peneliti mampu meningkatkan *Kinerja Perusahaan* (Mollah *et al.*, 2012, Ammann *et al.*, 2011, Renders, 2010, Sami *et al.*, 2011). Namun disisi lain hasil penelitian juga menunjukkan Pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan berhubungan negatif, seperti hasil penelitian Yammeesri dan Herath, (2010), Ujunwa, (2012). Bahkan hasil penelitian Pham *et al.*, (2011) menemukan tidak ada pengaruh antara *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Intellectual Capital* seperti hasil penelitian Altuner *et al.*, 2015. Hasil tersebut sejalan

dengan temuan Appuhami and Bhuyan, 2015 yang menunjukkan bahwa CEO dualitas, komposisi dewan dan komposisi komite remunerasi secara signifikan berpengaruh terhadap IC. Sedangkan ukuran dewan dan komposisi komite audit tidak berpengaruh terhadap IC. Hasil yang berbeda dimana penelitiannya menguji Pengaruh *Ownership Structure*, yang merupakan mekanisme *internal* dari *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital*, menunjukkan hasil yang negatif (Saleh dan Rahman, 2009).

Kamukama *et al.*, 2011, menguji pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Performance* dengan mediasi *Competitive Advantage*. Hasil penelitiannya menunjukkan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *Performance*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Cheng *et al.*, 2010. Berdasar uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan melihat kontribusi *Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan, terutama untuk perusahaan dalam industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini mendasarkan teori agensi Jensen dan Meckling (1976), dimana mekanisme pengawasan diperlukan untuk mengatasi problem keagenan, mekanisme ini diharapkan mampu membuat manajemen perusahaan melakukan tugas sesuai tujuan perusahaan. Selain teori agensi penelitian ini juga mendasarkan teori *Resources Based Theory*, terutama untuk melihat hubungan antara variabel *Intellectual Capital* dengan Kinerja Perusahaan. Selain kedua teori itu dasar hubungan konsep dalam penelitian ini didukung oleh penelitian empiris sebelumnya. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat peran *Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* sebagai kunci untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

1.2 Teori dan Pengembangan Hipotesis

Corporate Governance

Hubungan keagenan terjadi dimana satu pihak mempekerjakan pihak lain untuk bertindak atas nama kepentingannya. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan mendelegasikan manajer untuk bertindak atas nama kepentingan mereka, dalam hal ini pemegang saham dianggap sebagai "Prinsipal dan manajer dianggap "agen". Pemisahan kepemilikan dan manajemen dalam sebuah perusahaan menciptakan hubungan *principal-agent*. Keuntungan dari pemisahan tersebut mencakup kemampuan kepemilikan saham dapat berubah tanpa mengganggu operasi bisnis, dan kemampuan untuk menyewa manajer dengan pengetahuan dan keterampilan khusus (Jensen dan Meckling, 1976).

Intellectual Capital

IC semakin diakui sebagai sumber daya strategis yang penting untuk organisasi yang beroperasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan (Appuhami, 2015). IC dari organisasi terletak dalam hubungan, struktur dan orang-orang, dan menambah nilai bagi organisasi dengan menciptakan dan memelihara kreativitas, inovasi, teknologi informasi, kegiatan interpersonal dan keunggulan kompetitif (Appuhami, 2015). IC menambah nilai bagi organisasi dengan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan penciptaan pengetahuan baru (Van der Meer-Kooistra dan Zijlstra, 2001). Petty dan Guthrie (2000, p. 156) mencatat bahwa "[...] modal intelektual memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi modal dan pasar tenaga kerja". Studi juga menemukan bahwa IC memiliki pengaruh positif pada kinerja dan kekayaan organisasi (Serenler dan Gozlu, 2008; Phusavat *et al.*, 2011).

Pengukuran IC

Pulic's VAICTM dikembangkan oleh Pulic (1998, 2000) sebagai pengukuran model IC sebuah perusahaan. VAICTM menawarkan informasi tentang efisiensi penciptaan

nilai baik yang berwujud dan aset tidak berwujud dari suatu perusahaan. Ia berpendapat bahwa metode ini memberikan dua aspek penting penilaian dan penciptaan nilai yang tidak ditawarkan oleh model lainnya. Pertama, dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak terdaftar, di mana nilai IC berbasis pasar tidak tersedia. Kedua, menyediakan sistem pemantauan efisiensi kegiatan usaha yang dilakukan oleh karyawan, apakah kemampuan mereka menunjuk ke arah penciptaan nilai. Pulic (2000) menjelaskan nilai pasar perusahaan berasal dari kedua modal IC, terdiri dari modal manusia dan modal struktural.

Kinerja Perusahaan

Pengukuran *performance* berdasarkan informasi pasar mempertimbangkan informasi pasar perdagangan saham. Tabari *et al.*, (2013) menyebutkan bahwa informasi pasar berubah setiap saat, namun secara umum langkah-langkah ini lebih diutamakan dan lebih akurat untuk mengukur kinerja perusahaan. Beberapa proksi untuk mengukur Kinerja perusahaan dengan informasi pasar yakni *Price to Earning Ratio (P/E)*. *Price Earning Ratio* mencerminkan hubungan antara harga pasar saham umum dengan laba perlembar saham pada saat ini. P/E sebagai proksi *Corporate Performance* mengacu pada penelitian (Tabari *et al.*, 2013). Kinerja Perusahaan dengan memperhatikan informasi pasar juga dapat diukur dengan menggunakan perbandingan antara nilai pasar perusahaan dengan nilai buku. Mollah (2012) menggunakan PBV dengan membandingkan nilai pasar perusahaan terhadap nilai buku perusahaan. Selain itu ratio lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah dengan ratio Return on asset (ROA); ROA diperoleh dengan membandingkan laba dengan Total Aset (Janosević *et al.*, 2013, Mollah, 2012, Mehralian *et al.*, 2012).

Kajian Empiris

Penelitian empiris mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital* masih terbatas. Beberapa peneliti mencoba melihat pengaruh dua variabel tersebut seperti; Altuner *et al.*, 2015, hasilnya menunjukkan dampak positif Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital*.

Mention dan Bontis, 2013, meneliti Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Bisnis di sektor Perbankan Luxenberg dan Belgia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal manusia berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kinerja bisnis. Modal struktural dan relasional berhubungan positif dengan kinerja bisnis, dan tidak signifikan.

Janosevic *et.al* 2013, Meneliti pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja finansial perusahaan di Serbia, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Net profit*, *Operating Revenue*, dan *Operating Profit* tidak mempunyai konsekuensi terhadap efisiensi IC di perusahaan Serbia, sementara *Human Capital* dan *Structural Capital* berdampak pada ROE dan ROA, dimana *Physical Capital* berpengaruh terhadap ROE.

Guo *et al.*, 2012, meneliti pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja perusahaan di Bursa Efek Amerika Serikat. Hasil penelitian ada pengaruh positif antara paten dan pengeluaran Penelitian dan Pengembangan (R & D), namun peningkatan paten tidak signifikan meningkatkan kinerja akuntansi. Kualitas sumber daya manusia, yang diukur oleh beberapa faktor, diharapkan dapat memainkan peran positif dalam inovasi teknologi dan kinerja keuangan.

Berdasarkan kajian teoritis dan pengujian empiris di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Ada pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital*

H₂: Ada pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan

H₃: Ada pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan

1.3 Metode Penelitian

Populasi dan sampel Penelitian

Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan dalam industri Telekomunikasi, Elektronik, Farmasi, Kabel, Otomotif, Kimia dengan sampel berjumlah 43 perusahaan. Pengamatan dilakukan selama 3 tahun yakni dari tahun 2013-2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan analisis SEM berbasis komponen GSCA (*Generalized Structured Component Analysis*).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Eksplanatori (*Explanatory Research*), karena ingin menguji dan menjelaskan pengaruh *Corporate Governance*, *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan. Data diperoleh di Bursa Efek Indonesia, web perusahaan atau dari web investasi seperti *yahoo finance*. Variabel yang akan dianalisis terdiri variabel *Eksogen*, *Corporate Governance* dan variabel *Endogen Intellectual Capital* dan Kinerja Perusahaan. *Corporate Governace* terdiri atas indikator: *Board Size*, Komite Audit, Komposisi Dewan mengacu peneliti sebelumnya. *Intellectual Capital* terdiri atas *Human Capital Efficiency*, *Structural Capital Efficiency*, *Relational Efficiency* serta VAIC. Kinerja Perusahaan diukur dengan ukuran kinerja tradisional dan ukuran pasar; *Return On Asset*, *Price Book Value*, *Price Earning Ratio*.

1.4 Hasil Penelitian

Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan nilai FIT sebesar 0.662, ini berarti model yang terbentuk mampu menjelaskan semua variabel yang ada sebesar 66.2%, Nilai AFIT = 0.658 menunjukkan keragaman variabel *Corporate Governance*, *Intellectual Capital*, dan *Kinerja Perusahaan* yang dapat dijelaskan oleh model setelah mengalami koreksi sebesar 66.2% dan sisanya sebesar 33.8% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak terdapat dalam model.

Analisis Hipotesis masing-masing jalur

Output program GesCa menghasilkan model struktur dan dapat dilihat.

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital*

Hasil Analisis menunjukkan nilai estimasi 0.477 yang berarti ada pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital* signifikan, Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Corporate Governance* dan *Intellectual Capital*, artinya apabila *Corporate Governance* meningkat maka akan diikuti peningkatan *Intellectual Capital*.

Hasil ini menunjukkan bahwa Peran *Corporate Governance* sangat penting dalam mendorong manajer perusahaan untuk meningkatkan *Intellectual Capital* perusahaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan memberikan dampak positif untuk meningkatkan *Intellectual Capital* perusahaan sebagai kunci daya saing perusahaan.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Kinerja Perusahaan*

Hasil Analisis menunjukkan nilai estimasi 0.941 menunjukkan bahwa pengaruh

Corporate Governance terhadap *Kinerja Perusahaan* signifikan, Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan*, artinya apabila *Corporate Governance* meningkat maka akan diikuti peningkatan *Kinerja Perusahaan*.

Hasil ini menunjukkan peran *Corporate Governance* memberikan pengaruh positif terhadap *Kinerja Perusahaan* baik kinerja tradisional maupun kinerja pasar. Peningkatan kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* akan membawa perbaikan dan peningkatan kinerja yang dicapai perusahaan.

Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Kinerja Perusahaan*

Hasil Analisis menunjukkan nilai estimasi 0.618 menunjukkan bahwa pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Kinerja Perusahaan* signifikan, Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Intellectual Capital* dan *Kinerja Perusahaan*, artinya apabila *Intellectual Capital* meningkat maka akan diikuti penurunan *Kinerja Perusahaan*.

Hasil ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja *Perusahaan*. *Intellectual Capital* berperan strategis dalam meningkatkan kinerja perusahaan pada perusahaan yang berbasis pengetahuan dan teknologi, Oleh sebab itu, upaya peningkatan *Intellectual Capital* harus terus ditingkatkan untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

1.5 Simpulan dan Saran

Hasil penelitian memberikan bukti bahwa pelaksanaan *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Intellectual Capital* dan *Kinerja Perusahaan*. Hal ini berarti harus ada upaya secara terus menerus yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* untuk meningkatkan *Intellectual Capital* yang memegang peran penting dalam meningkatkan *Competitive advantage* perusahaan serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian juga memberikan bukti *Intellectual Capital* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini mengisyaratkan perlu upaya dalam mendorong peningkatan *Intellectual Capital* perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Daftar Pustaka

- Altuner, Dogan, Çelik, Saban, Güleç, Tuna Can, 2015; *The linkages among intellectual capital, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility*, Corporate Governance Vol. 15 No. 4.
- Ammanna, Manuel, Oesch, David, Schmid, M. Markus, 2011, *Corporate governance and firm value: International evidence*, Journal of Empirical Finance 18.
- Appuhami, Ranjith, Bhuyan, Mohammed; 2015, *Examining the influence of corporate governance on intellectual capital efficiency Evidence from top service firms in Australia*, Managerial Auditing Journal Vol. 30 No. 4/5.
- Bokpin, Godfred A, Zangina Isshaq, Onumah, Joseph Mensah; 2009, *Corporate governance, ownership structure, cash holdings, and firm value on the Ghana Stock Exchange*, The Journal of Risk Finance Vol. 10 No. 5.
- Cheng, Meng-Yuh, Lin, Jer-Yan, Hsiao, Tzy-Yih, Lin Thomas W; 2010, *Invested resource, competitive intellectual capital, and corporate performance*, Journal of Intellectual

- Capital Vol. 11 No. 4.
- Choong, Kwee Keong 2008; *Intellectual Capital: Definitions, Categorization and Reporting Models*, *Journal of Intellectual Capital* 9 (4).
- Ehikioya, Benjamin I. 2009. *Corporate Governance Structure and Firm Performance in Developing Economies: Evidence from Nigeria*, *Corporate Governance* 9 (3)
- Guo, Wen-Chung, Shiah, Shin-Rong, Hou, Chien, Wei-Jer, 2012, *A study on intellectual capital and firm performance in biotech companies*, *Applied Economics Letters*,
- Janosević, Stevo; Dzenopoljac, Vladimir and Bontis, Nick, 2013 *Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia*, *Knowledge and Process Management*, Volume 20 Number 1,
- Jensen, Michael C; Meckling, William H.1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*; *Journal of Financial Economics* 3(4).
- Kamukama, Nixon, Ahiauzu, Augustine, Ntayi, Joseph M; , 2011. *Competitive advantage: mediator of intellectual capital and performance*, *Journal of Intellectual Capital* Vol. 12 No. 1
- Komnencic, Biserka; Pokrajcic, Dragana. 2012. *Intellectual Capital and Corporate Performance of MNCs in Serbia*, *Journal of Intellectual Capital* 13(1)
- Mehralian, Gholamhossein, Rajabzadeh, Ali, Sadeh Mohammad Reza, Rasekh, Hamid Reza; 2012, *Intellectual capital and corporate performance in Iranian pharmaceutical industry*, *Journal of Intellectual Capital* Vol. 13 No. 1
- Mention, Anne-Laure, Bontis, Nick; 2013 *Intellectual capital and performance within the banking sector of Luxembourg and Belgium*, *Journal of Intellectual Capital* Vol. 14 No. 2.
- Mollah, Sabur; Al Farooque, Omar; Karim, Wares. 2012. *Ownership Structure, Corporate Governance and Firm Performance* *Finance* 29 (4).
- OECD *Principles of Corporate Governance*. 2004. *Organisation for Economic Co-operation And Development Organisation*, www.OECD.org
- Renders, Annelies, Gaeremynck, Ann, and Sercu, Piet; 2010; *Corporate-Governance Ratings and Company Performance: A Cross-European Study*, *Corporate Governance: An International Review*, 18(2).
- Saleh, Norman Mohd, Rahman, Mara Ridhuan Che Abdul, Hassan Mohamat Sabri, 2009; *Ownership Structure and Intellectual Capital Performance in Malaysia*.
- Sami, Heibatollah, Wang, Justin, Zhou, Haiyan, 2011 *Corporate governance and operating performance of Chinese listed firms*; *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Volume 20, Issue 2
- Shim, Jae K dan Siegel, Joel G. 2007. *Financial Management*, Mc GrawHill
- Tabari, Naser Ali Yadollahzadeh, Nasrollahi, Mohammad, Emamgholipour, Milad, Mansourinia, Elham. 2013. *Relationship Between Capital Cost and Market Measures of Corporate Performance Evaluation: Evidence from the Tehran Stock Exchange*, *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 4 (5)
- Ujunwa, Augustine. 2012. *Board Characteristics And the Financial Performance of Nigerian Quoted Firms*, *Corporate Governance* 12(5)
- Wang, Jui-Chi, 2008, *Investigating market value and intellectual capital for S&P500*, *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 9 No. 4
- Yamneesri, Jira, Kanthi Herath, Siriyama, 2010 "Board characteristics and corporate value: evidence from Thailand", *Corporate Governance: The international journal of business in society*, Vol. 10 Iss: 3

KAUSALITAS ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

Purwiyanta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran Yogyakarta

Email : purwiyanta@gmail.com

Rini Dwi Astuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran Yogyakarta

Email : rindwiasuti@upnyk.ac.id

Abstact

Mercantilism has changed the outlook of world civilization through foreign trade. Hypothesis exsport led growth strengthens trade role in creating prosperity through economic growth. This study tested the two matters in the case of the Indonesian economy. Granger Causality models used to test whether there is causality between economic growth and Indonesia balance of trade (net exports). Time series data from 1971 to 2015 are taken into use to test his hypothesis. The conclusion of this study is does not causality between economic growth and Indonesia balance of trade, and vice versa.

Keywords: Mercantilism, Export Led Growth, Granger causality

1. PENDAHULUAN

Perdagangan luar negeri merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomiannya nasionalnya. Perdagangan luar negeri juga dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki (Todaro & Stephen C).

Perkembangan perdagangan luar negeri suatu negara dapat dilihat melalui neraca perdagangannya. Apabila terjadi penurunan ekspor dan impor yang merupakan komponen neraca perdagangan maka hal ini akan berkaitan dengan pertumbuhan kegiatan produksi barang-barang di Indonesia. Penurunan ekspor berarti penurunan kapasitas produksi dalam negeri, terutama pada kegiatan industri yang berorientasi ekspor. Demikian halnya dengan penurunan impor dapat dipandang sebagai penurunan aktivitas produksi domestik, sekaligus ancaman pada produksi domestik mengingat sebagian besar impor adalah bahan baku dan bahan penolong.

Neraca Perdagangan Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan surplus. Pada tahun 2010 surplus neraca perdagangan sebesar 31,003 milyar US \$ telah turun hanya menjadi 7,083 milyar US \$ pada 2014 (Tabel 1). Pada periode tersebut dari sisi ekspor terjadi penurunan lebih cepat dari penurunan impor. Secara teoritis berkurangnya surplus neraca perdagangan juga berarti berkurangnya arus modal keluar neto (Mankiw, 2007; 115-116). Apabila hal ini terus berlanjut maka dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan mengancam stabilitas makro ekonomi Indonesia.

Tabel 1.
Neraca Perdagangan Indonesia 2010 - 2015 TW1

Tahun	Ekspor Milyar US \$	Pertumbuhan (%)	Impor Milyar US \$	Pertumbuhan (%)	Neraca Perdagangan Milyar US \$
2010	149,966		118,963		31,003
2011	191,109	27,43	157,284	32,21	33,825
2012	187,347	-1,97	178,667	13,59	8,68
2013	182,089	-2,81	176,256	-1,35	5,833
2014	175,393	-3,68	168,310	-4,51	7,083
2015 TW 1	37,831		34,743		3,088

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Kajian mengenai kausalitas neraca perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu topik menarik karena menawarkan hubungan sebab-akibat. Apabila benar terjadi hubungan sebab akibat maka kebijakan perdagangan akan kembali mempertimbangkan pemikiran merkantilisme, negara akan mengejar surplus perdagangan untuk memperkuat perekonomiannya.

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini ini adalah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan neraca perdagangan Indonesia. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, atau sebaliknya neraca perdagangan Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia?
- b. Mungkinkah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan neraca perdagangan Indonesia keduanya saling mempengaruhi atautkah keduanya tidak saling mempengaruhi?

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Merkantilisme dan Perdagangan Luar negeri

Merkantilisme merupakan pemikiran yang mengatakan bahwa jalan menuju negara yang kaya dan kuat adalah dengan cara ekspor lebih besar dari pada impor (Salvatore: 2004, hal 20). Pandangan ini mempengaruhi pola pikir bangsa Eropa abad ke-16 sampai ke-18, dan memicu intervensi negara dalam mengatur perekonomiannya. Kebutuhan akan pasar akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan dikalangan negara Eropa dan dimulainya era imperialisme bangsa Eropa.

Kelebihan ekspor atas impor pada prinsipnya merupakan penimbunan uang (devisa), atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak, menjadi tujuan utama kebijakan nasional negara penganut pemikiran merkantilis. Penguasaan terhadap logam mulia sebagai alat tukar internasional mendorong negara-negara barat membangun armada laut yang kuat, modernisasi alat-alat perang, membangun pertahanan yang kokoh, untuk melindungi keuntungan pada perdagangan komoditi.

2.2. Ekspor Memimpin Pertumbuhan (*Export Led Growth*)

Dalam literatur Ekonomi Pembangunan, khususnya pembangunan di negara-negara berkembang disebutkan peranan ekspor sebagai pendorong atau stimulus pertumbuhan ekonomi (*eksport led growth*). Pandangan ini banyak disepakati oleh para ahli ekonomi pembangunan karena dianggap masuk akal. Bukti bukti empiris yang menunjukkan tidak

ada satupun negara didunia ini yang tidak melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Para ekonom dan peneliti telah memberi sokongan ilmiah terhadap pandangan ini (lihat Aliman, 2001), seperti Gerald K Haberler (1964), Krueger (1978), penelitian WorldBank (1987), Marc Piazolo (1995), Mozghan (1999), Gills dan Williams (2000), dan Izani (2002). Adapun beberapa argumennya adalah :

- a. Ekspor dapat menyebabkan penggunaan penuh sumber-sumber domestik sesuai dengan keunggulan komparatif dan terjadinya pembagian kerja sehingga mendorong munculnya skala penghematan.
- b. Ekspor dapat memperluas pasar baik didalam negeri maupun diluar negeri.
- c. Ekspor merupakan sarana untuk mengadopsi ide atau pengetahuan baru, teknologi baru, dan keahlian baru serta keahlian lainnya sehingga memungkinkan penggunaan kapasitas lebih besar dan lebih efisien.
- d. Ekspor dapat mendorong mengalirnya modal dari negara maju ke negara berkembang.
- e. Ekspor merupakan salah cara efektif untuk menghilangkan perilaku monopoli karena produsen dituntut bersaing agar lebih efisien dibanding produsen lain di luar negeri.
- f. Adanya ekspansi ekspor akan menghasilkan devisa dan karenanya kesempatan untuk mengimpor barang modal dan barang antara semakin besar.

2.3. Ekspor Menisbikan Pertumbuhan (*Export Reducing Growth*)

Pandangan yang kurang mendukung peranan perdagangan luar negeri pada pertumbuhan ekonomi didasari pada pemikiran bahwa kegiatan ekspor sebagai mesin bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang hanya berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka jangka panjang, ekspor tidak dapat diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi karena berbagai alasan, diantaranya :

- a. Mengandalkan ekspor sebagai motor pertumbuhan akan menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang menjadi rentan terhadap fluktuasi perekonomian dunia
- b. Kecenderungan kebijakan proteksi oleh negara maju untuk melindungi perekonomiannya, dan maraknya produk sintesis yang dibuat oleh negara maju untuk menggantikan bahan alami atau bahan mentah.
- c. Sruktur perekonomian yang bersifat dualistik pada negara-negara yang sedang berkembang.

Pemikiran tersebut didukung oleh para ekonom seperti Raul Prebisch (1950), Hans W Singer (1950), dan Myrdal (1956). Mereka berpendapat bahwa faktor yang berasal dari luar negeri merupakan faktor utama yang menyebabkan ekspor tidak berhasil sebagai penggerak pembangunan. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan jangka panjang di bidang perdagangan luar negeri yang merugikan perdagangan luar negeri sebagai penghasil barang primer. Akibatnya dalam jangka panjang barang industri semakin mahal sehingga negara penghasil barang primer mengalami defisit neraca perdagangan yang berarti akan mengecilkan porsi tabungan dan investasi serta akhirnya menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.4. Ekspor Menciptakan Dorongan Internal (*Internally Generated Export*)

Keyakinan para ekonom pada pemikiran bahwa ekspor menciptakan dorongan kegiatan ekonomi internal didasarkan pada pemikiran bahwa syarat utama bagi suatu negara dalam melakukan ekspor adalah menciptakan iklim yang dapat membawa terjadinya proses pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara berkesinambungan melalui pembentukan dan perluasan pasar dalam negeri yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai variabel endogen yang besar kecilnya dikendalikan, sementara ekspor merupakan variabel eksogen yang tidak dapat dikendalikan. Maka ekspor ditempatkan sebagai ujung proses pertumbuhan ekonomi bukan pangkal pertumbuhan ekonomi (Aliman, 2001).

Tercapainya proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menyebabkan meningkatnya pendapatan nasional, tersedianya lapangan kerja yang luas, meningkatnya kemakmuran masyarakat, dan bertambahnya akumulasi modal dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, perekonomian dalam negeri semakin luas menyebabkan permintaan barang jasa semakin meningkat sehingga mendorong pengusaha melakukan investasi dalam perluasan kapasitas perusahaan melalui spesialisasi melalui diversifikasi produk yang pada akhirnya mendorong skala penghematan, efisiensi dalam proses produksi dan munculnya daya saing di pasar internasional.

2.5. Pertumbuhan Menisbikan Ekspor (*Growth Reducing Export*)

Para ekonom yang percaya pada pemikiran ini dilandasi pada anggapan bahwa dalam proses pembangunan banyak aspek yang terlibat tidak hanya aspek ekonomi saja. Proses pembangunan dianggap sebagai kesatuan aspek ekonomi, sosial, budaya yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga pembangunan menjadi bagian dari perilaku masyarakat dan budaya. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan nasional, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara riil sehingga daya beli masyarakat meningkat. Pada sisi yang lain meningkatnya pendapatan riil dapat menciptakan kebutuhan baru dalam jangka pendek sehingga meningkatkan permintaan konsumen terhadap barang-barang yang secara langsung dapat diekspor dan barang yang tidak dapat diperdagangkan sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya ekspor dan meningkatnya impor bila beberapa komoditi yang diminta tidak dapat dipenuhi di dalam negeri.

2.6. Penelitian Terdahulu

Dari studi pertumbuhan ekonomi selama periode 1968 – 1984 yang dilakukan oleh Bela Balassa (1985) terhadap sekelompok negara-negara yang sedang berkembang yang dibedakan antara negara-negara yang berorientasi keluar (*Outward – Oriented Countries*) dan Negara-negara yang berorientasi kedalam (*Inward- oriented countries*) menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi keluar memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik dari pada negara-negara yang menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi ke dalam atau substitusi impor. Studi yang dilakukan Anne Krueger (1978) mengemukakan bahwa kenaikan 0.1 persen didalam laju pertumbuhan pendapatan ekspor mampu meningkatkan laju pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) dengan kira-kira 0,11 persen.

Anne Krueger dalam Nanga (2005 : 301) juga menyatakan bahwa orientasi keluar akan mendorong kebijakan makro ekonomi yang lebih baik, misalnya para pembuat kebijakan harus menjaga nilai tukar pada tingkat yang realistis, sehingga ekspor negara tersebut dapat bersaing dipasar luar negeri. Berdasarkan studi dilakukan Hollis Chemery terhadap 20 negara yang sedang berkembang menemukan bahwa total input productivity total meningkat di atas 3 persen per tahun di negara-negara yang menerapkan *Outward oriented* atau *export- led strategies*, sedangkan negara-negara yang menerapkan *inward – oriented* pertumbuhannya hanya 1 persen.

Penelitian Far Alei (1999) terhadap negara Iran dengan alat analisis pendekatan kointegrasi dan kausalitas granger. Hasil penelitian menunjukkan ekspor memberi dampak positif terhadap GDP yang diperkuat dengan adanya hubungan unilateral antara keduanya. Hal ini berarti dalam perekonomian Iran membuktikan bahwa ekspor terutama minyak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian penelitian ini mendukung pendapat ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi (*export led growth*).

Penelitian Siregar (1999) terhadap negara Indonesia dengan alat analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan ekspor terhadap pertumbuhan

PDB. Hal ini terjadi karena ekspor pada periode penelitian yang dilakukan mengalami penurunan sementara PDB meningkat terus sampai krisis ekonomi mulai melanda dalam negeri pada tahun 1997. Maka krisis ekonomi harus dipandang sebagai titik permulaan pembangunan yang baru sehingga diperlukan peningkatan ekspor komoditas yang benar-benar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Penelitian Aliman (2001) terhadap negara Indonesia dengan menggunakan alat analisis kausalitas model koreksi kesalahan dan FPE. Hasil penelitian untuk uji kausalitas model koreksi kesalahan menunjukkan adanya pola kausalitas timbal balik antara tingkat ekspor riil dan tingkat pendapatan nasional riil. Akan tetapi pola kausalitas satu arah dari tingkat pendapatan nasional ke tingkat ekspor riil lebih kuat selama periode penelitian ketika alat analisis dipadukan dengan FPE. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung pendapat pertumbuhan ekonomi dalam negeri mendukung ekspor (*internally generated export*).

Penelitian Ibrahim (2002) terhadap enam negara di Asia yakni Hongkong, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Alat analisisnya menggunakan regresi melalui pengembangan model feder. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali Filipina. Oleh karenanya diperlukan orientasi secara kuat dan moderat untuk mendiversifikasi struktur ekspor dan perbaikan pembuatan produk ekspor yang disesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung pendapat ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi (*export led growth*).

Penelitian Ardian D Lubis menyimpulkan bahwa perkembangan ekspor Indonesia secara historis bersifat dinamik dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dunia yang sifatnya turbulen (Lubis, 2013: 16). Dinamika perekonomian dunia mempengaruhi perkembangan impor Indonesia dan sebaliknya.

Rahman Hakim, Arif, dkk, menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor di negara ASEAN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat enam negara yang mendukung hipotesis *export led growth*, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Negara yang mendukung *export reducing growth* yaitu Laos dan Myanmar. Negara yang mendukung hipotesis *internally generated growth* hanya Kamboja. Saran yang diberikan pada penelitian ini antara lain adalah perlunya pemikiran strategi kebijakan ekspor yang berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi masing-masing negara.

3. METODA PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada penelitian ini. Dengan menggunakan data sekunder *time series* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 1971 sampai dengan 2015, yakni data Neraca Perdagangan Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi.

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Model Kausalitas Granger. Model ini dapat digunakan untuk mengindikasikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah atau hanya satu arah saja. Dengan demikian di dalam hubungan kausalitas tidak terdapat variabel independen, semua variabel merupakan variabel dependen. Model persamaannya dapat ditulis sbb :

$$Growth = \sum_{i=1}^n \alpha_i NPI_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Growth_{t-i} + e_{1t} \dots \dots \dots (1)$$

$$NPI = \sum_{i=1}^m \lambda_i NPI_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Growth_{t-i} + e_{2t} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- Growth = pertumbuhan ekonomi
- NPI = Pertumbuhan Neraca Perdagangan Indonesia
- n, m = Jumlah lag
- e_{1t}, e_{2t} = Variabel pengganggu
- $\alpha, \beta, \lambda, \delta$ = Koefisien regresi

Menurut Granger untuk menyelesaikan model kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan sebagaimana dalam persamaan (1) dan (2) maka ada empat model regresi yang harus dilakukan (Widarjono, 2007: 245).

- a. Untuk menguji apakah ada kausalitas neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan regresi dengan memodifikasi terhadap persamaan (1) dalam bentuk persamaan *unrestricted* dan *restricted* sebagai berikut :

$$Growth = \sum_{i=1}^n \alpha_i NPI_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Growth_{t-i} + e_{1t} \quad \text{.....persamaan } unrestricted \quad (3)$$

$$Growth = \sum_{i=1}^m \gamma_i Growth_{t-i} + e_{2t} \quad \text{.....persamaan } restricted \quad (4)$$

- b. Untuk menguji apakah ada kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap neraca perdagangan, maka dilakukan regresi dengan memodifikasi terhadap persamaan (2) dalam bentuk persamaan *unrestricted* dan *restricted* sebagai berikut :

$$NPI = \sum_{i=1}^m \lambda_i NPI_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Growth_{t-i} + e_{2t} \quad \text{.....persamaan } unrestricted \quad (5)$$

$$NPI = \sum_{i=1}^m \gamma_i NPI_{t-i} + e_{2t} \quad \text{.....persamaan } restricted \quad (6)$$

- c. Kemudian untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi neraca perdagangan atau sebaliknya neraca perdagangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digunakan uji F, nilai F dihitung sebagai berikut :

$$F = \frac{(n - k)(RSS_R - RSS_{UR})}{m(RSS_{UR})} \quad \text{.....} \quad (7)$$

Dimana :

RSS_R dan RSS_{UR} = Berturut-turut adalah nilai *Residual sum of squares* di dalam persamaan *restricted* dan *unrestricted*.

n = jumlah observasi

m = jumlah lag

k = jumlah parameter yang diestimasi di dalam persamaan *unrestricted*.

- d. Hipotesis

- 1). Kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap neraca perdagangan (NPI) dihipotesiskan sebagai berikut:

H_0 : pertumbuhan ekonomi tidak ada hubungan kausalitas terhadap NPI .

H_a : pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas terhadap NPI .

- 2). Kausalitas neraca perdagangan (NPI) terhadap pertumbuhan ekonomi dihipotesiskan sebagai berikut:

H_0 : NPI tidak ada hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_a : NPI memiliki hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi.

e. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesia

Dengan derajat keyakinan (*degree of freedom*) tertentu, maka :

Jika F_{hitung} pada persamaan 15 $> F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika F_{hitung} pada persamaan 15 $< F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun era 80-an mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga minyak dunia yang tidak stabil. Di tahun era 90-an pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, yang berkisar antara angka 6,5 persen sampai dengan 8,22 persen. Namun pada tahun 1997 sejalan dengan merosotnya nilai tukar rupiah dan di tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sangat drastis mencapai -13,13 persen. Hal ini diawali dari krisis moneter dan pada akhirnya menjadi krisis ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di era tahun 2000-an sudah mulai stabil pada kisaran 5%. Hal ini mencerminkan perbaikan perekonomian domestik melalui restrukturisasi dan perbaikan kinerja ekonomi luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode setelah krisis sangat dibutuhkan untuk mengatasi memburuknya pengangguran yang terjadi akibat krisis.

Neraca Pembayaran Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Keadaan ini terutama diakibatkan dari pekanya perekonomian Indonesia terhadap pengaruh yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 1998 krisis ekonomi melanda Indonesia menyebabkan buruknya kinerja ekspor Indonesia sehingga neraca perdagangan Indonesia sedikit mengalami masalah. Dan pada awal tahun era 2000-an seiring membaiknya perekonomian Indonesia menyebabkan terjadinya perbaikan ekspor dan pertumbuhan neraca perdagangan mulai positif.

Hasil uji Kausalitas Granger pada data lag pertama antara pertumbuhan ekonomi (PE) dan pertumbuhan nilai neraca perdagangan Indonesia (NPI) dengan menggunakan data dari tahun 1971 s.d. 2015 tersaji pada Tabel 2. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tidak menjadi penyebab fluktuasi pertumbuhan surplus/defisit neraca perdagangan Indonesia. Demikian juga dengan fluktuasi pertumbuhan surplus/defisit perdagangan luar negeri, tidak menjadi penyebab terhadap fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 2.
Rangkuman Hasil uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PE does not Granger Cause NPI	44	0.50967	0.4793
NPI does not Granger Cause PE		0.48142	0.4917

Sumber : data diolah

Jika diselidiki lebih lanjut, kausalitas juga tidak terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan neraca perdagangan migas maupun neraca perdagangan non migas

Indonesia. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tidak menjadi penyebab fluktuasi surplus/defisit perdagangan migas maupun non migas Indonesia. Demikian halnya dengan fluktuasi pertumbuhan neraca migas (surplus/deficit) tidak menjadi penyebab fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika dibedakan sebelum periode krisis dan periode setelah krisis (sebelum dan sesudah tahun 1988), penelitian ini juga memberikan kesimpulan yang sama, yakni bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi tidak disebabkan oleh pertumbuhan surplus dan defisit neraca perdagangan Indonesia, dan sebaliknya. Pada periode sebelum krisis ekonomi, hasil uji Kausalitas Grenger memberikan petunjuk bahwa terjadi kausalitas satu arah antara ekspor non migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum terjadi krisis ekonomi *export led growth* terjadi di Indonesia, khususnya ekspor non migas.

Perdagangan luar negeri (ekspor dan Impor) kurang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebaliknya. Pandangan aliran merkantilisme pada perdagangan luar negeri tidak menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada kemungkinan pada perekonomian Indonesia terjadi *growth reducing export* dan *export reducing growth*.

5. KESIMPULAN

Hipotesis *Export Led Groth* tidak terjadi pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan surplus/deficit neraca perdagangan (ekspor neto) sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diabaikan. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebaiknya tidak mengandalkan perdagangan luar negerinya. Perdagangan luar negeri Indonesia bukan merupakan penyebab pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak fluktuasi perdagangan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. REFERENSI.

- Aliman, dan A. Budi Purnomo**, 2001. "*Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16, No. 2, pp. 122-137.
- Agus Widarjono**, 2007, *Ekonometrika Toeri dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi ke 2, Penerbit Ekonnesia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Andrian D. Lubis**, 2013, Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Indonesia [Internet] Jakarta, Tersedia dalam : <<http://www.kemendag.go.id>> [diakses tanggal 1 Agustus 2013]
- Balasa, Bela**, 1986, "Export, Policy Choice and Economic Groth in Developing Countries After the 1973 Oil Shock." *Journal of Development Economics*, 18, 23-36
- Damodar N. Gujarati**, 2003. *Basic Econometric*, 4th Edition, Mc. Graw-Hill, USA.
- Far Alei, Mozghan**, 1999, The Relationship between Export and Economic Growth, assesing the evidence from Iran (1959 – 1999). *Institute for International Energy Studies*. Tehran: Iran.
- Ibrahim, Izani** , 2002, On Exports and Economic Growth. *Jurnal Pengurusan* 21 hal 3-18
- Nanga, Nuana**. 2005. Makro Ekonomi : teori, masalah dan kebijakan. P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Rahman Hakim, Arif ; Sidayu Ariteja, Inaki Maulida Hakim Reisyia Ibtida, Harmini**, "Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor Di Negara-Negara Asean", Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- https://www.academia.edu/7830732/Kausalitas_Pertumbuhan_Ekonomi_dan_Ekspor_di_Negara_ASEAN [diakses tanggal 3 Maret 2016]

Todaro, Michael P. Steven C, 2012, *Economic Development*, 11th Editions, Addison-Wesley, Boston .

Slavatore, Dominic, 2004, *International Economics*, Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc, USA

Siregar, Masjudin, 1999, "Kausalitas Antara Ekspor dan PDB di Indonesia, 1971–1997",. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol XLVII Nomor 3

KAJIAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO

Sadi¹⁾, Tri Mardiana²⁾, Indra Kusumawardhani³⁾

¹ Fakultas Teknik Industri UPN "Veteran" Yogyakarta
email: sadi.sadi1971@yahoo.co.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta
email: indrakoes74@gmail.com

Abstract

Traditional mining which is conducted by the people of Wonocolo Village, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro absorbed many local workers. After being abandoned by Dutch Colonial Government, the wells at Wonocolo were exploited by the locals until present times. This study aims to identify the economic potential of the local people at Wonocolo. Data were collected from the local people and government with interview and other documentation. Result shows that the background of traditional oil mining based on the fact that people operated the old wells because of the oil price booming in 1970s. They initially conducted traditionally but in the 1980s people started to use machines. Oil mining is more profitable than the agriculture. The government joined with Pertamina then started a program called Petroleum Geheritage to develop other potential, which is tourism. The program is expected to raise the income for the local people and shift their dependency on oil mining.

Keywords: *Wonocolo, traditional oil mining, tourism*

1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan salah satu bagian penting yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga banyak negara asing yang bekerjasama dalam upaya pengelolaan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak diminati oleh perusahaan asing adalah minyak bumi. Menurut Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM tahun 2008, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui, dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Pengelolaannya pun harus secara maksimal dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peranan minyak bagi perekonomian Indonesia merupakan faktor yang sangat menentukan, baik sebagai sumber penerimaan negara, sumber cadangan devisa, alat, atau sarana stabilisasi ekonomi. Negara Indonesia memiliki beberapa wilayah penambangan minyak bumi yang dikelola menggunakan cara modern maupun cara tradisional. Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah penambangan minyak bumi dengan cara tradisional dan dihasilkan dari sumur tua peninggalan Belanda yang dibor sebelum tahun 1970 (Naumi dan Trilaksana, 2015; Yudhanto, 2011; Shiddiqoh, 2015)

Sumur-sumur tersebut saat ini masih dimanfaatkan penduduk sekitar untuk mendulang minyak mentah demi kebutuhan hidup sehari-hari. Minyak di Desa Wonocolo sebenarnya sangat potensial jika diolah dengan teknologi yang lebih canggih dan tenaga teknis yang lebih handal. Kegiatan penambangan sampai saat ini masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan tenaga manusia dibantu dengan alat-alat sederhana seperti tali, pipa, jerigen, kayu, mesin truk, dan sebagainya. Penambangan minyak dari beberapa sumur tua di Desa Wonocolo dimiliki oleh pemilik modal yang berasal dari luar daerah sehingga penduduk sekitar hanya bekerja sebagai buruh penambang yang mendapatkan upah kecil. Hasil penambangan berupa minyak mentah atau crude oil dari sumur tua di wilayah tersebut diserahkan kepada penampung yang dikelola oleh masyarakat

setempat. Penampungan (stasiun pengepul) tersebut dikelola dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang memberikan kontribusi bagi para buruh penambang. Disamping sebagai penampung minyak mentah, KUD juga dapat mempermudah akses pemasaran. Hal ini disebabkan karena buruh penambang tidak diijinkan untuk mengolah minyak mentah sehingga minyak mentah yang sudah terkumpul di KUD dijual ke PT. Pertamina untuk diolah lebih lanjut dengan memenuhi standar kualitas mutu dan dipasarkan. Harga beli minyak mentah merupakan hasil kesepakatan antara PT. Pertamina, KUD dan Pemilik sumur sehingga penambang hanya menerima keputusan dari ketiga belah pihak walaupun tidak seperti yang mereka harapkan (Kholis, 2010; Nurmalitasari, 2011; Sugara, 2013).

Desa Wonocolo sebagai salah satu daerah yang kaya minyak bumi seharusnya memiliki masyarakat yang lebih sejahtera karena perekonomiannya ditopang dari hasil pengolahan minyak bumi, akan tetapi kenyataannya masyarakat tersebut tidak dapat menikmati kekayaan alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Profesi masyarakat yang secara turun-temurun sebagai penambang dengan upah yang minim membuat mereka tidak dapat beralih profesi menjadi pemilik sumur karena modal yang didapatkan selama bekerja tidak cukup untuk mengubah profesi mereka. Selain itu, tidak tersedianya lahan subur yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan tingkat pendidikan serta keterampilan yang rendah membuat mereka tetap pada kondisi ekonomi yang dapat dikatakan di bawah garis kemiskinan. Desa Wonocolo belum merasakan pembangunan yang berarti dari hasil pengolahan minyak yang dimiliki. Kondisi jalan yang rusak semakin memperparah akses penduduk terutama dalam hal transportasi, padahal untuk bersekolah, penduduk harus menempuh jarak yang cukup jauh. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beberapa tahun terakhir sudah mulai menyusun rencana kebijakan terhadap pengolahan minyak di daerah tersebut. Faktanya sampai saat ini belum ada kemajuan konkret dalam pengolahan sumur minyak yang hasilnya dapat dirasakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.

Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonocolo adalah dengan menggali potensi kawasan pengeboran sumur minyak tua sebagai wisata alam. Mulai dari wilayah geografisnya yang berada di daerah perbukitan dan pengelolaan yang masih dilakukan dengan cara tradisional. Melihat kondisi pengeboran sumur tradisional ini sangat unik, tempatnya di atas lahan perbukitan. Sehingga bisa berpotensi menjadi desa wisata andalan. Untuk mewujudkan usulan kawasan tambang minyak tua sebagai desa wisata ini maka semua pemangku kepentingan harus saling mendukung. Penertiban terhadap penambang liar di sumur minyak tradisional ini bisa dilakukan dengan cara mengangkat potensi di daerah setempat. Desa wisata alam ini kemungkinan bisa menambah penghasilan para penambang sehingga tidak ada pengeboran sumur baru.

Kegiatan penambangan tetap dilakukan karena menyangkut aspek ekonomi. Tapi harus segera diwujudkan menjadi desa wisata, karena kemungkinan hasil pengembangan wisata ini nanti bisa lebih besar dari hasil pengeboran. Permasalahan dalam pengeboran sumur tua ini sangat kompleks mulai sisi ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan faktor kepentingan. Hal ini terbukti dengan munculnya pengeboran sumur baru, muncul dapur penyulingan yang dilakukan sendiri, pencemaran lingkungan dan penjualan sebagian produksi minyak sumur tua secara ilegal. Harus dilakukan pemetaan wilayah untuk mewujudkan daerah wisata sumur tua. Secara umum hal yang sangat diperbaiki di antaranya harus tersedianya sumur percontohan dan ipal, penghijauan, penambahan keanekaragaman hayati, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan rumah pasaran produk binaan, museum migas dan pusat informasi dan edukasi migas. Selain itu yang paling terpenting adalah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan desa wisata di Desa Wonocolo. Upaya pengembangan nilai ekonomi sumberdaya alam dan penduduk setempat mengutamakan pada keterkaitan potensi dan kebutuhan penduduk di suatu kawasan pengembangan, dalam bentuk jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya melalui upaya penggalan sumber daya potensial, pengembangan industri mikro, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan penduduk dalam kapasitasnya sebagai kelompok masyarakat miskin. Ruang lingkup Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan meliputi dua pilar pengembangan, yaitu:

Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi (SDE) penduduk setempat secara terpadu dan berkelanjutan (www.bojonegorokab.go.id, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain: Desa Wonocolo kaya minyak, namun para penambang masih menggunakan cara tradisional dalam proses penambangannya sehingga tidak membuahkan hasil yang maksimal; pemilik sumur minyak berasal dari luar desa sehingga posisi masyarakat di Desa Wonocolo yang selalu menjadi penambang, membuat mereka berada di bawah garis kemiskinan; hasil penyulingan minyak yang dilakukan oleh penambang tidak diakui kualitasnya karena dilakukan dengan menggunakan alat yang sangat sederhana sehingga penambang harus menyerahkan seluruh hasil tambangnya kepada PT. Pertamina untuk memenuhi standar mutu; kebijakan pemerintah daerah belum dapat meringankan masyarakat Desa Wonocolo dari lingkaran kemiskinan.

2. KAJIAN LITERATUR

Motivasi

Self efficacy didefinisikan sebagai rasa kepercayaan seseorang bahwa ia dapat menunjukkan perilaku yang dituntut dalam suatu situasi yang spesifik (Bandura, 2000). *Self efficacy* lebih mengarahkan pada penilaian individu akan kemampuannya. Pentingnya *self efficacy* akan berpengaruh pada usaha yang diperlukan dan pada akhirnya terlihat dari *performance* kerja. Menurut Bandura (2000) keberadaan *self efficacy* pada diri seseorang akan berdampak pada empat proses, yaitu :

a. Proses Kognitif

Pengaruh *self efficacy* pada proses kognitif dapat timbul dalam berbagai bentuk. Banyak perilaku manusia yang diatur dengan pemikiran sebelumnya dalam mewujudkan tujuan. Pengaturan tujuan individu dipengaruhi oleh penaksiran individu terhadap kapabilitas yang dimilikinya.

b. Proses Motivasi

Kepercayaan diri terhadap *self efficacy* berada dalam pengaturan diri terhadap motivasi. Motivasi individu banyak ditimbulkan melalui proses kognitif. Orang – orang memotivasi dirinya sendiri dengan mengarahkan tindakannya dengan melalui berbagai latihan. Mereka percaya terhadap apa yang mereka lakukan dan selalu mengantisipasi adanya hasil tindakan yang prospektif. Mereka akan mengatur tujuan yang dimilikinya dan merencanakan latihan-latihan sebelum melakukan tindakan dengan mendesainnya sesuai nilai-nilai masa depan.

c. Proses Afektif

Orang-orang percaya terhadap pengaruh kapabilitasnya dalam mengatasi stres dan depresi dalam menghadapi ancaman atau situasi yang sulit. Dengan adanya *self efficacy*, seseorang akan lebih mampu mengatasi segala persoalan yang mengancam keberadaannya.

d. Proses Seleksi

Melalui kepercayaan diri terhadap kapabilitas yang dimilikinya, maka seseorang cenderung bertindak selektif atau melakukan pemilihan terhadap pencapaian tujuan hidupnya. Manusia akan memilih pemecahan masalah dan pencapaian tujuan hidupnya yang sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi, catatan atau memo dan dokumentasi lainnya. Hasil penelitian yang berupa kutipan, wawancara, dan observasi diolah dan kemudian disajikan secara deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbeda dengan kondisi yang biasa terjadi di daerah Kabupaten Bojonegoro, ketika memasuki

Desa Wonocolo suasana penambangan minyak tradisional akan dirasakan setiap mata yang memandang. Setelah memasuki kawasan hutan dapat ditemui sumur-sumur minyak dikelilingi kayu yang disusun berdiri sebagai penyangga alat timba minyak bumi tradisional. Bau khas minyak bumi juga akan tercium menyengat hidung orang yang berkunjung. Di daerah tersebut terdapat puluhan kelompok warga yang bekerja dengan cara mengambil minyak bumi tradisional. Setiap kelompok rata-rata terdiri dari 10 orang. Para pekerja tidak mengenakan pakaian dengan alat penambangan lengkap, tapi hanya berpakaian ala kadarnya seperti orang bekerja di sawah dan suara alat penambangan akan membuat bising telinga.

Desa Wonocolo yang terletak disekitar hutan membuat masyarakat masih hidup dengan cara tradisional dan masih ada unsur-unsur kejawaan yang kental, masyarakat mempertahankan melakukan ritual adat yang telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Adat yang mereka sering lakukan adalah adat manganan atau sedekah bumi, biasanya sedekah bumi dilakukan di tempat-tempat tertentu yang diikuti oleh hampir seluruh masyarakat Wonocolo.

Peranan Penambangan Minyak Tradisional dalam perubahan fisik desa terutama seperti infrastruktur jalan maupun irigasi lebih disebabkan dari faktor diluar adanya penambangan minyak tradisional. Karena secara formal tidak ada mekanisme legal yang mengatur pembagian pendapatan dari pajak penambangan minyak termasuk didalamnya penambangan minyak secara tradisional hingga ke tingkat desa.

Penambangan minyak tradisional di Wonocolo yang dikelola oleh masyarakat Desa Wonocolo sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, kawasan penambangan Minyak tersebut telah membuka lapangan kerja baru yang tidak perlu memiliki keterampilan kerja tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh penduduk desa yang awalnya bekerja sebagai petani, buruh dan pengangguran, dengan adanya penambangan minyak di Desa Wonocolo maka mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat disekitar Desa Wonocolo hal ini diperkuat dengan berkurangnya kemiskinan di masyarakat sekitar pertambangan. Adanya pertambangan tradisional juga berpengaruh terhadap dampak pendapatan masyarakat, pendapatan yang diperoleh dari penambangan. Peningkatan produksi penambangan berarti bertambah pula taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat peningkatan pendapatan pertambangan salah satunya diinvestasikan untuk pendidikan keluarga mereka, sebagai upah peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kesadaran akan pentingnya kemampuan manusia ditunjukkan oleh kelompok penambangan yang merasa mampu membiayai anaknya untuk membiayai pendidikan SMA bahkan sampai kuliah, hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah lulusan SMA dan Sarjana di desa Wonocolo.

Hasil pertambangan minyak bumi di Wonocolo memang tak selalu menguntungkan, tapi kebanyakan mereka yang memiliki sumur atau bekerja di sumur minyak akan meningkat perekonomiannya. Ada beberapa sumur yang hanya dimiliki satu orang dan hal tersebut membuat perekonomian pemilik sumur sangat meningkat. Seperti yang diungkapkan oleh penambang bahwa ada beberapa orang yang memiliki satu sampai tiga sumur dan orang tersebut termasuk golongan orang kaya dan memiliki banyak mobil, dan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke kota. Setiap Penambang mempunyai waktu kerja sendiri di setiap sumur tidak memiliki waktu kerja yang sama. Pembagian waktu penambangan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi penambang dan kondisi produktivitas sumur. Sumur yang produktivitasnya 2-3,5 ton per hari akan ditambang di pagi hari mulai pukul 05.00 hingga 08.00, kemudian istirahat sambil menunggu akumulasi minyak. Pekerja dapat istirahat turun gunung dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Sore hari pukul 14.00 kembali bekerja menimba minyak hingga pukul 17.00. Sedangkan sumur dengan produktivitas tinggi tetapi dengan kadar air yang lebih besar akan ditambang dengan sistem shift. Operator shift pertama mulai pukul 05.00 hingga 08.00 pagi dilanjutkan operator shift kedua hingga pukul 12.00. Pukul 14.00 shift yang bekerja di pagi hari akan datang lagi menggantikan. Sumur berkala ditambang menunggu minyak mengalir kembali ke sumur minyak. Ada yang seminggu 2-3 kali ditambang ada yang seminggu sekali ditambang. Sumur-sumur dengan produktivitas kecil biasanya juga ditambang selama 3-4 jam sehari. Dan dilakukan antara jam 5 hingga jam 9 pagi atau sore hari antara jam 14.00 hingga jam 17.00.

Dari pola tersebut terlihat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan penambangan masih memiliki waktu luang yang memungkinkan melaksanakan pekerjaan lainnya. Penambang yang sebelumnya

sebagai petani masih tetap bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai petani. Ada juga para penambang yang merangkap pekerjaan dengan sumur lain, jadi sumur minyak yang dikerjakan bukan satu tempat saja, para penambang bisa bekerja di 3-4 sumur secara bergantian. Untuk penambang hasil akan dibagi biasanya penambang memiliki upah sekitar Rp. 300.000/drum itu dibagi dengan jumlah penambang yang ikut bekerja, tengkulak minyak sekitar Rp. 300.000/drum, tengkulak minyak tanah, bensin, dan solar sekitar Rp. 600.00/drum. Penyulingan minyak Rp 60.000/drum.

Bukan hanya kegiatan penambangan saja yang terdapat di wilayah penambangan Wonocolo, tetapi di sekitar penambangan juga terdapat warung-warung yang menyajikan beberapa makanan dan minuman. Warung-warung tersebut sangat ramai ketika para penambang beristirahat dan dapat melepas lelah di warung bersantai sambil makan dan minum.

Penambangan minyak Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro ini telah ada sejak jaman Belanda dulu, sumur dikelola oleh masyarakat sendiri, sumur dimiliki beberapa orang dan dikelola secara berkelompok. Ada tiga blok di sekitar Wonocolo yaitu blok Wonocolo, blok Kedewan, dan blok Hargomulyo. Salah satu penambang yang berhasil diwawancarai memberikan informasi bahwa kelompoknya terdiri dari 9 orang pemilik dengan 15 orang pekerja. Penambangan yang dilakukan pada 1 sumur dapat menghasilkan 2 ton atau setara dengan Rp 20.000.000,- per minggu.

Peluang ekonomi bagi penduduk di Desa Wonocolo selama ini dianggap terbatas karena pekerjaan yang tersedia adalah seputar pertambangan dan penyulingan minyak karena lahan yang ada merupakan hutan dan tanahnya tidak cocok untuk pertanian. Sifat tertutup yang biasanya dimiliki oleh sebagian besar orang miskin tidak terjadi pada masyarakat penambang minyak di Desa Wonocolo. Mereka memiliki sikap yang ramah, bahkan memiliki harapan yang besar untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

Desa Wonocolo memiliki banyak keunikan, eksotika hingga pemandangan yang dramatis dan tidak terdapat di lokasi lain di Indonesia. Keunikan ini merupakan salah satu potensi wisata geoheritage dan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi penduduk setempat. Pengunjung bisa melihat langsung penambangan minyak yang eksotik, keberadaan sumur-sumur tradisional dengan tiang penyangga kayu yang dipadukan dengan ketrampilan penambang menggerakkan tali sling dan mengarahkan timba minyak ke lubang sumur adalah hal yang langka. Daerah Wonocolo tidak hanya menyimpan kandungan minyak tapi juga menyimpan peradaban Indonesia masa lalu.

Saat ini Pertamina bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan UPN "Veteran" Yogyakarta telah mengembangkan kawasan ini sebagai lokasi wisata Geoheritage. Pengembangan ini tidak hanya mendukung Program Petroleum Geoheritage Bojonegoro tetapi juga merupakan pilihan yang tepat untuk membantu masyarakat agar bisa melepaskan diri dari ketergantungan hidup pada kegiatan pertambangan minyak secara tradisional. Pengunjung lokasi wisata tidak hanya bisa melihat penambangan sumur minyak tradisional yang telah diwariskan sejak 100 tahun yang lalu, tetapi juga akan menemukan keunikan eksotika di puncak-puncak bukit yang merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia, bahkan Asia dan dunia. Yaitu adanya penemuan fosil hingga sungai purba, yang menjadikan Desa Wonocolo dan lokasi sekitarnya diwilayah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu pusat peradaban manusia yang patut untuk dilestarikan dan dipelajari. Para wisatawan penggemar sepeda dan offroad bisa juga melakukan wisata trekking atau trail adventure, bahkan juga mountain bike dan down hill. Untuk pengunjung yang ingin merasakan suasana lokasi penambangan bisa menghabiskan waktu untuk berkemah di lokasi sekitar penambangan.

Potensi wisata ini sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak, akan tetapi mereka bukan penduduk lokal desa Wonocolo. Hal ini merupakan peluang bagi penduduk desa sendiri melalui Badan Usaha Milik Desa untuk dapat melakukan pengelolaan potensi wilayah mereka secara mandiri dan berkesinambungan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk Desa Wonocolo.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ekonomi masyarakat Desa Wonocolo tergolong miskin dan hampir seluruh masyarakat bekerja di bidang penambangan minyak tradisional. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat sekitar terhadap modal dan peluang

ekonomi. Dengan adanya program Petroleum Geoharitage Bojonegoro yang mengembangkan potensi wisata alam Bojonegoro, yang mengkhususkan diri pada wisata sumur minyak tua dan peninggalan jaman purbakala maka kesejahteraan penduduk lokal akan bisa meningkat, karena tidak lagi menggantungkan pendapatannya dari hasil penggalian sumur tua tetapi mengembangkan potensi wisata daerahnya.

6. REFERENSI

- Bandura, A. (2000). *Cultivate self efficacy for personal and organizational effectiveness: handbook of organization behavior*. Oxford, UK: Blackwell.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Ghufron M. Nur & Risnawati Rini S. 2010. *Teori-Teori Psikologi*.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organizations Behavior Structure Processes*. Irwin McGraw-Hill.
- Greenberg. J dan R. Baron. 1995. *Behavior Structure and Process*. Business Publication Inc., Plano, Texas
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kholis, M. Nur. 2010. *Pertambangan Minyak Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kussujaniatun, Sri. 2006 *Efek Komunikasi Dari Mulut ke Mulut Terhadap Sikap dan Niat Membeli Produk Prosesor AMD Athlon DSI Yogyakarta*(Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi " BALANCE" Th. III No. 6 Juli 2006, ISSN : 1693-9352)Penulis sendiri
- Kussujaniatun, Sri. 2007 *Pengaruh Motivasi Nasabah Kredit Terhadap Keputusan Meminjam Dana (Survei Pada BPR Bank Kredit Kecamatan Juwangi Boyolali) Jurnal Ekonomi "Artavidya" Tahun 7 No.1 Maret 2007, ISSN : 1410-8755 Terakreditasi No. 23 a/DIKTI/Kep/2004*Penulis sendiri
- Mardiana, Tri. 2001. *Analisis Pengaruh Stressor Terhadap Kinerja (Studi Pada Pegawai BPK Di DI Yogyakarta. Jurnal Ilmiah "SIASAT BISNIS*
- Mardiana, Tri. 2002. *Pengaruh Efektifitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bank Yang Ada Di DI Yogyakarta. Jurnal Ilmiah "KOMPAK"*
- Mardiana, Tri. 2004. *Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan dan Pengalaman Kerja Terhadap komitmen Perawat RS Panti Rapih Di DI Yogyakarta Jurnal Ilmiah "TELAAH BISNIS"*
- Mardiana, Tri. 2009. *Pengaruh Sumber Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Edukatif Di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Yogyakarta Call Paper Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur*
- Mardiana, Tri. 2011. *Anteseden Kepuasan Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Intensi Turn Over (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Golongan C) Jurnal Manajemen Inovasi dan Bisnis*
- Mardiana, Tri. 2012. *Analisis Degree of Fit Tipe Perilaku dengan Budaya Organisasi Serta Dampaknya Pada Kinerja. Laporan Penelitian LPPM UPNVY*
- Naumi, Rizka Nahdia dan Agus Trilaksana. 2015. *Pertambangan Minyak Tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro tahun 1970-1987. Avatara. E-journal Pendidikan Sejarah. Volume 3, No. 1. Tahun 2015.*

- N.N, Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro. Tersedia dalam www.bojonegorokab.go.id. Diakses pada tanggal 21 Mei 2016.
- Nurmalitasari, Yuniar. 2011. Potret Kemiskinan Masyarakat Penambang Minyak Tradisional. (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan,, Kabupaten Bojonegoro). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pertamina dan SKK Migas. 2016. Petroleum Geoheritage Wonocolo-Bojonegoro.
- Sadi. 2009. Pendekatan Sistem dalam Organisasi.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhe Medika.
- Siddiqoh, Elha Ayu Alinda. 2015. Konflik Masyarakat Penambang Minyak mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2015. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya. Diakses 11 Agustus 2016.
- Sugara, Dian Prima. 2013. Pengelolaan Sumber Minyak Tradisional Masyarakat Penambang Desa Wonocolo 1900-2006. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Usman, Wan, dkk. 2003. *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia
- Yudhanto. 2011. Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Ditengah Rendahnya Imbal Jasa. Jurnal FISIP UMRAH. Vol 1. No 1. 2011:75-91.

